

Institusi pendidikan yang bermutu tinggi merupakan salah satu faktor kunci yang akan menentukan kualitas SDM suatu bangsa, dan daya saing bangsa. Oleh karenanya memanaj institusi pendidikan dengan baik (: praktik manajemen pendidikan) menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelekan.

Manajemen pendidikan di satu sisi memiliki teori yang bisa digunakan untuk mengatasi problem (antisipatif) dan di sisi lain berhadapan dengan problematika yang memang sering muncul berbarengan maupun beriringan. Oleh karenanya, buku ini hadir dalam format kolase dari berbagai teori, kebijakan dan praktik yang bersifat laten hingga terupdate seperti kebijakan manajemen pendidikan di era Pandemic Covid -19, dan didesain untuk memberikan gambaran yang relatif real, kaya dan menginspirasi bagi pembaca.

Harapannya beberapa teori, kebijakan dan praktik manajemen pendidikan yang telah ada bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mempertinggi kualitas praktik manajemen pendidikan di Indonesia, baik manajemen pendidikan dasar, menengah maupun manajemen

Diterbitkan Oleh:



Jl. Kemerdekaan Timur, Kesugihan Kidul
Kesugihan-Cilacap-Jateng
HP. 081327782079, 085291043420

ISBN 978-602-6753-45-8



Dr. Umi Zulfa, M.Pd.



Kolase Manajemen Pendidikan

KOLASE

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Dr. Umi Zulfa, M.Pd.

KOLASE

MANAJEMEN PENDIDIKAN



KOLASE MANAJEMEN PENDIDIKAN

Penulis : Dr. Umi Zulfa, M.Pd.
Editor : Nuning Wahyu Budiarti, M. Pd.
Lay Out Isi : RGB Desain
Desain Sampul : Novi Triyaningrum

Cetakan I Awal 2017
Cetakan II Awal 2020
Diterbitkan Oleh: IHYA MEDIA
Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumuddin
Jl. Kemerdekaan Timur, Kesugihan Kidul
Kesugihan-Cilacap-Jateng HP.0813277097472

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT) Dr. Umi Zulfa, M.Pd
Kolase Manajemen Pendidikan / Dr. Umi Zulfa, M.Pd/
Cetakan Pertama, 2017- IHYA MEDIA CILACAP; Cetakan Kedua (Revisi), 2020

ISBN : 978-602-6753-45-8

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiyen. Puji Syukur ke Hadlirat Allah Swt, atas Hidayah dan Inayah-Nya buku yang hadir di hadapan pembaca akhirnya selesai dikerjakan.

Buku yang disusun ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan, baik yang sudah dipublikasikan di jurnal, forum ilmiah lain maupun yang belum dipublikasikan. Sehingga buku ini diberi judul Kolase Manajemen Pendidikan. Sesuai dengan judulnya: kolase merupakan komposisi yang terdiri dari berbagai bahan yang ditempelkan pada permukaan bahan, maka, buku ini juga merupakan percampuran berbagai bahan yang disatukan dalam bingkai manajemen pendidikan. Baik yang menyangkut manajemen pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Akhirnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya buku ini. Besar harapan penulis, buku ini akan menjadi warisan setitik ilmu/pengetahuan yang bermanfaat di tengah banyak kesalahan dan kekurangan yang ada dalam tulisan ini. Ya Allah terimalah amalan-amalan kami. Amin Ya Rabb al ‘aalamiyen.

Cilacap, 2017

Umi Zulfa

KATA PENGANTAR

(Cetakan ke-2)

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiyen. Untuk kesekian kalinya penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga atas Rahmat, Ridlo, Hidayah dan Inayah dari Allah Swt sehingga dari sekian banyak keterbatasan baik waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya tetapi buku edisi revisi ini akhirnya bisa diselesaikan di bulan penuh berkah.

Buku yang disusun ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan, baik yang sudah dipublikasikan di jurnal, forum ilmiah lain maupun yang belum dipublikasikan. Sehingga buku ini diberi judul Kolase Manajemen Pendidikan. Pada edisi revisi ini ada penambahan tulisan yang dimasukkan dan kemudian dicari kedekatan tema utamanya, sehingga pada edisi revisi ini tulisan sudah terklasifikasi dalam bab-bab khusus. Walaupun sudah terklasifikasi dalam bab khusus, tetapi karena sifatnya adalah kolase maka pengklasifikasian tidak menggunakan pendekatan waktu tetapi menggunakan pendekatan kedekatan tema. Pendekatan tema akan memudahkan pengklasifikasian, walaupun demikian akan kelihatan juga kesenjangan pembahasan karena tema dan tren berdasarkan waktu juga sudah bergeser.

Buku ini memang kolase dari perjalanan penulis, namun di dalamnya ada artikel hasil penelitian yang disusun bareng dengan ibu Nani Kurniasih sehingga nanti akan ditampilkan nama penyusunnya secara khusus.

Akhirnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya buku ini. Besar harapan penulis, buku ini akan menjadi memotivasi penulis untuk terus menulis dan memberikan kemanfaatan bagi semuanya khususnya di dunia Pendidikan.

Cilacap, 2020

Umi Zulfa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR (Cetakan ke 2)	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II POLITIK PENDIDIKAN	 3
A. Kepemimpinan dan Politik Pendidikan	3
B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Relasinya dengan SAN	12
C. Akuntabilitas Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	27
D. Administrasi Pengelolaan Sekolah	51
 BAB III EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	 69
A. Mencari Alternatif Prioritas Pendidikan Berdasarkan Anggaran 20%	69
B. SCHOOL LEVY SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT (Analisis Probabilitas Ziswa sebagai Model School Levy ala Indonesia)	81
C. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)	103
D. Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy (Studi di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap)	112
E. Dimensi Ekonomis Kursus Bahasa Jepang Bago Calon Tenaga Kerja Indonesia	125

F.	Pembiayaan Pendidikan dalam Konteks Amerika-Indonesia	131
G.	Mewujudkan Cilacap \$C Melalui Model Pendidikan 435-PE-4C	160
BAB IV	<i>HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EDUCATION ...</i>	171
A.	Strategi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia Melalui Pendidikan 4.0	171
B.	Model Rekrutmen Dosen-Mahasiswa Berbasis AB-RIE	191
C.	Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Praktik <i>Performance Appraisal</i> Yang Adil	201
BAB V	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	219
A.	Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di Abad 21	219
B.	Active Learning Sebagai Stratgei Pembelajaran Abad 21	230
C.	Penyiapan Pembelajaran Berkualitas Melalui Perangkat Pembelajaran Yang Baik:	244
D.	<i>SICI: Model Pembelajaran PAI Unggulan</i>	255
E.	Pembelajaran Sekolah Era Daring: Bagaimana Cara Bijak Mensikapinya?	279
BAB VI	PENELITIAN DAN PUBLIKASI	293
A.	MENGENAL SINTA (<i>Science and Technology Index</i>)	293
B.	Peran Pengelola Jurnal Perspektif IAPS 4.0	298
C.	Penelitian Dan Manajemen Kelembagaan	302
BAB VII	PENDIDIKAN NON FORMAL BERBASIS KEAGAMAAN ..	305
A.	IBU, Sahabat Anak HEBAT	305
B.	Peran Dan Tanggungjawab Wanita dalam Keluarga	318
C.	<i>Empowering Pesantren: A Study of Al Ghazali's Thoughts On</i> <i>Islamic Education</i>	324
D.	<i>Membangun Sistem Kurikulum, Active Leraning dan Paradigma</i> <i>Kreatif Bagi MADIN dan TPQ</i>	343
E.	<i>Manajemen Nafkah</i>	349
F.	<i>Menyoroti Arah Pembangunan Cilacap dalam Perspektif</i> <i>Akademisi dan Agamawan</i>	368

BAB VIII	PENDIDIKAN TINGGI DAN <i>WORLD CLASS</i>	
	<i>UNIVERSITY</i>	377
A.	Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	377
B.	Desiminasi SMPM-Dikti	385
C.	Mewujudkan Pembelajaran Bermutu Melalui Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	394
D.	Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju <i>World Class University</i>	406
E.	Menggagas <i>Inspiring-World Class University</i>	419
F.	Internalisasi Ikhlas: Meraih Sukses Belajar di Perguruan Tinggi	429
G.	Transformasi A Smart Teacher Menuju Internasionalisasi Pendidikan	440
H.	<i>Model of Islamic Religion Education 435 Based on Islam Nusantara on College</i>	449
I.	<i>Efektivitas Strategi Percepatan Penyelesaian Studi Program S1 Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap</i>	458
J.	<i>General Education On Higher Education</i>	499
K.	Belajar Ke Negeri Ginseng	505
L.	Idealisme Kampus: Strategi Pengembangan Intelektual Mahasiswa Menuju WCU	509
M.	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa dan Negara dalam Konteks Pendidikan Tinggi	518
N.	Bidang Penalaran Dan Keilmuaan Mahasiswa	527
O.	Pembelajaran Di Perguruan Tinggi ABAD 21	531
P.	Penyusunan Buku Ajar Di Perguruan Tinggi	541
BAB IX	PENUTUP	557
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	558

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Ragam Standar Pendidikan Tinggi di Indonesia	13
Bagan 2	Komponen SN-Dikti	14
Bagan 3	Standar Pendidikan	16
Bagan 4	Standar Penelitian	16
Bagan 5	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	17
Bagan 6	Standar Kompetensi Lulusan	18
Bagan 7	Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau	18
Bagan 8	Mekanisme Pengurusan RPL Tipe A	19
Bagan 9	Mekanisme Pengurusan RPL Tipe B	21
Bagan 10	Standar Proses Pembelajaran	22
Bagan 11	Standar Penilaian Pembelajaran	23
Bagan 12	Sistem Akreditasi Nasional	26
Bagan 13	Relasi SN Dikti dengan SAN	27
Bagan 14	Overview Administrasi Sekolah	54
Bagan 15	Administrasi-Manajemen Untuk Mewujudkan Sekolah Efektif	55
Bagan 16	Perspektif Ruang Lingkup Manajemen Sekolah/Pendidikan	56
Bagan 17	Ruang Lingkup MP Perspektif Cakupan/Wilayah	57
Bagan 18	Fungsi-Fungsi Manajemen Peserta Didik	59
Bagan 19	Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik	60
Bagan 20	Fungsi Operasional MSDM	61
Bagan 21	Fungsi Operasional Manajemen Kurikulum	62
Bagan 22	Fungsi Operatif Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan	65
Bagan 23	Fungsi Operasional Manajemen Pembiayaan Pendidikan	65
Bagan 24	Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan	120
Bagan 25	Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif	122
Bagan 26	Beneficiaries Pendidikan	130
Bagan 27	Model Pendidikan 435-PE-4C	165
Bagan 28	Sistem Pendidikan Berbasis Model 435-PE-4C	167
Bagan 29	Revolusi Industri	172
Bagan 30	Karakteristik Kualitas SDM 4.0	173

Bagan 31	9 Tingkatan Kompetensi Mental	175
Bagan 32	Pola Pendidikan Berlawanan-Beriringan	180
Bagan 33	Tantangan Pendidikan 4.0	182
Bagan 34	Tuntutan Pendidikan 4.0	183
Bagan 35	Literasi Baru 4.0	184
Bagan 36	Ragam Strategi Penyiapan Pendidikan 4.0	184
Bagan 37	Strategi Dikdasmen untuk Penyiapan Pendidikan 4.0	185
Bagan 38	Strategi Pendidikan Tinggi untuk Penyiapan Pendidikan 4.0	186
Bagan 39	Perbandingan Modus Pembelajaran	187
Bagan 40	Jenis Pembelajaran Daring	188
Bagan 41	Kedudukan Penting Dosen Dalam Pembelajaran Daring	189
Bagan 42	Mekanisme RPL bagi Dosen dan Mahasiswa	196
Bagan 43	Alur RPL Tipe A1	197
Bagan 44	Mekanisme RPL Tipe B	198
Bagan 45	Kedudukan Teacherpreneur di Abad 21	221
Bagan 46	Tuntutan Pendidikan Abad 21	222
Bagan 47	Kompetensi Teacherpreneur	226
Bagan 48	Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Abad 21	229
Bagan 49	Hirarki Penentuan Pembelajaran HOTS	235
Bagan 50	Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Usia	237
Bagan 51	Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran	239
Bagan 52	Prosedur CPS	240
Bagan 53	Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran	245
Bagan 54	Langkah-langkah Penyusunan Silabus	248
Bagan 55	Prosedur Penyusunan RPP HOTS	252
Bagan 56	Model Pembelajaran SICI	276
Bagan 57	Perbandingan Modus Pembelajaran	282
Bagan 58	Mental Competence Skill	283
Bagan 59	Interdependensi SN Dikti, PD Dikti, Akreditasi	294
Bagan 60	4 Konsep Kunci	306
Bagan 61	Perspektif Konsep Anak	307
Bagan 62	Ciri Digital Native	308
Bagan 63	Anak dalam Perspektif Agama (Islam)	308
Bagan 64	Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak	311
Bagan 65	Cara 1. Perlindungan Anak	314

Bagan 66	Cara 2. Pemberian Kesempatan Eksplorasi	315
Bagan 67	Cara.3. Filter Pengaruh Negatif	316
Bagan 68	Cara.4. Penerapan Metode Mendidik Rosul	316
Bagan 69	Peranan Wanita Dalam Perpspektif Agama	319
Bagan 70	Platform for the development of an ideal pesantren model	329
Bagan 71	The ideal model of pesantren	339
Bagan 72	Jenjang Pendidikan	368
Bagan 73	Klasifikasi Negara	368
Bagan 74	Relasi Dikti, Agama dan Pembangunan	370
Bagan 75	Relasi Pendidikan – Pembangunan	371
Bagan 76	Relasi Dikti -Pendapatan/Kesejahteraan	372
Bagan 77	Relasi Dikti, Pembangunan dan Pemerintah	373
Bagan 78	Peran Agama Dalam Pembangunan	374
Bagan 79	Konstruksi Dikti	378
Bagan 80	Jenis Pendidikan Tinggi	380
Bagan 81	Program Pendidikan Tinggi	380
Bagan 82	Bentuk Perguruan Tinggi	380
Bagan 83	Penyelenggaraan PT	381
Bagan 84	Pengelolaan Pendidikan Tinggi	382
Bagan 85	Otonomi Perguruan Tinggi	383
Bagan 86	Pola Pengelolaan PT	383
Bagan 87	Tata Kelola PT	384
Bagan 88	Pengembangan Iptek di PT	384
Bagan 89	Perspektif General Education	501
Bagan 90	Tujuan General Education	502
Bagan 91	Peran Mahasiswa Menuju WCU	514
Bagan 92	Strategi Pengembangan	514
Bagan 93	Strategi Pengembangan Soft Skill	515
Bagan 94	Tahapan Pengembangan Soft Skill	516
Bagan 95	Tahapan Pengemabngan Soft Skill	517
Bagan 96	Problem Area Aktualisasi Nilai Pancasila	519
Bagan 97	Kedudukan Pancasila	520
Bagan 98	Pendidikan Tinggi Dan Tantangan Globalisasi	521
Bagan 99	Relasi Pancasila-Pendidikan Tinggi Dalam Konteks Global	522
Bagan 100	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	522

Bagan 101	Strategi Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di PT	524
Bagan 102	Indikator Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	525
Bagan 103	Aspek Bidang Kemahasiswaan	528
Bagan 104	Ragam Bentuk Kegiatan Penalaran dan Keilmuan	529
Bagan 105	Aspek Kunci Pembelajaran 4.0	533
Bagan 106	Langkah-langkah Penyusunan Buku Ajar	546
Bagan 107	Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Kajian Teori	547
Bagan 108	Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian	550
Bagan 109	Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian	550

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Kelompok Mata Pelajaran	36
Tabel 2	Struktur Kurikulum SD/MI	38
Tabel 3	Struktur Kurikulum SMP/MTs	38
Tabel 4	Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPA	39
Tabel 5	Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan	40
Tabel 6	Peruntukkan Zakat Untuk Biaya Pendidikan	108
Tabel 7	Konsep Anggaran Pendidikan PP. N0.48 Tahun 2008	140
Tabel 8	Pertumbuhan Jenis Pekerjaan Baru	164
Tabel 9	Perubahan Akibat Revolusi Industri 4.0	173
Tabel 10	Macam Strategi	204
Tabel 11	Kuadran Guru	219
Tabel 12	Integrasi HOTS dalam CPS	241
Tabel 13	Struktur Kognitif	251
Tabel 14	Perubahan RPP K-13	252
Tabel 15	Kesiapan Guru Dalam Pembelajaran Daring Covid-19	288
Tabel 16	Platform dan Tautan Pembelajaran Daring Gratis	288
Tabel 17	Standar-standar dalam SN Dikti	295
Tabel 18	Perbandingan Luaran Tri Dharma PT Dosen	295
Tabel 19	Rekaman Kinerja Dosen dalam SINTA Per 13 Maret 2018	296
Tabel 20	Standar Nasional Pendidikan Tinggi	299
Tabel 21	<i>The weakness and strength of salaf (traditional) pesantren</i>	330
Tabel 22	<i>The weakness and strength of khalaf (modern) pesantren</i>	331
Tabel 23	Pendekatan Internasionalisasi PT	410
Tabel 24	Organisasi Penjaminan Mutu PT	215
Tabel 25	Internasionalisasi Pendidikan menurut UU Sisdiknas	416
Tabel 26	Organisasi Penjamu Regional-Internasional	424
Tabel 27	Dimensi, Nilai dan Karakter Keghozalian	423
Tabel 28	Draf RIP 2014-2120	425
Tabel 29	Internasionalisasi Pendidikan menurut UU Sisdiknas	443
Tabel 30	Pillars and Characteristics of Islam Nusantara	451

Tabel 31	Prosentase Mahasiswa Program Studi PAI Yang Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun 2013-2013 s.d 2016-2017	492
Tabel 32	Prosentase Mahasiswa Program Studi PGMI Yang Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun 2013-2013 s.d 2016-2017	492
Tabel 33	Prosentase Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun Akademik 2012-2013 s.d 2016-2017	493
Tabel 34	Peraturan Tentang <i>General Education</i> di PT Indonesia	502
Tabel 35	Perspektif Kesejarahan WCU	511
Tabel 36	Contoh Langkah 4 “menentukan materi/bab sesuai urutan RPS Mata kuliah MPP	548
Tabel 37	Draf batang Tubuh Buku Ajar MPP	549
Tabel 38	Contoh langkah 4 dan 5: tentukan materi ajar dlm RPS sesuai kajian teori dan hasil penelitian (MKMSDM)	551
Tabel 39	Draf Buku Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian	551
Tabel 40	Contoh Langkah 6. Reduksi Hasil penelitian Menjadi Buku Ajar ..	552

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai barang pribadi (*private good*) dan barang publik (*goods public*) di sisi lain membutuhkan penanganan tersendiri. Dalam konteks tulisan ini, pendidikan akan dilihat sebagai barang publik. Sebagai barang publik maka negara wajib melakukan pengaturan sedemikian rupa yang menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan bermutu bisa dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin haknya oleh konstitusi untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mutlak menghajatkan praktek manajemen pendidikan tingkat makro.

Dalam menjalankan atau mempraktikkan manajemen pendidikan, pemerintah tidak sedikit banyak mengalami kendala, maupun isu-isu persoalan baru. Oleh karena itu tulisan ini, berangkat dari situasi seperti itu. Keberangkatannya dari isu parsial, ditulis secara terpisah tetapi kemudian dibingkai dalam sebuah komposisi yang jika dipahami secara komprehensif maka bisa ditarik benang merahnya adalah persoalan manajemen pendidikan, baik yang bersifat mikro, meso, maupun makro atau manajemen pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Demikian juga karena berangkat dari tulisan yang terpisah, maka kemunculan pembahasannya bisa terulang di beberapa sub tulisan.

BAB II

POLITIK PENDIDIKAN

A. Kepemimpinan dan Politik Pendidikan

1. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai kualitas pendidikan maka harus diingat faktor determinannya adalah kepemimpinan pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan, seorang leader melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan *decision making* (pengambilan keputusan). Dalam proses pengambilan keputusan ini utamanya dalam konteks pendidikan sebagai jasa public, maka leader harus memperhatikan berbagai factor sebelum mengeluarkan produk kebijakan public di bidang pendidikan. Dalam situasi seperti ini maka pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh adanya factor politik. Oleh karena itu, sebagai produk kebijakan politik kadangkala pendidikan menjadi kurang efektif dalam implementasinya.

Berangkat dari persoalan itu, maka makalah ini ingin sedikit memperbincangkan persoalan kepemimpinan dan politik pendidikan, dengan lebih banyak dikonsentrasikan pada persoalan berikut: 1) bagaimana makna sesungguhnya dari pendidikan sebagai *human investman* yang memperhatikan nilai *equity* dan *equallity*?, 2).Bagaimana Content/ isi yang terkandung dalam UU BHP?, 3). Bagaimana relasi antara *visionary leadership*, *transformasional leadership* dan perubahan dalam dunia pendidikan?

2. Makna pendidikan sebagai Human Invesment dengan memperhatikan nilai-nilai *equity* dan *equallty*

Minimal ada tiga konsep baru yang harus dipahami dalam *istilah human invenstment* atau *investmen in human capital*. Tiga konsep yang dimaksud adalah, pertama, adalah konsep investasi, konsep capital dan konsep human. Berangkat dari asumsi konsep human sudah dipahami secara umum, maka konsep investasi yang akan dikupas di tulisan ini.

Secara umum konsep investasi bisa dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, dalam Nanang: 2000). Dalam hal investasi manusia, maka juga bisa dipahami bahwa nilai manusia bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai lewat kegiatan pendidikan. Sehingga pendidikan dalam kacamata ekonomi sering disebut sebagai *investmen in human capital*. Artinya pendidikan sesungguhnya adalah investasi sumber daya manusia.

Konsep kedua adalah *capital*. Capital bisa diartikan sebagai pendapatan atau apapun bentuk dari efek out put, dalam jangka waktu yang lama.(Levin,).Dari dua konsep ini, maka bisa dipahami apa yang disebut dengan *investmen in human capital*, yaitu suatu aktivitas untuk menambah atau meningkatkan nilai manusia sebagai pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu lama. Di mana untuk mewujudkan hal yang demikian diperlukan pendidikan. Pendidikan di sini dipandang sebagi investasi, karena proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang sedangkan manfaatnya bisa diperoleh kemudian.

Pendidikan sebagai investasi manusia (*human investment*), sehingga keberadaannya harus mampu menghasilkan output atau keluaran yang bermanfaat (menguntungkan), baik secara financial, sosial maupun pribadi. Jika ditinjau dari *out putnya*, maka *out put* ini adalah orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya, artinya lulusan ini mencakup juga *out comes*-nya, yaitu berupa hasil investasi pendidikan yang selama ini dijalani siswa untuk menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat (*benefit*). Khusus untuk outcomes pendidikan dasar dan menengah adalah siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau jika tidak dapat melanjutkan study siswa dapat bekerja kepada orang lain, atau mandiri, hidup layak, dapat bersosialisasi dan bermasyarakat (Komariyah dan triatna, 2006).

Menurut Cohn (1978) manfaat yang bisa diperoleh manusia secara pribadi ada dua, yaitu manfaat konsumsi dan manfaat investasi. Yang termasuk ke dalam manfaat konsumsi adalah produk atau jasa yang bisa memberikan kepuasan segera dalam satu waktu. Sedangkan yang termasuk manfaat investasi adalah kepuasan untuk masa datang. Manfaat pribadi ini adalah manfaat yang dirasakan oleh individu yang menjalani pendidikan.

Manfaat pendidikan berikutnya adalah manfaat sosial. Yang dimaksud dengan manfaat sosial adalah manfaat yang diserap oleh anggota masyarakat yang lain. Paling tidak ada dua manfaat sosial pendidikan, yaitu

- a. pembayaran pajak yang berkaitan dengan manfaat pendidikan, yaitu pajak yang berasal dari pendapatan seseorang,
- b. manfaat eksternal, yaitu manfaat dari adanya investasi pendidikan dan tidak diperoleh oleh individu, seperti kemampuan pemerintah mengandalkan pemasukan pajak pendapatan.

Senada dengan pendapat terdahulu, maka manfaat yang bisa diambil dari pendidikan sebagai investasi manusia antara lain juga dikemukakan oleh Walter and Terry dalam Hasbiyallah (2008);

- a. manfaat non moneter, yaitu diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati pension dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan
- b. manfaat moneter, yaitu manfaat ekonomi berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. Artinya pendidikan sebagai investasi menyebabkan terbentuknya individu terdidik, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin produktif seseorang, dan semakin tinggi pula pendapatan seseorang. Jadi tampak jelas bahwa pendidikan juga berpengaruh terhadap pendapatan/ kesejahteraan material seseorang.

Dalam pandangan yang senada, masih menurut Gaffar, dengan menggunakan pendekatan *credential/* sertifikat, maka pendidikan juga akan membuat peningkatan pendapatan seseorang. Dengan investasi pendidikan maka seseorang akan mendapat sertifikat, semakin tinggi sertifikat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula pendapatan seseorang. Penjelasan ini bisa dideskripsikan dalam bagan berikut.

Kembali kepada konsep investasi, sesungguhnya pemikiran pendidikan sebagai investasi sudah lama muncul, sebagaimana pendapat Sutermeister (1976:3) yang menyatakan bahwa “perubahan dan peningkatan kualitas SDM dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai factor penentu keberhasilan seseorang, baik secara social maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, yaitu dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang

diperoleh dalam pendidikan merupakan investasi”. Dalam hal ini, pendidikan sebagai sebuah investasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan investasi jangka panjang, di mana hasil / dampaknya akan dirasakan dalam jangka waktu satu generasi (15-20 tahun),
- b. Tidak bisa diulang, karena usia subyek didik berlangsung terus,
- c. Merupakan industri pelayanan jasa yang sangat besar ditinjau dari jumlah orang yang terlibat, kepentingan yang dilayani, biaya yang diperlukan, dan fasilitas yang harus disediakan, dan
- d. memiliki *multifying effect / social benefit* yang paling dominan. (Djam,an, 2008)

Pendidikan sebagai investasi manusia dalam prakteknya harus memper-timbangkan nilai persamaan hak (*equality*) dan keadilan (*equity*). Konsep equality di sini tidak berarti identik; sebab setiap individu memiliki kapasitas fisik dan psikis masing-masing yang tidak sama, sikap hidup dan prinsip yang bervariasi dan berbeda, yang harus dihormati oleh orang lain dan juga pemerintah. Sehingga persamaan yang dimaksudkan di sini lebih diartikan kepada pemberian kesempatan yang sama untuk realisasi diri (berkembang) dan mendapatkan pendidikan. Sedangkan *equity* (keadilan) dalam pendidikan artinya pendidikan tidak membedakan manusia atas perbedaan kelas social atau gender, tetapi manusia memiliki harkat yang sama sehingga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sama berdasarkan kemampuannya masing-masing (Susanto, 2008).

Equality dalam pendidikan di Indonesia sesungguhnya belum berjalan dengan maksimal. Walaupun dalam amandemen UUD 1945, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, namun sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu apalagi final. Hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh kesempatan itu. Indonesia baru mengusahakan equity, dan ini pun menurut saya terbatas pada pembiayaan. Misalkan, alokasi pembiayaan untuk Pendidikan Tinggi jauh lebih besar dari pendidikan dasar dan menengah. Bahkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) justru tidak menganut prinsip *equity*.

Equity dan equility ini mutlak menghajatkan keputusan politik yang disebut kebijakan pendidikan. Produk kebijakan pendidikan merupakan produk dari kepemimpinan pendidikan. Pada konteks inilah, maka tipe kepemimpinan

pendidikan menjadi salah satu faktor yang akan menentukan besarnya kontribusi bagi mutu pendidikan.

3. Analisis Isu dalam UU BHP

Diantara sekian banyaknya isu yang ada dalam UU BHP yang akan dibahas kali ini adalah pendidikan sebagai badan usaha (korporat; liberalisasi pendidikan) dan kemungkinan tergerusnya kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan pendidikan sebagai badan usaha di sini karena dengan dijadikan lembaga pendidikan sebagai badan hukum, maka lembaga mengusahakan sendiri seluruh keperluan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tentu akan membuat lembaga mencari sumber pendanaan baru yang sangat tidak mungkin berasal dari modal asing. Sehingga operasional lembaga adalah bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, yang berakibat pula pada semakin sempitnya *equality* pendidikan bagi kelompok marginal (status ekonomi). Begitu juga dengan masuknya modal asing ke lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan akan dipaksa untuk mengikuti aturan main dari pemodal asing tersebut. Akibatnya dalam jangka waktu tertentu kearifan lokal akan tergerus dan tergantikan oleh hal-hal baru yang asing bagi masyarakat.

Dua isu ini sesungguhnya bermula dari ketakutan adanya liberalisasi pendidikan. Liberalisasi ini juga akan menjadikan lembaga pendidikan kehilangan ciri khasnya, karena semua harus mengikuti tren global. Tetapi jika kita lihat filosofi munculnya kebijakan ini, sesungguhnya untuk mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan (terutama yang berstatus negeri). Mereka diberi kesempatan untuk mencari sumber-sumber baru yang pada gilirannya mereka akan menjadi lembaga pendidikan yang mandiri tanpa melupakan tugas mereka untuk memberikan layanan jasa pendidikan yang bermutu. Namun jika dalam perjalanannya ternyata lembaga pendidikan terjebak pada investor asing, maka inilah yang seharusnya bisa diantisipasi. Boleh saja modal asing masuk, tapi bagaimana lembaga pendidikan tersebut tetap mampu mempertahankan daya tawarnya sehingga tidak harus tunduk pada pemodal asing. Dengan begitu, maka nilai-nilai lokal tidak tergerus oleh nilai-nilai global, bahkan nilai lokal-global dapat dipadukan menjadi tawaran baru bagi masyarakat. Dengan begitu lembaga pendidikan akan memperoleh pasar yang lebih luas, yaitu dari kelompok yang masih mengidealkan nilai lokal, kelompok yang mengagungkan nilai global, dan dari kelompok yang menginginkan keduanya.

Dari pembicaraan ini, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa strategi yang diharapkan dapat menciptakan impact sebagaimana yang diharapkan dari alasan kemunculan UU BHP antara lain:

- a. Pemberian kebebasan yang terkontrol kepada lembaga pendidikan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan, terutama dari pemodal asing, sehingga lembaga tidak kehilangan jati dirinya
- b. Lembaga Pendidikan harus mempertahankan karakteristiknya yang berbasis kearifan local.
- c. Diwujudkanannya kepemimpinan visioner-transformasional di lembaga pendidikan yang akan jadi BHP.

4. Relasi Antara *Visionary Leadership*, *Transformasional Leadership* dan Perubahan.

Sebelum pembicaraan menitik pada persoalan bagaimana relasi antara *Visionary Leadership*, *Transformasional Leadership* dan Perubahan, penting sekali dipahami masing-masing konsep *Visionary Leadership*, *Transformasional Leadership* dan Perubahan. Oleh karena itu tulisan ini akan terlebih dahulu mengenalkan ketiga konsep tersebut secara terpisah sebelum kemudian dilakukan analisis korelasi antar ketiganya.

a. Konsep *Visionary leadership*

Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Lantas, menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu organisasi yang memahami prioritas, menjadi pelatih yang professional, serta dapat membimbing personel lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan (Komariyah dan Triatna, 2006).

Ciri-ciri kepemimpinan visioner menurut John Adair dalam Komariyah dan Triatna (2006) adalah 1) memiliki integritas pribadi, 2) memiliki antusiasme terhadap perkembangan lembaga yang dipimpinnya, 3) mengembangkan kehangatan, budaya dan iklim organisasi, 4) memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi dan 5) tegas dan adil dalam mengambil tindakan/ kebijakan kelembagaan.

Terkait dengan ciri-ciri kepemimpinan visioner, maka langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh pemimpin visioner dalam rangka

menjalankan perubahan adalah 1) menciptakan visi, 2) Perumusan visi, 3) Transformasi visi, dan 4) implementasi visi

b. Konsep *transformational leadership*

Kepemimpinan Transformasional merupakan jenis kepemimpinan yang menekankan pentingnya sistem nilai untuk meningkatkan kesadaran pengikut tentang masalah-masalah etis, memobilisasi energi dan sumber daya untuk mereformasi diri. (Yeoh, 1995). Burns (1978) mengemukakan “*transforming leadership... occurs when one or more persons engage with a others in such a way that leaders and followers raise one another to higher levels of motivation and morality.*

Ciri kepemimpinan transformasional, menurut Bass dan Avilio dalam Rozi (2008) antara lain; 1) menstimulasi semangat kerja kolega dan pengikutnya untuk melihat pekerjaan mereka dari beberapa perspektif baru, 2) Menurunkan visi atau misi kepada tim dan organisasinya, 3) mengembangkan kolega dan pengikutnya pada tingkat kemampuan dan potensial yang lebih tinggi, dan 4) memotivasi kolega dan pengikutnya untuk melihat pada kepentingannya masing-masing, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan organisasinya.

c. Konsep Perubahan

Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perbedaan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan itu dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia dan budaya (Wibowo, 2006 dalam Juhaidi dan Makruf, 2008).

d. Keterkaitan *Visionery leadership, transformational Leadership* dan perubahan yang diwujudkan dalam *Balance Scorecard*.

Untuk mewujudkan organisasi pendidikan yang bermutu, adaptif terhadap perubahan zaman, maka diperlukan kepemimpinan yang cerdas dan responsive terhadap perubahan. Kepemimpinan pendidikan yang dimaksud adalah kepemimpinan visioner dan transformasional. Kerja pemimpin ini adalah menciptakan dan mentransformasikan perubahan dalam dunia pendidikan. Yang Tak kalah pentingnya adalah bagaimana menggunakan seluruh sumber daya/ elemen organisasi pendidikan dengan seimbang.

Karena dalam konsep *Balance scorecard (BSC)*, jika lembaga tidak memiliki keeseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai, maka yang terjadi adalah ketimpangan, inefisiensi dan ketidakefektifan. (Alma, 2003). Akibatnya pelanggan tidak puas, dan pada gilirannya lembaga akan ditinggalkan oleh pelanggan. Oleh karena itu di sinilah pentingnya kemampuan kerja pemimpin yang visioner dan transformatif dengan menggunakan perangkat BSC agar pemimpin dapat mengelola lembaga dengan mengutamakan pada kepuasan pelanggan, proses, dan perbaikan lembaga untuk menghadapi masa depan.

Elemen BSC sendiri menurut Alma (2003) terdiri dari:

- 1) *Financial*, meliputi pertumbuhan tingkat pendapatan, penghasilan kotor, *return of investment*, *return on capital*, dan nilai tambah.
- 2) *Customer*; tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat profitabilitas pelanggan, hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi lembaga.
- 3) Proses bisnis internal; identifikasi kebutuhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, efisiensi kegiatan produksi, waktu yang dihabiskan dan sebagainya.

5. Penutup

Berdasarkan atas pembahasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan dan politik pendidikan ada sebenarnya justru sebagai satu instrument untuk mewujudkan pendidikan bermutu tanpa yang mengacu kepada nilai-nilai equality dan equity. Di mana sesungguhnya nilai-nilai tersebut ada dalam rangka memperkembangkan potensi yang dimiliki manusia secara manusiawi. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pendidikan bermutu, maka kemudian seorang pemimpin pendidikan dengan berbagai tipe atau gaya kepemimpinannya mengacu kepada BSC.

Daftar Referensi

- Alma, Buchari, (2003), *Pemasaran Strategik Jasa Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Burn, A. (1992), *Charisma and Leadership in Organization*, London: Sage
- Komariyah, Aan Dan Triatna, Cepi, (2006), *Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif*, Jakarta: Bumi Aksara

- Djam'an, (2008), *Kepemimpinan Dan Politik Pendidikan*, Han out Perkuliahan,, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fahrurrozi, (2008), *Kepemimpinan Pendidikan Visioner-Transformasional*, makalah, Perkuliahan, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasbiyallah, (2008), *Pendidikan Sebagai Human Investment*, Makalah, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Juhaidi, Ahmad dan Makruf, Imam, (2008), *Manajemen Perubahan (Konsep, Prinsip, Pendekatan Dan Strategi)*, makalah, Perkuliahan,, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susanto, Pendi, (2008), *Kebijakan Pendidikan Demokratis; Hakikat Pendidikan Bagi Warga Negara, Persamaan Hak (equality), dan Keadilan (Equity), Pendidikan Untuk Semua (Education for All) dan Wajib Belajar (Compulsary Education)*, Makalah, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutemeiser, Robert. A. (1976), *People and Productivity*, Tokyo: Mc.Graw-Hill Books Company
- Yeoh, Michael, (1995), *Vision Leadership: Values and Strategies Toward Vision 2020*, Malaysia: Pelanduk Publication
- Cohn, Elchanan,(1979), *The Economics Of Education*, Massachusetts: Balinger Publishing Company.
- Davis, Stan and Meyer, Christopher, (2000), *Future Wealth*, Boston: Harvard Business School Press
- Fattah, Nanang, (2000), *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Gaffar, M. Fakry, (2009), *Ekonomi Pendidikan*, Handout perkuliahan Ekonomi Pendidikan PPs Universitas Pendidikan Indonesia.
- Levin, Henry.M, (), *Financing Recurrent Education, Strategies for Increasing Employment, Job Opportunities, and Productivity*, Centre For Educational Research and innovation, Institute for Research on Educational Finance and Governance (U.S): Sage Publication.



B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Relasinya dengan SAN

1. Pengantar

Perubahan kebijakan bagi Perguruan Tinggi (PT) khususnya di Indonesia “sangat dinamis”. Hal ini dikarenakan PT saat ini berada dalam era “Deregulasi Kemenristekditi”. Ada sekitar 60-an peraturan menteri yang sudah digulirkan dan sedang digodok untuk melakukan perubahan peraturan lama. Dalam konteks inilah, maka PT “wajib” beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika PT tidak melakukan itu, maka PT akan ditinggalkan masyarakat.

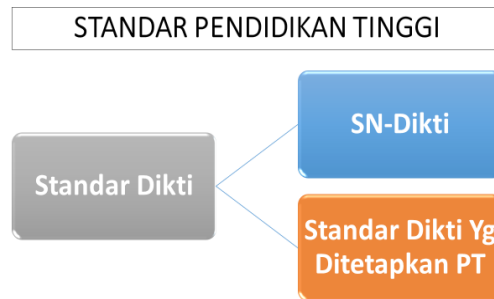
Dalam rangka memenuhi ketentuan dan regulasi-regulasi tersebut, diperlukan komitmen dan loyalitas yang sangat luar biasa, baik dari penyelenggara maupun pengelola PT dan komponen lain, seperti dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan. Komitmen dan loyalitas ini menjadi syarat mutlak agar di era revolusi teknologi 4.0 sebagai era Disrupsi Teknologi yang mengakibatkan pengelolaan PT harus keluar (*out of box*) dari kebiasaan-kebiasaan lama. PT harus membiasakan dengan pola pengelolaan baru yaitu pengelolaan berbasis IT, seperti PD-Dikti, PIN Sivil, Sister, Akreditasi, LBKD dan sebagainya.

Mengelola PT dengan baik merupakan visi besar seorang beragama, yaitu visi yang tidak hanya terbatas dengan umur dunia ini (visi dunia) tetapi juga visi akhirat (kehidupan di masa depan yang lebih mapan dan kekal). Di dalam mengelola ini harus akuntabel di mata manusia dan Tuhan. Akuntabel di mata manusia dalam hal ini berarti pengelolaan PT harus menggunakan standar-standar mutu yang ada, baik standar internasional, nasional dan local atau internal PT.

Pemerintah sebagai administrator pendidikan tertinggi dalam konteks negara ini juga perlu melakukan penjaminan mutu bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di negeri ini, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan standar nasional Pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih jauh apa dan bagaimana standar mutu Pendidikan tinggi secara nasional itu, maka pada kesempatan ini akan disampaikan beberapa point penting dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN -Dikti) ini sesuai permintaan dari pihak penyelenggara acara sosialisasi pada hari ini, yaitu: 1) pengantar, 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), 3) Implementasi Standar Pendidikan dan 4) Relasi SN-Dikti dengan Standar Akreditasi Nasional.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Di Indonesia, pemenuhan jaminan mutu yang harus dilakukan PT atau yang sering disebut sebagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), di dalamnya terkandung dua pemenuhan standar, yaitu 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti yang ditetapkan oleh pemerintah) dan 2) Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh PT melalui kantor atau unita jaminan mutu.



Bagan. 1. Ragam Standar Pendidikan Tinggi di Indonesia

Dalam konteks pembicaraan kali ini akan difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Di mana SN -Dikti yang akan disosialisasikan pada hari ini adalah standar nasional yang baru yang merupakan perubahan dari Permendikbud N0 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) menjadi Permenristekdikti N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam permen yang baru ini, ada beberapa point yang mengalami perubahan sebagai akibat dari respon dan fasilitasi kementerian atas berbagai masukan dari para rector PT baik negeri maupun swasta.

Sebelum terjadi deregulasi atau perubahan atas Permendikbud No 49 tahun 2014, telah dikeluarkan **Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015**. Surat edaran ini dikeluarkan dengan beberapa alasan:

- Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Permendikbud No.49 tahun 2014
- Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan mengevaluasi kembali Peraturan Menteri tersebut
- Memohon agar perguruan tinggi menunda implementasi permendikbud N0 49 Tahun 2014 dan akan diganti dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 ttg SN Dikti.

Beberapa pokok perubahan penting yang perlu dicatat dalam hal ini dari permen yang baru tadi adalah:

- a. Beban Belajar pada Program Magister dari 72 sks menjadi 36 sks
- b. Masa studi pada Program Sarjana dari paling lama 5 tahun menjadi paling lama 7 tahun
- c. Kewajiban calon lulusan Program Doktor untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional yang terindeks;
- d. Kewajiban calon lulusan Program Magister menerbitkan artikel di jurnal internasional

Agar relative lebih jelas, maka SN -Dikti baru secara umum masih sama dengan SN-PT lama yang meliputi 3 komponen utama, yaitu 1) Standar Nasional Pendidikan, 2) Standar Nasional Penelitian dan 3) Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.



Bagan. 2. Komponen SN-Dikti

Tujuan SN-Dikti sendiri sebagaimana yang tertuang dalam permenristekdikti ini ada 3, yaitu:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi
- b. Menjamin mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Mendorong PT melampaui SN-Dikti

Tujuan SN Dikti pertama adalah menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi, di mana rumusan tujuan pendidikan tinggi jika merujuk kepada UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 adalah:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

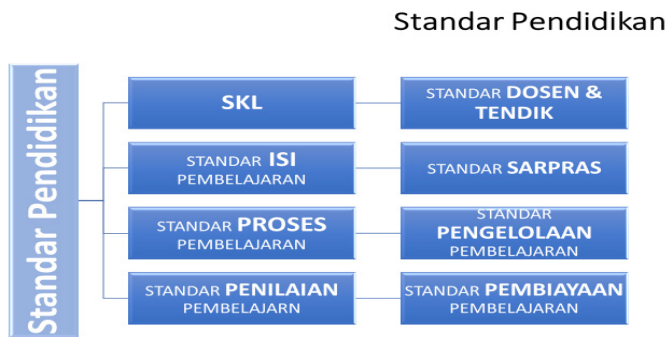
Keempat tujuan Pendidikan tinggi ini tidak akan tercapai jika tanpa adanya jaminan dari pemerintah dan dari PT di mana mahasiswa menempuh pendidikannya. Oleh karena di samping SN-Dikti memiliki tujuan, SN- Dikti juga memiliki peranan, yaitu:

- a. dipenuhi (SN Diktinya) oleh setiap PT untuk mewujudkan pendidikan nasional
- b. sebagai dasar pemberian izin pendirian PT dan izin pembukaan Prodi
- c. sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. sebagai dasar penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Tiga komponen utama SN -Dikti yang harus dipenuhi oleh semua PT di Indonesia ini merupakan standar “minimal”. Artinya PT bisa “melampaui” standar minimal yang ditetapkan pemerintah ini, bahkan “melampaui SN Dikti” menjadi salah satu tujuan dari penerbitan SN Dikti ini.

Komponen pertama, berupa standar minimal penyelenggaraan Pendidikan oleh PT di Indonesia disebut sebagai Standar Pendidikan. Standar Pendidikan ini dipevah menajadi delapan (8) standar, yaitu: 1) SKL, 2) Standar Oso Pembelajaran, 3) Standar Prose Pembelajaran, 4) Standar Penilaian Pembelajaran, 5) Standar

Dosen dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana, 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran dan 8) Standar Pembiayaan Pendidikan.

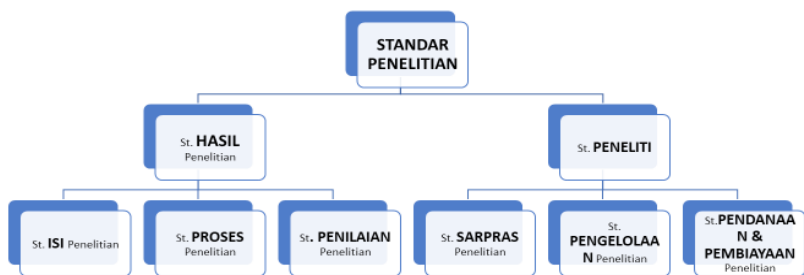


Bagan. 3. Standar Pendidikan

Pada standar penelitian sebagai komponen kedua dari SN Dikti, juga dipecah menjadi delapan (8) standar, yaitu:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENELITIAN

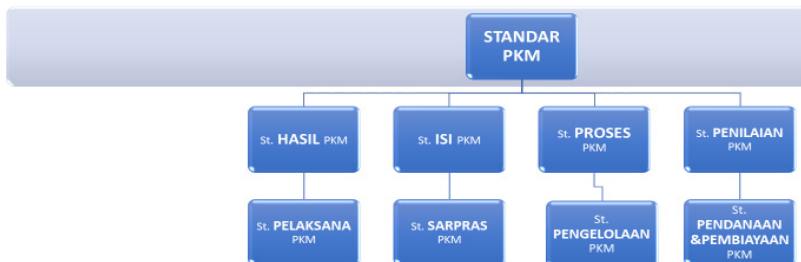


Bagan. 4. Standar Penelitian

Komponen terakhir dalam SN Dikti yaitu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Standar PKM sebagaimana Standar Pendidikan dan Penelitian juga dibagi menjadi delapan (8) standar, sehingga praktis SN Dikti ada 24 standar. Adapun kedelapan standar PKM yang dimaksud adalah:

- a. Standar Hasil PKM
- b. Standar Isi PKM
- c. Standar Proses PKM
- d. Standar Penilaian PKM
- e. Standar Pelaksana PKM
- f. Standar Sarana dan Prasarana PKM
- g. Standar Pengelolaan PKM
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Standar PKM



Bagan. 5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Implementasi Standar Pendidikan

Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa pada kesempatan ini hanya akan membahas standar Pendidikan dan implementasinya, maka pada sub bab ini pembicaraannya berkaitan dengan isi dari masing-masing standar Pendidikan sekaligus bagaimana PT bisa mengimplementasikannya sebagai komitmen pemenuhan standar minimal pengelolaan Pendidikan tinggi.

Pertama. Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL adalah = **kriteria minimal** tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan **capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. CPL inilah yang nanti membantu PT atau dalam hal ini adalah Program

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



```

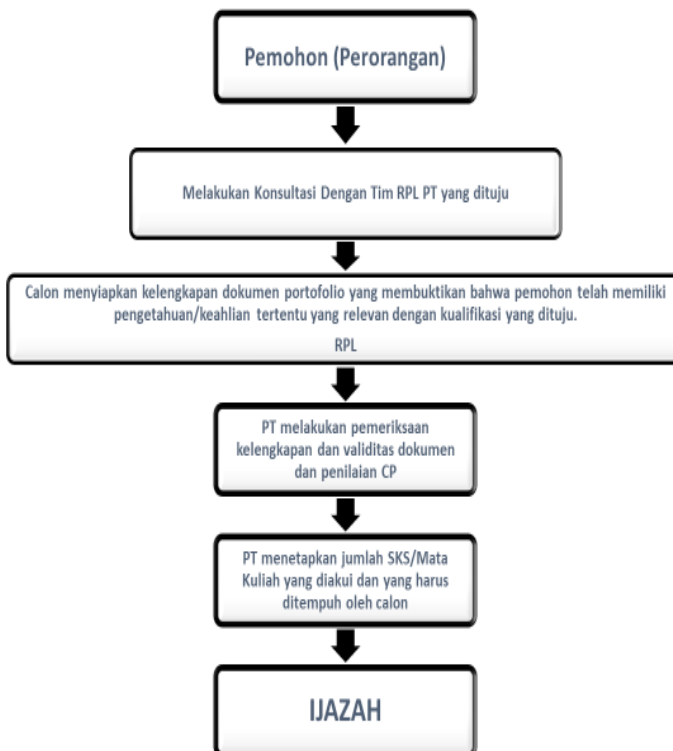
graph LR
    RPL[RPL] --> A[TIPE A  
(utk melanjutkan  
Pend.formal)]
    RPL --> B[TIPE B  
(utk mendapatkan pengakuan  
kesetaraan dg level KKNI tt)]
    A --> A1[TIPE A.1  
(dari pend formal/PT lain dan  
alih kredit)]
    A --> A2[TIPE A.2  
(Dr pend informal, non  
formal, pengalaman ker,  
assessment dan rekognisi)]
    B --> B1[Tipe B 1 (dosen: assessment &  
Rekognisi)]
    B --> B2[Tipe B 2 (profesi lain)]
    A1 --> Ij1[Ijazah]
    A2 --> Ij2[Ijazah]
    B1 --> SK1[SK Pengakuan Kesetaraan dari Menristekdikti  
Sk pengangkatan sbg dosen dr PT]
    B2 --> SK2[SK Pengakuan kesetaraan min profesi (mentri)  
SK Pengakuan kesetaraan level 3 sd 7 (dirjen  
Belmawa)]
  
```

The diagram illustrates the RPL (Recognition of Prior Learning) process, categorized into two main types: TIPE A and TIPE B. TIPE A is for continuing formal education, while TIPE B is for obtaining equivalence with KKNI levels. TIPE A is further divided into TIPE A.1 (from formal education/other PT and credit transfer) and TIPE A.2 (from informal, non-formal, work experience, assessment, and recognition). TIPE B is divided into Tipe B 1 (for lecturers: assessment and recognition) and Tipe B 2 (for other professions). Each sub-type has specific requirements, such as having a diploma (Ijazah) for TIPE A or a SK (Surat Keputusan) from the relevant authority for TIPE B.

Berdasarkan bagan tersebut, maka RPL diklasifikasi menjadi dua, yaitu RPL Tipe A untuk mahasiswa dan RPL Tipe B untuk dosen.

- a. RPL Tipe A adalah RPL yang digunakan untuk **melanjutkan Pendidikan Formal**.
- 1) **TIPE A1.** TIPE A.1 adalah RPL yang digunakan untuk calon mahasiswa dari pendidikan formal atau PT lain dan alih kredit.
 - 2) **TIPE A.2.** Tipe A2 digunakan bagi calon mahasiswa yang berasal dari pendidikan informal, nonformal, pengalaman kerja, assessment dan rekognisi.
- b. RPL Tipe B adalah yang digunakan untuk melakukan **penyetaraan dengan level KKNI tertentu**.

Berdasarkan Permenristekdikti ini dan diperinci lagi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau, maka baik RPL Tipe A maupun B untuk memperolehnya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan kementerian. Masing- masing prosedur bisa disimak pada bagan-bagan berikut.



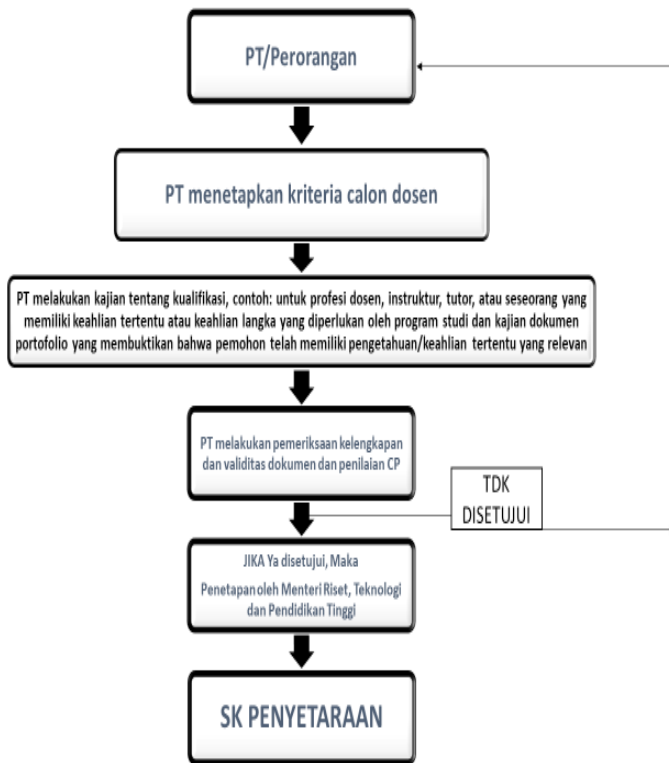
Bagan. 8. Mekanisme Pengurusan RPL Tipe A

Berdasarkan bagan mekanisme RPL Tipe A. di atas, maka langkah-langkah yang harus ditempuh seseorang yang ingin melanjutkan studi ke PT adalah:

- a. Pemohon (perorangan) mengajukan RPL ke PT yang dituju
- b. Pemohon melakukan Konsultasi Dengan Tim RPL PT yang dituju
- c. Calon mahasiswa/pemohon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/keahlian tertentu yang relevan dengan kualifikasi yang dituju RPL
- d. PT melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP
- e. PT menetapkan jumlah SKS/Mata Kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa, dan mahasiswa menempuh sisa sks melalui proses perkuliahan sebagaimana mestinya sampai selesai
- f. Setelah selesai, IJAZAH diterbitkan PT.

Demikian halnya dengan RPL Tipe B juga memiliki mekanismen pengurusannya yang sedikit berbeda, yaitu:

- a. PT/Perorangan yang akan melakukan penyetaraan pendidikan untuk kebutuhan dosen
- b. PT menetapkan kriteria calon dosen
- c. PT melakukan kajian tentang kualifikasi, contoh: untuk profesi dosen, instruktur, tutor, atau seseorang yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka yang diperlukan oleh program studi dan kajian dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/keahlian tertentu yang relevan
- d. PT melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP
- e. JIKA Ya disetujui, Maka dilakukan Penetapan oleh Menteri Riset, Teknologi



Bagan. 9. Mekanisme Pengurusan RPL Tipe B

Jika dicermati, kebutuhan RPL Tipe A untuk mahasiswa maka yang proaktif adalah mahasiswa tersebut, sedangkan untuk Tipe B maka yang proaktif bukan individu dosen yang akan di RPL, tetapi justru PT yang memerlukan dosen dengan keilmuan tersebut. RPL Tipe B sangat membantu bagi PT yang menyelenggarakan Prodi dengan keilmuan langka.

Kedua. Standar Isi Pembelajaran. Yang dimaksud dengan Standar Isi Pembelajaran adalah **kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai CPL**. Biasanya bersifat kumulatif dan/atau integrative dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Ketiga. Standar Proses Pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran adalah **kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan**. Standar ini meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. 1) Karakteristik pembelajaran yang distandarkan untuk PT adalah bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, 2) perencanaan: berarto prodi dan dosen menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), 3) pelaksanaan proses pembelajaran adalah interaksi dosen dengan mahasiswa dan dengan sumber belajar maupun lingkungan belajar. Baik dalam bentuk pemblajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, peneltian dan PKM, dengan menggunakan metode-metode tertentu, dan 4) beban belajar mahasiswa. Beban belajar mahasiswa diwujudkan dalam satuan kredit semester, di mana 1 sksnya mengandung makna: a) 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester, 2) jika kuliah, maka 170 menit terbagi dalam 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri mahasiswa, 3) sedangkan jika pembelajarannya mengambil bentuk tutorial/responsi/seminar maka 170 menitnya dibagi dalam dua kegiatan saja yaitu 100 menit untuk tatap muka dan 70 menit untuk kegiatan mandiri, dan 4) bentuk praktikum/studio/bengkel maka 170 menit yang tersedia langsung digunakan penu di laboratorium/studi/bengkel.



Bagan. 10. Standar Proses Pembelajaran

Keempat. Standar Penilaian Pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran adalah **kriteria minimal** tentang **penilaian proses dan hasil belajar** mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Stándar ini meliputi: *prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan mahasiswa.* Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam bagan berikut.



Bagan.11. Standar Penilaian Pembelajaran

Kelima. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, merupakan **kriteria minimal** tentang **kualifikasi** dan **kompetensi** dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi = pendidikan (ijazah), maka dosen harus memiliki ijazah min S2 dan Kompetensi = sertifikat pendidik/profesi, maka dosen akan disebut profesional jika telah memiliki sertifikasi. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokoknya, kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan menyesuaikan dengan ketentuan.

Keberadaan dosen dalam sebuah program studi minimal 6 orang dan pada program doktor, dua diantaranya harus Guru Besar. Adapun pada tenaga kependidikan kualifikasi terendah adalah D3, kecualai untuk tenaga administrasi terendah maka bisa hanya lulusan SMA sederajat dan pada bidang khusus maka tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat kompetensi khusus.

Keenam. Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Ada dua konsep yang mesti dibedakan dalam standar keenam ini, yaitu sarana dan prasarana. Sarana mengacu kepada pengertian semua sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk suatu kegiatan, atau dalam bahasa administrasi pendidikan sarana pendidikan/ pembelajaran adalah semua sumber daya yang digunakan secara langsung dan atau berpengaruh langsung terhadap kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, prasarana adalah sumber daya fisik yang bisa digunakan untuk mendukung suatu kegiatan. Artinya semua sumber daya yang bisa mempenagruhi secara tidak langsung kegiatan pembelajaran maka itu disebut sebagai prasarana pembelajaran. Sarana pembelajaran seperti alat peraga, media pembelajaran dan sebagainya yang bisa secara langsung digunakan dalam peristiwa pembelajaran, sedangkan prasaran

seperti lahan, gedung dan lainya yang tidak langsung mempengaruhi kegiatan pembelajaran.

Sarana dan prasaran pembelajaran ini harus disediakan dengan mengacu kepada kebutuhan standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Adapun detail dari ketentuan tentang ragam apa saja dan spesifikasi macam apa dari sarana dan prasarana termaktub dalam peraturan Dirjen Dikti.

Ketujuh. Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran adalah **kriteria minimal** tentang **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan** kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini dilaksanakan oleh **unit pengelola prodi dan PT. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** dalam hal ini sebagai Pengelola pembelajaran memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, yaitu:

- a. melakukan **penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran** dalam setiap mata kuliah;
- b. **menyelenggarakan program pembelajaran** sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. **melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu** yang baik;
- d. melakukan kegiatan **pemantauan dan evaluasi** secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
- e. **melaporkan hasil program pembelajaran** secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Demikian juga halnya dengan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan pembelajaran berupa:

- a. **menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional** terkait dengan pembelajaran.
- b. **menyelenggarakan pembelajaran** sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

- c. **menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran** secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- d. melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. **memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan** kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f. **menyampaikan laporan kinerja program studi** dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui **pangkalan data pendidikan tinggi**

Kedelapan. Standar Pembiayaan Pendidikan. Yang dimaksud standar ini adalah **kriteria minimal** tentang **komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional** yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam standar ini pula dibedakan antara biaya investasi dengan biaya operasional dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Biaya investasi diperuntukkan untuk sesuatu yang akan dimabil manfaat dalam skala jangka panjang, seperti pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Adapun biaya operasional diperuntukkan untuk kegiatan operasional pendidikan tinggi seperti: 1) membiaya kegiatan pendidikan, berupa biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional bahan pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya ini ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai Standar Satuan Biaya Operasional Dikti).

Detail dari yang sudah dijelaskan tadi berarti berkaitan dengan pembiayaan pendidikan tinggi. Disamping standar ini membicarakan tentang pembiayaan, standar ini juga membicarakan tentang pendanaan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, mekanisme, prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

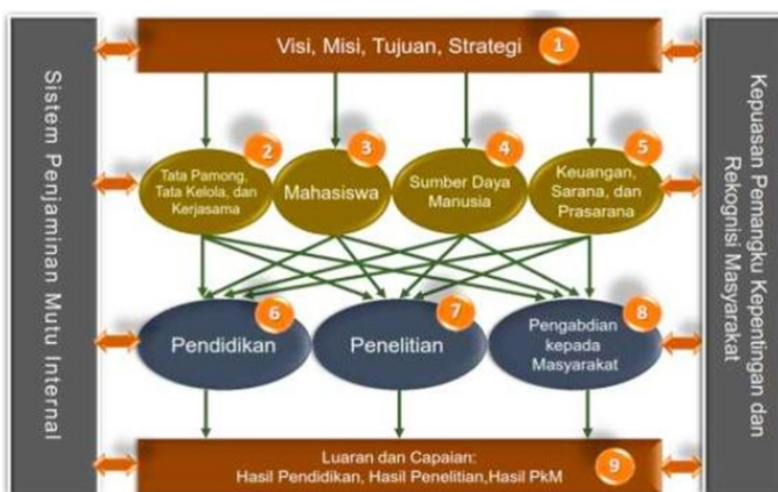
4. Relasi SN-Dikti (Pendidikan) dengan Standar Akreditasi Nasional.

Setelah detail membicarakan tentang SN Dikti pada aspek Standar Pendidikan yang berjumlah delapan standar tersebut, maka standar ini juga menjadi acuan penentuan Sistem Akreditasi Nasional (SAN). Lalu bagaimana relasi SN -Dikti ini dengan SAN?

Sebagaimana diketahui bahwa BAN PT telah mengeluarkan Perban No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN 2017), yang di dalamnya memuat ketentuan baru tentang kriteria penilaian dalam kegiatan akreditasi di perguruan tinggi yang berjumlah 9 kriteria. Kesembilan kriteria yang dimaksud adalah:

- a. Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- b. Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- c. Kriteria Mahasiswa
- d. Kriteria Sumber Daya Manusia
- e. Kriteria Keuangan, Saran dan Prasarana
- f. Kriteria Pendidikan
- g. Kriteria Penelitian
- h. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Kriteria Luanan dan Capaian: Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kesembilan kriteria ini merupakan bagian dari akuntabilitas sekaligus sistem penjaminan mutu eksternal bagi perguruan tinggi, sehingga kesembilan kriteria ini harus dipenuhi ditambahkan juga dengan kriteria atau standar penjaminan mutu tambahan dari internal perguruan tinggi. Jika ini dilakukan dengan patuh, maka akan memunculkan kepuasan pemangku kepentingan dan rekognisi masyarakat.



Bagan. 12. Sistem Akreditasi Nasional

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar SAN mengacu kepada SN Dikti? Atau bagaimana relasi SAN dengan SN Dikti dan khususnya standar Pendidikan dalam konteks pembicaraan kali ini.



Bagan.13. Relasi SN Dikti dengan SAN

Dari bagan di atas secara keseluruhan tampak jelas bahwa SN Dikti memiliki keterkaitan dengan SAN. Jika Kembali kepada ketiga komponen yang ada dalam SN Dikti, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, maka relasinya adalah:

- Standar Pendidikan dalam SN Dikti memiliki relasi dengan kriteria 6 berupa Kriteria Pendidikan dalam SAN. Dari delapan Standar Pendidikan SN Dikti, 3 diantaranya masuk dalam Kriteria Pendidikan SAN, yaitu: a) Standar Isi Pembelajaran, b) Standar Proses Pembelajaran dan c) Standar Penilaian Pembelajaran. Sedang lima standar lainnya masuk: a) standar SKL masuk ke kriteria 9 berupa Luaran dan Dampak Tri Dharma, b) standar dosen dan tenaga kependidikan masuk ke dalam kriteria 4 (kriteria SDM), c) standar sarana dan prasarana Pendidikan serta standar pembiayaan Pendidikan masuk ke kriteria 5 (keuangan, sarana dan prasarana) dan standar pengelolaan pembelajaran masuk ke kriteria 2 (tata pamong pamong, tata Kelola dan kerjasama)
- Standar Penelitian dalam SN Dikti, juga memiliki relasi dengan kriteria dalam SAN, yaitu a) standar isi, proses dan hasil penelitian berelasi dengan kriteria 7 SAN (penelitian), b) standar penekliti berelasi dengan kriteria

- 4 (SDM), c) standar sarana dan prasarana serta pembiayaan penelitian berelasi dengan kriteria 5 (Keuangan dan sarana prasarana penelitian), d) standar pengelolaan penelitian bersesuaian dengan kriteria 2 (tata pamong, dan kerjasama) dan e) standar hasil penelitian berelasi dengan kriteria 9 (luaran dan dampak tri dharma)
- c. Standar Pengabdian Kepada masyarakat SN Dikti memiliki relasi dengan kriteria dalam SAN, yaitu : a) standar isi, proses dan hasil penelitian berelasi dengan kriteria 8 (Pengabdian pada masyarakat/PKM), B) Standar pelaksana PKM berelasi dengan kriteria 4 (SDM), c) standar sarana prasarana serta standar pembiayaan PKM berelasi dengan kriteria 5 (Keuangan dan sarana prasarana penelitian), d) standar kriteria 2 (tata pamong, dan kerjasama) dan kriteria 9 (luaran dan dampak tri dharma)

Dari paparan di atas, cukup jelas bahwa 24 standar SN Dikti berelasi dengan 7 kriteria SAN, sedangkan 2 kriteria SAN berupa kriteria 1 dan kriteria 9 tidak berelasi. Jika 7 kriteria SAN mengacu kepada 24 standar SN Dikti, maka 2 kriteria SAN yaitu kriteria visi, misi dan tujuan serta kriteria luaran dan dampak tri dharma PT menjadi peluang bagi PT untuk bisa menambahkan sebagai standar mutu internal di masing-masing PT. sehingga SAN memberikan akses pengukuran atas implmentasi hasil SPMI sekaligus SPME.

Karena konteks hari ini ada dalam standar Pendidikan, maka standar ini menjadi tugas pertama bagi perguruan tinggi sebagai organisasi yang menawarkan jasa Pendidikan, maka titik krusialnya ada dalam standar pertama, yaitu SKL. Lalu bagaimana relasinya dengan SAN? Bahwa di dalam SAN ada kriteria 1 berupa kriteria visi, misi dan tujuan yang tidak ada relasi secara langsung dengan kedua puluh empat SN Dikti, bukan berarti hal ini tidak menunjukkan ketiadaan relasi atau hubungan dengan SAN. Pada saat perguruan tinggi dan khususnya program studi akan menawarkan layanan jasa Pendidikan tinggi kepada masyarakat, maka program studi wajib menentukan visinya. Visi ini akan dijadikan sebagai landasan untuk menentukan profil lulusan dan otomatis berkaitan dengan standar Pendidikan pertama yaitu SKL dari program tersebut, SKL ini pula yang kemudian akan dijadikan rujukan dalam menentukan kurikulum yang menyangkut standar isi, proses, penilaian pembelajaran. Hasilnya adalah kriteria 9 SAN berupa luaran dan dampak dari Tri Dharma PT. dalam hal ini berarti luaran dan dampak dari Pendidikan berupa prestasi lulusan, rekognisi lulusan, kebermanfaat lulusan dan sebagainya.

5. Penutup

Mengelola perguruan tinggi memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Jika kita menyediakan prasyaratnya maka kesulitan akan menjadikan kemudahan. Prasyarat yang distandarkan pemerintah adalah SN Dikti. Tetapi SN Dikti yang telah ditentukan pemerintah juga ditetapkan dalam rangka untuk dilampaui oleh semua perguruan tinggi yang ada di seluruh wilayah kesatuan negara RI. Oleh karena itu, PT memiliki peluang untuk mengembangkan standar mutu internal. Standar yang tekah ditetapkan ini akan menjadi tidak bermakna jika tidak ada komitmen dan loyalitas dari semua unsur masyarakat kampus, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Ini berarti kesuksesan SN Dikti bergantung pula pada komitmen dan loyalitas dari seluruh komponen masyarakat kampus pada seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Daftar Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi N0 426 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Peraturan BAN PT No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN 2017), ya
- Surat Edaran Menristekdikti No. 01/M/SE/V/2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau,



C. Akuntabilitas Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat mendasar dan universal. Mendasar artinya bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dihindari, sekaligus universal karena semua manusia di dunia ini entah sadar atau tidak pasti membutuhkan pendidikan. Begitu juga di Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga Negara, sehingga kemudian Negara melakukan pengaturan dalam rangka memberikan layanan publik berupa jasa pendidikan.

Dalam kerangka manajemen pendidikan makro (nasional), layanan pendidikan menjadi tanggung jawab Negara. Tanggung jawab ini kemudian didelegasikan ke tingkat wilayah/propinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat institusional. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat wilayah/propinsi menjadi tanggung jawab pemerintah propinsi, tanggungjawab pendidikan di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, sedangkan tanggungjawab pendidikan di tingkat institusi menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam rangka memberikan jasa pendidikan maka Negara dengan dibantu masyarakat semestinya memberikan jasa pendidikan yang bermutu. Apalagi masyarakat sekarang sudah semakin sadar akan kebutuhan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks manajemen/ administrasi pendidikan, maka manajemen pendidikan dikatakan berhasil jika manajemen mampu mewujudkan produktivitasnya. Produktivitas inilah sesungguhnya gambaran nyata dari mutu out put pendidikan. Masalahnya sekarang adalah terjadi kesenjangan antara keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, dengan kemampuan untuk memberikan pendidikan yang bermutu. Diantara sekian alasan yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan belum berjalan secara maksimal; antara lain karena masih rendahnya akuntabilitas lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Rendahnya akuntabilitas lembaga juga dipengaruhi oleh minimnya angka partisipasi masyarakat terhadap kebermutuan penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya.

Dengan melihat alasan ini semua, maka makalah ini akan coba mengupas tentang apa sesungguhnya akuntabilitas pendidikan itu (konteks pendidikan dasar

dan menengah?) Bagaimana jaminan pendidikan yang akuntabel? Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel sulit dipenuhi., serta apa indikator bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga telah memenuhi derajat akuntabel?.

2. Konsep Dasar Akuntabilitas Pendidikan Dasar Dan Menengah

a. Pengertian

Persoalan akuntabilitas pendidikan, gaungnya sudah semakin terdengar semenjak digulirkannya kebijakan pendidikan dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Namun begitu isu akuntabilitas dalam pendidikan tinggi sudah ada sejak lama, karena memang perguruan tinggi sudah sejak lama memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, berbeda dengan dunia persekolahan (*schooling*) yang baru mendapatkan kewenangan semenjak digulirkannya manajemen berbasis sekolah.

Untuk memahami apa dan bagaimana sesungguhnya akuntabilitas pendidikan, maka terlebih dahulu harus dipahami konsep dasar akuntabilitas pendidikan. Menurut Slamet dalam Kande (2008), “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Sementara Zamroni (2008) mendefinisikan akuntabilitas, *“is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do... Accountability can be seen as validation of participation, in that test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action”*. Senada dengan Zamroni adalah Kande, bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi (pendidikan) untuk mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari *stakeholders*.

Dari beberapa batasan akuntabilitas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah satu pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan organisasi. Dalam konteks pendidikan maka akuntabilitas pendidikan sesungguhnya bentuk pertanggungjawaban institusi pendidikan kepada *stakeholders* atas kinerja pendidikan yang telah diamanatkan publik.

Konsep kedua adalah pendidikan dasar dan menengah. Menurut UU Sisdiknas N0.20 Tahun 2003 pasal 17 disebutkan:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya Pasal 18 menyebutkan:

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan atas kajian istilah akuntabilitas pendidikan dasar dan menengah tersebut, maka bisa disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas pendidikan dasar dan menengah adalah kemampuan satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik tentang segala kinerja yang telah diperoleh sebagai hasil partisipasi dari *stakeholders*.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas tersebut jelas tidak mudah. satuan pendidikan dalam hal ini harus melakukan upaya-upaya yang keras mulai dari merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen yang tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang memadai dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan yang bersangkutan (Jalal dan Supriadi, 2001).

b. Tujuan Akuntabilitas Pendidikan

Tujuan akuntabilitas adalah terciptanya kepercayaan publik kepada institusi pendidikan (Slamet, 2005). Dengan kepercayaan publik yang tinggi maka akan semakin mendorong angka partisipasi publik kepada manajemen, sebagaimana yang tadi dikemukakan Zamroni dalam pengertian

akuntabilitas. Artinya semakin tinggi angka partisipasi masyarakat, maka akan semakin akuntabel lembaga pendidikan tersebut.

Tingginya angka partisipasi masyarakat akan semakin menaikkan derajat akuntabilitas pendidikan dasar dan menengah. Partisipasi masyarakat akan semakin meningkat jika pendidikan dasar dan menengah mampu menawarkan jasa pendidikan yang bermutu. Dalam sistem pendidikan, derajat mutu pendidikan sesungguhnya merupakan fungsi sinergi antara satuan pendidikan, pemerintah dan masyarakat (Komariyah dan Triatna, 2006). Sehingga dalam hal ini bermutu tidaknya, akuntabel tidaknya satuan pendidikan ternyata juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

3. Pelaksanaan Akuntabilitas Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya dimaksudkan agar satuan pendidikan senantiasa terkontrol dan tidak melakukan penyimpangan atas mandat yang telah diberikan oleh masyarakat. Berikut akan dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas pendidikan dasar dan menengah.

4. Dimensi dan Tipe Akuntabilitas Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas menyangkut persoalan kemampuan lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu. Satuan pendidikan dasar dan menengah akan dikatakan akuntabel jika ia mampu menjaga mutu outputnya sehingga bisa diterima masyarakat. Untuk menjaga mutu, maka institusi harus mengacu kepada standar yang telah digariskan pemerintah. Standar-standar yang ada dalam pendidikan inilah sesungguhnya jaminan mutu sekaligus jaminan akuntabel tidaknya satuan pendidikan.

Agar pelaksanaan akuntabilitas berjalan dengan baik, selain lembaga mengacu pada standarisasi pendidikan, hal penting selanjutnya yang patut diperhatikan adalah bahwa akuntabilitas sendiri memiliki dimensi, yaitu dimensi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Dimensi yang *pertama* berhubungan dengan persoalan relasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, lembaga dengan orang tua siswa dan antara sekolah dengan instansi di atasnya. Sedangkan dimensi *kedua* merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan antara sesama warga lembaga pendidikan, kepala sekolah dengan komite, kepala sekolah dengan guru.

Adanya muatan dimensi akuntabilitas, kemudian melahirkan adanya tipe akuntabilitas, yaitu tipe akuntabilitas eksternal dan internal (Kande, 2008). Akuntabilitas eksternal didasarkan pada manajemen hirarkis, sedangkan akuntabilitas internal didasarkan pada tanggung jawab profesional yang di dalamnya melekat sebuah konsep agen moral. Dilihat dari kepemilikan kepercayaan, akuntabilitas eksternal memiliki kepercayaan yang rendah, sedangkan akuntabilitas internal memiliki kepercayaan yang tinggi. Tetapi jika dilihat dari segi tanggungjawabnya, maka akuntabilitas eksternal terdapat kontrol yang hirarkis, sedangkan akuntabilitas internal tanggungjawab profesional didelegasikan.

a. Jaminan Standar Pendidikan Sebagai Akuntabilitas Pendidikan Dasar Dan Menengah

Dalam sistem persekolahan (pendidikan dasar, menengah dan tinggi) akuntabilitas pendidikan terletak pada ada tidaknya jaminan standar. Jaminan standar pendidikan yang dimaksud terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan, yang dalam tulisan ini masing-masing akan dibahas satu persatu. Adanya jaminan standar di Indonesia diatur dalam UU N0 20 tahun 2003 pasal 35 bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikut dikutip pasal 35 ayat (1) sampai (4):

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Standar Isi

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang standar isi dijelaskan bahwa dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup:

- 1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
- 2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
- 3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
- 4) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar isi selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang isinya antara lain :

Pasal 1

- (1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam dokumen ini (lampiran Permen N0 22 tanggal 23 Mei 2006 dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup:

- 1) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
- 2) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar & menengah
- 3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan

- 4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. (bab I Lampiran)

Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dalam bab II juga diperinci mengenai pengelompokkan mata pelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- 3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) kelompok mata pelajaran estetika;
- 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan & kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran & wawasan peserta didik akan status, hak, & kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan & teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan u/ mengenal, menyikapi, & mengapresiasi ilmu pengetahuan & teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir & berperilaku ilmiah yg kritis, kreatif & mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan & teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan u/ memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.
4.	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Sedangkan struktur kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah bisa dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Struktur kurikulum SMP/MTs disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	XI
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2

10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Dan struktur kurikulum untuk SMA/MA adalah

Tabel 4. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPA

Komponen	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Fisika	4	4	4	4
7. Kimia	4	4	4	4
8. Biologi	4	4	4	4
9. Sejarah	1	1	1	1
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/ Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Dalam bab III selanjutnya diatur mengenai beban belajar peserta didik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut: 1). SD/MI/SDLB

berlangsung selama 35 menit; dan 2) SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB: (a) Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran; dan (b) Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran, dan 2) b. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB adalah 34 jam pembelajaran

Bab IV selanjutnya membahas tentang kalender pendidikan. Di dalamnya mengatur tentang alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel berikut.

Tabel 5. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu & maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	Jeda antarsemester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan & administrasi akhir & awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/ nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Sedangkan Penetapan Kalender Pendidikan diatur sebagai berikut:

- 1) Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

- 2) Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- 3) Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- 4) Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

c. **Standar Proses**

Untuk standar proses diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
- (2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam lampiran Permen ini diperinci lebih lanjut mengenai hal yang dibicarakan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

1) Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi

waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah :

- a) Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.
- b) Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharap-

kan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

- c) Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
- d) Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- e) Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
- f) Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- g) Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
- h) Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.
- i) Kegiatan pembelajaran. a) Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran, b) Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis & sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, c) Penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

- j) Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.
- k) Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

3) **Kompetensi Lulusan**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 23 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan: Pasal 1, (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya dalam lampiran menyebutkan tentang SKL (dengan mengambil contoh 1 mata pelajaran untuk setiap jenjangnya):

Pertama. SD/MI untuk mata pelajaran Agama:

- 1) Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-'Alaq
- 2) Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar
- 3) Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku tercela
- 4) Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari bersuci (thaharah) sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji
- 5) Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi

Kedua. SMP/MTs mata pelajaran agama:

- 1) Menerapkan tata cara membaca Al-qur'an menurut tajwid, mulai dari cara membaca "Al"- Syamsiyah dan "Al"- Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf
- 2) Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna
- 3) Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah
- 4) Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat
- 5) Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara

Ketiga. SMA/MA mata pelajaran agama Islam:

- 1) Memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 2) Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul Husna
- 3) Berperilaku terpuji seperti hasnuzzhan, taubat dan raja dan meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabzir dan fitnah
- 4) Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam
- 5) Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia

d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk memberikan jaminan mutu sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, maka komponen pendidik dan tenaga kependidikan juga harus memenuhi standar. Dalam UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 8 dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9) dan kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi kepribadian, sosial, professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10).

Secara spesifik standarsisasi tenaga pendidik (guru) juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007, **Pasal 1, ayat (1)** Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Sedangkan mengenai tenaga kependidikan diatur dalam pasal 39 ayat (1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

e. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Standar akuntabilitas pada sarana prasarana pendidikan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA). Pada pasal 1 diisyaratkan bahwa setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi criteria minimum sarana dann criteria minimum prasarana, yang lebih detail dituangkan dalam lampiran Permen ini, yaitu: 1) Standar Prasarana SD/MI. SD/MI minimal memiliki prasarana: Ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, UKS, Jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/ olahraga dan 2) 2). Standar Sarana SD/MI.

f. Pengelolaan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, disebutkan Pasal 1. ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Ayat (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Adapun dalam lampiran tersebut, syarat pengelolaan lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi) minimal memenuhi unsur :

- a) Perencanaan Program, meliputi perguruan tinggi harus memiliki visi, misi, tujuan dan rencana kerja
- b) Pelaksanaan rencana kerja; pedoman pelaksanaan, struktur organisasi, pelaksanaan rencana, kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan dan peran serta masyarakat.
- c) Program pengawasan dan evaluasi, meliputi program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan kurikulum, pendayaagunaan tenaga pendidik, dan akreditasi.
- d) Kepemimpinan
- e) Sistem informasi manajemen
- f) Penilaian khusus.

g. Pembiayaan

Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Lebih rinci lihat Permen 00-2007

h. Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian menyebutkan: Pasal 1, (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. (2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam lampiran disebutkan pengertian dari standar penilaian, yaitu standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Tentang Mekanisme. Penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian oleh pendidik berupa ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas yang dilaksanakan di bawah koordinasi satuan pendidikan. Sedangkan penilaian pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan berupa Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan yang tidak di-UN-kan dan Rapat Dewan Sekolah untuk penilaian pada kelompok mata pelajaran estetika, seni dan olahraga. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional (UN).

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik Penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Demikian, paparan tentang 8 standar nasional pendidikan sebagai bentuk jaminan layanan pendidikan yang akuntabel.

5. Faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam upaya melaksanakan akuntabilitas, pendidikan dasar dan menengah tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menghambat perwujudan lembaga pendidikan yang akuntabel. Persoalan inilah yang menjadi faktor penghambat akuntabilitas satuan pendidikan.

Menurut Marks Olsenn dkk (2004) faktor yang menjadi penghambat terbentuknya akuntabilitas lembaga pendidikan adalah adanya kecenderungan manusia yang mengutamakan kebebasan. Di mana kebebasan ini muncul secara baru (*neoliberalisme*) sehingga mempengaruhi ketahanan moral orang dalam menjalankan akuntabilitasnya.

Stephen Robins dalam Kande (2008) menambahkan bahwa faktor yang ikut mempengaruhi / menghambat pelaksanaan akuntabilitas ada dua yaitu faktor system dan faktor orang. Faktor sistem menyangkut aturan-aturan, tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai yang dianutnya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan akuntabilitas selanjutnya bisa dieliminir jika satuan pendidikan mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Lembaga harus menyusun aturan main tentang system akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawabannya.
- 2) Lembaga menyusun pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggara pendidikan dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Lembaga menyusun rencana pengembangan organisasi dan menyampaikannya kepada public/ stakeholder awal setiap tahun anggaran.
- 4) Menyusun indicator yang jelas tentang pengukuran kinerja lembaga dan disampaikan kepada stakeholder.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada public.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan public

- 7) Menyediakan informasi kegiatan lembaga kepada public yang akan memperoleh layanan pendidikan
- 8) Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. (Slamet dalam Kande, 2008)

Ke delapan upaya ini, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan lembaga untuk mewujudkannya. Lembaga juga bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk digerakkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas.

6. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas Pendidikan Dasar Dan Menengah

Selanjutnya Slamet juga mengemukakan, bahwa untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen pendidikan dasar dan menengah bisa menggunakan indikator-indikator keberhasilan akuntabilitas, yang terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan public terhadap lembaga pendidikan
- 2) Tumbuhnya kesadaran public tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di lembaga
- 3) Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

7. Penutup

Akuntabilitas adalah satu cara agar adanya jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Jaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan adanya standarisasi, baik mulai dari standar isi, proses dan sebagainya yang kesemuanya mendapat campur tangan dari pemerintah lewat regulasi yang dikeluarkannya.

Daftar Referensi

- Anwar, Idochi (2004), *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Jalal, Fasli dan Supriadi, dedi (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita

- Kartiwa, Asep (2002), *Akuntabilitas Dan Standarisasi Kualitas Perguruan Tinggi Swasta Di Daerah*, download, 11 Nopember 2008,
- Kande, Fredik (2008), *Akuntabilitas Dalam Manajemen Berbasis Sekolah*, download tgl 24 Oktober 2008
- Komariyah, Aan dan Triatna, Cepi (2006), *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- M, Sufyarma (2004), *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- SK. Mendiknas, Nomor 184/U/2001 *tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi*.
- UU No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Nuansa Aulia
- UU N0 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*, bandung: Nuansa Aulia.
- Zamroni (2008), *School Based Management*, Yogyakarta: PPS UNY



D. Administrasi Pengelolaan Sekolah

1. Pengantar

Belajar tentang administrasi pengelolaan sekolah bagi mahasiswa fakultas tarbiyah maupun fakultas keguruan dan ilmu pendidikan menjadi sangat penting mengingat sekolah adalah calon tempat mereka bekerja selepas lulus nanti. Mempelajari perbedaan atau persamaan antara adminitrasi dan manajemen juga menjadi lebih penting mengingat secara parktis keduanya sering dianggap sama. Lalu apakah secara teori sesungguhnya sama atau bahkan berbeda. Pemahaman akan dua konsep ini menjadi sangat penting karena berimpilkiasi kepada ruh dalam menjalankan praktiknya di dunia persekolahan.

Secara umum istilah administrasi dan manajemen apakah dibedakan atau disamakan, dianggap lebih luas atau lebih sempit, terklasifikan menjadi tiga (3) pendapat, yaitu:

- a. Administrasi lebih luas daripada manajemen. Dalam pandangan ini, aktivitas-aktivitas manajemen ada dalam dan ditentukan oleh aktivitas-aktivitas administrasi. Aktivitas manajemen bergantung pada administrasi, sekaligus merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah ditetapkan oleh administrasi.
- b. Manajemen lebih luas daripada administrasi. Administrasi hanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ketatausahaan; yang sesungguhnya hanyalah pengertian administrasi secara sempit.
- c. Administrasi sama dengan manajemen. Seluruh proses kegiatan dan dinamika administrasi tidak lain juga merupakan proses kegiatan dan dinamika manajemen (Silalahi, 2007: 115-116) dalam (Zulfa, 2014).

Sebagaimana disebutkan oleh Umi Zulfa dalam bukunya “Management: An Introduction” dan “Supervisi Pendidikan Indonesia”, bahwa administrasi dan manajemen itu sama tetapi berbeda. Perbedaanya akan dirangkumkan sebagai berikut:

- a. Filosofi. Administrasi yang sudah muncul zaman Romawi ada dalam dunia pemerintahan berkaitan dengan pelayanan (; ingat istilah *administere* (melayani, menaati) atau *administrator* (pemimpin yang hakikatnya melayani kepentingannya magister). Sedangkan manajemen lahir dari dunia usaha yang memiliki filosofi berbeda dengan pemerintahan. Sehingga secara filosofis, administrasi berorientasi *services* (melayani) sedangkan manajemen berorientasi profit (keuntungan). Perbedaan ini tentunya akan membawa implikasi bagi praktik (; Pratik dari Ilmu) yang berbeda. Jika menggunakan istilah administrasi, maka administrator yang notabenenya pemimpin hakikatnya adalah pelayan bagi yang dipimpin (anggota organisasi) maupun pengguna jasa/produk organisasi tersebut atau pelanggan eksternal. Sebaliknya jika menggunakan istilah manajemen, maka keuntungan menjadi orientasinya, baik keuntungan dalam pengertian material maupun lainnya (jika diterapkan dalam organisasi nonprofit, seperti Lembaga Pendidikan), bisa berupa keuntungan *benefit*.
- b. cakupan/ruang lingkup yang diurusi. Cakupan/ruang lingkup yang diurusi. Yang diurusi administrasi adalah semua sumber daya organisasi, baik yang berbentuk manusia(*man*, berupa pimpinan/manajemen, bawahan/anggota), maupun material (*money, material, methods, machine, market, minute*,

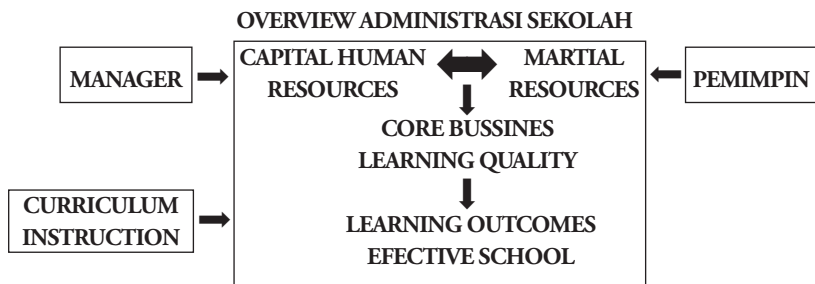
information), sedangkan yang diurusi manajemen adalah manusianya,. Artinya manajemen fokus mengurus manusia yang akan mengurus sumber daya manusia dan sumber daya organisasi yang berbentuk non manusia. Manajemen sumber daya manusia, mengurus manusianya yang ditugaskan administrator untuk mengurus manusia yang ada dalam organisasi. Manajemen sarana prasarana, mengurus manusia yang mendapatkan tugas mengurus sarana prasarana. Manajemen Kurikulum, mengurus manusia yang akan mengurus kurikulum dan sebagainya. Dari sini maka cakupan administrasi lebih luas karena mengurus sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, sedangkan manajemen hanya mengurus sumber daya manusia.

- c. titik fokus yang diprioritaskan. Pada periode klasik (manajemen klasik), manajemen terpecah menjadi dua kubu, yaitu manajemen ilmiah (*scientific management*) dan manajemen administrasi (*administration management*) (Lunenburg and Ornstein, 2004). Manajemen ilmiah dengan tokoh utamanya Frederick W.Taylor yang menghasilkan 4 prinsip manajemen yang sangat terkenal, menfokuskan pekerjaannya hanya pada manajemen pekerjaan dan pekerja (*the management of work and workers*). Artinya titik fokus kerja manajemen adalah manusianya (otomatis dengan pekerjaan manusia). Sedangkan pada manajemen administrasi dengan 3 tokoh utamanya, yaitu: 1) Henry Fayol, dengan sumbangan pemikirannya berupa 14 prinsip manajemen, 2) Luther Gullick dengan 5 fungsi manajemen dan 3) Max Weber dengan konsep birokrasi dalam organisasi, ketiga-tiganya menfokuskan diri pada pembahasan: ***how to overall organization should be structured***. Ini berarti pekerjaan utama administrasi adalah bagaimana menstrukturkan semua (komponen) organisasi (; yang jelas bukan hanya manusia saja). Dalam konsep ini muncul pembagian tugas administrator ada dalam wilayah kebijakan semua hal dalam organisasi, sedangkan manajemen adalah pelaksana atau penterjemah kebijakan. Sehingga urusan administrasi jauh lebih luas dari urusan manajemen (Zulfa, 2020) dan (Zulfa, 2014).
- d. *Administrasi menentukan menyeluruh yang hendak dicapai (organizational goal), sedangkan Menentukan tujuan yang bersifat departemental atau sectoral*
- e. *Menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi (general and overal policies), sedangkan manajemen menentukan kebijakasaan yang bersifat khusus atau operasional* (Zulfa, 2014)

Berdasarkan pemahaman ini pula maka pembahasan kali ini adalah: 1) overview administrasi sekolah, 2) ruang lingkup manajemen sekolah dan 3) manajemen sesuai bidang garapan.

2. Overview Administrasi Sekolah

Sekolah sebagai organisasi pendidikan di dalamnya memiliki human capitas (modal dan sumber daya manusia) serta sumber daya material lainnya yang dipimpin oleh seorang pemimpin sekaligus administrator pendidikan sekaligus dimanaje oleh secara teknis -operasional oleh seorang manajer pendidikan yaitu kepala sekolah. Kepemimpinan dan pengelolaan yang dilakukan oleh satu aktor yaitu kepala sekolah dilakukan dalam menjalankan bisnis intinya (*core-business*) yaitu pembelajaran yang berkualitas (*learning quality*). Pembelajaran yang berkualitas yang dilaksanakan melalui mekanisme manajemen kurikulum/ instruksional akan berhasil mengarahkan peserta didik menjadi lulusan bermutu dalam wujud learning outcomes yang menjadikannya sekolah berpredikat sekolah efektif. Namun semuanya tidak bisa hanya dijalankan oleh manajemen kurikulum tetapi butuh support dari seluruh manajemen sumber daya yang ada dalam organisasi sekolah, yaitu manajemen SDM, manajemen kesiswaa, manajemen sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya.

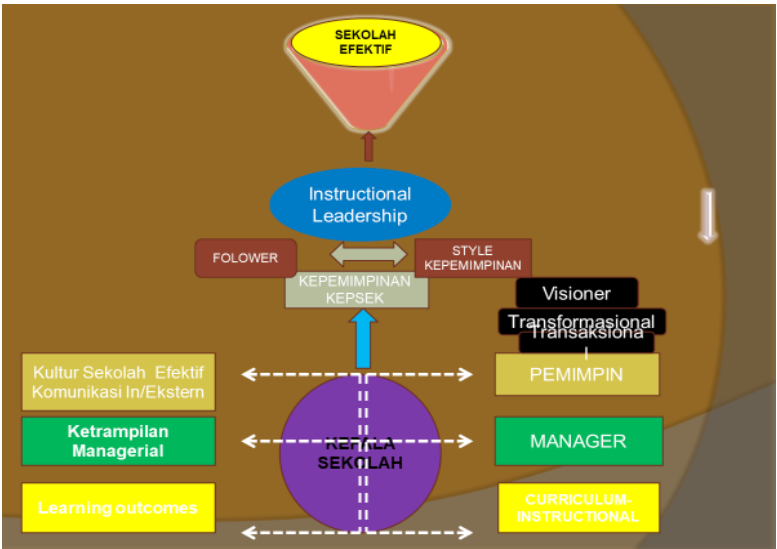


Bagan. 14. Overview Administrasi Sekolah

Untuk menjalankan sekolah efektif yang dibutuhkan adalah kepemimpinan kepala sekolah khususnya kepemimpinan instruksional (pembelajaran). Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah ini bergantung kepada style atau gaya kepemimpinan dan juga karakteristik dari para followernya atau pengikutnya seperti tenaga pendidik (guru maple, guru BK, guru kelas), siswa dan tenaga kependidikan (ka Tu, staf Tu, ka Urusan TU, kepala peroustakaan, pustawakan, teknisi, laboran dan sebagainya).

Menjalankan kepemimpinan sekolah di era seperti saat ini yang paling dibutuhkan adalah pemikiran besar ke depan dan jangka panjang. Di sinilah diperlukannya kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, tetapi yang transformasional supaya bisa menjadikan sekolah sebagai institusi yang melakukan transformasi sosial sekaligus kepemimpinan trnasaksional pada pihak-pihak yang terikat secar formal maupun emosional-ideologi untuk secara Bersama-sama membangun kualitas sekolah ini.

Melalui 3 gaya kepemimpinan ini maka akan tampil kepala sekolah sebagai pemimpin yang mampu membangun kultur sekolah efgelktif sekaligus membangun jaringan komunikasi yang harmonis baik komunikasi di internal sekolah maupun eksternal. Di sisi lain untuk mewujudkan kultur sekilah efektif, maka secara teknis kepala sekolah harus tampil,sebagai manajer sekolah yang di dalamnya membutuhkan ketrampilan manaegerial sehingga learning outcomes khususnya dan kurikulum/instruksionalnya tercapai secara efektif.

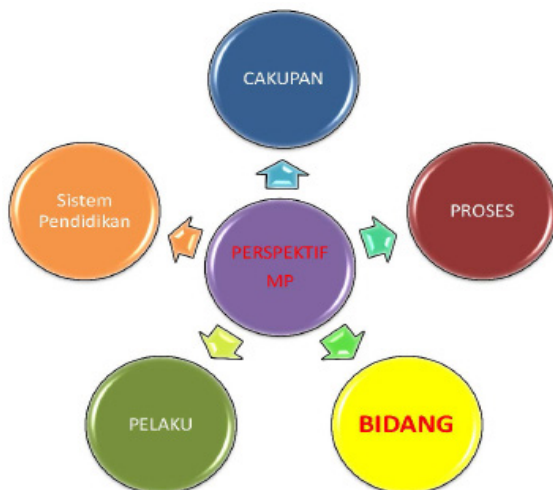


Bagan.15. Administrasi-Manajemen Untuk Mewujudkan Sekolah Efektif

3. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah

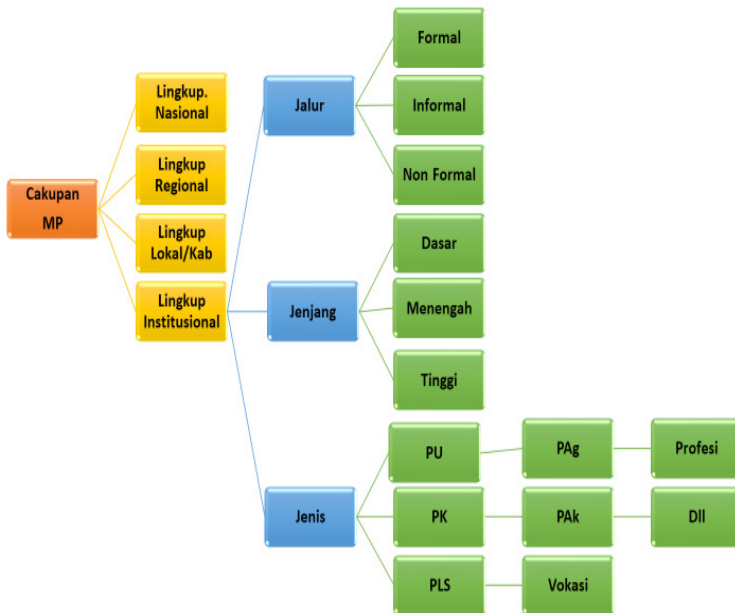
Berdasarkan bagan di atas maka manajemen memiliki kontribusi secara operasional atau teknis untuk mewujudkan sekolah efektif. Berdasarkan hal ini pula maka mempelajari ruanglingkup kajian manajemen sekolah menjadi sangat penting. Setidaknya ruang lingkup manajemen sekolah bisa dilihat dalam

beberapa perspektif, yaitu: 1) perspektif wilayah atau cakupan, 2) sistem, 3) proses, 4) bidang Garapan dan 5) pelaku.



Bagan. 16. Perspektif Ruang Lingkup Manajemen Sekolah/Pendidikan

- a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Perspektif Cakupan/wilayah
Yang dimaksud dengan ruang lingkup Manajemen Pendidikan(MP) perspektif wilayah atau cakupan adalah melihat MP dari cakupan wilayah konteks kenegaraan sampai ujung tombaknya s=wilayah terkecil yaitu satuan Pendidikan (sekolah) yang sesungguhnya juga menyimpulkan gambaran umum dari UU Sisdiknas N0 20 Tahun 2003 (RI, 2003). Bersarkan cakupannya maka runag lingkup MP Pendidikan ada 3, yaitu:
 - 1) Lingkup/ Wilayah Makro, yaitu MP dalam perspektif Nasional
 - 2) Lingkup Messo, yaitu MP dalam konteks propinsi/kabupaten/kota
 - 3) Lingkup Mikro, yaitu MP dalam konteks sekolah/ institusi Pendidikan. dilingkup institusi ini maka MP ruang lingkupnya terbagi menjadi 3 sebagaimana amanah UU Sisdiknas, yaitu:
 - a) Jalur Pendidikan: formal, informal dan non formal
 - b) Jenjang Pendidikan: jenjang Pendidikan dasar, menengah dan tinggi (Dikti)
 - c) Jenis Pendidikan: PU, PK, PLS, PAG, Pak, Vokasi, Profesi dan lainnya



Bagan. 17. Ruang Lingkup MP Perspektif Cakupan/Wilayah

b. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Perspektif sistem.

Ruang lingkup MP perspektif Sistem artinya MP melihat sistem Pendidikan dari kacamata manajemen, yang meliputi:

- 1) Input Pendidikan. input Pendidikan adalah seven M (Man (tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa), Matrial (kurikulum), Machine (sarana dan prsarana Pendidikan), Money (pembiayaan Pendidikan), Methode (metode/strategi), Minute (waktu/masa) dan Market (pasar, kebutuhan masyarakat) dan 1I (informasi)
- 2) Proses Pendidikan. merupakan pelaksanaan fungsi manajemen dalam proses Pendidikan, seperti perencanaan Pendidikan, pengorganisasian, pengarahan dan monitoring dan evaluasi pendidikan
- 3) Output Pendidikan, adalah lulusan sekolah yang berbentuk prestasi akademik dan non akademik
- 4) Outcomes Pendidikan, merupakan luaran sekolah yang memberikan benefit sosial maupun individu seperti kebermanfaatan ilmu dalam bentuk pemikiran dan atau teknologi tepat guna, waktu yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan, jumlah lulusan yang melanjutkan ke pendidika yang lebih tinggi maupun tingkat kesejahteraan dari lulusan.

- c. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Perspektif proses. Dari perspektif proses maka MP merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional dan managerial dari Pendidikan, seperti POAC, POSde CorB dan lain sebagainya. Sekaligus fungsi ini menunjukkan aktivitas rutin dari manajemen sekolah.
- d. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Perspektif bidang Garapan, merupakan MP dilihat dari bidang Garapan yang dilakukan sekolah, seperti manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen SDM, manajemen sarana prasarana Pendidikan, manajemen pembiayaan Pendidikan dan manajemen Humas
- e. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Perspektif pelaku, merujuk pada siapa dimlevel mana sebagai manajer pendidikannya. Eks: manajer sekolah/ kepala sekolah, manajer kurikulum/manajer kurikulum, manajer sarana prasarana sampai manajer kelas dan lain sebagainya.

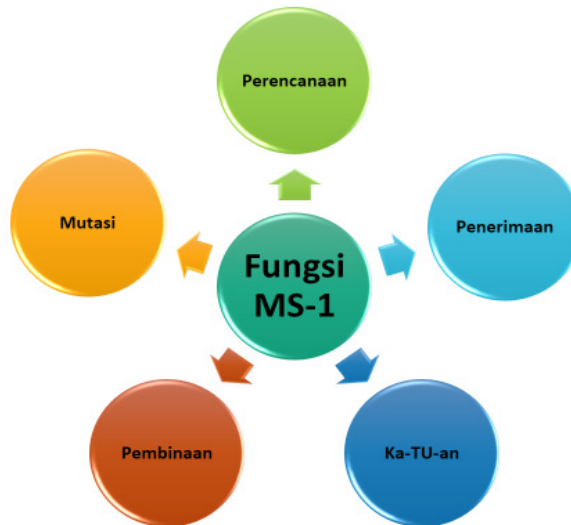
4. Manajemen Sekolah Dalam Perspektif Bidang Garapan

a. Manajemen Kesiswaan

Manajemen Siswa : suatu **layanan** yang memusatkan perhatian pada **pengaturan, pengawasan dan layanan** siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah (Knezevich, 1961). Demikian juga dengan pengertian manajemen siswa menurut Eka Prihatini adalah usaha **pengaturan** terhadap **peserta didik** mulai dari peserta didik tersebut **masuk** sekolah sampai dengan mereka **lulus** sekolah (Prihatin, 2011: 4).

Fungsi manajemen peserta didik meliputi: perencanaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik, ke-TU-an, pembinaan dan mutasi (Prihatin, 2011). Perencanaan berkaitan dengan berapa peserta didik baru yang akan diterima yang hasilnya menjadoi rekomendasi untuk dilaksanakan oleh panitia penerimaan peserta didik baru pada fungsi kedua yaitu penerimaan peserta didik. Selanjutnya peserta didik yang dinyatakan diterima dimasukkan dalam buku catatan peserta didik dlam buku induk, dan catatan lain selama peserta didik melakukan aktivitas sampai dengan siswa keluar dicatat pada fungsi ketiga ini, seperti buku klapper nilai, buku raport, absen, dan sampai dengan ijazah. Dalam fungsi berikutnya yaitu fungsi pembinaan, peserta didik memperoleh pembinaan baik yang bersifat

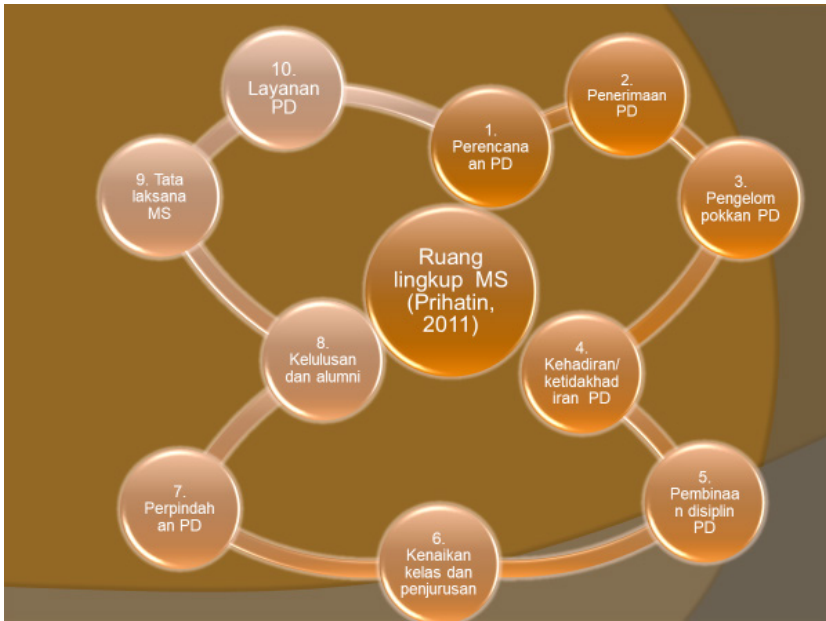
akademis maupun non akademis. Terakhir fungsi mutasi yaitu perpindahan siswa dari jenjang/kelas (internal) maupun eksternal (lulus maupun transfer eksternal).



Bagan. 18. Fungsi-Fungsi Manajemen Peserta Didik

Berdasarkan fungsi operasi manajemen peserta didik, maka ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi:

1. Perencanaan peserta didik
2. Penerimaan peserta didik
3. Pengelompokkan peserta didik
4. Kehadiran/ketidakhadiran peserta didik
5. Pembinaan disiplin peserta didik
6. Kenaikan kelas dan penjurusan
7. Perpindahan peserta didik
8. Kelulusan dan alumni
9. Tata laksana Manajemen Siswa
10. Layanan peserta didik (Prihatin, 2011)



Bagan.19. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

MSDM itu berkaitan dengan cara memperoleh, cara menggunakan dan mempertahankan SDM dalam suatu organisasi agar bisa diberdayakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Zulfa, 2013). Sebagaimana manajemen lain, maka MSDM juga memiliki fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi operasional inilah yang harus diidentifikasi apakah sekolah menjalankan MSDM atau tidak. Adapun fungsi-fungsi operasional MSDM adalah:

- 1) *Human resources planning (perencanaan SDM)*
- 2) *Recruitment*
- 3) *Selection*
- 4) *Staffing*
- 5) *Introduction, training and development, and career management*
- 6) *Compensation*
- 7) *Performance appraisal* (Casteter, 2001), (Decenzo and Robbins, 1999) (1999), Zulfa (2012).



Bagan. 20. Fungsi Operasional MSDM

Pertama. Perencanaan SDM. **Perencanaan SDM** merupakan suatu aktivitas **mengidentifikasi** kebutuhan akan staff, **meramalkan** personel yang didapatkan, dan **menentukan** tambahan atau penempatan apa yang dibutuhkan untuk memelihara staf yang diperlukan secara kuantitas dan kualitas guna mencapai misi organisasi (Lunenburg and Ornstein, 2004).

Kedua. Recruitment. “*recruiting is the process of discovering potential candidates for actual or anticipated organizational vacancies* (Decenzo and Robbins, 1999), yaitu proses menemukan calon2 potensial untuk saat ini maupun untuk mengantisipasi kekosongan.

Ketiga. Selection. Seleksi adalah kegiatan untuk **memutuskan menerima atau menolak** kandidat pegawai baru dari hasil perekrutan (Zulfa, 2013).

Keempat. Staffing merupakan penempatan SDM setelah dinyatakan diterima dalam fungsi seleksi (Zulfa, 2013)

Kelima. Introduction, training and development, and career management. fungsi kelima MSDM ada yang menyebut dalam tiga istilah tersebut, ada yang menyebutkan secara mandiri. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut maka ketiganya berada dalam konteks yang sama yaitu untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja dan mengembangkan kinerja dan organisasinya. Introduction merupakan masa orientasi pekerja setelah ia ditempatkan sesuai

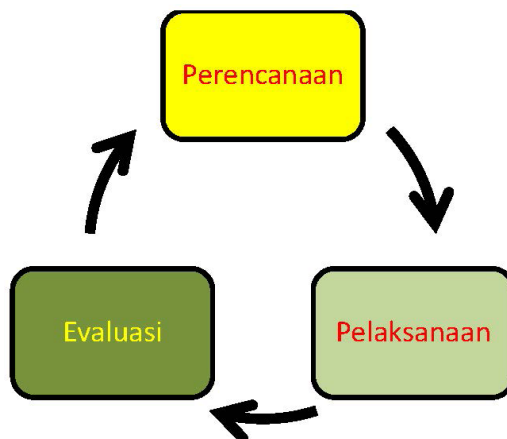
dengan lamaran saat ia mendaftar. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan. **Pelatihan** merupakan pembelajaran para **karyawan teknis/tingkat bawah** tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan mereka **sekarang** dan **Pengembangan** adalah pembelajaran keahlian-keahlian yang diperlukan oleh para **administrator dan profesional** untuk posisi **sekarang** maupun **masa datang** (Lunenburg and Ornstein, 2004).

Keenam. Compensation. Kompensasi adalah semua **pendapatan** yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai **imbalan** atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, demikian menurut Hasibuan. Kompensasi juga bisa didefinisikan sebagai apa yang seorang pekerja **terima** sebagai **balasan** dari pekerjaan yang telah diberikannya (Werther & Davis) dalam (Zulfa, 2013).

Ketujuh. *Performance appraisal* atau penilaian kinerja, yaitu proses menentukan apakah pekerja sudah bekerja sesuai dengan standar-standar kerja yang telah ditetapkan organisasinya.

c. Manajemen Kurikulum

Manajemen Kurikulum adalah Pemberdayaan dan pendayagunaan manusia, materi, uang, informasi dan rekayasa untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi yang ada dalam berbagai kehidupan yang dipelajari (Depdiknas, 2000). Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen kurikulum memiliki fungsi operasionalnya yaitu 1) fungsi perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) evaluasi.



Bagan. 21. Fungsi Operasional Manajemen Kurikulum

Pertama. Perencanaan Kurikulum. Suatu proses menganalisis kondisi-kondisi yang bisa memengaruhi kurikulum maupun pengembangannya. Dalam pengertian yang lebih operasional maka perencanaan kurikulum adalah aktivitas yang dilakukan manajemen untuk merencanakan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa/ peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa/ peserta didik (Nasbi, 2017).

Prosedur perencanaan operasional kurikulum di sekolah adalah

- 1) Penyusunan Kalender Pendidikan
- 2) Pembagian tugas mengajar guru
- 3) Penyusunan jadwal mengajar
- 4) Penghitungan hari efektif mengajar
- 5) Pengembangan silabus
- 6) Penyebaran silabus dalam hari efektif mengajar
- 7) Penyusunan rencana pembelajaran

Kedua. Pelaksanaan Kurikulum adalah aktivitas melaksanakan perencanaan melalui proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu (Nasbi, 2017). Pelaksanaan kurikulum ini ada dalam dua level, yaitu level sekolah dan level kelas. Pada tingkatan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik dan menyusun laporan. Sedangkan Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu : 1) Pembagian tugas mengajar 2) Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler 3) Pembagian tugas bimbingan belajar.

Ketiga. Evaluasi Kurikulum. Menurut pendapat S. Hamid, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tak

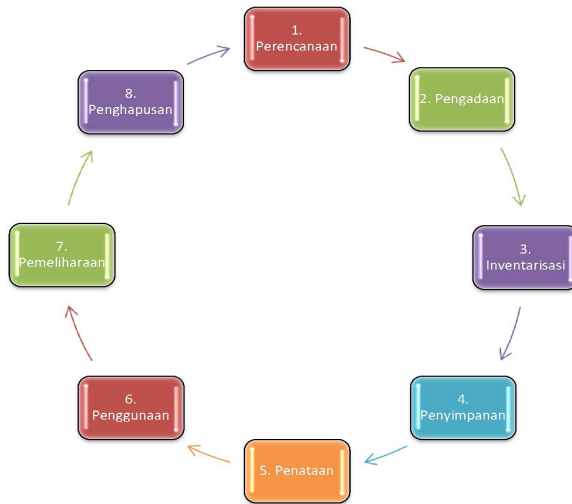
terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian juga dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Hal tersebut disebabkan oleh filosofi keilmuan seorang yang berpengaruh terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi (Nasbi, 2017).

d. Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses merencanakan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan penghapusannya. Manajemen ini memiliki fungsi operasional mulai dari Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan (Trisnawati dkk, 2019). Pendapat lainnya yang dikemukakan Maryadi meliputi (1) perencanaan, (2) penetapan, (3) inventarisasi, (4) pemeliharaan dan (5) penghapusan (Maryadi, 2018).

Dari pendapat di atas, maka fungsi operatif manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Perencanaan sebagai aktivitas pertama berkaitan dengan menentukan sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dan perlu diadakan sebagaimana pendapat Ellong yang menyatakan bahwa perencanaan sarana prasarana pendidikan adalah proses pemikiran secara matang untuk menyusun rencana kebutuhan sarpras pendidikan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan seperti kepala sekolah/Madrasah, wakil kepala, kepala Tata Usaha, guru dan komite sekolah/madrasah (Ellong, 2018).

Selanjutnya fungsi pengadaan adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan baik melalui pembelian, hibah, pembuatan maupun sewa. Setelah diadakan sebelum digunakan maka sarana prasarana tersebut diinventarisir agar sekolah memiliki data sarana prasarana apa yang dimiliki, bagaimana keadaannya dan masih bisa digunakan atau tidak, barulah kemudian disimpan, ditata, digunakan dan tetap dalam pemeliharaan. Jika kondisinya sudah tidak layak guna maka baru dihapuskan dari catatan inventaris dan dibuang/dimusnahkan atau dihibahkan.

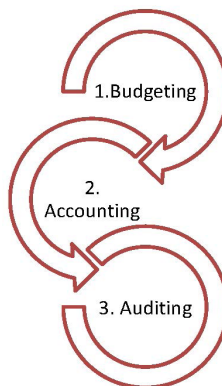


Bagan. 22. Fungsi Operatif Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

e. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Menurut Nanang Fattah memiliki fungsi operatif berupa: perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pelaksanaan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) (Dedy Achmad Kurniady, 2017). Senada dengan pendapat ini adalah pendapat Jones, bahwa manajemen pembiayaan pendidikan meliputi financial planning/budgeting, accounting dan evaluasi/auditing (Arwildayanto dkk, 2017).



Bagan.23. Fungsi Operasional Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Fungsi pertama, yaitu penyusunan/perencanaan anggaran (budgeting) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya fungsi accounting. Pembukuan (accounting) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang (Arwildayanto dkk, 2017).

f. Manajemen Humas Sekolah

Menurut Ruslan, Manajemen hubungan masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengkomunikasian serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya (Karwanto, 2014). Manajemen humas berarti penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi; mulai dari pertemuan kelompok kecil hingga berkaitan dengan konferensi pers internasional via satelit, dari pembuatan brosur hingga kampanye nasional melalui multimedia, dari menyelenggarakan acara open house hingga kampanye politik, dari pengumuman pelayanan publik hingga menangani kasus manajemen krisis (NN). Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen Humas meliputi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) (Rahmat, 2016).

Daftar Referensi

- Arwildayanto, N. L. (2017). *Manajemen Keaunagan dan Pembiayaan Pendidikan Jilid 1*. Bandung: IKAPI Jabar.
- Casteter. (2001). *Human Resourch Management in Educational Administration*.
- Decenzo, D. A. (1999). *Human Resource Management.Sixth Edition..* New York: Jhon Wiley and Sons. Inc.
- Dedy Achmad Kurniady, L. S. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)*. Vol 17 No 3 tahun 2017, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/9620/5929>, 263-269.
- Depdiknas. (2000). *Buku panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Karwanto, I. N. (2014). Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Pencitraan Sekolah (Studi Kasus diDI SMP AL HIKMAH SURABAYA). *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, April 2014, jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id, 8-20.
- Lunenburg, F. C. (2004). *Educational Administration. Concept and Practices. Fourth Edition*. United State America: Thomson-Wadsworth.
- Maryadi, N. d. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Pembelajaran Di SD. *Jurnal Manajemen Pendidikan - Vol. 13, No. 1, Januari 2018: 15-23*, journals.ums.ac.id.
- Nasbi, I. (2017). Manajemen Kurikulum. Suatu Kajian Teoritik. *JURNAL IDAARAH, VOL. I, NO. 2, DESEMBER 2017*, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/viewFile/4274/3936>, 308-330.
- NN. (n.d.). *Manajemen Humas*. Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/7052/4/BAB%20II.pdf>
- Prihatin, E. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat, A. (2016). *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media akademi.
- RI, P. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Trisnawati, C. Z. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SD NEGERI LAMTEUBEE ACEH BESAR. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan ISSN 2302-0156Volume 7, No. 1, Februari 2019*, 62-69.
- Tubagus Djaber Abeng Ellong. (2018). MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI LEMBAGA. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM IQRA'*

Vol. 11. Nomor 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK], <http://journal.iainmanado.ac.id>.

Zulfa, U. (2013). *Alternatif Model Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi*. Cilacap: Ihya Media.

Zulfa, U. (2014). *Supervisi Pendidikan Di Indonesia*. Cilacap: Ihya Media.

Zulfa, U. (2014). *Supervisi Pendidikan Di Indonesia*. Cilacap: Ihya Media.

Zulfa, U. (2020). *Management: An Introduction*. Cilacap: Ihya Media.



BAB III

EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Mencari Alternatif Prioritas Pendidikan Berdasarkan Anggaran 20%

1. Pendahuluan

Hingga saat ini masalah pendidikan yang dihadapi bangsa ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1). Sistem Manajemen Nasional Berbasis Otonomi daerah, 2). Pemborosan Biaya, 3). Infrastruktur Pendidikan, 4). Guru, 5). Perluasan, Pemerataan dan Keadilan dalam Pendidikan, 6). Kualitas, 7). *Relevancy*, 8). Pengelolaan Dana, 9). Manajemen Kelembagaan Perguruan Tinggi, 10). Manajemen Perguruan Tinggi (Gaffar, 2009).

Khususnya tentang masalah pemerataan pendidikan di Indonesia juga masih cukup memerhatikan. Jika pemerataan diartikan sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (*equility*) saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendidikan wajar (wajib belajar) sembilan tahun, di mana implikasinya maka pemerintah harus membiayai setiap warga negaranya untuk bisa mengenyam pendidikan dasar dan menengah ini, sehingga kebijakan ini juga didukung dengan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apa yang dilakukan pemerintah ini tidak lepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Disamping itu, jika pemerataan pendidikan diartikan sebagai *equity*, maka bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat, dalam hal kesempatan untuk mendapat layanan pendidikan yang sama (kebermutuannya). Jika konsep ini yang dimaksud maka Indonesia masih jauh untuk mendapatkannya. Karena ada jenis-jenis sekolah tertentu yang masih bersifat elitis, seperti pendidikan anak usia dini atau yang paling mencolok adalah pendidikan tinggi yang tidak semua warga negara Indonesia memperoleh kesempatan untuk menikmatinya.

Senada dengan itu adalah apa yang dinyatakan Coleman dalam bukunya *Equality of educational opportunity* bahwa secara konsepsional konsep pemerataan ada dua, yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Ace Suryadi, 1993 : 31). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Dengan demikian dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan *equality of outcome*. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun di mana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efisiensi.

Persoalan pemerataan dalam arti *equality* di Indonesia sebenarnya sudah diatasi dengan kebijakan wajar 9 tahun dan disupport dengan BOS. Bahkan Wajar 9 tahun ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah pertama di Indonesia merupakan prioritas utama agar pendidikan yang bersifat universal bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara Indonesia Sedangkan persoalan *equity* yang belum merata, seperti untuk pendidikan tinggi, di mana ketidakmerataan ini diakibatkan oleh antara lain persoalan pendanaan atau pembiayaan pendidikan tinggi yang mahal. Tetapi jika melihat peran penting pendidikan sebagai *human investmen*, yang itu tidak terjadi jika manusianya hanya mengenyam pendidikan rendah/dasar/menengah, maka semestinya ini juga difikirkan sebagai prioritas program pembangunan pendidikan yang kesekian kalinya (prioritas alternative).

Berdasarkan pemaparan pentingnya pendidikan tinggi sebagaimana yang ada dalam latar belakang pendidikan tadi, tetapi terhambat oleh keterbatasan dana, maka keterbatasan dana pendidikan yang seringkali memaksa kita untuk melakukan prioritas pendidikan, perlu kiranya diambil langkah penentuan prioritas pendidikan berdasarkan kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada prioritas pendidikan yang sudah dibuat

oleh pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia, maka makalah ini ingin mencoba mencari celah untuk melihat adanya kemungkinan alternatif lain untuk menformulasikan prioritas pendidikan secara jitu. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana menformulasikan prioritas pendidikan yang ideal?
- b. Bagaimana kemungkinan formulasi prioritas pendidikan di Indonesia berdasarkan keterbatasan anggaran pendidikan 20%?

2. Pendidikan Sebagai *Human Investmen*

Menurut Levin berkaitan dengan *human capital* dalam konteks suatu negara, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih dikarenakan oleh *human capitalnya*. Di mana kualitas penduduk menjadi penentunya. *Human capital* yang dimaksud di sini adalah memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan (termasuk teknologi dan sains dengan kegiatan pendidikan sebagai *human investmen*) dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan Negara. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa. *Pertama*. Jika kondisi *human capital* itu tetap, maka kesejahteraan tinggi, jika berubah-ubah maka sebaliknya. *Kedua*. Kesejahteraan itu selalu berubah-ubah bagi keluarga yang dinamis dan ini berefek pada *human capital* yang terus meningkat.

Disamping itu, Cohn (1979) dalam hal ini juga menyatakan bahwa ada dua asumsi dasar yang memandang keterkaitan antara SDM dengan pendidikan, yaitu: (1) pendapatan total seorang buruh merupakan sisa dari pendapatan total nasional dikurangi laba dari tanah dan sumber –sumber lain, (2). Nilai seorang manusia itu 20 kali besarnya pendapatan buruh pertahun.

Berdasar atas asumsi itu, maka sekarang pandangan bahwa pendidikan sebagai *human investmen* tampaknya sudah menjadi kesadaran umum setiap manusia yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Karena dengan melalui proses pendidikan, maka manusia akan menjadi pribadi yang matang dan dipenuhi dengan berbagai pengetahuan. Disamping itu, manusia kemudian juga bisa mengambil manfaat atas pendidikan yang telah dilaluinya. Menurut Cohn (1978) manfaat yang bisa diperoleh manusia secara pribadi ada dua, yaitu manfaat konsumsi dan manfaat investasi. Yang termasuk ke dalam manfaat konsumsi adalah produk atau jasa yang bisa memberikan kepuasan segera dalam satu waktu. Sedangkan yang termasuk manfaat investasi adalah kepuasan untuk masa datang.

Benefit of investmen yang akan diterima manusia terdidik akan semakin tinggi, jika pendidikan yang dilaluinya juga tinggi. Sehingga terkait dengan usaha memajukan suatu bangsa, maka selayaknya bangsa itu memperhatikan pendidikan tingginya. Karena sesungguhnya pendidikan tinggi adalah :

- a. Pendidikan Tinggi mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas amat tinggi.
- b. Pendidikan tinggi mempersiapkan profesional dalam berbagai bidang keilmuan untuk kepentingan pembangunan nasional bangsa itu.
- c. Pendidikan tinggi adalah tonggak *Perkembangan Civilization* manusia.
- d. Unesco mempromosikan Pendidikan Tinggi (Gaffar, 2009)

3. Prioritas Pendidikan Dalam Pembangunan Manusia

Dalam buku *Economics of education, Research and Studies*, disebutkan bahwa doktrin ekonomi yang memandang bahwa manusia memiliki nilai kepentingan yang sangat tinggi. Modal manusia (*human capital*) sebagai sumber utama kekuatan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dan pendidikan merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Oleh karena itu menjadi keharusan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka. Dengan pemilikan pendidikan yang tinggi, terlihat keunggulan para pekerja, seperti memahami bidang pekerjaannya, menghargai waktu, motivasi kerja tinggi sehingga memungkinkan mereka memiliki penghasilan yang tinggi dan kelas sosial yang bernilai tinggi di tengah-tengah masyarakatnya.

Saat ini, kebijakan pendidikan Indonesia memang tepat diarahkan pada peningkatan a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan c) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga hal inilah yang akan mempengaruhi wajah pendidikan nasional.(www.depdiknas.go.id). Apalagi jika melihat dari laporan UNDP tahun 2006, yang menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia di peringkat ke-108 dari 177 negara, menunjukkan bahwa wajah pendidikan kita sungguh masih sangat memprihatinkan.

Rendahnya angka index pembangunan manusia suatu bangsa dikarenakan masih belum meratanya akses pendidikan tinggi disamping persoalan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional yang perlu dipentingkan adalah pembangunan

manusianya melalui pembangunan pendidikan. Karena pendidikan akan menghasilkan manusia berkualitas. Sedang ukuran yang menentukan kualitas manusia ada beberapa aspek, seperti aspek kesehatan, pendidikan, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.

Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. (Tobing, <http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm>---11 juni 2009).

4. Konsep Pembiayaan Pendidikan

a. Sumber Dana

Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia memang terus meningkat, tetapi secara persentase masih sekitar 10 persen, lebih kecil dibanding dengan negara industri baru seperti Malaysia dan Korea Selatan yang alokasi anggaran pendidikannya rata-rata mencapai 20 persen. Demikian pula dari sudut GNP, periode 1968-1993, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ternyata secara rata-rata di bawah 2.5 persen, dibandingkan Malaysia dan Singapura masing-masing 10 persen dan 5 persen (Tobing, <http://www.theindonesianinstitute.org/janlabofile.htm>---11 juni 2009). Bahkan setelah UU Sisdiknas mengamantkan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan.

Dengan kata lain maka sesungguhnya alokasi dana pendidikan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 20% dari APBN, satu jumlah yang tampak banyak tapi sesungguhnya sangat sedikit, apalagi jika dilihat dalam perspektif kebutuhan pendidikan tinggi. Berbeda dengan Korea Selatan untuk satu lembaga pendidikan tingginya pemerintah mengalokasikan 6 % dari pendapatan nasional.

Sistem keuangan universitas di US. Menyesuaikan dengan sumber-sumber pendapatan dan konsep fundamental atas peranan social yang harus dijalankan oleh universitas. *Pertama*. model pembiayaan dengan dominasi

pemerintah, *kedua*. *Cost-recovery* dan *ketiga*. Model diversifikasi pendapatan. (Ziderman and Albreth, 1985),

Untuk model pembiayaan atas dominasi pemerintah menggambarkan sistem hubungan pembiayaan tradisional antara negara dengan universitas, yang sesungguhnya merupakan pengendalian negara atas universitas.

Model *cost-recovery*, merupakan model pembiayaan bersama antara pemerintah dengan universitas sebagai institusi “layanan” yang melayani intersekt masyarakat dan perekonomian secara luas.

b. Distribusi

Distribusi dana pendidikan jika mengacu pada Amerika bisa berbentuk bantuan pendidikan dengan jenis, seperti: 1) *Flat grant* (bantuan sama rata) adalah bantuan yang diberikan secara sama pada setiap warga negara bagian tanpa memperhatikan tingkat pendapatan pajak negara bagian tersebut, tetapi hanya berdasarkan pada jumlah siswa, 2) *Full State Funding* (Pendanaan Negara Bagian Penuh), yang diberikan berdasarkan pertimbangan efisiensi pendidikan, 3). *The foundation plan*, yang menitikberatkan pada upaya meminimalkan penggunaan pajak kekayaan daerah dan mengontrol pengeluaran seminimal mungkin pada sekolah distrik di setiap negara bagian, 4). *The guaranteed Tax Base* (GTB- Jaminan berdasarkan pajak, merupakan upaya tandingan dari program lainnya yang dilakukan negara bagian, 5) *Percentage Equilizing* (kesamaan prosentase), merupakan program yang orientasinya untuk memastikan bahwa negara bagian memberikan prioritas sumber penfapatannya kepada kebutuhan sekolah distrik, 6). *Power Equilizing* (Kesamaan kemampuan), adalah program yang memberikan kewenangan untuk mengawasi pengeluaran lokal yang didasarkan pada kemamkmuran dan pendapatan lokal. (Jones, 1985).

Distribusi dana pendidikan di Amerika serikat juga bisa dilihat dalam bentuk lain, sebagai berikut:

- 1) *School Lunch*- Makan siang sekolah, merupakan bantuan untuk anak sekolah dan petani dari kelompok masyarakat tidak mampu.
- 2) *Handicapped Aid*- bantuan penyandang cacat,
- 3) *Education block grant* (Jones, 1985).

Rossen (1999) dalam hal ini juga menyampaikan bahwa pengembalian pemerintah dari pajak yang dibayarkan penduduk adalah berupa program kesejahteraan untuk masyarakat seperti:

- 1). EITC (*The earned uncome tax credit*- Pendapatan Yang Patut Mendapatkan Kredit Pajak), merupakan subsidi pendapatan bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Subsidi ini dalam bentuk *kredit pajak*, yang mana secara sederhana merupakan sebuah reduksi dari pajak kewajiban (liability). Sebagai contoh, jika kamu berhutang kepada pemerintah 1.000 \$ dalam pajak pendapatan tetapi kamu juga memiliki pajak kredit 600 \$, maka kamu hanya akan membayar 400 \$.
- 2). SSI (*Supplemental Security Income*- Pendapatan Jaminan Keamanan Tambahan) merupakan program pemerintah federal sejak tahun 1972 yang menyediakan dasar manfaat bulanan untuk umur, orang buta dan orang lumpuh. Pada tahun 1997, rata manfaat yang harus dibayarkan tiap tahun untuk umur dewasa adalah 234 \$ Aset SSI yang diterima 2.000 \$ untuk individual dan 3,000 \$ untuk pasangan.
- 3). *Medicaid* merupakan program dengan belanja terbesar bagi individu dengan pendapatan rendah. Program ini ditetapkan tahun 1965 untuk perhatian kesehatan tertentu, seperti perawatan rumah sakit dan rawat jalan, laboratorium dan biaya sinar x serta layanan ahli pengobatan
- 4). *Food stamps and Child Nutrition* (Cap Makanan Dan nutrisi Anak), Cap makanan merupakan voucher isu pemerintah yang dapat digunakan hanya bagi pembelian makanan. (makanan hewan, alkohol, tembakau dan makanan import tidak termasuk). Pada tahun 1997, selama rata-rata bulannya 22,9 juta orang menerima cap makanan dengan total kemnfataan 20 M \$. Cap makanan secara langsung diberikan oleh pemerintah federal, Karena bagaimanapun administrasi dan distribusi cap makanan tidak bisa dikerjakan oleh negara bagian. Sedangkan untuk *Child Nutrition Programs*, Target dari program ini adalah menutrisi para ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun dan anak sekolah. Sekitar 25 juta anak menerima subsidi makan siang di sekolah setiap harinya (CWM, 1996, 924).

- 5). *Housing Assistance* (Bantuan rumah), Di Amerika Serikat subsidi penyedia rumah bagi orang lemah dimulai tahun 1937. Program rumah publik dikembangkan, dimiliki dan dijalankan oleh otoritas lokal yang beroperasi dengan subsidi kotamadya, daerah dan setiap daerah sebagai kelompok. Sampai saat ini ada sekitar 1,3 juta unit rumah publik.

c. Faktor Penentu Biaya Pendidikan

Beberapa penentu biaya pendidikan menurut buku *Managing Educational Cost*, yang ditulis oleh Coombs dan Hallak (.1972) yaitu 1).inflansi, 2) populasi penduduk, 3) meningkatnya permintaan rakyat, 4) demokratisasi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bantuan asing, 5). Persaingan antara kebutuhan prioritas publik, 6) pertumbuhan laju ekoonomi, 7). Sumber-sumber belanja pendidikan dan bagaimana ini direspon untuk mengubah pada pendapatan negara, dan 8) naik turunnya perdagangan luar negeri. Hal –hal inilah yang selanjutnya juga akan sangat mempengaruhi dalam penentuan prioritas pendidikan suatu bangsa.

5. Pembiayaan Pendidikan dan Masalahnya di Indonesia

Pada tahun 2005, Rektor UGM Jogjakarta Sofian Effendi sempat memberikan pidato resmi yang diikuti ratusan, bahkan ribuan orang, yang isinya merupakan pengakuan atas rendahnya kualitas perguruan tinggi kita pada umumnya. Menurut Pak Sofian, lemahnya dana pemerintah bagi pendidikan tinggi nasional mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan tinggi kita. Karena itu, sulit bagi perguruan tinggi nasional untuk memenuhi standar mutu internasional. Kemampuan keuangan nasional yang amat terbatas membawa dampak besar kepada rendahnya mutu pendidikan tinggi kita. Anggaran yang mampu disumbangkan pemerintah untuk pendidikan tinggi kepada 3,5 s/d 4 juta mahasiswa tahun anggaran 2005 ini hanya Rp 6,2 triliun. Padahal, anggaran yang diperlukan untuk mencapai standar mutu nasional adalah 72,4 triliun. Agar perguruan tinggi Indonesia masuk dalam barisan perguruan tinggi terbaik di Asia-Pasifik, setidaknya-tidaknya, biaya pendidikan 77 juta per mahasiswa per tahun atau lebih kurang empat kali standar nasional yang besarnya 18,1 juta per mahasiswa per tahun.(<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Wajah-Pendidikan-Tinggi>----10 juni 2009)

Garms, etc: (1978)menyatakan, bahwa masalah pembiayaan Pendidikan Tinggi (PT) antara lain secara umum di dunia, termasuk juga di Indonesia adalah:

- 1). Meningkatkan biaya perkuliahan universitas swasta
- 2). Mengadopsi sistem yang komprehensif untuk menolong mahasiswa yang memiliki pendapatan rendah dengan mengikuti pendidikan di swasta atau negeri
- 3). Memberikan beasiswa pada mahasiswa yang membutuhkan
- 4). Mengadopsi universitas yang sukses untuk diterapkan pada universitas negeri

Di Indonesia, selain persoalan anggaran pendidikan yang hanya 20 % dari APBN, persoalan lain juga muncul terkait PP 48 tahun 2008 yang menyebutkan:

1) biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 2) biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, 3) biaya pribadi peserta didik adalah biaya yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh peserta didik.

Artinya selain pemerintah maka masyarakat/wali siswa/siswa juga memiliki beban untuk menanggung biaya pendidikan yang ditempuhnya. Hal ini menjadi sulit jika dikaitkan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang semakin menurun pasca krisis moneter. Apalagi kalau sampai membiayai pendidikan tinggi.

6. Formulasi Prioritas (Alternatif) Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Keterbatasan Dana

Terbatasnya anggaran pendidikan yang hanya 20 % inilah yang memaksa kita untuk membuat skala prioritas. Ada prioritas utama, kedua dan sebagainya. Jika melihat kondisi kualitas manusia Indonesia, maka langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan dasar dan menengah pertama adalah tepat. Karena pendidikan inilah yang minimal harus dirasakan secara universal tidak hanya massal oleh masyarakat Indonesia. Artinya pendidikan universal merupakan prasyarat universal bagi manusia untuk bisa mengenal atau memahami persoalan-persoalan kehidupan rutinnya.

Akan halnya dengan pendidikan tinggi, pemerintah tidak secara eksplisit memunculkannya dalam skala prioritas. Sesungguhnya peluang memunculkan prioritas pendidikan tinggi sebagai prioritas alternatif pendidikan yang tak terelakkan lagi bisa dilihat berdasarkan:

Pertama. Berdasarkan Renstra Diknas, pada point 2 (peningkatan mutu, relevansi dan daya saing) maka jelas pendidikan tinggi termasuk di dalamnya. Artinya pendidikan tinggi juga menjadi prioritas berikutnya atas pembangunan pendidikan di Indonesia, tapi bukan dari segi kuantitas (akses kesempatan yang banyak ke masyarakat) tapi lebih kepada bagaimana mengusahakan pendidikan tinggi itu menjadi lebih bermutu, tingkat relevansinya dengan pasar tinggi sehingga menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang memiliki daya saing tinggi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional (daya saing global).

Kedua. Dalam konteks untuk menentukan prioritas pendidikan, maka hal ini berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Supaya pendidikan yang dijalankan bisa mengatasi pengangguran maka, perencanaan yang semestinya dilakukan adalah: 1) pendidikan direncanakan atas dasar *social demand approach*, 2). Model *economic return approach*, yaitu pendidikan dianalogikan sebagai proses produksi dan 3). Model *employment generation approach*, artinya pendidikan justru tidak akan berkontribusi bagi terjadinya pengangguran. Sedangkan pendidikan yang memiliki kontribusi besar dan final atas kebutuhan tenaga kerja adalah pendidikan tinggi. Berdasarkan konsep perencanaan ini, maka sesungguhnya penentuan prioritas pendidikan tinggi sebagai prioritas alternative pendidikan juga menunjukkan hal yang tak terelakkan lagi.

Ketiga. Dalam hal kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang relative tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah, maka Perguruan Tinggi (PT) tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Tapi bagaimana PT mencari sumber lain yang digelontorkan dalam bentuk program kesejahteraan untuk mahasiswa seperti mengambil dari *Corporate Social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Djarum dengan program Bhakti Pendidikannya dan lain sebagainya, Dana kesejahteraan dari Pemda I dan Pemda II. Ditambah dengan badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi sebagaimana amanat UU BHP.

Dalam hal membahas kemungkinan prioritas alternative pendidikan tinggi di Indonesia, maka hal khusus yang patut diperhatikan oleh PT terkait dengan masalah pembiayaan, sesungguhnya ada hukum pembiayaan di pendidikan tinggi diderived dari hal-hal berikut sebagaimana yang diajukan oleh Bowen (1981) yaitu:

- a) *The dominan goals of institutions are educational excellence, prestige and influence.*

Indikator excellence atau quality adalah rasio mahasiswa-fakultas, gaji fakultas, jumlah doctor dalam fakultas, jumlah buku di perpustakaan, jumlah peralatan dan fasilitas dan kualifikasi akademik mahasiswa.

- b) *In quest of excellence, prestige and influence, there is virtually no limit to the amount of money an institution could spend for seemingly fruitful educational ends.*
- c) *Each institution raises all the money it can*
- d) *Each institution spend all it raises*
- e) *The cumulative effect of the preceding four laws is toward ever increasing expenditure*

Jika dalam prakteknya nanti, PT memperhatikan hukum Bowen, maka persoalan keterbatasan dana dan kualitas pendidikan tinggi tidak akan menjadi masalah.

7. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dalam pembicaraan ini adalah bahwa sesungguhnya menformulasikan prioritas pendidikan sangat terkait dengan 1).inflansi, 2) populasi penduduk, 3) meningkatnya permintaan rakyat, 4) demokratisasi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bantuan asing, 5). Persaingan antara kebutuhan prioritas publik, 6) pertumbuhan laju ekoonomi, 7). Sumber-sumber belanja pendidikan dan bagaimana ini direspon untuk mengubah pada pendapatan negara, dan 8) naik turunnya perdagangan luar negeri.

Untuk kasus Indonesia, maka menformulasikan prioritas pendidikan (PT) sangat terkait dengan Rentra Pendidikan Nasional, pendekatan perencanaan pendidikan dan sumber alternatif pendanaan.

Daftar Referensi

- Bowen, Howard R (1981), *The Costs Of Higher Education. How Much Do Colleges and universities Spend Per student And How Much Should They spend?*, London: Jossey-Bass Publishers.
- Cohn, Elchanan,(1979), *The Economics Of Education*, Massachusets: Balinger Publishing Company.
- Coombs, Philip H and hallak, Jacques, (1972), *Managing Educational Costs*, New york: Oxford Univercity Press
- Coleman, (1979), *Equality of educational opportunity Economics of Education, Research and Education*.
- Gaffar, M.Fakry, (2009), *Membangun Pendidikan Untuk Masa Depan Bangsa*. Handout Perkuliahan Program Administrasi Pendidikan. SPS UPI
- , (2009), *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi*, Handout Perkuliahan Program Administrasi Pendidikan. SPS UPI
- Jones, Thomas.h, (1985), *Introduction To School Finance, technique and social Policy*, New York: McMillan Publishing
- Levi, Henry M, (1990), *Financing Recurrent Education: Strategies For Increasing Employment, Job Opportunities, and Productivity*, center For educational research and Innovation: Institute For Research on Educational Finance and governance (US): sage Publication
- PP. 48 tahun 2008.
- Rossen, Harvey.S, (1999), *Public Finance*, Singapura: Irwin Mcgraw-Hill
- Tobing, Elwin, (2009), *Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi*, tersedia, <http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm>---11 juni 2009
- (2009),*Masalah struktural Peningkatan Kesempatan Kerja*, tersedia di <http://www.theindonesianinstitute.org/janlabofile.htm>---11 juni 2009
- Walter etc, (19780, *School Finance, the Economic and policies of Public Education*, Englewoods Cliffs, New Jersey: Printece-Hall.Inc
- Ziderman, Adrian and Albreth, Douglas, (1985), *Financing Univercities In developing Countries*,



B. SCHOOL LEVY SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT (Analisis Probabilitas Ziswa sebagai Model School Levy ala Indonesia)

1. Pendahuluan

Masalah pendidikan yang dihadapi bangsa pada dasawarsa sekarang berkaitan dengan: 1) sistem manajemen nasional berbasis otonomi daerah, 2) pemborosan biaya, 3) infrastruktur pendidikan, 4) guru, 5) perluasan, pemerataan, dan keadilan dalam pendidikan, 6) kualitas, 7) *relevancy*, 8) pengelolaan dana, 9) manajemen kelembagaan perguruan tinggi, 10) manajemen perguruan tinggi (Gaffar, 2009: 2).

Mengenai poin ke lima, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia cukup memerhatikan. Jika pemerataan diartikan sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan '*equility*', saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendidikan wajar (wajib belajar) sembilan tahun '*compulsary education*'. Implikasi kebijakan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai setiap warga negaranya untuk bisa mengenyam pendidikan dasar, sehingga kebijakan ini juga didukung dengan kebijakan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS). Apa yang dilakukan pemerintah ini tidak lepas dari tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Di samping itu, jika pemerataan pendidikan diartikan sebagai *equity*, hal itu bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Jika konsep ini yang dimaksud, Indonesia masih jauh untuk mendapatkannya. Karena ada jenis-jenis sekolah tertentu yang masih bersifat elitis, seperti pendidikan anak usia dini atau yang paling mencolok adalah pendidikan tinggi yang tidak semua warga negara Indonesia memperoleh kesempatan untuk menikmatinya.

Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan *equality of outcome*. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang

membangun di mana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efisiensi.

Persoalan pemerataan '*equality*' di Indonesia sebenarnya sudah diatasi dengan kebijakan wajar 9 tahun dan disupport dengan BOS. Bahkan Wajar 9 tahun ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia merupakan prioritas utama agar pendidikan yang bersifat universal bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara Indonesia. Adapun persoalan *equity* yang belum merata, seperti pendidikan tinggi, diakibatkan antara lain oleh persoalan pembiayaan pendidikan tinggi yang relatif mahal.

Jika melihat peran penting pendidikan sebagai *human investment* yang itu tidak terjadi jika manusianya hanya mengenyam pendidikan rendah/ dasar/ menengah, semestinya persoalan klasik tersebut segera diatasi dengan mencari alternatif sumber pembiayaan pendidikan. Pencarian alternatif sumber pembiayaan pendidikan yang relatif baru bisa dilakukan dengan mencoba mempelajari konsep dari luar untuk kemudian dicermati dan dianalisis kemungkinan penerapannya untuk konteks Indonesia dan Islam secara umum sebagaimana konsep *school levy* di Amerika Serikat yang sudah cukup mampu membuktikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Tulisan ini memaparkan konsep *school levy* dalam pembiayaan pendidikan Islam, khususnya pembiayaan berbasis potensi umat Islam di Indonesia. Untuk lebih mudah memahami tulisan ini, penulis mengembangkan uraian konsep *school levy* dengan mengacu pada landasan potensi umat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia.

2. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman tentang *school levy* dalam pembiayaan pendidikan yang berbasis potensi umat, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pembiayaan pendidikan secara sederhana. Pembiayaan pendidikan, sebagaimana pendapat yang diutarakan Fatah (2000:) merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan pada upaya pendistribusian *benefit* pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Adapun hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa besar uang yang harus dibelanjakan (anggaran), darimana sumber uang diperoleh (sumber biaya) dan kepada siapa uang harus dibelanjakan (distribusi) (Cohn, 1979: 29).

Sesuai dengan pendapat Cohn di atas, persoalan pembiayaan pendidikan sesungguhnya berputar pada bagaimana memperoleh sumber dana, bagaimana mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan bagaimana mendistribusikan sesuai anggaran yang telah disusun. Dalam praktik pembiayaan pendidikan seringkali anggaran menyesuaikan dengan stok atau sumber dana yang ada. Dengan kata lain, anggaran disusun berdasarkan realitas ketersediaan sumber dana yang ada, artinya, anggaran disusun bukan berdasarkan pada kebutuhan real. Akibatnya dalam realisasi distribusi pembelanjaan dana pendidikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan akibatnya adalah pendidikan yang bermutu tinggi semakin menjauh dari jangkauan. Konteks ini yang sering disebut sebagai model penyusunan anggaran secara *top down*.

Idealnya, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan real (*bottom up*) pendidikan, kemudian diidentifikasi sekaligus dicari sumber dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selanjutnya didistribusikan untuk keperluan program sebagaimana tertera dalam mata anggaran. Dengan demikian, pemenuhan itu akan berimplikasi pada adanya jaminan terbentuknya pendidikan yang bermutu tinggi.

Persoalan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan prioritas program pendidikan apa yang menentukan besarnya anggaran, sesungguhnya berkaitan dengan kebijakan pembiayaan. Ghaffar (2009: 8) dalam hal ini melihat persoalan kebijakan pembiayaan '*financing policies*', di mana anggaran '*budget*' yang ada akan didistribusikan berdasarkan kebijakan alokasi '*allocation policies*' biaya kebutuhan berdasarkan prioritas program pendidikan '*education program priority*' yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks inilah, pihak manajemen harus mampu mencari sumber-sumber dana yang baru, melimpah dan eksistensinya selalu ada. Konsep *school levy* merupakan salah satu strategi untuk menemukan sumber pembiayaan pendidikan yang dimaksud.

Terlepas dari konsep dasar *school levy*, yang perlu dicermati adalah pembiayaan pendidikan dalam konteks keindonesiaan yang sudah jamak terjadi. Indonesia melalui beberapa regulasinya sudah mengatur sedemikian rupa persoalan yang

berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di antaranya sebagai berikut.

- a. UUSPN nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan BAB III menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 menyatakan (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 menyatakan (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 mengungkapkan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- b. Pasal 25 dan 33 UU No 2 tahun 1989. pasal 25 ayat 1 butir 1 “setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 33 disebutkan “pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik.
- c. PP No 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Pasal 1 menyatakan bahwa masyarakat diperlakukan sebagai patner pemerintah yang peranannya diharapkan tetap bertumpu kepada prinsip persamaan, pemerataan, dan keadilan dalam memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.
- d. PP. No. 48 tahun 2008, juga menyebutkan tentang pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat).

Beberapa regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang tidak secara tegas menyatakan bahwa pendidikan sebagai barang publik atau privat. Sebagai barang publik, pendidikan semestinya menjadi tanggung

jawab penuh negara untuk menyediakannya bagi warga negaranya, atau menjadi barang privat, di mana seluruh kebutuhan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat. Pada kenyataannya, pemerintah (negara) masih menanggung pembiayaan pendidikan, namun juga menggandeng tangan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam hal pembiayaan pendidikannya.

Negara dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan. Hanya saja, secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya masyarakat (umat) melihat potensi dirinya sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan. Namun untuk membuka mata bahwa masyarakat memiliki potensi besar tersebut, membutuhkan *tool* berupa konsep dari luar yang relatif sudah berhasil dilaksanakan di negara maju, yaitu konsep *school levy*.

3. Konsep Dasar *School Levy*

Pengertian umum *school levy* adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaan pendidikannya dari pajak (Kranz, 2004:1). Disebut *levy* karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai *school tax levies* atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai *school levy*. Di Amerika Serikat, sekolah-sekolah secara khusus mendapatkan biaya pendidikan yang bersumber dari pajak rumah, tanah, properti, serta kekayaan. Biasanya pajak-pajak ini dikhususkan untuk membiayai sekolah di komunitasnya sendiri-sendiri.

Informasi tentang *school levy* juga bisa dilihat dalam ketetapan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan *Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy* pada 3 Desember 2008, dengan apa yang disebut dengan *State School Levies*. Produk *state school levies* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan '*property tax*' untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi (situs web Wisconsin Department Revenue: <http://dor.wa.gov>).

Konsep *school levy* muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan sejumlah pengaturan, sebagaimana dijelaskan dalam situs web Department of Revenue Washington State (2009:1) sebagai berikut.

Property tax is the primary funding source for Washington's public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state School levy paid by all Washington property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district.....Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. This money is distributed to school districts throughout the state on a set formula.

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikkan, menurut Cagnetti (2009:1), *school levy* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a) Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti.
- b) Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 % akibat inflasi pada tahun sebelumnya.
- c) Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru.
- d) Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak.
- e) Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun.

Dari karakteristik tersebut, perolehan sumber biaya pendidikan yang langsung diterima oleh sekolah adalah jenis pajak properti. Penerimaan pajak ini langsung diterimakan oleh sekolah tanpa harus menunggu jenis pajak tersebut masuk ke dalam pundi-pundi negara, kemudian disusun sebagai sumber APBN/federal, kemudian didistribusikan berdasarkan prioritas anggaran negara kepada distrik-distrik. Berbeda dengan di Indonesia, perolehan anggaran yang 20% dari APBN diperoleh dari berbagai sumber (termasuk juga pajak) yang harus masuk terlebih dahulu dalam pundi-pundi negara, baru didistribusikan untuk kebutuhan negara. Dengan demikian, dalam konteks *school levy*, ada sumber keuangan negara yang diperuntukkan khusus untuk membiayai pendidikan yaitu pajak properti, di samping mendapatkan sumber lain dari negara.

Terkait dengan ini, Zulfa (2009:11-12) mensiasati terbatasnya anggaran 20% dengan membuat prioritas program pendidikan, yaitu membuat prioritas utama, kedua dan sebagainya. Jika melihat kondisi kualitas manusia Indonesia, maka langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan dasar dan menengah pertama adalah tepat. Karena pendidikan inilah yang minimal harus dirasakan secara universal tidak hanya massal oleh masyarakat Indonesia. Artinya pendidikan universal merupakan prasyarat universal bagi manusia untuk bisa mengenal atau memahami persoalan-persoalan kehidupan rutinnya.

Akan halnya dengan pendidikan tinggi, pemerintah tidak secara eksplisit memunculkannya dalam skala prioritas. Sesungguhnya peluang memunculkan prioritas pendidikan tinggi sebagai prioritas alternatif pendidikan yang tak terelakkan lagi bisa dilihat berdasarkan:

Pertama. Berdasarkan Renstra Diknas, pada point 2 (peningkatan mutu, relevansi dan daya saing) maka jelas pendidikan tinggi termasuk di dalamnya. Artinya pendidikan tinggi juga menjadi prioritas berikutnya atas pembangunan pendidikan di Indonesia, tapi bukan dari segi kuantitas (akses kesempatan yang banyak ke masyarakat) tapi lebih kepada bagaimana mengusahakan pendidikan tinggi itu menjadi lebih bermutu, tingkat relevansinya dengan pasar tinggi sehingga menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang memiliki daya saing tinggi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional (daya saing global).

Kedua. Dalam konteks untuk menentukan prioritas pendidikan, maka hal ini berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Supaya pendidikan yang dijalankan bisa mengatasi pengangguran maka, perencanaan yang semestinya dilakukan adalah: 1) pendidikan direncanakan atas dasar *social demand approach*, 2). Model *economic return approach*, yaitu pendidikan dianalogikan sebagai proses produksi dan 3). Model *employment generation approach*, artinya pendidikan justru tidak akan berkontribusi bagi terjadinya pengangguran. Sedangkan pendidikan yang memiliki kontribusi besar dan final atas kebutuhan tenaga kerja adalah pendidikan tinggi. Berdasarkan konsep perencanaan ini, maka sesungguhnya penentuan prioritas pendidikan tinggi sebagai prioritas alternative pendidikan juga menunjukkan hal yang tak terelakkan lagi.

Ketiga. Dalam hal kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang relative tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah, maka Perguruan Tinggi (PT) tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Tapi bagaimana PT mencari sumber lain yang digelontorkan dalam bentuk program kesejahteraan

untuk mahasiswa seperti mengambil dari *Corporate Social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Djarum dengan program Bhakti Pendidikannya dan lain sebagainya, Dana kesejahteraan dari Pemda I dan Pemda II. Ditambah dengan badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi sebagaimana semangat *entrepreneur university*.

4. Konsep *School Levy* dalam Perspektif Islam

Ide utama dalam praktik *school levy* adalah pembiayaan pendidikan dengan sumber utamanya diperoleh dari masyarakat (pajak properti). Artinya, masyarakat memiliki kepedulian untuk berbagi dengan anggota masyarakat di sekitarnya, termasuk berbagi kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Sedangkan pajak properti biasanya dikenakan untuk barang-barang mewah yang notabene pemiliknya adalah orang mampu/kaya. Orang kaya dan atau mampu dalam Islam adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan dan wajib menzakatinya jika sudah mencapai nishobnya. Artinya, ide utama *school levy* mirip dengan ide yang ada dalam konsep zakat, infak, sadakah, dan wakaf dalam Islam yaitu ide kepedulian terhadap sesama yang diwujudkan dengan saling berbagi.

Konsep zakat, infak, sadakah, dan wakaf (selanjutnya disingkat *Ziswa*) jelas memiliki nilai kepedulian sosial, termasuk persoalan pendidikan. Dalam konteks *school levy*, sumber pajak properti diperoleh dari masyarakat, dalam konteks *Ziswa*, juga demikian. Artinya, peruntukkan pemanfaatan *school levy* dan *Ziswa* sama-sama untuk kesejahteraan sosial. Perbedaannya, *school levy* peruntukkan dalam pembiayaan pendidikan tidak spesifik untuk kelompok dan kepentingan tertentu, sementara, *Ziswa* lebih khusus, yakni zakat yang memiliki kelompok khusus yang menjadi mustahiknya. Namun demikian jika dianalisis lebih lanjut akan ditemukan titik temu sebagai berikut.

a. Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu. Oleh karenanya, zakat memiliki kekhususan dalam distribusinya, yaitu hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam QS. 9/At Taubah ayat 60 dalam Tafsir Jalalein,

*Innamash Shadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiini wal 'aamiliina
'alaihaa wal mu'allafati quluubibuhum wa fir riqaab wal gharimiina
wa fii sabiilillaahi faridlatan minallaahi wa Allaahu 'aliimun hakiimun.*

Maknanya: sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya dan untuk budak-budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Oleh karena itu, peluang munculnya pemanfaatan zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan adalah dengan melakukan penafsiran lebih lanjut di kelompok mana yang bisa dijadikan celah untuk sumber pembiayaan pendidikan.

Dari delapan mustahik tersebut yang memiliki peluang masuk dalam pembahasan ini adalah kelompok fakir, miskin, dan fi sabilillah. Untuk lebih mengetahui bagaimana penafsiran para mufasir atas pemaknaan kata fakir, miskin, dan fi sabilillah berikut kami cuplikan beberapa pendapat.

- 1) Kata fakir dan miskin sebagaimana disebut dalam Tafsir Jalalain adalah:
 - 1) Fakir, mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka; dan 2) Masakin ‘orang-orang miskin’, mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka.
- 2) Pemaknaan fi sabilillah ‘untuk jalan Allah’ dalam tafsir Jalalain adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekali pun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Pemaknaan ini masih bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Tetapi jika diperhatikan Tafsir Al Mishbah, kata fi sabilillah dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah jamaah haji atau umrah. Berbeda dengan pendapat tersebut, sebagian ulama kontemporer memasukkan kelompok ini (fi sabilillah) adalah semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata sabilillah dari segi kebahasaan mencakup

segala aktivitas menuju jalan dan keridlaan Allah (Shihab, 2004).

Menurut Al Qardhawi, masih dalam tafsir *Al Mishbah*, makna fi sabilillah bisa diperluas maknanya dalam pengertian jihad. Kata jihad bisa dengan pena dan dengan lidah, sebagaimana bisa juga pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagaimana, bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa fi sabilillah dalam arti untuk membela dan meninggikan kalimat-Nya (Shihab, 2004).

Kata fi sabilillah dalam Tafsir Depag RI (2009: 140-141) dijelaskan perkataan sabilillah mempunyai dua arti, yaitu;

- 1) Arti khusus, yaitu orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin.
- 2) Arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridaan Allah seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah.

Para ulama empat madzhab berpegang pada pendapat pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus dan pengertian umum atas dasar kaidah ushul fiqh: *al 'ibrathu bi'umumil lafdzi laa bikhushuushis sababi*. (yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafadz (sesuatu nas) tidak pada kekhususan sebab (nas diucapkan/ diturunkan). Atas dasar tersebut, pembangunan atau pemeliharaan masjid dan madrasah demikian juga kegiatan ulama dan para mubaligh dapat diambilkan dari harta zakat.

Berdasarkan kedelapan golongan penerima zakat ini kemudian bisa dipilah menjadi dua kelompok besar, yakni:

- 1) Golongan penerima zakat langsung menjadi milik pribadi. Yang termasuk golongan ini, yakni: fakir, miskin, amil, orang yang menanggung hutang, muallaf dan musafir.
- 2) Golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan, terdiri atas: 1) Fi ar riqab, yaitu usaha membebaskan budak. Badan Amil Zakat secara langsung atau dengan perantaraan organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang

akan dijual oleh pemiliknya atau yang ada di pasar-pasar budak untuk dimerdekakan dan 2) *Fi sabilillah*, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas (Depag RI, 2009: 140-141)

Dari penjelasan tersebut, sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari zakat bisa diambilkan untuk tiga kategori, yaitu: fakir, miskin, dan *fi sabilillah*. Dalam pendistribusiannya, zakat sebagai alokasi biaya pendidikan adalah sebagai berikut.

Untuk biaya individu peserta didik terutama untuk biaya operasionalnya maka peserta didik yang masuk kategori fakir dan miskin dapat dialokasikan dari zakat mal. Sedangkan untuk pendidik yang tidak dibayar, dapat dialokasikan dari bagian *fi sabilillah* sebagaimana pendapat Qardhawi dan Tafsir Jalalain. Tetapi jika guru sudah dibayar tetapi sangat tidak mencukupi, dapat diambilkan dari bagian zakat untuk kelompok fakir. Adapun untuk biaya investasi seperti pembelian lahan, penyediaan sarana pendidikan (gedung sekolah), dan biaya pemeliharannya dapat diambilkan dari bagian *fi sabilillah* sebagaimana Tafsir Al Mishbah.

Kesimpulan dari pembahasan zakat ini adalah bahwa sumber biaya pendidikan kategori biaya operasional, pemeliharaan, dan investasi bisa diperoleh dari zakat mal dengan mengacu kepada 3 kelompok yang berhak yaitu fakir, miskin, dan *fi sabilillah*. Jika kemudian masyarakat (lokal saja) mampu memberdayakan potensi umat Islam dari zakat tersebut, persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia bisa diatasi, sebagaimana di Amerika masyarakat lokalnya mengalokasikan sumber pembiayaan pendidikan dari pajak properti masyarakatnya, tanpa terlalu menggantungkan alokasi dari Pemerintah Pusat (federal). Inilah yang penulis maksud dengan zakat sebagai pengganti *tax* dalam konteks *school levy*. Indonesia khususnya masyarakat muslimnya memiliki peluang untuk menerapkan *school levy*.

b. Wakaf, Infak, Shadaqah, dan Sejenisnya

Jika persoalan tentang zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan terkait dengan peruntukannya yang khas masih menimbulkan pro dan kontra akibat perbedaan penafsiran, peluang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan sumber pembiayaan pendidikan dari wakaf, infak, shadaqah, nadzar, hibah, hadiah, dan yang sejenisnya. Sumber-sumber tersebut

menjadi sangat potensial dan besar, mengingat potensinya yang sangat besar serta tidak adanya ketentuan khusus tentang siapa pelaku, siapa yang berhak, kapan dan di mana dilaksanakan, sehingga ini akan memudahkan pengelolanya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan bisa mulai mengelolanya dari masyarakat sekolah dan wali, jika sudah berhasil kemudian meluas ke masyarakat lokal (daerah; desa/kecamatan/kabupaten) di mana sekolah itu berada. Inilah yang penulis maksud dengan wakaf, infak, shadaqah, dan lainnya sebagai pengganti *tax* dalam konteks *school levy* sebagaimana zakat. Dengan demikian, Indonesia khususnya masyarakat muslimnya memiliki peluang untuk menerapkan *school levy*. Bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat nonmuslim dengan potensi uang puasa yang dikumpulkan oleh jama'ahnya juga bisa menjadi sumber pembiayaan yang berpotensi besar mengatasi persoalan minimnya alokasi anggaran pendidikan dari Pemerintah Pusat.

Pertama. Wakaf. Dalam upaya menggunakan wakaf sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan, maka yang harus dicermati dan diperhatikan betul adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara *terus menerus* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasar atas hal tersebut, maka jika wakaf digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan, asalkan pihak lembaga pendidikan memanfaatkan harta wakaf tersebut secara *terus menerus* (seperti biaya investasi, atau operasional sekolah tanpa harus menghilangkan harta asal wakaf) bukan bersifat konsumtif, maka wakaf bisa dipilih sebagai sumber pembiayaan pendidikan.

Sebagai pembanding, jika kita kaji pemanfaatan wakaf sejak zaman Rasulullah hingga zaman dinasti-dinasti Islam disalurkan untuk kemasla-

hatan umat (agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya). Dalam hal ini, Karim (2010: 2) secara runtut menampilkan perkembangan pemanfaatan wakaf sebagai berikut.

- 1) Zaman Rasulullah SAW, wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW dengan wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid. Kemudian, Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha. Selanjutnya, sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan Dar Al-Anshar. Pelaksanaan wakaf selanjutnya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.
- 2) Zaman Dinasti Umayyah. Masa itu Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy menjadi Hakim Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
- 3) Zaman Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *shadr al-Wuquuf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.
- 4) Zaman Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa ini, perkembangan wakaf cukup menggembirakan. Hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan

oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara Fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab, harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi kemudian banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa 'qaryah' untuk pengembangan Madrasah Mazhab asy-Syafi'iyah, Madrasah al-Malikiyah, dan Madrasah Mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan Madrasah Mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

- 5) Zaman Dinasti Mamluk. Wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah 'kiswatul ka'bah'. Raja Shaleh bin al-Nasir membeli Desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai Kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali. Bahkan, pada perkembangan berikutnya, wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa disahkannya Undang-undang Wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H). Dengan undang-undang tersebut, Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafkan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

- a) pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa;
 - b) wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah);
 - c) kepentingan masyarakat umum.
- 6) Zaman Dinasti Turki Utsmani. Sejak abad ke-15, Kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah merapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada Dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.

Berdasarkan informasi tersebut, jelas menunjukkan bahwa wakaf benar-benar sudah digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan dalam Islam. Artinya, Indonesia dengan warga negaranya yang mayoritas pemeluk Islam, memberikan kontribusi untuk menyuplai ketersediaan sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan terjamin keberadaannya. Sehingga persoalan terbatasnya sumber dan atau anggaran pendidikan dari pemerintah bisa diatasi dengan memberdayakan potensi wakaf.

Trend Wakaf Tunai. Harta untuk diwakafkan seiring dengan perkembangan ekonomi juga memunculkan variasi harta wakaf, termasuk adalah wakaf tunai (uang). Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, tepatnya tanggal 8 Januari 2010. Pencanangan gerakan ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dan momentum penting bagi gerakan wakaf produktif di Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa

Indonesia. Di Indonesia, isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) dan Departemen Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tgl 7-8 Januari 2002 (Agustianto, 2010: 1).

Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai '*cash wakaf*' telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-Hadits* telah menetapkan fatwa bahwa masyarakat muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di luar negeri, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan, Pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tidak berorientasi pada keuntungan. Mereka tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam memanaj dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya. Pembaharuan dilakukan pada sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Belum lama ini, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada 2 hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf & manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.

Di Indonesia, selain gerakan wakaf yang dicanangkan presiden, praktik wakaf tunai dan produktif sebenarnya sudah dilakukan di Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur. Lembaganya dibiayai wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile-service*. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi semangat hidup sehat kaum dhuafa, bahkan melalui kajian kekinian, muncul model-model pemberdayaan wakaf untuk beberapa kebutuhan. Penelitian Asyari (2009: 12) melalui kegiatan “The 9 th Annual Conference On Islamic Studies (ACIS)”, yang dilaksanakan di Surakarta dari tanggal 2 s.d. 5 Nopember 2009, disebutkan bahwa pemberdayaan wakaf di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto di Kabupaten Agam, antara lain dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.

- 1) Harta-harta wakaf yang berada di Kecamatan IV Angkek pada mulanya berbentuk sarana ibadah (masjid, musholla dan langgar seluas 18.830 M², tanah lapangan 640 M², dan lembaga pendidikan seluas 7.361 M²).
- 2) Harta wakaf dapat dijadikan salah satu peningkatan ekonomi umat melalui model pemberdayaan, di antaranya memproduktifkan:
 - a) Tanah wakaf yang berbentuk sawah dapat ditanami padi, cabe, tomat, kentang, sayur-sayuran, dan palawija lainnya;
 - b) Tanah wakaf yang terdekat sumber air dapat dibuat sebagai kolam ikan, tambak ikan, tempat pencucian mobil dan karpet;
 - c) Tanah wakaf yang terletak di pemukiman penduduk dapat dibuat sebagai rumah tempat tinggal yang bisa dikontrakkan, toko

yang menjual kebutuhan harian dan pasar tradisional yang bisa menyediakan kebutuhan harian masyarakat dan menampung hasil pertanian;

- d) Tanah wakaf yang terletak dekat masjid dapat dibuat tempat potong rambut, toko buku serta perlengkapan ibadah, lembaga keuangan syari'ah (BMT);
- e) Tanah wakaf yang terdapat di pinggir jalan dapat dibuat untuk tempat penjualan bahan bangunan, rumah yang memiliki dwifungsi, toko yang menjual alat-alat kendaraan, membuat rumah untuk disewakan sebagai kantor instansi pemerintah/swasta, membuat tangki minyak/menjual minyak ketengan;
- f) Tanah wakaf lapangan, bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan olah raga.

Pemberdayaan harta wakaf dari Asyari jika yang memiliki (harta wakaf bersama) dan mengelola adalah masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, hasilnya akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial. Pada gilirannya, sekolah betul-betul bisa gratis. Berarti, persoalan *equality*, *equity*, efektivitas, dan efisiensi pendidikan dapat teratasi.

Potensi sumber pembiayaan pendidikan lain dari khasanah Islam yang tidak terikat aturan ketat syar'i sangat besar pula jumlahnya, seperti shadaqah, infak, hibah, nadzar dan lainnya, jelas-jelas memiliki potensi untuk dibayarkan. Sumber-sumber tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional, sehingga bisa menjadi sumber yang produktif. Dalam hal ini, sekolah bersama masyarakat bisa mengambil peran tersebut.

Kedua. Infaq. Menurut bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut isilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq berbeda dengan zakat, iinfaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan (Surono, 2012: 1).

Melihat karakteristik infaq yang demikian, maka infaq memiliki peluang besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan

yang potensial. Persoalannya hanya terletak pada pengaturannya. Pengaturannya yang dimaksud di sini adalah bagaimana infaq itu diatur waktunya, frekuensi pengeluarannya, pendistribusiannya dan tentu saja siapa yang akan mengelolanya. Paling tidak ada 3 pengatur yang mungkin bisa dijadikan sebagai pengelola infaq, yaitu pemerintah, masyarakat terbatas (community bukan society) dan langsung lembaga pendidikan/sekolah/madrasah/perguruan tinggi/pesantren. Jika pemerintah sebagai pengaturnya maka bisa diterapkan sebagaimana konsep baitul mal dalam sejarah Islam. Sedangkan jika masyarakat sebagai pengaturnya maka sangat bergantung pada tingkat kemandirian masyarakat untuk melakukan pengaturan atas pengumpulan & pendistribusian infaq bagi pendidikan. Terakhir adalah jika sekolah atau lembaga pendidikan yang mengambil alih pengaturan infaq maka akan lebih sederhana terkait dengan masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar yang terlibat baik langsung (seperti wali murid) maupun tidak langsung. Bahkan kelebihanannya penarikan dan pendistribusian infaq bisa lebih fokus, sekaligus untuk merangsangnya bisa dengan target / capaian mutu lembaga pendidikan seperti apa yang akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari infaq.

Ketiga. Shadaqah. Selain zakat, wakaf dan infaq sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang ada dalam Islam, adalah shadaqah. Masih menurut Surono (2012:1), secara terminologi syariat batasan shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain.

Mengingat tidak terikatnya subyek, waktu, kadar bahkan jenis sesuatu yang akan dishadaqahkan, maka shadaqah memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia. Artinya berbeda dengan zakat dan wakaf yang hanya kelompok orang tertentu yang bisa melakukannya, maka shadaqah bisa dilakukan oleh setiap orang muslim, baik mampu maupun tidak mampu. Jika setiap muslim Indonesia bershadaqah Rp.1000 saja setiap minggunya yang khusus dialokasikan untuk biaya pendidikan, maka berapa banyak dana yang terkumpul untuk biaya pendidikan warga bangsa ini.

Keempat. Jenis Lain. Selain beberapa sumber dalam potensi umat Islam untuk pembiayaan pendidikan sebagaimana yang sudah dikemukakan di muka, sesungguhnya masih ada potensi umat yang tersembunyi. Hanya saja sifatnya sangat terbatas, sering tidak diketahui (karena sering tidak dipublikasikan), dan pelaksanaannya yang insidental. Potensi yang dimaksud adalah nadhar. Bahkan nadhar tidak jarang jumlahnya bisa lebih besar dari infaq dan shadaqah. Selanjutnya sejenis dengan karakteristik nadhar adalah hibah atau hadiah. Dua jenis ini juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan jika sanggup menggantinya.

5. Peluang Penerapan School Levy Berbasis Potensi Umat

Probabilitas utama yang menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk bisa menerapkan *school levy* adalah karena banyaknya penduduk Indonesia yang menganut agama Islam dan dalam Islam terdapat zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan sebagainya. Sumber ini jika disubstitusi dalam konteks *tax* 'pajak' propetinya *school levy*, bisa digunakan sebagai sumber dana penyelenggaraan pendidikan.

Jika kita mencermati praktik pembiayaan pendidikan masa khilafah, akan diperoleh informasi sebagaimana pendapat An Nabhani dalam Al Jawi (2008: 2). An- Nabhani menyatakan bahwa biaya pendidikan dari baitul mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan:

- a) Untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain;
- b) Untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya;

Kondisi di atas berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dicari sumber pembiayaan pendidikan yang baru, yaitu dengan pengambilan dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan sejenisnya.

Pajak memang berbeda dengan zakat, infak, shadaqah dan lainnya. Tetapi tujuannya sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Jika di negara asal konsep *school levy* sumber pembiayaan pendidikan dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia; di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak

dialokasikan secara khusus dari awal untuk menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infak, shadaqah dan lainnya. Jika dasar penerapannya seperti ini maka keuntungan yang diperoleh dengan mengadopsi sistim *school levy* adalah:

- a) Tumbuhnya kesadaran masyarakat mampu/ yang berkewajiban membayar zakat untuk bisa mendistribusikan zakat yang dibayarkannya secara tertib, teratur dan termenej dengan baik,
- b) tumbuhnya kesadaran untuk menumbuhkan budaya berinjak, shadaqah dan lainnya bukan atas tuntutan sebagai bentuk kesalehan peribadi tetapi juga untuk kesalehan sosial. Karena dengan pendidikan yang baik (karena terjamin pembiayaannya) maka akan tercipta masyarakat yang baik,
- c) munculnya sikap kemandirian masyarakat untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan roda perokonomian akan berjalan dengan baik.

6. Simpulan

Mencari sumber dana yang cukup untuk pembiayaan pendidikan dalam konteks Indonesia menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah –dengan sekian banyaknya hal yang harus dibiayai– memiliki keterbatasan untuk bisa memberikan alokasi dana pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. Model *school levy* yang diterapkan oleh negara maju seperti Amerika Serikat dianggap berhasil dalam mengelola pembiayaan sekolah sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian maju. Tidak salah, jika Indonesia mencoba mengadopsi model tersebut guna keberhasilan pendidikan kita.

Terdapat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Potensi yang dimiliki umat Islam adalah potensi Ziswa (zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan sejenisnya). Potensi besar ini jika dikelola dengan baik oleh institusi pendidikan bersama masyarakat akan menghasilkan tidak hanya tercukupinya kebutuhan pendidikan yang bermutu, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat. Inilah konsep *school levy* yang bisa dikembangkan sedemikian rupa dalam pembiayaan pendidikan berbasis umat Islam di Indonesia yang dapat dikelola sehingga tersedia melimpah dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustianto. 2010. "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat". Tersedia dalam: <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Al Jawi, M. Shiddiq. 2008. "Pembiayaan Pendidikan dalam Islam", tersedia dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011-02-02
- Al Mahalli, Imam Jamaludin, dan As Suyuti, Imam Jalaludin. 2003. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzuul. Jilid 1*.
- Asy'ari. 2009. "Pemberdayaan Harta Wakaf dan Peningkatan Ekonomi Umat (Tawaran Model Pemberdayaan Harta Wakaf di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto di Kabupaten Agam)", Makalah. The 9 th Annual Conference On Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 Nopember 2009.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economic of Education*. Billinger Publishing Company Cambridge Massachussetts.
- Cagnetti, Linda. 2009. *School Levies, Informed Voter Are Better's Votter. Here's to primer to Help You*. http://enquirer.com/editions/2002/04/28/loc_school_levies.html
- Departemen Agama RI. 2009. *Al Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fatah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Gaffar, M. Fakry. 2009. "Pembiayaan Pendidikan Nasional", Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- , 2009. "Ekonomi Pendidikan", Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Karim. 2010. "Sejarah Perkembangan Wakaf", 18 Juni 2010, tersedia dalam: <http://bawamif.org>, diambil 12 Maret 2011.
- Karti, Surono.(2012). *Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah*.
- Kranz, Cindi. 2009. "Schools Levy Activist Compete to Attention Enquirer Staff Writer" dalam "School Levy Activists Compete for Attention", Sunday, September 26, 2004, http://www.enquirer.com/editions/2004/09/26/loc_schoollevies26.html--- 16 April 2009, School Levy).
- NN. 2009. "Perbedaan Pendidikan di Rusia dan Amerika", Tersedia dalam :<http://sarahdaulaydiary.blogspot.com/>, diambil tanggal 1 februari 2011.

- NN. 2008. "State School Levies Credit", Wisconsin Department of Revenue Division of Research and Policy December 3, tersedia dalam: 2008 <http://www.revenue.wi.gov>, diambil tanggal 1 Februari 2011
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, volume 5, Jakarta: Lentera Hati.
- Washington State Department of Revenue, (tt), "State School levy Property Tax", tersedia dalam: <http://dor.wa.gov>, diambil tanggal 1 Februari 2011.
- Zulfa, Umi (2009). *Mencari Alternatif Prioritas Pendidikan Berdasarkan Anggaran 20%*. Makalah. Mata Kuliah Ekonomi Pendidikan. Prodi Administrasi Pendidikan. SPS UPI Bandung



C. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia)

1. Pendahuluan

Pendidikan sebagai *human investment* hingga saat ini di Indonesia masih berkuat dengan persoalan efisiensi, efektivitas, *equality* dan *equity*. Tidak terkecuali juga dengan madrasah sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah yang sudah diakui sama dengan sekolah (:bukan sub sekolah sejak UU Sisdiknas N0 20 tahun 2003), merekomendasikan pada setiap penyelenggara, pengelola dan administrator pendidikan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan secara efisien. Sedangkan peningkatan efisiensi sistem pendidikan (:sistem kecil/madrasah) bisa dilakukan jika sistem pendidikannya melakukan pemanfaatan secara efektif pada tingkat primer maupun sekunder atas fungsi produktivitas administrator sekolah/madrasah (Anwar, 2004: 126). Situasi seperti ini kemudian menghajatkan adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bagi madrasah untuk melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus mampu melayani setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara merata dan setinggi-tingginya. Jika jaminan ini bisa diberikan oleh madrasah maka madrasah akan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul, efektif sehingga image madrasah semakin positif di mata masyarakat.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara Negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaan pendidikannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud memaparkan konsep manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (:Islam) sebagai satu alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia.

2. Pembahasan

a. Konsep Madrasah Bermutu

Konsep mutu sangat beragam. Mutu bisa dimaknakan *fitness for use* (Joseph Juran), *conformance to customer requirement* (P.B.Crosby), *meeting customer expectations* (Armand V Feigenbaum), *conformance to customer satisfaction* (K. Ishikawa) (Wahab dan Kusumastuti, 2009). Sedangkan secara sederhana mutu di sini dimaknakan sebagai kepuasan pelanggan. Pelanggan dalam konteks ini adalah pelanggan madrasah, yaitu siswa, orang tua, pengguna lulusan, guru, karyawan, rekanan institusi, sekolah lain serta pihak yang terkait dengan pelayanan madrasah. Sehingga madrasah bermutu adalah madrasah yang dinilai “bermutu” oleh para pelanggannya. Karena dalam konteks ini pelanggan sesungguhnya adalah penentu akhir mutu. Tanpa mutu maka madrasah tidak akan eksis.

Terkait dengan mutu, dalam konteks pendidikan di Indonesia, baik sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi, telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan standar mutu. Artinya madrasah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk bisa dikatakan bermutu minimal

harus memenuhi standar mutu dan akan lebih bagus lagi jika melampaui standar tersebut. Dalam PPN0.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan *menjamin mutu* pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dari 8 standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh madrasah, maka keberadaan standar pembiayaan menjadi salah satu penentu ketercapaian pemenuhan 7 standar mutu yang lain. Hal ini terjadi karena tanpa biaya maka pendidikan tidak berjalan, terlepas dari siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pendidikan (pemerintah atau masyarakat). Demikian juga jika biaya yang tersedia banyak tetapi tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi in-efisiensi sistem pendidikan. In-efisiensi sistem pendidikan menunjukkan ketidakbermutuan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mutlak bagi setiap madrasah yang menghendaki institusi dan sistem pendidikan yang akan dijalankannya menjadi bermutu, maka praktek manajemen pembiayaan yang baik tidak bisa dihindarkan. Sedangkan salah satu persoalan yang selama ini mewarnai tidak baiknya manajemen pembiayaan pendidikan adalah keterbatasan sumber biaya. Sehingga tawaran manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah berbasis potensi umat yang bisa diupayakan oleh madrasah menjadi salah satu obat bagi persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia umumnya dan madrasah/ sekolah Islam khususnya.

b. Pembiayaan Pendidikan Dalam Konteks Indonesia

Secara umum pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pendistribusian *benefit* dan beban pendidikan yang harus ditanggung masyarakat (Cohn, 1979: 29). Demikian juga halnya dengan Nanang Fattah (2000:23) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang *dihasilkan dan dibelanjakan* untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang,

pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. Sehingga sangat jelas bahwa “pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa *sumber-sumber* saja, tetapi juga *penggunaan* dana-dana secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan itu makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia “ (Zymelman dalam Anwar, 2004: 126).

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan berarti menyangkut besaran uang yang akan dibelanjakan (anggaran), sumber uang yang diperoleh (sumber biaya) dan sasaran pembelanjaan (distribusi) yang semestinya didasarkan pada prioritas program pendidikan (*education program priority*). Dalam dataran realitasnya, kesulitan yang dihadapi oleh administrror sekolah/madrasah bukan pada kebijakan penyusunan anggaran dan distribusi, tetapi lebih kepada persoalan pencarian sumber biaya yang bervariasi, melimpah dan berkesinambungan.

Indonesia adalah negara yang sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk memperhatikan sektor pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsanya, sebagaimana Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat, yaitu:

“...untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Komitmen tersebut selajnutnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan pembiayaan pendidikan yang akan mensupport lancarnya proses pendidikan yang ada di Indonesia. Regulasi-regulasi yang dimaksud antara lain:

- 1) UUSPN nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dan BAB III menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4 menyatakan (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 menyatakan (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 mengungkapkan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

- 2) PP. No. 48 tahun 2008, juga menyebutkan tentang pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat), dengan jenis pembiayaan di sekolah/madrasah berupa biaya investasi, operasional dan pribadi.

Dari dua contoh regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup konsisten dalam persoalan pendidikan dengan cara melakukan pengaturan sedemikian rupa atas pembiayaan pendidikan. Walaupun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kalau Indonesia tidak cukup konsisten dengan salah satu pasal dalam amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak warga negara menunjukkan kewajiban negara. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi, sehingga pendidikan menjadi barang publik bukan privat, melalui *compulsary education* (wajib belajar). Namun kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda bahkan ketidakmampuan negara kemudian menggandeng swasta/masyarakat untuk ikut menanggung biaya pendidikan bagi warga negara Indonesia.

c. **Ziswa Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Dalam salah satu tulisan yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis *School Levy*”, Zulfa mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki

sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah Ziswa (zakat, infak, sadakah dan wakaf). Dalam konsep Ziswa ada nilai kepedulian sosial termasuk kepedulian dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan (*equity*), maka dengan adanya Ziswa bisa mendapatkan pendidikan seoptimal mungkin.

Secara sepiantas Ziswa “seolah” hanya diperuntukkan bagi mustahiknya. Sehingga kemungkinan menjadi sumber biaya pendidikan yang melimpah bagi kebanyakan peserta didik di madrasah seakan kecil. Tetapi jika ditelusuri dan dicermati secara teliti, sesungguhnya potensi itu sungguh sangat besar. Berikut sedikit penjelasan yang dirangkum dari tulisan Zulfa sebelumnya:

Pertama. Zakat. Zakat sebagai sebagai sebuah kewajiban untuk dan bagi orang-orang tertentu, bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6. Peruntukkan Zakat Untuk Biaya Pendidikan

Golongan	Sumber Biaya Pendidikan	Distribusi Biaya Pendidikan
Fakir	Zakat al mal	1) Biaya individu/operasional peserta didik 2) Guru, jika honor yang ada tidak mencukupi
Miskin	Zakat al mal	1) Biaya individu/operasional peserta didik
Fisabilillah	Zakat al mal	1) Guru yang tidak dibayar

Kedua. Infak. Infak sebagai harta yang dikeluarkan sesuai perintah Islam tidak memiliki aturan nishab, penerima dan waktu. Oleh karena itu, infak memiliki peluang yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Namun begitu, perlu pengaturan dalam hal waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas (*community*) dan lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan (madrasah) sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan operasional).

Ketiga. Sadakah. Menurut terminologi syariat, sadakah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam hal ini sadakah bisa

menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.

Keempat. Wakaf. Wakaf dalam penggunaannya juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan “secara terus –menerus” untuk kepentingan umum. Pemberdayaan harta wakaf (; termasuk wakaf tunai) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya bisa digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial baik untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi.

d. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Penerapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat

Membangun madrasah bermutu mutlak menghajatkan adanya pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit. Karena biaya pendidikan akan menentukan terbentuknya kualitas *in put* pendidikan (*seven M*), *process*, *output* bahkan *outcomes* pendidikan. Pada gilirannya manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel “mutlak” diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.

Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), implementasi/pelaksanaan pengeluaran keuangan (*accounting*) dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (*auditing*) (Jones, 1985: 5; dan Fahrurrozi, 2012:229). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi penentu keberhasilan pembangunan madrasah bermutu. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan berupa *budgeting*, *accounting* dan *auditing* yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu yang menjadi fokus manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat, adalah adanya

akuntabilitas pada setiap fungsi manajemennya; akuntabilitas penyusunan rencana keuangan (*budgeting*)/ Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), akuntabilitas implementasi/*accounting*, dan akuntabilitas evaluasi (*auditing*).

Akuntabilitas *Budgeting* bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan (Fahrurrazi, 2012: 232). Dari enam faktor ini, jelas menunjukkan bahwa akuntabel tidaknya madrasah sangat ditentukan oleh kemampuan madrasah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan Ziswa. Pengelolaan ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya membutuhkan akuntabilitas internal dan eksternal tetapi juga akuntabilitas akhirat. Karena peruntukkan Ziswa harus benar-benar pada kelompok yang tepat dari komponen input; baik raw input/siswa maupun tenaga pendidik.

Accounting pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah cukup akuntabel dalam melaksanakan prosedur pengeluaran biaya pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.

Auditing atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi: a) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, b) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.

Jika madrasah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang memiliki nilai kepercayaan tinggi bagi madrasah adalah jika madrasah melakukan akuntabilitas internal yaitu pengelolaan biaya pendidikan disosialisasikan kepada seluruh warga

sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat adanya penekanan nilai komitmen, loyalitas, rasa memiliki dan kecakapan yang didasarkan pada adanya tanggungjawab profesional. Berbeda jika madrasah melakukan akuntabilitas eksternal yang hanya menekankan adanya kontrol hirarkis dari manajemen (Kande dalam Fahrurrazie, 2012: 234-235). Dengan demikian praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat/ziswa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel internal-eksternal-dunia-akhirat akan relatif memberikan jaminan bagi kebermutuan madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi dan melahirkan out put dan outcomes yang bermutu amat tinggi.

3. Penutup

Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi umat berupa Ziswa, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Daftar Referensi

- Anwar, Moch.Idochi.(2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Cohn, Elchanan.(1979). *The Economic Of Education*. Bilinger Publishing Company Cambridge Massachussetts.
- Fattah, Nanang.(2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya
- Jones, Thomas. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and School Policy*. New York: McMillan Publishing Co.

- Fahrurrozi. (2012). *Manajemen Keuangan Madrasah*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.229
- Wahab, Abdul Azis dan Kusumastuti, Diah. (2009). *Penjaminan Mutu*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Zulfa, Umi.(2012). *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djai Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.239-254



D. Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy (Studi di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap)

1. Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia merupakan komponen strategik yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bermutu tidaknya praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komponen pembiayaan pendidikan. Melihat begitu strategiknya peran pembiayaan pendidikan, maka negara lewat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Landasan yuridis ini diperkuat dengan PP. No. 48 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak

lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat).

Pengaturan ini penting dilakukan agar terjamin kebermutuan dari sekolah khususnya mutu pembiayaan pendidikan sebagai salah satu dari 8 standar (mutu) pendidikan nasional sebagaimana ter jelaskan dalam PP.N0.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan *menjamin mutu* pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dengan adanya regulasi tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia, idealnya persoalan pembiayaan pendidikan yang berujung kepada tidak efektif, tidak efisien dan tidak bermutunya pendidikan di Indonesia semestinya tidak akan muncul, setidaknya bisa diminimalisir. Tetapi pada kenyataannya, persoalan tersebut masih banyak muncul. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil amatan atas kondisi real di Indonesia dari berbagai sumber, seperti: masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah walaupun sudah ada kebijakan BOS, BSM dan sebagainya. Masih banyak sekolah/madrasah yang tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai. Akibat persoalan ini, maka seolah-olah pendidikan di Indonesia masih berkutut dengan persoalan akses pendidikan. Padahal sesuai dengan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional (Renstra Diknas) maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia meliputi: a) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, b) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan c)Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Tiga pilar ini juga berkutut pada persoalan “mutu”.

Sebenarnya jika kita sejenak menengok sekilas tentang praktek pembiayaan pendidikan masa khilafah sebagaimana pendapat An Nabhani dalam Al Jawi (2008), ternyata pembiayaan pendidikan dimenej oleh Baitul Mal yang kemudian secara garis besar dibelanjakan (*distribution*) untuk 2 kepentingan. *Pertama*, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. *Kedua*, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama,

perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan pada masa itu berasal dari umat yang dikelola oleh baitul mal. Jika hal ini dilakukan dalam konteks ke-Indonesia-an, maka persoalan anggaran pendidikan yang hanya 20% dari APBN bisa teratasi, serta tidak adanya alasan rendahnya mutu pendidikan karena terbatasnya sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditepis, karena hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan potensi sumber pembiayaan pendidikan umat Islam di Indonesia yang sangat melimpah seperti dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, dan sedekah.

MI Ya BAKII Kesugihan di Karangjengkol, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan), di mana satu kecamatan terdiri dari 16 MI Ya BAKII, maka sudah sepantasnya tidak lagi berkutat dengan persoalan pembiayaan pendidikan karena bisa memanfaatkan sumber dari Ziswa ditambah juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai macam perusahaan/industri yang ada di kabupaten Cilacap, seperti Pertamina, Holcim, Pengolahan Ikan dan sebagainya. Sehingga prinsip dari penyelenggara untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat bisa diwujudkan oleh madrasah-madrasah yang mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakatnya melalui pengembangan sekolah efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik sekaligus krusial untuk segera dilakukan agar bisa membuka wacana baru tentang potensi ditemukannya sumber pembiayaan pendidikan yang baru, melimpah, keberlangsungannya tinggisekaligus dekat dengan masyarakat sehingga mampu memediasi kemandirian sekolah menuju sekolah efektif.

Adapun **Ruang lingkup dan gambaran permasalahan:** Penelitian ini dibatasi pada kondisi empirik dan konsep *ziswa-school levy* untuk kemudian dikembangkan model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis *ziswa-school levy*. Dengan **Asumsi yang digunakan:** Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a) semakin banyak sumber pembiayaan pendidikan maka semakin terjamin proses pendidikan yang bermutu, b) potensi sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia yang kaya dan sustainable bisa diberdayakan dari Ziswa (Zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) sebagaimana *school levy* di AS.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap?, 2) Bagaimana temuan model manajemen pembiayaan pendidikan

berbasis *Ziswa-school levy* di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap? Dan 3) Bagaimana formulasi pengembangan model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis *Ziswa-school levy*? Sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) tujuan umum penelitian ini adalah “*ditemukan dan dikembangkannya alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis Ziswa-School Levy*”. 2) Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini ada 3, yaitu: a) a. Mendeskripsikan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap, b) Menganalisis temuan model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis *Ziswa-school levy* di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan Cilacap dan c) Menyusun atau menformulasikan pengembangan model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis *Ziswa-school levy*. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah: hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kemanfaatan berupa penambahan khasanah keilmuan khususnya tentang manajemen pendidikan dan secara praktis memberikan sumbangan real tentang alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan yang kaya, melimpah, sustainable serta menjamin kebermutuan pendidikan di Indonesia.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Berbicara tentang konsep manajemen pembiayaan pendidikan setidaknya berbicara tentang pembiayaan pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan dan fungsi-fungsi (operatif) manajemen pendidikan itu sendiri. Menurut Nanang Fatah pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup; gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervise pendidikan (Fattah, 2000). Kemudian konsep kedua adalah konsep manajemen pembiayaan pendidikan atau Manajemen Keuangan Pendidikan merupakan aplikasi konsep dan unsur- unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi/ satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara sistematis dan sinergis (Sa'ud, 2009).

Dalam konsep manajemen pembiayaan pendidikan maka akan muncul konsep fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap penting yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), implementasi/ pelaksanaan pengeluaran keuangan (*accounting*) dan tahap penilaian atau evaluasi keuangan (*auditing*) (Jones, 1985: 5; dan Fahrurrozi, 2012:229). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan implementasi merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan evaluasi merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

b. Konsep School Levy Dalam Pembiayaan Pendidikan

Konsep school levy sebenarnya ditemukan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di Amerika. Pengertian umum *school levy* adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaannya dari pajak (Kranz, 2004:1) Disebut *levy* karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai *school tax levies* atau sekolah yang mengambil dana pajak untuk memenuhi keperluan pendidikan. Dari pendapat Kranz tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai *school levy*. Artinya konsep school levy dalam manajemen pembiayaan pendidikan sesungguhnya berbicara dalam konteks sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

Informasi tentang *school levy* juga bisa dilihat dalam ketetapan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan *Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy* pada 3 Desember 2008, dengan apa yang disebut dengan *State School Levies*. Produk *state school levies* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan '*property tax*' untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 untuk tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan serta pajak kekayaan pribadi (situs web Wisconsin Department Revenue: <http://dor.wa.gov>).

Konsep *school levy* muncul sebagai akibat pembagian antara dana pusat (Pemerintah Federal) dengan lokal (Pemerintah Distrik). Selama ini, pajak properti dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah distrik melalui negara bagian dengan sejumlah pengaturan, sebagaimana dijelaskan dalam situs web Department of Revenue Washington State (2009:1) sebagai berikut:

Property tax is the primary funding source for Washington's public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state School levy paid by all Washington property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district....Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. is money is distributed to school districts throughout the state on a set formula. (Jones, 1985).

Sebagai sebuah konsep yang sudah efektif dipraktikkan, menurut Cagnetti, *school levy* memiliki karakteristik sebagai berikut

- 1) Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, terutama penarikan pajak properti.
- 2) Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 % akibat inflasi pada tahun sebelumnya.
- 3) Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru.
- 4) Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak.
- 5) Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun (Cagnetti, 2009)

c. Konsep Ziswa dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Jika di negara asal konsep *school levy*, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pajak terutama pajak property, maka jika diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia; di mana masyarakat mayoritas Islam berada bukan dalam negara Islam, yang implikasinya tidak hanya membayar pajak tetapi juga zakat dan lainnya, sedangkan pajak tidak dialokasikan secara khusus dari awal untuk menjamin pendidikan yang bermutu, maka pajak tersebut bisa diganti dengan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan lainnya.³

Apalagi dalam khasanah Islam, praktik ziswa sebagai sumber pembiayaan pendidikan juga bisa ditemukan misalnya pada masa kekhalifahan Islam abad IV H.⁴ Bahkan pada masa khalifah Umar dan Utsman, pembiayaan pendidikan seperti untuk memberi gaji kepada guru, muadzin dan imam sholat jama'ah, diambilkan dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari *Hizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara), demikian pendapat Rahman (1995), Azmi (2002) dan Muhammad (2002) dalam Al Jawi (2011).⁵ Artinya pada masa sahabat sumber pembiayaan pendidikan bisa dari *Hizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Sehingga tidak heran pada masa abad ke IV H, kekhalifahan Islam telah mampu memberikan pendidikan gratis pada rakyatnya.

d. Konsep Sekolah Efektif

Sekolah sebagaimana organisasi lain akan disebut sukses dibangun jika sekolah menjadi organisasi yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai (Akdon, 2007: 70). Artinya sekolah akan dikatakan sebagai sekolah efektif jika sekolah dapat mencapai tujuan-tujuannya melalui aktivitas yang sudah dilakukannya.

e. Hasil Penelitian Terdahulu

Laporan hasil penelitian Fahrurrozi yang dipublikasikan dalam jurnal Media Pendidikan (2012: 232) tentang manajemen pembiayaan pendidikan madrasah di kota semarang menyampaikan bahwa: a) dalam melaksanakan fungsi budgeting, madrasah telah melaksanakan hal-hal: (1) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, (2) b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, (3) c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, (4) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, (5) sumber dana yang variatif dan (6) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan. b) dalam melaksanakan fungsi accounting madrasah melaksanakan: (1) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, (2) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, (3) ada buku kontrol pemasukan, (4) ada buku kas/ pembukuan keuangan, (5) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan (6) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan. Kemudian

c) pelaksanaan fungsi auditing, hal-hal yang sudah dilaksanakan madrasah adalah: (1) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, (2) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.

Dilihat dari kajiannya, maka penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama berbicara tentang manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah. Tetapi titik perbedaannya adalah penelitian Fahrurrozi tidak mendasarkan diri pada pengembangan model pembiayaan pendidikan madrasah yang berbasis ziswa sekaligus *school levy*.

f. Hubungan Masalah Penelitian, Kerangka Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan paparan tersebut, maka persoalan sulitnya madrasah mencari alternatif sumber pembiayaan pendidikan, maupun hasil penelitian terdahulu bisa diurai dan dicari solusinya jika penelitian ini dilakukan, sehingga akan menghasilkan temuan model sekaligus pengembangan model konseptual dari konsep ziswa dan *school levy* sebagai alternatif sumber pembiayaan madrasah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan khususnya fungsi *budgeting*.

4. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu proses pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *in-depht interview*, observasi dan dokumentasi dengan tetap memperhatikan keabsahan data. Sehingga pada proses ini menggunakan triangulasi data. Sedangkan untuk memperkaya data dilakukan perpanjangan waktu penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data dengan membuat kodifikasi berdasarkan fokus dan turunannya dari setiap aspek dalam pertanyaan penelitian yang juga didasarkan pada proses penggalian data. Baru setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif, yang sesungguhnya dilakukan sejak dari awal, selama dan setelah penelitian secara interaktif.

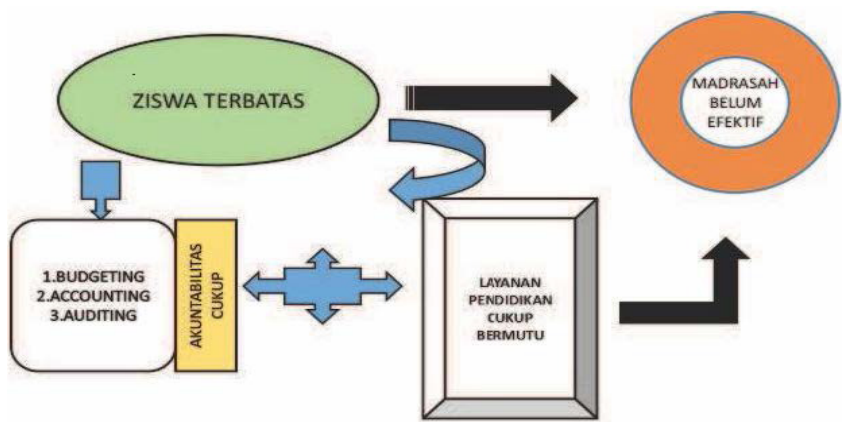
Kemudian selain menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang dipilih adalah R and D yang mengacu dari Borg and Gall (1983: 626),⁶ maka

penelitian ini memiliki tahapan sebagai berikut:a). Penelitian dan pengumpulan informasi, b).perencanaan, c). Pengembangan produk, d). Uji lapangan awal, e). Revisi produk utama, f). Uji lapangan lanjut, g). Revisi produksi operasional, h). Uji lapangan operasional, i). Uji lapangan akhir, j). Diseminasi dan implementasi. Tetapi penelitian ini pengembangan (development) yang dilakukan hanya sampai kepada pengembangan produk akhir berupa Model manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis ziswa-school levy sebagai model manajemen pembiayaan pendidikan. Jadi tidak sampai kepada desiminasi dan implementasi mengingat terbatasnya waktu.

5. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

a. Temuan Model

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka temuan model konseptual atas penelitian ini adalah sebagaimana bisa dilihat dalam gambar berikut.



Bagan. 24. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dari model temuan tersebut diperoleh informasi bahwa MI Ya BAKII Karangjengkol dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan yang menyebabkan madrasah efektif belum sepenuhnya terwujud. Hal-hal yang dimaksud adalah:

- 1) Fungsi –fungsi manajemen pembiayaan pendidikan dilaksanakan hanya samoai tingkat “cukup akuntabel”
- 2) Pelaksanaan fungsi budgeting, masih minim sumber dana dan belum memanfaatkan ziswa secara optimal (ziswa terbatas). Padahal ziswa

merupakan sumber dana pendidikan yang sangat berlimpah, kaya dan sustainable.

- 3) Akibat dari pemanfaatan ziswa yang terbatas, maka layanan pendidikan yang bermutu belum sepenuhnya terwujud (cukup bermutu).
- 4) Akibat kedua adalah terbentuknya madrasah belum efektif.

b. Model Pengembangan Konseptual

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disusun alternatif model konseptual yang bisa ditawarkan, yaitu Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif. Model ini dikembangkan dengan melandaskan diri pada teori-pikir dan empirik.

Landasan pikir pertama berangkat dari teori bahwa pendidikan bermutu akan bisa diberikan kepada peserta didik jika madrasah mampu memenuhi dan mengembangkan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan. Standar mutu pendidikan yang dimaksud adalah 8 standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah (Permendiknas).

Landasan kedua, salah satu standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan akan bisa berpengaruh terhadap kebermutuan layanan pendidikan jika dimenej dengan baik dan akuntabel. Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dan akuntabel adalah manajemen pembiayaan yang melaksanakan seluruh fungsinya secara akuntabel sesuai dengan indikator yang telah ditentukan (Fakhrurozie, 2012).

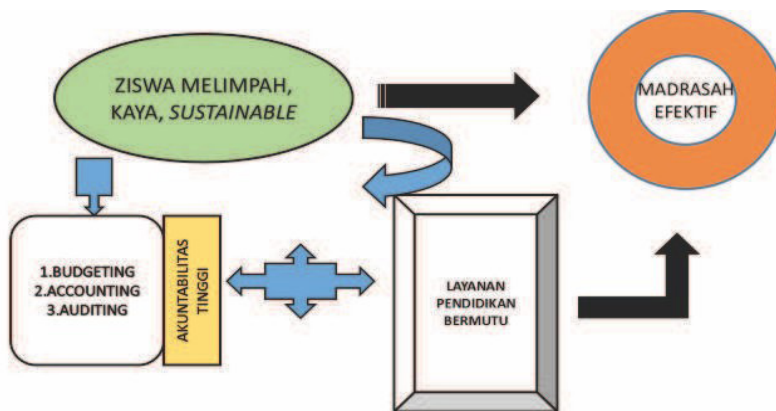
Landasan ketiga. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik semestinya memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan sustainable. Idealnya sumber dana (*Financing Sources*) pembiayaan pendidikan bisa diperoleh melalui pajak (*tax*), APBN, APBD, Grants, kontributor dan *loan* (pinjaman),⁷ atau jika merujuk pada PP No. 48 Tahun 2008, maka sumber pendanaan pendidikan bisa berasal dari anggaran Pemerintah Pusat (APBN), anggaran pemerintah daerah (APBD), dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat). Mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis

umat Islam, maka pengadaan sumber dana bisa memanfaatkan potensi ekonomi umat berupa ziswa (zakat, infaq, sadakah dan wakaf)

Landasan keempat, keefektifan madrasah banyak ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu yang mengacu kepada 8 standar sekaligus diback up oleh sumber dana dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan bermutu. Sehingga berkontribusi bagi naiknya minat belajar (kehadiran siswa lengkap), antusiasme belajar tinggi, guru konsisten melaksanakan tugasnya termasuk selalu memberi sekaligus menilai pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sebagai latihan maupun pengayaan, mempertinggi ragam dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan selalu mendapatkan dukungan masyarakat dan orang tua. Di mana ciri-ciri ini merupakan indikator sekolah efektif (Sergiovani dalam Umiarso dan Gojali,2011).

Landasan kelima, landasan empirik dari temuan penelitian tentang praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol yang hanya cukup akuntabel serta sumber dana pendidikan terbatas menyebabkan layanan pendidikan tidak bermutu tinggi, berdampak pada gelar “madrasah efektif” belum sepenuhnya bisa diraih.

Berdasarkan landasan pikir-teoritik dan empirik, maka disusunlah pengembangan model konsptual sebagaimana bagan berikut:



Bagan. 25. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa Berorientasi Madrasah Efektif

Sebagai model konseptual yang baru ditawarkan, jelas model ini berupaya untuk mengatasi kelemahan yang ada di lapangan. Sebagaimana

temuan penelitian bahwa praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII memiliki dua kelemahan utama yaitu belum akuntabel, belum memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan sustainable dan belum fokus pada pencapaian madrasah efektif.. Oleh karena itu model konseptual yang baru ini adalah model manajemen pembiayaan pendidikan yang harus memiliki **karakteristik**:

- 1) Seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan harus **akuntabel**
- 2) Sekolah harus memiliki **sumber dana** pendidikan berbasis umat yang **kaya, melimpah dan sustainable** yaitu berbasis siswa.
- 3) Fokus layanan pendidikan yang bermutu berdampak pada pencapaian **madrasah efektif**.

Ketiga karakteristik yang sekaligus menjadi syarat efektifnya praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu mewujudkan madrasah efektif-madrasah bermutu, merupakan tesis berdasarkan hasil analisis temuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Manajemen pembiayaan pendidikan yang **akuntabel** akan mempengaruhi terbentuknya layanan pendidikan yang bermutu dan madrasah efektif.
- 2) Manajemen pembiayaan pendidikan yang memiliki **sumber dana kaya, melimpah dan sustainable** mampu mempertinggi mutu layanan pendidikan.
- 3) Mutu layanan pendidikan yang optimal akan berdampak pada predikat **madrasah efektif**.

6. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, maka bisa ditarik simpulan bahwa “Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan cukup akuntabel, dan belum memanfaatkan siswa sebagai sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah dan sustainable”. Berdasarkan simpulan tersebut, maka dikembangkan model konseptual “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Siswa Berorientasi Madrasah Efektif”, yang memiliki tiga karakteristik: akuntabel, sumber dana melimpah, kaya, dan sustainable serta fokus pada madrasah efektif.

Daftar Referensi

- Albab, Ulul, (2011), *Perbandingan Kebijakan Pendidikan Amerika Serikat – Indonesia*, tersedia dalam: <http://muhlis.files.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011
- Al Jawi, M. Shiddiq. 2008. “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam”, tersedia dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011-02-02
- Alma, Bukhari dan Hurriyati, Ratih (Eds), (2008), *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima*, Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Moch.Idochi.(2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Cagnetti, Linda (2009), *School Levies, Informed Voter Are Better's Votter. Here's to primer to Help You*.
- Depdiknas, (2001), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1, Konsep dan Pelaksanaannya*. Jakarta: diknas Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama.
- Fattah, Nanang, (2012), *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam Konteks Penerapan MBS*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Fahrurrozi, (2008), *Kepemimpinan Pendidikan Visioner-Transformasional*, makalah, Perkuliahan,, Program Doktorat Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Komariyah, Aan Dan Triatna, Cepi, (2006), *Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Khusnuridlo, Moh, (2010), *Sumber-sumber Pendapatan Sekolah*, tersedia dalam: <http://www.khusnuridlo.com>, diambil tanggal 2 februari 2011.
- Gaffar, M. Fakry. 2009. “Pembiayaan Pendidikan Nasional”, Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jones, omas H, (1985), *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, New York: McMillan Publishing Company.

- Johns, Roe L., Morphet, Edgar L and Alexander, Kern (1983), *The Economic and Financing of Education*. 4th Edition, New Jersey: Prentice Hall, inc
- M.Bird, Richard, (1990) "Tax Policy and Economic Development" tahun 1990. Mulyasa, E, (2002), *Manajemen Berbasis Sekolah*, bandung: Remaja Rosdakarya Nurhadi, Mulyani A, (1993), *Efisiensi Pendidikan*, Yogyakarta: FIP/IKIP Yogyakarta
- Zulfa, Umi.(2012). *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy*. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djati Bandung Bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia.
- _____.(2013), *Membangun Madrasah bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)*. Jurnal Kependidikan. Vol.1 N0.1 Nopember 2013. Kelompok Kajian Pendidikan Ikatan Alumni STAIN Purwokerto.
- _____.(2013), *Alternatif Model Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Pengembangan Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi*. Cilacap: Ihya Media



E. Dimensi Ekonomis Kursus Bahasa Jepang Bago Calon Tenaga Kerja Indonesia

1. Rasionalisasi Program

Dengan munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 2003 semua maka pendidikan non formal di masyarakat, seperti kursus-kursus, bimbingan dan lain sebagainya dengan berbagai bentuk yang berbeda, kedudukannya sama dengan pendidikan formal. Hal ini jelas terjelaskan dalam pasal yang ada dalam UU Sisdiknas tadi, yaitu bahwa jalur pendidikan di Indonesia adalah formal, non formal dan in formal.

Sebagai sebuah kegiatan pendidikan sebagaimana pendidikan yang lain, maka pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah pun memiliki nilai ekonomis (*economic values*) bagi peserta didiknya. Berapa besarnya nilai ekonomi,

baik diukur dalam proses mencapai tujuan pendidikannya (biaya proses) maupun nilai manfaat (*benefit*) atau *Return of Investment*-nya (ROI) setelah pendidikan selesai yang bisa diambil oleh lulusan pendidikan formal. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mencoba melihat sebuah pendidikan non formal di sebuah daerah, yaitu Lembaga Kursus Bahasa Jepang Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia” terkait dengan dimensi ekonomisnya khususnya seberapa besar *return of investment*nya dan nilai *benefit*-nya Untuk memberikan arahan, tulisan ini mencoba membahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran program pendidikan; kursus bahasa Jepang bagi calon tenaga kerja Indonesia di Jepang?
- b. Berapa banyaknya biaya pendidikan yang diperlukan sampai selesainya program?
- c. Berapa biaya keseluruhan yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan kursus dan mendapatkan pekerjaan di Jepang?
- d. Bagaimana *return of investment* maupun *benefit* program yang dihasilkan atas program kursus bahasa Jepang tersebut?

2. Deskripsi Program Kursus Bahasa Jepang Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

a. Tujuan Program

Lembaga Kursus Bahasa Jepang Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon TKI ini memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang cukup baik sebagai syarat untuk bisa bekerja di negeri Jepang. Kursus yang khusus disediakan bagi TKI pria ini, keberadaannya muncul sebagai salah satu bentuk layanan dari sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di wilayah kota kecil paling selatan Jawa Tengah, yaitu Cilacap. Setiap kali kegiatan berjalan, sekitar 100 orang calon TKI yang menjadi esertanya.

b. Rincian Pelaksanaan Program

- 1) Waktu. Program ini dilaksanakan selama tiga bulan menjelang keberangkatan calon TKI ke Jepang.
- 2) Beban sks = 4 sks (2 pertemuan/hari x setara 2 jam)
- 3) Kebutuhan Tutor. 1 rombongan belajar (20 calon TKI) : 1 tutor. Sehingga 1 kali penyelenggaraan (100 TKI) dibutuhkan 5 orang tutor.

c. Budget Program.

- 1) Kebutuhan pengadaan materi. 1 buku panduan materi x 100 TKI x Rp. 20.000 = Rp. 2.000.000,-
- 2) Fee tutor = 1 orang x 5 rombongan belajar x 2 pertemuan x 12 minggu x Rp. 100.000 = Rp. 12.000.000,-
- 3) Makan Calon TKI selama di penampungan. 3 kali x 90 hari x 100 orang x Rp. 6.000 = Rp. 162.000.000
- 4) Makan tutor : 5 orang x 2 kali x Rp. 15.000 = Rp.150.000 x 90 hari = Rp.13.500.000
- 5) Gaji pengelola: 3 orang x Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000
- 6) Saving penyelenggara = Rp. 500.000 x 100 peserta = Rp. 50.000.000
- 7) Biaya ujian. 1 kali x 100 orang x Rp. 10.000 = Rp.1.000.000,
Jumlah total = Rp. Rp. 240. 500.000, (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah),

3. Analisis Biaya Penyelenggaraan Program Kursus Bahasa Jepang Bagi Calon TKI

Jika jumlah Keseluruhan kebutuhan dalam satu kali penyelenggaraan kursus berarti = Rp. 240. 500.000, (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka kita akan mengetahui berapa besarnya biaya penyelenggaraan untuk sekali program/program maupun per peserta kursus. Sekaligus juga bisa diketahui berapa biaya total yang diperlukan untuk kursus dan untuk satu keberangkatan kerja ke Jepang per orangnya.

- a. Biaya Program Kursus/Orang. Jika jumlah total setiap kali penyelenggaraan adalah Rp. Rp. 240. 500.000, untuk 100 orang, maka bisa diketahui biaya pendidikan/kursus setiap 1 orang TKI adalah $\text{Rp. } 240.500.000 / 100 \text{ orang} = \text{Rp. } 2.405.000$ (Dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
- b. Biaya Total Program Kursus dan Keberangkatan Kerja/Orang. Biaya pendidikan Rp. 2.405.000 sesungguhnya menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap calon TKI berupa biaya keberangkatan ke PJTKI dan agen luar sebesar @ Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Jika dalam satu keberangkatan program kursus ada 100 orang maka biaya total kursus dan keberangkatan adalah $100 \text{ Orang} \times \text{Rp. } 35.000.000 = \text{Rp. } 3.500.000.000$ atau setara dengan Rp.35.000.000/orang

4. Analisis *Return Of Invesment* dan *Benefit* Kursus Bahasa Jepang Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

a. *Return Of Invesment*

Berdasarkan atas biaya kebutuhan untuk menghasilkan lulusan, sebesar Rp. 2.405.000, atau biaya total per orang calon TKI Rp. 35.000.000, maka selanjutnya bisa dikomparasikan dengan *return of investmen*-nya yang akan diperoleh lulusan. Lulusan dari program ini adalah mereka yang akan bekerja di perusahaan (elektronik) di Jepang, di mana gaji per bulannya rentang Rp. 12.000.000 – Rp. 15.000.000. Artinya jika dibandingkan, dengan besarnya pendapatan mereka selama satu kontrak saja (2 tahun = 24 bulan), maka bisa dihitung *return*-nya adalah $2 \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 12.000.000 - \text{Rp. } 35.000.000 = \text{Rp. } 541.000.000$. inilah ROI dari pendidikan non formal ini. Artinya nilai pengembaliannya lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan dan biaya untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga tidak heran jika program pendidikan formal seperti ini banyak diminati oleh masyarakat. Ini gambaran secara kasar dan awam.

b. Analisis Manfaat

Menurut Levin berkaitan dengan *human capital*, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih dikarenakan oleh *human capitalnya*. Di mana kualitas penduduk menjadi penentunya. *Human capital* yang dimaksud di sini adalah memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan (termasuk teknologi dan sains dengan kegiatan pendidikan sebagai *human investmen*) dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan Negara. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa. *Pertama*. Jika kondisi *human capital* itu tetap, maka kesejahteraan tinggi, jika berubah-ubah maka sebaliknya. *Kedua*. Kesejahteraan itu selalu berubah-ubah bagi keluarga yang dinamis dan ini berefek pada *human capital* yang terus meningkat.

Disamping itu, Cohn (1979) dalam hal ini juga menyatakan bahwa ada dua asumsi dasar yang memandang keterkaitan antara SDM dengan pendidikan, yaitu: (1) pendapatan total seorang buruh merupakan sisa dari pendapatan total nasional dikurangi laba dari tanah dan sumber –sumber lain, (2). Nilai seorang manusia itu 20 kali besarnya pendapatan buruh pertahun.

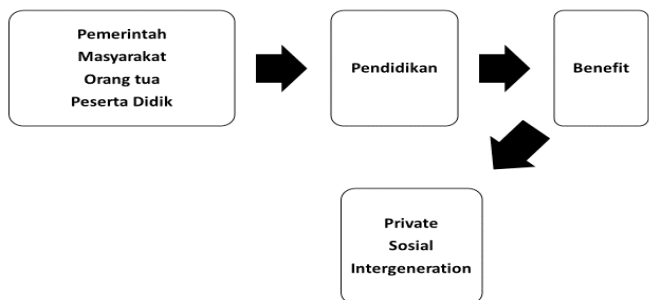
Berdasar atas asumsi itu, maka sekarang pandangan bahwa pendidikan sebagai *human investmen* tampaknya sudah menjadi kesadaran umum setiap manusia yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Karena dengan melalui proses pendidikan, maka manusia akan menjadi pribadi yang matang dan dipenuhi dengan berbagai pengetahuan. Disamping itu, manusia kemudian juga bisa mengambil manfaat atas pendidikan yang telah dilaluinya. Menurut Cohn (1978) manfaat yang bisa diperoleh manusia secara pribadi ada dua, yaitu manfaat konsumsi dan manfaat investasi. Yang termasuk ke dalam manfaat konsumsi adalah produk atau jasa yang bisa memberikan kepuasan segera dalam satu waktu. Sedangkan yang termasuk manfaat investasi adalah kepuasan untuk masa datang.

Benefit of investmen yang akan diterima manusia terdidik akan semakin tinggi, jika pendidikan yang dilaluinya juga tinggi. Oleh karena itu tulisan ini akan melanjutkan atas analisis manfaat atau benefit dari pendidikan.

Melakukan analisis biaya manfaat atas sebuah pendidikan, baik yang formal, maupun in formal dan non formal sesungguhnya kita membicarakan tentang manfaat dari pendidikan tersebut. Berikut pendapat Fakry (2008) tentang manfaat pendidikan (*Educational Benefits*):

Jelasnya bahwa manfaat pendidikan atau benefits pendidikan adalah hasil investasi pendidikan dalam jangka panjang. Manfaat pendidikan yang diperoleh dari sebuah proses pendidikan nantinya ada yang bersifat: 1). pribadi, artinya diterima langsung oleh peserta didik itu sendiri dan ada pula yang bersifat 2). Kemasyarakatan, artinya masyarakat juga akan menerima hasil pendidikan seseorang itu dalam berbagai bentuk. Dalam kasus penyelenggaraan program kursus Bahasa Jepang untuk calon TKI, seorang lulusannya memiliki kemanfaatan atas program pendidikan yang telah ditempuh selama 3 bulan sebanding dengan Rp. 541.000.000/ Rp. Rp. 2.405..000 = Rp. 224.948.02. jadi manfaat yang diperoleh peserta program kursus nantinya setelah dua tahun adalah 224. 948 kalinya dari biaya yang diperlukan di awal kegiatan program. Dan jika dibandingkan dengan keseluruhan biaya program kursus dan biaya keberangkatan, maka besarnya manfaat yang diperoleh per peserta program adalah Rp. 541.000.000/ Rp. 35.000.000 = Rp. 15.457,143 atau 15.457 kali dari biaya yang diperlukan untuk mrngikuti program dan keberangkatan. Sungguh keleipatan yang

sangat banyak. Apalagi jika kemudian dilipatkan jumlah kontrak kerjanya, maka akan kelihatan semakin besar manfaat yang diperoleh oleh masing-masing peserta program kursus, yaitu mendapatkan kesejahteraan yang tinggi. Disamping itu manfaat sosialnya adalah jumlah pengangguran berkurang dan semakin menambah devisa Negara dari sector TKI.



Bagan.26. Beneficiaries Pendidikan

Setelah kita mengetahui dari benefit pendidikan dari program kursus bahasa Jepang ini, maka benefeceries pendidikan itu sendiri atas program kursus bahasa epang adalah sebagaimana terjelaskan dalam bagan di atas. Artinya benefit akan dirasakan oleh *private* (pribadi peserta didik) yaitu calon TKI untuk negeri tujuan Jepang, *social* (masyarakat) dan *intergeneration*.

Terkait dengan benefit pendidikan inilah, maka benefit juga bisa diukur. Maka kemudian dalam analisis pembiayaan pendidikan ada istilah analisis benefit pendidikan. Dalam konteks kasus ini; kursus bahasa Jepang bagi calon TKI maka bisa diketahui beberapa hitungan akan benefit pendidikan/ kursus menurut Jac Fitz-enz and Barbara Davison sebagai berikut:

a. *Benefit Expense Percent* (Persentase Biaya Manfaat)

$$BE = \frac{TB}{TE}$$

TE

BE = persentase biaya manfaat

TB = total biaya dari semua biaya program manfaat,

TE = biaya operasi total.

Dalam konteks ini berarti

$$BE = \frac{Rp. 3.500.000.000,}{Rp. 2.405. 000}$$

$$= Rp. 14.553.015$$

5. Penutup

Melihat besarnya nilai ROI dan benefit dari lembaga kursus ini, maka tidak heran jika permintaan masyarakat atas pendidikan non formal seperti ini tidak kalah tingginya dengan ROI dari lembaga pendidikan formal yang selama ini dipandang masyarakat sebagai pendidikan nomor satu. Bahkan model pendidikan seperti ini menjadi alternative bagi sebagian masyarakat kurang mampu atau lebih tepatnya mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal secara final. ROI dan Benefitnya tidak kalah tingginya dengan pendidikan formal.

Daftar Referensi

- Jac Fitz-enz and Barbara Davison, (2002), *HOW TO MEASURE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT*, Third Edition, New York: McGraw-Hill
- Fakry, M. Gaffar, (2009), *Invesment In Human Capital, Ekonomi Pendidikan*, Bandung : UPI PPS
- Cohn, Elchanan,(1979), *The Economics Of Education*, Massachusets: Balinger Publishing Company.
- Levi, Henry M, (), *Financing Recurrent Education: Strategies For Increasing Employment, Job Opportunities, and Productivity*, center For educational earch and Innovation: Institute For Research on



F. Pembiayaan Pendidikan Dalam Konteks Amerika-Indonesia

1. Pendahuluan

Persoalan utama dalam pembiayaan pendidikan khususnya dan manajemen pendidikan nasional pada umumnya hingga saat ini adalah persoalan efektivitas dan efisiensi pendidikan di luar persoalan *equity* dan *equality*. Dua persoalan tersebut menjadi persoalan pelik, karena tidak setiap kegiatan pendidikan yang efektif akan terjamin pula efisiensinya, demikian juga sebaliknya. Tetapi bukan tidak mungkin kalau efektifitas dan efisiensi pendidikan bisa dicapai berbarengan.

Di sisi lain tuntutan kebutuhan akan sumber pembiayaan pendidikan semakin tinggi, sehingga kemampuan manajemen untuk bisa mengelola pembiayaan pendidikan dengan bijak sangat diperlukan.

Garner dalam Hamadah (2009) memaknai efektivitas tidak hanya berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi. Effectiveness “*characterized by qualitative outcomes*”. Oleh karena itu dalam konteks pembiayaan pendidikan akan dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kualitatif *outcomes* sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi, efektivitas pendidikan adalah kemampuan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas biaya suatu kegiatan yang menurut pasar yang berlaku dapat menyelesaikan program sesuai rencana. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk menilai efektivitas adalah:

a. Menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan dan alat untuk memproses input menjadi output, b. Sistem yang dibandingkan harus sama/*homogeny*. Misal tingkat pendidikan, kecakapan, social ekonomi, dan lain-lain, c. Mempertimbangkan semua output. Misal jumlah siswa lulus dan kualitas kelulusan, d. Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan output harus berkualitas.

Idealnya terwujudnya efektivitas pendidikan juga dibarengi dengan efisiensi pendidikan. Dalam perspektif manajemen, maka pengertian efisiensi adalah jumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Semakin kecil jumlah pengorbanan yang dikeluarkan maka akan semakin efisien, demikian juga sebaliknya. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan maka akan semakin tidak efisien (*boros*). Pendidikan dikatakan efisien jika untuk mencapai tujuan pendidikan hanya mengeluarkan sejumlah pengorbanan yang kecil (biaya, tenaga, pikiran dan waktu). Sedangkan dalam konteks pembiayaan pendidikan dikatakan efisien manakala pencapaian sasaran atau target atas pembiayaan program-program pendidikan mampu mencapai tujuan program dengan biaya yang sedikit. Lebih jauh Fattah (2000) menyatakan bahwa efisiensi dalam pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

Mengingat sedemikian rumitnya persoalan efektivitas dan efisiensi pendidikan maka persoalan tersebut mendesak untuk diuraikan. Apalagi persoalan tersebut berpengaruh terhadap terwujudnya *equity* dan *equality* pendidikan di Indonesia.

Tulisan ini akan mencoba memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan penerapan strategi-strategi baru dalam mencari sumber pembiayaan pendidikan dengan terlebih dahulu belajar atau paling tidak sekedar membandingkan akan praktek pembiayaan pendidikan di negara lain, dalam hal ini adalah Amerika. Oleh karena itu tulisan ini akan dimulai dengan memperkenalkan pembiayaan pendidikan dalam konteks Amerika, baru konteks Indonesia dan analisis kemungkinan penerapannya di Indonesia sebagai alternatif sumber pembiayaan yang baru.

2. Pembiayaan Pendidikan Di Amerika

Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Amerika terkait dengan sumber pembiayaan pendidikan adalah paraktek *School Levy*. Pengertian umum yang bisa dipahami tentang *school levy* adalah pendapat dari Kranz (2009). *School levy* menurutnya, sesungguhnya merupakan sekolah di mana sumber utamanya dari pajak. Disebut *levy* karena merekrut atau mengambil dana dari pajak, sehingga sering juga disebut sebagai *school tax levies*.

Dari pendapat yang dimajukan oleh Kranz ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap sekolah yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh pajak maka bisa disebut sebagai *school levy*.

Di Amerika Serikat, sekolah secara khusus mendapatkan biaya pendidikan yang bersumber dari pajak rumah, tanah, property serta kekayaan. Biasanya pajak-pajak ini dikhususkan untuk membiayai sekolah di komunitasnya sendiri-diri. Pajak property biasanya untuk pembiayaan pendidikan di tingkat local, sedangkan untuk level negara bagian menggunakan pajak penjualan dan pendapatan (Irianto, 2017 102).

a. Latar Belakang Kemunculan *School Levy*.

School levy muncul sebagai akibat sharenya antara dana pusat/ federal dengan local/district. Selama ini pajak properties dikumpulkan sebagai sumber keuangan umum, dan didistribusikan kepada sekolah distrik dengan melalui Negara bagian dengan sejumlah pengaturan. Sebagaimana pendapat berikut:

Property tax is the primary funding source for Washington's public schools. Two types of property tax levies support the state school system: the state school levy paid by all Washington property owners for public schools; and special levies approved by voters for a specific school district. Selanjutnya: Whereas revenues from special levies may only be used for that school district, all

funds collected from the state property tax levy are deposited in the state's general fund. This money is distributed to school districts throughout the state on a set formula (DRWS, 2009)

Dari informasi ini, dapat dipahami bahwa Pajak properti merupakan sumber pendanaan utama untuk sekolah umum Washington. Dua jenis pungutan pajak properti mendukung sistem sekolah negeri: retribusi sekolah negeri yang dibayar oleh semua pemilik properti Washington untuk sekolah umum; dan pungutan khusus yang disetujui oleh pemilih untuk distrik sekolah tertentu. Selanjutnya: Jika pendapatan dari retribusi khusus hanya dapat digunakan untuk distrik sekolah itu, semua dana yang dikumpulkan dari retribusi pajak barang milik negara disimpan dalam dana umum negara. Uang ini didistribusikan ke distrik sekolah di seluruh negara bagian dengan formula yang telah ditentukan.

Dalam pada itu informasi tentang *school levy* juga bisa dilihat dalam ketetapan yang dikeluarkan *State School Levies Credit* yang dikeluarkan Wisconsin Department of Revenue, Division of Research and Policy 30 November, 2019, dengan apa yang disebut dengan *State School Levies*. Produk *State School Levies* dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kredit pajak kekayaan (*property tax*) untuk pertama kali dibayarkan pada tahun 1962/1963 tahun pembayaran pajak bagi pajak kekayaan tanah dan bangunan dan pajak kekayaan pribadi.

b. Karakteristik *School Levy*

Beberapa karakteristik *school levy* yang telah dipraktikkan yang penulis ringkaskan dari beberapa sumber menurut Cagnetti (2009) adalah sebagai berikut:

Pertama. Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun. Dalam hal ini terutama untuk penarikan pajak property.

Kedua. Terjadinya peningkatan penarikan sebesar 2 sampai 3 persen akibat inflasi pada tahun sebelumnya.

Ketiga. Di lapangan terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru

Keempat. Gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak.

Kelima. Kenaikan gaji guru rata-rata naik 2,5 % sampai 5 % per tahun.

Dari karakteristik tersebut maka perolehan sumber biaya pendidikan yang langsung diterima ke sekolah adalah jenis pajak properti, tanpa harus menunggu jenis pajak tersebut masuk ke dalam pundi-pundi negara baru kemudian disusun sebagai sumber APBN/federal untuk kemudian didistribusikan berdasarkan prioritas anggaran negara. Berbeda dengan di Indonesia, perolehan anggaran yang 20% dari APBN diperoleh dari berbagai macam sumber yang harus masuk terlebih dahulu dalam pundi-pundi negara.

3. *School Levy* dalam Praktek Pembiayaan Pendidikan di Amerika

a. Model Pembiayaan Pendidikan

Sistem pembiayaan lembaga pendidikan (universitas) di Amerika Serikat menyesuaikan dengan sumber-sumber pendapatan dan konsep fundamental atas peranan social yang harus dijalankan oleh universitas. *Pertama.* model pembiayaan dengan dominasi pemerintah, *kedua.* *Cost-recovery* dan *ketiga.* Model diversifikasi pendapatan.

Untuk model pembiayaan atas dominasi pemerintah menggambarkan sistem hubungan pembiayaan tradisional antara negara dengan universitas, yang sesungguhnya merupakan pengendalian negara atas universitas. Model *cost-recovery*, merupakan model pembiayaan bersama antara pemerintah

dengan universitas sebagai institusi “layanan” yang melayani interest masyarakat dan perekonomian secara luas.

b. Sumber Pembiayaan

Menurut Ruslan (2007), Amerika Serikat ada tiga sumber utama dukungan anggaran untuk sekolah umum/publik (: di Indonesia sekolah negeri), yaitu dana dari pemerintah lokal, state dan federal. Secara spesifik, Ulul Albab (2011) menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan *public schools*, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), serta Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan sekolah umum bergantung terutama pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak, khususnya pajak properti pada level lokal, pajak penjualan dan pendapatan pada level negara bagian. Masyarakat umum di sana menerima pajak apabila : 1) Pajak tidak menyebabkan distorsi ekonomi (perubahan perilaku ekonomi dalam pola belanja atau relokasi bisnis, industri dan penduduk), 2) Pajak harus equitable (memperhatikan kemampuan wajib pajak), 3) Pajak harus memberi kemudahan (pajak dikumpulkan dengan biaya yang rendah bagi wajib pajak dan pemerintah), 4) Pajak harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam hal pendanaan lokal untuk sekolah umum bersumber dari: 1) Pajak Properti. Pajak properti merupakan sumber utama pendanaan untuk sekolah lokal, yang perhitungannya dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dan pajak penjualan. Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan tergantung pada efisiensi dari departemen pajak di pemerintahan lokal, 2) Pajak dan Biaya Lokal lainnya. Untuk menambah dana, selain dari pajak properti, sekolah lokal dapat mengumpulkan pendanaan melalui pajak pemasukan khusus dan pajak-pajak atau biaya lainnya, misalnya menarik biaya dari fasilitas dan layanan yang digunakan, seperti pelayanan bus, buku teks, aktivitas atletik, rekreasi, dan kegiatan setelah sekolah

Secara khusus di wilayah Washington, sebagaimana tertera dalam dokumen Washington State Department of Revenue, sekolah-sekolah negerinya mengandalkan sumber pembiayaan pendidikan yang utama dari pajak property/kekayaan. Di mana pajak kekayaan ini dipeliah menjadi

dua, yaitu pajak yang dibayarkan untuk sekolah negeri oleh semua pemilik kekayaan, serta pajak khusus yang disetujui oleh para pemberi suara untuk sekolah daerah/lokal yang telah ditetapkan.

Selain untuk keperluan pendidikan secara umum penerimaan kembali atas pajak yang telah dibayarkan masyarakat adalah untuk program kesejahteraan masyarakat. Pengembalian pemerintah dari pajak yang dibayarkan penduduk adalah berupa program kesejahteraan untuk masyarakat seperti:

- a) EITC (*The earned uncome tax credit*- Pendapatan Yang Patut Mendapatkan Kredit Pajak), merupakan subsidi pendapatan bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Subsidiya dalam bentuk *kredit pajak*, yang mana secara sederhana merupakan sebuah reduksi dari pajak kewajiban (liability). Sebagai contoh, jika Anda berhutang kepada pemerintah 1.000 \$ dalam pajak pendapatan tetapi Anda juga memiliki pajak kredit 600 \$, maka kamu hanya akan membayar 400 \$.
- b) SSI (*Supplemental Securitty Income*- Pendapatan Jaminan Keamanan Tambahan) merupakan program pemerintah federal sejak tahun 1972 yang menyediakan dasar manfaat bulanan untuk umur, orang buta dan orang lumpuh. Pada tahun 1997, rata-rata manfaat yang harus dibayarkan tiap tahun untuk umur dewasa adalah 234 \$ Aset SSI yang diterima 2.000 \$ untuk individual dan 3,000 \$ untuk pasangan.
- c) *Medicaid* merupakan program dengan belanja terbesar bagi individu dengan pendapatan rendah. Program ini ditetapkan tahun 1965 untuk perhatian kesehatan tertentu, seperti perawatan rumah sakit dan rawat jalan, laboratorium dan biaya sinar x serta layanan ahli pengobatan
- d) *Food stamps and Child Nutrition* (Cap Makanan Dan nutrisi Anak), Cap makanan merupakan voucher isu pemerintah yang dapat digunakan hanya bagi pembelian makanan. (makanan hewan, alcohol, tembakau dan makanan import tidak termasuk). Pada tahun 1997, selama rata-rata bulannya 22,9 juta orang menerima cap makanan dengan total kemnfaatan 20 M \$. Cap makanan secara langsung diberikan oleh pemerintah federal, Karena bagaimanapun administrasi dan distribusi cap makanan tidak bisa dikerjakan oleh negara bagian.

Sedangkan untuk *Child Nutrition Programs*, Target dari program ini adalah menutrisi para ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun dan anak sekolah. Sekitar 25 juta anak menerima subsidi makan siang di sekolah setiap harinya, maupun *Housing Assistance* (Bantuan rumah), Di Amerika Serikat subsidi penyedia rumah bagi orang lemah dimulai tahun 1937. Program rumah publik dikembangkan, dimiliki dan dijalankan oleh otoritas lokal yang beropersi dengan subsidi kotamadya, daerah dan setiap daerah sebagai kelompok. Sampai saat ini ada sekitar 1,3 juta unit rumah publik (WSDR, 2011)

c. Distribusi

Masih menurut sumber yang sama, distribusi dana pendidikan di Amerika Serikat bisa berbentuk bantuan pendidikan dengan jenis, seperti:

- 1) *Flat grant* (bantuan sama rata) adalah bantuan yang diberikan secara sama pada setiap warga negara bagian tanpa memperhatikan tingkat pendapatan pajak negara bagian tersebut, tetapi hanya mendasarkan pada jumlah siswa.
- 2) *Full State Funding* (Pendanaan Negara Bagian Penuh),, yang diberikan berdasarkan pertimbangan efisiensi pendidikan,
- 3) *The foundation plan*, yang menitikberatkan pada upaya meminimalkan penggunaan pajak kekayaan daerah dan mengontrol pengeluaran seminimal mungkin pada sekolah distrik di setiap negara bagian,
- 4) *The guaranteed Tax Base* (GTB- Jaminan berdasarkan pajak, merupakan upaya tandingan dari program lainnya yang dilakukan negara bagian,
- 5) *Percentage Equilizing* (kesamaan prosentase), merupakan program yang orientasinya untuk memastikan bahwa negara bagian memberikan prioritas sumber penfapatannya kepada kebutuhan sekolah distrik,
- 6) *Power Equilizing* (Kesamaan kemampuan), adalah program yang memberikan kewenangan untuk mengawsi pengeluaran lokal yang didasarkan pada kemamkmuran dan pendapatan lokal.

Selain distribusi dalam bentuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan tadi, maka distribusi dana pendidikan di Amerika Serikat juga bisa dilihat dalam bentuk lain, seperti: 1) *School Lunch*- Makan siang

sekolah, merupakan bantuan untuk anak sekolah dan petani dari kelompok masyarakat tidak mampu, 2) *Handicapped Aid*- bantuan penyandang cacat, dan 3) *Education block grant*.

4. Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia

a. Komponen Biaya Pendidikan di Indonesia

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unitcost*). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut “Income Forgone” yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMU, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah, gaji) selama tiga tahun belajar di SMU harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.

Satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui

besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Komponen biaya pendidikan di Indonesia mengacu kepada PP no 48 tahun 2008, terdiri dari tiga komponen utama, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau biaya pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik. Dari tiga jenis biaya pendidikan tersebut, pertama dan terakhir kemudian bisa dipecah berdasarkan kategorisasi sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya. Untuk biaya satuan pendidikan bisa dilihat berdasarkan 1) biaya investasi, seperti; lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan, 2) biaya operasional yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia, 3) bantuan biaya pendidikan dan 4) beasiswa. Sedangkan untuk biaya penyelenggaraan bisa dipelah lagi menjadi; 1) biaya investasi; berupa lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan, dan 2) biaya operasional; biaya personalia dan non personalia.

b. Anggaran Pendidikan

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Secara umum konsep anggaran pendidikan di Indonesia sesuai PP No 48 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Konsep Anggaran Pendidikan PPN0.48 Tahun 2008

No	Pembiayaan	Sumber	Penempatan
1	Investasi lahan dan selain lahan yang menghasilkan aset fisik	APBN/ APBD	Belanja modal dan/atau belanja barang
2	Investasi SDM dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik	APBN/ APBD	Belana pegawai dan/atau belanja barang

3	Operasional Personalia	APBN/ APBD	Belanja pegawai dan/atau bantuan social
4	Operasional Non Personalia	APBN/ APBD	Belanja barang dan/atau bantuan social

(disarikan dari Pascarina, 2008)

Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
- 2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
- 3) Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah
- 4) Kesejahteraan pegawai
- 5) Administrasi
- 6) Pembinaan teknis edukatif
- 7) Pendataan.

Penentuan anggaran pendidikan pada dasarnya adalah praktek politik anggaran, sebab dibutuhkan usaha rasional, logis dan empiris serta argumentatif-politis. Dengan demikian anggaran yang diajukan mendapat dukungan dari berbagai pihak

c. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Sumber-sumber pembiayaan (;pendapatan) lembaga pendidikan di Indonesia sebagaimana UU No 20 Tahun 2003 bisa berasal dari pemerintah serta masyarakat. Sumber dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dalam APBN maupun pemerintah daerah dalam bentuk APBD. Sedangkan sumber dari masyarakat bisa dari masyarakat wali, masyarakat sekolah, masyarakat industri dan masyarakat umum. Penggalan sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat wali dan umum bisa dalam bentuk penggalan potensi zakat, shodaqah, infak, hibah dan sebagainya. Sedangkan sumber dari sekolah/ perguruan tinggi bisa dalam bentuk *entrepreneurial* lembaga lewat penerapan *corporate management*, serta CSR dari masyarakat dunia industri.

Di dalam PP No. 48 Tahun 2008 sumber pendanaan pendidikan juga secara umum berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari

pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat).

1) Sumber Dari Pemerintah

Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi Administrasi Umum, yaitu alokasi dari Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat (Khusnuridlo, 2010).

2) Sumber Dari Masyarakat.

Sumber pembiayaan dari masyarakat sebagaimana dikemukakan di muka, terdiri dari masyarakat wali, masyarakat umum, sekolah dan masyarakat industri.

Pertama. Sumber dari masyarakat wali dan umum.

Sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat wali dan umum sebenarnya bukanlah sumber asing, melainkan merupakan sumber swadana sebagaimana yang sudah dikenal sebelumnya. Terkait dengan swadana, maka swadana di sekolah/PT dapat dilakukan dengan: patungan, zakat, infaq, sadaqoh, nazar, titipan dan loan dari anggota penyelenggara (pimpinan, guru/dosen dan tenaga kependidikan), peserta didik dan alumni. Patungan dan sumbangan sukarela seperti penghimpunan dana pokok koperasi. Zakat, infaq, sadaqoh, nazar dapat dijadikan modal pengumpulan dana bulanan atau tahunan sesuai waktu yang tepat. Dana titipan dan loan dari peserta didik dapat diterapkan pada waktu penerimaan mahasiswa. Penggunaan dana jenis ini digunakan untuk mengembangkan program maupun kegiatan operasional, bukan untuk kegiatan pembangunan fisik (Alma dan Ratih, 2008).

Kedua. Sumber dari Sekolah/Perguruan tinggi.

Sumber pendapatan dari sekolah/PT yang dimaksud di sini adalah sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh lewat jalan sekolah melakukan kegiatan kewirausahaan (*entrepreneurial*) sebagai salah satu bentuk penerapan dari manajemen korporasi (*corporate management*). Penerapan manajemen korporasi dalam lembaga pendidikan jangan dipahami secara dangkal sebagai upaya sekolah/PT untuk semata-mata mencari keuntungan dengan menafikan fungsi sekolah/PT sebagai organisasi yang memiliki fungsi layanan sosial (*social services*), tetapi bagaimana sekolah mampu mengusahakan pencarian sumber pembiayaan baru tanpa membebani kepada masyarakat utamanya masyarakat wali siswa/mahasiswa dengan cara-cara kreatif dan inovatif untuk kepentingan kemajuan sekolah/PT, inilah yang disebut dengan *entrepreneurial* konteks ekonomi.

Dalam dunia PT, pelaksanaan *corporate management* lebih dikenal dengan istilah *corporate university*. *Corporate university* adalah lembaga pendidikan yang didesain secara strategik untuk mendukung organisasi induknya mencapai misi melalui berbagai aktivitas yang bersifat menumbuhkembangkan seluruh potensi (pembelajaran, pengetahuan dan kearifan) yang dimiliki individu dan organisasi (Allen, 2005).

Kemunculan awal *corporate university* sesungguhnya dari dunia bisnis (*corporate/perusahaan*) yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan (dengan kualifikasi tertentu) oleh *corporate*. Oleh karena itu kemudian *corporate* mendirikan universitas yang mempersiapkan SDM tadi untuk keperluan *corporatenya*. Dalam perkembangan selanjutnya, universitas tersebut juga menyelenggarakan pendidikan secara umum sesuai dengan permintaan pasar. Bahkan sekarang konsep *corporate university* lebih berkembang lagi. Yaitu, universitas memiliki *corporate* dalam rangka mencari sumber pembiayaan pendidikan, atau universitas menerapkan sistem manajemennya sebagaimana *corporat*, tentu saja dengan orientasi yang berbeda, bukan *profit oriented* tetapi tetap *services oriented*.

Untuk konsep universitas (bisa juga sekolah) memiliki *corporate* sebagai sumber pembiayaan sekolah/PT inilah yang dimaksudkan

oleh penulis sebagai cara yang bisa digunakan oleh sekolah/PT, karena *corporate* ini sesungguhnya implemementasi atas konsep enterpreneurial sekolah/PT dengan memiliki unit usaha sendiri. Di sinilah pentingnya pemimpin sekolah/PT sebagai *entrepreneur*, karena menurut Winardi *entrepreneur* berarti orang yang memulai (*The Originator*) sesuatu bisnis baru atau seorang manajer, yang berupaya memperbaiki sebuah unit organisasi melalui serangkaian perubahan-perubahan produktif (Winardi, 2008). Perubahan di sini termasuk adalah perubahan untuk mengusahakan terpenuhinya sumber dana baru bagi PT/sekolah lewat pendirian unit usaha. Sedangkan pendanaan unit usaha; jika sebagai satu hal yang pertama kali baru dilakukan, pendanaannya bisa dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha, pengguna dan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha digunakan untuk mendukung biaya operasional PT/sekolah. Sedangkan biaya investasinya bisa diperoleh dari loan (pinjaman lunak) dan dicicil oleh unit usaha selama kurun waktu 15 hingga 20 tahun dengan masa tenggang 3 hingga 5 tahun. Kegiatan unit usaha ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT/sekolah, demikian pendaat Ibrahim Musa (Alma dan ratih, 2008).

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah, (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta / perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah (Khusnurridlo, 2010). Sedangkan untuk PT bisa berupa dana patungan, zakat, infaq, sadaqoh, nazar, titipan dan loan dari anggota penyelenggara (pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan), peserta didik dan alumni. Patungan dan sumbangan sukarela seperti penghimpunan dana pokok koperasi. Zakat, infaq, sadaqoh, nazar dapat dijadikan modul pengumpulan dana bulanan atau tahunan sesuai waktu yang tepat. Dana titipan dan loan dari peserta didik dapat diterapkan pada waktu penerimaan mahasiswa.

3) Sumber dari masyarakat dunia industri

Sebagai bentuk tanggungjawab masyarakat industri kepada masyarakat/ sosial termasuk dunia pendidikan, maka mereka mengalokasikan dana pendidikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk beasiswa atau pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk lainnya. Di Indonesia seperti beasiswa Djarum, beasiswa Gudang Garam dan lain sebagainya.

5. Mencari Sumber Pembiayaan Pendidikan Yang Baru dengan Belajar dari Amerika

Setelah mencermati konsep dan praktek *school levy* di Amerika maka kemungkinan pelajaran yang bisa diambil dalam praktek pembiayaan pendidikan di Indonesia juga memiliki peluang mengingat di luar konteks pemerintah maka praktek sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia itu berbasis umat.

Probabilitas utama yang menjadikan Indonesia memiliki peluang untuk bisa menerapkan *school levy* sebagai pelajaran dari Amerika, adalah karena banyaknya penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Dalam hal ini umat Islam memiliki peluang itu dikarenakan dalam Islam ada zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan sebagainya. Sumber inilah yang jika disubstitusi dalam konteks *tax* (pajak) propeties-nya *school levy*, bisa digunakan sebagai sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

Jika kita sejenak menengok praktek pembiayaan pendidikan masa khilafah maka akan diperoleh informasi sebagaimana pendapat An Nabhani dalam Al Jawi (2008). An- Nabhani dalam hal ini menyatakan bahwa biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. *Pertama*, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. *Kedua*, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi umat Islam untuk sumber pembiayaan pendidikan yang dari baitul mal, maka peluang untuk mencari sumber pembiayaan pendidikan yang baru dari dalam konteks keIndonesiaan yang notabene penduduknya sebagian besar adalah muslim,

yaitu dengan pengambilan dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan sebagainya.

a. Zakat

Mengingat zakat memiliki kekhususan dalam distribusinya, yaitu hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sebagaimana disebutkan dalam QS. 9/At Taubah ayat 60 dalam Tafsir Jalalein....

Innamash Shadaqaatu lil fuqaraaai wal masaakiini wal 'aamiliina 'alaihaa wal mu'allafati quluubibuhum wa fir riqabi wal gharimiina wa fii sabiilillaahi faridlatan minallaahi wa Allaahu 'aliimun hakiimun. (sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya dan untuk budak-budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Oleh karena itu peluang munculnya pemanfaatan zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan adalah dengan melakukan penafsiran lebih lanjut di kelompok mana yang bisa dijadikan celah untuk sumber pembiayaan pendidikan.

Dari delapan mustahik tersebut yang memiliki peluang masuk dalam pembahasan ini adalah kelompok fakir, miskin dan fi sabilillah.. Untuk lebih mengetahui bagaimana penafsiran para mufasir atas pemaknaan kata fakir, miskin dan fi sabilillah berikut kami cuplikan beberapa pendapat.

Pertama. Kata fakir dan miskin sebagaimana disebut dalam Tafsir Jalalain adalah:

- ✓ Fakir: mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka,
- ✓ Masakin (orang-orang miskin); mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka.

Kedua. Pemaknaan Fii sabiilillah (untuk jalan Allah) dalam tafsir Jalalain adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang

berkecukupan. Pemaknaan ini masih bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Tetapi jika kita melihat dalam Tafsir AL Mishbah, maka kata fi sabilillah dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah. Berbeda dengan itu, kini sebagian ulama kontemporer memasukkan kelompok ini (fi sabilillah) adalah semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantarkan menuju jalan dan keridhaan Allah”.

Menurut Yusuf Al Qarddhawi, masih dalam tafsir Al Mishbah (Shihab, 2004), makna fi sabilillah bisa diperluas maknanya dalam pengertian jihad. Kata jihad bisa dengan pena, dan dengan lidah, sebagaimana bisa juga pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagaimana bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa ia fi sabilillah dalam arti untuk membela dan meninggikan kalimat-Nya.

Kata Fi sabilillah dalam tafsir Depag RI (2009) dijelaskan sebagai berikut: Perkataan sabilillah mempunyai dua arti. *Pertama* arti khusus, yaitu orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Kedua, arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah seperti: pengadaan fasilitas umum, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah.

Para ulama empat madzhab berpegang pada pendapat pertama, tetapi sebagian ulama mempunyai pendirian yang mencakup pengertian khusus dan pengertian umum atas dasar kaidah ushul fiqh: *al 'ibrathu bi'umumil lafadzi laa bikhushuushis sababi*. (yang menjadi pegangan ialah umumnya pengertian lafadz (sesuatu nas) tidak pada kekhususan

sebab (nas diucapkan/diturnkan). Atas dasar ini, pembangunan atau pemeliharaan masjid dan madrasah demikian juga kegiatan ulama dan para mubaligh dapat diambilkan dari harta zakat.

Berdasarkan ke delapan golongan penerima zakat ini kemudian bisa dipelah menjadi dua kelompok besar, yaitu: Pertama. Golongan penerima zakat langsung menjadi milik pribadi: fakir, miskin, amil, orang yang menanggung hutang, muallaf dan musafir, Kedua, golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum. Golongan ini berupa instansi dan badan, terdiri dari: 1) *fi ar riqab*, yaitu usaha membebaskan budak. Badan amil zakat secara langsung atau dengan perantara organisasi tertentu dapat membeli semua budak yang akan dijual oleh pemiliknya atau yang ada di pasar-pasar budak untuk dimerdekan dan 2) *fi sabilillah*, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas (Depag, 2009).

Dari penjelasan tersebut, maka sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari zakat bisa diambilkan untuk 3 kategori; fakir, miskin, dan *fi sabilillah*. Kemudian dalam pendistribusiannya, zakat sebagai alokasi biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

Untuk biaya individu peserta didik terutama untuk biaya operasionalnya maka peserta didik yang masuk kategori fakir dan miskin bisa dialokasikan dari zakat (*mal*). Sedangkan untuk pendidik yang tidak dibayar bisa dialokasikan dari bagian *fi sabilillah* sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan Tafsir Jalalain. Tetapi jika guru sudah dibayar tetapi sangat tidak mencukupi maka bisa diambilkan dari bagian zakat untuk kelompok fakir. Sedangkan untuk biaya investasi seperti pembelian lahan, penyediaan sarana pendidikan (gedung sekolah) dan biaya pemeliharaannya bisa diambilkan dari bagian *fi sabilillah* sebagaimana Tafsir Al Mishbah. Dengan kata.

Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan ini adalah bahwa sumber biaya pendidikan kategori biaya operasional, pemeliharaan dan investasi bisa dipeoleh dari zakat (*mal*) dengan menngacu kepada 3 kelompok yang berhak yaitu fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Jika kemudian masyarakat (lokal saja) mampu memberdayakan potensi umat Islam dari zakat ini, maka persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia bisa diatasi, sebagaimana di Amerika masyarakat lokalnya

mengalokasikan sumber pembiayaan pendidikan dari pajak property masyarakatnya, tanpa terlalu menggantungkan alokasi dari pemerintah pusat (federal). Inilah yang penulis maksud dengan zakat sebagai pengganti *tax* dalam *konteks school levy*. Yang itu berarti bahwa benar jika Indonesia khususnya masyarakat muslimnya memiliki peluang untuk menerapkan *school levy*.

b. Wakaf, Infak, Shadaqah dan Sebagainya.

Jika persoalan tentang zakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia terkait dengan peruntukkannya yang khas, masih menimbulkan pro dan kontra akibat perbedaan penafsiran, maka peluang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan sumber pembiayaan pendidikan dari wakaf, infak, shadaqah, nadzar, hibah, hadiah dan yang sejenisnya. Sumber-sumber ini menjadi sangat potensial dan besar, mengingat potensinya yang sangat besar serta tidak adanya ketentuan khusus tentang siapa pelaku, siapa yang berhak, kapan dan di mana dilaksanakan, sehingga ini akan memudahkan bagi pengelolanya. Dalam hal ini lembaga pendidikan bisa mulai mengelolanya dari masyarakat sekolah dan wali, jika sudah berhasil kemudian meluas ke masyarakat lokal (daerah; desa/kecamatan/kabupaten) di mana sekolah itu berada. Inilah yang penulis maksud dengan wakaf, infak, shadaqah dan lainnya sebagai pengganti *tax* dalam *konteks school levy* sebagaimana zakat. Yang itu berarti bahwa benar jika Indonesia khususnya masyarakat muslimnya memiliki peluang untuk menerapkan *school levy*. Bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat non muslim dengan potensi uang puasa yang dikumpulkan oleh jama'ahnya juga bisa menjadi sumber pembiayaan yang berpotensi besar mengatasi persoalan minimnya alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat.

Sebagai pembanding, jika kita tengok pemanfaatan wakaf misalnya, sejak zaman rasulullah hingga zaman dinasti-dinasti Islam juga disalurkan untuk kemaslahatan umat (agama, pendidikan, ekonomi dan sebagainya). Karim dalam hal ini secara runtut menampilkan perkembangan pemanfaatan zakat sebagai berikut (Karim, 2010):

- 1) Zaman Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut sebagian pendapat

ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Kemudian Umar bin Khataba disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

- 2) Zaman dinasti Umayyah. Masa itu Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy menjadi hakim Mesir pada masa khalifah Hisham bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
- 3) Zaman Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.
- 4) Zaman Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Masa ini perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyubiy memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam

hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. Sedangkan orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi sendiri kemudian juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

- 5) Zaman Dinasti Mamluk. Wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. Bahkan Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat

mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi *tiga katagori*: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

- 6) Zaman Dinasti Turki Utsmani. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.

Harta untuk diwakafkan seiring dengan perkembangan ekonomi juga memunculkan variasi harta wakaf, termasuk adalah wakaf tunai (uang). Di Indonesia sendiri, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono, mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, tepatnya tanggal 8 Januari 2010. Pencanangan Gerakan ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dan momentum penting bagi gerakan wakaf produktif di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia. Walaupun sebenarnya di Indonesia, isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) dan Departemen Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tgl 7-8 Januari 2002 (Agustianto, 2010).

Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai (cash wakaf) telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan

bahwa Imam Az-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits telah menetapkan fatwa, yaitu bahwa masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di luar negeri, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis. Demikian juga halnya dengan di Sudan sudah dimulai pada tahun 1987 dan di Kuwait pada tahun 1993.

Di Indonesia sendiri selain gerakan wakaf yang dicanangkan Presiden, praktek wakaf tunai dan produktif atau sudah dilakukan di Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur. lembaganya dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa.bahkan lewat kajian kekinian sekarang juga muncul model-model pemberdayaan wakaf untuk. Dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh Asyari (2009) lewat kegiatan The 9 th Annual Conference On Islamic Studies (ACIS), yang dilaksanakan di Surakarta dari tanggal 2 sampai dengan 5 Nopember 2009, disebutkan bahwa pemberdayaan wakaf di Kecamatan Ampek Angkek dan IV Koto di Kabupaten Agam, antara lain dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) harta-harta wakaf yang berada di kecamatan IV Angkek pada mulanya berbentuk sarana ibadah (masjid, musholla dan langgar seluas 18.830 M², tanah lapangan 640 M² dan lembaga pendidikan seluas 7.361 M².
- b) Harta wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu peningkatan ekonomi umat melalui model pemberdayaan, diantaranya memproduksi sesuai dengan kondisi:
 - Tanah wakaf yang berbentuk sawah dapat ditanami padi, cabe, tomat, kentang, sayur-sayuran dan palawija lainnya.
 - Tanah wakaf yang terdekat sumber air, dapat dibuat sebagai kolam ikan, tambak ikan, tempat pencucian mobil dan karpet,
 - Tanah wakaf yang terletak di pemukiman penduduk, dapat dibuat sebagai rumah tempat tinggal yang bisa dikontrakkan, toko yang menjual kebutuhan harian dan pasar tradisional yang bisa menyediakan kebutuhan harian masyarakat dan menampung hasil pertanian.
 - Tanah wakaf yang terletak dekat masjid dapat dibuat tempat potong rambut, toko buku serta perlengkapan ibadah, lembaga keuangan syariah (BMT).
 - Tanah wakaf yang terdapat di pinggir jalan dapat dibuat untuk tempat penjualan bahan bangunan, rumah yang memiliki dua fungsi, toko yang menjual alat-alat kendaraan, membuat rumah untuk disewakan sebagai kantor instansi pemerintah/swasta, membuat tangki minyak/menjual minyak ketengan.
 - Tanah wakaf lapangan, bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan olah raga.

Tawaran pemberdayaan harta wakaf dari Asyari jika yang memiliki (harta wakaf bersama) dan mengelola adalah masyarakat, wali siswa dan pihak sekolah, maka hasilnya akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial. Pada gilirannya sekolah betul-betul bisa gratis. Yang itu berarti persoalan equall, equity, efektivitas dan efisiensi pendidikan bisa teratasi.

Selanjutnya jika kita cermati, bahwa yang saat ini marak pengelolaan harta wakaf termasuk juga wakaf tunai, yang harus diperhatikan adalah pokok harta (property) yang tidak boleh hilang, maka potensi sumber pembiayaan pendidikan lain dari khasanah Islam yang tidak terikat aturan ketat syar'i yang sangat besar pula jumlahnya jika dikelola dengan baik adalah shadaqah, infak, hibah, nadzar dan lainnya, jelas-jelas memiliki potensi untuk dibayarkan. Namun demikian, untuk sumber pembiayaan pendidikan dari kelompok ini supaya menjadi sumber yang produktif juga menghajatkan adanya pengelolaan yang profesional. Dalam hal ini sekolah bersama masyarakat bisa mengambil peran tersebut.

6. Analisis Penerapan Dalam Kasus

Bisa atau tidaknya, berhasil atau tidaknya (efektif tidaknya) sebuah konsep baru tentang pendidikan diterapkan di Indonesia, termasuk konsep *school levy*, maka yang perlu diketahui dulu adalah bagaimana sih ciri-ciri sekolah efektif. Menurut Tola Dan Furqon (2002) ada beberapa ciri atau indikator sebuah sekolah dikatakan efektif yaitu: a) Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik, b) Pelaksanaan Kepemimpinan yang kuat oleh Kepala Sekolah, c) Ekspektasi guru dan staf tinggi, d) Ada kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua dan masyarakat, e) Adanya iklim positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar, f) Menekankan pada keberhasilan siswa untuk mencapai ketrampilan aktivitas yang esensial dan g) Kemajuan siswa sering dimonitor

Dari pendapat ini, maka bisa disimpulkan karakteristik sekolah efektif dengan melihat beberapa komponen penentu, adalah: 1) Siswa: Siswa yang memiliki semangat dan harapan kuat untuk maju, 2) Lingkungan belajar bagi siswa; lingkungan yang kondusif untuk mendukung keberhasilan belajar siswa, 3) Kualitas SDM: SDM yang berkualitas dan mampu mendorong siswa untuk belajar dan 4) Manajemen dan kepemimpinan pendidikan: manajemen yang

dikelola dengan baik dan dipimpin oleh kepala sekolah dengan kepemimpinan yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat sekolah.

Berdasarkan atas ciri-ciri sekolah efektif ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis *school levy* sebagai sebuah konsep; apakah juga memiliki konsep tentang sekolah yang efektif. *School levy* sesungguhnya hanya bagian dari manajemen/administrasi sekolah khususnya manajemen pembiayaan sekolah. Artinya, jika manajemen yang baik juga menjadi penanda dari keefektifan sebuah sekolah, maka sesungguhnya *school levy* sebagai sebuah konsep manajemen pembiayaan juga menjadi penentu baik tidaknya manajemen sekolah. Berangkat dari pemahaman seperti ini, maka baru kita bisa mengestimasi kemungkinan penerapan *school levy* di Indonesia tentu saja dengan memperhatikan konteks pembiayaan pendidikan yang berjalan di Indonesia.

Jika mendasarkan diri pada karakteristik *school levy* maka sesungguhnya tidak ada perbedaan besar dengan model sekolah; pembiayaan saat ini, seperti alokasi gaji guru dan sebagainya. Hanya saja dalam kasus tertentu, seperti alokasi sumber langsung pembiayaan pendidikan dan pertanggungjawaban atas penggunaan atau distribusi dana pendidikan di Indonesia ada perbedaan. Inilah sesungguhnya peluang untuk menganalisisnya.

Pertama. Jika melihat pada karakteristik pembiayaan pendidikan dalam *school levy* yang pertama yaitu Perekrutan/penarikan uang dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, maka dalam hal ini akan sulit dilakukan di Indonesia. Karena praktek pemungutan pajak di Indonesia dengan berbagai macam jenis pajaknya adalah langsung masuk pundi-pundi pemerintah (ada daerah, ada pusat) hanyalah salah satu sumber pendapatan pemerintah. Setelah terkumpul baru dialokasikan untuk sekian banyak keperluan salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia sesungguhnya sudah cukup baik, karena mendapatkan alokasi 20% dari APBN. Masalahnya belum dapat terealisasi dengan baik. Masalah kedua, pengumpulan berbagai macam sumber itu menunggu distribusi selama satu tahun dan itu berarti sekolah dalam hal ini bisa memperoleh angka sesungguhnya yang berbeda sesuai dengan fluktuasi pendapatan. Berarti bisa saja kebutuhan biaya pendidikan meningkat tetapi jatah real dari pemerintah menurun. Ditambah lagi bahwa sumber pendanaan pendidikan dan laporannya juga belum terintegrasi dengan baik. Sebaliknya yang terjadi dalam *school levy*, karena ada pajak yang secara langsung dialokasikan setiap tahun untuk pendidikan maka jumlah angka real yang akan digunakan oleh sekolah juga relatif tetap, bahkan

berdasarkan karakteristik selanjutnya justru cenderung mengalami peningkatan. Sehingga ada semacam jaminan bahwa perwujudan pendidikan bermutu dengan dukungan dana yang memadai bisa dilaksanakan.

Solusi atas persoalan tersebut didasarkan atas peluang yang terbidik dalam pembahasan ini adalah substitusi pajak-*school levy* menjadi zakat, wakaf, infak, shadaqah dan lainnya dari masyarakat untuk sumber pembiayaan pendidikan konteks Indonesia, yang bisa langsung dikelola masyarakat atau badan yang langsung dibentuk masyarakat untuk backing keperluan pembiayaan pendidikan disamping keperluan ekonomi, sosial dan keagamaan.

Kedua. Warga/siswa secara langsung masih memikirkan biaya pendidikan. Berbeda dengan *school levy*, warga hanya memikirkan untuk membayar pajak, sedangkan urusan penggunaan pajak untuk kebutuhan pendidikan tidak ditangani mereka. Dalam hal ini warga utamanya masyarakat wali siswa atau siswa sendiri cukup memikirkan membayar zakat bagi kelompok yang mampu; berkewajiban, maupun cukup membayar wakaf (ingat wakaf tunai tidak harus besar), infak, shadaqah, hibah, nadzar dan lainnya sesuai kemampuan dan kesepakatan awal yang dikelola dengan profesional, tanpa harus memikirkan membayar biaya pendidikan lagi.

Sesungguhnya dari adanya perbedaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka justru memunculkan peluang atas kemungkinan penerapan *school levy* di Indonesia. Alasannya sebagai berikut:

- 1) Warga Indonesia sudah terbiasa menanggung biaya pendidikannya, sekaligus membayar berbagai macam pajak. Ketika hal itu dialihkan dalam bentuk pemungutan pengganti pajak yaitu zakat (hanya bagi yang berkewajiban saja), wakaf, infak, shadaqah dan lainnya bagi kelompok lainnya, penulis kira itu akan lebih meringankan beban mereka dalam perspektif psikologis maupun materialnya.
- 2) Pengintegrasian sumber pendanaan dan laporan hanyalah sebuah kebiasaan yang bisa dibentuk. Artinya jika selama ini sumber pendanaan dan laporan penggunaan pembiayaan pendidikan masih terpisah-pisah, maka dengan hanya membiasakan berdasarkan tuntutan pertanggungjawaban maka masalah ini juga bisa diatasi. Untuk selanjutnya maka masalah pembiayaan pendidikan tidak menjadi masalah lagi.

Dua alasan inilah yang menurut penulis mengamanatkan bahwa *school levy* juga bisa diterapkan di Indonesia, karena memang keberangkatan awal atas pembiayaan pendidikan di Indonesia juga memiliki kesamaan dengan yang ada dalam *school levy* ditambah beberapa hal yang nampaknya berbeda ketika diurai juga bisa dilakukan di Indonesia. Bahkan jika ini diterapkan maka akan diperoleh keuntungan sebagai berikut: 1) tumbuhnya kesadaran masyarakat mampu/ yang berkewajiban membayar zakat untuk bisa mendistribusikan zakat yang dibayarkannya secara tertib, teratur dan termenej dengan baik, 2) tumbuhnya kesadaran untuk menumbuhkan budaya berinfaq, shadaqah dan lainnya bukan atas tuntutan sebagai bentuk kesalehan pribadi tetapi juga untuk kesalehan sosial. Karena dengan pendidikan yang baik (karena terjamin pembiayaannya) maka akan tercipta masyarakat yang baik, 3) munculnya sikap kemandirian masyarakat untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, dan 4) roda perekonomian akan berjalan dengan baik.

5. Penutup

Mengkreasikan sumber pembiayaan pendidikan yang baru saat ini mutlak diperlukan. Bahwa ide kreatif itu muncul setelah melihat dari orang lain itu hanyalah jalan. Tetapi bahwa ide itu dilandasi dengan adanya probabilitas untuk menerapkannya. Sehingga perolehan ide sumber pembiayaan pendidikan yang baru benar-bener bisa dilaksanakan.

Daftar Referensi

- Agustianto, (2010), *Wakaf uang Dan Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Tersedia dalam: <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Albab, Ulul, (2011), *Perbandingan Kebijakan Pendidikan Amerika Serikat – Indonesia*, tersedia dalam: <http://muhlis.files.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011
- Alma, Bukhari dan Hurriyati, Ratih (Eds), (2008), *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima*, Bandung: Alfabeta.
- Allen, Mark.Ed, (2005), *The Corporate Univercity, Designing, Managing, And Growthing a Succesfull Program*.(2005)

- Al Jawi, M. Shiddiq, (2008), *Pembiayaan Pendidikan Dalam islam*, tersedia dalam: <http://taukhid.wordpress.com>, diambil tanggal 1 februari 2011-02-02
- Cagnetti, Linda (2009), *School Levies, Informed Voter Are Better's Votter. Heres to primer to Help You..*
- Departement of Revenew Wasshington State. (2009). All quarterly and monthly taxpayers are required to file and pay electronicall, <https://dor.wa.gov/get-form-or-publication/publications-subject/tax-topics/all-quarterly-and-monthly-taxpayers-are-required-file-and-pay-electronically>
- Departemen Agama RI, (2009), *Al Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Washington State Department of Revenue, (tt), *State School Levy Property Tax*,tersedia dalam: <http://dor.wa.gov>, diambil tanggal 1 februari 2011.
- Hamadah, Fi. *Sumber-Sumber, Efisiensi Dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan*, (2009) tersedia dalam: <http://fihamadah.blog.com>, diambil tanggal 1 Februari 2011
- Irianto, Agus. (2017). *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam pembangunan Suatu Bangsa. Jakarta: Kencana*
- Karim, (2010), *Sejarah Perkembangan Wakaf*, 18 Juni 2010, tersedia dalam: <http://bawamif.org>, diambil 12 Maret 2011.
- Kranz, Cindi, (20099), *Schools Levy Activist Compete to Attention Enquirer staff writer* dalam *School levy activists compete for attention*, Sunday, September 26, 2004, http://www.enquirer.com/editions/2004/09/26/loc_schoollevies26.html--- 16 April 2009, school levy).
- Khusnuridlo, Moh, (2010), *Sumber-sumber Pendapatan Sekolah*, tersedia dalam: <http://www.khusnuridlo.com>, diambil tanggal 2 februari 2011.
- Ruslan, Agus, (2007), *Dana Pendidikan Di Amerika Serikat*, tersedia dalam: <http://re-searchengines.com>, diambil tanggal 1 Februari 2011
- Shihab, M. Quraish. (2004), *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, volume 5, Jakarta: Lentera Hati
- Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.2000
- Tola Dan Furqon, (2002), <http://www.dediknas.go.id/jurnal/44/hlm>
- Wisconsin Departemen of renew. (2019), *State School Levies Credit*, Wisconsin Department of Revenue Division of Research and Policy Nivember 30, 2019 <https://www.revenue.wi.gov/DORReports/schlevcredit.pdf>
- Winardi, J, (2008), *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

G. Mewujudkan Cilacap 4C Melalui Model Pendidikan 435-PE-4C

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk cepat melakukan perubahan agar tugas kehidupannya semakin mudah. Kemampuan ini yang kemudian melahirkan berbagai inovasi untuk berevolusi bahkan kadang-kadang cenderung revolusioner. Setidaknya ada empat kali revolusi (; industri) yang pernah dilakukan oleh manusia. Keempat Revolusi Industri yang dimaksud adalah 1) *Revolusi Industri 1.0* (tahun 1750-1850). Revolusi pertama ini ditandai dengan adanya perubahan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin), 2) *Revolusi Industri 2.0* (tahun1870.-1914) yang sering disebut sebagai Revolusi Teknologi yang ditandai dengan semakin pesatnya industrialisasi, 3) Revolusi Industri 3.0. (tahun 1960-2010) merupakan revolusi digital atau era komputer dan otomatisasi yang menyebabkan waktu dan ruang tidak lagi berjarak dan 4) Revolusi Industri 4.0 (2011-Sekarang) yang sering disebut sebagai era disrupsi technology. Era ini ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual (cyber physical-otomasi robot).

Sebagai era yang saat ini kita berada di dalamnya, maka harus dicermati bahwa konsekuensi dari era Revolusi Industri 4,0 adalah munculnya SDM baru dengan perubahan kualitas dan ragam kompetensi. Perubahan kualitas dan kompetensi yang baru ini tidak bisa dihindari oleh dunia Pendidikan sebagai penyedia SDM berkualitas. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan generasi bangsa agar mampu hidup secara layak di masa sekarang dan utamanya masa yang akan datang. Di sinilah terlihat urgennya menyediakan model pendidikan baru yang mampu memfasilitasi tuntutan global, khasanah kearifan lokal dan dilaksanakan secara damai sebagai alternative untuk mewujudkan masyarakat aman, damai, sejahtera dan ramah.

Dalam hal ini baik Pemerintah atau Masyarakat bisa mengembangkan model Pendidikan baru sesuai nilai budaya bangsa (seperti 435 dari Islam Nusantara yang saat ini diminati oleh internasional) sebagai keunggulan bangsa Indonesia, dengan menggunakan prinsip Peace Education (PE) yang diterapkan dalam konteks 4C sebagai tuntutan abad 21.

Berdasarkan hal inilah maka kajian kali ini akan dilakukan untuk melakukan

identifikasi atas berbagai tuntutan dan tantangan dari abad 21 (Revolusi Industri 4.0), serta mencermati apa sesungguhnya yang diinginkan oleh era ini (4C) dan bagaimana strategi alternative untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis 4C sebagai tuntutan dan pemertahanan nilai-nilai budaya bangsa (435) sekaligus sebagai distingsi pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan secara damai untuk semua warga, bangsa dan masyarakat Indonesia khususnya dan warga dunia pada umumnya.

2. Pembahasan

a. Tuntutan dan Tantangan Abad 21

Abad 21 sebagai realitas yang dihadapi oleh semua elemen yang ada di dalamnya, memiliki tuntutan serta tantangan tersendiri. Tuntutan dan tantangan tersebut harus ditangkap, diolah, diantisipasi oleh dunia pendidikan sehingga pendidikan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan tersebut tanpa harus kehilangan makna dari nilai pendidikan itu sendiri.

Apa saja sebenarnya yang menjadi tuntutan dari Abad 21? Setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM yang hidup di era ini. Keempat kompetensi yang dimaksud adalah: *a) learning competencies*, *b) literacy competencies*, *c) life competencies* dan *d) moral competencies* (Wahab, 9 Pebruari 2019).

Pertama. Learning competencies. Kompetensi pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Jenis kompetensi ini jika dimiliki oleh guru menurut Chen, akan mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif (Chang Zhu, 2013) dan jika dimiliki oleh peserta didik maka peserta didik akan tampil sebagai problem solver di zamannya (BUSD, 2018). Adapun keempat kompetensi pembelajaran yang dimaksud adalah *critical thinking*, *creativity*, *communication* dan *collaboration* yang sering diakronimkan dengan 4C.

Kedua. Literacy competencies. Menurut Bundy, istilah kompetensi literasi mengacu kepada serangkaian ketrampilan dan pemahaman yang memungkinkan seseorang mengenali kebutuhan informasi, memutuskan sumber daya mana yang paling baik untuk menjawab kebutuhan itu, tahu cara menggunakan sumber daya secara efektif dan mengevaluasi informasi yang mereka temukan (Islam dan Tsuji, 2010).

Kompetensi literasi yang semestinya dikuasai oleh seseorang yang hidup di era ini, setidaknya ada 3, yaitu *information/data literacy*, *technology literacy* (*media-IT*) dan *human literacy*. Ketiga literasi tadi merupakan literasi baru, di mana literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital secara positif, sedangkan literasi teknologi merupakan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti; Artificial intelegent atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berfikir seperti manusia dan meniru tindakannya seperti pemerolehan informasi dan aturan menggunakannya (pembelajaran), menggunakan aturan untuk membuat simpulan (penalaran) dan koreksi diri; coding, Engineering Principles (Farras, 2019).

Adapun yang dimaksud dengan *human literacy* adalah kemampuan yang harus dimiliki agar manusia berfungsi dengan baik di lingkungan manusia; humanities, komunikasi dan desain. Jika literasi ini dikuasai maka individu tersebut akan memiliki ketrampilan *leadership* dan *team work*, *cultural agility* (kelincahan dan kematangan budaya) yang menyebabkan individu mampu bekerja dengan lingkungan yang berbeda sekalipun serta dimilikinya *entrepreneurship* (termasuk juga *social entepreneurship*).

Pada situasi masyarakat saat ini, literacy informasi dan teknologi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, karena dengan literasi ini maka siswa maupun guru bisa menemukan informasi yang luas untuk kemudian diintegrasikan dengan informasi-informasi lain dari banyak sumber dan secara efektif bisa digunakan untuk penyelesaian masalah belajar dan pembelajaran (Segers & Verhoven) (Chang Zhu, 2013).

Ketiga. Life Competencies. Kompetensi hidup yang semestinya dimiliki SDM era ini adalah fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas dan kompetensi social. Koster, Brekelmans, Korthagen dan Wubbels menjadikan kompetensi social sebagai inti dari kompetensi hidup di era revolusi industry 4.0, karena kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama dengan beragam latar belakangnya (Chang Zhu, etc, 2013).

Keempat. Moral Competencies. Lind mendefinisikan kompetensi moral sebagai kesadaran terhadap satu perilaku moral yang universal (aspek afektif) dan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku moral

secara konsisten (Sit, 2010). Kompetensi jenis ini sangat penting dikuasai oleh peserta didik yang akan hidup di era disrupsi teknologi agar hidupnya sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Adapun kompetensi moral yang penting dikuasai adalah responsibility, truthfulness and honesty (kebenaran dan kejujuran) serta integritas.

Dengan keempat jenis kompetensi yang menjadi tuntutan abad 21 maka memberikan implikasi bagi dunia pendidikan baik secara umum maupun secara khusus (guru dan peserta didik). *Pertama*, Tantangan Pendidikan abad 21. Berdasarkan Sumber JACQUES DELORS (ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad 21 PBB, maka tantangan yang dihadapi pendidikan abad 21 adalah munculnya beberapa ketegangan antara: global - lokal, universal - individual, tradisi-kemodernan, jangka Panjang-jangka pendek, kompetisi-kesamaan kesempatan, perluasan pengetahuan-kemampuan mencernakan dan spiritual-material.

Implikasi lebih jauh adalah munculnya tantangan bagi guru abad 21, yang menurut Susanto meliputi: *Teaching in multicultural society, Teaching for the construction of meaning, Teaching for active learning, Teaching and technology, Teaching with new view about abilities, Teaching and choice*, serta *Teaching and accountability* (Ishak, 2011). Tantangan yang sama juga ditemui para peserta didik, yaitu 4 kompetensi tuntutan abad 21 sebagaimana dijelaskan di awal.

b. Urgensi 4C

4C merupakan komponen dalam learning competencies yang menjadi bagian dari 4 kompetensi abad 21. 4C selain sebagai 4 kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik, maka 4C juga akan menyiapkan peserta didik untuk bisa menjalani kehidupan dengan lingkungan kerja yang sangat kompleks yaitu lingkungan masyarakat global. Hal ini menjadi sangat urgen karena di era ini peran yang paling esensial bisa dilakukan oleh individu adalah dengan peran sebagai kolaborator, komunikator, pemikir kritis, maupun kreator (BUSD, 2018).

Keempat komponen 4C meliputi Creativity, Critical Thinking, Communication dan Collaboration. Dengan literasi data dan technology yang dimiliki seseorang, disertai dengan kemampuan berfikir kritisnya maka akan melahirkan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi sehingga

individu bisa tampil sebagai creator. Disamping itu dengan kemampuannya berkomunikasi dan berkolaborasi maka ia akan tampil sebagai problem solver. Sehingga tampak jelas bahwa 4C merupakan kompetensi yang sangat diperlukan bagi semua jenis pekerjaan di semua bidang.

Era disrupsi teknologi yang menghadirkan peluang berbagai macam jenis pekerjaan baru juga mutlak membutuhkan 4 kompetensi tadi. Berdasarkan hasil riset CST; The Canadian Scholarship Trust Plan pada tahun 2018, maka diperkirakan ada beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul dengan lowongan pekerjaan mencapai ribuan seperti; tele-surgeon (dokter bedah online/memakai robot), nostalgist (desainer spesialis nostalgia), re-wilder (petani yang memperbaiki kerusakan lingkungan), simplicity expert (ahli (bisnis) kesederhanaan), garbage desainer (desainer limbah), robot counselor, helath navigator (pembimbing kesehatan), solar technology specialist (spesialis tenaga surya), aquaponic fish farmer (peternak ikan akuaponik) dan sebagainya. Di waktu yang sama pula CJOF Index (Cognizant Jobs of The Future) melakukan riset yang menghasilkan ekstrapolasi atas berbagai jenis dan jumlah lowongan pekerjaan sebagaimana table berikut.

Tabel 8. Pertumbuhan Jenis Pekerjaan Baru

Jenis Pekerjaan Baru	Perkiraan Angka Lowongan
Pengembang Perangkat Lunak	12.000
Cyber Calamity Forecaster	8.300
Desainer/Pengembang UI/UX	6.800
Perancang Busana	Pertumbuhan 279%
Insinyur Tenaga Surya	Pertumbuhan 275%
Spesialis Medsos	Pertumbuhan 172%
Konselor Genetik	Pertumbuhan 163%
Data Science	Ilmuwan data

Kembali ke 4C sebagai learning competencies bagi pendidikan abad 21, maka 4C akan memfasilitasi layanan pendidikan dan khususnya secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Sesuai konteks Indonesia misalnya, penerapan 4 C ada dalam K-13, di mana:

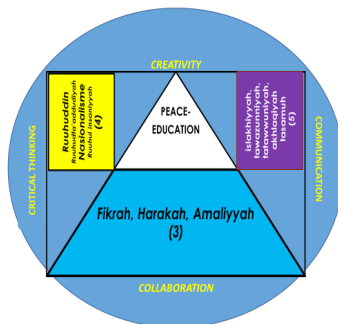
- 1) C pertama yang berkaitan dengan ketrampilan berpikir kritis difasilitasi dalam penerapan pendekatan saintifik lewat 5M (dari mengamati

sampai mengkomunikasi) melalui model dan strategi pembelajaran *problem based learning* serta *project based learning*.

- 2) C kedua (Creativity) sebagai kelanjutan dari kemampuan berfikir kritis sehingga mampu menerima, menyeleksi dan menggunakan literacy data/teknologi secara bijak maka akan menghasilkan produk-produk inovasi yang sustainable sekaligus memiliki novelty yang tinggi.
- 3) C ketiga yaitu communication merupakan ketrampilan seseorang untuk bisa berkomunikasi secara bijaksana. Dalam konteks pembelajaran ketrampilan ini sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan sesama peserta didik, guru maupun sumber belajar yang lain. Oleh karena itu communication bisa difasilitasi lewat kegiatan pembelajaran yang lebih banyak mengeksplor (siswa aktif menemukan) melalui model pembelajaran discovery learning yang dikombinasikan dengan kemampuan bahasa yang bagus serta IT secara bijak.
- 4) Collaboration sebagai C terakhir dalam learning competencies merupakan kompetensi seseorang untuk bisa bekerjasama dalam kelompok sehingga diperoleh perluasan pengetahuan sekaligus pencernaan makna dari materi yang dipelajari.

c. Strategi Mewujudkan Cilacap 4 C Melalui Model Pendidikan 435-PE-4C

Melihat karakteristik yang ada dalam elemen-elemen abad 21 serta implikasi utamanya bagi dunia pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana menformulasikan model pendidikan abad 21 konteks Indonesia?. Setidaknya dalam kesempatan ini diajukan alternative model pendidikan 435-PE-4C yang terdeskripsikan dalam gambar berikut.



Gambar.27. Model Pendidikan 435-PE-4C

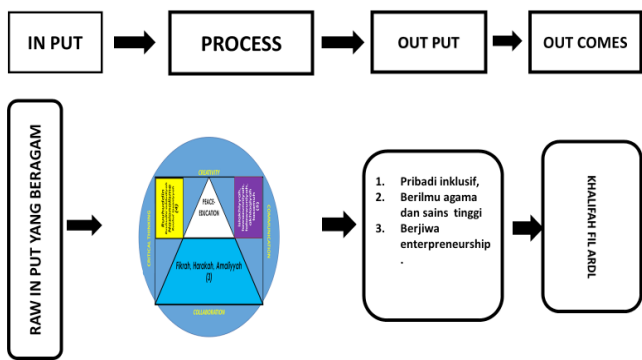
Model ini diformulasikan dari tiga komponen utama yang melandasi pengembangannya, yaitu 1) 435 yang bersumber dari khasanah nilai-nilai budaya bangsa berupa Islam Nusantara. Nilai ini dibangun sebagai distingsi bagi pendidikan abad 21 ala Indonesia yang sekaligus menjadi keunggulan komparatif dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara lain, 2) PE atau Pendidikan perdamaian yang sebenarnya juga merupakan tuntutan pendidikan global yang notabeneanya berangkat dari calon peserta didik maupun pendidik yang memiliki latar belakang berbeda, dan 3) 4C sebagai ciri pembelajaran abad 21. Hal ini berarti bahwa model ini di satu sisi ingin mengangkat sesuatu yang bersifat lokal-nasional agar tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat global-universal-internasional.

Pertama, 435. Yang dimaksud dengan 435 sebagai konsep yang diambilkan dari Islam Nusantara merupakan akronim dari 4 spirit, 3 pilar dan 5 penanda Islam Nusantara. Konsep 435 sangat relevan dengan learning competencies, life competencies maupun literacy competencies. 4 spirit (semangat) Islam Nusantara akan menjadi ruh dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu: *ruuhuddin* (semangat keagamaan), nasionalisme, *ruuhudta'addudiyah* (semangat kebhinekaan) dan *ruuhul insaniyyah* (semangat kemanusiaan). Sedangkan 3 pilar Islam Nusantara merupakan pembangun pendidikan, berupa: pemikiran (fikrah pemikiran (*fikrah*), gerakan (*harakah*), tindakan nyata (*amaliyyah/amaliah*) serta 5 penanda Islam Nusantara, yaitu *islakhiyyah*, *tawazunniyah*, *tatawuwunyah*, *akhlaqiyah* dan *tasamuh* (Zulfa, 2018) dan (Hazen (ed), 2015) yang sudah menjadi karakter dari individu setelah menyelesaikan proses pendidikannya.

.Kedua, Peace Education (PE). PE merupakan pendidikan yang tidak mempersoalkan hal-hal friksi yang menjadi pembeda diantara peserta didik sehingga pendidikan berjalan secara damai (literasi baru) yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pendidikan. PE yang diinspirasi dari Gerakan dukungan pendidikan perdamaian oleh Comenius di Eropa (1642/1969) memiliki tujuan akhirnya adalah dunia di mana pria dan wanita akan hidup dalam harmoni dengannya penerimaan budaya yang beragam (Harris, 2008) serta untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang akar konflik, kekerasan dan ketidakdamai dalam lingkup personal, interpersonal, komunitas, nasional, regional dan internasional (Muslihah, 2014).

Ketiga, 4C. 4C yang terdiri dari *Creativity, Critical thinking, Communication, Collaboration (learning & Inovation skill)* merupakan persiapan yang esensial bagi peserta didik untuk kehidupan dan lingkungan kerja yang kompleks di abad 21. Dengan 4C maka peserta didik bisa menjadi anggota dari masyarakat global dengan peran sebagai kolaborator, komunikator, pemikir kritis, maupun kreator (BUSD, 2018).

Ketiga konsep yang melatarbelakangi munculnya model ini, jika diimplementasikan akan tampak dalam sistem pendidikan secara menyeluruh sebagaimana penjelasan bagan berikut.



Gambar 28. Sistem Pendidikan Berbasis Model 435-PE-4C

Pendidikan sebagai suatu sistem diawali dengan input pendidikan yang memiliki raw input sangat beragam, baik latar belakangnya (suku, bangsa, Bahasa, negara dsb) serta beragam kemampuannya. Raw input ini akan diproses lewat fasilitasi kegiatan pembelajaran yang di dalamnya diruhi oleh 4 spirit, dibangun di atas 3 pilar, ditandai dengan 5 penanda Islam Nusantara yang dikombinasikan dengan karakteristik PE beserta 4 C, sehingga proses pendidikan ini akan melahirkan output yang memiliki ciri sebagai pribadi yang inklusif, berilmu agama dan sains tinggi serta berjiwa entrepreneurship sehingga pada akhirnya akan lahir outcomes pendidikan berupa pribadi yang mampu berperan sebagai khalifah fil arld yang rahmatan lil ‘alamien.

3. Penutup

Membicarakan persoalan-persoalan pendidikan memang sangat imperative, tetapi menjalani tugas di dunia pendidikan secara berkualitas dengan komitmen tinggi akan memperoleh kepuasan dan makna yang tak ternilai. Hal ini dikarenakan mendidik pada hakikatnya adalah menyiapkan masa depan peserta didik sebenar-

benarnya masa depan. Sedemikian pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa sampai tokoh besar dunia Imam Ghazali mengingatkan urgennya kedudukan pendidik untuk masa depan peserta didik: “Kedudukan Guru/Dosen/Pendidik lebih tinggi derajatnya daripada kedudukan orang tua kandung. Karena, GURU yang menjadi penyebab selamatnya anak di akhirat sedangkan orang tua hanya menjadi penyebab kelahiran anak di dunia”

Daftar Pustaka

- Hazen (ed), I. H. (2015). *100 Ulama Dalam Lintas Sejarah NU*. Jakarta: Lembaga Ta'mir Masjid-PBNU.
- BUSD. (2018). *21st Century Learning*. Retrieved from Berresia Union School District Education Services: <https://www.berryessa.k12.ca.us/documents/Common%20Core%20State%20Standards/BUSD%204Cs%20Presentation.pdf>
- Chang Zhu, D. W. (2013). What core competencies are related to teachers' innovative teaching?. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2013, Vol. 41, No. 1, 9–27, <http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.753984>.
- Farras, B. (2019, May 13 pukul 13:08). *Mengenal Artificial Intellegence dan Cara Kerjanya*. Retrieved from CNBT Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190513130056-37-72069/>
- Harris, I. (2008, february 22). *History of Oeace Education*. Retrieved from https://www.tc.columbia.edu/epe/epe-entries/Harris_ch2_22feb08.pdf
- Ishak, A. S. (2011). Guru, Generasi Z dan Pembelajaran Abad 21.
- Mohammed Anwarul Islam dan Keita Tsuji. (2010). Assessing information literacy competency of Information Science and Library Management graduate students of Dhaka University,. *IFLA Journal Of cial Journal of the International, Federation of Library Associations and Institutions*, https://cf-www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-36-4_2010.pdf#page=20.
- Muslihah, E. (2014). Pesantren dan Pengembangan Pendidikan Perdamaian. Studi Kasus di esantren An Nidzomiyah Labuan Pandeglang Banten. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2014, 315-316.

- Saleh, M. N. (2012). *Peace education : kajian sejarah, konsep, & relevansinya dengan pendidikan islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sit, M. (2010). Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2010, 3.
- Wahab, R. (9 Pebruari 2019). *FGD FRI Tentang Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Padang: FRI.
- Zulfa, U. (2018). Model of Islamic Religion Education 435 Based on Islam Nusantara on College. *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 12, Nomor 1 Tahun 2018, hal 13-26 (hal 23). Tersedia: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/view/2462/pdf>, 13-23.



BAB IV

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EDUCATION

A. Strategi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia Melalui Pendidikan 4.0

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman (: desrupsi teknologi) saat ini merupakan suatu hal yang tak terelakkan dan ‘memaksa’ semua elemen yang ada di dunia ini untuk cepat merespon, mengadaptasi dan mengembangkan diri. Sedangkan Revolusi Industri 4.0 memunculkan “SDM baru” dengan perubahan kualitas dan ragam kompetensi baru pula. Selanjutnya, terbentuknya “kualitas SDM baru” bisa difasilitasi oleh pendidikan yang berkualitas pula, karena pendidikan sesungguhnya menyiapkan generasi saat ini untuk hidup di masa depan. Lahirnya bangsa hebat biasanya karena pendidikannya hebat.

Realitas di Indonesia yang menunjukkan gambaran umum kualitas pendidikannya antara lain bisa dilihat berdasarkan laporan World Bank & Bappenas tahun 2019, sebagai berikut:

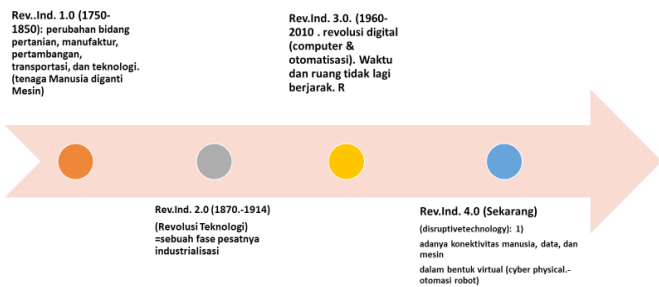
- a. Kualitas SDM: 1) *Human Capital Index* (HCI) Indonesia: 0.53 (87/157 Negara), 2) 58,77% pekerja Indonesia Berpendidikan SMP ke bawah, 3) produktivitas kerja Rendah (21% dr AS)
- b. Efisiensi Pendidikan: Anak Tidak Sekolah (ATS) masih Tinggi (4,4 juta)
- c. *Equal and equity*: 1) Partisipasi Pendidikan anak dari keluarga kurang mampu masih rendah (APK SMA 0,69%, PT 0,16% dr 20% siswa termiskin, 2) Taraf Pendidikan antar wilayah tidak merata (Jakarta 10,89 dan Papua 6,45) (PPN/Bappenas, 2019).

Situasi yang demikian tentu tidak bisa dibiarkan berlarut, harus ada upaya-upaya serius dan terobosan-terobosan yang jitu sehingga pendidikan kita bisa menghasilkan SDM berkualitas dan mengejar keteringgalannya dengan negara maju lainnya. Berdasarkan hal ini maka akan dikupas: a) Karakteristik SDM Berkualitas 4.0, b) Pendidikan 4.0, c) Strategi Penyiapan Pendidikan 4.0.

2. Karakteristik SDM Berkualitas 4.0.

Konsep umum pendidikan secara linear akan mampu membentuk produktivitas dan kesejahteraan yang tinggi. Pendidikan sebagai *human investment in education* akan mampu membentuk manusia menjadi pribadi yang memiliki produktivitas tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya (*higher productivity*) dan secara linier pula akan semakin tinggi pula pendapatan (*higher earning*) dan kesejahteraanya.

Produktivitas sebagai impact dari pendidikan juga justru bisa disimak dari perjalanan revolusi industri yang ada dalam kehidupan manusia.



Bagan.29. Revolusi Industri

Revolusi Industri Pertama (tahun 1950-1850an), di mana mulai muncul adanya perubahan bidang pertanian, manufaktur, pertmabngan, transportasi dan teknologi yang dicirikan dengan digantinya tenaga manusia dengan tenaga mesin, juga karena adanya pendidikan. Pendidikan mampu menfasilitasi manusia menciptakan mesin di bidang pertanian dan sebagainya sehingga memudahkan kerja manusia.

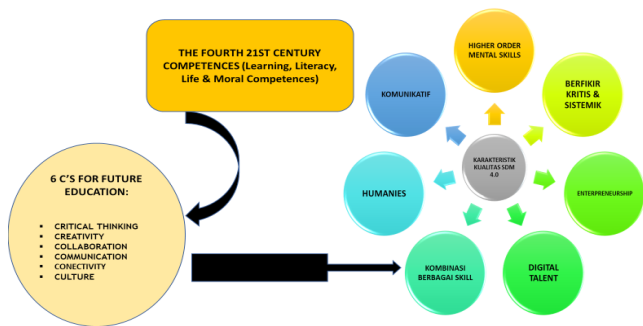
Revolusi Industri kedua (tahun 1870-1914an) sebagai kelanjutan dari revolusi pertama, merupakan sebuah fase pesatnya industrialisasi dalam segala bidang. Dilanjutkan dengan Revolusi Industri 3.0. (1960-2010) sebagai revolusi digital (computer & otomatisasi) di mana waktu dan ruang tidak lagi berjarak dan saat ini dengan Revolusi Industri 4.0 yang identik dengan *disruptive technology*, yang dicirikan dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual (*cyber physical*.-otomasi robot) juga akibat dari adanya temuan-temuan baru dari SDM yang dihasilkan dari dunia pendidikan. Walaupun demikian tidak otomatis setiap negara dan setiap warga negaranya siap untuk hidup di era 4.0 ini. Di sinilah dibutuhkan pendidikan baru. Namun sebelum masuk ke pembicaraan tentang pendidikan baru ini, akan dikaji dulu tentang apa itu sebenarnya revolusi industry 4.0 dan jenis SDM berkualitas seperti apa yang diinginkan oleh era ini.

Menurut Prof. Klaus Martin Schwab (Schwab, 2020), Revolusi Industri 4.0 adalah Revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. The Mckinsey Global Institute (Company, 2017) dan (Haryono, 2018) dan memprediksikan beberapa perubahan akibat dampak dari revolusi ini, sebagaimana tampak dalam tabel.

Tabel 9. Perubahan Akibat Revolusi Industri 4.0

N0	Jenis Perubahan	Keterangan
1	<i>Jobs Lost, Jobs Gained</i>	- McKinsey Global Institute (Desember 2017), pada 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru, karena digantikan mesin. - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, = memasuki revolusi industri 4.0 Indonesia akan <u>kehilangan 50 juta</u> peluang kerja.
2	<i>Meningkatkan Efisiensi</i>	Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, sebaliknya. Revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi . Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Ia tidak sependapat bahwa revolusi industri 4.0 akan mengurangi tenaga kerja, sebaliknya malah <u>meningkatkan efisiensi</u> .
3	<i>Peningkatan Net Tenaga Kerja</i>	Era digitalisasi pada thn 2025 memberikan PELUANG PENINGKATAN NET TENAGA KERJA HINGGA 2.1 JUTA PEKERJAAN BARU
4	<i>Desrupsi semua bidang kehidupan</i>	: bidang bisnis, bidang transportasi, kodekteran, pemerintah dan Pendidikan
5	<i>Ramah Bumi</i>	Terdapat <u>Pengurangan Emisi Karbon</u>

Dengan adanya dampak tersebut, setidaknya bisa dirumuskan beberapa karakteristik SDM baru dengan kualitas baru era revolusi indiiustri 4.o sebagaimana tampak dalam bagan berikut.



Bagan.30. Karakteristik Kualitas SDM 4.0

Dari bagan di atas bisa dipahami bahwa ada 4 kompetensi inti sesuai tuntutan abad 21 yaitu *Learning Competencies, literacy competencies, life competencies and moral competencies competencies* (Wahab, 9 Pebruari 2019). Kompetensi pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Jenis kompetensi ini jika dimiliki oleh guru menurut Chen, akan mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif (Chang Zhu, 2013) dan jika dimiliki oleh peserta didik maka peserta didik akan tampil sebagai *problem solver* di zamannya (BUSD, 2018). Adapun keempat kompetensi pembelajaran yang dimaksud adalah *critical thinking, creativity, communication dan collaboration* yang sering diakronimkan dengan 4C yang kemudian berkembang menjadi 6 C yaitu *6 C'S FOR FUTURE EDUCATION* dengan menambahkan 2 kompetensi yaitu *Connectivity dan Culture*.

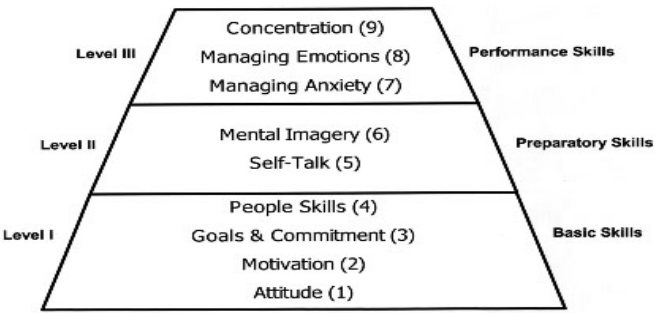
Literacy competencies. Menurut Bundy, istilah kompetensi literasi mengacu kepada serangkaian ketrampilan dan pemahaman yang memungkinkan seseorang mengenali kebutuhan informasi, memutuskan sumber daya mana yang paling baik untuk menjawab kebutuhan itu, tahu cara menggunakan sumber daya secara efektif dan mengevaluasi informasi yang mereka temukan (Islam dan Tsuji, 2010).

Kemudian kompetensi kedua, yaitu kompetensi literasi berupa, *information/ data literacy, technology literasi (media-IT) dan human literacy*. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital secara positif, sedangkan literasi teknologi merupakan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti; Artificial intelegent atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berfikir seperti manusia dan meniru tindakannya seperti pemerolehan informasi dan aturan menggunakannya (pembelajaran), menggunakan aturan untuk membuat simpulan (penalaran) dan koreksi diri; *coding, Engineering Principles* (Farras, 2019). Adapun yang dimaksud dengan *human literacy* adalah kemampuan yang harus dimiliki agar manusia berfungsi dengan baik di lingkungan manusia; humanities, komunikasi dan desain. Jika literasi ini dikuasai maka individu tersebut akan memiliki ketrampilan *leadership dan team work, cultural agility* (kelincahan dan kematangan budaya) yang menyebabkan individu mampu bekerja dengan lingkungan yang berbeda sekalipun serta dimilikinya entrepreneurship (termasuk juga *social entrepreneurship*).

Dua kompetensi berikutnya adalah kompetensi hidup (*Life Competencies*) dan kompetensi moral (*Moral Competencies*). Kompetensi hidup yang semestinya dimiliki SDM era ini adalah fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas dan kompetensi social. Koster, Brekelmans, Korthagen dan Wubbels menjadikan kompetensi social sebagai inti dari kompetensi hidup di era revolusi industry 4.0, karena kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama dengan beragam latar belakangnya (Chang Zhu, etc, 2013). Sedangkan kompetensi moral yang oleh Lind didefinisikan sebagai kesadaran terhadap satu perilaku moral yang universal (aspek afektif) dan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku moral secara konsisten (Sit, 2010). Kompetensi jenis ini sangat penting dikuasai oleh peserta didik yang akan hidup di era disrupsi teknologi agar hidupnya sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Adapun kompetensi moral yang penting dikuasai adalah *responsibility, truthfulness and honesty* (kebenaran dan kejujuran) serta integritas.

Berdasarkan kepada empat kompetensi tuntutan hidup di abad 21 dan khususnya era Revolusi Industri 4.0 maka terumuskan standar kualitas SDM 4.0 adalah:

Pertama. Higher order mental skills adalah ketrampilan mental tingkat tinggi dari 9 tingkatan ketrampilan mental (Jack J. Lesyk, 2015)



Bagan.31. 9 Tingkatan Kompetensi Mental

Sembilan tingkat ketrampilan mental secara umum dibagi dalam tiga level ketrampilan, yaitu: a) level I sebagai ketrampilan mental dasar (*basic skills*) terdiri dari 4 tingkat ketrampilan mental, yaitu: sikap/*attitude* (1), motivasi/*motivation* (2), tujuan dan komitmen/*goals and commitment* (3) dan ketrampilan manusia. *People skills* (4), b) level II sebagai kerampilan persiapan (*preparation skills*) terdiri dari 2 tingkat ketrampilan mental, yaitu bicara mandiri/*selef-talk* (5) dan citra

mental/*mental imagery* (6), dan c) level III sebagai level ketrampilan performa/ ketrampilan kinerja (*performance skills*) yang terdiri dari 3 ketrampilan mental, yaitu: mengelola kecemasan/*managing anxiety* (7), mengelola emosi/*managing emotions* (8) dan konsentrasi/*concentration* (9).

Ketrampilan Mental Level I (ketrampilan dasar) adalah ketrampilan dasar yang luas untuk mencapai tujuan jangka panjang, pembelajaran, dan mempertahankan praktik sehari-hari. Ketrampilan ini bisa dikategorikan sebagai *lower mentall skills*. Sedangkan ketrampilan mental Level II (ketrampilan persiapan) adalah ketrampilan yang digunakan sebelum kinerja atau untuk mempersiapkan kinerja. Ketrampilan ini bisa disebut pula sebagai *middle mentall skills*. Terakhir adalah ketrampilan mental Level III (ketrampilan kinerja) adalah ketrampilan yang digunakan selama kinerja actual dilaksanakan. Ketrampilan ini merupakan ketrampilan tingkat tinggi (*higher order mentall skills*). Adapun kesembilan jenjang ketrampilan mental yang merupakan penjabaran dari 3 level ketrampilan mental, penjelasannya bisa disimak berikut ini.

- 1) **sikap/attitude.** Sikap mental yang perlu dibangun oleh setiap orang yang ingin sukses adalah:
 - a) sadari bahwa sikap adalah pilihan
 - b) pilihlah sikap yang dominan positif
 - c) lihatlah bidang kerja apapun sebagai peluang untuk bersaing dengan diri sendiri dan belajar dari kegagalan dan kesuksesan diri
 - d) mengejar keunggulan, bukan kesemournaan dan menyadari bahwa diri sendiri, dan orang lain juga tidaklah sempurna
 - e) pertahankan keseimbangan dan perspektif antara bidang kerja dan sisa hidup
 - f) hormati bidang kerja, diri sendiri dan orang lain
- 2) **motivasi/motivation.** Orang yang sukses adalah orang yang: a) sadar akan penghargaan dan manfaat yang diharapkan melalui aktivitas partisipasi diri, b) mampu bertahan dengan tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit bahkan ketika imbalan dan manfaat tidak segera datang dan c) sadari bahwa manfaat berasal dari partisipasi diri bukan hasilnya.
- 3) **tujuan dan komitmen/goals and commitment.** Indikator dari ketrampilan mental ini antara lain; a) tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis, terukur dan berorientasi waktu, b) menyadari tingkat kinerja

saat ini dan mampu mengembangkan rencana yang spesifik dan terperinci untuk mencapai tujuan mereka dan c) berkomitmen tinggi untuk tujuan dan untuk melaksanakan tuntutan harian dan program kerja/pelatihan.

- 4) **ketrampilan orang/*People skills***. Indikator dari ketrampilan orang antara lain: a) menyadari bahwa setiap individu adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup keluarga, teman, rekan kerja, guru/pelatih dan lainnya, b) jika perlu, komunikasikan pikiran, perasaan dan kebutuhan diri individu dengan orang lain dan sebaliknya juga, luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain, dan c) telah mempelajari ketrampilan yang efektif untuk menghadapi konflik, lawan yang sulit dan orang lain ketika mereka menentang.
- 5) **bicara mandiri/*self-talk*** adalah ketrampilan mental berupa: a) kemampuan mempertahankan kepercayaan diri selama masa-masa sulit dengan berbicara pada diri sendiri secara realistis dan positif, b) berbicaralah dengan diri sendiri sama seperti berbicara dengan sahabat sendiri, dan c) gunakan *self-talk* untuk mengatur pikiran, perasaan dan perilaku selama kompetisi.
- 6) **citra mental/*mental imagery***. Citra mental diindikasikan dengan: a) mempersiapkan diri untuk kompetisi dengan membayangkan diri tampil sebaik mungkin dalam kompetisi, b) buat dan gunakan gambar mental yang detail, spesifik dan realistis, dan c) gunakan citra selama kompetisi untuk mempersiapkan Tindakan dan pemulihan diri dari kesalahan dan kinerja buruk.
- 7) **mengelola kecemasan/*managing anxiety***. Mengelola kecemasan dengan: a) terima kecemasan sebagai bagian dari bidang kerja, b) sadari bahwa beberapa tingkat kecerdasan dapat membantu mereka berkinerja dengan baik dan c) ketahui pula cara mengurangi kecemasan Ketika kecemasan menjadi terlalu kuat tanpa kehilangan intensitasnya.
- 8) **mengelola emosi/*managing emotions*** dengan: a) terima emosi yang kuat seperti kegembiraan, kemarahan dan kekecewaan sebagai bagian dari pengalaman kerja, b) mampu menggunakan emosi untuk meningkatkan kinerja bukan mengganggu kinerja
- 9) **konsentrasi/*concentration***. Sebagai ketrampilan mental yang tertinggi, maka konsentrasi bisa diketahui dari indikator berikut: a) ketahui apa yang harus diperhatikan selama dan setiap ada dalam situasi kerja atau apapun, b)

telah belajar bagaimana mempertahankan focus dan menahan gangguan baik yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan, c) mampu mendoatkan Kembali focus diri ketika konsentrasi hilang selama bekerja, d) telah bejara cara bermain di “sini dan sekarang”, tanpa memoerhatikan peristiwa masa lalu atau yang diantisipasi di masa depan.

Ketrampilan mental tingkat tinggi yaitu 7, 8 dan 9 ini sangat dibutuhkan oleh SDM yang hidup di era 4.0 ini yang syarat dengan kompetisi yang sangat tinggi pula akibat dunia tanpa batas dan kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Kedua. Berfikir kritis dan sistemik. Berfikir kritis adalah suatu proses penggunaan kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Dari definisi tersebut dapat maka berpikir kritis mempunyai ciri-ciri: (1) menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu, (2) menganalisis, menggeneralisasikan, mengorganisasikan ide berdasarkan fakta/informasi yang ada, dan (3) menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis dengan argumen yang benar (Cahyono, 2015).

Karakteristik SDM berkualitas era 4.0 ini berkaitan dengan kemampuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di era 4.0 yang cenderung sistemik. Oleh karenanya berfikir kritis sebagai bagian dari berpikir tingkat tinggi menjadi sangat diperlukan, terutama dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks seperti di era 4.0. Demikian pendapat Saputra (Dini, 2018).

Ketiga. Entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan faktor penting yang bisa menumbuhkan setro perekonomian suatu negara. Kewirausahaan juga dikaitkan dengan generasi muda karena mereka memiliki potensi kewirausahaan yang besar yang jika dikembangkan akan mampu berkontribusi bagi laju perkembangan dan kemajuan suatu bangsa (Ahmad dkk, 2016). SDM era 4.0 adalah bagian dari kelompok generasi muda, maka standar kualitasnya antara lain dari ketrampilan kewirausahaan yang harus dimiliki agar ia bisa hidup, beradaptasi dan berkembang di era 4.0 dan masa depannya lagi.

Keempat. Digital talent. Orang yang hidup di era 4.0 tidak semuanya adalah digital native, masih sebagian juga yang masuk kelompok immigrant digital. Oleh karenanya yang perlu dibangun adalah bagaimana SDM 4.0

memiliki digital talent (bakat digital), yaitu kemampuan yang berkaitan dengan memahami, menggunakan dan membuat perangkat-perangkat berbasis teknologi digital, karena real mereka hidup di era digital. Walaupun istilahnya bakat digital, tetapi bakat ini atau lebih tepatnya kemampuan ini bisa dibangun atau dibentuk dengan melalui pendidikan atau pelatihan berbasis Teknologi Informasi.

Program pengembangan bakat digital ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta bahkan mandiri. Sebagai contoh Kemenkominfo memberikan Beasiswa *Digital Talent* di tahun 2020 untuk masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Pada tahun 2020 ini beasiswa Digital Talent 2020 menawarkan Online Academy berbentuk pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan di bidang IT. Program Online Academy merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan *Global Technology Company* (Admin, 2020).

Kelima. Kombinasi berbagai skill. Pengusaan berbagai macam skill dan penggunaan yang dikombinasikan pada situasi satu dengan situasi lain tentunya berbeda. Artinya ciri kelima ini bukan ragam apa dari kombinasi skill tersebut tetapi lebih ditekankan kepada ketrampilan untuk mengkombinasikan berbagai skill yang dibutuhkan pada situasi yang berbeda.

Keenam. Humanies. Humanis bermakna dalam konteks ini adalah ketrampilan untuk berhubungan secara harmonis dan damai dengan orang lain yang relatif beragam latar belakang. Ragam perbedaan latar belakang orang lain tidak dijadikan pemicu perpecahan tetapi menjadi pemantik keunggulan untuk saling membutuhkan. Dunia yang mengglobal di sisi era 4.0 meniscayakan adanya interaksi orang-orang di belahan dunia satu dengan belahan dunia lain, oleh karenanya membutuhkan ketrampilan humanies. Dengan ketrampilan ini maka manusia bisa hidup di belahan bumi manapun.

Ketujuh. Komunikatif. Ciri terakhir dari kualitas SDM 4.0 adalah komunikatif, artinya ketrampilan SDM untuk bisa berkomunikasi secara bijaksana di tengah hiruk pikuknya banyak informasi dari sumber dan melalui media yang bermacam-macam. Bijaksana dalam pengertian, seseorang harus mampu memilah dan memilih informasi yang valid dan digunakan untuk kepentingan yang baik dan tepat serta tidak menimbulkan kegaduhan publik.

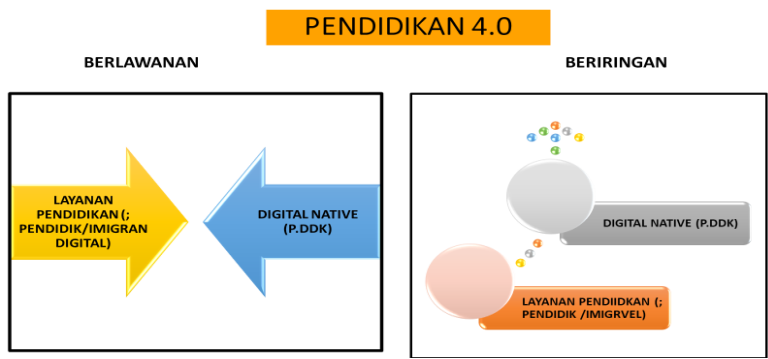
Dari ketujuh karakteristik Kualitas SDM 4.0, maka pertanyaannya siapa / pihak mana yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ketujuh kualitas SM 4.0 tersebut? Tentu saja jawabannya adalah Pendidikan 4.0. tapi apa dan bagaimana Pendidikan 4.0, maka jawabannya akan dikupas dalam sub bab berikutnya.

3. Pendidikan 4.0

Pendidikan 4.0 sebagai pendidikan yang saat ini dan akan datang harus disediakan terutama untuk generasi baru, maka menjadi penting sebelum membahas tentang karakteristik pendidikan 4.0, dicermati pula tentang pola pendidikan yang nanti akan dipilih berdasarkan karakteristik dari peserta didik yang notabenenya ada dalam kategori generasi milenial bahkan generasi digital native di satu sisi, sementara di sisi lain, guru sebagai fasilitator ada dalam kelompok imigran native.

Pertama. Pendidikan Berlawanan. Kemungkinan pertama dari oola interaksi dalam proses pendidikan 4.0 adalah pola berlawanan. Yang dimaksud dengan pola berlawanan adalah interaksi pembelajaran tidak memperhatikan karajteristik guru yang notabenenya sebagai imigran digital memberikan pelayanan yang cenderung kurang beradaptasi dengan karakteristik peserta didik yang notabenenya adalah generasi milenial bahkan digital native. Pola ini bisa diterapkan tetapi memberi peluang kurang efektif dan efisien.

Kedua. Pendidikan Beriringan. Kebalikan dari pola pertama adalah peserta didik yang generasi milenial dan digital native dilayani kebutuhannya oleh pendidik dengan cara pendidik mengikuti/mengiringi kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran relatif bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Guru menyesuaikan dengan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan peserta didik, terutama ketrampilan menggunakan sumber, media dan modus pembelajaran berbasis digital.



Bagan.32. Pola Pendidikan Berlawanan-Beriringan

Salah satu pembicaraan penting dalam pendidikan 4.0 adalah peserta didik yang notabene generasi milenial dan sebagian lagi di usia pendidikan para sekolah ataupun dasar adalah digital native menjadi penting diperhatikan, selain era 4.0 identik dengan era digital juga karena generasi ini memiliki karakteristik khusus yang harus dipahami untuk kemudian difasilitasi dalam interaksi pendidikannya agar peserta didik tumbuh menjadi generasi hebat.

Menurut Tim Penyusun Buku “Mendidik Anak di Era Digital” Kemendikbud ada beberapa karakteristik anak sebagai digital native, diantaranya:

- a. Identitas. Anak biasanya memiliki akun facebook, Twitter, Path, Instagram, You Tube dll utk membuktikan kpd dunia bahwa mereka ada
- b. Provokasi. Cenderung terbuka, blak-blakan dan lebih progresif
- c. Kebebasan berekspresi. Cenderung ingin memperoleh kebebasan, tidak mau diatur, dikekang. Ingin memegang control dan internet menawarkan kebebasan berekspresi.
- d. Proses Belajar. Selalu akses google, yahoo, dan mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar lebih cepat krn segala informasi ada di ujung jari mereka (Kemendikbud, 2016).

Setelah mengetahui karakteristik peserta didik dan pendidik di era 4.0 ini, selanjutnya yang harus diketahui adalah tantangan, tuntutan serta ciri khusus pendidikan 4.0 yang masih masuk kategori pendidikan abad 21.

Pertama. Tantangan Pendidikan 4.0. menurut sumber JACQUES DELORS (ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad 21 PBB, menyatakan bahwa pada abad 21 terjadi yang namanya ketegangan-ketegangan antara dua kutub yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia Pendidikan di abad ini sekaligus era revolusi industri 4.0. ketegangan dan atau tantangan yang dimaksud adalah:

- a. Global Vs lokal
- b. Universal Vs individual
- c. Tradisi Vs Kemodernan
- d. Jangka panjang Vs jangka pendek
- e. Kompetisi Vs kesamaan kesempatan
- f. Perluasan pengetahuan Vs Kemampuan mencernakan
- g. Spiritual Vs material



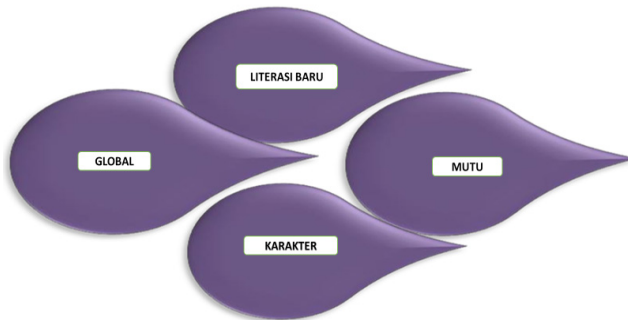
Bagan. 33. Tantangan Pendidikan 4.0

Kedua. Ciri khusus pendidikan Abad 21. Selain memiliki tantangan tersendiri, pendidikan abad 21 dan atau pendidikan 4.0 juga memiliki karakteristik khusus, yaitu:

- a. Berfokus pada **pemupukan potensi unggul** setiap peserta didik.
- b. **Keseimbangan beragam kecerdasan** (intelektual, emosional, sosial, spritual, kinestetis, dst.)
- c. Mengajarkan **life skills**.
- d. Sistem penilaiannya berbasis **portofolio** dari hasil karya siswa.
- e. Pembelajaran berbasis kehidupan **nyata** dan praktik di lapangan.
- f. **Guru** lebih berperan sebagai **motivator dan fasilitator** agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing.
- g. Pembelajaran didasarkan **pada kemampuan, cara atau gaya belajar, dan perkembangan psikologis** anak masing-masing
- h. Pilar Pendidikannya: Learning To Know/Do/Be/live together in peace & belajar utk memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (Dikdasmen, 2017).

Ketiga. Tuntutan Pendidikan 4.0. Tuntutan pendidikan 4.0 setidaknya ada empat hal yaitu: global, literasi baru, mutu dan karakter. *Tuntutan pertama yaitu global* berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik orientasi maupun sasaran subyek didik dan tenaga pendidik harus mengglobal, tidak dibatasi oleh sekat batas negara dan waktu. Sedangkan tuntutan kedua berupa literasi baru, artinya peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai literasi lama seperti

membaca, menulis dan berhitung, juga dituntut untuk menguasai literasi baru seperti literasi data, teknologi dan kemanusiaan (Fitriyani dkk, 2019). Sedangkan tuntutan mutu, sejalan dengan tuntutan pertama, bahwa persoalan mutu tidak hanya dalam ukuran nasional tetapi juga internasional dan kelas dunia. Terakhir adalah tuntutan karakter. Peserta didik pendidikan 4.0 dituntut memiliki karakter yang kuat untuk bisa hidup di era sangat tinggi kompetisi, sangat kompleks persoalan kehidupan dan lain sebagainya.



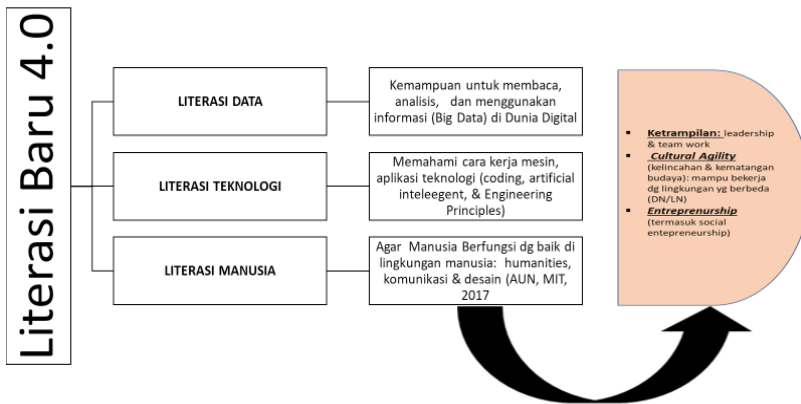
Bagan. 34. Tuntutan Pendidikan 4.0

Pada aspek literasi baru, maka pendidikan 4.0 harus membekali peserta didik dengan:

- a. Literasi data, yaitu Kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di Dunia Digital
- b. Literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, & Engineering Principles*)
- c. Literasi manusia, yaitu literasi agar manusia Berfungsi dg baik di lingkungan manusia: humanities, komunikasi & desain (AUN, MIT, 2017)

Jika ketiga jenis literasi baru ini dibekalkan pendidikan 4.0 kepada peserta didik, maka peserta didik akan tampil sebagai pribadi yang:

- a. Memiliki Ketrampilan: leadership & team work
- b. *Cultural Agility* (kelincahan & kematangan budaya): mampu bekerja dengan lingkungan yang berbeda (DN/LN)
- c. *Entrepreneurship* (termasuk *social entrepreneurship*)



Bagan. 35. Literasi Baru 4.0

4. Strategi Penyiapan SDM Berkualitas melalui Pendidikan 4.0

Pendidikan 4.0 adalah jawaban mempersiapkan SDM berkualitas versi 4.0. pertanyaanya adalah bagaimana strategi penyiapan pendidikan 4.0?. untuk melakukan penyiapan pendidikan 4.0 yang akan memfasilitasi lahirnya kualitas SDM 4.0 bisa disiapkan beberapa strategi untuk mencapai maksud tersebut. Strategi yang dimaksud meliputi tiga strategi besar yang masing-masing di dalamnya memuat lagi strategi khusus. Adapun ketiga strategi besar yang dimaksud adalah: 1) strategi umum, 2) strategi pendidikan dasar dan menengah dan 30 strategi pendidikan tinggi.

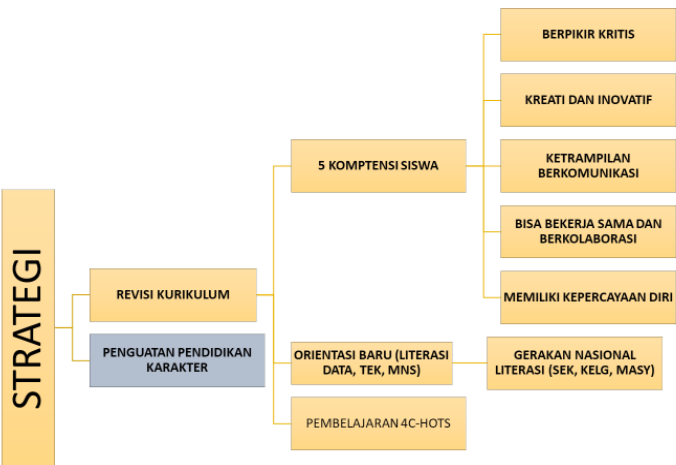


Bagan.36. Ragam Strategi Penyiapan Pendidikan 4.0

Pertama Strategi Umum. Strategi umum yang dilakukan untuk menyiapkan pendidikan 4.0 antara lain:

- a. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat.
- b. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat.
- c. Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat/*stakeholders*/pasar dan tuntutan teman saing.
- d. Pemanfaatan sumber luar (*out sourcing*), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan.

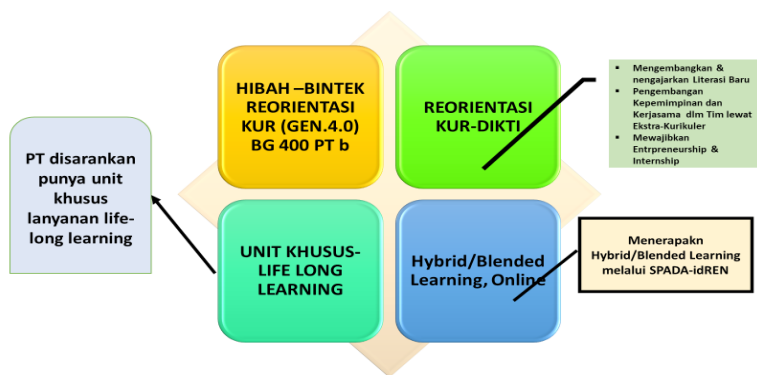
Kedua. Strategi Dikdasmen. Untuk strategi Pendidikan dasar dan menengah bisa dilakukan mellaui dua strategi besar yaitu: 1) revisi kurikulum dan 2) penguatan Pendidikan karakter. Revisi kurikulum diperlukan untuk membekali peserta didik dengan: a) 5 kompetensi siswa, yaitu berpikir kritis, kreatif dan inovatif, ketrampilan berkomunikasi, bisa bekerjasama dan berkolaborasi dan memiliki kepercayaan diri, b) orientasi baru berupa literasi baru 4.0 yaitu literas data, teknologi dan manusia, dan c) pembelajaran 4C-HOTS.



Bagan. 37. Strategi Dikdasmen untuk Penyiapan Pendidikan 4.0

Ketiga. Strategi Pendidikan Tinggi, Strategi Pendidikan Tinggi 4.0, dilakukan dalam konteks Pendidikan tinggi. Beberapa strategi turunan dari strategi pendidikan tinggi, antara lain:

- a. *Re-orientasi Kurikulum Dikti*. Sesuai Kebijakan Menristekdikti dalam SIARAN PERS No : 175/SP/HM/BKKP/IX/2018 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi perlu melakukan re-orientasi kurikulum untuk meningkatkan inovasi Perguruan Tinggi di Era Revolusi 4.0 mellaui: 1) mengembangkan dan mengajarkan literasi baru. Artinya PT melalui pembelajaran dalam teknologi informasi, ‘internet of things’, ‘big data’ dan komputerisasi,. Ini akan menghasilkan lulusan terampil dalam aspek literas data, literasi teknologi dan literasi manusia. Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem pembelajaran baru, yaitu ‘cyber university’ yang berbasis ‘online learning, 2) mewajibkan mata kuliah ‘entrepreneurship’ dan ‘internship’ dan 3) mengembangkan kepemimpinan dan Kerjasama dalam tim lewat ekstra kurikuler (Kemenristekdikti, 2018)
- b. **Hybrid/Blended Learning, Online.** Kebijakan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti yang menerapakn Hybrid/Blended Learning melalui SPADA-idREN
- c. **UNIT KHUSUS-LIFE LONG LEARNING:** PT disarankan punya unit khusus lanyanan *life-long learning*
- d. **HIBAH –BINTEK REORIENTASI KUR (GEN.4.0) BG 400 PT b.**



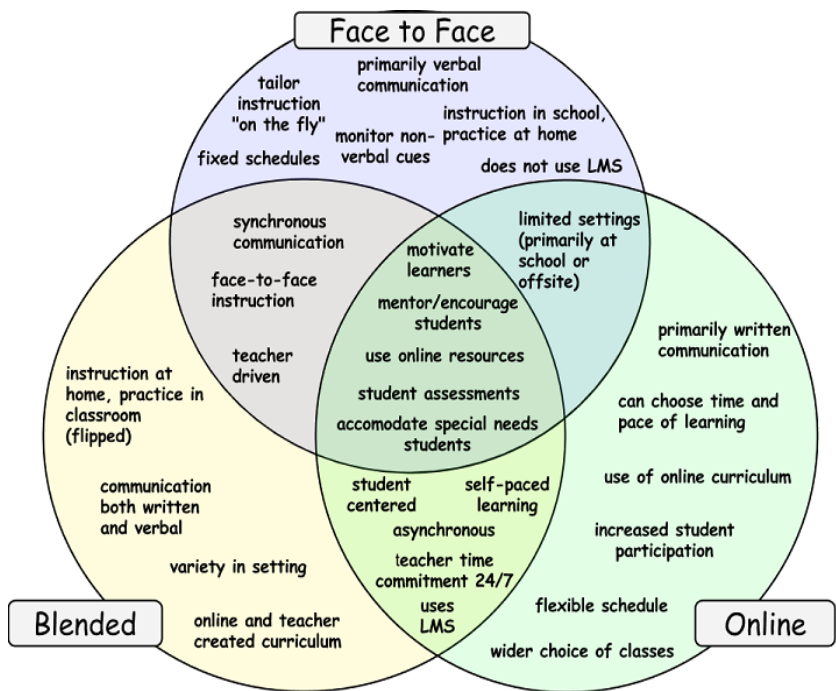
Bagan. 38. Strategi Pendidikan Tinggi untuk Penyiapan Pendidikan 4.0

Melalui beberapa strategi penyiapan Pendidikan 4.0 yang digunakan baik umum maupun sesuai jenjang pendidikan, maka inti dari Pendidikan 4.0 adalah peristiwa pembelajaran 4.0. Ciri khusus peristiwa pembelajaran 4.0 adalah:

- 1) Berpusat pada mahasiswa
- 2) Multi arah
- 3) Peserta didik harus lebih aktif

- 4) kolaboratif dan kooperatif
- 5) *critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation, sehingga secara sempurna akan menghasilkan peristiwa pembelajaran yang bersifat: Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik.*

Selain peristiwa pembelajaran, modus pembelajarn juga bisa didesaian beragam sesuai karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi yang ada. Ada tiga modus pembelajaran yaitu: 1) face to face atau offline atau luring (luar jaringan), 2) online (daring=dalam jaringan internet) dan 3) *blended learning*, campuran modus 1 dan 2. Sesuai karakteristik era 4.0, maka modus pembelajaran yang direkomendasikan adalah modus online dan blended learning, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku.



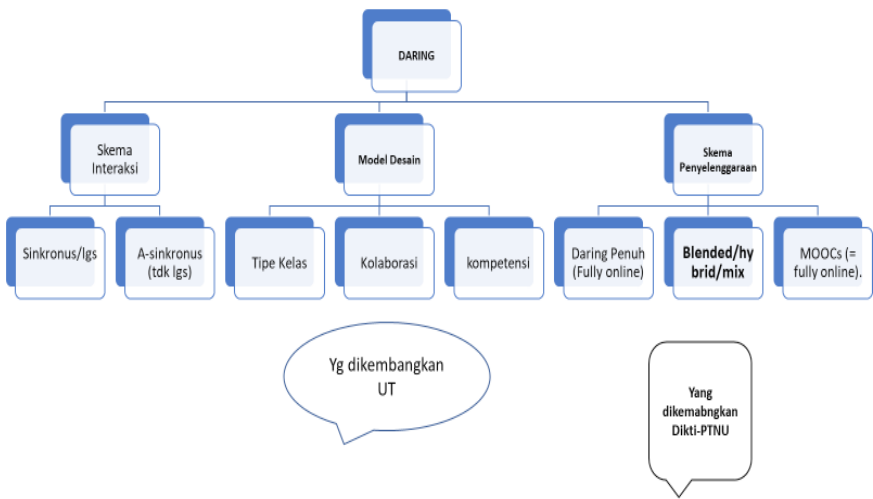
Bagan. 39. Perbandingan Modus Pembelajaran

Di Indonesia pembelajaran daring banyak ragamnya. Ragam yang dimaksud terkalsifikasi dalam tiga, ayoatu: 1) skema interaksi, 2) model disain dan 3) skema penyelenggaraan.

- 1) Skema interaksi, ada dua, yaitu: a) sincronus (interaksi langsung) dan b) a-sincronus (interaksi tidak langsung)

- 2) Tipe kelas, ada 3, yaitu: a) tipe kelas, b) kolaborasi dan c) kompetensi
- 3) Skema penyelenggaraan, juga ada 3, yaitu: a) daring penuh (fully online), b) blended/hybrid/mix, c) Moocs (fully online).

Dari ketiga skema pembelajaran daring, kolaborasi merupakan model pembelajaran daring yang dikembangkan UT, sedangkan yang dikembangkan Dikti dan PTNU adalah blended learning.



Bagan. 40. Jenis Pembelajaran Daring

Dalam melaksanakan pembelajaran daring, yang perlu diingat sesuai dengan inti Pendidikan adalah pemahaman tentang kedudukan dosen yang tak tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Fungsi guru sebagai aspek kedua dalam blended learning adalah faktor *human* yang berhadapan dengan faktor kedua yaitu teknologi. Human ini yang akan menjadi kacabenggala bagi peserta didik, karena faktor human memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh teknologi, yaitu: motivasi, personalisasi, feedback, mempengaruhi maupun mendengarkan, relevansi dan disiplin. Berbeda dengan aspek kedua yaitu teknologi, ia hanya memiliki: *mobility, structure, tracking and control, self-study reduced costs dan global reach*.



Bagan.41. Kedudukan Penting Dosen Dalam Pembelajaran Daring

Kedudukan dosen yang tak tergantikan dalam pembelajaran daring maupun blended, mengharuskan dosen untuk memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sbg motivator, inspirator (: selain fasilitator), course manager, **pengembang bahan ajar/desain instructional, ahli media.**
- b) **Minat baca tinggi**
- c) Memiliki kemampuan **menulis**
- d) **Kreatif dan inovatif** dalam mengembangkan sumber belajar (termasuk **buku ajar**)
- e) Mampu melakukan **transformasi sosial**

Di sisi lain, mahasiswa 4,0 juga memiliki karakteristik tersendiri: 1) Mahasiswa adalah **generasi milenial yang juga melek digital.** 2) **Keterampilan belajar dan inovasi: berpikir kritis dan pemecahan masalah** dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif, 3) **Keahlian literasi digital:** literasi media baru dan literasi ICT, 4) **Kecakapan hidup dan karir:** memiliki kemamuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antarbudaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggungjawab.

5. Penutup

Menciptakan SDM Berkualitas tinggi merupakan satu kebutuhan yang tak terelakkan di segala zaman. Demikian juga halnya dengan era Revolusi Industry 4.0. Yang membedakannya adalah tuntutan kualitasnya dengan standar yang berbeda. Demikian juga dengan Pendidikan 4.0 sebagai instrument untuk mewujudkan SDM berkualitas 4.0 juga memiliki satndar-standar yang harus dipenuhi sesuai tantangan, tuntutan dan karakteristik era 4.0.

Daftar Referensi

- Admin. (2020, January). *Beasiswa Digital Talent 2020 Pelatihan Gratis*. Retrieved from INDBeasiswa: <https://indbeasiswa.com/2020/04/beasiswa-digital-talent-kominfo.html>
- Atas, D. P. (2017). *Panduan Implementasi Kecakapan Abad 21 Kurikulum 2013 di SMA*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendikbud.
- Azis, Y. F. (2019). Literasi Era Revolusi Industri 4.0. *SENABA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)*, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA> (pp. 100-104). Yogyakarta: umm.
- BUSD. (2018). *21st Century Learning*. Retrieved from Berres Union School District Education Services: <https://www.berryessa.k12.ca.us/documents/Common%20Core%20State%20Standards/BUSD%204Cs%20Presentation.pdf>
- Cahyono, B. (2015). Korelasi Pemecahan Masalah dan Indikator Berfikir Kritis. *Phenomenon. Jurnal Pendidikan MIPA*. Vol. 5 No 1. 2015. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/Phenomenon/article/view/87>.
- Chang Zhu, D. W. (2013). What core competencies are related to teachers' innovative teaching?. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2013, Vol. 41, No. 1, 9–27, <http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.753984>.
- Company, M. a. (2017). *Jobs lost, Jobs Gained: Worlforce Transition in a tima of automation*. New York: on fifth Avenue, <https://www.mckinsey.com/-/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20>
- Dini, H. N. (2018). HOTS (High Order Thinking Skills) dan Kaitannya dengan Kemampuan Literasi Matematika. *PRISMA 1*, 2018, 170-176.
- dkk, N. A. (2016). Enterpreneurship at Era Digital. *Dinamika Pendidikan*. 11 (2) 2016. <https://journal.unnes.ac.id/njul/index.php/DP/article/view/8934/6651>, 102-107.
- Farras, B. (2019, May 13 pukul 13:08). *Mengenal Artificial Intellegence dan Cara Kerjanya*. Retrieved from CNBT Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190513130056-37-72069/>
- Haryono, S. (5 Mei 2018). Re-Orientasi Pengembangan SDM Era Digital Pada Revolusi Industri 4.0. *The National Conference on Management and Business FEB UMS* (pp. 1-15). Surakarta: FEB UMS.
- Jack J. Lesyk, P. (2015). *Ohio Center for Sport Psychology*. Retrieved from Nine

mental skill for succes: <https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview>

Kemdikbud. (2008).

Kemendikbud, T. P. (2016). *Mendidik Anak Di Era Digital*. Jakarta : Kemnetrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.

Kemenristekdikti, B. K. (2018, September 20). *SIARAN PERS: No : 175/SP/HM/BKKP/IX/2018*. Retrieved from Kemenristekdikti: kemenristekdikti.go.id

PPN/Bappenas, K. (2019, Februari 12). Strategi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia. Sawangan, Jawa Barat, Indonesia.

Schwab, K. (2020). *The Fourth Industrial Revolution*. Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>

Sit, M. (2010). Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2010, 3.

Wahab, R. (9 Pebruari 2019). *FGD FRI Tentang Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Padang: FRI.



B. Model Rekrutmen Dosen-Mahasiswa Berbasis AB-RIE

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjamin setiap warga negaranya memperoleh pendidikan secara layak, meliputi segala aspek, hingga ke pendidikan agama yang menjadi hak asasi yang paling asasi, harapannya hasil pendidikan mampu menjadikan peserta didik yang berkontribusi positif dan produktif bagi masyarakat, bangsa dan negara dan menjadi warga dunia (Zulfa, 2018).

Perguruan tinggi sebagai komponen negara yang diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas amat tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan menjadi instrument yang ampuh untuk memenuhi maksud tersebut. Demikian juga SN-Dikti juga dikeluarkan dengan makasud tersebut. Apalagi setelah pendidikan tinggi dtangani langsung oleh Kementrian Ristek Dikti maka beberapa aturan sedemikian rupa “di- deregulasi” untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dengan semakin

dinamisnya perubahan kebijakan untuk PT dalam konteks Indonesia, maka PT wajib beradaptasi dengan perubahan tersebut jika PT tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini harus bersatu padu, satu komitmen, satu gerak antar komponen penyelenggara dan pengelola PT serta komponen lain seperti dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan lainnya untuk menyosong perubahan tersebut.

Adanya perubahan kebijakan mau tidak mau selain harus dipenuhi di satu sisi karena menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, namun di sisi lain juga menjadi lahan perjuangan yang harus mengerahkan seluruh kemampuan agar hajat perubahan tersebut bisa dicapai. Diantara perubahan tuntutan itu adalah tentang kualifikasi dosen maupun kuantitas minimal dosen yang harus tersedia di setiap program studi maupun jumlah mahasiswa. Bagi sebagian PT kedua hal tersebut menjadi “momok” untuk dipenuhi. Tentang dosen, beban hampir dirasakan oleh semua PT baik negeri maupun swasta. Tetapi PTN relatif tertanagnai dengan munculnya kebijakan tentang pengangkatan dosen tetap non PNS, sedangkan bagi sebagian PTS, hal ini masih butuh perjuangan sendiri untuk memenuhinya. Demikian juga dengan jumlah mahasiswa, terutama bagi PTS, di mana emenuhannya jumlahnya saja (belum kualitas) saat ini masih membutuhkan perjuangan yang sangat ekstra untuk memenuhinya.

Situasi real tersebut, membutuhkan solusi dengan segera. Oleh karena itu tulisan ini menawarkan RPL sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan mahasiswa yang dibingkai dalam pemikiran rekrutmen dosen mahasiswa menjadi model alternatif berbasis SN-Dikti dan teori MSDM. Artinya tulisan ini menawarkan solusi Cerdas Persoalan Rekrutmen Dosen-Mahasiswa berbasis RPL.

2. Pembahasan

a. Sekilas Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pemerintah melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi sebagai revisi dari produk revisi kebijakan kementerian sebelumnya tentang hal yang sama, telah menggulirkan 24 standar pendidikan tinggi, yang terdiri atas 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian pada masyarakat (pasal 2).

Standar pendidikan diatur dalam pasal 4 tentang standar pendidikan yang meliputi 8 standar, yaitu: a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar

isi pembelajaran; c. Standar proses pembelajaran; d. Standar penilaian pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Selanjutnya dalam Pasal 43 diatur tentang standar penelitian yang juga memiliki 8 standar turunan, yaitu: a. Standar hasil penelitian; b. Standar isi penelitian; c. Standar proses penelitian; d. Standar penilaian penelitian; e. Standar peneliti; f. Standar sarana-prasarana penelitian; g. Standar pengelolaan penelitian; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Terakhir adalah pasal 54 yang mengatur tentang standar pengabdian pada masyarakat berupa: a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Keduapuluh empat standar pendidikan tinggi itu ditetapkan dengan tujuan (pasal 3) untuk: a) Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi, b) Menjamin mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta c) mendorong PT melampaui SN-Dikti. Sekaligus melalui tujuan tersebut maka bisa dipahami bahwa SN Dikti memiliki peran: 1) Untuk dipenuhi oleh setiap PT untuk mewujudkan pendidikan nasional, 2) Sebagai dasar pemberian izin pendirian PT dan izin pembukaan program studi, 3) Sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 4) Sebagai dasar penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Dari keduapuluh empat standar tersebut maka persoalan tentang dosen seperti apa yang harus direkrut serta mahasiswa seperti apa yang boleh atau berkesempatan untuk direkrut bisa terlihat ada dalam lingkup standar pendidikan. artinya SN-Dikti sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan tentang dosen dan mahasiswa bagi sebagian besar PT di Indonesia. Oleh karena itu mempelajari SN Dikti beserta regulasi turunannya justru menjadi solusi atas masalah yang muncul tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian sederhana ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian library research di bidang pendidikan McMilland and Schumacher (2001) di mana data utama penelitian diperoleh dari sumber-sumber pustaka khususnya terkait dengan kebijakan Menteri dengan menggunakan metode documenter (Zulfa, 2011) dan dianalisis menggunakan *content analysis* (Muhajir, 2000).

4. Strategi Perekrutan Dosen dan Mahasiswa Berbasis RPL-REI

a. SN-Dikti dan RPL

Munculnya berbagai tuntutan yang berkaitan standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di satu sisi merupakan alternatif jaminan kualitas pendidikan bagi generasi muda bangsa, tetapi di sisi lain merupakan “beban” bagi penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi. Bagaimana tidak, kuantitas dosen dan mahasiswa yang ditentukan para administrator pendidikan membuat perguruan tinggi (PT) khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus sedemikian rupa berkompetisi dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang notabene-nya sudah diback-up oleh negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu bahkan wajib bagi pengelola perguruan tinggi untuk mencermati lebih teliti apa sesungguhnya yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara mudah tetapi tetap elegan. Dalam hal dua persoalan tentang dosen dan mahasiswa yang dihadapi oleh perguruan tinggi, maka minimal ada dua dokumen penting yang perlu dicermati, yaitu: 1). Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan 2). Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di dalam dua dokumen inilah peluang besar bagi PT untuk mengatasi momok selama ini.

Pertama. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. Pada Pasal 5 (1) disebutkan “Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan” SKL atau Capaian Pembelajaran inilah yang kemudian bisa digunakan untuk pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan (pasal 5 ayat 2).

Secara khusus, sesuai konteks pembicaraan ini, SKL atau CP akan digunakan sebagai kajian untuk menentukan rekrutmen dosen maupun mahasiswa. SKL atau CP bisa digunakan untuk penyusunan instrument RPL Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi calon mahasiswa pindahan yang diharapkan mampu mengatasi persoalan tentang jumlah mahasiswa, sekaligus bisa digunakan untuk penyusunan instrument RPL dosen yang tidak memiliki kualifikasi S2, sehingga bisa menjadi solusi PT yang masih mengalami persoalan jumlah minimal dosen, rasio dosen mahasiswa maupun keahlian khusus dosen yang tidak atau masih langka.

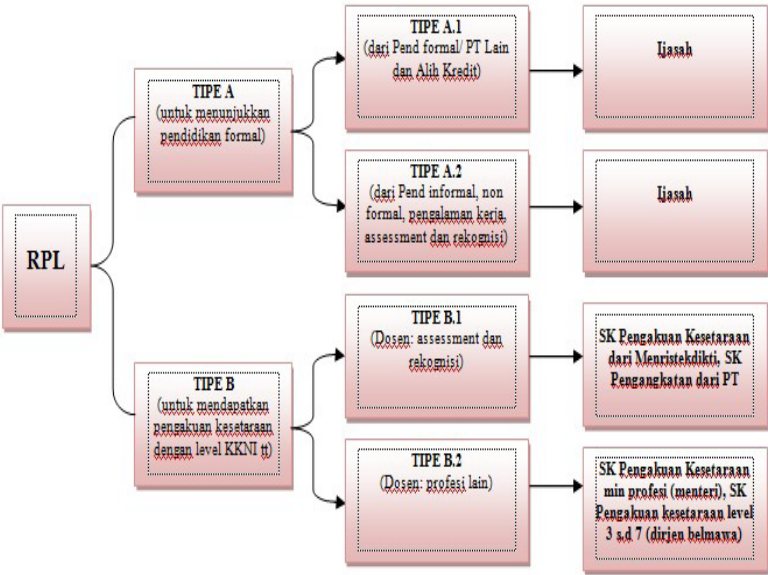
Kedua. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPL.

Pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri sebelumnya, maka Menteri kembali mengeluarkan kebijakan melalui Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)⁶. Secara khusus Permenristekdikti tersebut memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/ atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNI atau program D1 sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNI atau program doktor sebagai jenjang paling tinggi.

RPL ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga Kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Berdasarkan pernyataan ini maka hasil belajar sebelumnya yang dimiliki oleh siapapun dan berada dalam jalur pendidikan manapun atau bahkan pengalaman kerja khusus, langka dan dibutuhkan oleh negara maka bisa diakui dan disetarakan dan diakui oleh negara dengan pendidikan formal. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dosen yang belum memiliki kualifikasi minimal S2 bisa direkrut melalui mekanisme RPL. Demikian permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran

Lampau, juga calon mahasiswa bisa akses pendidikan lanjut ke perguruan tinggi sebagai jalur pendidikan formal melalui pengakuan dan penyetaraan sks melalui mekanisme RPL juga. Dua hal inilah yang nanti akan menjadi angin segar bagi PT baik negeri maupun swasta dalam hal pemenuhan jumlah minimal dosen per prodi. Terkhusus lagi untuk PTS yang terancam demerger jika tidak memiliki jumlah minimal mahasiswa yang ditentukan pemerintah, maka mekanisme rekrutmen mahasiswa baru melalui jalur RPL juga bisa menjadi solusi. Bagaimana mekanismenya bisa disimak dalam penjelasan berikut.



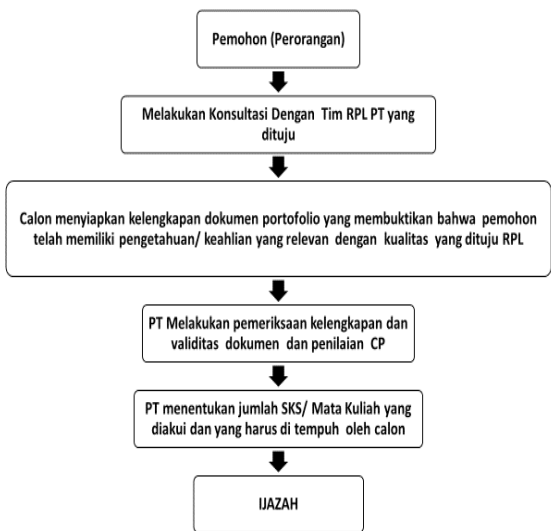
Bagan.42. Mekanisme RPL bagi Dosen dan Mahasiswa

Pertama. RPL untuk Calon Mahasiswa. Kementerian menyebutnya sebagai RPL Tipe A, yaitu RPL yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal dengan cara mengajukan pengakuan kredit (sks) atas capaian pembelajaran maupun pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Selanjutnya RPL ini diklasifikasi menjadi 2 yaitu RPL Tipe A1 dan A2.

RPL Tipe A1 adalah RPL yang berasal dari pendidikan formal atau perguruan tinggi lain dan cara/metode *alih kredit* untuk melanjutkan ke PT yang dituju sehingga yang bersangkutan diterima di PT yang dimaksud dan setelah selesai menempuh sks yang harus ditempuh maka yang bersangkutan berhak memperoleh ijazah. pada Tipe A2, mekanisme RPL

nya sama persis dengan A1, yang membedakan pada: 1) asal individu yang mengajukan pengakuan kredit atas capaian pembelajaran atau pengalaman kerjanya. Jika tipe A1 dari pendidikan formal untuk ke PT, maka tipe A2 dari pendidikan informal, nonformal maupun pengalaman kerja dan 2) metode pengakuannya, jika A1 menggunakan metode alih kredit, maka A2 menggunakan metode assessment dan rekognisi.

Yang dimaksud metode alih kredit adalah pengakuan sks yang sama, relevan atau mendekati (; transfer), sedangkan metode assessment adalah assessment mandiri dari pemohon atas sejumlah ketrampilan khusus dari Prodi PT yang dituju atau dihadapan asesor RPL. Assessment sebagai metode RPL Tipe A2 memiliki metode turunan untuk melakukan pembuktian, yaitu: observasi, bertanya, kajian hasil pekerjaan, referensi pihak ketiga dan kegiatan terstruktur. Prosedur yang harus dilalui dalam konteks ini adalah sebagaimana Penjelasan bagan berikut.



Bagan. 43. Alur RPL Tipe A1

Kedua, RPL untuk Calon Dosen atau RPL Tipe B adalah RPL yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu, sehingga seseorang ketika memenuhi kualifikasi sebagai dosen. Sebagaimana tipe A, maka RPL B juga terbagi menjadi dua, yaitu Tipe B1 dan B2. B1 diperuntukkan bagi profesi dosen dengan metode assessment dan rekognisi, maka Tipe B2 digunakan untuk profesi lain. Baik tipe B1 maupun B2, keduanya sama-sama akan mendapatkan sk dari

pihak yang berkepentingan. Untuk profesi dosen, yang bersangkutan akan mendapatkan 2 SK, yaitu SK Pengakuan Kesetaraan dari Menristekdikti dan SK Pengangkatan sebagai dosen dari PT yang mengangkatnya. Sedangkan pada Tipe B2, maka pihak pemohon akan memperoleh 2 SK juga, yaitu 1). SK Pengakuan Kesetaraan Minimal Profesi dari Menteri dan 2). SK Pengakuan Kesetaraan Level 3 sampai dengan level 7 dari Dirjen Belmawa. Sebagaimana bagan 1 untuk Tipe A, maka secara umum alur RPL Tipe B adalah sebagai berikut.



Bagan 44. Mekanisme RPL Tipe B

b. Pola dan Basis Rekrutmen Dosen dan Mahasiswa

Rekrutmen sumber daya manusia termasuk dosen dan mahasiswa bisa menggunakan pola langsung dan tidak langsung, ataupun sumber internal maupun eksternal.

- 1) Pola langsung dimaksudkan PT bisa secara langsung untuk mengambil sumber rekrutmen dosen dari dari PT tersebut (Rekrutmen Internal). Artinya dosen (yang awalnya dosen, sebelum ada peraturan tentang kualifikasi minimal dosen S2) pendidikan formalnya baru S1 tetapi keilmuan dan keahliannya melampaui S1 maka butuh dibuktikan dengan mekanisme RPL. Dalam hal ini dosen yang masih S1 bisa direkrut kemudian diajukan oleh PT atau insiatif mandiri dosen yang bersangkutan untuk “disetarakan” melalui mekanisme RPL Tipe B1. Hasil dari rekrutmen dengan pola ini adalah: 1) individu dosen tetap

memenuhi kualifikasi sebagai dosen dan 2) PT tetap bisa memanfaatkan keahlian dosen serta memenuhi jumlah dosen sesuai standar minimal yang dibutuhkan. Pola langsung dengan sumber internal ini juga bisa digunakan untuk merekrut mahasiswa baru yang berasal dari mahasiswa lama yang sudah ter-DO atau yang terancam DO. RPL bisa Menggunakan tipe A1. Caranya PT atau mahasiswa yang berinisiatif untuk mengajukan RPL dengan tipe A1, hasilnya mahasiswa akan tercatat sebagai mahasiswa baru lagi yang tinggal menempuh mata kuliah dengan beban sks tertentu yang akan diselesaikan dengan waktu yang baru lagi. Tipe A1 bisa menjadi alternatif menolong mahasiswa terancam atau yang sudah di DO untuk bisa menyelesaikan kuliah.

- 2) Pola tidak langsung dengan sumber eksternal (Rekrutmen Eksternal-RE). pola ini bisa digunakan untuk rekrutmen dosen dan mahasiswa. *Pertama*, untuk kepentingan rekrutmen dosen, bagi PT yang membutuhkan dosen bisa mengambil calon dosen dari luar PT dan dari jalur pendidikan lain yang di RPL dengan tipe B1 sehingga calon dosen tersebut secara sah disetarakan kualifikasinya (S2) dengan bukti SK Kesetaraan dari Kemenristekdikti yang kemudian dijadikan acuan oleh PT untuk mengangkatnya sebagai dosen di PT yang bersangkutan. *Kedua*, untuk perekrutan mahasiswa baru, PT bisa secara penuh Menggunakan Tipe A1 maupun Tipe A2. Sehingga penggunaan RPL Tipe A1 dan A2 akan semakin memaksimalkan perekrutan calon mahasiswa baru.

Berdasarkan formulasi AB dari RPL bagi dosen dan mahasiswa, serta REI dari pola dan sumber rekrutmen eksternal dan internal dari dosen dan mahasiswa, maka bisa diformulasikan **Model Rekrutmen Dosen-Mahasiswa AB-REI**. Yang dimaksud dengan Model Rekrutmen Dosen-Mahasiswa AB-REI adalah model perekrutan dosen dan mahasiswa yang didasarkan pada regulasi tentang RPL Tipe A dan B serta dikolaborasikan dengan pola dan sumber rekrutmen baik internal maupun eksternal (REI).

3. Kesimpulan

Dosen dan mahasiswa merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan PT, keberadaannya menjadi penentu bisa diselenggarakan tidaknya kegiatan pendidikan tinggi. PT dalam pemenuhan atas kedua komponen ini

semakin mengalami tantangan yang semakin berat, baik dalam konteks kuantitas maupun kualitas. Untuk itu diperlukan desain/ model perekrutan yang relatif menjamin sumber yang kaya sekaligus melimpah. Oleh karena itu, dengan munculnya Model Rekrutmen Dosen-Mahasiswa Berbasis AB-REI, diharapkan menjadi alternatif bagi PT untuk memperoleh dosen yang memiliki kualitas dan kuantitas, maupun untuk memperoleh mahasiswa baru yang melimpah sehingga PT bisa fokus dalam pengembangan, pengelolaan maupun untuk menciptakan kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat dunia secara damai di atas banyaknya perbedaan sehingga kesejahteraan hidup manusia juga bisa diraih dalam pengertian yang sebenar-benarnya.

Daftar Referensi

- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Schumacher, James H McMillan and Sally.2001. *Research In Education. A Conceptual Introduction*. New York: Addison Wesley Longman.Inc.
- Umi Zulfa, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.
- _, 2013, *Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen dan Pergurua Tinggi*. Cilacap: Ihya Media.
- _____, Model of Islamic Religion Education 435 Based on Islam Nusantara on College, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12, Nomor 1 Tahun 2018 Accredited by Ristekdikti based on Decree No. 51/E/KPT/2017, hal 13-26
- Lampiran Keputusan Direktur jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Tentang PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU, hal.2
- Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan



C. Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Praktik *Performance Appraisal* Yang Adil

1. Pendahuluan

Dahsyatnya pengaruh globalisasi memaksa setiap elemen yang ada di dunia ini untuk berbenah, mempersiapkan dan memperbaiki diri agar tidak tergilas oleh arus globalisasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi. Kondisi seperti ini semestinya diperhitungkan pendidikan tinggi karena alasan mendasar tugas dari pendidikan tinggi adalah untuk mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas amat tinggi (Gaffar, 2008:2) yang sangat dibutuhkan di era ini.

Perguruan Tinggi (PT) sebagai satuan dari pendidikan tinggi akan mampu melaksanakan tugas dasar tersebut, jika PT mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dengan cara memberikan layanan yang bermutu (tinggi). Karena layanan yang bermutu memiliki peran strategis dalam praktik manajemen PT. Hal ini sesuai dengan pendapat Dobrzański dan Roszak (2007: <http://www.journalamme.org>) yang menyatakan bahwa mutu layanan yang disajikan oleh PT merupakan suatu peran strategis dalam manajemen PT. Sedangkan untuk mewujudkan layanan yang bermutu dibutuhkan SDM PT (dosen dan tenaga kependidikan) yang bermutu pula yang bisa dibentuk melalui pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM (Kiesling dan Harvey: <http://rphrm.curtin.edu.au>).

Sedemikian urgennya kedudukan MSDM dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, maka dalam prosesnya ada satu fungsi yang sangat menentukan kesuksesan praktik MSDM yaitu fungsi penilaian kinerja (*performance appraisal*). Melalui pelaksanaan fungsi penilaian kinerja SDM PT yang benar/adil dan efektif, maka akan terwujud SDM PT yang berkualitas yang selalu mampu mengembangkan/meningkatkan kinerjanya (*performance development*) (Schuler dan Youngblood, 2006) sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas PT (Mangkunegara, 2008).

Dalam realitasnya, tidak setiap sistem maupun model penilaian kinerja SDM PT efektif dilakukan. Artinya penilaian kinerja dosen belum tentu mampu memberikan pengaruh bagi pengembangan/peningkatan kinerja SDM PT dan PT itu sendiri. Diantara sebabnya adalah karena bias penilaian (Wirawan, 2009) dan rendahnya sistematisasi penilaian yang dijalankan (*a low level systematization*)

(Casteter, 1999: 272).

Ketidakefektifan penilaian kinerja SDM PT bisa menjadi persoalan yang kompleks serta mengganggu kinerja PT itu sendiri, jika hal ini terus dibiarkan. Bukan tidak mungkin kondisi PT akan **semakin terpuruk**. Akibat lebih jauhnya adalah para peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga ini menjadi manusia-manusia yang tidak siap untuk hidup sesuai dengan tuntutan zamannya. Akan menjadi berbeda keadaannya, jika persoalan tersebut dikritisi untuk kemudian diambil langkah solusi maupun antisipatifnya, sehingga kinerja SDM PT dari waktu ke waktu semakin berkembang baik, serta citra PT juga semakin baik dan siap berkompetisi secara global.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan betapa penting dan berpengaruhnya praktik penilaian kinerja. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nyaoga, Simeon dan Magutu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tercapai tidaknya tujuan MSDM sangat bergantung kepada keefektifan praktik penilaian kinerja SDM PT di Perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta di Kenya tersebut (*African Journal of Business & Management (AJBUMA)* vol. 1. 2010, *AJBUM*, <http://www.aibuma.org/journal/index.htm>). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Schlitz dkk, (2009: <http://www.isetl.org>).

Berdasarkan latar belakang inilah maka tulisan ini akan memperbincangkan hal-hal sebagai berikut: 1) mutu PT, 2) *Performance Appraisal*, dan 3) strategi peningkatan mutu PT melalui praktik *performance appraisal*.

2. Mutu Perguruan Tinggi

a. Konsep Mutu

Berbicara tentang mutu PT, berarti berbicara tentang suatu hal yang bersifat dinamis. Mengapa demikian? Karena konsep mutu dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Sesuatu yang dianggap mutu saat ini belum tentu akan disebut mutu di masa yang akan datang.

Konsep mutu yang pertama muncul adalah *fitness for use* (Joseph Juran), kemudian diikuti oleh konsep-konsep berikut: *conformance to customer requirement* (P.B.Crosby), *meeting customer expectations* (Armand V.Feigenbaum) dan *conformance customer satisfaction* dari K.Ishikawa (Wahab dan Kusumastuti, 2009).

b. Mutu Perguruan Tinggi

Berdasarkan evolusi konsep mutu di atas, maka berbicara mengenai mutu PT sama saja dengan berbicara tentang kemampuan PT untuk mempertemukan harapan pelanggan dengan tawaran dari PT. Jika seluruh PT melakukan hal yang sama, maka konteks mutu berkembang menjadi konsep keunggulan PT. PT yang bermutu adalah PT yang menawarkan keunggulan. Sedangkan konsep keunggulan menurut Rahayu (2008: 66) adalah posisi relatif dari suatu organisasi terhadap organisasi lain, baik terhadap satu organisasi atau sebagian organisasi atau keseluruhan organisasi pada suatu industri. Sedangkan posisi relatif ini bisa dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif pasar dan organisasi. Perspektif pasar menyebutkan bahwa posisi relatif berkaitan erat dengan nilai pelanggan (*customer-value*). Sedangkan perspektif organisasi, posisi relatif organisasi sesungguhnya adalah kinerja organisasi yang lebih baik atau lebih tinggi. PT dikatakan unggul atau memiliki keunggulan, jika ia mampu menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih (*superior customer-value*) atau kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan PT lain.

Kinerja PT yang baik harus terlihat pada 10 elemen PT, yaitu 1) *goal and objectives*, 2) *student learning*, 3) *faculty performance*, 4) *academic programs*, 5) *institutional support services*, 6) *administrative leadership*, 7) *financial management*, 8) *governing board*, 9) *external relations* dan 10) *institutional self-improvement* (Miller dalam Kuncoro, 2008:98).

c. Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

Dalam rangka mencapai mutu PT yang diinginkan, maka PT mutlak menggunakan strategi yang memberikan jaminan bagi kebermutuan PT tersebut. Namun sebelum masuk ke ranah tersebut, terlebih dahulu akan dikupas secara sederhana tentang konsep strategi tersebut.

Menurut Strickland dalam Winardi (2008: 106), yang dimaksud dengan strategi (organisasi) merupakan tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan bisnis, yang diterapkan oleh pihak manajemen guna mencapai kinerja keorganisasian yang ditetapkan sebelumnya. Dari pendapat ini maka bisa dipahami bahwa strategi bisa bermakna sebagai tindakan atau pendekatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja.

Pendapat yang lain dimunculkan oleh Mintzberg (Winardi, 2008: 114). Menurut Mintzberg ada lima macam definisi formal tentang strategi, yakni strategi sebagai rencana, sebuah “Ploy”, sebuah pola, sebuah posisi dan sebagai sebuah perspektif.

Pertama. Strategi sebagai Rencana. Dalam bidang manajemen, Glueck (Winardi: 115), menyatakan, strategi merupakan sebuah rencana terpadu, komprehensif, serta terintegrasi, yang didesain untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran dasar perusahaan yang bersangkutan dicapai. Sebagai sebuah rencana, maka strategi merupakan “Ploy” yaitu sebuah “manuver” khusus untuk mengalahkan seorang oponent atau pesaingnya. Artinya sebuah organisasi bisa mengumumkan rencananya untuk mencegah pesaingnya membangun rencana yang sama.

Kedua. Strategi sebagai Sebuah Pola. Strategi sebagai sebuah pola, khususnya sebuah pola dalam suatu arus tindakan-tindakan (*a stream of action*)(Winardi: 116). Berikut disajikan aneka macam strategi dari yang agak deliberat sampai yang emergency.

Tabel 10. Macam Strategi.

No	Macam Strategi	Karakteristik
1.	Strategi Yang Direncanakan (<i>Planned Strategy</i>)	Intensi/rencana yang tepat dirumuskan dan ditekankan oleh kepemimpinan sentral tertentu dan ditopang oleh kontrol-kontrol formal guna memastikan implementasi mereka. Strategi macam ini bersifat <i>sangat dipertimbangkan</i> .
2	Strategi Entrepreneur (<i>Entrepreneur Strategy</i>)	Terdapat adanya intensi-intensi, sewaktu visi pribadi, dan yang tidak diartikulasikan dari seorang pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap peluang-peluang baru; organisasi yang bersangkutan berada di bawah kontrol pribadi sang pemimpin, dan ia berada di dalam suatu “ceruk” yang terproteksi di dalam lingkungan tersebut. Strategi demikian bersifat <i>deliberat</i> , tetapi mereka dapat pula muncul sewaktu proses penerapan strategi berlangsung.
3	Strategi Ideologikal (<i>Ideological Strategy</i>)	Terdapat adanya intensi-intensi, karena visi kolektif dari semua anggota organisasi yang bersangkutan dikendalikan oleh sejumlah norma kuat, yang diterima secara umum oleh semua anggota. Organisasi tersebut seringkali bersifat proaktif terhadap lingkungannya. Strategi ini bersifat <i>deliberat</i> .

4.	Strategi Payung (<i>Umbrella Strategy</i>)	Kepemimpinan yang mengendalikan kegiatan-kegiatan keorganisasian secara parsial, menetapkan target-target strategik, atau batas-batas, di dalam mana semua pihak harus bertindak. Akibatnya adalah bahwa strategi-strategi yang ada, sebagian bersifat <i>deliberat</i> (batas-batas) dan sebagian bersifat <i>emergen</i> , dalam arti bahwa kepemimpinan secara sadar membolehkan pihak lain untuk melaksanakan manuver-manuver dan membentuk pola-pola di dalam batas-batas yang ada.
5.	Strategi Proses (<i>Process Strategy</i>)	Pihak pimpinan mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi (siapa yang akan dipekerjakan, hingga dengan demikian ia memperoleh peluang untuk mempengaruhi strategi, struktur –struktur dengan apa mereka bekerja dan sebagainya), di mana isi aktual strategi diserahkan kepada pihak lain; strategi ini sebagian bersifat <i>deliberat</i> (sehubungan dengan proses-proses) dan sebagian bersifat <i>deliberat dan emergen</i> .
6.	Strategi yang dipisahkan (<i>Disconnected Strategy</i>)	Para anggota atau sub unit yang terikat dengan longgar dengan organisasi yang bersangkutan, menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri, karena tiadanya atau yang bertentangan secara langsung dengan intensi-intensi umum. Strategi ini bersifat <i>deliberat</i> , bagi mereka yang menyusunnya.
7.	Strategi Konsensus (<i>Concensus Strategy</i>)	Melalui tindakan saling menyesuaikan, berbagai anggota berkonvergensi tentang pola-pola yang mencakup seluruh organisasi, karena tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum. Strategi ini bersifat <i>emergen</i> .
8.	Strategi yang dipaksakan (<i>Imposed Strategy</i>)	Lingkungan eksternal menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan, melalui pemaksaan secara langsung, atau melalui pembatasan pilihan keorganisasian. Strategi demikian secara keorganisasian bersifat <i>emergen</i> , walaupun mereka dapat diinternalisasi dan dibuat segera <i>deliberat</i> .

Ketiga. Strategi sebagai sebuah Posisi. Strategi sebagai sebuah posisi, merupakan sebuah alat secara spesifik untuk mengidentifikasi di mana suatu organisasi, melokasi dirinya sendiri pada lingkungannya.

Keempat. Strategi sebagai Sebuah Perspektif. Strategi dalam konteks ini, isinya bukan hanya berupa sebuah posisi yang dipilih tetapi ia merupakan sebuah cara mendalam untuk mempersepsi dunia.

Berdasarkan konsep dasar strategi, maka diperoleh bermacam-macam strategi yang bisa dipergunakan PT untuk meningkatkan mutu diri, yang salah satunya adalah praktik penilaian kinerja dosen (*faculty performance appraisal*) pada khususnya dan penilaian kinerja SDM PT pada umumnya.

3. *Performance Appraisal Yang Adil*

a. *Pengertian Performance Appraisal*

Schuler and Youngblood (1996: 232) menyatakan pendapatnya tentang *performance appraisal* sebagai berikut:

...performance appraisal... It can be defined as a system of measuring, evaluating and influencing an employee's job-related attributes, behaviors and outcomes, and level of absenteeism to discover at what level the employee is presently performing on the job. This involves determining how productive the employee is and if the employee can perform as or more effectively in the future so that the employee, the organization, and society benefit.

Karena kegiatan penilaian kinerja mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian, maka ruh utama kegiatan ini adalah perbaikan (*improvement*). Artinya penilaian kinerja tidak akan berhenti pada satu titik di mana organisasi mengetahui level kinerja SDM PT-nya saat ini saja, tetapi kegiatan ini disebut sukses jika organisasi mampu meningkatkan/mengembangkan kinerja SDM PT di masa-masa kerja berikutnya.

b. *Urgensi Performance Appraisal*

Dari sekian banyaknya domain administrasi pendidikan, maka Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu domain yang menentukan kesuksesan penyelenggaraan administrasi pendidikan. Sedangkan salah satu fungsi operasi MSDM yang memiliki kedudukan strategis adalah penilaian kinerja (*performance appraisal/PA*). Sedangkan fungsi *performance appraisal* yang secara efektif mampu memberikan kontribusi bagi keefektifan kinerja PT adalah *performance appraisal* yang mampu mengembangkan kinerja dosen (*development*), bukan hanya sekedar untuk evaluasi (*evaluation*). Oleh karena itu pada bagian ini akan dikemukakan beberapa teori yang relevan dengan penilaian kinerja dosen.

Dari sekian banyaknya fungsi MSDM maka fungsi *performance appraisal* memegang peranan yang sangat strategis. Fungsi ini tidak hanya sebagai fungsi rutinitas tetapi memegang fungsi strategis yang akan menentukan perbaikan kinerja organisasi menuju kejayaannya. Melalui penilaian kinerja maka organisasi akan mengetahui di level mana kinerja SDM PT saat ini. Jika kinerja itu belum memenuhi standar yang telah ditetapkan organisasi, maka organisasi bisa melakukan fungsi *performance*

development (PD) dengan terlebih dahulu melakukan *interview performance appraisal* (IPA) antara SDM ternilai dengan *appraiser* sebagai perwakilan manajemen organisasi. Sehingga pada masa kerja berikutnya organisasi akan mendapatkan SDM dengan kinerja yang memenuhi standar yang diharapkan. Disamping organisasi bisa melakukan PD melalui penilaian kinerja organisasi juga bisa melakukan *evaluation* untuk keperluan berbagai macam perencanaan SDM rutin seperti kompensasi/renumerasi, promosi, terminasi dan sebagainya (Schuler dan Youngblood, 1996).

Dua hal inilah yang menentukan apakah praktik MSDM akan efektif atau tidak. Jika efektif maka SDM tadi akan berkontribusi pada pencapaian kinerja organisasi (Mangkunegara, 2008). Inilah yang dimaksud dengan peran strategis penilaian kinerja dalam penentuan kinerja (mutu) PT. Dengan kata lain jika PT menginginkan kinerja PT-nya bagus, maka PT bisa memulainya dengan melakukan praktik PA Dosem sebagai bagian dari rencana strategik PT.

c. Manfaat *Performance Appraisal*

Memang ada alasan mendasar kenapa penilaian kinerja perlu dilakukan. Paling tidak penilaian dilakukan agar pegawai memperoleh manfaat baik secara individu maupun kelompok sebagaimana manfaat yang diperoleh organisasi (Casteter (1996:270). Manfaat penilaian kinerja SDM bisa diperoleh jika penilaian kinerja telah sampai kepada tujuannya. Adapun secara umum tujuan penilaian kinerja adalah untuk evaluasi dan pengembangan (Schuler dan Youngblood, 1996: 233, Lunenburg dan Ornstein, 2000: 539). Yang dimaksud evaluasi dalam hal ini adalah penilaian kinerja SDM dilakukan untuk memenuhi keperluan-keperluan yang berhubungan dengan pembayaran, promosi, demosi, *layoff* dan terminasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan pengembangan adalah penilaian dilakukan untuk keperluan riset, feedback, perencanaan karir, manajemen karir/pengembangan, perbaikan kinerja (*performance improvement*), dan komunikasi (Schuler dan Youngblood, 1996: 233).

d. Sistem *Performance Appraisal*

Sebagai suatu sistem, maka penilaian kinerja memiliki beberapa komponen sistem yang harus saling berinteraksi dan bergantung agar pelaksanaan

penilaian kinerja efektif. Komponen sistem yang harus ada adalah tujuan, instrumen, penilai, metode, waktu, tempat dan pemanfaatan.

Penilaian kinerja yang efektif akan terwujud jika bangunan sistemnya dilakukan secara sistemik. Penentuan tujuan penilaian kinerja akan menentukan instrumen macam apa yang akan digunakan. Apakah instrumen yang bersifat subyektif atau obyektif. Instrumen obyektif adalah instrumen yang dibangun melalui *job analysis* yang menghasilkan kriteria kinerja yang berupa *perilaku kerja dan hasil kerja*. Sedangkan kriteria kinerja berupa *sifat* yang harus dimiliki oleh SDM lebih merupakan kriteria subjektif (Schuller dan Youngblood, 1996). Namun begitu organisasi bisa menggunakan tiga kriteria kinerja ini secara bersamaan dengan pendekatan campuran (Wirawan, 2009) jika organisasi mampu menyusunnya sedemikian rupa. Instrumen yang tidak valid yang tidak mampu menggali informasi sesungguhnya atas kinerja SDM PT-nya adalah instrumen yang cenderung menggunakan salah satu saja dari 3 pendekatan tadi.

Jika instrumen obyektif sudah bisa ditentukan, maka akan menentukan siapa yang akan melakukan penilaian (appraiser). Penilai yang tepat adalah penilai yang memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dinilai. Oleh karena itu biasanya yang menjadi penilai adalah atasan langsung (formal, lini) yang memang mengetahui kinerja SDM PT bawahannya. Di sisi lain penilai juga bisa diambil dari *customer* ataupun bawahan yang mendapatkan layanan dari SDM ternilai tadi. Sehingga kemudian dalam hal ini dikenal ada 6 jenis penilai yaitu penilai formal, penilai kelompok lini, penilai informal, penilai diri sendiri, penilai sejawat dan penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Untuk menjamin keobyektifan atas penilaian yang akan dilakukan penilai maka penilai harus menghindari hal-hal sebagai berikut: *hallo effect, leniency, strictness, central tendency, severity error,, high potential error, similar-to-me error, stereotyping error, recency error, spillover effect, contrast effect*. (Hasibuan, 2007 dan Wirawan, 2009, (Arup Varma, Shaun Pichler and Ekkirala S. Srinivas, <https://www.msu.edu>).

Penentuan penilai juga akan menentukan metode, tempat dan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan penilaian. Ada banyak metode yang bisa dipilih dan digunakan oleh penilai. Penggunaan metode ini tentu saja sangat bergantung pada tujuan dan jenis kinerja yang akan diukur dan dinilai. Metode-metode yang dimaksud adalah (1). Skala peringkat (*Rating Scale*),

(2). Daftar pertanyaan (*Checklist*), (3) metode dengan pilihan terarah (*Forced Choice Methode*), (4) metode peristiwa kritis (*Critical Incident Methode*), (5) Metode catatan prestasi, (6) Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (*Behaviorally Anchored Rating Scale*= BARS), (7) Metode peninjauan lapangan (*Field Review Methode*), (8) Tes dan observasi prestasi kerja (*Performance Test and Observation*), dan (9) Pendekatan evaluasi komparatif (*Comparative Evaluation Approach*) sebagai metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu. Adapun Metode yang berorientasi pada masa depan, meliputi teknik-teknik: (1) Penilaian diri sendiri (*Self Appraisal*), (2) Manajemen berdasarkan sasaran (*Management By Objective*), (3) Penilaian secara psikologis dan (4) Pusat penilaian (*Assessment Center*), 360 Degree (Lunenburg and Ornstein, 2004, Decenzo dan Robins,1999), Byars and Rue, dan 1991, Rivai dan Sagala, 2009).

Selanjutnya adalah penentuan tempat dan waktu. Tempat penilaian ada dua yaitu: 1) pengukuran dan penilaian di tempat pekerjaan (*on the job performance*) secara formal dan 2) pengukuran dan penilaian yang dilakukan di luar tempat pekerjaan (*off the job performance*) baik secara formal maupun informal. (Hasibuan, 2007). Sedangkan waktu penilaian ada dua, yaitu waktu formal dan informal. Waktu penilaian formal adalah penilaian yang dilakukan secara periodik, sedangkan waktu penilaian informal adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus (Hasibuan, 2007, Rivai dkk, 2005).

Titik kritis yang menentukan apakah praktik penilaian kinerja SDM PT akan efektif atau hanya menjadi kegiatan yang mubadzir adalah komponen pemanfaatan. Hasil penilaian kinerja berupa informasi tentang kinerja real SDM merupakan informasi mahal. Supaya tidak mubadzir maka informasi tadi digunakan atau dimanfaatkan hasilnya oleh manajemen baik yang berhubungan dengan *development* maupun *evaluation* sebagaimana tujuan awal ditetapkan kebijakan penilaian kinerja SDM PT (Schuler dan Youngblood, 1996). Jika manajemen mementingkan pengembangan kinerja SDM PT di periode-periode kerja berikutnya maka pemanfaatan berupa pengembangan kinerja harus disesuaikan sejak awal dengan tujuan penilaian kinerja.

e. Pengembangan Kinerja SDM

Pengembangan kinerja karyawan atau dosen dalam praktik penilaian kinerja menjadi alasan utama kenapa fungsi Manajemen SDM ini dijalankan oleh organisasi. Schuler dan Youngblood (1996:235), menyebutkan bahwa *“general purposes of performance appraisal are evaluation and development.... evaluation are pay, demotion, termination...development are career planning, counseling...performance improvement”*.

Yang dimaksud tujuan dan pemanfaatan evaluasi (*evaluation*) adalah bahwa penilaian kinerja digunakan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan *pay, promotion, demotion, layoff, termination* dan yang dimaksud pengembangan (*development*) adalah untuk *research, feedback, management/career development, human resource planning, performance improvement and communications*.

Dalam konteks ini penilaian kinerja dilakukan oleh PT dalam rangka mengembangkan kinerja dosen. Sedangkan pengembangan kinerja dosen yang dimaksud di sini lebih difokuskan pada peningkatan kinerja dosen (*performance improvement*). Artinya penilaian kinerja dosen dilakukan agar terjadi peningkatan kinerja dosen ke arah yang lebih baik atau derajat yang lebih tinggi melalui upaya manajemen PT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan antara kinerja standar dengan kinerja real dosen, untuk kemudian mengembangkan strategi yang dapat menghilangkan faktor penyebab tersebut sehingga kemudian terbentuklah kinerja dosen yang lebih baik lagi bahkan melampaui kinerja standar yang sudah digariskan PT.

Oleh karena itu, maka yang menjadi titik kritis berikutnya dalam proses penilaian kinerja adalah wawancara evaluasi (*Interview Performance Appraisal/ IPA*) (Schuler dan Youngblood, 1996). Dengan kata lain, pengembangan kinerja ternilai (dosen) mekanismenya dilakukan dengan dilaksanakannya wawancara evaluasi yang dilakukan dengan *tell and sell approach, tell and listen approach* serta *problem solving approach*.

Pengembangan kinerja dosen selain bisa diupayakan lewat praktik penilaian kinerja dosen sebagaimana penjelasan di muka, juga bisa diupayakan lewat penciptaan budaya kerja di kalangan dosen dan pimpinan (Ilyasin, 2011).

Adapun menurut Schuler dan Youngblood (1996), strategi untuk meningkatkan kinerja yang bisa dilakukan oleh organisasi (PT) adalah: 1). *Job clarification and behavior reward*, 2). *Employee participation in decision making*, 3). *Rewards and peer pressure*, 4). *Appropriate work rules and policies*, 5). *Employee assistance programs* dan 6). *Employee counseling*.

f. ***Performance Appraisal Yang Adil dan Efektif***

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem *performance appraisal* untuk dikatakan adil dan efektif, diantaranya:

- 1) Relevansi. Sistem penilaian kinerja harus relevan, artinya harus ada hubungannya dengan sejumlah faktor organisasi seperti: hubungan strategi dengan tujuan organisasi dan hubungan standar kinerja dengan strategi organisasi (karena strategi organisasi dicapai melalui pelaksanaan kinerja karyawan: evaluasi kinerja valid).
- 2) Reliabilitas adalah konsistensi penilaian dari sistem penilaian kinerja (instrumen: dimensi/standar kinerja: perilaku kerja, hasil kerja dan sifat) (Wirawan, 2009: 119-120).
- 3) Sensitivitas. Sistem penilaian kinerja yang sensitiv adalah penilaian yang mampu membedakan kinerja sangat baik, baik, sedang, buruk dan sangat buruk.
- 4) **Akseptabilitas**, yaitu penilaian kinerja dapat diterima oleh mereka yang berkaitan dengan penilaian kinerja, yaitu penilai dan ternilai. Penilaian kinerja yang ditolak oleh pihak ternilai akan menimbulkan keresahan (*grievance*), ketidakpuasan, stress kerja, pemogokan bahkan akhirnya *turn over* tinggi. demikian juga penilaian kinerja ditolak oleh penilai (misal atasan) akibat rumit dan menyita waktu mereka, maka mereka akan melaksanakannya dengan ogah-ogahan.
- 5) Praktikal, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- 6) Tidak melanggar hukum. Dalam konteks Indonesia, penilaian kinerja tidak boleh bertentangan dengan : (1) pasal 6 UU RI N0.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan, “setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”, (2) pasal 28D ayat (2) UUD 1945, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

f. Kesalahan Dalam *Performance Appraisal*

Ada beberapa kesalahan yang bisa mempengaruhi keobyektifan proses penilaian kinerja seperti *hallo effect*, *leniency*, *strictness*, *central tendency* dan *personal bias*, *Hallo effect*, *severity error*, *halo error*, *high potential error*, *similar-to-me error*, *stereotyping error*, *recency error*, *spillover effect*, *contrast effect*. (Hasibuan, 2007 dan Wirawan, 2009, (Arup Varma, Shaun Pichler and Ekkirala S. Srinivas, <https://www.msu.edu>).

- 1) *hallo effect/ hallo error/horn effect* atau kesalahan hallo adalah kesalahan yang terjadi karena penilai menilai ternilai berdasarkan asumsinya atas ternilai bukan berdasarkan penilaian di setiap indikatornya.
- 2) *leniency error* (kesalahan lembek; terlalu murah) adalah kesalahan di mana penilai memberikan nilai *lebih positif* dari yang seharusnya.
- 3) *central tendency error* (kesalahan titik tengah), yaitu adalah kesalahan penilai karena cenderung memberikan nilai kepada ternilai pada titik tengah (nilai rata-rata).
- 4) *severity error (stricty error/ strictness/* kesalahan keras/terlalu mahal) adalah kesalahan penilai dalam memberikan nilai terlalu rendah dari yang seharusnya.
- 5) *high potential error* (kesalahan potensi tinggi) yaitu kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa yang akan datang dengan kinerja ternilai sekarang.
- 6) *similar-to-me error* (kesalahan sama dengan saya), yaitu kesalahan yang terjadi akibat penilai menilai ternilai sama dengan dirinya dan cenderung lebih tinggi daripada ternilai lain.
- 7) *stereotyping error* (kesalahan stereotip), yaitu kesalahan yang terjadi akibat kecenderungan penilai untuk menggeneralisasikan kelompok tertentu dan mengabaikan perbedaan individu.
- 8) *recency error* (kesalahan baru-baru ini) adalah kesalahan yang terjadi akibat penilai memberikan nilai berdasarkan kinerja ternilai akhir-akhir ini –satu dua bulan sebelum penilaian bukan penilaian pada sepanjang bulan-bulan sebelumnya.
- 9) *spillover effect* (efek tumpah) adalah kesalahan akibat penilai menggunakan nilai masa lalu untuk menilai kinerja sekarang walaupun kinerja ternilai sudah berubah.

- 10) *contrast effect* (kontras efek) adalah kesalahan akibat adanya kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya (pembanding), bukan membandingkan ternilai dengan standar kinerjanya.

Dari sekian banyaknya ragam kesalahan yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja, bisa ditelusuri faktor penyebabnya. Faktor penyebab kesalahan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan.

Pertama, Kesalahan akibat kesengajaan seperti erat hubungannya dengan persoalan politik organisasi. Biasanya penilai menaikkan (*inflate*) atau menurunkan (*deflate*) nilai ternilai dengan sengaja dalam rangka memanajemeni kinerja ternilai.

Berikut adalah alasan penilai menaikkan nilai ternilai: a) meningkatkan kemungkinan naik gaji, b) mendorong kinerja ternilai yang semoat menurun akibat persoalan pribadi, c) penilai menghindari kontroversi dengan ternilai, d) menghadihkan ternilai karena ternilai sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kinerjanya, e) memindahkan pegawai yang tidak disukai ke unit lain. Demikian juga jika penilai dengan sengaja menurunkan kinerja biasanya dilakukan dengan tujuan untuk: a) memberikan shock therapy agar ternilai memacu kinerjanya, b) shock therapy untuk biang kerok dan c) membangun dokumentasi kuat dalam rangka memberhentikan pegawai.

Kedua, kesalahan akibat ketidaksengajaan bisa terjadi karena: 1) penilai tidak atau kurang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan penilaian kinerja dan 2) *cognitive information processing* (CIP) yang tidak rutin.

4. Strategi Peningkatan Mutu PT melalui Praktik *Performance Appraisal* Yang Adil

Praktik PA SDM PT tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan kinerja SDM sendiri, tetapi juga bagi eksistensi PT yang hakikatnya adalah kinerja PT itu sendiri. Dengan kata lain, jika PT melakukan PA SDM-nya dengan baik dan adil maka akan berdampak bagi pengembangan kinerja SDM PT, sekaligus akan memperkuat eksistensi dan keunggulan-kebermutuan PT itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Rahayu (2008: 67), yang menyatakan:

Suatu organisasi (satuan pendidikan) potensial memiliki keunggulan apabila dapat menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih (*superior customer values*) atau kinerjanya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain... Keunggulan baik dari perspektif pasar maupun organisasi dapat dicapai atau diraih melalui dua strategi dasar yaitu strategi bersaing (*competitive strategy*) dan strategi bekerjasama (*cooperative strategy*)...strategi bersaing akan efektif apabila suatu organisasi memiliki sumber daya yang lebih baik (*superior resources*). apabila sumber daya yang dimiliki imperior (*imperial resources*) maka *cooperative strategy* tepat untuk dipilih.

Ada dua alternatif yang bisa dipilih oleh PT yang akan meningkatkan kinerja-mutunya, yaitu strategi Kooperatif dan Kompetitif. Strategi kooperatif diperlukan oleh PT yang tidak cukup memiliki sumber daya organisasi (termasuk SDM PT). Keterbatasan ini dipenuhi oleh PT dengan cara menjalin kerjasama dengan PT lain yang lebih superior atas kepemilikan sumber dayanya. Sedangkan strategi kompetitif dilakukan oleh PT jika PT memiliki kecukupan sumber daya seperti SDM yang berkualitas-berkinerja tinggi.

Dalam konteks era global, mutlak PT harus memilih strategi kompetisi. Karena karakteristik dari era global adalah *high competition*. Tingginya kompetisi ini mutlak membutuhkan SDM yang berkualitas, sedangkan garansi untuk menciptakan dan memelihara kualitas SDM PT adalah melalui praktik PA yang adil dan efektif. Jika SDM PT yang berkualitas sudah diperoleh, maka sumber daya lain yang dibutuhkan PT agar menjadi PT yang *digdaya* (mampu berkompetisi global; sebagai indikator kebermutuan PT) bisa diupayakan oleh SDM yang berkualitas tadi.

PT yang menghendaki terjadinya peningkatan mutu organisasinya secara berkelanjutan (standar mutu yang ditetapkan pada titik waktu tertentu tercapai, tentukan lagi standar mutu yang lebih tinggi dan seterusnya), mau tidak mau harus menggunakan strategi praktik PA yang adil dan mampu mengembangkan kinerja SDM-PT dan mampu menghantarkan PT untuk bisa bersaing di pasar global dan masuk ke dalam *World Class University*. Adapun PA yang mampu memberikan jaminan tersebut adalah PA yang memenuhi **syarat: Sistemik, Kontinyu dan Optimalisasi Pemanfaatan Hasil**.

a. Sistemik

Yang dimaksud sistemik adalah perlunya keterpaduan dan ketergantungan pada seluruh komponen yang ada dalam sistem penilaian kinerja ini, mulai dari *instrumen* yang disusun berdasarkan hasil analisis pekerjaan, sehingga akan diketahui kriteria kinerja yang paling tepat untuk menilai kinerja (kinerja sebagai *sifat, perilaku dan hasil kerja*) SDM PT dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Tridharma PT, selain harus mengacu kepada *tujuan* yang sebelumnya sudah ditetapkan. Baru langkah selanjutnya menentukan *metode, waktu, tempat dan penilai* yang paling tepat untuk bisa melaksanakan penilaian. Hasil penilaian berupa informasi mengenai kinerja real dari SDM PT ternilai selanjutnya harus *dimanfaatkan* secara optimal agar terjadi efek atau dampak atas penilaian. Efek yang dimaksud di sini adalah terjadi perbaikan/*pengembangan* kinerja dosen yang menjadi salah satu dari tujuan yang ditetapkan.

b. Kontinyu.

Agar menjamin terjadinya perubahan kinerja yang lebih baik bagi SDM PT ternilai, maka penilaian harus dilakukan secara kontinyu. Kontinyu dalam arti dilakukan dilakukan secara terus menerus (; menggunakan waktu informal). Artinya pemanfaatan hasil penilaian kinerja dosen yang pertama adalah untuk memberikan umpan balik bagi dosen ternilai. Ketika umpan balik ini diperoleh dosen maka dosen akan mengetahui apa yang seharusnya diperbaiki atau ditingkatkan sehingga berakhir dengan terbentuknya pengembangan kinerja dosen. Sehingga pada periode penilaian kinerja berikutnya sudah kelihatan adanya peningkatan/perbaikan kinerja dosen, begitu seterusnya, sehingga kualitas kinerja SDM PT PT dari waktu ke waktu semakin tinggi dan secara linier terjadi peningkatan kinerja (mutu) PT.

c. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil.

Hasil penilaian kinerja dosen adalah informasi mahal yang sangat berguna untuk dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja yang belum baik atau meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Artinya perbaikan kinerja sulit terbentuk jika hasil penilaian kinerja tidak dimanfaatkan untuk banyak hal terutama untuk umpan balik bagi perbaikan kinerja dosen. artinya, untuk menjamin penilaian kinerja mampu

memberikan dampak bagi pengembangan kinerja dosen maka mutlak dalam pemanfaatannya harus optimal.

Daftar Referensi

- Byars, Lyolyd L dan Rue, Leslie W. (1991). *Human Resource Management*. Boston: IRWIN.
- Casteter, William B. (1996). *The Human Resource Function in Educational Administration*. Sixth Edition. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Decenzo, David. A dan Robbins, Stephen. P. (1999). *Human Resources Management*. Sixth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dehesa, Guelermo de le. (2006). *Winners and Losers in Globalization*, Malden USA: Blackwell Publishing. (e book/ <http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405133821.html>)
- Dobrzański, L.A dan Roszak, M.T. (2007). Quality Management In University Education. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*. Vol.24, Issue 2 Oktober 2007. (Online). Tersedia: <http://www.inderscience.com>. (6 Januari 2010).
- Gaffar, M. Fakry.(2008). *Kebijakan Pengembangan Perguruan Tinggi*. Perkuliahan Sekolah Pascasarjana Program S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.
- Gaffar, Vannessa.(2008). Customer Relationship Management (CRM) Jasa Pendidikan. Dalam *Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- Inyang, Benyamin J. (2007). A Case for Performance Appraisal In The Public Center I The Nigeria. *International Journal Of Business and Management*. (Online). Tersedia: <http://ccsenet.org/journal/index.php/ijbm>. (8 Nopember 2011)
- Kiesling dan Harvey. (2005). The Strategic Human Resource Management. *Journal dari Kuala Lumpur Malaysia Kepolisian Kerajaan College*, No 4, 2005. (Online). Tersedia: <http://rphrm.curtin.edu.au>. (8 Nopember 2010).

- Kuncoro, E.A. (2008). Leadership Sebagai Primary Forces dalam Competitive trength, Competitive Area, Competitive Result Guna Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi, dalam Bukhari Alma dan Ratih Hurriyati, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta
- Lunenburg, Fred. C dan Ornstein, Allan C.(2006). *Educational Administration, Concepts and Practices (Fourth Edition)*. Australia: Thomson Woodwar.
- Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Agus.(2008). Membangun Kelayakan Strategik Perguruan Tinggi Melalui Penjaminan Mutu dalam Alma, Bukhari dan Hurriyati, Ratih (2008). *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Javani.(2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veitzal dkk. (2005). *Performance Appraisal. Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan meningkatkan Daya Saing Perusaahaan. Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schuler, Randall S dan Youngblood, Stuart A.(1996). *Effective Personnel Management*. Second Edition, San Fransisco: West Publishing Company.
- Schlitz dkk.(2009).*Developing a Culture of Assessment through a Faculty Learning Community: A Case Study*. (Online). Tersedia: <http://www.isetl.org>. (8 juni 2010).
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdul Azis. (2011). *Gagasan Dan Pemikiran Pembangunan Pendidikan Di Indonesia. Penghargaan dan Penghormatan 68 tahun prof. Dr/H. Abdul azis Wahab, M.A. (Ed.* Bandung: Laboratorium PKn PIPS UPI Bandung
- Wahab, Abdul Azis dan Kusumastuti, Diyah. (2009). *Penjaminan Mutu*. Bandung: UPI bandung
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.



BAB V

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A. Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di Abad 21

1. Pengantar

Madrasah saat ini sebagai institusi pendidikan yang hidup di abad 21, dan khususn era disrupsi teknologi harus beradaptasi dengan berbagai perubahan, pengembangan, inovasi dan daya kreasi lain yang akan menjadikannya tetap eksis di tengah zaman yang syarat dengan kompetisi, ketidakmenentuan dan deregulasi. Jika tidak melakukan empat ini maka madrasah bisa ditinggalkan masyarakat.

Inovasi merupakan satu kekuatan mutlak yang diperlukan madrasah, karena dengan melakukan inovasi, maka madrasah bisa menjadi yang terdepan. Madrasah yang melakukan inovasi maupun adaptasi membutuhkan profesionalisme, militansi dan akhlak yang baik, sehingga *benefit* yang diperoleh meliputi apa yang ada (diperlukan) di dunia dan apa yang dibutuhkan di akhirat. Dalam konteks inilah, maka semua komponen madrasah, baik itu penyelenggara, pengelola/ pimpinan, guru, tenaga kependidikan, dan siswa harus bersatu dalam visi dan gerak langkah. Langkah ini tidak bisa dilakukan jika tidak dimulai dengan melakukan PERUBAHAN MINDSET

2. Perubahan Mindset

Perubahan mindset sebagai Langkah pertama untuk mewujudkan madrasha terdepan, bisa dilakukan dengan mengidentifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini yang dimiliki oleh sekolah, terutama guru. Guru secara umum bisa diklasifikasikan dalam empat kategori sebagaimana tampak dalam empat kuadran berikut.

Tabel 11. Kuadran Guru

Kuadran I GURU SEKOLAH ATAS ANGIN (SAA)	Kuadran II GURU SEKOLAH ABAL-ABAL (SAA)
“NGAJAR itu penting. Sayang sering ada pimpinan yang ngasih tugas macam-macam....”	“NGAJAR..... yang penting “BERES”

Kuadran III GURU SEKOLAH UMUM (SU)	Kuadran IV Guru SEKOLAH HATI YANG BERSIH (SHYB)
“jadi guru ya ada mengajar di kelas, mendidik, membimbing siswa agar dapat ilmu dan ijazah.. Syukur mereka bisa melanjutkan sekolah, kalau tidak ya mereka bisa kerja”	“Jadi guru itu ya ada standar-standar yang harus diikuti... sehingga kita tidak hanya membekali siswa dengan ilmu, tapi mampu merubah DIRI mereka yang tadinya hanya sumberdaya menjadi MODAL yang berkontribusi produktif & positif baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa & manusia”

Pada kuadrant I, merupakan jenis guru yang memandang bahwa tugas guru hanyalah mengajar. Guru akan merasakan tugasnya menjadi berat jika ada tugas-tugas tambahan yang diberikan kepadanya selain mengajar.

Kuadran II, merupakan guru yang memiliki pemahaman dalam melaksanakan tugas selain terbatas pada kegiatan mengajar, juga melakukan cara-cara yang bisa mencidrai kode etik profesi.

Kuadrant III, merupakan guru pada umumnya. Guru yang sudah memahami bahwa tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing siswa agar dapat ilmu dan ijazah. Ditambah mereka akan merasa sangat bersyukur jika anak didiknya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih atau ketika tidak melanjutkan pendidikannya, setidaknya bisa langsung bekerja.

Kuadran IV, merupakan guru yang dibutuhkan di era ini, guru adalah ujung tombak yang akan mengubah peserta didik dari hanya sekedar sumber daya manusia (*human resources*) suatu bangsa menjadi modal manusia (*human capital*) untuk pembangunan bangsanya.

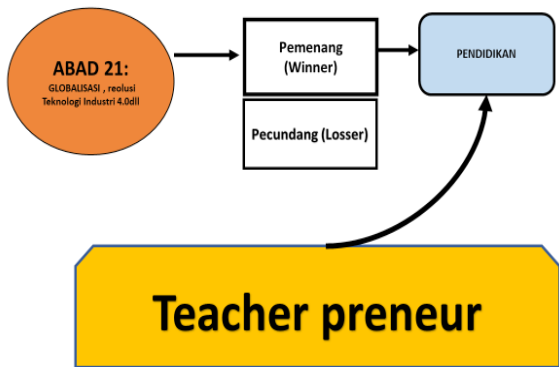
Jika sekolah masih menemukan jenis guru yang ada dalam kuadrant 1,2 dan 3, maka sekolah harus merubah mindset guru tersebut menjadi guru pada kuadrant 4. Sebab gurulah yang mewujudkan SDM berkualitas bangsa ini yaitu modal manusia. Sebagaimana Hasil Evaluasi Bank Dunia (1995) thd 150 negara, bahwa faktor keunggulan suatu negara bergantung kepada faktor-faktor berikut:

- a. *Innovation*, dengan kontribusi 45%
- b. *Networking*, dengan kontribusi 25%
- c. *Technology*, mengambil peranan 20%
- d. Natural resources, hanya berkontribusi 10%.

Dari empat faktor tersebut, tiga faktor pertama melekat kepada *human capital*. Artinya jika SDM suatu negara berkualitas tinggi yang ditandai sebagai *human*

capital maka akan menjamin 90% negaranya maju. Jika teori pembangunan dulu menyatakan bahwa pembangunan akan berhasil jika suatu negara memiliki kekayaan melimpah sudah tidak relevan karena hanya menyumbangkan kesuksesan sebesar 10%. Di sinilah peran guru yang penting, yaitu guru yang ada di kuadran 4 atau merujuk ke istilah sekarang adalah teacherpreneur. Teacherpreneur memiliki karakteristik: Berkreasi, Berdaya, Berimbang, Berbudaya dan Berterimakasih (Wiyani, 2012). Pendapat yang lain, teacherpreneur di abad 21 adalah teacherpreneur yang memiliki kompetensi khusus, yaitu guru yang memiliki kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut: 1) *Opportunity Assesment*, 2) *Opportunity Recognition*, 3) *Conveying a compelling vision*, 4) *Building and using network*, dan 5) *Value creation* (Morris, Webb, Fu, & Singhai, 2013) yang akan dibahas dalam sub bab karakteristik guru abad 21.

Jadi, abad 21 yang identic dengan globalisasi, revolusi industry 4.0 dan lain sebagainya, secara alami akan menyeleksi dua kelompok manusia, yaitu apakah winner (pemenang) atau bahkan kelompok loser yang akan tergilas dan menjadi pecundang. Agar kelompok manusia ini bisa menjadi winner diperlukan pendidikan yang memiliki karakteristik sesuai tuntutan abad 21 yang di dalamnya ada teacherpreneur. Sedemikian urgennya kedudukan guru yang teacherpreneur untuk menyiapkan modal manusia tadi bagi negaranya.



Bagan. 45. Kedudukan Teacherpreneur di Abd 21

3. Mengenal Abad 21 dalam Perspektif Pendidikan

a. Tantangan Pendidikan Abad 21

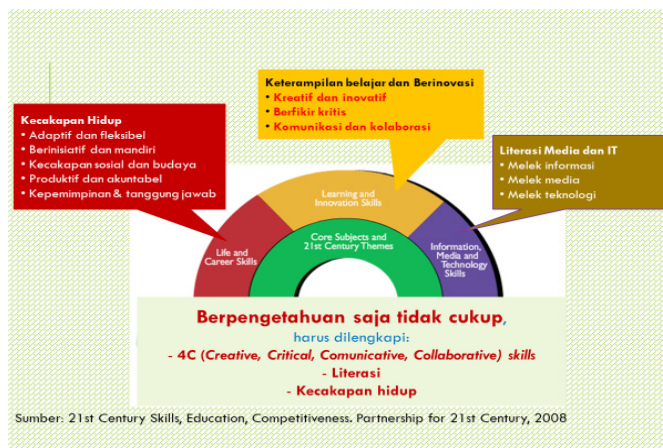
Ciri yang melekat kepada abad 21 salah satunya adalah tantangan yang mesti dihadapi oleh dunia pendidikan. bebera[a tantangan pendidikan di abad 21 antara lain:

- 1) Ketegangan antara GLOBAL dan LOKAL.
- 2) Ketegangan antara UNIVERSAL dan INDIVIDUAL.
- 3) Ketegangan antara TRADISI dan KEMODERNAN.
- 4) Ketegangan antara pertumbuhan2 JANGKA PANJANG dengan JANGKA PENDEK.
- 5) Ketegangan antara perlunya KOMPETISI dengan KESAMAAN KESEMPATAN.
- 6) Ketegangan antara PERLUASAN PENGETAHUAN dengan KEMAMPUAN MENCERNAKANNYA.
- 7) Ketegangan antara SPIRITUAL dan MATERIAL Sbr: JACQUES DELORS (ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad 21 PBB

b. Tuntutan Pendidikan Abad 21

Tantang pendidikan abad 21 melahirkan beberapa tuntutan pendidikan di abad ini. Tuntutan yang dimaksud adalah:

- 1) Life and Career skills, seperti: a) Adaptif dan fleksibel, b) Berinisiatif dan mandiri, c) Kecakapan sosial dan budaya, d) Produktif dan akuntabel dan e) Kepemimpinan & tanggung jawab
- 2) Learning and innovation skills, seperti: Kreatif dan inovatif, Berfikir kritis dan Komunikasi dan kolaborasi
- 3) Information, media and teknologi skills: Melek informasi, Melek media dan Melek teknologi (Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century, 2008)



Bagan 46. Tuntutan Pendidikan Abad 21

Sesuai konteks ini, maka pendidikan yang harus dilayangkan kepada customer pendidikan adalah yang mengutamakan Kreatif dan inovatif, Berfikir kritis dan Komunikasi dan kolaborasi yang kemudian terkenal dengan istilah 4C, yaitu: ***Creative, Critical, Communicative, Collaborative***. Serta memperhatikan jenis skill yang lain maka pendidikan abad 21 harus mampu memfasilitasi peserta didik agar memiliki 4 c, kecakapan hidup dan literasi. Dalam bahasanya Rohmat Wahab tidak cukup itu tetapi ditambahkan dengan moral competence, jadi disebut *Learning Competencies, literacy competencies, life competencies and moral competencies* (Wahab, 9 Februari 2019). Moral competences yang dimaksud dan yang penting dikuasai adalah *responsibility, truthfulness and honesty* (kebenaran dan kejujuran) serta integritas.

Dalam konteks Dikdas di Indonesia 4C diterjemahkan dalam konteks Kurikulum 2013 sebagai berikut:

- 1) ***Creative***. Sebenarnya konsep ini mengacu kepada istilah kreatif dan inovatif. Artinya kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain; bersikap terbuka, dan responsive terhadap perspektif baru dan berbeda.

Inovasi merupakan kreativitas yang menghasilkan penemuan-penemuan baru. Inovasi seseorang akan muncul dengan bersumber pada kreativitas (kemampuan menghasilkan pemikiran gagasan-gagasan baru atau sekedar menggabungkan atau mengembangkan).

- 2) ***Critical***. Critical atau kritis yang dimaksud di sini merupakan ketrampilan berpikir kritis. Berpikir kritis menurut Beyer (1985) adalah: a) menentukan kredibilitas suatu sumber, b) membedakan antara yang relevan dari yang tidak relevan, c) membedakan fakta dari penilaian, d) mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, 6) mengidentifikasi bias yang ada, 7) mengidentifikasi sudut pandang, dan 8) mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan.

Adapun Direktorat Pembinaan SMA mencirikan berpikir kritis dengan:

- a) Menggunakan berbagai tipe pemikiran/penalaran atau alasan, baik induktif maupun deduktif dengan tepat dan sesuai situasi.

- b) Memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lain dalam suatu mata pelajaran, dan keterkaitan antar konsep antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
- c) Melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif dalam mengolah data dan menggunakan argumen.
- d) Menguji hasil dan membangun koneksi antara informasi dan argumen.
- e) Mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh melalui simpulan awal dan mengujinya lewat analisis terbaik.
- f) Membuat solusi dari berbagai permasalahan non-rutin, baik dengan cara yang umum, maupun dengan caranya sendiri.
- g) Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan
- h) Menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan suatu masalah (kemendikbud, 2017).

3) ***Comunicative***

Komunikatif adalah sifat yang merujuk kepada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa menyampaikan informasi secara efektif kepada orang lain, baik lisan maupun tulisan dengan melalui berbagai Teknik dan media.

4) ***Collaborative***

Kolaboratif adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerjasama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab; bekerja secara produktif dengan orang lain; menempatkan empati pada tempatnya; dan menghormati perspektif yang berbeda.

c. Karakteristik Pendidikan Abad 21

Berdasarkan tuntutan dan tantangan pendidikan abad 21, maka karakteristik yang muncul bagi pendidikan di abad 21 sebagaimana dirangkum oleh PenSMA tahun 2017 adalah:

- 1) Berfokus pada pemupukan potensi unggul setiap peserta didik.
- 2) Keseimbangan beragam kecerdasan (intelektual, emosional, sosial, spritual, kinestetis, dan seterusnya)
- 3) Mengajarkan life skills.

- 4) Sistem penilaiannya berbasis portofolio dari hasil karya siswa.
- 5) Pembelajaran berbasis kehidupan *nyata* dan praktik di lapangan.
- 6) Guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing.
- 7) Pembelajaran didasarkan pada kemampuan, cara/gaya belajar, dan perkembangan psikologis anak masing-masing.
- 8) Pilar Pendidikannya: Learning To Know/Do/Be/live together in peace & belajar utk memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (kemendikbud, 2017).

d. Tantangan Guru Abad 21

Implikasi selanjutnya adalah munculnya tantangan khusus bagi guru dan bagi peserta didik. Adapun tantangan guru abad 21 adalah:

- 1) Teaching in multicultural society
- 2) Teaching for the construction of meaning
- 3) Teaching for active learning
- 4) Teaching and technology,
- 5) Teaching and technology,
- 6) Teaching and choice
- 7) Teaching and accountability (Susanto (2010))

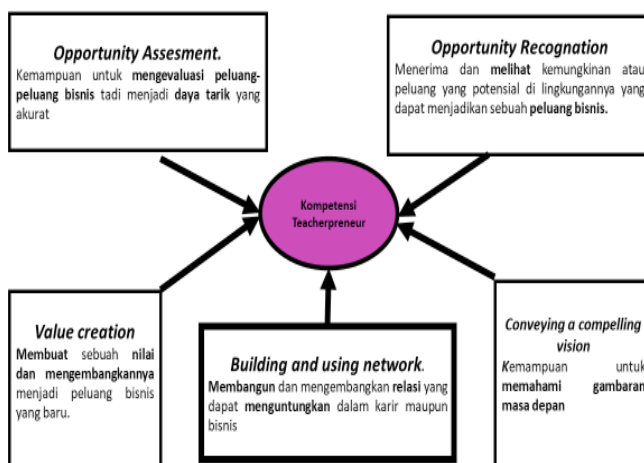
e. Karakteristik Guru & Siswa Abad 21

Berdasarkan tantangan guru abad 21 maka guru abad 21 juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

- 1) Peran guru sbg selain sbg fasilitator adalah motivator dan inspirator
- 2) Memiliki minat baca yang tinggi
- 3) Memiliki kemampuan menulis
- 4) Harus kreatif, inovatif dlm mengembangkan metode belajar dan masalah2 belajar, memanfaatkan media berbasis TIK
- 5) Mampu melakukan transformasi sosial

Guru sebagaimana disebutkan Dirketorat pembelajaran SMA tahun 2017 tersebut sesungguhnya adalah teacherpreneur. Kompetensi yang harus dimiliki teacherpreneur adalah:

- 1) *Opportunity Assesment*. Kemampuan untuk **mengevaluasi peluang-peluang bisnis** tadi menjadi **daya tarik** yang akurat
- 2) *Opportunity Recognition*. Menerima dan **melihat** kemungkinan atau peluang yang potensial di lingkungannya yang dapat menjadikan sebuah **peluang bisnis**.
- 3) *Conveying a compelling vision*, Kemampuan untuk **memahami gambaran masa depan**.
- 4) *Building and using network*, **Membangun** dan mengembangkan **relasi** yang dapat **menguntungkan** dalam karir maupun bisnis
- 5) *Value creation*, **Membuat** sebuah **nilai** dan **mengembangkannya** menjadi peluang bisnis yang baru (Morris, Webb, Fu, & Singhai, 2013)



Bagan. 47. Kompetensi Teacherpreneur (Morris, Webb, Fu, & Singhai, 2013)

Setelah guru, pihak lain yang beradaptasi dengan abad 21 juga memiliki sendiri, yaitu siswa. Adapun karakteristik Siswa Abad 21

- 1) Keterampilan belajar dan inovasi: berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif.
- 2) Keahlian literasi digital: literasi media baru dan literasi ICT.
- 3) Kecakapan hidup dan karir: memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggungjawab.

f. **Karakteristik Pembelajaran Abad 21**

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Kemendikbud, 2014). Sebagai proses interaksi, di mana peserta didik dan guru memiliki karakteristik tersendiri, maka memunculkan karakteristik pula pada pembelajaran abad 21. Karakteristik pembelajaran abad 21 adalah:

- 1) Berpusat pada siswa
- 2) Multi arah
- 3) Peserta didik disarankan untuk lebih lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan dan melakukan penyelidikan, serta menuangkan ide-ide, baik lisan, tulisan, dan perbuatan. d) Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus dapat
- 4) memfasilitasi peserta didik untuk dapat bekerjasama antar sesamanya (kolaboratif dan kooperatif).
- 5) Semua kompetensi (KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4) harus dibelajarkan secara terintegrasi dalam suatu mata pelajaran, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang utuh
- 6) Pembelajaran harus memperhatikan **karakteristik tiap individu**
- 7) Guru harus dapat **memotivasi** peserta didik untuk memahami interkoneksi antar konsep, baik dalam mata pelajarannya dan antar mata pelajaran, serta aplikasinya dalam dunia nyata.
- 8) Sesuai dengan karakter pendidikan Abad 21 (4K atau 4C), maka pembelajaran yang dikembangkan harus dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir lebih tinggi (**Higher Order Thinking Skills = HOTS**).
- 9) Pembelajaran yang dilaksanakan mengacu kepada **RPP** yang telah dikembangkan sebelumnya

Karakteristik pembelajaran abad 21 ini, oleh pemerintah dikembangkan menjadi karakteristik pembelajaran dan dituangkan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 104 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikbud, 2014), yaitu: Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik:

- a. interaktif dan inspiratif;
- b. menyenangkan, menantang, & memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;
- c. kontekstual dan kolaboratif;
- d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan
- e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (R1, 2014)

4. Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Abad 21

Setelah mengidentifikasi berbagai karakteristik dari komponen pembelajaran di abad 21, maka strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran abad 21 adalah:

- a. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat.
- b. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat.
- c. Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat/*stakeholders*/pasar dan tuntutan teman saing.
- d. Pemanfaatan sumber luar (*out sourcing*), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan.
- e. **Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak (pemerintah/non pemerintah, dalam/luar negeri)**
- f. **Menciptakan *soft image*** pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup.
- g. **Pemanfaatan teknologi informasi**, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya (misal; penggunaan internet, multi media pembelajaran, sistem informasi terpadu, dan sebagainya) (Kemenristekdikti, 2016)

Dalam formulasi sederhana, maka strategi peningkatan kualitas pembelajaran abad 21 tergnatung pada tiga komponen utama yaitu guru (teacherpreneur), siswa (technopreneur) dan kurikulum. Ketiga komponen ini melaksanakan pembejaran yang HOTS dengan dawali oleh: 1 (desain pembelajaran yang HOTS dan pelaksanaan pembelajaran dengan active learning strategy berbasis HOTS.



Bagan.48. Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Abad 21

5. Penutup

Abad 21 yang syarat dengan tantangan, tuntutan menyebabkan pendidikan harus pandai mengambil kesempatan untuk menampilkan diri secara berkualitas. Walaupun Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas tinggi awalnya memang berat, tetapi jika menjalani tugas yang berat dengan komitmen yang tinggi maka akan menghasilkaj kepuasan dan makna tak ternilai.

Daftar References

kemendikbud, T. (2017). *Panduan Implementasi Kecakapan Abad 21 Kurikulum 2013 di SMA*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Didasmen Kemendikbud.

Kemenristekdikti. (2016). *Pembelajaran Abad 21*. Retrieved from SPADA: <http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/course/view.php?id=568>

- R1, K. (2014). *Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Wahab, R. (9 Pebruari 2019). *FGD FRI Tentang Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Padang: FRI.
- Wiyani, N. A. (2012). *Teacherpreneurship*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.



B. Active Learning Sebagai Stratgei Pembelajaran Abad 21

1. Pengantar

Saat ini dunia pendidikan secara real ada dalam lingkungan Abad 21. Abad 21 adalah abad pengetahuan, oleh karenanya pendidikan seemestinya menjadi ujung tombak penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dibutuhkan oleh abad ini. Untuk menjadi SDM berkualitas maka seluruh kompetensi yang dibutuhkan di abad ini juga harus dimilikinya. Menurut Prof. Dr. Rohmat Wahab, ada 4 komptensi inti yang harus dimiliki SDM sesuai tuntutan abad 21 yaitu *Learning Competencies, literacy competencies, life competencies and moral competencies* (Wahab, 9 Pebruari 2019).

Keempat kompetensi yang dimaksud: pertama, *Learning Competencies* adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik, agar guru mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif (Chang Zhu, 2013) dan agar siswa bisa menjadi *problem solver* di zamannya (BUSD, 2018). Kedua, *literacy competencies* adalah serangkaian ketrampilan dan pemahaman yang memungkinkan seseorang mengenali kebutuhan informasi, memutuskan sumber daya mana yang paling baik untuk menjawab kebutuhan itu, tahu cara menggunakan sumber daya secara efektif dan mengevaluasi informasi yang mereka temukan (Islam dan Tsuji, 2010). Kompetensi literasi saat ini yang dibutuhkan ada;ah jenis literasi baru yaitu *information/data literacy, technology literasi (media-IT) dan human literacy*. Ketiga, *life competencies* adalah adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama dengan beragam latar belakangnya (Chang Zhu, etc, 2013). Keempat, *moral competencies* adalah kesadaran terhadap satu perilaku moral yang universal (aspek

afektif) dan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku moral secara konsisten (Sit, 2010).

Dari keempat kompetensi yang dibutuhkan Abad 21 ini yang diadopsi oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah kompetensi pembelajaran (*learning competencies*) menjadi 4C tetapi C nya bukan Competencies sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Keempat c yang dimaksud adalah:

- a. Critical Thinking Skill. Keterampilan berpikir kritis memiliki batasan yang berbeda-beda. Menurut John Dewey “berpikir kritis” merupakan “berpikir reflektif” dan mendefinisikannya sebagai pertimbangan yang aktif, terus- menerus, dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan- alasan yang mendukungnya dan kesimpulan- kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Sedangkan Glaser (mendefinisikan critical thinking skill sebagai suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah- masalah dan hal- hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang, pengetahuan tentang metode- metode pemeriksaan dan penalaran yang logis, dan semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode- metode tersebut Keterampilan berpikir kritis adalah (Hidayah, 2017).

Pendapat dari Mendikbud Anies Baswedan, yang dimaksud dengan Critical thinking (berpikir kritis) yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Di era reformasi critical thinking, juga digunakan untuk menangkal dan memfilter paham radikal yang dianggap tidak masuk akal. Kemampuan berpikir kritis biasanya diawali dengan kemampuan seseorang mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya, kemudian menilai dari sudut pandang yang digunakannya. Kemudian ia memposisikan dirinya, dari situasi yang tidak tepat menjadi situasi yang berpihak padanya (Sugiyarti dkk, 2018)

Masih dalam sumber yang sama, keterampilan berpikir kritis menurut Garrison, Anderson, dan Archer dibagi menjadi empat, yaitu: (1) trigger event /cepat tanggap terhadap peristiwa, yaitu mengidentifikasi atau mengenali masalah, dilema dari pengalaman seseorang dengan cepat, (2) exploration/ eksplorasi, memikirkan ide personal dan sosial dalam rangka membuat persiapan keputusan, (3) integration/ integrasi, yaitu mengkonstruksi maksud dari gagasan, dan mengintegrasikan informasi relevan yang telah

ditetapkan pada tahap sebelumnya, dan (4) resolution/ mengusulkan, yaitu mengusulkan solusi secara hipotetis, atau menerapkan solusi secara langsung kepada isu, dilema, atau masalah serta menguji gagasan dan hipotesis.

Beberapa ahli mengungkapkan terkait indicator dalam critical thinking skill. Menurut Ennis (1995: 4-8), terdapat enam unsur dasar dalam critical thinking skill meliputi (1) Fokus (focus), merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui informasi. Untuk fokus terhadap permasalahan, diperlukan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan dimiliki oleh seseorang akan semakin mudah mengenali informasi. (2) Alasan (reason), yaitu mencari kebenaran dari pernyataan yang akan dikemukakan. Dalam mengemukakan suatu pernyataan harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung pernyataan tersebut. (3) Kesimpulan (Inference), yaitu membuat pernyataan yang disertai dengan alasan yang tepat (Hidayah dkk, 2017).

Dalam konteks Indonesia, ketrampilan berpikir kritis ketika diimplementasikan dalam pembelajaran (Kurtulis) menggunakan 5 M dalam pendekatan saintifik, yaitu Mengamati, Menanya< Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi (menganalisis informasi), dan mengkomunikasikan (Purnomo, 2016).

Model pembelajaran yang sesuai untuk ketrampilan berfikir kritis antara lain *model problembased learning* dan *project based learning*. *Pertama. model problem based learning*. Menurut Mbulu (Widia Ratna Sari, 2017), Problem based learning model adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dalam usaha mencari pemecahan/jawaban oleh siswa. Adapun sintak dari model pembelajaran ini adalah: 1) mengidentifikasi masalah, 2) mendefinisikan masalah, 3) memilih strategi, 4) melaksanakan strategi dan 5) mengevaluasi hasil (Khairani dan Safitri, 2017). *Kedua. project based learning*. menurut Grant (2002) mendefinisikan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Sintaks model pembelajarn ini menurut Educational Technology Division-Ministry of Education Malaysia (2006)

terdapat 6 langkah yaitu 1) dengan mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari, 2) membuat rencana proyek, 3) membuat jadwal, 4) memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (PBL), 5) melakukan penilaian, dan 6) evaluasi pembelajaran berbasis proyek (PBL) (Harianti), 2019).

- b. *Creativity*. Menurut Anies Baswedan, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kreativitas membekali seorang peserta didik yang memiliki daya saing dan memberikan sejumlah peluang baginya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Sugiyarti dkk, 2018).

Kreativitas menurut Campbell juga Kreativitas dapat diartikan: 1) kemampuan menanggapi, menanggapi dan memberikan jalan keluar segala pemecahan yang ada; 2) kemampuan melibatkan diri pada proses penemuan untuk memecahkan masalah; 3) kemampuan intelegensi, gaya kognitif, dan kepribadian/motivasi; 4) kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baru. Oleh karenanya kreativitas ini didasari dengan: kelenturan (fleksibilitas), kelancaran (fluency), kecakapan (smartly), dan kepandaian (intellegency) (Sunarto, 2018).

Kreativitas biasanya disandingkan dengan inovasi. Inovasi berkaitan dengan temuan baru yang dasarnya adalah gagasan-gagasan baru yang sumbernya dari kreativitas, sehingga kreativitas menurut Waruwo merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada (Sunarto, 2018). Oleh karenanya, dalam konteks Kurikulum 13 C kedua ini difasilitasi lewat kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan produk dari peserta didik, seperti melalui pembelajaran berbasis proyek.

- c. *Communication*. Menurut Anies Baswedan, Communication (komunikasi) yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan (Sugiyarti dkk, 2018). Komunikasi menjadi penting karena dengan kemampuan komunikasi maka peserta didik akan mampu menemukan sesuatu (discovery), tetapi membutuhkan kemampuan bahasa maupun IT.

- d. *Collaboration adalah* Collaboration (kolaborasi) yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian ia akan senantiasa berguna bagi lingkungannya (Sugiyarti dkk, 2018). Kolaborasi akan membentuk kemampuan peserta didik untuk bisa bekerja dalam tim.

Keempat C tersebut dalam implementasinya di pembelajarn difasilitasi melalui pembelajaran yang HOTS.

2. Pembelajaran HOTS

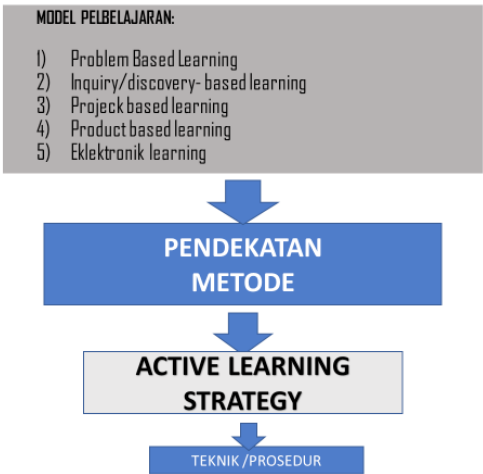
Sesuai dengan karakteristik pembelajaran dalam konteks Abad 21 di Kurtilas ini yang diadaptasikan dengan 4C, maka implementasinya menggunkan pembelajaran yang HOTS. Apa sebenarnya HOTS itu? HOTS yang merupakan akronim dari Higher order thinking skill **menghubungkan temuan masalah dan kreativitas melalui kegiatan perencanaan, pengamatan sendiri terhadap perkembangan masalah, dan penyesuaian strategi pemecahan masalah sendiri** (Sternberg & Lubart, 1995, hal 276; Young, 1997). Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga didefinisikan sebagai **penggunaan pikiran secara luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru.** (Heong, dkk, 2011). Pendapat lainnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang diberikan, **sikap yang kritis untuk mengevaluasi, mempunyai kesadaran (awareness) metakognitif dan memiliki kemampuan pemecahan masalah** (Dewanto dalam Amalia (20013:5) dan Berpikir tingkat tinggi : menggunakan pemikiran yang **kompleks, non algorithmic untuk menyelesaikan suatu tugas, ada yang tidak dapat diprediksi, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tugas yang telah ada dan berbeda dengan contoh.**

HOTS memiliki karakteristik sendiri yaitu: 1) **Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ciri-ciri berpikir tingkat tinggi, kemampuan:** menemukan, menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, mengambil keputusan yang tepat, 2) **Berbasis permasalahan kontekstual; 3) Stimulus menarik; dan 4) Tidak Rutin. Selanjutnya menurut Wade 8 karakteristik HOTS:** 1) Merumuskan pertanyaan, 2) Membatasi permasalahan, 3) Menguji

data-data, 4) Menganalisis berbagai informasi, 5) Menghindari pertimbangan yang sangat emosional, 6) Menghindari penyederhanaan berlebihan, 7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi dan 8) Mentoleransi ambiguitas (Handayani dan Priatmoko, 2013).

Untuk melaksanakan pembelajaran HOTS yang sesuai menggunakan alur hirarkis sebagai berikut:

- 1) Menentukan model pembelajaran. Contoh guru bisa memilih model pembelajaran: a) Problem Based Learning, b) Inquiry/discovery- based learning, c) Project based learning, d) Product based learning, d) Eklektronik learning dan lain sebagainya yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran Abad 21.
- 2) Pilih pendekatan/metode pembelajaran yang paling sesuai (HOTS)
- 3) Pilih strategi pembelajaran (active learning) yg paling sesuai (HOTS)
- 4) Tentukan prosedur/Teknik pembelajaran
- 5) Laksanakan pembelajaran sesuai prosedur yang HOTS



Bagan. 49. Hirarki Penentuan Pembelajaran HOTS

Dari bagan di atas bisa dipahami bahwa melaksanakan pembelajaran membutuhkan persiapan secara hirarkis untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Sesuai dengan Standar Nasional pendidikan, maka dijelaskan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang sesuai dengan kriteria pemilihannya. Pertama. Model pembelajaran: merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki

nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Kedua, pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Ketiga. Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi. Keempat. Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan langkah-langkah sistematis dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan (R1, 2014).

3. Active learning Sebagai Strategi Pembelajaran Abad 21

Dari sekian banyak pilihan strategi pembelajaran yang bisa dipilih dan digunakan dalam pembelajaran di Abad ini adalah strategi pembelajaran aktif (*active learning strategy*). Erix Hutasoit (Latifah, 2015), menyatakan bahwa *active learning* merupakan strategi pembelajaran yang sangat tepat untuk pembelajaran di Abad 21 karena mampu menggali potensi dan kecerdasan peserta didik lebih maksimal, agar peserta didik lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Strategi pembelajaran aktif sendiri adalah strategi pembelajaran yang Melvin L Sibermen yang berangkat dari asumsi bahwa peserta didik akan relative menguasai bahkan menjadi master jika dia terlibat aktif dalam peristiwa pembelajaran. Siswa yang hanya mengandalkan mendengarkan maka ia cenderung lupa, jika mendengar dan melihat maka ia akan ingat tetapi sedikit, dan jika ia mendengar, melihat dan mendiskusikannya dengan teman lainnya maka ia akan cenderung mengingat banyak, apalagi jika sampai ia mengerjakan dan mengajarkannya kepada orang lain maka ia akan menjadi sangat menguasai (master) (Sibermen, 2006).

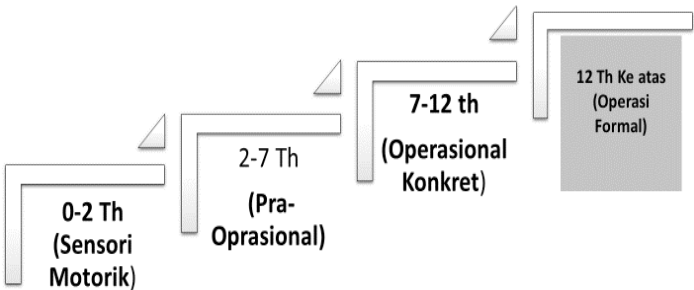
Sesuai dengan karakteristiknya membuat siswa aktif, maka strategi ini digunakan tidak hanya dalam konteks saat kegiatan ini pembelajaran, tapi dimulai sebelum pembelajaran dan bahkan sampai ketika pembelajaran akan selesai. Dengan jumlah 101 strategi pembelajaran, maka strategi pembelajaran aktif ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja waktunya, yaitu sebelum pembelajaran, ketika kegiatan inti pembelajaran dan saat kegiatan pembelajaran akan selesai digunakan. Strategi pembelajaran aktif yang dipilih dan diperuntukkan “sebelum” pembelajaran berfungsi untuk mengkondisikan siswa

agar siap belajar, untuk “saat” pembelajaran (kegiatan inti pembelajaran) berfungsi agar siswa menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dipelajari saat kegiatan ini pembelajaran dan strategi yang digunakan sebelum pembelajaran selesai (akhir pembelajaran) berfungsi untuk mengamankan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sudah diperoleh di “saat” pembelajaran agar tidak terlupakan (membekas lama).

Selanjutnya setelah guru memahami perbedaan beberapa penggunaan strategi pembelajaran aktif yang jumlahnya ada 101 strategi turunan berdasarkan waktu penggunaannya (sebelum, saat dan ketika akan selesai pembelajaran), maka guru wajib memahami, mempedomani dan menggunakan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Menurut Umi Zulfa (2010), kriteria pemilihan strategi pembelajaran ada 4, yaitu:

- a. Karakteristik peserta didik. Artinya guru ketika memilih strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, utamanya dalam hal perbedaannya baik perbedaan kemampuan, talenta, gaya belajar, kematangan, maupun kelengkapan aspek fisik. Jika kriteria ini diabaikan maka akan menyebabkan penggunaan strategi pembelajaran bukannya membantu sampainya peserta didik ke tujuan pembelajaran malah menghambat sampainya tujuan pembelajaran. Artinya pembelajaran menjadi tidak efektif.

Misalnya dalam konteks workshop kali ini adalah untuk MA/SMAA, maka penting bagi guru mengetahui karakteristik umum dari anak usia SMA/MA.



Bagan.50. Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Usia

Sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia SMA/MA/MAK/ SMK ada berada dalam poisis Operasional Konkrit menurut Piaget. Karakteristik (utamanya ciri berfikirnya/kemampuan kognitif) adalah:

- a) Peserta didik mampu berfikir secara menyeluruh (komprehensif)
- b) Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah walaupun tanpa adanya data yang konkrit
- c) Mampu melakukan klasifikasi
- d) Memiliki skema (kategori pengetahuan yang membantunya menginterpretasikan dan memahami dunia)
- e) Asimilasi (proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada)
- f) Akomodasi (bentuk penyesuaian lain yang melibatkan perubahan atau penggantian skema akibat masuknya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang lama) (Widiyati, 2014)

Dengan karakteristik ini maka akan sangat efektif ketika guru memilih sekain dari 101 strategi pembelajaran aktif. Siswa benar-benar menjadi pusat pembelajaran dan sifat harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Walaupun demikian adakalanya seseorang tidak otomatis bisa mencapai tahapan perkembangan ini sebagai orang dewasa, maka guru bisa memberi alternatif lain dengan mengasumsikan ada peserta didiknya yang masih berada dalam tahapan operasional konkrit dengan sesekali menyelipkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik operasional konkrit (logika yang sudah lumayan: bisa mengurutkan, mengklasifikasi, decentering (memperhatikan beberapa aspek dalam pemecahan suatu masalah), dan reversibility (memahami penjumlahan berbeda tetapi bisa Kembali ke kondisi awal, seperti $4+4$ sama dengan 8, dan $8-4$ sama dengan 4), konservasi (pemahaman bahwa kuantitas tidak berhubungan dengan tampilan), dan penghilangan sifat egosentris).

- b. Tujuan dan materi pembelajaran. Kriteria ini berkaitan dengan ranah tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran itu apakah ada dalam ranah kognitif, psikomotorik ataukah afektif. Ketiga ranah ini mengandung konsekuensi jatuhnya pilihan strategi pembelajaran yang berbeda pula di setiap ranahnya. Maka guru harus memperhatikan betul kesesuaian strategi pembelajarannya dengan tujuan dan materi pembelajaran.
- c. Ketersediaan waktu dan media pembelajaran. Seringkali penggunaan suatu strategi pembelajaran menghabiskan porsi waktu yang lebih banyak dari strategi pembelajaran yang lain. Demikian juga adakalanya penggunaan

strategi pembelajaran tertentu wajib disediakan media pembelajaran tertentu. Sikap yang harus diambil guru adalah guru harus memperhatikan apakah strategi pembelajaran yang akan dipilih menghajatkan penggunaan waktu yang lebih banyak dna mengharuskan digunakannya media pembelajaran atau tidak. Jia jawabannya adalah iya, lihatlah apakah sekolah menyediakan kebutuhan dua hal tersebut atau tidak atau guru mau menyediakan secara mandiri atau tidak, jika iya, maka strategi tersebut bisa dipilih.

- d. Familiaritas strategi pembelajaran. Saat ini guru-guru banyak mendapatkan fasilitas pelatihan dan pengembangan guru baik yang berbentuk training, workshop, in house training dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Strategi-startegi baru yang didapatkan harus dipastikan dikuasai betul teknis penggunaannya sampai derajat familiar. Jika belum dikuasai dan belum familiar ketika dipaksa digunakan maka akan berakibat tidak efektifnya pembelajaran yang menggunakan startegi tersebtu. Namun begitu, tidak berarti guru hanya selalu menggunakan strategi itu-itu saja hanya dengan alasan sudah sangat familiar. Ini berarti penggunaan strategi pembelajaran selain tidak bervariasi juga menyebabkan terabaikannya kriteria-kriteria lain dalam pemilihan strategi pembelajaran.



Bagan.51. Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran

Beberapa strategi pembelajaran yang termasuk strategi pembejaran aktif adalah debate active, point counter point, jigsaw, problem solving, creative problem solving strategi dan lainnya. Sebagai contoh bagaimana penggunaan startegi pembelajaran ini sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21, maka akan ditampilkan contoh oenggunaan salah satu starteginya.

Creative problem solving strategy (CPS) merupakan strategi pembelajaran yang ditemukan oleh Penemu Alex Osborn dan Sidney Parnes. Menurut Pepkins dalam penggunaannya, strategi ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. *Klarifikasi Masalah*. Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan pada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan.
- b. *Pengungkapan Pendapat (Brainstorming)*. Siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah.
- c. *Evaluasi dan Pemilihan*. Setiap siswa berkelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah.
- d. *Implementasi*. Setiap siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut (Effendy, 2016)



Bagan.52. Prosedur CPS

Lalu bagaimana CPS bisa dilaksanakan dengan HOTS? Atau bagaimana integrasi HOTS dalam CPS (ingat bahwa HOTS bisa disiapkan dalam desain pembelajaran/RPS, materinya, pelaksanaannya (penggunaan startegi pembelajaran) dan evaluasi juga HOTS.

Berikut disajikan contoh pengintegrasian HOTS dalam Langkah-langkah penggunaan strategi CPS.

Tabel 12. Integrasi HOTS dalam CPS

Tahapan CPS	Integrasi HOTS	Hasil Belajar Berpikir Kritis	Hasil Belajar Berpikir Kreatif
Klarifikasi Masalah	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menggali informasi yang dibutuhkan	• memfokuskan pertanyaan • menganalisis argument • bertanya dan menjawab pertanyaan	menganalisis masalah dengan cara yang berbeda dan informasi dari berbagai sumber
Brainstorming	Tidak membatasi peserta didik dalam mengajukan dugaan, gagasan, maupun pendapat melalui inkuiri ataupun membuat konjektur. Tidak ada sanggahan dalam mengungkapkan ide gagasan satu sama lain.	• memberikan penjelasan lanjut dengan mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi • mengidentifikasi asumsi-asumsi	• menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam interpretasi, metode penyelesaian atau jawaban masalah • mendiskusikan berbagai metode penyelesaian
Evaluasi dan Pemilihan	• meminta peserta didik mencari berbagai alternative jawaban maupun penyelesaian. • Peserta didik mendiskusikan strategi mana yang cocok, efektif, dan efisien untuk menyelesaikan masalah	• mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak -mengobservasi dan mempertimbangkan strategi • membuat dan menentukan hasil pertimbangan terhadap strategi penyelesaian.	• memecahkan masalah dalam satu cara, kemudian dengan menggunakan cara lain.
Implementasi (:solusi)	• meminta peserta didik memberikan kesimpulan dengan kreativitasnya sendiri dan menggunakan strategi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan lain	• menentukan strategi penyelesaian yang diambil -menarik kesimpulan	• memeriksa beberapa metode penyelesaian atau jawaban, kemudian membuat lainnya yang berbeda. • memeriksa beberapa masalah yang diajukan, kemudian mengajukan suatu masalah yang berbeda.

4. Penutup

Mengimplementasikan sesuatu hal yang baru membutuhkan persiapan profesional sekaligus komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Semakin tinggi kualitas yang diinginkan semakin membutuhkan banyak komitmen dari

berbagai pihak. Memilih startegi pembejaraan yang sesuai dengan karakteristik pemebelajaran Abad 21 selain membutuhkan persiapan secara professional dari guru juga membutuhkan komitmen dari berbagai pihak sekolah.

Daftar References

- BUSD. (2018). *21st Century Learning*. Retrieved from Berresa Union School District Education Services: <https://www.berryessa.k12.ca.us/documents/Common%20Core%20State%20Standards/BUSD%204Cs%20Presentation.pdf>
- Chang Zhu, D. W. (2013). What core competencies are related to teachers' innovative teaching?. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2013, Vol. 41, No. 1, 9–27, <http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.753984>.
- Effendy, A. (2016). Implementasi Creative Problem Solving Untuk Meningkatkan Self-Regulated Learning Siswa SMA. *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika UNY* (pp. 9-16). Yogyakarta: UNY.
- Harianti), A. S. (2019). *Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL)*. Retrieved from sibatik.kemdikbud.go.id: https://sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif/assets/file_upload/pengantar/pdf/pengantar_5.pdf
- Latifah, N. W. (2015). *Active Learning Sebagai Model Pembelajaran Abad 21*. Retrieved from Model of Teaching: https://www.academia.edu/33109766/ACTIVE_LEARNING_SEBAGAI_MODEL_PEMBELAJARAN_ABAD_21
- Lina Sugiyarti, A. A. (2018). Pembelajaran Abad 21 di SD. *Prosiding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar 2018*.
- Priatmoko, R. H. (2013). Pengaruh Pembelajaran Problem Solving Berorientasi HOTS (Higher Order Thinking Skill) Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas X. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, Vol 7, No. 1, 2013. jurnal.unnes.ac.id, 1051-1062.
- Purnomo, M. E. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik (5M) Menurut Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Matematika. *Seminar Nasional Pendidikan Matematika UNNISULA 2016* (pp. 280-287). Semarang: https://www.researchgate.net/publication/325249024_IMPLEMENTASI_PENDEKATAN_SCIENTIFIC_5M_MENURUT_KURIKULUM_2013_DALAM_PEMBELAJARAN_MATEMATIKA.

- R1, K. (2014). *Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Ratna Hidayah, M. S. (2017). Critical Thinking Skill: Konsep Dan Indikator Penilaian. *Taman Cendekia Vol.1. No. 2 Tahun 2017*, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/tamancendekia/article/view/1945/1127>, 127-133.
- Safitri, I. K. (2017). Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Usaha dan Energi di MAN Rukoh Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) Vol.5, No.2, hlm. 32-40*, 2017, 33-40.
- Sibermen, M. L. (2006). *Active Learning, 101 Cara Belajar Aktif*. penerjemah. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media dan Nuansa.
- Sit, M. (2010). Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2010*, 3.
- Sunarto. (2018). Pengembangan Kreativitas-Inovatif Dalam Pendidikan Seni Melalui Pembelajaran Mukidi. *JURNAL REFLEKSI EDUKATIKA 8 (2) (2018)*, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/RE/article/viewFile/2348/1347>, 107-113.
- Wahab, R. (9 Pebruari 2019). *FGD FRI Tentang Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Padang: FRI.
- Widia Ratna Sari, A. A. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dalam Kelompok Kecil untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis dan Hasil Belajar. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel8F05625A1E0E20743695AD9D7501E114.pdf>, jurnal-online.um.ac.id.
- Widiyati, W. (2014). Belajar Dan Pembelajaran Perspektif Teori Kognitifisme. *Bilogi SKL Vol 3 No 2 edisi Juli-Desember 2014*, 177-187.
- Zulfa, U. (2010). *Strategi Pembelajaran (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.



C. **Penyiapan Pembelajaran Berkualitas Melalui Perangkat Pembelajaran Yang Baik:**

1. **Pengantar**

Melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan Abad 21 tidaklah mudah sekaligus juga tidak sulit. Salah satu yang bisa diupayakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas adalah dengan melakukan penyiapan perangkat pembelajaran yang baik. Perangkat pembelajaran menurut Zuhdan merupakan alat atau **perlengkapan untuk melaksanakan** proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan **pembelajaran** (Hapsari dkk, 2018).

Dalam pembahasan ini akan dimulai dengan; a) Konsep Dasar Perangkat Pembelajaran, b) Implikasi Persyaratan Pembelajaran Abad 21 Bagi PP dan c) Penyusunan Perangkat RPP Berbasis HOTS.

2. **Penyiapan Pembelajaran Berkualitas Melalui Perangkat Pembelajaran Yang Baik:**

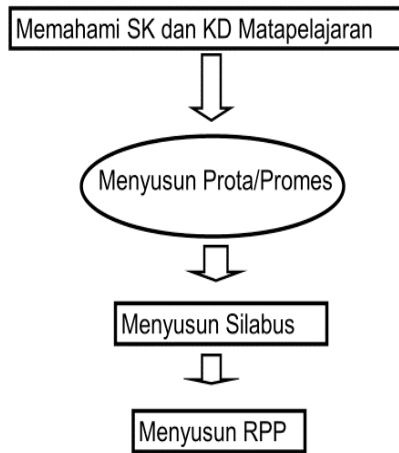
a. **Konsep Dasar Perangkat Pembelajaran**

Konsep dasar perangkat pembelajaran dimulai dengan mengetahui batasan perangkat pembelajaran. Menurut Zuhdan perangkat pembelajaran adalah alat atau **perlengkapan untuk melaksanakan** proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan **pembelajaran** (Hapsari dkk, 2018). Adapun ragam dari berbagai perangkat pembelajaran antara lain: Kaldik, Prota, Promes, Silabus, **RPP**, buku absen, Buku jurnal, Buku penilaian, Bundel portofolio, Bank soal dan Media.

Salah satu dari perangkat pembelajaran yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah RPP. Namun sebelum membahas hal tersebut maka sedikit dibahas masing-masing dari perangkat pembelajaran di atas yang dekat dengan RPP.

a. **Program Tahunan (Prota).**

Penyusunan rencana pembelajaran berkaitan dengan kegiatan merencanakan program pembelajaran tahunan, semesteran sampai dengan harian. Dibutuhkan Langkah-langkah sistemik sehingga produk perencanaan itu holistik-integratif. Dalam hal ini dibutuhkan kecermatan dalam proses penyusunannya sehingga hasil maksimal.



Bagan.53. Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran

Prosedur penyusunan Rencana Pembelajaran dimulai dengan: a) memahami SK dan KD Mata pelajaran, 2) Menyusun Prota/Promes, 3) Menyusun silabus dan 4) Menyusun RPP.

Program tahunan (Prota) adalah **Rancangan kegiatan belajar mengajar** secara garis besar yang dibuat dalam **jangka waktu satu tahun** dengan memperhatikan **analisis kurikulum** beserta perhitungan pekan efektif. Prota juga sama dengan Rencana penetapan alokasi waktu dalam satu tahun pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Prota merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni Program Semester (Promes), Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam hal ini Guru memiliki **kebebasan** dalam menentukan format program tahunan.

Dalam Menyusun Prota bisa mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) **Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator** dalam satu tahun.
- 2) Mengidentifikasi **keluasan dan kedalaman** kompetensi dasar
- 3) Melakukan **pemetaan kompetensi dasar** untuk tiap semester
- 4) Menentukan **alokasi waktu** untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan **pekan efektif**

Pendapat yang kedua, Langkah-langkah penyusunan Prota adalah:

- 1) Memahami/ SK dan KD Matapelajaran
- 2) Menghitung pekan efektif
- 3) Distribusi alokasi waktu untuk setiap SK/KD
- 4) Menyusun Prota dan Promes

Kemudian pendapat ketiga meliputi:

- 1) Menelaah **jumlah tema dan subtema** pada suatu kelas
- 2) **Menandai** hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif
- 3) **Menghitung** jumlah Minggu Belajar Efektif (**MBE**) dalam satu tahun.
- 4) **Mendistribusikan alokasi waktu** Minggu Belajar Efektif (MBE) ke dalam subtema

b. Program Semester (Promes)

Promes adalah Rencana penetapan alokasi waktu pembelajaran dalam satu semester. Langkah-langkah penyusunan Promes adalah:

- 1) Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan
- 2) Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu
- 3) Menghitung jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) dan Jam Belajar Efektif (JBE) setiap bulan dan semester dalam satu tahun
- 4) Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review

c. Silabus

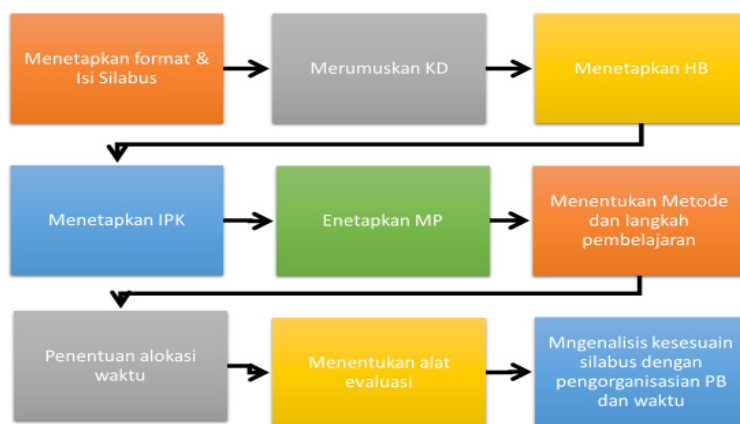
SILABUS adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK,KD,MP, sumber/bahan/alat belajar. Silabus juga merupakan penjabaran SK-KD ke dalam MP, kegiatan pembelajaran dan IPK untuk penilaian. Dalam

konteks KTSP, maka Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus sebagai suatu rencana pembelajaran diperlukan sebab proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, proses pembelajaran sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif (Niron, 2009). Sedangkan dalam konteks Kurikulum 13 (K-13) silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. (Permen No 59 tahun 2014 ttg K13)

Perbedaan kurikulum (KTSP dan K-13) memberikan implikasi perbedaan tahapan penyusunan silabus. Dalam konteks KTSP, prosedur penyusunan silabus adalah:

- 1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
- 2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran
- 3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran
- 4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi
- 5) Penentuan Jenis Penilaian Menentukan Alokasi Waktu
- 6) Menentukan Sumber Belajar (Niron, 2009)

Dalam format yang lebih detail pengembangan silabus merujuk pada Langkah-langkah sebagaimana bagan berikut.



Bagan.54. Langkah-langkah Penyusunan Silabus

Selanjutnya Prosedur pengembangan silabus menurut K-13 adalah

- 1) Mengkaji SK-KD/ KI-KD
- 2) Mengidentifikasi materi/ pokok pembelajaran
- 3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran (UNY, 2017)

d. RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP-KTSP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP juga bisa dimaknakan sebagai rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan dalam konteks K-13, maka Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus (UNY, 2017).

Adapun Langkah-langkah penyusunan RPP (KTSP) adalah:

- 1) Menetapkan Identitas Mapel
- 2) Menetakan SK
- 3) Memilih KD
- 4) Menjabarkan IPK
- 5) Mengembangkan ruang lingkup dan urutan MP

- 6) Menyusun skenario/PB
- 7) Menyusun sumber belajar, alokasi waktu
- 8) Menyusun penilaian
- 9) Menetapkan refleksi dan tindak lanjut

Adapun Langkah-langkah penyusunan RPP-K-13 sesuai Permendikbud No 81A tahun 2013 Tentang implementasi Kurikulum 13: Pedoman Umum (UNY, 2017) pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Kaji silabus.

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses.

Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

- 2) Identifikasi materi pembelajaran

Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran memperhatikan karakteristik peserta didik, daerah, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan, struktur ilmu, aktualitas, relevansi dan tentu saja adalah ketersediaan waktu.

- 3) Menentukan tujuan

Tujuan dalam hal ini dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan).

4) Mengembangkan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

5) Penjabaran jenis penilaian

Dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Selanjutnya Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

6) Menentukan alokasi waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

7) Menentukan sumber belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

b. Implikasi tuntutan pembelajaran abad 21 bagi RPP

Sebagaimana dimafhumi Bersama, maka tuntutan pembelajaran Abad 21 dalam konteks K-13 yang terumuskan dalam 4c (*Creative, Critical, Comunicative, Collaborative*) *skills*, memaksa kita memfasilitasinya mellaui peristiwa pembelajaran yang HOTS. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang HOTS maka RPP nya juga harus sedemikian ruoa disiapkan agar menjadi HOTS.

HOTS sendiri adalah Kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*), dengan menekankan pada:

- 1) *transfer satu konsep* ke konsep lainnya,
- 2) *memproses dan menerapkan* informasi,
- 3) *mencari kaitan* dari berbagai informasi yang berbeda-beda,
- 4) menggunakan informasi untuk *menyelesaikan masalah*,
- 5) menelaah ide dan informasi secara *kritis*.

Jika diperhatikan daloam struktur kognitif Bloo yang direvisi Anderson, maka posisi HOTS tampak dalam tabel berikut.

Tabel 13. Struktur Kognitif

HOTS	Mengkreasi	• Mengkreasi ide/gagasan sendiri. • Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengemba menulis, memformulasikan.
	Mengevaluasi	• Mengambil keputusan sendiri. • Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan memilih, mendukung.
	Menganalisis	• Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. • Kata kerja: membandingkan, memeriksa, , mengkritisi menguji.
MOTS	Mengaplikasi	• Menggunakan informasi pada domain berbeda • Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan.
	Memahami	• Menjelaskan ide/konsep. • Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan.
LOTS	Mengetahui	• Mengingat kembali. • Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, meniru

Berdasarkan hal demikian, maka implikasinya RPP yang disusun dalam konteks pembelajaran Abad 21 yang K-13 adalah harus HOTS. Lalu bagaimana mengembangkan RPP yang HOTS? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan **jenis kecakapan** sesuai KD
- 2) Merumuskan **Tujuan** Pembelajaran sehingga jelas kecakapan yang akan dimiliki peserta didik
- 3) Mengembangkan **IPK** yang dapat mengembangkan karakter kecakapan berfikir kritis dan pemecahan masalah
- 4) Mengembangkan **materi** pembelajaran yang relevan
- 5) Mengembangkan **kegiatan pembelajaran** yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis
- 6) Mengembangkan **teknik dan instrumen penilaian** sesuai dengan hasil analisis (tujuan atau IPK)
- 7) **Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**



Bagan.55. Prosedur Penyusunan RPP HOTS

Pada Langkah kedelapan yaitu Menyusun RPP, maka penyusun harus menyesuaikan dengan perubahan TPP K-13 edisi 2017. Setidaknya dipahami bahwa RPP K-13 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

Tabel 14. Perubahan RPP K-13

Permendikbud No. 103 Tahun 2014	Permendikbud No. 22 Tahun 2016	Permendikbud No. 22 Tahun 2016	Komponen RPP Revisi 2017
1. Identitas Sekolah	1. Identitas Sekolah/ Satuan Pendidikan	1. Identitas Sekolah/ Satuan Pendidikan	1. Sekolah
2. Identitas mata pelajaran	2. Identitas mata pelajaran/Tema	2. Identitas mata pelajaran/Tema	2. Mata pelajaran
3. Kelas/ semester	3. Kelas/ semester	3. Kelas/ semester	3. Kelas/ semester
4. Alokasi Waktu	4. Materi Pokok	4. Materi Pokok	4. Materi Pokok
5. Kompetensi Inti (KI)			5. Alokasi Waktu
			6. Kompetensi Inti/KI

6. Kompetensi dasar KD pada KI 1 KD pada KI 2 KD pada KI 3 KD pada KI 4	5. Alokasi Waktu 6. Tujuan Pembelajaran 7. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi	5. Alokasi Waktu 6. Tujuan Pembelajaran 7. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi	7. Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
7. Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator KD pada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4	8. Materi Pembelajaran 9. Metode pembelajaran	8. Materi Pembelajaran 9. Metode pembelajaran	8. Tujuan Pembelajaran 8. Materi Pembelajaran
8. Materi Pembelajaran	10. Media Pembelajaran	10. Media Pembelajaran	9. Metode pembelajaran
9. Kegiatan pembelajaran	11. Sumber Belajar	11. Sumber Belajar	10. Media Pembelajaran
10. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan pengayaan	12. Langkah- langkah Pembelajaran	12. Langkah- langkah Pembelajaran	11. Sumber Belajar
11. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar	13. Penilaian Hasil Pembelajaran	13. Penilaian Hasil Pembelajaran	12. Langkah- langkah Pembelajaran
			13. Penilaian Hasil Belajar

RPP yang HOTS di dalamnya memuat karakteristik HOTS pada aspek:

1) IPK harus HOTS.

Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi yang HOTS merujuk kepada struktur berpikir level HOTS dari C4 sampai C6 (menganalisis, mengevaluasi dan mencipta) dengan

2) Materi HOTS

Materi HOTS masuk dalam kategori procedural dan metakognitif. Tetapi tetap menyesuaikan dengan jenjang dan umur peserta didik.

3) Langkah-langkah pembelajaran HOTS

Menggunakan strategi pembelajaran yang mengasah kemampuan berfikir tingkat tinggi dari peserta didik seperti strategi pembelajaran kreatif problem solving (CPS) dan lain-lainnya.

4) Evaluasi HOTS

Instrumen evaluasi disesuaikan dengan level C4 sampai C6 sebagaimana tujuan pembelajarannya atau IPK nya.

3. Penutup

Melaksanakan pembelajaran berkualitas bisa dimulai dari perencanaan yang berkualitas. Menyusun perencanaan yang berkualitas butuh profesionalitas dan komitmen yang tinggi. Guru adalah penyusun rencana pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum, sekaligus guru adalah penterjemah dari kurikulum. Generasi penerus bangsa sangat ditentukan oleh profesionalitas dan komitmen guru dalam melaksanakan tugasnya.

Daftar References

- Niron, M. D. (2009). *Pengembangan Silabus dan RPP Dalam KTSP*. Retrieved from ahan Pendidikan dan Pelatihan Guru Dalam Jabatan Pengawas Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta: Silabus pada dasarnya merupakan rencana pembelajaran jangka panjang
- R1, K. (2014). *Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Tri Retno Hapsari, V. M. (2018). Analisis Permasalahan Guru Terkait Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Examples Non Examples dan Permasalahan Siswa Terkait Hasil Belajar Biologi di SMA. *Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2, Bln Februari, Thn 2018*, 204-209.
- UNY, S. (2017). *Pengembangan Silabus dan RPP K 13*. Retrieved from <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/nur-endah-januarti-ma/pps06pengembangan-silabusrppbahan-ajar.pdf>



D. SICI: Model Pembelajaran PAI Unggulan

1. Pendahuluan

Era ekonomi kreatif seperti saat ini, menghajatkan manusia-manusia yang tidak hanya sebagai *resources* tetapi *capital* agar ia mampu memberikan kontribusi positif bagi kebermutuan *Human Development Index* (HDI) bangsa ini, yaitu manusia-manusia yang memiliki karakteristik: a) tahu banyak (“knowing much”), b) berbuat banyak (“doing much”), c) mencapai keunggulan (“being excellence”), d) menjamin hubungan dan kerjasama dengan orang lain (“being sociable”), dan d) serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (“being morally”) (Sukmadinata, 2006: 5-6).

Untuk bisa memperoleh manusia-manusia dengan karakteristik tersebut, maka dibutuhkan lembaga pendidikan yang mampu menjalankan fungsi *educational production function* (Gaffar, 2009), secara berkualitas (unggul). Artinya institusi pendidikan sebagai organisasi yang berada di era kompetisi seperti saat ini mutlak harus memperlihatkan keunggulannya agar ia bisa dipercaya untuk menjalankan fungsi tadi secara berkualitas. Adapun yang dimaksud dengan keunggulan dalam konteks organisasi pendidikan adalah “... posisi relatif dari suatu organisasi terhadap organisasi lain, baik terhadap suatu organisasi atau sebagai organisasi atau keseluruhan organisasi dalam industry” (Gaffar, 2009).

Lebih jauh lagi Rahayu (Rahayu, 2008: 67), menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan maka suatu organisasi (satuan pendidikan) potensial memiliki keunggulan apabila dapat menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih (*superior customer values*) atau kinerjanya yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain dengan menerapkan strategi bersaing. Adapun Salah satu bentuk real atas strategi bersaing yang mestinya dipersiapkan oleh setiap lembaga pendidikan saat ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia khususnya guru agar mampu menjadi *human capital* agar ia mampu menunjukkan kinerjanya yang prima sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja organisasinya menjadi organisasi pendidikan yang unggul (Mangkunegara, 2008: 11). Dengan dimilikinya SDM guru yang unggul, diharapkan mereka akan mampu mengembangkan kualitas pembelajaran yang salah satunya adalah pembelajaran agama Islam sebagai salah satu indikator kebermutuan pendidikan nasional.

Adapun pengembangan kualitas pembelajaran bisa dilakukan dengan pengembangan pembelajaran agama Islam yang lebih jauh lagi bisa dilakukan baik dari sisi input (kurikulum dan perangkatnya) sebagai produk perencanaan pengembangan, proses (proses pembelajaran yang berkualitas) sebagai pelaksanaan pengembangan sampai pengembangan evaluasinya yang akan bermuara pada terbentuknya *output* dan *outcomes* pendidikan agama yang melampaui batas-batas standar nasional sehingga memiliki probabilitas tinggi untuk memenangkan kompetisi di era global. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan agama seperti PP. Nomor.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, hingga Keputusan Mentri Agama RI N0.211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Di luar itu semua, lembaga pendidikan yang mampu menawarkan keunggulan dengan sendirinya akan membuat para pelanggan tertarik untuk membeli, tidak saja hanya karena membutuhkan tetapi karena ada sesuatu yang lain yang diharapkannya. Sesuatu yang lain tersebut sesuai dengan citra dirinya (Alma, 2003: 91). Sedangkan untuk bisa menawarkan sesuatu yang lain yang dibutuhkan pelanggan dan sekaligus yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan, maka mutlak diperlukan *leadership* yang kuat yang mampu membawa perbaikan secara personal atas pribadi-pribadi yang ada di organisasi tersebut maupun membawa perbaikan bagi organisasi tersebut. Yaitu kepemimpinan yang mampu mengkreasikan visi, mengkreasikan gambaran kesuksesan di masa datang (Yeoh, 1995). Namun realitasnya menunjukkan hal yang berbeda. Kualitas *human capital* di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Bahkan berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa angka kemiskinan sebagai salah satu indikator ketidakbermutuan SDM Indonesia menunjukkan kisaran angka yang cukup tinggi, yaitu 34,96 juta jiwa atau 15,42 % dari total penduduk Indonesia adalah miskin (Ali, 2009: 57). Secara khusus moral anak bangsa juga semakin memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pemberitaan tentang tawuran anak sekolah, tawuran mahasiswa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak hingga kasus korupsi yang melilit negeri ini.

Faktor penting yang mempengaruhi kualitas SDM bangsa Indonesia yang demikian secara umum adalah faktor kualitas pendidikannya, dan secara spesifik adalah kualitas pembelajaran yang dilakukannya. Masih banyak dijumpai guru dalam proses pembelajarannya masih berkutat dengan model-model pembelajaran

konvensional yang kurang memberdayakan peserta didik, sehingga hasilnya pun masih kurang maksimal, baik dari sisi *academic achievement* maupun *nonacademic achievement* seperti masih banyak dijumpai adanya perilaku-perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam padahal mereka adalah muslim. Dengan kata lain, masih banyak fenomena moral peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas. Padahal semestinya pembelajaran PAI mampu menghantarkan peserta didik untuk memiliki karakter/pribadi muslim yang sempurna.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka tulisan ini memaparkan hasil penelitian tentang temuan model pembelajaran PAI unggulan sebagai tawaran model pembelajaran Agama Islam yang bisa dijadikan alternative untuk mengatasi keprihatinan akan persoalan moral (;baca *nonacademic achievement*) anak bangsa, khususnya generasi penerus bangsa. Untuk lebih mudah memahami tulisan ini, penulis menampilkan beberapa pembahasan dengan mengambil kasus di SDIP Masyitoh Kroya: a) kebijakan Pembelajaran PAI, b) Pelaksanaan Pembelajaran PAI, c) hasil hasil pembelajaran PAI, d) dan pengembangan model konseptual atas temuan model pembelajaran Agama Islam di SDIP Masyitoh Kroya.

2. Pembahasan

a. Pembelajaran PAI Dan Pembentukan Karakter

Sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan disebut sebagai karakter (Munir, 2010: 3). Ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa makanan, teman, orang tua, dan tujuan, merupakan faktor-faktor terkuat dalam mewarnai karakter seseorang. Namun disamping itu, karakter juga bisa dibangun atau dibentuk (Munir, 2010: 93).

PAI merupakan salah satu matapelajaran yang memiliki ciri khas pada tujuan utamanya pada pembentukan akhlak. Baik akhlak kepada Khalik, alam, makhluk, sesama manusia bahkan terhadap diri manusia sendiri (Al Syaibany, 1979). Oleh karena itu, akhlak (;terpuji) sebagai hasil dari proses pembelajaran PAI agar bisa permanen eksistensinya, maka harus bisa ditingkatkan derajatnya menjadi *karakter* setiap peserta didik muslim. Artinya efektivitas pembelajaran PAI antara lain bisa dilihat dari terbentuk tidaknya “karakter Islami” yang ada pada peserta didik. Karakter

Islami inilah yang sesungguhnya menjadi ciri khas pribadi-pribadi muslim yang hakikatnya merupakan tujuan akhir pendidikan Islam. Dalam hal ini meminjam istilahnya Marimba, terwujudnya kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam merupakan tujuan akhir pendidikan Islam. Aspek yang dimaksud meliputi: a). Aspek kejasmanian: meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dari luar, misalnya cara-cara berbuat, cara berbicara dan sebagainya, b). Aspek kejiwaan: meliputi aspek yang tidak segera dapat dilihat dari luar, misalnya cara berpikir, sikap (berupa pendirian atau pandangan seseorang dalam menghadapi seseorang atau suatu hal) dan minat dan c). Aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem nilai yang meresap di dalam kepribadian yang mengarahkan dan memberi corak seluruh kepribadian individu (Al Syaibany, 1979: 490).

Dalam rangka terwujudnya karakter Islami inilah, maka penting bagi pihak sekolah melakukan aktivitas pembelajaran PAI melalui pola-pola serta tahapan yang sistematis yang mampu mengkondisikan peserta didik, pendidik, sumber belajar dan lingkungan belajar sedemikian rupa (;terintegrasi) sehingga peserta didik benar-benar memperoleh pengalaman belajar yang akan menghantarkannya pada pencapaian tujuan berupa terbentuknya karakter Islami. Pola-pola yang dimaksud dalam hal ini adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar melalui proses sosialisasi, internalisasi, kontinyuitas dan institusionalisasi nilai –nilai Islam yang dilandasi filsafat belajar konstruktivisme.

Pertama. Sosialisasi. Hakikat dari belajar adalah proses sosialisasi. Sedangkan proses sosialisasi akan menentukan tujuan belajar, karena faktor sosial merupakan bagian dari sistem pembelajaran itu sendiri (Hanafiah dan Suhana, 2010: 62-64). Interaksi pertama peserta didik dengan pendidik, serta sumber belajar sesungguhnya merupakan proses sosialisasi. Sedangkan kualitas proses sosialisasi ini akan menentukan proses selanjutnya dari proses pembelajaran. Maka penting mengusahakan agar proses sosialisasi sebagai proses awal dan mutlak dalam pembelajaran dijamin kualitasnya.

Sosialisasi dalam proses pembelajaran dilandasi filsafat konstruktivisme. Brooks and Brooks menyatakan bahwa konstruktivis adalah suatu

pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif peserta didik. Artinya bahwa belajar bukan menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajarannya.

Sebagai pendekatan maka konstruktivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, 2) Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik, 3) Berbagai pandangan yang berbeda diantara peserta didik dihargai dan sebagai tradisi dalam proses pembelajaran, 4) Peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan mensitesiskan secara terintegrasi, 5) Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian (*inquiry*) yang lebih alami, 6) Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, 7) Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik dihadapkan ke dalam pengalaman nyata.

Dalam konteks tulisan ini, maka konstruktivisme melandasi konsep *sosialisasi* itu sendiri, yaitu pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian bahwa pengetahuan dibina oleh manusia. Artinya pengetahuan sebagai dasar utama yang akan membentuk karakter sesungguhnya diperoleh peserta didik akibat interaksinya dengan lingkungan sosial dan sekitarnya yang melibatkannya dan memberikannya pengalaman real yang kemudian dikonstruksi sendiri. Dengan demikian maka jelas bahwa sosialisasi sesungguhnya merupakan tahapan belajar. Bahwa hakikat dari belajar adalah proses sosialisasi. Sedangkan proses sosialisasi akan menentukan tujuan belajar, karena faktor sosial merupakan bagian dari sistem pembelajaran (Hanafiah dan Suhana, 2010; 68).

Dalam pandangan teori lain, seperti teori masyarakat Belajar (*Learning Community*) disebutkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses kerjasama antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan gurunya dan antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga sosialisasi diberikan melalui pemberian izin kepada peserta didik untuk mendapatkan sesuatu lewat pemberian pengalaman, menggunakan sumber

masyarakat lokal, dan sekolah mengorganisir kurikulum pada kelas-kelas yang mula-mula di sekitar masalah-masalah lokal dan isu-isu sosial (Ahmadi, 2007: 18-19). Sosialisasi juga terjadi dalam proses hubungan sosial antara pendidik dan peserta didik, di mana peserta didik mendapat pengaruh dari pendidik (pendapat dan pola tingkah laku yang disebut *konformitas*) (Prayitno, 2009: 70-75), yang bisa saja terjadi kesulitan karena kesulitan komunikasi maupun pola kelakuan yang berbeda (Nasution, 2009: 127-128). Untuk itu diperlukan media sosialisasi berupa keluarga, sekolah, teman bermain, media massa dan lingkungan kerja, sehingga proses sosialisasi berupa: sosialisasi, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, motivasi sumber bisa diwujudkan (NN, 2012).

Kedua. Internalisasi. Setelah proses sosialisasi maka lewat konformitas yang dilakukan guru atas siswa bisa dilanjutkan dengan proses internalisasi. Dalam istilahnya Muhaimin (2009: 153), internalisasi merupakan proses yang terdiri dari transformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi. Dalam konteks ini, maka belajar sesungguhnya adalah proses internalisasi *value* ke dalam diri peserta didik agar mem-body dan teraktualisasi lewat sikap dan perilaku yang dinampakannya. Internalisasi akan efektif dilakukan jika diawali dengan tahap sosialisasi yang menunjukkan kualitasnya yang menyebabkan teresapkannya informasi (; pengetahuan, nilai dan sebagainya) yang disosialisasikan kepada peserta didik.

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral termasuk juga nilai moral religius sebagai nilai yang terkandung dalam pembelajaran PAI bisa menggunakan pendekatan komprehensif. Yang dimaksud pendekatan komprehensif adalah pendidikan nilai yang menyeluruh atau komprehensif yang dapat ditinjau dari segi metode yang digunakan, pendidik yang berpartisipasi (guru, orang tua), dan konteks berlangsungnya pendidikan nilai (sekolah, keluarga) (Wahab A. A., 2011: 123). Adapun metode yang bisa digunakan dalam proses internalisasi adalah metode keteladanan dan pembiasaan. Kedua metode ini tidak bisa dipisahkan, karena tidak mungkin seorang pendidik akan dapat membiasakan perilaku baik kepada anak tanpa memberikan teladan bagaimana cara melaksanakannya.

Pembiasaan dilakukan ditujukan untuk membentuk ketrampilan lahiriah, yaitu kecakapan mengucap dan berbuat, kemudian diperkuat dengan keteladanan. Metode keteladanan menjadi sangat penting untuk

digunakan dalam proses internalisasi, karena secara alamiah pada diri anak ada beberapa unsur yang menyebabkan anak pada saat tertentu suka meniru (meneladani) orang lain yang berujung pada terbentuknya *caring* (kepedulian), *judging* (pertimbangan), tetapi sampai juga pada tahapan *acting* (perbuatan) (Syahidin, 2009: 119-121, 154-156).

Ketiga. Kontinuitas. Menurut teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dan lain-lain yang berlangsung secara *terus menerus* (*kontinyu*) sehingga peserta didik juga selalu mengadakan konstruksi (Pannen, 2001: 18-19). Oleh karena itu, yang dimaksud kontinuitas dalam konteks ini adalah proses mengupayakan perubahan perilaku (sebagai kelanjutan dari proses sosialisasi dan internalisasi value PAI) yang dilakukan secara terus-menerus dan terimplementasikan lewat pembiasaan sehingga value tersebut akan mem-body di dalam diri peserta didik. Kontinuitas belajar akan sangat terkait dengan waktu yang disediakan untuk berproses, tempat yang menentukan kelangsungan kontinuitas belajar itu sendiri (sekolah dan luar sekolah) (Nasution, 1995: 77), dan tentu saja adalah metode yang menjamin keberlangsungan proses belajar itu sendiri, seperti penggunaan metode *tajribi* atau metode latihan pengamalan; metode latihan penerapan secara terus menerus sehingga siswa terbiasa melakukan sesuatu sepanjang hidupnya. Suatu saat setelah latihan yang dimaksudkan selesai, maka siswa terbiasa dan merasakan bahwa melaksanakan sesuatu tersebut tidak lagi menjadi beban hidupnya, bahkan menjadi kebutuhan hidupnya. Terus menerus di sini yang dimaksud karena latihan di sini bukan latihan simulasi tapi difokuskan pada aspek pembiasaan dengan terjun langsung membiasakan melakukan sesuatu. Contoh membiasakan sholat dengan dipraktekkan langsung dalam rangka melaksanakan kewajiban pada waktu dan tempat yang tepat (Syahidin, 2009: 136-138). Sehingga setelah selesai latihan sholat (pada kurun waktu yang telah ditentukan), maka anak akan terbiasa untuk melakukan sholat bukan sebagai beban tapi sebagai kebutuhan hidupnya.

Adapun indikator dilakukan tidaknya kontinuitas dalam pembelajaran PAI bisa dilihat dari perspektif waktu, tempat dan metode yang digunakan. Pertama, waktu. Sebagaimana makna harfiah kontinuitas maka konsep kontinuitas adalah berlangsungnya proses pembelajaran secara terus

menerus, sepanjang berlangsungnya program pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kedua, tempat. Tempat berlangsungnya proses pembelajaran idealnya tidak hanya dalam konteks kelas formal-tradisional, tetapi di luar kelas (lingkungan besar; sekolah maupun lingkungan masyarakat). Terakhir atau indikator ketiga adalah metode yang digunakan dalam kontinuitas pembelajaran. Metode yang tepat dan menjamin proses pembelajaran berlangsung terus-menerus adalah metode *tajribi* (latihan pengalaman) yang dapat berbentuk: a) latihan dan pengulangan, b) latihan menghafal, c) latihan berpikir dan d) latihan ibadah.

Keempat. Institusionalisasi. Belajar akan semakin efektif jika *value* yang ada dalam pembelajaran diinstitusionalkan untuk menjadi karakter khas (; tuntutan capaian) bagi setiap orang yang ada dalam institusi tersebut. Sedangkan institusionalisasi *value* bisa diwujudkan lewat penciptaan budaya baru. Berdasarkan asumsi tersebut, maka yang dimaksud dengan institusionalisasi dalam konteks ini adalah suatu proses menjadikan nilai-nilai yang ada dan disepakati bersama menjadi karakter khas suatu lembaga. Jika nilai yang disepakati adalah nilai-nilai religius Islam yang ada dalam content PAI, maka sekolah akan memiliki karakter islami yang khas yang membedakannya dengan lembaga lain jika sekolah mampu menciptakan budaya baru. Adapun penciptaan budaya baru di sekolah bisa melalui pengembangan nilai mulai dari: a) tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian; melalui sosialisasi nilai agama, penetapan *action plan* dan pemberian penghargaan atas usaha pembiasaan atau *habit formation*, b) tataran simbol-simbol budaya, yaitu sekolah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya yang agamis (Muhaimin, 2009: 325-327).

Empat tahapan tersebut (*Socialization, Internalization, Continues, dan Institutionalization*) dilakukan secara sistemik dan di dalam setiap tahapannya harus selalu dievaluasi dalam kerangka *circle evaluation*, maka karakter Islami yang menjadi tujuan pembelajaran PAI akan terbentuk.

b. Pembelajaran PAI Di SDIP Masyitoh Kroya

Kebijakan yang diambil SDIP Masyitoh Kroya dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI adalah kebijakan semi formal (tertulis-tapi tidak ter-SK-kan) atau dalam istilah emic-nya disebut “kebijakan otomatis”. Isi dari kebijakan ini adalah pembelajaran PAI dilakukan di dalam kelas dan luar

kelas. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pembelajaran PAI mengikuti alur sosialisasi, internalisasi, kontinyu dan institusionalisasi. Berikut deskripsinya.

Sosialisasi. Alur yang dilakukan dalam sosialisasi meliputi: *Pertama. Awal pengenalan/ sosialisasi.* Artinya tahap awal pembelajaran adalah proses sosialisasi. Dalam hal ini SDIP melakukan sosialisasi atas bentuk pembelajaran PAI yang akan diterima/dialami oleh siswa kepada orang tua siswa dan siswa sendiri. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengambil waktu di awal tahun yaitu pada saat rapat tahunan untuk kalangan orang tua siswa. Sosialisasi di awal tahun juga diberikan kepada siswa, tepatnya pada saat awal kedatangan mereka di sekolah serta setiap hari selama menjadi peserta didik dengan menggunakan media sosialisasi berupa lembaran-lembaran, pembacaan program oleh wali kelas dan penempelan lembar sosialisasi di tempat-tempat umum di dalam kelas dan di luar kelas.

Apa yang dilakukan SDIP Masyitoh Kroya dalam melaksanakan pembelajaran PAI khususnya yang di luar kelas berupa pembiasaan dan keteladanan menunjukkan kalau SDIP sesungguhnya melakukan proses sosialisasi nilai-nilai Agama Islam. Dalam konteks pendidikan peristiwa sosialisasi seperti kasus di SDIP Masyitoh Kroya khususnya sosialisasi terhadap peserta didik, menurut Prayitno (2009) bisa terjadi dalam proses hubungan sosial antara pendidik dan peserta didik, di mana peserta didik mendapat pengaruh dari pendidik.

Berkenaan dengan hubungan sosial ini, sejak awal para ahli dalam bidang Psikologi Sosial (seperti Musen dan Rosenzweig) menampilkan berbagai pokok kajian tentang pengaruh sosial: salah satunya adalah konformitas. *Konformitas* merupakan pengaruh sosial dalam bentuk penyamaan pendapat atau pola bertingkah laku seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhinya. Dalam hubungan pendidikan, konformitas terjadi pada peserta didik sebagai hasil pengaruh dari pendidik. Demikian pula halnya yang terjadi dalam proses sosialisasi program/nilai-nilai agama Islam yang dikenalkan pihak SDIP (utamanya guru) lewat program pembiasaan dan keteladanan, dimaksudkan agar peserta didik memiliki persamaan pendapat sekaligus persamaan bertingkah laku sebagaimana yang digariskan oleh pihak sekolah (konformitas).

Apa yang terjadi dalam kasus konformitas peserta didik SDIP Masyitoh pada awal memperoleh informasi dan sekaligus mulai melaksanakan program pembiasaan dan keteladanan sebagai pengembangan diri dalam bentuk pembelajaran PAI di luar kelas merupakan konformitas membabitbuta (kelas 1 dan 2), konformitas identifikasi (kelas 3 ke atas). Sedangkan konformitas internalisasi baru muncul sedikit ketika siswa sudah kelas 5 atau 6, karena sosialisasi juga dilakukan terus-menerus bukan hanya di awal kegiatan pembelajaran saja. Artinya konformitas internalisasi sudah mungkin muncul mengingat pada jenjang kelas tersebut siswa relatif sudah dibekali dengan ilmu, wawasan dan sekaligus pengalaman menjalankan pembiasaan dan keteladanan selama ini. Sehingga siswa kelas 5 dan 6 relatif bisa mengambil posisi untuk tetap melaksanakan atau tidak atas pembiasaan dan keteladanan tersebut.

Kedua. Imitasi. Pada tahapan berikutnya setelah sosialisasi, pembelajaran PAI yang mengambil pola di dalam kelas dan di luar kelas, kemudian diformulasikan sedemikian rupa lewat program pembiasaan dan keteladanan pada saat di luar kelas dan diintegrasikan lewat pembelajaran PAI di dalam kelas dalam jam umum mata pelajaran PAI maupun Agama lokal. Namun dalam konteks pembelajaran di luar kelas yang menggunakan program pembiasaan seperti sholat dhuha, sholat dhuhur berjama'ah maupun program keteladanan, pihak sekolah kurang menampilkan perilaku keteladanan langsung kepada peserta didik dengan alasan guru lebih berperan sebagai “pengawas” bukan “model” sehingga mengakibatkan proses “imitasi” dari siswa tidak bisa leluasa muncul diperoleh oleh kalangan siswa.

Imitasi sebagai proses sosial atau tindakan seseorang untuk *meniru* orang lain melalui sikap, penampilan atau gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. Apa yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan bahwa imitasi relatif sulit diperoleh siswa akibat interaksi sosial dengan guru relatif kurang. Padahal jika menilik kepada kekhasan pembelajaran PAI, model dari guru menjadi faktor yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran PAI sendiri. Dalam hal ini semestinya guru melakukan sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dengan tampil menggunakan metode keteladanan (langsung). Artinya para guru dan atau karyawan SDIP Masyitoh Kroya tampil sebagai figur yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya contoh-contoh

keseharian yang relevan dengan program pembiasaan dan keteladanan yang sudah digariskan sekolah serta diperkuat oleh karakteristik anak usia SD yang punya kecenderungan untuk meniru/mengimitasi orang lain (Syahidin, 2009: 157-158).

Ketiga. Sugesti. Walaupun imitasi sulit diperoleh siswa akibat minimnya model dari kalangan guru, namun sugesti sudah mulai muncul di kalangan peserta didik sendiri maupun guru di SDIP Masyitoh Kroya. Adapun bentuk real adanya sugesti di kalangan peserta didik adalah berupa: a) saran kepada temannya yang tidak atau belum melaksanakan pembiasaan untuk melaksanakan pembiasaan tersebut, b) tindakan melapor kepada guru jika ada teman yang tidak melaksanakan pembiasaan, c) munculnya kesadaran diri untuk menerima konsekuensi jika tidak melaksanakan pembiasaan. Sedangkan sugesti yang muncul di kalangan guru berbentuk kesadaran guru untuk menanyakan kepada siswa apakah sudah melaksanakan pembiasaan atau belum.

Di luar munculnya sugesti di kalangan siswa dan guru, ada realitas menarik, yaitu masih dijumpainya sebagian kecil dari siswa yang belum mampu mensugesti diri apalagi mensugesti orang lain khususnya untuk siswa kelas 1 dan 2.

Berdasarkan temuan penelitian tentang adanya sugesti di kalangan siswa dan khususnya pada guru, menunjukkan bahwa sugesti dari siswa yang dekat dengan siswa (berteman) relatif memiliki pengaruh besar bagi temannya. Kepemilikan pengaruh inilah yang menyebabkan siswa SDIP mampu memberikan sugesti terhadap teman lainnya. Demikian juga sugesti guru terhadap siswa. Guru mensugesti siswa karena guru memiliki kekuasaan bahkan wibawa untuk mensugesti siswa agar siswa melaksanakan pembiasaan dan keteladanan yang sudah disosialisasikan oleh guru.

Keempat. Identifikasi. Selain sugesti dalam proses sosialisasi bisa dilihat juga adanya “identifikasi”. Namun identifikasi belum sepenuhnya muncul pada diri peserta didik SDIP Masyitoh Kroya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan siswa baru sekedar melaksanakan sesuai yang diprogramkan oleh pihak sekolah (misal dalam hal melakukan pembiasaan sholat dhuha hanya 2 roka’at) akibat pengaruh guru/sekolah.

Identifikasi sebagai kemampuan anak untuk mengidentifikasi stimulus yang diterimanya (<http://id.shvoong.com>: hal1), akan muncul jika siswa

sudah memiliki tingkat kesiapan (: pengetahuan) yang relatif besar. Pada kasus yang terjadi, siswa hanya melaksanakan pembiasaan terbatas pada perolehan pengetahuan yang didapatkan dari sekolah, bukan berdasarkan kesiapan awal untuk melaksanakan lebih dari yang distandarkan pihak sekolah. Seperti pada kasus pembiasaan sholat dhuha 2 roka'at, sehingga siswa juga hanya melaksanakan sholat dhuha 2 roka'at. Ini menunjukkan kemampuan mengidentifikasi stimulus berupa perintah pembiasaan sholat dhuha minimal 2 roka'at, juga dipahami siswa bahwa sholat dhuha adalah 2 roka'at. Berbeda jika siswa relatif punya kesiapan banyak, maka walaupun standar minimal yang digariskan sekolah untuk melakukan pembiasaan sholat dhuha, tidak akan dilakukan siswa hanya 2 roka'at, tetapi lebih sesuai ketentuan sebenarnya.

Kelima. Simpati-empati. Pada sisi lain sebagian siswa juga sudah memiliki "simpati". Dalam hal ini bisa dilihat berdasar gejala yang berbentuk antara lain: 1) anjuran siswa kesiswa yang lain agar mematuhi aturan/program yang sudah ditentukan sekolah, 2) laporan yang dilakukan siswa kepada gurunya jika ada siswa lain yang tidak melakukan program pembiasaan dan atau keteladanan yang sudah diinformasikan pihak sekolah, dan 3) adanya tindakan real siswa untuk melakukan perbuatan/pekerjaan yang seharusnya bukan menjadi kewajiban siswa (dalam hal ini contohnya siswa dengan kesadaran sendiri menyapu lantai sekolah yang kotor yang sesungguhnya bukan menjadi kewajibannya tetapi bagian dari pekerjaan petugas kebersihan).

Simpat-empati adalah dua hal yang relatif sama namun memiliki perbedaan. Simpati sendiri adalah bentuk kepedulian seseorang terhadap orang lain tetapi tidak terlalu mendalam sebagaimana empati, karena empati merupakan satu bentuk kepedulian sebagai sebuah respon yang sifatnya spontan karena kesadaran yang sudah melekat pada diri individu atas apa yang diterima maupun dilakukan orang lain (<http://id.shvoong.com>: hal1). Dalam kasus proses pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya menunjukkan bahwa simpati-empati muncul dalam batas yang relatif tidak terlalu "kentara" bedanya antara simpati dan empati. Simpati yang ditampilkan adalah "sekedar" lisan untuk menganjurkan maupun melaporkan teman siswa kepada guru atas pelanggaran pembiasaan yang dilakukan siswa. Tetapi siswa yang melakukan aktivitas/perbuatan menyapu yang itu jelas merupakan pekerjaan orang lain (tukang sapu), menunjukkan

bahwa siswa perempuan tadi memiliki tingkat pemahaman atas rasa yang mungkin ditanggung petugas kebersihan, sehingga secara sadar siswa melakukan tindakan untuk menyapu sendiri lantai yang kotor akibat tindakan temannya.

Keenam. Sumber motivasi. Semua gejala perilaku siswa yang muncul di proses awal pembelajaran PAI ini memiliki sumber motivasi dari sekolah dan keluarga. Dari sekolah berupa tawaran program pembelajaran dan dari keluarga berupa dukungan dari orang tua.

Berdasarkan hasil analisis atas tahapan sosialisasi nilai agama Islam di awal pembelajaran PAI di SDIP Kroya, menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang terjadi di SDIP dilandasi oleh pandangan konstruktivisme sosial. Artinya bahwa pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam hal ini adalah lingkungan sosial sekolah. Dengan demikian maka pengetahuan awal yang diterima peserta didik SDIP Masyitoh sesungguhnya hasil pembinaan manusia, yaitu guru (Hanafiah dan Suhana, 2010: 64). Pengetahuan awal inilah yang kemudian akan mendasari siswa di dalam memenuhi tuntutan pembiasaan dan keteladanan sebagai bentuk pembelajaran PAI di luar kelas.

Internalisasi. Dalam melaksanakan proses internalisasi nilai Islam dalam pembelajaran PAI, SDIP menggunakan pendekatan penanaman nilai moral dan metode yang digunakan adalah metode pembiasaan dan keteladanan. Adapun capaian dari proses internalisasi nilai-nilai Islam meliputi: (1) *Caring* (kepedulian): anak peduli terhadap temannya yang melakukan pelanggaran dengan cara melaporkan ke guru. (2) *Acting* (perbuatan): penanaman pohon di pot, kesadaran sendiri untuk menghukum diri jika melanggar aturan (berdiri di depan kelas), selalu salim kapanpun ketika bertemu dengan guru, tidak hanya saat baru datang ke sekolah atau akan pulang ke rumah, latihan kepemimpinan sudah berjalan baik, perkelahian antar anak jarang sekali, jikalau ada anak yang melakukan pelanggaran paling 1% seperti masih ditemukannya coretan anak di meja depan kelas (meja pengambilan snack), ada kesadaran siswa untuk melaksanakan pembiasaan hidup tertib (tertib masuk kelas), anak memiliki kesadaran untuk mengusahakan capaian hafalan dengan rajin menghafal dan menyetorkan hafalan, ada kesadaran untuk menajalakan pembiasaan membaca surat pendek yang sudah digariskan sekolah.

Internalisasi nilai PAI yang sudah dilakukan di SDIP menunjukkan bahwa: *Pertama*. Internalisasi dalam pembelajaran PAI merupakan tahapan yang sangat strategik. Bisa dikatakan, ruh dari pembelajaran PAI adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam itu sendiri. Jika melihat pada usaha yang dilakukan pihak SDIP Masyitoh Kroya dalam mengadakan program pembiasaan dan keteladanan yang hakikatnya adalah proses pembelajaran PAI untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama mereka, menunjukkan bahwa SDIP menggunakan pendekatan penanaman nilai moral. Dengan kata lain internalisasi yang dilakukan SDIP sesungguhnya adalah pendekatan penanaman nilai-nilai moral (: moral religius Islam).

SDIP Masyitoh Kroya juga secara tepat menggunakan metode pembiasaan dan keteladanan dalam proses internalisasi nilai Islam itu sendiri, karena idak mungkin seorang pendidik akan dapat membiasakan perilaku baik kepada anak tanpa memberikan teladan bagaimana cara melaksanakannya.

Kontinuitas. Kontinuitas dalam pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya bisa dilihat dari beberapa perspektif, yaitu: *Pertama. Perspektif waktu*. Dilihat dari kontinuitas (waktu) ada dua waktu yaitu waktu *setiap hari* dan waktu *periodik*. Pembiasaan yang dilakukan “*setiap hari*” berupa: (a). “*setiap jam I*” di setiap kelas untuk pembiasaan tertentu seperti baca alfatihah, surat-surat pendek, hafalan hadits, asmaul husna. (b). “*sepanjang hari setiap hari*” seperti menjalin kearaban guru-siswa, mengingatkan membimbing siswa untuk menepati aturan (:makan jangan sambil jalan), dan (c). “*setiap hari sebelum masuk kelas*” untuk sholat dhuha. Adapun waktu kedua yaitu waktu “*periodik*” tergantung dari kebutuhan akan kemunculan pembiasaan tersebut seperti setiap pembelajaran yang menghajatkan adanya tanaman dan setelah selesai ditanam di pot depan kelas sebagai bentuk program keteladanan melalui budaya lingkungan hijau. *Kedua. Perspektif Tempat*. Kontinuitas pembelajaran PAI dilakukan di sekolah dan rumah. Di sekolah setiap hari sedangkan di rumah masih terbatas pada pesan kepada orang tua di awal tahun ataupun pesan guru kelas setiap hari sabtu menjelang liburan. *Ketiga. Perspektif Metode dan Media*. dilihat dari sisi metode yang digunakan untuk melakukan jaminan kontinuitas pembelajaran PAI, maka SDIP Masyitoh Kroya menggunakan metode: mengingatkan/”nylentiki, komunikasi via

sms, vace to vace, berpesan, dan menggunakan media Buku Penghubung dan Buku Raport Merah.

Mencermati temuan praktik internalisasi nilai agama dalam pembelajaran PAI di SDIP menunjukkan bahwa: *Pertama. Waktu.* Berdasarkan temuan data diketahui bahwa ada dua waktu yang digunakan oleh SDIP Masyitoh Kroya untuk melakukan pembelajaran PAI, yaitu setiap jam pertama pada setiap hari setiap semester dan setiap ada jam pembelajaran PAI maupun Agama Lokal di setiap minggu dan setiap semester sesuai silabus maupun setiap tahun sesuai program yang ditetapkan. Ini berarti SDIP menggunakan waktu informal dan formal dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Waktu informal adalah waktu yang terus menerus dalam hal ini adalah setiap jam, setiap hari untuk melakukan pembelajaran PAI utamanya pembelajaran PAI lewat program pembiasaan dan keteladanan. Sedangkan waktu formal adalah waktu periodik (Hasibuan, 2007). Dalam hal ini SDIP melakukan pembelajaran PAI yang ada di dalam kelas hanya setiap ada jam pelajaran PAI dan Agama lokal saja, di mana jatahnya perminggu perkelas untuk PAI adal 3 jam pelajaran dan Agama Lokal 10 jam pelajaran. Demikian juga waktu periodik untuk pembelajaran PAI di luar kelas seperti untuk kegiatan pembiasaan terprogram berupa kegiatan pesantren ramadlon, akhirussanah, wisata religi dan sebagainya. Waktu periodik jenis kedua ini hanya dilakukan setiap tahun sekali.

Penggunaan waktu informal dan formal memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika pembelajaran PAI yang syarat dengan nilai-nilai Islam yang hendak ditanamkan kepada peserta didik lebih menghajatkan waktu informal, yaitu waktu yang terus menerus untuk terjadinya proses pembelajaran PAI. Hal ini disebabkan keberhasilan dari pembelajaran PAI terukur tidak hanya dalam pencapaian ranah kognitif ataupun psikomotorik saja, tetapi justru yang terpenting adalah aspek afektifnya. Artinya keberhasilan pembelajaran PAI tidak boleh hanya diukur dari dimilikinya pengetahuan agama Islam dan atau dimilikinya kemampuan

Pemilihan SDIP atas penggunaan waktu informal dalam pembelajaran PAI utamanya pembelajaran di luar berupa pembiasaan dan keteladanan menurut penulis sangat tepat. Artinya untuk terbiasa dan untuk selalu bisa meneladani dan memberi teladan tidak bisa kalau dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja (periodik) tetapi harus dilakukan terus-menerus dan

setiap hari. Semakin terus menerus pembiasaan dan keteladanan dilakukan maka akan semakin berhasil pembelajaran tersebut, sehingga pada akhirnya anak sudah terbiasa untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dan lama-kelamaan menjadi karakter khas yang tidak bisa dirubah walaupun siswa sudah lulus sekalipun.

Dari dua penggunaan waktu dalam pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh menunjukkan bahwa peserta didik diberi kesempatan untuk selalu belajar (kontinyu). Hal ini mirip dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Di dalam prosesnya, konstruktivisme memiliki berbagai macam ciri salah satunya adalah konstruksi arti yang merupakan *proses yang terus menerus*, setiap berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, peserta didik akan selalu mengadakan konstruksi.

Kemudian *kedua*, dilihat dari *aspek tempat*, kontinyuitas pembelajaran PAI di SDIP dilakukan di sekolah dan rumah. Di sekolah dilakukan setiap hari sedangkan di rumah baru terbatas pada usaha pemberian “pesan” guru terhadap orang tua di awal tahun ataupun pesan guru kelas setiap hari sabtu menjelang liburan kepada peserta didik agar di rumah juga tetap menjalankan pembiasaan yang sudah dijalankan di sekolah. Adapun metode yang digunakan adalah: mengingatkan/ ”nylentiki, komunikasi via sms, *vace to vace* dan berpesan dan media yang digunakan Buku Penghubung dan Buku Raport Merah. Hal ini setara juga dengan teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang kontinyu. Artinya anak-anak tidak hanya belajar di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah.

Keempat, Institusionalisasi. Berdasarkan temuan penelitian, maka bisa diketahui bahwa dalam upaya memaksimalkan terbentuknya generasi sholih cendekia sebagaimana yang menjadi visi SDIP Masyitoh Kroya, maka sekolah menentukan hal-hal sebagai berikut: a) Ada aturan yang berlaku untuk siswa dan guru seperti: (1) tugas dan kewajiban yang meliputi sebelum berangkat sekolah, masuk sekolah, waktu belajar di kelas, waktu istirahat, waktu sholat, akhir pelajaran, (2) pakaian seragam, (3) upacara bendera, (4) larangan bagi para siswa, dan (5) akibat bagi siswa yang melanggar tata tertib. b) Membangun budaya islami sebagai ciri khusus SDIP dengan melalui budaya pembiasaan dan keteladanan. c) Menciptakan simbol-

simbol budaya islami seperti baju identitas SDIP (siswa berpeci putih dan siswi berkerudung putih), ucapan baik, bahasa jawa, bersalaman, menyebut mas/mba/adik, hafalan hadits, zakat dan amal.

Jika melihat pada karakter-karakter yang muncul pada peserta didik SDIP Masyitoh Kroya, menunjukkan bahwa secara kualitas *hasil* pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya, secara umum relatif baik, dan cukup mampu terbentuk karakter Islami, seperti siswa yang selalu menjalankan sholat dhuha, segera mendirikan sholat dhuhur berjama'ah jika waktunya datang, tidak berkelahi, selalu salim/bersalaman jika bertemu guru, punya hafalan do'a-do'a dan surat-surat tertentu dalam Al Qur'an. Namun jika dicermati lebih jauh, menurut penulis karakter ini masih baru terbatas muncul selama mereka menjadi siswa SDIP Plus, atau lebih tepatnya selama mereka berada di lingkungan sekolah. Sedangkan ketika mereka sudah berada di luar lingkungan sekolah, baik itu di rumah, di masyarakat saat mereka belum lulus maupun sudah lulus belum terekam oleh pihak sekolah. Artinya hasil pembelajaran PAI berupa kebiasaan untuk menjalankan hal-hal yang sudah menjadi program pembiasaan dan keteladanan belum tentu akan tetap sama adanya, jika siswa sudah berada di luar sekolah. Sebagai contoh, anak di larang jajan. Selama anak di sekolah memang anak dapat dibuat sedemikian rupa oleh pihak sekolah untuk tidak jajan (;karena snack ataupun makan sudah disediakan pihak sekolah dengan kontribusi uang jajan siswa). Namun jika selesai jam pembelajaran, lalu siswa pulang, baru di pintu gerbang sekolah saja anak sudah melakukan tindakan yang sebaliknya dari pembiasaan yang sudah dilakukan selama jam sekolah. Di depan sekolah dengan sepengetahuan orang tua atau wali bahkan pihak sekolah, anak tetap jajan, padahal mereka tahu kalau jajan di larang. Di sinilah munculnya kemungkinan hasil pembelajaran PAI di SDIP baru sekedar menjadi habit belum menjadi karakter.

Perilaku-perilaku maupun kebiasaan-kebiasaan agamis yang muncul di kalangan siswa SDIP Masyitoh Kroya akan disebut karakter jika pada diri mereka terbentuk sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan, di manapun siswa berada, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Artinya bisa saja karakter itu sudah terbentuk tapi belum kuat, sehingga ketika di lingkungan sekolah seolah-olah telah menjadi karakter tetapi

begitu keluar dari lingkungan sekolah karakter tersebut hilang. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim adalah sebatas habit atau kebiasaan saja. Sebuah kebiasaan akan tumbuh subur jika lingkungannya mendukung dan akan relatif mudah hilang jika lingkungannya tidak mendukung. Berbeda dengan karakter, di manapun ia berada, apakah lingkungannya mendukung atau tidak, karakter itu tetap melekat kuat pada diri orang tersebut.

Apa yang terjadi di SDIP Masyitoh Kroya, belum bisa secara tegas dikatakan apakah perilaku-perilaku agamis yang dimunculkan siswa di lingkungan sekolah itu sebuah karakter Islami yang menjadi ciri khas siswa SDIP atautkah hanya sekedar habit saja yang muncul subur di sekolah karena sekolah memediasi tumbuh suburnya perilaku tersebut. Tetapi begitu keluar dari lingkungan sekolah bisa saja menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Inilah yang belum mampu dikontrol oleh pihak sekolah.

Fenomena ini muncul disebabkan oleh: a) *Target Groups* Kebijakan Pembelajaran PAI yang belum komprehensif. Hasil pembelajaran PAI belum optimal sebagaimana idealnya, hal ini menunjukkan kalau kebijakan tentang pembelajaran PAI yang diambil SDIP Masyitoh Kroya bisa saja kurang memenuhi kepentingan sekelompok pihak (orang) yang menjadi *target groups*-nya walaupun kebijakan ini sudah dikeluarkan relatif formal. Dalam hal ini Merilee S Grindle (Subarsono, 2008) mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Jika melihat kasus di SDIP Masyitoh Kroya, *target group* atas pembelajaran PAI adalah peserta didik. Guru dan karyawan tidak masuk di dalamnya, sehingga tidak ada kewajiban menjalankan program pembiasaan dan keteladanan sebagaimana siswa. Padahal ciri khusus pembelajaran PAI adalah pembelajaran yang syarat dengan nilai-nilai yang tidak hanya perlu diketahui dan dipahami, tetapi harus sampai juga ke pengamalan secara terus-menerus. Pengamalan akan mudah terbentuk dan sekaligus menjadi karakter yang tidak mudah hilang, jika pembelajaran PAI memediasi adanya “model” dari pihak-pihak yang semestinya memberikan teladan kepada peserta didik. Dalam hal ini yang utama adalah guru, baru kemudian karyawan atau warga sekolah lain.

“Model” dari guru dan karyawan akan menjadi *reinforcement* bagi siswa di dalam melakukan proses “imitasi” perilaku-perilaku yang khas Islami. Proses inilah yang kemudian akan menampilkan sugesti, identifikasi, simpati dan empati dari peserta didik dalam menjalankan proses pembiasaan dan keteladanan. Pada akhirnya peserta didik akan semakin kuat memiliki karakter/pribadi muslim sebagaimana yang menjadi tujuan PAI dan visi SDIP Masyitoh itu sendiri. b) Evaluasi. Evaluasi sebagai faktor strategik untuk memenej keberhasilan sebuah kegiatan, kurang begitu diperhatikan pihak SDIP Masyitoh Kroya. Dalam hal ini mereka belum memiliki konsep standar hingga instrumen yang akan digunakan untuk melakukan penilaian atas berhasil tidaknya pembelajaran PAI khususnya yang di luar kelas (pembiasaan dan keteladanan). Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena adanya anggapan bahwa program pembiasaan dan keteladanan hanyalah program pengembangan saja, yang tidak secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran PAI di kelas formal. Walaupun di sisi lain, ada sebagian pihak SDIP yang menyadari betul kontribusi pembiasaan, keteladanan dan program plus agama lain terhadap keberhasilan pembelajaran PAI formal. Kalau pun ada evaluasi, itu hanya dilakukan terbatas lewat metode “nylentiki”, “ mengingatkan/pesan” yang itu juga tidak setiap saat dilakukan, hanya dilakukan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran ataupun jika siswa akan berada di luar jangkauan sekolah seperti mau libur/hari minggu atau liburan panjang. Apalagi jika mengingat proses pembelajaran sesungguhnya proses yang terus menerus. Semestinya evaluasi juga dilakukan secara terus menerus, dari tahap awal hingga tahap akhir, bahkan dalam setiap tahapannya dievaluasi (*recycling evaluation*), sehingga akan diketahui di tahapan mana dalam proses pembelajaran itu mengalami kendala. Dengan teridentifikasinya kendala pada tahapan yang mana maka setelah dianalisis pihak sekolah bisa menawarkan solusi. Padahal berdasarkan rapat tahunan juga sudah muncul masukan dari wali siswa agar ada laporan pembiasaan yang dilakukan siswa oleh sekolah kepada wali siswa. c) Konteks Pembelajaran PAI. Karakter Islami yang kuat akan terbentuk sebagai hasil dari proses pembelajaran PAI yang sudah dijalankan, jika lingkungan di mana peserta didik berada mampu memberikan pengawalan atas proses terbentuknya karakter tersebut. Artinya selama lingkungan mendukung terbentuknya karakter Islami dari peserta didik, maka ada jaminan karakter

akan terbentuk dengan cepat. Dalam konteks ini, pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya akan cepat menghasilkan karakter Islami yang menjadi tujuan utama dari proses pembelajaran PAI bahkan visi lembaga, jika di dalam prosesnya sekolah menerapkan pendidikan terpadu. Artinya sekolah benar-benar bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran PAI dengan cara mengintegrasikan pendidikan di sekolah (*scholling*), keluarga (*homeschooling*) dan masyarakat (*community*).

Ini berarti SDIP Masyitoh kurang mengoptimalkan fungsi dari pendidikan terpadu (terintegrasi). Jika pun selama ini sekolah melibatkan pihak keluarga untuk memantau berlangsungnya pembiasaan-pembiasaan agama yang tetap harus dijalankan anak di rumah, ini pun baru sebatas menggunakan media buku penghubung dan atau raport kepribadian. Sedangkan pihak sekolah juga menyadari betul kalau tidak semua wali siswa mengoptimalkan penggunaan media tersebut. Akibatnya sekolah akan sulit mengukur apakah pembiasaan tersebut tetap dilaksanakan di rumah sebagai karakter khas siswa SDIP. Belum lagi dalam konteks masyarakat. Masyarakat kurang memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pembiasaan anak di lingkungan masyarakatnya, demikian juga sebaliknya sekolah belum mampu mengintervensi kepada masyarakat atas pentingnya pemberlakuan pembiasaan-pembiasaan agamis untuk anak-anak mereka. Dalam hal ini seyogyanya pihak sekolah secara bersama-sama membuat satu strategi pendidikan terpadu antara sekolah, rumah dan masyarakat sekaligus menyusun instrumen pengontrolnya. Dengan demikian akan ada jaminan, pembiasaan berprilaku agamis di lingkungan sekolah akan tetap juga dilaksanakan walaupun siswa sedang berada di rumah atau di masyarakatnya. Jika hal ini dilakukan secara benar maka dalam waktu yang sudah bisa direksikan, prilaku yang dibiasakan tersebut akan berubah menjadi karakter.

d) Institusionalisasi. Institusionalisasi atas budaya Islami dalam rangka pembentukan karakter khas warga SDIP Masyitoh sesungguhnya sudah dimulai, tetapi kurang optimal. Hal ini bisa dilihat sebagaimana *target group* dari kebijakan pembiasaan dan keteladanan sebagai bentuk real pembelajaran PAI di luar kelas (berupa pengembangan) lebih ke siswa. padahal untuk membentuk karakter khas (;karakter Islami) sangat penting didukung oleh budaya lingkungan yang Islami juga. Karena budaya Islami sebagai budaya pilihan SDIP sebagaimana visi misinya semestinya didukung

dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya peserta didik saja.

Dalam hal ini jika SDIP Masyitoh Kroya benar-benar menghendaki terbentuknya generasi sholih cendekia (generasi berkarakter Islam), maka SDIP perlu menciptakan budaya Islami yang disepakati dan dilaksanakan bersama penuh komitmen oleh seluruh elemen sekolah. Untuk menciptakan budaya Islami baru, maka SDIP bisa menata kembali dengan melalui tahapan sebagaimana yang diajukan Muhaimin (Muhaimin, 2009), berupa: 1) membuat kesepakatan atas Nilai-nilai yang akan dikembangkan di sekolah (Nilai-nilai Islam untuk membangun generasi sholih cendekia), 2) mempraktikkan nilai dalam keseharian semua warga sekolah bukan hanya peserta didik dan 3) pembuatan simbol-simbol agama (Islam), serta pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang disepakati.

c. **Model Pembelajaran SICI dalam Pembelajaran PAI**

Berdasarkan temuan dan proposisi temuan penelitian yang sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disusun alternatif model konseptual yaitu

Pertama. Pra Pembelajaran berupa Penentuan Kebijakan Kurikulum dan Pembelajaran. Langkah pertama pembelajaran model ini adalah menentukan kurikulum dan pembelajaran yang akan dilakukan. Jika kurikulum itu sudah ada, maka secara otomatis penentuan langsung dilakukan dalam konteks pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan luar kelas biar kontekstual dan memperkaya pengalaman belajar siswa.

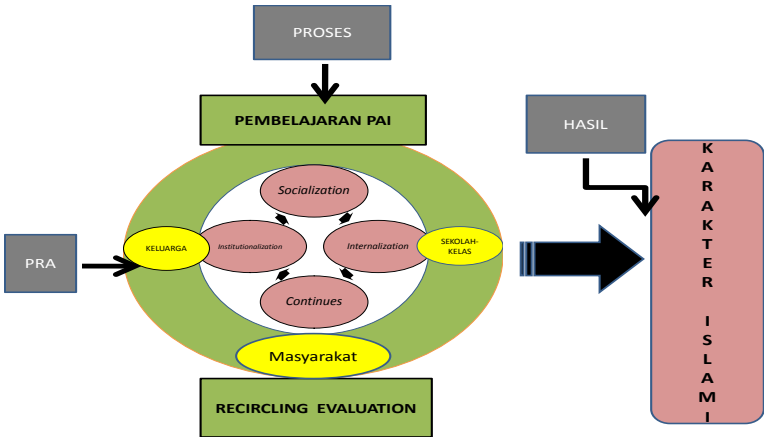
Kedua. Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dipentingkan adalah tahapan operasional berupa ***sosialisasi, internalisasi, kontinuitas dan institusionalisasi***. Di mana dalam proses sosialisasi sendiri harus bisa memunculkan tahapan sosialisasi, sugesti, identifikasi, simpati-empati, dan adanya sumber motivasi pada peserta didik yang melaksanakan pembelajaran. Setelah sosialisasi dilakukan dilanjutkan dengan proses internalisasi dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai moral dan metode pembiasaan dan keteladanan. Kemudian proses kontinuitas. Maksudnya proses pembelajaran dilakukan

terus-menerus, baik dari sisi waktu maupun tempat dilakukannya kegiatan pembelajaran, yaitu sepanjang waktu ketika peserta didik berada di sekolah, di keluarga dan di masyarakatnya. Terakhir ditutup dengan kegiatan Insritusionalisasi. Institusionalisasi yang baik tidak sekedar ditengarai adanya aturan maupun simbol-simbol Islami yang muncul tetapi harus diperkuat dengan reward terhadap warga sekolah yang membumikan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama, serta reward tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan penerima reward. Sehingga kemudian akan semakin menguatkan karakter yang terbangun.

Selain hal tersebut di atas, pada proses pelaksanaan pembelajaran ini, mutlak menghajatkan adanya evaluasi pada setiap tahapan proses (S,I,C,I) maupun pada setiap tahapan dalam sistem besarnya. Sekaligus tahapan ini mutlak memerlukan adanya kerjasama antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat agar perolehan hasil pembelajaran berupa karakter menjadi maksimal.

Ketiga. Akhir pembelajaran ditengarai dengan terbentuknya karakter Islami sebagai perolehan hasil Pembelajaran PAI melalui pola dan tahapan sistematis dari SICI yang optimal dan dikawal oleh *recircling evaluation*.

Dominannya aktivitas sosialisasi (*socialization*), internalisasi (*internalization*), kontinyu (*continues*) dan institusionalisasi (*institutionalization*) dalam proses pembelajaran PAI, maka model ini dinamakan model pembelajaran SICI. (Ilustrasi model Pembelajaran SICI bisa dilihat pada bagan berikut.)



Bagan 56. Model Pembelajaran SICI
(*Sosialization, Internalization, Continues dan Institutionalization*)

3. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis atas temuan dan preposisi temuan penelitian, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kebijakan tentang Pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya adalah pembelajaran di dalam kelas dan luar kelas, 2) Pelaksanaan Pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya meliputi tahapan-tahapan: (a) Pelaksanaan sosialisasi nilai agama dalam pembelajaran Agama Islam di SDIP Masyitoh Kroya sudah dilakukan dengan tahapan sosialisasi, imitasi (minim), sugesti, identifikasi, simpati-empati dan adanya sumber motivasi. Kekhasan dari proses sosialisasi di SDIP Masyitoh adalah minimnya “model” dari guru ataupun tenaga kependidikan yang ada sehingga peluang siswa untuk “mengimitasi” kecil. Apalagi Proses ini lebih ditekankan kepada siswa saja, (b) Pelaksanaan internalisasi nilai agama dalam pembelajaran Agama Islam di SDIP Masyitoh Kroya dilakukan dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai moral (religius Islam) serta menggunakan metode pembiasaan dan keteladanan. Namun pada proses internalisasi ini keteladanan dari guru/karyawan masih kurang, akibat peran guru dalam proses ini lebih banyak sebagai “penjaga/polisi/pengawas” siswa serta proses ini lebih ditekankan untuk kepentingan siswa, (c) Kontinuitas nilai agama dalam pembelajaran Agama Islam di SDIP Masyitoh Kroya dilakukan dalam 3 perspektif, yaitu perspektif waktu, tempat dan metode/media. Kontinuitas waktu dilakukan secara periodik (formal) dan terus menerus (informal). Kemudian kontinuitas dalam perspektif tempat berlangsungnya, berada di sekolah (:utama) dan di rumah (: terbatas). Sedangkan perspektif metode/media, kontinuitas dilakukan dengan cara mengingatkan/”nylentiki, komunikasi via sms, *vace to vace*, berpesan, dan menggunakan media Buku Penghubung dan Buku Raport Merah dan (d) Institusionalisasi nilai agama dalam pembelajaran Agama Islam di SDIP Masyitoh Kroya diwujudkan dalam bentuk: *pertama*, dikeluarkannya beberapa aturan yang mengikat siswa dan guru, seperti (1) tugas dan kewajiban yang meliputi sebelum berangkat sekolah, masuk sekolah, waktu belajar di kelas, waktu istirahat, waktu sholat, akhir pelajaran, (2) pakaian seragam, (3) upacara bendera, (4) larangan bagi para siswa, dan (5) akibat bagi siswa yang melanggar tata tertib dan (6) peraturan bagi guru, *kedua*, membangun budaya islami sebagai ciri khusus SDIP melalui budaya pembiasaan dan keteladanan bagi siswa dan *ketiga*, menciptakan simbol-simbol budaya Islami seperti baju identitas SDIP (siswa berpeci putih dan siswi berkerudung putih), ucapan baik, bahasa jawa, bersalaman, menyebut mas/mba/adik, hafalan hadits,

zakat dan amal. 3) Hasil pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya secara relatif mampu menjadi pembeda dengan perilaku siswa sekolah lain, namun secara kualitas relatif masih baru menjadi *habit* yang dilakukan di sekolah dan masih perlu ditingkatkan agar menjadi *karakter* Islami yang kuat dan tidak mudah “goyah” kapanpun dan di manapun siswa berada (:bukan hanya di sekolah saja). 4) Model Pembelajaran SICI merupakan hasil formulasi pengembangan model konseptual atas temuan model pembelajaran PAI di SDIP Masyitoh Kroya.

Daftar Referensi

- Abu Ahmadi.(2007). *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, Mohammad.(2009). *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: IMTIHa
- Alma, Bukhari.(2003). *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Al Syaibany, Oemar Mohmad Al Toumy. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Fitri, Agus Zaenul. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dan Etika Di Sekolah*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Gaffar, M. Fakry.(2009). *Kompetensi dan Strategi Dalam Membangun Perguruan Tinggi Pada Era Globalisasi*. Perkuliahan Sekolah Pascasarjana Program S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 19 Februari 2009
- Hanafiah, Nanang dan Suhana, Cucu. (2010). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Reflika Aditama
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- Ihsan, Hamdani dan Ihsan, Fuad.A.(2007). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Majid, Abdul dan Andayani, Dian.(2011). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam. Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Munir, Abdullah.(2010). *Pendidikan Karakter. Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah*. Yogyakarta: Pedagogia
- Nasution.(2009). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution.(1995). *Asas Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prayitno (2009). *Dasar, Teori Dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Gramedia
- Pannen, Paulina, Mustafa, Dina dan Sekarwinahyu, Mestika. (2001). *Konstruktivisme Dalam Pembelajaran: PAU-PPAI Universitas Terbuka*.
- Rahayu, Agus.(2008). "Membangun Pelayanan Strategik Perguruan Tinggi Melalui Penjaminan Mutu. dalam Manajemen Corporate Dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima. Bandung: Alfabeta
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, Nana Syaodikh, Jami'at, Ayi Novi dan Ahman. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Bandung: Refika Aditama
- Syahidin.(2009). *Menelusuri Metode Pendidikan Dalam Al Qur'an*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul Azis. (2011). *Gagasan Dan Pemikiran Pembangunan Pendidikan Di Indonesia. Penghargaan dan Penghormatan 68 tahun prof. Dr/H. Abdul azis Wahab, M.A. (Ed. Bandung: Laboratorium PKn PIPS UPI Bandung*
- Yeoh, Michael. (1995). *Vision & Leadership. Values and Strategies Towards Vision 2020*. Malaysia: Academe Art & Printing Services Sdn.Bhd



E. Pembelajaran Sekolah Era Daring: Bagaimana Cara Bijak Menyikapinya?

1. Pendahuluan

Hiruk pikuk dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai implikasinya yang merambah hampir semua sektor kehidupan manusia, kini

dunia Kembali digemparkan dengan adanya Pandemi Covid-19. Disebut pandemic, bukan endemi karena wabah ini telah mewabah ke seluruh penjuru dunia. Maka hiruk pikuknya juga dialami seluruh warga dunia. Tidak terkecuali adalah dunia Pendidikan yang harus menyikapinya.

Sebenarnya Revolusi Industri 4.0 sebagai bagian dari Abad 21 di dalamnya meminta 4 competencies yang harus dimiliki oleh warga dunia dan harus dipersiapkan oleh dunia Pendidikan, yaitu *Learning Competencies* (kompetensi pembelajaran), *literacy competencies* (kompetensi literasi), *life competencies* (kompetensi hidup) and *moral competencies* (kompetensi moral) (Wahab, 9 Februari 2019).

Dua kompetensi di awal sesuai konteks pembicaraan kali ini sudah sesuai dengan tuntutan real dunia pendidikan dan khususnya pembelajaran. Pertama, Kompetensi pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan peserta didik. Jenis kompetensi ini jika dimiliki oleh guru menurut Chen, akan mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif (Chang Zhu, 2013) dan jika dimiliki oleh peserta didik maka peserta didik akan tampil sebagai *problem solver* di zamannya (BUSD, 2018). Adapun keempat kompetensi pembelajaran yang dimaksud adalah *critical thinking, creativity, communication dan collaboration* yang sering diakronimkan dengan 4C yang kemudian berkembang menjadi 6 C yaitu *6 C'S FOR FUTURE EDUCATION* dengan menambahkan 2 kompetensi yaitu *Connectivity dan Culture*.

Kemudian kompetensi kedua, yaitu kompetensi literasi berupa, *information/data literacy, technology literacy (media-IT) dan human literacy*. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital secara positif, sedangkan literasi teknologi merupakan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti; Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berfikir seperti manusia dan meniru tindakannya seperti pemerolehan informasi dan aturan menggunakannya (pembelajaran), menggunakan aturan untuk membuat simpulan (penalaran) dan koreksi diri; *coding, Engineering Principles* (Farras, 2019). Adapun yang dimaksud dengan *human literacy* adalah kemampuan yang harus dimiliki agar manusia berfungsi dengan baik di lingkungan manusia; humanities, komunikasi dan desain. Jika literasi ini dikuasai maka individu tersebut akan memiliki ketrampilan *leadership dan team work, cultural agility* (kelincahan dan kematangan budaya)

yang menyebabkan individu mampu bekerja dengan lingkungan yang berbeda sekalipun serta dimilikinya entrepreneurship (termasuk juga *social entrepreneurship*).

Oleh karena itu Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) (Mendikbud, 2020) dan (Mendikbudw, 2020) secara tidak disengaja sesungguhnya justru sedang mengimplemnetasikan kedua kompetensi tersebut secara serempak dan massif. Jika tidak ada pandemi Covid -19 maka penerapannya bisa bertahap baik dari sisi waktu maupun prosentasinya sehingga tetap ada pembelajaran dengan modus face to face (luring), online (daring) maupun blended.

Pembelajaran daring selama masa wabah ini selain dilaksanakan dengan mengerahkan segala daya dan upaya dari berbagai pihak pada kenyataannya masih banyak kendala, seperti: 1) dari sisi siswa: siswa mengalami kendala teknis akibat fasilitas yang belum tersedia (: aplikasi, sinyal, kuota bahkan HP android atau laptop /computer yang bagi sebagian siswa di desa mungkin tidak memiliki), anak tambah pusing karena kebanyakan tugas yang diberikan, proses interaksi pembejaran dengan guru relatif minim, dan umpan balik penyelesaian tugas masih minim, b) orang tua: orang tua yang melaksanakan *work from home* (wfh) mengalami kendala melakukan pendampingan belajar bagi anaknya, gaptek, tidak memiliki kemampuan financial untuk menyediakan fasilitas bagi anaknya, c) Guru: tidak semua guru melek teknologi terutama dari kelompok senior, guru masih mengalami kesulitan dalam menterjemahkan Surat Edaran Mendikbud bahwa proses pembelajaran tidak lagi terpaku pada target kurikulum untuk kenaikan kelas, tetapi lebih kepada untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa (Mendikbud, 2020), paket data, d) letak geografis: kendala sinyal seperti daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal, seperti; kabupaten Asmat, papua (Kelas, 2020).

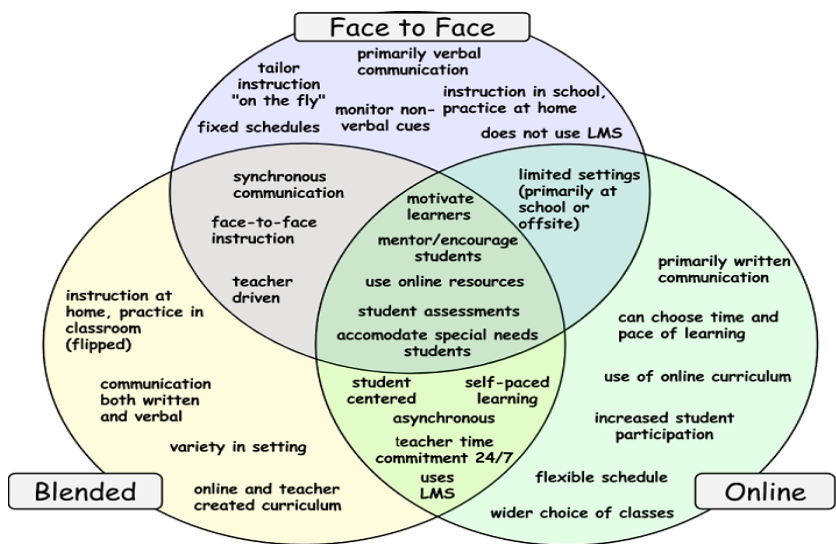
Berangkat dari persoalan tersebut maka bagaimana sebenarnya mensikapi situasi pembelajaran daring dalm situais seperti ini? Pertanyaan ini akan dijawab setelah mengetahui tentang apa itu pembelajaran dan berbagai modusnya.

2. Pembelajaran dan Modusnya

Di Indonesia pembelajaran bisa dilaksanakan dalam banyak skema. Setidaknya bisa dilihat dari: 1) skema interaksi, 2) model disain dan 3) skema penyelenggaraan.

- a. Skema interaksi, ada dua, yaitu: a) sinkronus (interaksi langsung) dan b) a-sinkronus (interaksi tidak langsung)
- b. Tipe kelas, ada 3, yaitu: a) tipe kelas, b) kolaborasi dan c) kompetensi
- c. Skema penyelenggaraan, juga ada 3, yaitu: a) daring penuh (fully online), b) blended/hybrid/mix, c) Moocs (fully online).

Dalam hala modulus pembelajaran, interaksinya bisa didesaian dengan beragam cara sesuai karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi yang ada. Ada tiga modulus pembelajaran yaitu: 1) face to face atau offline atau luring (luar jaringan), 2) online (daring=dalam jaringan internet) dan 3) *blended learning*, campuran modulus 1 dan 2. Sesuai karakteristik era 4.0, maka modulus pembelajaran yang direkomendasikan adalah modulus online dan blended learning, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Perbandingan atas ketiga modulus pembelajara bisa disimak dalam bagan berikut.



Bagan 57. Perbandingan Modus Pembelajaran

3. Cara Bijak Mensikapi Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19

Menghadapi situasi yang sedemikian memperhatikan dan tidak bisa diprediksikan kapan selesainya maka membutuhkan sikap bijak sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Sikap bijak akan melahirkan cara bijak/solutif. Sikap bijak atau **sikap bijaksana** adalah **sikap** tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarkan keadilan, ketawadluan dan kebeningan

hati (Bijaksana, 2018). Sikap sendiri merupakan ketrampilan mental dasar yang harus dimiliki oleh manusia, apalagi di era revolusi Industri 4.0 membutuhkan ketrampilan mental tingkat tinggi.

Ketrampilan mental tingkat tinggi (*Higher order mental skills*) adalah ketrampilan mental tingkat tinggi dari 9 tingkatan ketrampilan mental (Jack J. Lesyk, 2015)



Bagan.59. Mental Competence Skill

Sembilan tingkat ketrampilan mental secara umum dibagi dalam tiga level ketrampilan, yaitu: a) level I sebagai ketrampilan mental dasar (*basic skills*) terdiri dari 4 tingkat ketrampilan mental, yaitu: sikap/*attitude* (1), motivasi/*motivation* (2), tujuan dan komitmen/*goals and commitment* (3) dan ketrampilan manusia. *People skills* (4), b) level II sebagai kerampilan persiapan (*preparation skills*) terdiri dari 2 tingkat ketrampilan mental, yaitu bicara mandiri/*selef-talk* (5) dan citra mental/*mental imagery* (6), dan c) level III sebagai level ketrampilan performa/ ketrampilan kinerja (*performance skills*) yang terdiri dari 3 ketrampilan mental, yaitu: mengelola kecemasan/*managing anxiety* (7), mengelola emosi/*managing emotions* (8) dan konsentrasi/*concentration* (9).

Dalam hal ini ada ketrampilan mental level dasar mulai dari ketrampilan 1 sampai 4 dan ketrampilan persiapan sebagai level 2, khususnya ketrampilan 5 untuk menyikapi persoalan pembelajaran daring era Covid -19 ini. Semua pihak harus bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Kelima ketrampilan mental yang dimaksud adalah:

Ketrampilan 1. sikap/*attitude*. Sikap mental yang perlu dibangun oleh setiap orang yang ingin sukses adalah: a) sadari bahwa sikap adalah pilihan, b) pilihlah sikap yang dominan positif seperti memilih tinggal di rumah biar aman, memilih pembelajaran daring karena lebih aman, efektif, c) mengejar keunggulan,

bukan kesempurnaan dan menyadari bahwa diri sendiri, dan orang lain juga tidaklah sempurna: kejarlah keunggulan pembelajaran daring, jangan mengeluh / menyalahkan orang lain dengan situasi ini

Ketrampilan 2. Motivasi/*motivation*. Orang yang sukses adalah orang yang: a) sadar akan penghargaan dan manfaat yang diharapkan melalui aktivitas partisipasi diri, b) mampu bertahan dengan tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit bahkan ketika imbalan dan manfaat tidak segera datang dan c) sadari bahwa manfaat berasal dari partisipasi diri bukan hasilnya.

Ketrampilan 3. Tujuan dan komitmen/*goals and commitment*. Indikator dari ketrampilan mental ini antara lain; a) tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis, terukur dan berorientasi waktu, b) menyadari tingkat kinerja saat ini dan mampu mengembangkan rencana yang spesifik dan terperinci untuk mencapai tujuan mereka dan c) berkomitmen tinggi untuk tujuan dan untuk melaksanakan tuntutan harian dan program kerja/pelatihan.

Ketrampilan 4. ketrampilan orang/*People skills*. Indikator dari ketrampilan orang antara lain: a) menyadari bahwa setiap individu adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup keluarga, teman, rekan kerja, guru/pelatih dan lainnya, b) jika perlu, komunikasikan pikiran, perasaan dan kebutuhan diri individu dengan orang lain dan sebaliknya juga, luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain, dan c) telah mempelajari ketrampilan yang efektif untuk menghadapi konflik, lawan yang sulit dan orang lain ketika mereka menentang.

Ketrampilan 5. bicara mandiri/*self-talk* adalah ketrampilan mental berupa: a) kemampuan mempertahankan kepercayaan diri selama masa-masa sulit dengan berbicara pada diri sendiri secara realistis dan positif, b) berbicaralah dengan diri sendiri sama seperti berbicara dengan sahabat sendiri, dan c) gunakan self-talk untuk mengatur pikiran, perasaan dan perilaku selama kompetisi.

5 ketrampilan mental ini mestinya dimiliki dulu oleh guru, orang tua dan tentu saja adalah siswa maupun sekolah (pimpinan sekolah). Setelah ketrampilan mental ini dimiliki sebagai basis bersikap bijak, baru masing-masing pihak menentukan cara atau strategi kebijakannya dalam rangka mengurai dan mengatasi persoalan yang muncul dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembelajaran daring era Covid-19. Cara bijak menyikapi pembelajaran daring berbasis ketrampilan mental yang dimaksud adalah:

- a. Pemerintah: a) siapkan regulasi pengembangan sumber belajar digital khususnya untuk Dikdas (Meisa, 2020) pasca Covid-19, karena bagaimanapun sudah jadi tuntutan pemebjaraan abad ini. Sudah diawali dengan aplikasi Rumah belajar yang disiapkan Dikbud untuk Dikdas, sedangkan untuk PT sudah disiapkan lama regulasinya dan aplikasinya (SPADA) di tahun 2012 dan pembelajarn 3 smt di luar prodi dalam 1 PT maupun luar PT, b) siapkan infrastrtur pembelajaran daring lebih baik lagi. Terlebih dalam perbandingan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara terpadat di kawasan ini, hanya memiliki penetrasi internet sebesar 56%, lebih rendah dari Thailand (57%) apalagi jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia yang mampu mencapai 80%. Artinya pula penduduk Indonesia yang mampu mengakses internet hanya 150 juta dari 268 juta jiwa (Jalil, 2020), c) siapkan SDM Berkualitas, d) Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring.
- b. Sekolah: a) identifikasi siswa atau keluarga siswa tentang kemungkinan kepemilikan fasilitas pembelajaran daring, jika ada yang tidak memiliki bisa difasilitasi dengan alternative lain yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan, b) persiapkan infrastruktur pemebalajaran daring di sekolah, c) latih guru agar adaptif terhadap teknolog pembelajaran. Studi dari Amerika Latin menunjukkan bahwa kualitas guru sangat mempengaruhi inovasi pembelajaran dan menyumbang 30% kesuksesan akademik dari siswa (D.Zulfikar, 2019), d) buat panduan pembelajarn daring (aplikasi pembejaraan daring) biar orang tua dan anak tidak bingung. Jika tdk memungkinkan cukup mengkomunikasikan langkah-langkah pembelajaran lewat WA,dan d) SPMI e-learning
- c. Guru: a) tanamkan kepada diri, siswa dan orang tua bahwa pembelajaran daringa dalah metode dan modus pemblajaran baru sehingga butuh adaptas (Meisa, 2020), b) lakukan pembelajaran daring berbasis pembelajaran bermakna sebagaimana edaran mendikbud (point 2.a), bukan mengejar target kompetensi kelulusan sebagaimana situasi pembelajaran normal sehingga pembelajaran tidak membebani siswa.

Menurut David Ausubel seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna (*meaningfull*), pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur

kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa sebelumnya (Rahmah, 2013) dan (Faslah, 2011), sehingga menurut Miles Berry pembelajaran bermakna memiliki tujuan yang lebih jelas, pembelajaran yang memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan lebih banyak makna kepada dunia di sekitar mereka, belajar terhadap hal-hal yang lebih realistis yang ditandai dengan pembelajaran yang lebih aktif, konstruktif, disengaja, otentik dan kooperatif (Ahmad, 2016)

Sebagai contoh: Pembelajaran IPS. Anak bisa akses di internet tentang film/video yang menampilkan sungai yang sedang banjir. Terlihat di video selain banjir ada tumpukan sampah yang menyebabkan aliran air meluap keluar sungai. Maka dari sini siswa bisa mengaitkan beberapa konsep, yaitu: sungai, banjir, sampah dan perilaku masyarakat. Jika siswa berhasil menghubungkan satu konsep dengan konsep lain menjadi suatu konsep yang utuh dan berarti maka telah terjadi pembelajaran bermakna.

Proses penghubungan antar konsep ini tergantung dari banyaknya pengalaman konsep yang dimiliki siswa. Dalam kasus tadi siswa sudah mengetahui dulu tentang konsep sampah dan banjir. Siswa akan mudah memahami sebuah konsep jika siswa dapat mengalami, merasakan dan konsep tersebut tidak abstrak.

Namun, untuk bisa melaksanakan pembelajaran bermakna, ada prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel, yaitu: 1. Belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna, 2. Tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 3. Tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. (Rahmah, 2013).

Jika memenuhi prasyarat ini, selain pembelajaran bermakna bisa dijalankan, maka akhirnya siswa akan memperoleh manfaat dari belajar bermakna, yaitu: 1) Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat, 2) Informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip dan 3) Informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan

proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Jika sudah seperti ini maka hasil belajar yang bisa diperoleh juga lebih banyak. Djamarah menyebutnya ada empat, yaitu: 1) Siswa menguasai bahan pengajar yang telah di pelajarnya, 2) Siswa menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran, 3) Waktu yang di perlukan untuk menguasai bahan pengajaran relatif lebih singkat dan 4) Siswa dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri (Elhefni, 2016).

Menurut Ausubel, agar belajar lebih bermakna terjadi dengan baik dibutuhkan beberapa syarat, yaitu: (1) materi yang dipelajari harus bermakna secara potensial, (2) anak mempunyai tujuan belajar bermakna sehingga mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Pemaknaan inilah yang merupakan bentuk inovasi. Melalui pemaknaan, (1) pengajaran sains terintegrasi dengan pendidikan budi pekerti; (2) penyajian konsep / teori tidak berhenti sampai pemahaman konsep saja tapi dimaknai sehingga siswa dapat melihat kaitan apa yang dipelajarnya dengan norma dan situasi kehidupan (Setyo, 2011).

- d. Orang tua: 1) sediakan fasilitas pembejaran sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, 2) Perbesar porsi peran orang tua; sebagai pengontrol dan motivator, 3) buat Pustaka keluarga sesuai kebutuhan sehingga memudahkan anak ketika pembelajaran dan 4) bantu anak seperlunya (bukan mengambil alih tugas anak), dan 5) berikan alternative yang bervariasi dari tautan pembejaran daring yang gratis sehingga anak bisa memilih yang paling sesuai dengan mereka. Ex. Delapan plafform dan tautan gratis (lihat tabel), 5) beri permakluman kesiapan pemerintah, sekolah dan guru dalam implementasi daring era Covid-19.

Setidaknya berdasarkan tingkat kesiapan guru menfasilitasi pembejaran daring (Tanan, 2020), ada 4 kelompok guru sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 15. Kesiapan Guru Dalam Pembelajaran Daring Covid-19

Kelompok	Kesiapan/kemampuan
KELOMPOK 1	Sebatas mengirim bahan ajar melalui media sosial yang populer seperti Whatsapp (WA) atau melalui email = GURU GAPTEK
KELOMPOK 2	▪ SUDAH MEMANFAATKAN PLATFORM LMS (Learning Management System seperti Moodle, Edmodo, Google Classroom, Schoology atau platform lain yang sejenis. Pendidik di level 2 paham tentang LMS (Learning Management System) dan dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada misalnya untuk melakukan kuis. ▪ Komunikasi masih sebatas bertukar catatan saja dan tidak ada interaksi yang langsung secara verbal, atau secara verbal dan visual sekaligus misalnya melalui video call = MINIM INTERAKSI SOSIAL
KELOMPOK 3	▪ SDA 2 dan mengkurasi bahan ajar yang terdapat di internet seperti di Ruangguru, Zenius dll. ▪ secara sengaja menciptakan interaksi langsung yang terjadwal dengan peserta didik secara sinkron dengan mendengar suara, atau suara dan gambar = ADA INTERAKSI SOSIAL ▪ Sdh mengantisipasi kelemahan e-learning, yaitu minimnya interaksi sosial ▪ Jadi, SYARAT MINIMAL GURU E-LEARNING
KELOMPOK 4	▪ SDA 3 ▪ MENAMBAHKAN INSTRUKSI LEBIH BERVARIASI, DAN menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber belajar dengan cara membagikan rekaman suara atau video yang diproduksi sendiri untuk keperluan pembelajaran daring. Pendidik dapat menghasilkan instruksi-instruksi yang memandu peserta didik untuk bisa melakukan <i>collaborative learning</i> dan <i>experiential learning</i> secara mandiri di tempat masing-masing.

Tabel 16. Platform dan Tautan Pembelajaran Daring Gratis

No	Platform dan tautan	Alamat akses
1	Rumah Belajar Kemendikbud Fitur : Sumber Belajar, Kelas Digital, Laboratorium Maya, dan Bank Soal. Dr PAUD sd SMA	https://belajar.kemdikbud.go.id
2	Google Suite Education	https://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/
3	Kelas Pintar	https://kelas pintar.id
4	Microsoft Teams	Akses Microsoft Office 365: https://microsoft.com/id-id/education/products/office

5	Quipper School	https://quipper.com/id/school/teachers/
6	Ruang guru	Akses Sekolah Online Ruangguru Gratis: https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e
7	Sekolahmu	https://www.sekolah.mu/tanpabatas
8	Zenius	https://zenius.net/belajar-mandiri

- e. Siswa: 1) persiapkan mental, bahwa belajar adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan untuk penyiapan masa depan, 2) jangan mengeluh apalagi menyalahkan orang lain, 3) pertahankan rasa percaya diri selama masa-masa sulit ini, 4) gunakan aplikasi atau tautan pembelajaran daring gratis secara optimal

4. Penutup

Fast respon atas suatu hal, peristiwa dan fenomena adalah wajar. Tanggapan yang diberikan sebaiknya sudah melalui persiapan yang matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ikut berkontribusi bagi kesuksesan pelaksanaan keputusan tersebut. Keputusan membuat melaksanakan pembelajaran daring di tengah Covid-19 merupakan keputusan darurat. Menyikapinya dengan bijaksana dari semua pihak sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif. Termasuk hikmah dibalikinya adalah adanya percepatan pembelajaran daring sebagai salah satu tuntutan pendidikan 4.0, meningkatnya porsi dilaksanakannya pembelajaran bermakna, meningkatnya sinergi tri pusat Pendidikan untuk layanan Pendidikan generasi masa depan.

Daftar Referensi

- Ahmad. (2016, Februari <http://cepiriyana.staf.upi.edu/files/2016/02/BELAJAR-BERMAKNA.pdf>). Belajar Bermakna. Bandung.
- Bijaksana*. (2018, Februari 20). Retrieved from Wiktionary: <https://id.wiktionary.org/wiki/bijaksana>
- BUSD. (2018). *21st Century Learning*. Retrieved from Berresa Union School District Education Services: <https://www.berryessa.k12.ca.us/documents/Common%20Core%20State%20Standards/BUSD%204Cs%20Presentation.pdf>
- Chang Zhu, D. W. (2013). What core competencies are related to teachers' innovative teaching?. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2013, Vol. 41, No. 1, 9–27, <http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.753984>.
- D.Zulfikar, L. (2019, November 28). *The Conversation*. Retrieved from Visi #MerdekaBelajar Menteri Nadiem harus diikuti dengan perbaikan kualitas guru: <https://theconversation.com/visi-merdekabelajar-menteri-nadiem-harus-diikuti-dengan-perbaikan-kualitas-guru-127811>
- Elhefni, D. A. (2016). Pengaruh Penerapan Pembelajaran Bermakna (Meaningfull Learniang) Pada Pembelajaran Tematik IPS Terpadu Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III di MAHliyah IV PalembangI. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016, 19-28.
- Farras, B. (2019, May 13 pukul 13:08). *Mengenal Artificial Intellegence dan Cara Kerjanya*. Retrieved from CNBT Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190513130056-37-72069/>
- Faslah, R. (2011). Pemanfaatan Internet Dalam Pengembangan Konsep IPS dan Implikasinya Terhadap pembelajarn Bermakna. *EconoSains.vol.ix no 2 agustus 2011, journal.unj.ac.id*, 167-170.
- Jack J. Lesyk, P. (2015). *Ohio Center for Sport Psychology*. Retrieved from Nine mental skill for succes: <https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview>
- Jalil, N. (2020, Maret 18). *Kesenjangan akses internet di Asia Tenggara jadi tantangan bagi pengajaran online akibat pandemi COVID-19*. Retrieved from The Conversation.
- Kelas Online di Tengah Pandemi Corona Harusnya Memerdekakan Proses Belajar*. (2020, April 9). Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/dw/d-4971165/kelas-online-di-tengah-pandemi-corona-harusnya-memerdekakan-proses-belajar>

- Meisa, S. W. (2020, April 9). *Tiga Langkah Strategis Untuk Dukung Budaya Pembelajaran Daring Pasca Covid-19*. Retrieved from Covid-19 Bisnis: <https://theconversation.com/tiga-langkah-strategis-untuk-dukung-budaya-pembelajaran-daring-pasca-covid-19-135337>
- Mendikbud. (2020, Maret 24). Surat Edaran Mendikbud nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jakarta, Indonesia.
- Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19*. (2020, Maret 20). Retrieved from Mendikbud: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Rahmah, N. (2013). Belajar Bermakna Ausubel. *Al Khwarizmi, Vol.1. Maret 2013, ejournal.iainpalopo.ac.id*, 43-48.
- Setyo, A. (2011). PEMBELAJARAN BERMAKNA BERPENDEKATAN SETS PADA PELAJARAN BIOLOGI UNTUK MENUMBUHKAN KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN Ajib Setyo SMA 2 Karangawen, Demak,. *Bioma, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, journal.upgris.ac.id>index.php*, 161-170.
- Tanan, A. (2020, Mei 1). *4 Kelompok Pendidik Cara Daring*. Retrieved from 9. Antonius Tanan, 4 Kelompok Pendidik Cakemendikbud, <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/4-kelompok-pendidik-cara-daring/>: 9. Antonius Tanan, 4 Kelompok Pendidik Cara Daring, 1<https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/4-kelompok-pendidik-cara-daring/>
- Wahab, R. (9 Pebruari 2019). *FGD FRI Tentang Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Padang: FRI.



BAB VI

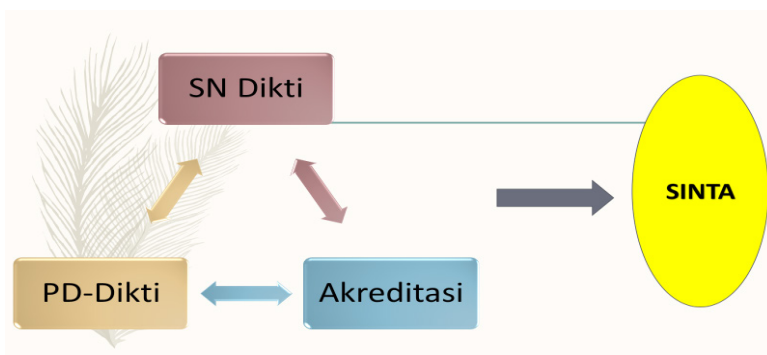
PENELITIAN DAN PUBLIKAS

A. MENGENAL SINTA (*Science and Technology Index*)

1. Pengantar

Tulisan ini merupakan bahan sosialisasi bagi dosen di Perguruan Tinggi (PT) baik Negeri maupun Swasta di kabupaten Cilacap sebanyak 13 PT. sebagaimana yang sudah dimafhumi Bersama, utamanya di kalangan ahli dan praktisi pendidikan tinggi, maka saat ini PT “dipaksa” untuk **beradaptasi** dengan berbagai perubahan, jika **tidak** ingin **ditinggalkan** masyarakat. PT harus melakukan **inovasi** jika ingin menjadi yang **terdepan**. PT yang melakukan adaptasi dan inovasi membutuhkan **profesionalisme, militansi dan akhlak yang baik dari** semua komponen PT (penyelenggara, pengelola/pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa). Salah satu perubahan yang harus segera diadaptasikan PT adalah tentang **indexasi** kinerja dosen melalui **SINTA**.

Dalam dunia Pendidikan tinggi setidaknya ada 4 sistem yang keempatnya memiliki hubungan (relasi) bahkan interdependensi. Keempat hal yang dimaksud adalah SN Dikti, PD Dikti, Akreditasi dan SINTA. SN Dikti atau Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar penyelenggaraan Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sekaligus dipersilahkan untuk dilampaui PT agar PT di Indonesia semakin meningkat mutunya. Aktivitas pemenuhan SN Dikti dilaporkan dalam Forlap PD Dikti (pangkalan data Pendidikan tinggi). PD Dikti ini akan digunakan oleh BAN PT sebagai basis data yang bersifat kuantitatif bagi akreditasi, baik untuk akreditasi program studi (APS) maupun akreditasi perguruan tinggi (APT). Sedangkan SINTA merupakan portal yang mengukur kinerja IPTek dosen/PT yang juga ada dalam PD Dikti dan diukur pula oleh BAN PT (Akreditasi). Tanpa ada pemenuhan SN Dikti maka forlap PD Dikti sebuah PT akan kosong dan ini akan mengakibatkan kosongnya data (valid) dalam pengukuran akreditasi dan SINTA.



Bagan 59. Interdependensi SN Dikti, PD Dikti, Akreditasi

Sehubungan dengan itu maka pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan atau mensosialisasikan sekilas tentang SINTA. Untuk lebih terorganisir, maka pembicaraan ini akan dimulai dengan: 1) mengingat sekilas tentang SN-Dikti yang sudah disosialisasikan sebelumnya, 2) mencermati Luaran dan Dampak Tri Dharma PT dalam Konteks Akreditasi, 3) SINTA Ristekdikti. Dengan mencermati 3 hal tadi maka harapannya para dosen dalam hal ini sebagai garda terdepan yang akan diukur oleh SINTA Ristekdikti menjadi faham, kemudian sadar bahkan menjadi budaya untuk selalu menghasilkan karya-karya dan inovasi baru yang terpublikasi sebagai bagian dari kinerja dosen, yang kemudian berkontribusi terhadap kinerja PT. kinerja PT ini akan diukur oleh BAN OT melalui sistem akreditasi PT sekaligus menjadi bukti kepatuhan PT dalam mengimplementasikan SN Dikti dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

2. Sekilas SN-Dikti

Sebagaimana dimafhumi Bersama bahwa dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau yang disingkat SN Dikti, maka otomatis seluruh PT yang ada di wilayah NKRI harus memenuhinya, bahkan disarankan untuk melampauinya. SN Dikti ini memiliki 3 komponen tri dharma yang distandarkan sehingga SN Dikti ini terdiri dari tiga standar besar sesuai jumlah tri dharma PT, yaitu Standar Pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Masing-masing standar tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 8 standar, sehingga SN Dikti jumlah standarnya ada 24 standar, kedua puluh empat standar tersbtu bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 17. Standar-standar dalam SN Dikti

Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1. Standar Hasil Penelitian	1. Standar Hasil PKM
2. Standar Isi Pembelajaran	2. Standar Isi Penelitian	2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses Pembelajaran	3. Standar Proses Penelitian	3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Standar Penilaian Penelitian	4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Standar Peneliti	5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana dan Prasarana	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	7. Standar Pengelolaan Penelitian	7. Standar Pengelolaan PKM
8. Standar Pembiayaan Pendidikan.	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

3. Luaran Tri Dharma PT dalam Konteks Akreditasi

Kinerja dosen sebagai pelaksana Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diukur kinerjanya dan dirangkum dalam sebuah laporan yang disebut sebagai laporan kinerja dosen. Laporan Kinerja Dosen yang harus diinput dalam Forlap PD Dikti berupa: Buku, Jurnal, Kegiatan Penelitian dan Kegiatan PKM.

Ragam jenis laporan kinerja dosen dalam forlap PD Dikti ini dijadikan dasar oleh BAN PT untuk melakukan pengukuran melalui sistem akreditasi nasional, utamanya pada point kriteria terakhir atau kriteria 9 berupa luaran dan dampak Tri Dharma PT, kriteria 7 (penelitian), dan kriteria 8 (pengabdian pada masyarakat).

Sedemikian sistemiknya luaran tri dharma PT berupa capaian Pendidikan, penelitian dan pengabdian maka dosen harus aktif melakukan aktivitas penelitian, haisnya bisa untuk inovasi pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Untuk gambaran yang relative jelas berikut diperlihatkan tabel perbandingan luaran Tro Dharma yang merupakan bagian dari kinerja dosen.

Tabel 18. Perbandingan Luaran Tri Dharma PT Dosen

Pendidikan	Penelitian	PKM
1. Buku teks	Jumlah karya ilmiah dr <i>hasil penelitian</i> yang diindex SINTA atau Jurnal yg di OJS	Jumlah karya ilmiah dr <i>hasil PKM</i> yang diindex SINTA atau Jurnal yg di OJS
2. Buku bahan ajar		
3. Media pembelajaran		
4. Trainer kit (simulator)		
5. produk teknologi yang diadopsi industri		

Dari tabel ini tampak jelas bahwa kinerja dosen ragamnya sangat banyak, dan khusus untuk kinerja dosen pada dharma penelitian dan pengabdian yang

terpublikasi dan terindeks SINTA. Inilah yang dimaksudkan kaitannya SINTA dengan 3 komponen dalam sistem Pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana pemaparan di awal. Oleh karena itu penting bagi PT dan khususnya dosen untuk mengenal lebih jauh apa itu SINTA? Apa saja yang ada di dalamnya? Dan apa saja yang dikehendaki SINTA dari dosen PT, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di jawab dalam sub bab selanjutnya yaitu sub bab SINTA.

4. Sinta Ristekdikti

SINTA yang merupakan kepanjangan dari **Science and Technology Index yang dikeluarkan oleh Ristekdikti dan beralamat di <http://sinta.ristekdikti.go.id/>** merupakan **Portal yang dikembangkan Kemenristekdikti dalam rangka pengukuran kinerja IPTEK yang meliputi kinerja dosen dan peneliti, kinerja jurnal, dan kinerja institusi.** keberadaannya berdasarkan **Surat dari Menristekdikti No. 227/E/IV/2017 tanggal 27 April 2017** yang ditujukan ke Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV tentang pendaftaran diri dosen dan peneliti di Portal SINTA. Peluncuran SINTA dilakukan Kemenristekdikti pada Rakornas 30 Januari 2017 dan Peluncuran SINTA dalam rangka mewujudkan kemandirian anak negeri dan mendorong kultur publikasi.

SINTA memiliki fungsi, setidaknya ada tiga, yaitu: 1) Relasi, 2) Sitasi dan 3) Pengindex. Kenapa dosen dan PT harus peduli dengan SINTA? Hal ini karena SINTA merupakan Alat untuk mengevaluasi Dosen, Prodi, Institusi dan Jurnal (Prediksi). Setidaknya dengan SINTA akan diketahui berapa banyak kinerja dosen yang sudah terekam. Sampai dengan 13 Maret 2018 berapa jumlah karya dosen yang sudah direkam SINTA. Berikut rekamannya.

Tabel 19. Rekaman Kinerja Dosen dalam SINTA Per 13 Maret 2018

Aspek	Rekaman sd 13 Maret 2018	Taget Akhir 2018
Jumlah penulis	103.000	150.000
Jumlah dokumen	1.100.000 ^a	-
Jurnal	1.600	3.500

Beberapa keunggulan SINTA dibanding pengindex lain yang patut dicermati PT dan dosen adalah SINTA dapat secara otomatis meng-index hasil karya yang telah ter-index di Google Scholar, Scopus, InaSTI dan Indonesian Publication Index (IPI). Dengan keunggulan ini ternyata SINTA belum sampai pada target

yang ditetapkan sebagaimana deskripsi tabel di atas, maka untuk memotivasi sekaligus mengapresiasi kinerja dosen, Ristekdikti kemudian mengeluarkan SINTA AWARD. SINTA AWARD adalah bentuk apresiasi Ristekdikti kepada penulis, jurnal dan institusi yang memiliki kinerja baik dalam publikasi, sitasi dan jurnal, maka rencananya Kemenristekdikti akan memberikan Penghargaan SINTA AWARD pada tanggal 4 Juli 2018, sehingga menjadi pemacu dan pemicu dosen, peneliti, pengelola jurnal serta institusi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi, sitasi dan pengelolaan jurnalnya.

Setelah dosen dan PT mengetahui karakteristik SINTA dan fungsinya, Langkah selanjutnya adalah bagaimana strategi meningkatkan jumlah dosen yg memiliki ID SINTA? Langkah-langkahnya setidaknya ada 3, yaitu:

1. PT melakukan sosialisasi
2. LP2M bekerja sama dengan Dekan memfasilitasi Bimtek Pembuatan Akun SINTA yang sudah didahului dengan Bimtek Pembuatan akun Google Scholar
3. Mobilisasi pengisian Jurnal Kampus

5. Penutup

Beradaptasi merupakan bagian dari “ikhtiar” manusia untuk bisa menjalankan kewajiban yang sudah dibebankan. Menjadi dosen memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma PT. Dalam hal ini, ikhtiar bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ada dalam SINYA, sekaligus ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan menyandarkan kepada-Nya akan menghasilkan luaran yang bisa “melebihi” dari apa yang bisa dibayangkan manusia. Semoga kita selalu mendoat Ridlo, Inayah dan Kelapangan dalam menjalankan kewajiban kita.

Daftar Referensi

Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan BAN PT No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN 2017), ya

SINTA, <http://sinta.ristekdikti.go.id/>

B. Peran Pengelola Jurnal Perspektif IAPS 4.0

1. Pengantar

Akhir-akhir ini keberadaan pengelola jurnal di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang sangat diperhitungkan, mengingat jurnal menjadi salah satu wadah bagi karya-karya civitas akademika yang sangat diperhitungkan juga khususnya dalam konteks akreditasi di perguruan tinggi. Sehingga mengurus jurnal di kampus merupakan sebuah amalan/ pekerjaan yang tidak hanya sekedar butuh profesionalitas tetapi juga komitmen yang luar biasa.

Sebuah kalimat bijak wasiat dari salah satu tokoh Pendidikan di Indonesia yaitu Hasyim Asy'ari yang berbunyi “ Menghiasi amal dengan adab/karakter yang baik menjadi penanda akan diterimanya amal di dunia dan akhirat “ Demikian juga dengan kalimat bijak dari mantan Menteri Pendidikan Nasional, Prof. M. Nuh di tahun 2018 pada sebuah acara di Jakarta “Mengurusi PT tdk cukup profesional tapi juga militan”. Apa yang disampaikan oleh kedua tokoh nasional tersebut, mengisyaratkan pentingnya keseriusan total dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada kita, apalagi jika tugas tersebut berkaitan dengan pelayanan orang banyak seperti mengelola jurnal, mengelola Lembaga Pendidikan dan sebagainya. Apalagi pada situasi seperti sekarang ini, di mana perguruan tinggi (PT) berada dalam tuntutan kompetisi yang sangat tinggi, tantangan dirupsi teknologi dan sebagainya. Orang yang mengelola PT butuh tenaga ekstra untuk melakukannya, karena “Mengelola PT harus mau **Beradaptasi** sekaligus **Berinovasi**”.

PT memang harus **beradaptasi** dengan berbagai perubahan, jika **tidak** ingin **ditinggalkan** masyarakat. PT juga harus melakukan **inovasi** jika ingin menjadi yang **terdepan**. PT yang melakukan adaptasi dan inovasi membutuhkan **profesionalisme, militansi dan akhlak yang baik**, sehingga benefit yang diperoleh meliputi yang ada di dunia dan akhirat. Untuk hal yang demikian, maka semua komponen PT (penyelenggara, pengelola/pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) harus bersatu dalam visi dan gerak Langkah, termasuk keseriusan mengelola jurnal penelitian atau pengabdian.

Sesuai dengan konteks pembahasan kali ini, maka SN Dikti dan SAN akan dibicarakan sekilas, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana peran jurnal dan konteks SAN dan khususnya IAPS 4.0.

2. SN-Dikti dan SAN

Pembicaraan tentang jurnal kampus memang tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Kementrian Riset, 2015) dan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) (PT, 2017) karena ketiganya berkaitan. SN Dikti berkaitan dengan karya-karya dosen bidang penelitian dan pengabdian, yang ditagih atau diukur keberadaannya baik secara jumlah, relevansi dan kecukupannya dalam SAN.

Seperti yang sudah dipahami bersama, bahwa tujuan SN-Dikti adalah untuk: 1) menjamin tercapainya tujuan Pendidikan nasional, 2) menjamin mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan 3) mendorong PT melampaui SN Dikti. SN Dikti ini secara umum terdiri dari 24 standar Pendidikan, penelitian dan pengabdian yang menjadi acuan dalam penyusunan SAN. Kedua puluh empat SN Dikti yang dimaksud adalah sebagaimana terjelaskan dalam tabel perbandingan di bawah ini.

Tabel 20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
i. Standar Kompetensi lulusan (SKL)	q. Standar Hasil Penelitian	9. Standar Hasil PKM
j. Standar Isi Pembelajaran	r. Standar Isi Penelitian	10. Standar Isi PKM
k. Standar Proses Pembelajaran	s. Standar Proses Penelitian	11. Standar Proses PKM
l. Standar Penilaian Pembelajaran	t. Standar Penilaian Penelitian	12. Standar Penilaian PKM
m. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	u. Standar Peneliti	13. Standar Pelaksana PKM
n. Standar Sarana dan Prasarana	v. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	14. Standar Sarana dan Prasarana PKM
o. Standar Pengelolaan Pembelajaran	w. Standar Pengelolaan Penelitian	15. Standar Pengelolaan PKM
p. Standar Pembiayaan Pembelajaran	x. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Mengacu pada SN-Dikti ini dan interaksi antar standar atau kriteria dalam SAN, maka instrument akreditasi harus dapat mengenali keragaman objek yang diakreditasi (one size does not fit all) yang dulu hanya berorientasi pada input dan proses, maka sekarang berorientasi pada proses, outputs, dan outcomes. Apalagi IAPS VERSI 4-0, di mana dalam sistem ini ada 2 laporan yang harus dipersiapkan unit pengelola program studi (UPPS), yaitu: 1) Laporan Evaluasi Diri (LED) atau *Self Evaluation Report*(SER) dan 2) Laporan Kinerja Akademik (LKA). LED yang bersifat kualitatif ini sangat menentukan kesuksesan akreditasi,

di dalamnya memuat: a) cakupan evadiri, b) kriteria, c) analisis dan penetapan program pengembangan institusi dan d) penutup. Di sisi lain LKA yang bersifat kuantitatif berbentuk excel ngelink dengan Pd Dikti, di mana jika PD Dikti data nya beres maka akan memudahkan jalan kesuksesan akreditasi program studi (APS).

IAPS VERSI 4.0 (disebut demikian karena sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali) dan saat ini istilah yang digunakan bukan lagi boring dan standar tetapi instrument dan kriteria. Ada 9 kriteria yang disediakan oleh IAPS 4.0 yang di dalamnya mengujur output dan outcomes pelaksanaan tri dharma PT yang telah dilaksanakan program studi dengan UPPS-nya. Termasuk output dan outcomes yang dimaksud dalam konteks ini adalah karya civitas akademika yang di dalamnya membutuhkan wadah seperti jurnal sesuai konteks pembahasan kali ini.

Pertanyaannya adalah siapa yang membuat IAPS? Tentu jawabannya adalah tim yang disiapkan UPPS dengan melibatkan banyak pihak. Dalam ini dosen harus memiliki dashboard, dan agenda personal sebagai sumbernya, kemudian Prodi yang bersangkutan, Unit kerja yg terintegrasi di PT (masukkan Tim) maupun Unit kerja yang sering berhubungan dengan mitra PT. pada kriteria 9 yaitu Capaian Penelitian dan PKM, maka aJumlah karya ilmiah yang dihasilkan berdasar penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi di 3 th terkahir harus disediakan butkinya apakah masuk di SINTA index atau Jurnal OJS. Sehingga mengelola jurnal berbasis OJS adalah sesuatu yang sangat urgen dalam konteks sekarang.

3. Bagaimana Peran Jurnal?

Setelah mengetahui bahwa jurnal kedudukannya sangat urgen dalam konteks IAPS 4.0 lalu bagaimana Peran Jurnal sesungguhnya? Peran Jurnal dalam hal ini adalah:

- a. Fasilitasi luaran penelitian dan PKM Dosen dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasi
- b. Harus OJS
- c. Terindex Lembaga pengindex sepeeti SINTA dan lain sebagainya

Keseriusan melakukan pengelolaan jurnal juga akan menyebabkan apakah jurnal yang dikelola PS atau Lembaga lainnya terakreditasi atau tidak.

Terakreditasi, bisa dilihat dari rekaman submit sampai dengan publish. Submit tidak lewat email atau flashdisk karena akan mengurangi nilai, tetapi langsung submit ke jurnal yang bersangkutan. Jadi Submit artikel harus online, ini bisa dibuatkan kebijakan internal dari jurnalnya bahkan akan lebih bagus lagi jika menjadi kebijakan pimpinan.

Dalam rangka mobilisasi karya sivitas akademika dan juga meningkatkan kinerja pengelola jurnalnya, maka keseriusan pengelolaan jurnal bisa dilihat juga dari ada tidaknya fasilitasi dari kampus untuk mengadakan upgrade SDM penulis dan pengelola jurnalnya, seperti: 1) workshop OJS, 2) workshop penyusunan artikel jurnal terakreditasi / terindeks SINTA 2 dan 1, 3) trik menulis menembus jurnal internasional bereputasi dan sebagainya.

4. Penutup

Mengelola Jurnal Kampus secara profesional dan penuh komitmen merupakan bagian dari adaptasi PT saat ini, sekaligus diperlukan inovasi untuk melakukan lompatan-lompatan yang lebih jauh. Pengelolaan jurnal tidak akan ada apa-apanya tanpa adanya kontribusi positif dan produkti dari luaran hasil penelitian dan PKM Dosen di satu sisi dan di sisi lain adalah keseriusan, komitmen dan akhlak yang baik dari para pengelolanya, sehingga dari tangan-tangan mereka akan lahir kemanfaatan yang banyak bagi kehidupan umat manusia di dunia bahkan di akhirat.

Daftar References

- Kementrian Riset, T. d. (2015). Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
- PT, B. A. (2017). Peraturan BAN PT No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. Jakarta: BAN PT.



C. Penelitian Dan Manajemen Kelembagaan

1. Pengantar

Penelitian dan manajemen kelembagaan dalam konteks praktik pengalaman lapangan di beberapa tahun terakhir ini menjadi kebijakan baru di institusi ini. Setidaknya ada dua hal yaitu penelitian sederhana yang berlaku untuk semua programs studi maupun studia manajemen Lembaga yang disesuaikan dengan perspektif program studinya. Kebijakan ini perlu diambil dengan alasan, diantaranya:

- a. Penelitian sederhana: 1) menumbuhkan jiwa sense of science dari mahasiswa, 2) memfasilitasi integrasi PPL, KKN dan tugas akhir (skripsi) dan 3) memberikan pengalaman bagi mahasiswa bagaimana melakukan penelitian lapangan. Setidaknya tiga alasan ini yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tentang penelitian sederhana dalam PPL/magang.
- b. Manajemen lembaga: 1) orientasi tempat kerja/magang/praktik, 2) peningkatan kinerja Lembaga dan 3) berkah.

Berdasarkan kebijakan inilah maka ruang lingkup pembahasan kali ini ada dua, yaitu: 1) penelitian sederhana yang berlaku untuk semua program studi dna 2) studi manajemen Lembaga juga untuk semua program studi tetapi dengan perspektif yang berbeda, seperti jika di fakultas Syariah Prodi AS atau Hukum keluarga Islam maka kajiannya adalah manajemen KUA dan PA atau bisa ditambahkan LBH, sedangkan untuk fakultas Dakwah studinya melingkupi manajemen Lembaga dakwah dan media massa dan fakultas Tarbiyah ada dalam konteks manajemen sekolah.

2. Penelitian sederhana

Penelitian sederhana yang dimaksud adalah penelitian sebagaimana umumnya penelitian tetapi dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan tuntutan laporan yang lebih mini untuk memotret problem research yang ada dalam lingkup tempat magang. Penelitian sederhana ini tetap menggunakan perspektif program studi atau basis keilmuan mahasiswa magang.

Wilayah penelitian (reseatch areas) berbasis Prodi sebagai berikut:

1. Program studi AS/HKI: perkawinan. Kewarisan, wasit, peradilan
2. PAI : Pendidikan dan pembelajaran (filosofis, structural dan operasional) baik di Lembaga Pendidikan formal, non formal dan informal.

3. PGMI: pembelajaran (operasional di sekolah)
4. KPI: jurnalis (media massa) dan broadcasting (: penyiaran: program, produksi, pemberitaan, Teknik, pemasaran, keunagan, HRD dan legal dan lainnya

3. Studi Manajemen Lembaga

Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa studi manajemen lembaga juga untuk semua program studi tetapi dengan perspektif yang berbeda, seperti jika di fakultas Syariah Prodi AS atau Hukum keluarga Islam maka kajiannya adalah manajemen KUA dan PA atau bisa ditambahkan LBH, sedangkan untuk fakultas Dakwah studinya melingkupi manajemen Lembaga dakwah dan media massa dan fakultas Tarbiyah ada dalam konteks manajemen sekolah. Berdasarkan hal ini maka lokasi studi manajemen adalah sekolah (Tarbiyah: PAI dan PGMI), Radio dan TV (KPI) dan KUA, PA dan LBH untuk AS.

Adapun ruang lingkup studi manajemen lembaga perspektif Prodi sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup manajemen KUA/PA/LBH: 1) organisasi, 2) tugas dan wewenang KUA, 3) kompetensi absolut dan relative PA, 4) pembiayaan, 5) Sarana dan prasarana dan 5) Humas
- b. Ruang lingkup manajemen sekolah, yang sebaiknya ada perspektif cakupan/wilayah,. Sistem, proses, bidang Garapan dan pelaku, tetapi dengan pertimbangan waktu maka hanya melakukan studi dalam persktif bidang Garapan saja. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sekolah yang akan dikaji mahasiswa praktikan adalah 1) manajemen kurikulum, 2) manajemen SDM, 3) manajemen kesiswaan, 4) manajemen sarana dan prasarana Pendidikan, 5) manajemen pembiayaan Pendidikan, 6) manajemen Humas
- c. Ruang lingkup manajemen TV/Radio/Cetak: 1) Organisasi, 2) tugas dan fungsi, 3) pembiayaan, 4) sarana dan prasarana dan 5) Humas

4. Penutup

Meneliti dan studi sesungguhnya ada dalam ranah yang sama, yaitu sama-sama melakukan studi atau kajian akan suatu realitas empiric yang didasarkan pada pertemuan dengan kondisi teoritis sebagai jalan untuk mengenal keadaan yang sesungguhnya apakah mengandung problem yang memerlukan pemecahan atau

tidak. Keduanya membutuhkan pengalaman langsung yang bisa diperoleh lewat kegiatan PPL atau magang.

Daftar Referensi

Buku Panduan PPL IAIIG tahun 2015

BAB VII

PENDIDIKAN IN-NON FORMAL BERBASIS KEAGAMAAN

A. IBU, Sahabat Anak HEBAT

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Setiap orang tua harus menyadari bahwa anak-anak kita lahir sebagai generasi milenial dan generasi digital (digital native), sehingga mereka tidak bisa dipaksa untuk seperti kita (imigran digital).

Sebuah riwayat menyatakan bahwa Ali bin Abi Tholib berkata “didiklah anakmu sesuai dengan zamannya”. Terlepas dari pro kontra tentang Riwayat tersebut, namun jika dilihat dalam konsep Pendidikan, maka mendidik harus disesuaikan dengan zamannya. Karena hakikatnya pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik untuk hidup di zamannya, maka kurikulumnya harus relevan dengan zamannya.

Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik anak. Jawabnya adalah orang tua. Orang tua adalah PENDIDIK KODRATI, yaitu pendidik yang langsung mendapatkan SK (tugas) dari Allah Swt. Salah satu dari orang tua, yaitu IBU berperan sebagai MADRASATUL ULA (sekolah pertama: *al ummu madrasatul ula*). Sedangkan peran sebagai madrasatul ula, bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu PENDIDIK, MOTIVATOR, FASILITATOR, PESAING, SAHABAT dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik sejati, berarti ibu telah menjadi ibu yang hebat.

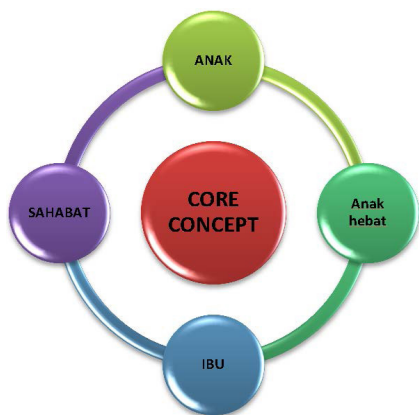
Idealitas yang luhur dari peran yang harus dijalankan seorang ibu untuk mendidik anak-anak hebat ini, seringkali dalam realitasnya berbanding terbalik. Banyak kasus orang tua, ayah atau ibu yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, khususnya Pendidikan agamanya, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang cenderung *hubbud dunya* (cinta dunia), terbiasa meninggalkan ibadah dan tidak memiliki akhlak yang baik.

Berangkat dari keribatan ini maka tulisan ini mencoba mengingatkan Kembali akan peran strategis orang tua dan utamanya ibu dalam pendidikan anaknya. Namun begitu, ibu yang sederhana sekalipun harus menyesuaikan

dengan anak-anaknya yang hidup di zaman digital seperti sekarang ini. Menjadi ibu hebat menjadi sangat penting untuk mendidik anak-anak yang hebat. Melalui tangan ibu yang hebat inilah akan lahir anak-anak yang hebat. Apa itu anak hebat? Ibu hebat? dan bagaimana strategi yang digunakan ibu untuk membentuk anak hebat inilah yang akan dikupas dalam tulisan ini.

2. Konsep Kunci

Sesuai judul yang diminta pihak penyelenggara yaitu “Ibu, Sahabat Snak Hebat”, maka ada empat (4) konsep kunci yang perlu diperjelas dahulu sebelum membahas tentang strategi yang harus ibu lakukan dalam mendidik anak hebat. Keempat konsep kunci yang dimaksud yaitu anak, anak hebat, ibu dan sahabat.



Bagan. 60. 4 Konsep Kunci

Konsep anak memiliki ragam batasan yang berbeda-beda. Setidaknya bisa dilihat dari konsep psikologi, Pendidikan, era digital bahkan agama. Demikian juga dengan konsep anak hebat bisa dilihat dari beragam perspektif. Sedangkan konsep kunci ketiga yaitu ibu akan dibahas dalam sub bab keempat dan sahabat sub bab berikutnya.

3. Konsep Anak dan Anak Hebat Dalam Berbagai Perspektif

a. Konsep Anak

Siapa sesungguhnya anak itu? Pertanyaan ini perlu jawaban tentang batasan atai definisi tentang anak. Banyak perspektif yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa sesungguhnya anak itu. Setidaknya dalam konteks seminar kali ini, anak bisa dilihat dalam 4 perspektif, yaitu anak perspektif psikologi, Pendidikan, era digital dan agama.



Bagan 61. Perspektif Konsep Anak

Pertama. Perspektif Psikologi. Anak dalam perspektif psikologi adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, anak memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.

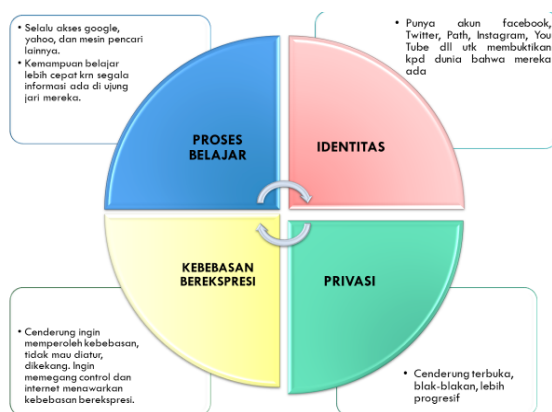
Kedua. Perspektif Pendidikan. Anak atau peserta didik adalah “homo educandum” = makhluk yang menghajatkan pendidikan. Jadi, anak adalah manusia yg punya potensi sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia yang cakap

Ketiga. Perspektif Era Digital. Anak adalah GENERASI DIGITAL NATIVE (individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital). Jadi anak sebagai DIGITAL NATIVE, sedangkan orang tua adalah IMIGRAN DIGITAL (Orang yang bermigrasi / beradaptasi terlebih dahulu dengan tekniligi digital) (Kemendikbud, 2016).

Sebagai anak yang lahir di era digital seperti sekarang ini, maka anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada zaman-zaman sebelumnya, diantaranya:

- a. Dari sisi identitas, anak biasanya punya akun facebook, Twitter, Path, Instagram, You Tube dan lainnya guna membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada
- b. Dari sisi privasinya, anak cenderung terbuka, blak-blakan dan lebih progresif

- c. Dari sisi kebebasan berekspresi, anak cenderung ingin memperoleh kebebasan, tidak mau diatur, dikekang. Ingin memegang control dan internet menawarkan kebebasan berekspresi
- d. Dari sisi proses belajar atau cara belajar, anak Selalu akses google, yahoo, dan mesin pencari lainnya. Jadi, kemampuan belajar lebih cepat krn segala informasi ada di ujung jari mereka (Kemendikbud, 2016).



Bagan. 62. Ciri Digital Native

Keempat. Perspektif Agama. Dalam perspektif agama (Islam), anak memiliki definisi yang berbeda yang sekaligus menunjukkan level keshalihan dari anak tersebut, seperti amanah, perhiasan, fitnah, musuh dan penyejuk hati.



Bagan.63. Anak dalam Perspektif Agama (Islam)

- 1) Anak sebagai amanah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati AMANAT-AMANAT yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (qs. Al Anfal: 27)

Karena anak adalah amanah, maka orang tua harus memegang amanah sesuai yang memberi amanah, yaitu mendidiknya untuk menjadi hamba yang beriman kepada-Nya

- 2) Anak adalah perhiasan (ziinatil hayaatid dunya)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak adalah PERHIASAN KEHIDUPAN DUNIA, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs al kahfi: 46)

Dalam memaknai ziinah berbeda-beda. Dalam kitab tafsir Jalalain bermakna sebagai perhiasan kehidupan dunia, sedangkan dalam tafsir ibnu katsir bermakna fana, pasti lenya dan awalnya tumbuh kemudian hilang. Oleh karena itu, keberadaan anak tidak selamanya ada, ia ada tapi akan lenyap atau akan diambil, ia hanya sekedar perhiasan yang akan dipakai selama pemakainya membutuhkannya dan yang memilikinya bersedia meminjamkan untuk dipakainya.

- 3) Anak adalah ‘aduwwun (musuh).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا فَتَضَحَّوْا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara ISTERI-ISTERI MU dan ANAK-ANAKmu ada yang menjadi MUSUH bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS At Taghobun: 14)

Kata ‘aduwwun bermakna musuh, yaitu penyebab atau perlambat kalian untuk taat kepada Allah (Tafsir Jalalain)

- 4) Anak adalah fitnah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan ANAK-ANAKMU hanyalah COBAAN (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Ath Thaghobun: 15).

Dalam Tafsir Jalalain. Kata fitnatun bermakna yang membuat kalian lalai dalam urusan akhirat

- 5) Anak sebagai penentram dan penyejuk jiwa

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: *“Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami Isteri-isteri Kami dan KETURUNAN Kami sebagai PENYENANG HATI (Kami) dan jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”* (QS. Al Furqan; 74)

Qurrota a'yun bermakna kami (orang tua) melihat mereka selalu TAAT kepada MU (Tafsir jalalain), dan bermakna = TDK PERNAH BERDUSTA, TDK BERBUAT KAFIR DAN MUSRIK (Tafsir: ibnu katsir).

b. Konsep Anak Hebat

Setelah mengetahui konsep anak dari berbagai perspektif, maka kesemuanya bermuara pada satu simpulan bahwa anak membutuhkan bimbingan atau arahan dari orang tua untuk menjadikannya lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih hebat.

Berbicara tentang anak hebat, sebenarnya siapa anak hebat itu? Anak hebat adalah anak yang baik (: anak yang patuh pada orang tuanya, mudah diarahkan, dan berakhir dengan prestasi yang baik (Fatan) atau anak yang berakhlak mulia dan berprestasi. Jadi, anak hebat adalah anak yang baik dalam aspek psikologis, agama, pendidikan maupun konteks (revolusi) digital.

Lalu bagaimana dengan realitas sebagai generasi digital native? Generasi Digital Native sebagai TANTANGAN sekaligus tugas yang diemban agama, pendidikan dan tugas psikologis agar anak tetap BERTAHAN sebagai ANAK BAIK. Dalam konteks inilah maka munculnya anak hebat membutuhkan ibu yang hebat, karena ibu adalah pendidik kodrati. Sebagai

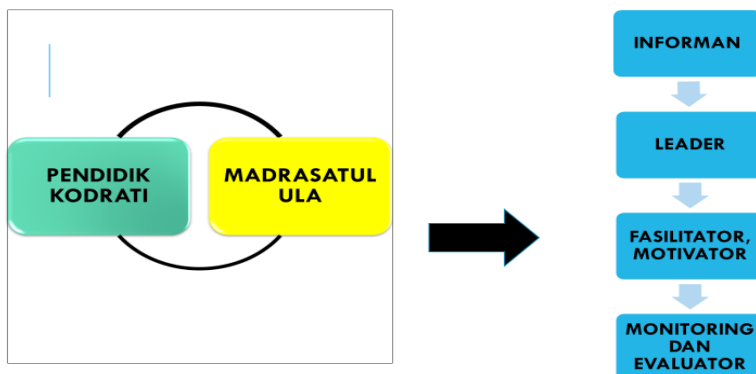
pendidik kodrati ia akan melaksanakan tugas apapun dan berperan sebagai apapun untuk membimbing anaknya menjadi anak yang hebat/baik/sholih/qurrota a'yun.

4. Konsep Ibu

Dalam kacamata umum, ibu adalah orang yang melahirkan. Di sisi lain setiap orang yang memelihara juga bisa disebut ibu. Demikian juga dengan orang yang mendidik/mengarahkan/membimbing juga bisa disebut ibu. Karena konteksnya adalah Pendidikan maka pengertian ibu bisa dipahami sebagai berikut:

- Ibu adalah orang yang melahirkan. Dalam peranannya dengan Pendidikan maka ibu disebut sebagai Pendidik Kodrati, yaitu pendidik yang langsung memperoleh tugas (SK) dari Allah Swt. (IBU = Pendidik Kodrati)
- Ibu adalah orang yang memelihara. Karena syaratnya memelihara maka ibu bisa maknanya orang lain. (Ibu bisa saja orang lain, bukan ibu kandung= pendidik formal)
- Ibu adalah orang yang mengarahkan/membimbing/mendidik, jadi bisa orang lain tetapi juga bisa ibu kandung. (Ibu = pendidik formal atau pendidik kodrati)

Berdasarkan konsep ibu tersebut, maka bagaimana peran ibu dalam Pendidikan anaknya di era digital ini? Dalam hal ini ibu yang hakikatnya adalah pendidik kodrati maka ia berperan sebagai madrasatul ula (sekolah pertama). Sebagai madrasatul ula, maka ibu bisa menjalankan peran lebih lanjut sebagai: a) informan, b) leader, c) fasilitator, motivator, d) monitoring dan evaluator.



Bagan 64. Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak

Sebagai informan, maka ibu adalah sumber belajar bagi anaknya. Ibu harus memberikan informasi sesuai kebutuhan anak, dengan melalui tahapan seleksi dan proses komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, termasuk informasi yang diperoleh dari sumber digital yang peluang membawa berita hoaknya besar. Sikap ini penting dicermati oleh ibu karena hal ini juga sudah diperingatkan dalam QS. Al Hujurat: 6 yang artinya “ Hai, orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Adzkiya, 2019).

Sedangkan sebagai leader, ibu harus mampu mengarahkan/membimbing anaknya menjadi anak yang selalu taat kepada perintah-perintah-Nya sehingga ia akan menjadi penyejuk jiwa bagi kedua orang tuanya. Ibu juga harus bisa menjadi fasilitator dan motivator. Ibu harus bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak, belajar tentang kehidupan sekaligus menjadi motivator jika anak pada situasi tertentu mengalami masa-masa sulit atau terlalu senang yang berlebihan sehingga membuatnya anak melupakan tugas utamanya. Dan terakhir ibu harus menjadi pemonitor sekaligus evaluator, ibu harus selalu memantau apa yang dilakukan anaknya baik langsung maupun langsung sehingga ibu memiliki cukup data untuk mengevaluasi anaknya apakah memang sudah bisa meraih level qurrota a'yun murni atau semu.

Dari sekian banyak peran yang dimainkan seorang ibu dalam konteks Pendidikan anaknya, di posisi manakah sesungguhnya ibu berperan sekaligus sebagai sahabat, sehingga bisa melahirkan anak hebat? Untuk bisa memahami peran sebagai sahabat, maka penting untuk terlebih dahulu mengenal siapa sesungguhnya sahabat itu?

5. Konsep Sahabat

Sahabat adanya karena ada persahabatan. Maka mengetahui konsep sahabat tidak bisa lepas dari konsep persahabatan. Persahabatan atau pertemanan menurut Aristoteles adalah hubungan khusus yang dapat saling membantu satu sama lain, tidak pernah memikirkan kewajiban, dan saling menguntungkan (NN, 2006). Persahabatan menjadi identic dengan hubungan emosional yang dilakukan dua orang atau lebih yang didasari saling pengertian, menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Mereka juga saling bertukar informasi tentang berbagai pengalaman untuk satu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

Dari pengertian ini, maka dua orang atau lebih itu adalah pelakunya, yang disebut sahabat. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif (spontan). Artinya pula seorang sahabat akan menunjukkan reaksi yang sifatnya spontan tanpa ada niat atau rencana untuk mengambil keuntungan sepihak.

Persahabatan terbentuk, menurut Rakhmat biasanya dipicu oleh beberapa faktor seperti kecocokan/kesamaan (hobi, sifat, visi dan misi), kedekatan, kemampuan personal individu untuk menjaga rahasia, menyayangi teman-temannya, serta adanya suatu keuntungan yang didapatkan secara emosional yang (Stefani, 2016)

Dalam sebuah hubungan persahabatan dikenal adanya kriteria peraturan persahabatan yang disepakati kedua belah pihak. Kriteria persahabatan ini menurut Michael Argyle dan Monika Henderson adalah:

- a. Ada kesepakatan ttg Batasan/peraturan perilaku
- b. Ada perbedaan peraturan antara teman lama dengan yang baru
- c. Ada perbedaan peraturan teman dekat dan tidak terlalu dekat
- d. Ketidaksetiaan terhadap aturan sering jadi penyebab berakhirnya persahabatan

Disamping kriteria ada juga aturan penting dari persahabatan, (Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa dari Inggris, Italia, Jepang, dan Hong Kong: Argyle dan Henderson), yaitu:

- a. Berbagi berita kesuksesan
- b. Memberikan dukungan emosional.
- c. Membantu dengan suka rela ketika dibutuhkan.
- d. Mengusahakan kebahagiaan sahabat di dalam lingkungannya masing-masing.
- e. Saling percaya dan menceritakan rahasia satu sama lain.
- f. Tetap bersikap/bertindak sebagai sahabat, baik ketika teman tersebut ada maupun tidak ada.
- g. Saling membayar hutang dan kebaikan-kebaikan.
- h. Bersikap/bertindak toleran terhadap sahabat.

Dari beberapa kriteria dan aturan persahabatan tersebut, pertanyaannya adalah Apakah ibu bisa menjadi sahabat anak? Jika mencermati anak adalah

makhluk sosial, biasanya ia cenderung bisa bersikap responsive terhadap orang yang bersikap bersahabat. Jika ibu bersikap bersahabat dengan anak maka anak akan biasanya akan lebih terbuka, ibu dan anak saling mengisi, saling belajar dan ibu akan semakin bisa memahami keinginan anak.

6. Strategi Ibu Hebat Menjadikan Anak Hebat Di Era Digital

Bagaimana agar ibu bisa menjadi sahabat anak? Beberapa hal yang harus dilakukan ibu agar ia diterima menjadi sahabat dari anaknya sendiri adalah:

- a. Terimalah anak dengan semua potensi yang ada pada dirinya
- b. Libatkan diri dalam kegiatan anak
- c. Berikan kepercayaan pada anak
- d. Jadi pendengar yang baik untuk anak
- e. Berikan penghargaan dan hukuman
- f. Jadi teladan bagi anak

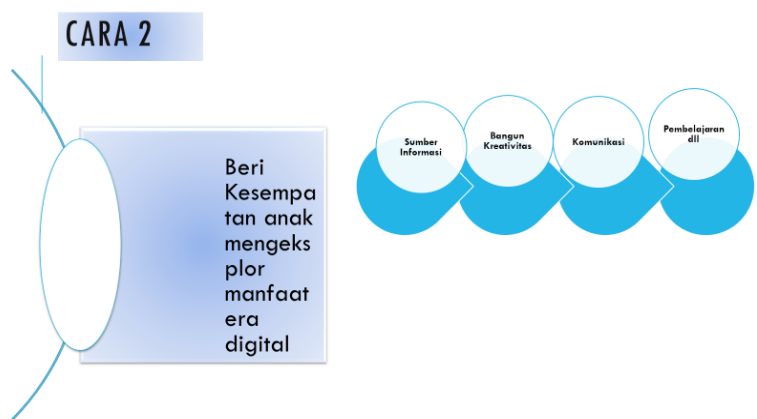
Lalu bagaimana **strategi ibu** sebagai **sahabat** dalam **menjadikan anak hebat** era digital? Ibu harus melakukan beberapa cara, yaitu:

- a. Lindungi anak dari dampak negative era digital
- b. Beri kesempatan anak mengeksplor manfaat era digital
- c. Filter pengaruh era digital dengan nilai moral/agama: sebelum, saat dan sesudah
- d. Terapkan metode mendidik anak menurut Rosulu sesuai karakteristik perkembangan anak.



Bagan.65. Cara 1. Perlindungan Anak

Cara pertama berkaitan dengan usaha ibu untuk melindungi anak dari dampak negative era digital, karena bagaimanapun bisa memberikan pengaruh bagi kesehatan, prestasi hingga hambatan perkembangan fisik, sosial, otak dan bahasa (Kemendikbud, 2016). Anak yang terlalu terpapar teknologi digital, biasanya jam menonton, melihat atau akses media/perangkat digital tinggi, maka akan Kesehatan mata seperti anak menjadi kurang berkedip akibatnya mata kekurangan air, mata jadi Lelah dan pada akhirnya juga bisa mengalami gangguan tidur. Demikian juga jika anak tidak dilindungi dalam penggunaan teknologi digital maka anak akan mengalami masalah prestasi akibat berkurangnya konsentrasi belajar. Demikian juga anak yang terlalu sering berkulat dengan dunia digital juga mengalami hambatan perkembangan fisik karena hanya anggota tubuh tertentu yang selalu digerakkan dan anggota yang lain tidak mendapatkan kesemaptan. Gangguan sosial, karena kurang berinteraksi langsung dengan teman sebaya di dunia nyata dan jenis gangguan lainnya.



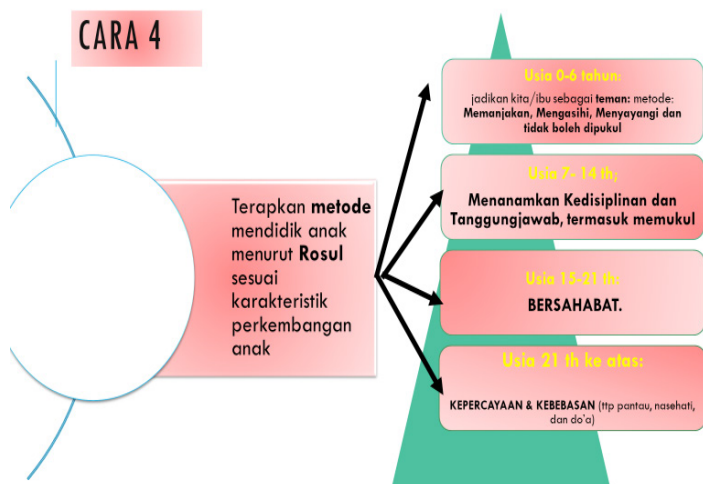
Bagan.66. Cara 2. Pemberian Kesempatan Eksplorasi

Pada cara kedua, merupakan kebalikan dari cara pertama, di mana anak harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi sekian banyaknya manfaat era digital. Setidaknya manfaat yang bisa diperoleh anak adalah yaitu sebagai sumber informasi, mampu membangun kreativitas, komunikasi, pembelajaran dan sebagainya.



Bagan 67. Cara.3. Filter Pengaruh Negatif

Cara ketiga, yaitu menfilter pengaruh era digital dengan nilai-nilai moral dan agama, baik sebelum, sedang dan selesainya menerima pengaruh era digital.



Bagan 68. Cara.4. Penerapan Metode Mendidik Rosul

Cara keempat, ibu bisa menerapkan metode mendidik ala rosul sesuai karakteristik perkembangan anak. Pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, jadikan diri ibu sebagai teman/sahabat anak. Metode mendidik yang digunakan adalah dengan memanjakan, mengasih, menyayangi dan tidak boleh dipukul. Selanjutnya pada usia 7 tahun samai usia 14 tahun, ibu menanamkan kedisiplinan kepada anak termasuk diperbolehkan memukul dengan tujuan mendidik. Ketiga pada usia 15 sampoai dengan 20 tahun, ibu benar-benar berperan sebagai sahabat bagi anak, dengan berbagi cerita, saling terbuka dan mendengarkan sehingga

anak akan turut arahan ibunya karena ibunya dianggap sebagai orang yang paling dipercaya. Terakhir pada usia anak sudah 21 tahun ke atas, maka ibu memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada anak, dengan catatan tetap memantau, menasehati dan mendo'akan (Fatah, 2019).

7. Penutup

Mendidik merupakan tugas orang tua yang telah diberi amanah Allah Swt agar menjadi Qurrota a'yun. Dalam menjalankan tugas Pendidikan, orang tua khususnya ibu membutuhkan peran, trik ataupun strategi yang harus disesuaikan dengan karakteristik anak dan konteks zamannya. Mendidik untuk mengembangkan anak menjadi anak hebat memang bukan hal mudah tetapi juga bukan hal yang sulit. Kuncinya adalah kesungguhan dan komitmen dari pendidik kodrati, yaitu: orang tua: ibu, sehingga mendidik anak hebat pada awalnya sulit tetapi berakhir dengan manis.

Daftar Referensi

- Adzkiya, K. S. (2019). *Mencari Akhirat Tidak Lupa Dunia. Pesan-Pesan Dari Mimbar Kyai*. Cilacap: PP Miftahul Huda.
- Fatah, A. (2019, April 9). *Mendidik Anak Ala Rosululloh*. Retrieved from iqra.id: <https://iqra.id/metode-mendidik-anak-ala-rasulullah-220161/>
- Kemendikbud, T. P. (2016). *Seri Pendidikan Orang Tua: Mendidik Anak Di Era Digital*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- NN. (2006). *Repository*. Retrieved from Bab 2: <http://repository.uin-suska.ac.id/20061/7/7.%20BAB%20II.pdf>
- Stefani. (2016). Keterbukaan Diri Dalam Membangun Hubungan Persahabatan Diadik Laki-laki Dan Perempuan. *Ultimacom*, <http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM>, 71-82.



B. Peran Dan Tanggungjawab Wanita Dalam Keluarga

1. Pendahuluan

Setiap orang memiliki peran sekaligus tanggungjawab sesuai tempat dan zamannya. Peranan harus sesuai tempat artinya setiap tempat memiliki kebutuhan yang berbeda walaupun digantungkan kepada pihak (wanita) yang sama. Demikian juga halnya dengan peranan harus sesuai dengan zamannya. Dengan subyek yang sama dan tempat yang sama tetapi pada zaman (waktu) yang berbeda, maka akan membutuhkan peranan yang berbeda. Tidak terkecuali juga halnya dengan peranan wanita. Bahkan wanita memiliki peran yang berbeda-beda. Peran-peran yang berbeda ini, ada dalam konteks peranan internal dalam keluarganya atau peranan eksternal untuk masyarakatnya.

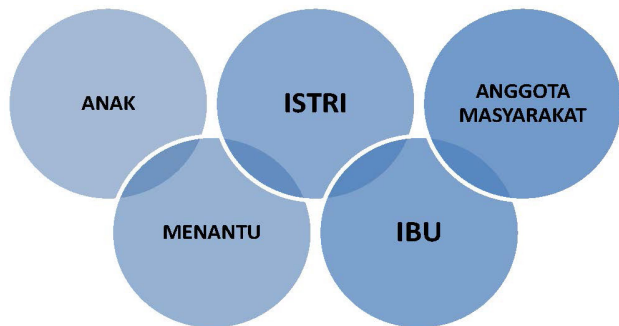
Ketika wanita memenuhi peran yang diperlukan dalam keluarga, maka dari keluarga tersebut akan lahir ANAK-ANAK HEBAT. Artinya anak-anak hebat biasanya karena KELUARGA HEBAT DAN KARENA PERAN WANITA HEBAT. Oleh karena itu akan dibahas tentang peranan dan tanggungjawab wanita dalam keluarga dengan sistematika: a) hakikat wanita dalam berbagai perspektif, b) wanita dalam keluarga, c) peranan dan tanggungjawab wanita dalam keluarga.

2. Hakikat Wanita Dalam Berbagai Perspektif

Pembahasan awal yang diperlukan untuk mengetahui peranan dan tanggungjawab wanita, maka dibutuhkan pemahaman tentang siapakah sesungguhnya wanita itu? Untuk melihat siapa sesungguhnya wanita itu, maka sesuai konteks kegiatan hari ini akan dibahas wanita dalam dua perspektif, yaitu perspektif pendidikan dan perspektif agama.

Pertama. **Wanita Dalam Perspektif Pendidikan.** Dalam perspektif pendidikan, wanita (manusia) adalah “homo educandum” yaitu makhluk yang menghajatkan pendidikan. Artinya pula, bahwa wanita adalah manusia yang memiliki potensi sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia yang cakap. Dalam konteks ini wanita dididik oleh orang tuanya ketika belum berkeluarga dan dididik oleh suaminya ketika sudah berkeluarga. Selanjutnya ketika ia sudah cakap maka wanita bisa melanjutkan tongkat estafet pelaksanaan pendidikan dalam keluarga untuk mendidik anak-anak yang dilahirkannya.

Kedua. Wanita Dalam perspektif Agama. Dalam perspektif agama, label yang melekat pada wanita sangat beragam, seperti sebagai anak, istri, menantu, ibu dan anggota masyarakat. Ragam label ini akan berkonsekuensi beragam peran dan tanggungjawab juga yang harus disandang oleh wanita.



Bagan 69. Peranan Wanita Dalam Perpspektif Agama

Wanita sebagai anak bagi orang tuanya. Sebagai anak dari iorang tuanya maka perannya adalah sebagai penentram dan penyejuk jiwa. Anak sebagai penentram dan penyejuk jiwa telah diamanahkan dalam QS. Al Furqan: 64

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami Isteri-isteri Kami dan KETURUNAN Kami sebagai PENYENANG HATI (Kami) dan jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (QS. Al Furqan; 74)

Qurrota a’yun bermakna kami (orang tua) melihat mereka selalu TAAT kepada MU (Tafsir jalalain) (Jalaluddin dan Jalaluddin tt), dan bermakna = TDK PERNAH BERDUSTA, TDK BERBUAT KAFIR DAN MUSRIK (Tafsir: ibnu katsir). Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya tidak pernah berdusta, tidak pernah kafir dan musyrik (Maliki, 2018).

Demikian halnya dengan wanita yang berstatus sebagai anak dari orang tuanya, dari kecil sampai dewasa sehingga ia menikah dan memiliki peran lain sebagai isteri dan ibu dari anak-anak suaminya, maka sesungguhnya ia adalah anak yang menyejukkan hati orang tuanya, bahkan mampu membawa suami dan anak-anaknya juga sebagai penentram jiwa bagi orang tuanya/mertua dari suami/ nenek-kakek bagi anak-anaknya.

Wanita sebagai anggota masyarakat. Untuk melihat peranan wanita dalam masyarakat, ada berbagai pendapat yang membolehkan dan melarangnya. Dalam konteks ini karena wanita juga dituntut untuk bisa berperan ssebagai anggota masyarakat di mana ia berada, maka yang diambil adalah pendapat yang memperbolehkannya. **WANITA YANG Mempunyai keistemewaan yang hebat sehingga kemahiran ini sangat diperlukan oleh masyarakat umumnya (spesialis), MAKA WAJIB KELUAR RUMAH.**

Menurut Prof. Dr Md Uqlah Al-Ibrahim (Rahman, 2009), seorang wanita bisa memilih karir di luar dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) terdapat keperluan yang menyebabkan ia terpaksa keluar dari tanggungjawab asalnya (yaitu peranan utama kepada rumahtangga) seperti : a. Kematian suami dan memerlukan belanja kehidupan, b. Memberikan bantuan kepada dua ibu bapa yang sangat miskin atau suami yang uzur tubuhnya, c. Membantu bisnis suami yang memerlukan banyak tenaga dan biaya, d. Mempunyai keistemewaan yang hebat sehinggakan kemahiran ini sangat diperlukan oleh masyarakat umumnya (spesialis).
- 2) bekerja sesuai fitrah kewanitaannya.
- 3) menutup aurat dan sentiasa menjauhi fitnah di tempat kerja.
- 4) kerjanya tidak memerlukan berdua-duaan(khalwat) dan bercampur baur dengan lelaki (ikhtilat tanpa batas/sering bersinggungan langsung).
- 5) mendapat izin wali atau suami.
- 6) tidak menyebabkan terganggu dan terhentinya tanggung jawab di rumah terhadap anak serta suami
- 7) tujuan dan niat utama bekerja bukanlah kerana keasyikan dan keghairahan kepada mengumpul harta dan niat semata-mata menyaingi lelaki.
- 8) mestilah berhenti sekiranya terdapat keperluan dan kecatatan dalam pendidikan anak-anak.

3. Wanita Dalam Keluarga dan Peranan Serta Tanggungjawabnya

Ketika wanita berada dalam lingkungan keluarga, maka setidaknya ada dua peran utaama wanita yang bisa dijalankannya, yaitu sebagai istri bagi suaminya dan yang kedua sebagai ibu bagi anak-anaknya. Kedua peran ini harus bisa dijalankan dengan baik dan imbang sehingga akan terbentuk keluarga Sakinah mawadah dan warohmah.

Pertama. Peran dan Tanggungjawab Wanita sebagai Istri. Untuk melihat bagaimana peran wanita sebagai istri bagi suaminya dalam keluarga, bisa disimak dalam QS. Al Rumm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحْزَنٌ وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Maghfiroh, 2016).

Berdasarkan ayat ini maka peran utama istri adalah penenang dna penentram jiwa bagi suaminya. Namun peranan utama ini akan terwujud jika istri menjalankan minimal tiga peranan khusus berikut:

- a. Sebagai Pendamping Suami. Artinya istri harus bisa menjadi belahan jiwa bagi suaminya sehingga akan cenderung menentramkan jiwa suaminya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan (isteri/suami) kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan: 74) (Adhim, 2016).

- b. Pencari nafkah kedua setelah suami. Istri harus tampil sebagai pencari nafkah keluarga jika suami memang berhlangan secara syar’I untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Annisa ayat 32).

Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan istri Abdullah bin Mas'ud, Rithah, datang menemui Rasulullah *dan berkata*: “Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya tidak memiliki harta apapun,”. Kemudian Rasulullah pun menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka,” (Damayanti, 2020).

- c. Pemimpin rumah tangga suaminya. Artinya istri harus bertanggungjawab atas semua anggota keluarganya. Diceritakan kepada kami dari Abu al-Yaman dari Syu'aib dari alZuhriy berkata: Aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang tentang mereka, dan seorang hamba sahaya bertanggung jawab atas harta tuan (majikan)nya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Berkata bahwa aku mendengar pemimpin (penanggung jawab) atas harta ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya (HR. Muttafaq Alaih, dalam Imam Bukhary, t.th.: 41) dalam (Sulaimang L, 2014).

Kedua. Peranan dan Tanggungjawab Wanita sebagai IBU. ibu adalah orang yang melahirkan atau orang yang memelihara anak. Sebagai ibu maka ibu berperan sebagai pendidik kodrati atau sebagai madrasatul ula bagi anak-anak yang dilahirkannya. Ibu akan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang agar menjadi generasi yang sholih yang menyejukkan hati dan pikiran kedua orang tuanya.

4. Penutup

Setiap makhluk Tuhan yang diciptakan-Nya memiliki peran dna tanggungjawab masing-masing, sebagai anggota keluarga, wanita memiliki peran sebagai istri bagi suaminya dan seb agai ibu bagi anak-anaknya. Peran yang dijalankan wanita ini memiliki konsekuensi munculnya tanggungjawab. Dalam menjalankan peran dan tanggungjawab inilah, maka wanita memerlukan tips-tips khusus. Bahwa

menjalankan peran dan tanggungjawab tersebut memang tidak mudah tetapi juga tidak sulit. Kuncinya adalah kesungguhan dan komitmen diri sendiri serta dukungan dari sekitarnya. Menjalankan peran sekaligus tanggungjawab sebagai wanita dalam keluarga memang pada awalnya adalah sulit, tetapi berakhir dengan manis.

Daftar References

- Adhim, M. F. (2016, Maret 30). *Istri yang Menyejukkan Mata*. Retrieved from Hidayatulloh.com: <https://www.hidayatullah.com/kolom/meminang-surga/read/2016/03/30/92117/istri-yang-menyejukkan-mata.html>
- Damayanti, I. (2020, Januari 21). *Istri Bekerja, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?* Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/q4g6gz430/istri-bekerja-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>
- L, S. (2014). Kepemimpinan Wanita dalam Rumah Tangga. *Al Munzir Vol 7 No 2 November 2014*, *ejournal.iainkendari.ac.id*, 115-128.
- Maghfiroh, N. (2016, November 26). *Tafsir Ar-Rum Ayat 21 Tentang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan*. Retrieved from Tafsir: <https://islami.co/tafsir-ar-rum-ayat-21-tentang-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam-pernikahan/>
- Maliki. (2018). Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya. *el ummah. vol 1. no 1 Januari-Juni 2018*, *jurnal.uinmataram.ac.id*, 74-86.
- mam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abul Fadhl 'Abdurrahman bin Abu Bakr bin Muhammad bin Abu Bakr Al-Khudhairy Ath-Thuluuni Al-Mishri Asy-Syafi'i. (n.d.). *Tafsir Al-Jalalain. Ta'liq: Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury*. Darus salam.
- QS. Annisa ayat 32. (n.d.). Retrieved from Tafsir Q: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-32>
- Rahman, Z. A. (2009). *Hukum Wanita Bekerja (Keputusan Majelis Fiqh Dunia)*. Tersedia: <http://www.zaharuddin.net/>.



C. *Empowering Pesantren: A Study of Al Ghazali's Thoughts On Islamic Education*

1. Introduction

Indonesia is a democratic country that gives freedom to all its citizens to worship according to their respective religion and belief (UUD 1945 article 29, paragraph 2). The country also pays great attention to religious education equal to other types of education, as set forth in Law No. 20 year 2003 on the National Education System article 15 stating: the types of education include general, vocational, academic, professional, religious, and special education. The Government Regulation No. 55/2007 on Religious Education clearly explains how Indonesian government regulates religious education for its citizens. Article 1 paragraph 1 on the scope of religious education states:

“Religious education is an education that provides knowledge and shapes attitude, personality, and skills of the learners to practice their religious teachings facilitated by subjects or courses on all channels, levels, and types of education.”

The above regulation indicates that the government has thought of religious education for all its citizens through various channels, levels and types of education. That is, religious education in Indonesia can be conducted by formal and non-formal education, from elementary level to higher education organized by special religious educational institutions, such as *pesantren* and *majelis taklim*. In this paper, the religious education meant by the author is the Islamic education in *pesantren*.

It is important to note that the general assumption about Islamic education in Indonesia is still not pleasing as the education is merely able to make the learners individually pious, but is unable to make them socially pious. Consequently, the exclusiveness of religious followers leads to new problems, such as intolerance. This exclusiveness makes them assume that their patterns of behavior are the best, most beautiful, most important, and so on. This situation will gradually lead to the rise of violences in the name of religion. Through proper religious education, this issue can be resolved.

Bambang Pranowo, for example, made a report about intolerance attitude in schools suggesting that radicalism is closely related to intolerance. Meanwhile, the Lakip survey shows that 62.7% of Muslim teachers and 40.7% of Muslim

students reject the establishment of other religious places of worship in their neighborhood. 57.1% of the teachers and 36.9% of the students also refuse to tolerate religious celebrations performed by non-Muslims in their neighborhood. Interestingly, the survey also finds that 21.1% of the teachers and 25.8% of the students consider Pancasila no longer relevant to be the state ideology. The teachers and students consider the issues of the nation will be resolved only if the Islamic Sharia is applied in Indonesia (65%). The Lakip survey also mentions that almost 50% of the students agree on radical acts in the name of religion (Suyatno, 2013, 97).

There are at least some factors of why the task of the Islamic religious education in Indonesia is considered unfinished yet, as intolerant attitudes among religious followers are still widespread. First, it is thought that theoretical knowledge of religious education is more emphasized than its implementation. The second is the assumption that religious education is merely a complement. The third is the lack of emphasis on the cultivation of moral values that support interreligious harmony. The fourth is the lack of reflection of the educational purposes. This way, attitudes such as mutual respect, sincerity, and tolerance towards religious and cultural diversity can be achieved in a plural society (Yahya 2010).

Such problems suggest that it is now the time religious education in pesantren be oriented to plurality or diversity education. The education must be able to promote inclusive values that share mutual respect among religious followers. In this context, the ideal values to empower pesantren are extracted from Al-Ghazali's thoughts, i.e. *shak*, *tawāḍu'*, *ṣuḥbah*, *mukhtalif al-alwān* and the classification of knowledge. This research uses a descriptive analysis, and it is part of library research in the field of education. The resources used by the author include books from academic publishers, articles from scholarly journals, data, primary sources, articles from popular publications, and other documents.

2. Pesantren as Religious Education Institution

The way to know pesantren may begin from knowing the meaning of the term, i.e. pesantren. Etymologically, pesantren comes from *pe-santri-an* which means the place of *santris* or students; dormitory where *santris* learn religion or; cottage. It is also said that pesantren comes from the word *santri*, that is, someone who learns Islam. Thus, pesantren means a place where people gather to study the religion of Islam (Dhofier 1994, 18).

Later, pesantren terminologically is meant to refer to a religious social institution that becomes an educational vehicle for Muslims who want to explore religious sciences and knowledge. *Pondok Pesantren* in religious terminology is an Islamic education institution. However, pesantren has become a social icon in Indonesian society. This is because it has typical social characteristics: (1) the figure of kyai, (2) santri, (3) independent quality, and (4) strong social network among its alumni (Maksum 2015, 85).

In Indonesia itself, the explanation of pesantren is referred from the Regulation of the Ministry of Religious Affairs (Permenag 2012). According to this regulation, what is meant with pesantren is an educational unit held in the form of pesantren *salafiyah*, that is, a pesantren which conducts education using *kitab kuning* (literal: yellow book) and a teaching system set by kyai or tutors (Ministry of Religious Affairs 2012). This also means that, de jure, the government recognizes the pesantren as a traditional education institution, even though, de facto, there have been many modern and semi-modern pesantrens emerging.

Many sources state that pesantren is the oldest type of Islamic education institution and has long been rooted in the culture of Indonesian society. It is the center of study and deepening treasures of Islamic sciences and, at the same time, the center of Islamic propagation movement in society. Pesantren is also known as the guardian of Islamic orthodoxy. It is a unique educational institution, not only because of its long existence, but also because of the culture, method, and network applied by this religious institution. Besides, pesantren is sort of education system indigenous in Indonesia.

The existence of pesantren as one of the educational institutions in Indonesia, de jure, refers to the regulation as follows: (1) Law No. 20 of 2003 on National Education System, Article 15 mentions: “the types of education include general, vocational, academic, professional, religious, and special education”. In this context, pesantren belongs to a category of religious education organized by the community. (2) The Government Regulation No. 55/2007 on Religious Education Article 1, Paragraph 1 explains the scope of religious education: “Religious education is education that provides knowledge and shapes the attitude, personality, and skills of learners in the practice of religious teachings, and is implemented at least through the subjects or courses on all channels, levels, and types of education”.

3. Al-Ghazali's Thoughts on Islamic Education

Al-Ghazali's complete name is Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al Thusi Al-Ghazali. He was usually called Abu Hamid, nicknamed *Zayn al-Din*, and dubbed with *Hujjat al Islam* (the Islamic thinker). He was born in 450 H and died in 505 H in Thus, Khurasan (Rosyad 2004, 113). As *hujjatul Islam*, he has made many thoughts, which are broad and deep. In this context, the author will focus only on a few of his thoughts that are relevant to the discussion of this paper. In this case, his thoughts meant are concerned with *shak* (skeptic-methodological), *tawādlu'*, *ṣuḥbah*, *mukhtalif al-alwān* (IAIIG 2014, 5–6), and the classification of knowledge (Alwizar 2015, 143).

The first is *shak*. *Shak* or skeptic is a term used by Al-Ghazali to describe the situation he experienced at the time, that is when he had reached the highest phase in his life journey. *Shak* does not mean to doubt the truth of knowledge from God. It is precisely indicative of the process that must be passed in the search for knowledge; that is, before obtaining evidence that shows the ultimate truth of the science, the process of searching and discovering such knowledge should not stop (Al-Ghazālī 1975, 79; Al-Ghazālī, n.d., 8). This concept of *shak* will inspire the importance of conducting research and innovation continuously in order to find the true point of truth. If this is done in the context of Islamic educational institutions, including the higher education institutions with their duty to always do research, then science will continue to evolve to the point of truth that has been inscribed in the Quran.

The second is *tawādlu'*. The concept of *tawādlu'* advanced by Al-Ghazali means a respect for the truth. It means that our respect should refer to the object, not the subject. As long as the subject has the truth, the subject is entitled to respect. Here, the concept of *tawādlu'* by Al-Ghazali is different from the concept of *tawādlu'* in general (Al-Ghazālī 1975, [1] 82, 180). This concept of *tawādlu'* is expected to inspire secondary students, *santris*, or college students to always respect the truth (science), to be active through learning and researching in order to find the truth. Finally, this truth-seeking action becomes daily activity until the subject earns the highest degree together with the believers because of the possession of the truth. This is in accordance with Quran, Chapter al-Mujadalah: 11.

The third is *ṣuḥbah* or togetherness. Humans are cultured beings. One can be said to be cultured if he is able to live by promoting the value of togetherness

or *ṣuḥbah*. Togetherness itself will not be achieved without recognition of the diversity that exists in society. Therefore, to be in a circle of togetherness, it requires recognition of the diversity that exists in society. In this case, Al-Ghazali teaches Islamic doctrines gentle and polite, not hard and sharp. God is presented not only as the Firm Substance as the *fiqh* scholars declare, but also as the Most Gracious and Most Merciful. Amid the tendency of a group of Muslims who preach Islam through violent ways, the doctrines of Sufism promoted by Al-Ghazali become relevant (Ghazali 2016, 82–86).

Muslims who are able to demonstrate courtesy, not harshness and cruelty even when dealing with adherents of other religions, show that they have been able to appreciate the diversity that exists in the real life so that they can live together in the diversity. This is *ṣuḥbah*. If this *ṣuḥbah* attitude is developed in the context of world-class educational institutions full of diverse communities, then the educational institutions will be able to produce graduates who have the attitude and soul of *ṣuḥbah*, and eventually, the world becomes peaceful because it is filled and prospered by human beings who have soul and attitude of *ṣuḥbah*. The world-class educational institutions meant are the pesantrens.

The fourth is *mukhtalif al-ahwān* (diversity). Diversity is a form of recognition of the differences. Recognition of this difference is a condition of achieving togetherness. Through this recognition of diversity, peaceful coexistence becomes possible, *al-ta'ayush bi al-silmi*. In this sense, *ṣuḥbah* will always coexist with the *mukhtalif al-ahwān*. The prerequisite to be able to live together peacefully, each individual and group must have an attitude acknowledged in the difference. The educational institutions that are able to indoctrinate their students to have the attitude of recognizing the differences will result in graduates with *ṣuḥbah* attitude that promotes peace in the world.

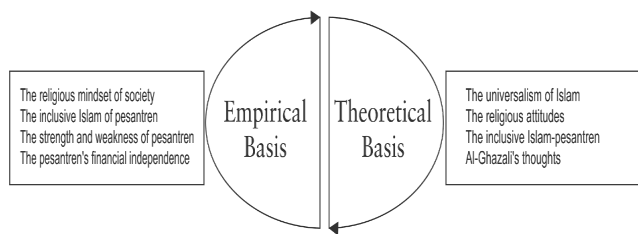
The last is the classification of sciences. Al-Ghazali divides sciences seen in term of importance into two groups. The first is the *farḍu 'ain* science that must be studied by every individual, such as the science of religion and its branches, and the science that comes from the book of Allah swt. The second is the *farḍu kifāyah* science, that is, the one used to facilitate worldly affairs, such as arithmetic, medical science, engineering, agricultural sciences, and industry (Alwizar 2015, 143).

If viewed from the aspect of importance, clearly Al-Ghazali reminded of the importance of integrating between religious science as a compulsory science that

will lead people to the salvation of the hereafter and secular science as a provision to maintain the sustainability of human beings and all creatures that exist on earth.

4. Developing an Ideal Model of Pesantren

The model of an ideal pesantren based on Al-Ghazali’s thoughts offered as an alternative model of the future pesantren education is a model developed with theoretical and empirical foundations as described in the following explanation.



Bagan 70. Platform for the development of an ideal pesantren model

5. Empirical Basis

The first is the style of religious thinking of the community. Basically, the style of religious thinking can be divided into three, namely exclusive, inclusive, and liberal. This style of thinking does not see whether the society is a conservative or modern society. This fact is reinforced by the Rahmat’s research on the college students that 52, 7% of respondents are exclusive in religious thinking, 26.4% are inclusive, 7.3% are liberal, and 13.6% are unclear (Rahmat 2012, 25). This shows that even the students who should be able to think moderate are still exclusive in religious hinking. Their association with either modern or traditional age does not guarantee the inclusiveness of their re- ligious thinking, vice versa with pesantren community, which is often categorized as a traditional society but in fact is even able to show an inclusive religious mindset. This is also reinforced by the results of a research by Bambang Pranowo concerning the attitude of intolerance at school, which according to the Lakip Survey, nearly 50% of students agree on radical acts in the name of religion (Suyatno 2013, 97).

The empirical condition of Inclusive Islam in pesantren, among others, can be seen from a research by Ali Maksum. According to Maksum, both in modern and salaf pesantrens, the understood and actualized Islam is Islam that is inclusive, friendly, not rigid, and moderate, that is, Islam with different nuance and full of

multicultural values (Maksum 2015). In line with the inclusive Islamic education in pesantren, this indicates that pesantren also carries out peace education.

Francoise (2017, 60) maintained that to judge a pesantren as the source of peace education can be viewed by the number of its kyais and santris who are active in peace activities, for example in Gontor Modern Pesantren and most of pesantrens in Madura island, they are always contributing and participating in peace activities, they are active in national ceremonies, workshops on peace education, meeting about Pancasila as one of schools sub- ject, and learning exchange with other schools. The alumni of pesantren also use social media on the Internet to spread peace *da’wa*.

The empirical condition of the weakness and strength of pesantren (Rindanah 2013; Hidayati 2017, 9; Maksum 2015, 84–94) is presented in table 1.

The practice of education in both pesantrens, i.e. salaf and khalaf, has weaknesses and strength. If examined more carefully, even the weakness has the opportunity to become strength. From the above description, at least we can sum up the following aspects.

Table 21. *The weakness and strength of salaf (traditional) pesantren*

Weaknesses	Strengths
– Closing itself to the changing times, and being conservative in responding to modernization – More emphasizing the fiqh, tasawuf and grammatical sciences centered on the classic books – Emphasizing rigid and literal translation – There is a decrease in the quality and quantity of the salaf pesantrens – The use of traditional learning methods such as sorogan, bandungan (halaqah), wetonan and memorization	– A strong reverence of the santris for the kyai – The right place to create Islamic cadres with noble character and qualified to religious studies, such as fiqh, tasawuf, or grammatical sciences – As a central place to study the religious sciences – An educational place with no social strata
– Lack of emphasis on the importance of reading and writing – The dominant role of kyai as the main source of learning	– Teaching the spirit of democratic, tolerant, cooperative, unified, equal, confident and courageous life – An inclusive Islamic education

Table 22. *The weakness and strength of khalaf (modern) pesantren*

Weaknesses	Strengths
• Lack of typical characteristics of pesantren as an indigenous educational institution in Indonesia • The religious sciences are no longer given • There are significant changes in the system, methods, and curriculum of pesantren • Classical instructional system of learning (class-room teaching) and integrated curriculum are adopted with certain adjustments • Open to respond the changing times	➤ intensively as in salaf pesantren ➤ Lack of face-to-face interaction with kyai because there are ustadhs who are asked to take care of the santri. From here, inner contact between the santri and the kyai will be difficult ➤ There are significant changes in the system, methods, and curriculum of pesantren ➤ Classical instructional system of learning (class-room teaching) and integrated curriculum are adopted with certain adjustments ➤ Open to respond the changing times

First is related to institution. The shutting-out from the outside world for the salaf pesantren and the loss of identity for the khalaf pesantren are indeed the main institutional weakness of pesantren. This condition is obviously contrary to *fikrah* (concept) or *harakah* (movement) of pesantren as an Islamic education institution in the archipelago. This means that if referring to the *fikrah* and *harakah*, pesantren has a great opportunity to become a world-class educational institution.

In this case, the attitude that should be maintained by pesantren in order to develop and internationalize itself as a world-class educational institution is that pesantren should prioritize the moderate (*tawāṣut*) *fikrah* with the orientation of making improvements as its *harakah*, not just imitate from the outside world. That is, pesantren as a sub-system of the national education should quickly respond to the changes and dynamics of the demands of the world, both from the aspect of Islamic religious education and from secular sciences and technology. However, the pesantren should not abandon its typical identity.

Second is related to the curriculum. The curriculum aspect meant here is the content or the material as a product of the methodology; it is a way of achieving the truth from science. Here is the explanation. *Third* is related to the content or material. Curriculum in educational institutions is the main menu that describes the profile of graduates in relation with the market. Most salaf pesantrens emphasize the *fiqh*, *tasawuf*, and grammatical sciences a.k.a religious sciences with traditional learning method. In the other hand, the khalaf pesantrens give less emphasis on religious sciences.

In this sense, thinking of *tawāsut* or moderate way becomes important, given the importance of pesantrens particular and Islamic educational institutions, in general, today as they are expected to become an alternative or solution for morality problems in the society. Through a good, focused and deep Islamic education, such problems can be disallowed. However, pesantren must also redesign the curriculum, especially related to the science and technology that became the booster of world civilization. This means that curriculum integrating science-technology with religious education will become a crucial factor of the rise of Islamic education, especially the pesantrens in Indonesia.

Fourth is related to methodology. The methodology should consider the ability and characteristics of the santri, such as *sorogan*, *bandungan*, *baḥṡ al-masā'il* and so forth. The educational system should facilitate the characteristics of learners. *Fifth* is related to the educator or kyai. Kyai is the key figure as he becomes the main source of learning in pesantren. The kyai is considered to be as the heir or successor of the prophet. That is why the figure of kyai is usually a knowledgeable man. Islam as a religion that upholds the truth highly appreciates people who are knowledgeable; they place a high rank in the sight of God. This means that the respect is not caused by the physical appearance of the kyai, but the ownership of science and knowledge. In education, anybody or anything having valid instructional information can be a source of learning, and the kyai or even the santri is no exception.

Sixth is the financial independence of pesantren. The chance owned by pesantren to be a world-class education model also depends on its independence financial matter, such as in Pesantren Sidogiri of Pasuruan. As one of the top twenty pesantrens in Indonesia, this salaf pesantren still maintains the educational system from Madrasah Diniyah (MD) up to the university level or Ma'had Ali named Tarbiyatul Muallimin. The pesantren's trademark is found in the financial independence as it has a business built by the pesantren, such as a minimarket (Mart) named Koperasi Sidogiri, a financial institution called *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT), and many other businesses.

According to the data of the Ministry of Religious Affairs in 2003-2006, of the 16,015 pesantrens in Indonesia, 13.23% is concerned with trade, 15.03% with agribusiness, and 10.92% with handicrafts (Sudibyo 2011, 55-57). Similarly, pesantren in Muslim minority areas like in Papua, in addition to religious knowledge, pesantren also equips entrepreneurship skills, such as in agriculture,

plantation and fishery as the main choice, and cooperatives and shops, farms, and buying and selling as the special options (Wekke 2017, 20).

Based on some empirical facts above, we can conclude things as follows:

First, Islamic education in Indonesia through the existing regulations become the right for every Indonesian citizen who is Muslim and can be obtained through various levels, paths and types of education. This means that the government has improved the service of Islamic religious education for its adherents. More specifically, because Islam is the religion of the majority, then Islamic religious education should be a pioneer for the implementation of religious education that is inclusive, peaceful and increasingly strengthens brotherhood not only in the name of nation, state, or religion but also in the name of God creatures in charge of prospering this beloved earth. In this case, the religious educational institution which consistently carries out its education process is the pesantren. In other words, pesantren is an inclusive religious education. This fact will open the eyes of the world that it is the pesantren that teaches how to respect differences (*ṣuḥbah*), including religion. It obviously refuses the assumption that pesantren produces terrorists.

Second, campus as one of the institutions that can provide religious education services, either through curricular or through extracurricular activities, is not automatically able to guarantee the formation of students who have an inclusive mindset. This means that the inclusive religious education remains in the pesantren. *Third*, pesantren as an Islamic educational institution has its own peculiarities. The *salaf* labeling does not always indicate that a pesantren is not able to reconcile with modernity. From this perspective, pesantrens in Indonesia have the opportunity to be developed into a world-class educational institutions by demonstrating its ability to educate their santri to be a person who has a high fighting spirit (entrepreneur), in addition to economic power built by the institution, i.e. pesantren (entrepreneur institution). This means that pesantren is an entrepreneur institution that not only trains the santri to be a true entrepreneur but also serves as an entrepreneur institution to finance the institution and empower the santri and the surrounding community.

Fourth, pesantren, especially the khalaf pesantren, offers programs needed by the international community, i.e. secular sciences, in addition to religious science. This means that pesantren is an educational institution that balances human needs, that is, the secular science developed for worldly orientation and

the religious science learned to prepare them to live in the world of immortality, i.e. life of the hereafter. This way, pesantren serves as the provider of secular and religious education.

Fifth is related to the kyai position and the method of education in pesantren. In instructional paradigm, the kyai position as the educator cannot be replaced by anyone or anything. This is because he is responsible for the truth of science-knowledge, in addition to the role model or *uswah ḥasanah*, for his santri. He does not restrict the rights of his santri in learning activities in pesantren. Here, the kyai uses a learning method that empowers the santri's skills, such as *sorogan*, *bandongan*, *baḥth al-masā'il*, *ḥiwār*, *uswah ḥasanah*, and so on. This is evident that pesantren is able to develop an educational method that empowers its santri. This is in line with the paradigm of learning using a method as an external factor that contributes to the success of student learning. A method should give students the opportunity to learn and develop (student center learning).

In pesantren, the position of the kyai is not to dominate learning activities (teacher center learning), but to facilitate the empowerment of students and to clarify the truth of science. Kyai has the power of expert judgment and *uswah ḥasanah* so that his position can not be replaced by any sophisticated technology. Therefore, it can be concluded that pesantren places the students as center of learning with the use of empowering methods, while the kyai or teacher serves as expert judgment and *uswah ḥasanah* irreplaceable by any technology.

Based on the analysis of these empirical conditions, it is recommended that pesantren has the opportunity to be developed into an ideal model of pesantren. This means that the re-design of an ideal model of pesantren based on empirical facts is an offer as well as an answer to various issues related to the challenges of the changing times, especially related to religious education, religious life, and human civilization. Several reasons are provided as follows:

First, public is becoming aware of the importance of religion as a solution to the various problems faced by humans due to the negative impact of the progress of Science and Technology. *Second*, world citizens are becoming aware of the importance of creating world peace. This mission can start with an inclusive religious education that will produce graduates that appreciate diversity and are able to live peacefully in diversity. This situation will ensure the human responsibility as caliphate on earth. *Third*, age of the earth that is getting old and porous because it is always undermined by human greed will be relatively longer

if humans do *rejuvenation of the earth*. This can only be realized if humans have a high work ethic and fighting spirit (entrepreneurship) to care for the earth for its survival and all creatures that are in it. *Fourth*, economic power as one of the pillars of world education will be realized from the great contribution of the educational model given by pesantren that teaches the economic independence, namely economic entrepreneurship.

The result of this empirical study is an ideal model of pesantren with characteristics of inclusive religious education, balanced secular and religious sciences, and entrepreneurship. It can be applied in any part of the world to create inclusive, religious, genius, and entrepreneurial graduates.

6. Theoretical Basis

The first theoretical basis deals with the universalism of Islam. One of the features of Islamic thoughts in Indonesia is internationalism or universalism of Islam. The idea of internationalism or universalism of Islam argues that Islam is essentially universal. Therefore, it is a fixed *dictum* (Qodir 2004, 46). This means that Islam as a universal religion has the nature to be accepted by citizens of the world. Its teachings can be contextualized in all the matters of human life, including pesantren education.

The second deals with the religious attitude. In general, religious attitudes toward the religion of others can vary. In this case, Hans Kung points out four categories of people's attitudes towards other religions. He calls them *fort strategy*, *ignoring strategy*, *embracing strategy*, and *ecumenical strategy*. In *fort strategy*, it departs from the assumption that only one particular religion is true, while other religions are not. Therefore, religious peace will only be achieved through the guarantee of one particular religion.

In *ignoring strategy*, it departs from the assumption that the essence of truth is essentially non-existent, because all religions are essentially correct in their own way. Therefore, religious peace will be best achieved when differences and contradictions are ignored. In *embracing strategy*, it departs from the assumption that only one religion is true, and all the religions that have developed in history have some truth in them. Therefore, religious peace will be best achieved when there is integration of all religions. In *ecumenical strategy*, it departs from various religious abuses that have occurred so far. It is related to the humanity perspective before God, the Absolute.

Of the four strategies above, it is ecumenical strategy that is relatively capable of providing solutions to the problems of interreligious relationships. This strategy uses humanitarian criteria as a tool to relate with adherents of other religions. In other words, inclusiveness in the interreligious relation can be practiced through ecumenical strategy. This is because the inclusive religious attitude is very important in a very diverse society. This means that inclusiveness becomes a manifestation of tolerance in a plural society, including religious tolerance: “... *religious tolerance is asking for the willingness to allow different parties to the implementation and development of worship place...*” (Suryono 2016, 408).

The third deals with pesantren as an inclusive Islamic education in the Archipelago. Pesantren is an Islamic educational institution that shows the existence of Islam in the Archipelago. This is because the penetration of Islam Nusantara itself is manifested through a process of the embodiment of Islamic values from local cultures. In fact, Islam Nusantara is built by injecting Islamic values into the local cultures, taking Islamic values to enrich the local culture, or filtering the cultures to fit the Islamic values. The process is possible because in Islam there is a principle of fiqh *al-‘adat al-muḥakkamah*, that is, custom may become a law, in addition to the development of understanding the *naṣ*, al-Quran and Hadith. The principles of fiqh and such a development are solely aimed at the attainment of *maqāṣid al-sharī‘ah* (the purpose of the sharia), namely the realization of the benefit (*maṣlaḥah*) of humans in the world and the hereafter. It includes the five main principles (*al-kulliyāt al-khams*), namely *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-māl*, and *ḥifẓ al-‘ird* (Mustofa 2015).

This means that Islam Nusantara occurs through the process of acculturation of Islamic culture with indigenous culture. In this context, Karim categorizes the acculturation of Islamic culture into three phases, i.e. natural, educational and organizational (Karim 2007, 147–50). In (1) the natural phase, Islam brought its cultural values through the traders who came to the Archipelago with the main goal to trade, besides to spread religious teachings. In (2) the educational phase, Islamization was conducted by preparing cadres, i.e. *muballigh* or preachers due to the need to spread Islam to all corners of the Archipelago. This was done through Islamic schools and pesantrens, so that the cultural mixing occurs only between the Islamic education and the indigenous culture. Finally, (3) the organizational phase is the implication of the second phase. While the establishment of Islamic

schools and pesantren was usually done in the sub-urbs, those who lived in the city took a different way.

Those who lived in the city established madrassas or Islamic schools that were built by Islamic institutions, such as Muhammadiyah, Persis, NU and so on, in a modern system. As an organization, there must be rules that must be met, such as matters related to organization, administration, communications, management, finance, and so forth. Many of them were adapted from Western culture. This means that the process of establishing Islamic institutions or organizations is a process of mixing between Western culture and Islamic culture filtered carefully. This led to a new modern way of life.

The second theory is presented by Uka Tjandrasmita (2009, 21). According to him, the Islamization process in the Archipelago takes place through a diverse network that naturally benefits each party, i.e. the Muslims who come and spread Islam to various places in Malay (archipelago) and the people who accept or convert to Islam as their religion. Broadly speaking, the spread of Islam and its process can be done through various channels, such as trade, marriage, bureaucracy, education, sufiism, art, and others.

The fourth deals with Al-Ghazali's thought, i.e. *shak*, *tawāḍu'*, *ṣuḥbah*, *mukhtalif al-alwān* and the balanced worldly and heavenly sciences. Besides theories mentioned before, other reference mentions that the pattern of Islam Nusantara is strongly influenced by the thoughts of Al-Ghazali, especially in tasawuf characterized with the polite attitude and the reduction of legal-formal attitude in Muslims life (Ghazali 2016). This can be used as a capital in Indonesian education to produce an output that always appreciates the differences and pluralism in the society. This means that pesantren as an Islamic educational institution capable of forming output or graduates with attitude to always appreciate the various differences and plurality is an educational institution capable of implementing the inclusive education.

In addition to the polite attitude, Al-Ghazali's second thought that we can refer to in this context is *shak* or skeptical. *Syak* is a term used by Al-Ghazali describing his situation at that time, that is, when he had reached the highest phase of the achievement of worldly existence. *Shak* meant by Al-Ghazali is a skeptical-methodological attitude. *Syak* or being skeptic in the process of truth-seeking is a condition that should be fulfilled before one obtains valid proof of truth. This way, the truth will be a valid science.

Shak will also drive the truth seekers to always innovate to develop science in scientific norms in line with religious doctrines which are transcendent. In fact, shak will put rationality as a balancing dimension of the transcendental science. With this shak, the chance to develop science and technology based on the Quran in order to prosper and glorify the earth will be possible.

In line with skeptical-methodological attitude, tawāḍu‘ is the next attitude to be owned by learners, scientists, and Muslim society in general. Tawāḍu‘ meant by Al-Ghazali refers to object, not subject, that is, to be submissive to the truth, not to the person. As long as the person has the truth, we are obliged to listen to him. If this attitude is developed within the context of pesantren education, obedience to the truth becomes possible.

Although shak and tawāḍu‘ have been internalized, but *ṣuḥbah* or togetherness is not manifested in a pluralistic life, peaceful life on earth will not be realized. Al-Ghazali in this case pays great attention to *ṣuḥbah*. In fact, *ṣuḥbah* becomes a characteristic of human beings. In a cultural context, a person is said ‘cultured’ if he is able to live in togetherness, and this togetherness will not be achieved without recognition of the diversity that exists in society. Therefore, it is important to take recognition of the existing diversity.

In this case, Al-Ghazali teaches gentle and polite attitude, not a hard and violent one. God is presented as not only the Firm Essence as the fiqh scholars declare, but also the Most Gracious and Most Merciful. Amid the tendency of a group of Muslims who like to preach Islam through violent ways, the doctrine of Sufism that Al-Ghazali presents is very relevant. In the view of Al-Ghazali, if God is the Beloved, man is the *Sālik*, who is walking towards God. Therefore, *ṣuḥbah* can be formed if the humans have an attitude of *mukhtalif al-alwān* (recognition to differences).

The five thoughts introduced by Al-Ghazali will be more perfect if Muslims place those thoughts while integrating the worldly science which is *farḍu ‘ain* with the heavenly science which is *farḍu kifāyah* (Alwizar 2015, 143). The task carried by humans as *khalīfah fi al-‘arḍ* will be realized if they are competent on both sciences. The mastery of religious science becomes a primary need since they are His creature, so that religious science is required in order to be able to understand what His will is. Moreover, as *khalīfah fi al-‘arḍ*, mastering those to sciences is a must to carry out the main task to spread prosperity on earth.

These six thoughts of Al-Ghazali are specifically able to be an inspiration for the efforts of Muslims in the world to formulate an educational institution that will be able to produce its graduates become *khalifah fi al-'ard*, that are able to make the earth safe, peaceful, and prosperous, and to make the inhabitants listen to the essence truth.

Based on the empirical-theoretical basis above, we find the following prepositions: (1) pesantren is an inclusive religious education organizer, (2) pesantren is an entrepreneurial institution, (3) pesantren is an Islamic educational institution that balances between secular and religious science education, (4) the pesantren puts students as center of learning using the empowering methods, while the kyai or teacher serves as expert judgment and role model or *uswah hasanah* irreplaceable by any sophisticated technology, (5) the polite style of Al-Ghazali's thought which emphasizes the *shuhbah* and *mukhtalif al-alwān*, and upholds the methodological skepticism and *tawāḍu* in the scientific context will be able to offer the development of high-tech science that is friendly to the difference of creatures and the existence of the earth. It is a balance between the secular science which is *farḍu kifāyah* and religious science which is *farḍu 'ain*. Gradually, it will be the inspiration of the implementation of an inclusive and science-based education equipped with religious values, and (6) the high demand for good graduates needs educational institutions that produce an inclusive, religious and intelligent person having entrepreneurship spirit.

From these prepositions, the conceptual model which is composed and offered is the ideal model of pesantren.

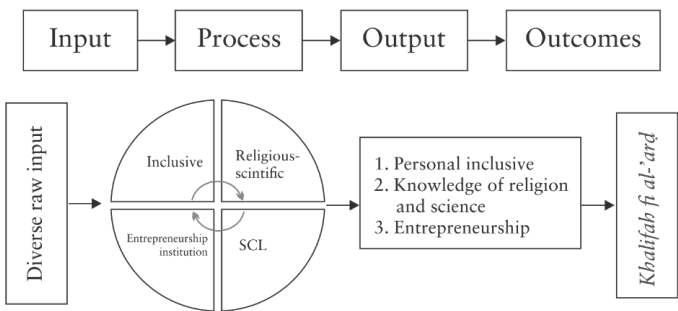


Figure 71. The ideal model of pesantren

As a new conceptual model, this model has characteristics: inclusive, religious-scientific, student-centered learning and entrepreneurial institution in

order to support the management system to ensure the development of the ideal model of pesantren.

Inclusive meant here is pesantren as an educational institution that represents the world's diverse citizens in term of race, nation, religion, etc. This is based on the inclusive Islamic religious education resulting in graduates with inclusive religious attitudes that lead to the peaceful world.

Religious-scientific means that the pesantren as an educational institution balances the secular science, such as technology, with the religious sciences that are based on the attitude of developing science and technology using skeptic-methodological approach and tawadlu attitude oriented for life not only in this world but also in the hereafter. With these characteristics, pesantren will be able to produce a balanced graduate between the mastery of religious sciences and general sciences. Science and technology are mastered and developed while maintaining religious values. This way, ownership of science and technology which is based on religious morals will make people trustworthy *khalifah* on the earth, not the destroyers of the earth. This can be fulfilled if the pesantrens conducts their education to the higher education level, university.

Student-centered learning meant here is that in carrying out the process of education, pesantren uses the learning paradigm. Pesantren puts students as the center of learning with the use of empowering methods, while the kyai or teacher serves as expert judgment and role model or *uswah hasanah* irreplaceable by any sophisticated technology.

Entrepreneurial institution means that pesantren is an institution that educates its santri to have entrepreneurship spirit, and proves itself as an entrepreneurial institution. Therefore, pesantren will be able to produce graduates who are self-motivated and always creative to realize prosperity on the earth. The ideal model of pesantren that is consistently carried out is expected to produce an output that characterizes an inclusive, religious and intelligent person having entrepreneurship spirit and is able to responsibly handle the duty as *khalifah fi al-'ard*.

9. Conclusion

Based on the research findings and discussion, this study concludes that pesantren promotes inclusive religious education and entrepreneurial learnings. Such a model of pesantren keeps a balance between secular sciences and religious sciences,

puts students as the center of learning, and uses empowering methods, while the kyai or teacher serves as expert judgment and role model or *uswah hasanah* irreplaceable by any sophisticated technology. The pesantren adopts Al-Ghazali's thoughts emphasizing the *ṣuḥbah* and *mukhtalif al-'alwān*, and upholds the methodological skepticism and *tawāḍu'* in the scientific context.

It is believed that the thoughts will be able to develop a high science-technology that is friendly to the plural society and the maintenance of earth. It also becomes the inspiration for the implementation of an inclusive and science-based education. This matches with the high demand for the needs of graduates of educational institutions to produce an inclusive, religious and intelligent person having entrepreneurship spirit. This conclusion is then developed conceptually into an ideal model of pesantren which has four characteristics, namely: (1) inclusive religious education, (2) balanced religious and scientific development, (3) student-centered learning and (4) entrepreneurial institution. These four characteristics will make promising output or graduates of the ideal model of pesantren, which are inclusive, religious and intelligent person having entrepreneurship spirit as *khalifah fi al-'arḍ*.

Daftar Referensi

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. n.d. *Al-Munqidh Min Al-Ḍalāl*. Andalusia: Dār al-Andalus.
- . 1975. *Ihya' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Alwizar. 2015. "Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali." *Jurnal Potensia* 14 (1).
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Francoise, Jeanne. 2017. "Pesantren as the Source of Peace Education." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25 (1): 41. doi:10.21580/ws.25.1.1161.
- Ghazali, Abdul Moqsih. 2016. "Corak Tasawuf Al-Ghazali Dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang." *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam* 13 (1).
- Hidayati, Noorazmah. 2017. "Pemertahanan Kekhasan Pengajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan (Telaah Aspek Linguistik

Dan Sociolinguistik)." *Madania* 21 (1).

IAIIG. 2014. "SK Rektor Tentang Core Values Keghozalian." Ci-lacap: IAIIG Cilacap.

Karim, M. Abdul. 2007. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Maksum, Ali. 2015. "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (1): 84–93.

Mustofa, Saiful. 2015. "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Islam Berkemajuan: Melacak Akar Epistemologis Dan Historis Islam (Di) Nusantara." *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10 (2): 405–34. doi:10.21274/epis.2015.10.2.405-434.

Permenag. 2012. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam." Jakarta.

Qodir, Abdul. 2004. *Jejak Langkah Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indoensia*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahmat, Munawar. 2012. "Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa (Eksklusif, Inklusif Dan Liberal)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Talim* 10 (1).

Rindanah, Rina. 2013. "Geneologi Pesantren Benda Kerep Dan Pesantren Buntet Cirebon: Suatu Perbandingan." *Holistik* 14 (2): 215–29.

Sudibyo, Rahmad Pulung. 2011. "Integrasi, Sinergi Dan Optimalisasi Dalam Rangka Mewujudkan Pondok Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim Indonesia." *Jurnal Salam* 13 (2): 49–65.

Suryono, Hassan. 2016. "The Reconstructio of Religious Education into community's Legal Life." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24 (2): 401. doi:10.21580/ws.24.2.1087.



D. Membangun Sistem Kurikulum, Active Learning Dan Paradigma Kreatif Bagi MADIN dan TPQ

1. Latar Belakang

Sebelum diakui secara formal, madrasah dengan berbagai macam bentuknya di Indonesia secara real telah mampu memberikan sumbangan besar bagi bangsa ini dalam menyediakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian agama Islam khususnya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pemerintah mulai memberikan pengakuan secara formal sejak tahun 1909 (Madrasah Adabiyah Padang sebagai yang pertama diakui) hingga saat ini. Bahkan eksistensi madrasah semakin diperhitungkan dan diperkuat dengan Permenag N0 3 tahun 2012.

Sesuai dengan Permenag No.3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan maka Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu : (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) **peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan**; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dari lima kebijakan ini, kebijakan ke tiga yang sesuai dengan konteks pembicaraan saat ini, maka pemerintah mengeluarkan program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam yang outputnya berbentuk: 1) Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, 2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, 3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren 4) Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren.

Dari program yang dicanangkan Kemenag RI tersebut, maka peningkatan mutu layanan Madin dan TPQ sebagai bentuk real dari lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia bukan menjadi tawaran lagi tetapi sebuah keniscayaan, mengingat

Oleh karena iklim yang berbeda, tuntutan yang berbeda maka sudah semestinya madin dan lembaga pendidikan Alqur'an saat ini harus terus berbenah agar mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat. Salah satu hal yang urgen untuk dipersiapkan secara matang adalah kurikulumnya. Karena wajah madin dan TPQ tergantung dari kurikulum yang ditawarkan

serta yang paling penting adalah *kemampuan melaksanakannya*, apalagi dalam konteks perubahan paradigma belajar saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan memperbincangkan hal-hal: a) kesejarahan madrasah, agar para pelaku pendidikan keagamaan Islam tidak lupa dari ghirah awal yang melatarbelakangi munculnya madrasah, b) sistem kurikulum madin dan peran kreatifnya, mengingat madrasah menjadi subsistem dari pendidikan nasional, c) Active Learning Sebagai Varian Kurikulum dan d) Paradigma Kreatif Dalam Konteks Madrasah

2. Kesejarahan Madrasah

Secara etimologi, kata “madrasah” terambil dari akar kata “*darasa-yadrusu-darsan*= belajar”. Kata madrasah sebagai *isim makan*, menunjuk arti “tempat belajar”. Sedangkan padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah (Supani, 2009). Sedangkan secara terminologi, menurut Para ahli sejarah pendidikan seperti A.L.Tibawi dan Mehdi Nakosteen yang dilansir oleh Dirjen Pendis (2012), istilah madrasah (bahasa Arab) merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam (klasik) pra-modern. Artinya, secara istilah madrasah di masa klasik Islam tidak sama terminologinya dengan madrasah dalam pengertian bahasa Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam menulis kata tersebut secara bervariasi misalnya, *schule* atau *hochschule* (Jerman), *school*, *college* atau *academy* (Inggris). Nakosteen sendiri menerjemahkan madrasah dengan kata *university* (universitas). Ia juga menjelaskan bahwa madrasah-madrasah di masa klasik Islam itu didirikan oleh para penguasa Islam ketika itu untuk membebaskan masjid dari beban-beban pendidikan sekuler-sektarian. Sebab sebelum ada madrasah, masjid ketika itu memang telah digunakan sebagai lembaga pendidikan umum. Tujuan pendidikan menghendaki adanya aktivitas sehingga menimbulkan hiruk-pikuk, sementara beribadat di dalam masjid menghendaki ketenangan dan kekhusukan beribadah. Itulah sebabnya, kata Nakosteen, pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan agama di dalam masjid hampir-hampir tidak dapat diperoleh titik temu. Maka dicarilah lembaga pendidikan alternatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum, dengan tetap berpijak pada motif keagamaan. Lembaga itu ialah madrasah.

Masih dalam sumber yang sama, ahli lain seperti George Makdisi berpendapat bahwa terjemahan kata “madrasah” dapat disimpulkan dengan tiga perbedaan mendasar yaitu: *Pertama*, kata universitas, dalam pengertiannya yang paling awal, merujuk pada komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswa, *Kedua*,

merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah pendidikan dasar (pendidikan tinggi) berlangsung. *Ketiga*; izin mengajar (ijazah *al-tadris, licentia docendi*) pada madrasah yang diberikan oleh syaikh secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan.

Erat kaitannya dengan penggunaan istilah ""madrasah" yang menunjuk pada lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudian istilah "madrasah" juga mempunyai beberapa pengertian di antaranya: aliran, mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli pikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiranyang sama. Munculnya pengertian ini seiring dengan perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang di antaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan pandangan atau aliran dan mazdhab pemikiran (*school of thought*) tertentu, seperti madrasah Safi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Hal ini juga berlaku bagi madrasah-madrasah di Indonesia, yang kebanyakan menggunakan nama orang yang mendirikananya atau lembaga yang mendirikananya.

Dalam konteks keIndonesiaan, istilah madrasah tetap dipakai dengan kata aslinya, yaitu madrasah, walaupun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah sendiri.

3. Sistem Kurikulum dan Peran Kreatifnya

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, keberadaannya tidak terlepas dari kurikulum yang akan ditawarkan. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (UU Sisdiknas, 2003).

Sebagai sistem, maka kurikulum memuat komponen tujuan, materi, metode, organisasi dan evaluasi. Komponen sistem ini bekerja secara *terintegrasi dan interdependency*. Dalam menjalankan sistemnya, kurikulum juga memiliki peran-peran sendiri, yaitu: a) peranan konservatif, b) peranan kritis dan evaluatif dan c) peranan kreatif (Hamalik, 2009).

Sesuai konteks pembicaraan ini, maka kurikulum bisa menjalankan peran kreatifnya jika kurikulum mampu mengeksplor secara kaya sumber-sumber

kurikulum itu sendiri. Sedikitnya ada tiga sumber kurikulum menurut Herrick masih dalam Hamalik yaitu pengetahuan, masyarakat dan peserta didik.

Pengetahuan sebagai sumber kurikulum yang pertama, merupakan bahan yang akan disampaikan atau diperbincangkan bersama dengan peserta didik. Mengingat sifat pengetahuan yang selalu dinamis, terus mengalami evolusi maka akan menjadi kesulitan sendiri jika pengetahuan-pengetahuan tersebut disusun sebagai kurikulum yang akan ditawarkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, butuh kreativitas dari penyelenggara pendidikan dalam proses penyusunan kurikulum tersebut. Kreativitas yang dimaksud adalah kreativitas untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tersusunnya kurikulum tersebut seperti pendidik, para ahli bidang studi, tokoh masyarakat, orang tua, maupun administrator.

Kedua, masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sekolah/madrasah adalah agen masyarakat yang memiliki tugas antara lain untuk meneruskan warisan-warisan budaya sekaligus memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana memilih dan mengembangkan nilai-nilai yang dianggap memiliki daya tangkal bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang, dalam proses menyusun kurikulum itu sendiri. Di sinilah diperlukannya kreativitas dalam menyusun kurikulum.

Ketiga, individu sebagai sumber kurikulum. Kurikulum sesungguhnya disusun dengan maksud untuk membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Sedangkan tiap anak memiliki kemampuan, sifat, serta kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, butuh kreativitas lebih untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik individu peserta didik.

4. Active Learning Sebagai Varian Kurikulum

Perguliran evolusi pengetahuan sebagai sumber kurikulum amatlah dinamis. Termasuk di dalamnya teori tentang belajar yang mengalami evolusi dari *teaching* ke *learning* dan *learning* ke *learn*. Masing-masing istilah ini memiliki konsekuensi amat tajam pada kedudukan peserta didik, pendidik dan kurikulumnya sendiri dengan berbagai komponennya tentunya.

Dalam praktik pendidikan di Indonesia, konsep pertama sudah mulai ditinggalkan bergulir ke konsep kedua dan mulai memasuki konsep ketiga. Persoalannya ketika memilih salah satu dari konsep-konsep di atas, maka harus didukung oleh kesiapan setiap unsur yang terlibat. Jika *active learning* (AL) sebagai

varian kurikulum, tepatnya berada pada unsur metode/strategi akan diterapkan di madin/TPQ, pertanyaannya adalah siapakah merubah paradigma atas 3 konsep tadi?.

Secara sederhana, *AL* yaitu suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif (Hisyam Zaini, 2002). *AL* berangkat dari filsafat konstruktivisme yang menempatkan peranan pancaindera secara lebih optimal, karena penggunaan hanya salah satu indera memberikan reduksi meaning substansi pembelajaran pada peserta didik.

Di dalam *AL*, kedudukan siswa sangat menonjol, guru dan sekolah/madrasah dipandang sebagai pihak yang bisa memfasilitasi siswa, jika menginginkan siswanya keluar sebagai output yang *master*. Jika madin/TPQ ataupun apalah nama lembaganya siap dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut, maka tidak mustahil *AL* juga menjadi wacana alternatif yang memiliki tingkat probabilitas tinggi untuk menuai sukses di madin/TPQ.

Di sisi lain, karena realitas madin di Indonesia baik itu formal maupun non formal, keberadaannya diatur oleh pemerintah, maka konsekuensi atas aturan tersebut antara lain ada pada persoalan kurikulum yang juga sudah diatur atau distandarkan. Pengaturan kurikulum madin sesuai Permenag NO.3 tahun 2012 pasal 9 dan 10 terdiri dari: a) kurikulum keagamaan Islam dan b) kurikulum pendidikan umum.

Kurikulum keagamaan Islam minimal memuat al Qur'an, Hadits, Tauhid, Fiqh, Akhlak, Tarikh dan Bahasa Arab bagi diniyah dasar. Sedangkan diniyah menengah pertama memuat Al Qur'an, Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits, Tauhid, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlak Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu Shorof, Balaghah dan Ilmu Kalam. Adapun kurikulum keagamaan Islam untuk diniyah menengah atas sebagaimana diniyah menengah pertama ditambah dengan Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq dan Ilmu Falaq.

Kemudian untuk kurikulum pendidikan umum bagi diniyah dasarnya minimal Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS. Hal yang sama berlaku untuk diniyah menengah awal dengan menambahkan Bahasa Inggris. Demikian halnya dengan diniyah menengah atasnya selain menambah Bahasa Inggris juga wajib menambah Kewirausahaan.

Dalam menjalankan *process* pendidikan di madin/TPQ yang menggunakan bahan ajar sebagaimana diatur di atas, maka guru harus bisa mengkreasikan

process yang bermutu. Salah satunya lewat AL sebagai alternatif pilihannya, tentu saja dengan terlebih dahulu menyepadankan/menyesuaikan karakteristik siswa, tujuan, materi, waktu dan kemampuan sekolah.

5. Paradigma Kreatif Dalam Konteks Madrasah

Dalam era ekonomi kreatif seperti sekarang ini, semua komponen yang ada di dunia ini mutlak harus mengeluarkan jurus kreativitasnya agar bisa tetap eksis, tidak terkecuali adalah lembaga pendidikan macam madin dan TPQ. Kreativitas itu dibangun oleh madin dan TPQ tidak hanya dalam mengelola institusinya tetapi juga dalam kerangka untuk menghasilkan manusia-manusia kreatif yang berbasis spirit keislaman. Artinya kreativitas dalam konteks madrasah bisa dimaknai minimal dua, yaitu kreatif dalam menjalankan roda madin/TPQ maupun kreatif sebagai orientasi akhir untuk menghasilkan manusia-manusia kreatif.

Pertama, kreativitas madin/TPQ dalam menjamin pengelolaan lembaganya. Kreativitas dalam konteks ini perlu dilakukan oleh madin/TPQ untuk menjamin tingginya mutu madin/TPQ itu sendiri. Artinya dibutuhkan oprang-orang kreatif untuk bisa mengusahakan dan memberdayakan *resourch (seven M)* madin/TPQ. Pada konteks ini pula, maka madin/TPQ dituntut untuk mampu membangun (: baca mengembangkan) kurikulum yang mengedepankan aspek *creativity* sebagai *core bussines*-nya.

Kedua, kreativitas madin/TPQ dalam untuk menghasilkan manusia-manusia kreatif. Salah satu tugas lembaga pendidikan adalah bagaimana mengubah *human resourch* (sumber daya manusia/SDM) menjadi *human capital* (modal manusia). SDM memiliki dimensi pasif, sedangkan modal manusia memiliki dimensi aktif. Dimensi aktif dalam konsep modal manusia disebabkan dimilikinya dimensi kreatif oleh manusia itu sendiri yang di-*reinforce*- oleh proses pembelajaran.

6. Simpulan

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tanggungjawab tersebut tidak akan berat sebelah jika masing-masing pemegang amanat tersebut mampu memerankan sebagaimana mestinya. Pemeranan akan efektif jika kreativitas menjadi kekuatan utama untuk membangun sistem pendidikan yang bermutu. Sedangkan jantung dari sistem pendidikan yang bermutu adalah kurikulumnya. Madin/TPQ akan menunjukkan kemampuan

tersebut dimulai dengan kemampuannya untuk membangun sistem kurikulum yang berbasis kreativitas.

Daftar Referensi

- Depdiknas (2003) UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Dirjen Pendis (2012), *Kebijakan, Program Dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010-2014*.
- (2012). *Pengertian dan Karakteristik Madrasah*
- Hamalik, Oemar (2008), *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Supani (2009), *Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia*. Purwokerto: Jurnal INSANIA Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto
- Peraturan Menteri Agama NO. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan
- Zaini, Hisyam dkk (2002), Strategi Pembelajaran Aktive di PT. Yogyakarta: CTSD



E. *Manajemen Nafkah*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Imbas kemajuan zaman yang memberikan peluang kepada wanita dan timbulnya kesadaran para wanita untuk berperan di dalam masyarakatnya menyebabkan sekarang banyak wanita memilih jalur karir untuk membuat dirinya bermanfaat bagi masyarakatnya. Terlepas apakah wanita bekerja (;berkarir) untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Banyak kenyataan menunjukkan bahwa di luar rutinitasnya sebagai ibu atau istri bagi suaminya ternyata wanita juga bekerja di luar rumah.

Seiring dengan perkembangan pendapat baik yang pro maupun yang kontra terkait dengan kebolehan wanita terutama “wanita bersuami” untuk

berkarir di luar rumahnya. Ada berbagai *reasoning* yang dijadikan sebagai alat justifikasi untuk memperbolehkan dan atau melarang wanita untuk berkarir. Termasuk di dalamnya adalah justifikasi agama (;Islam).

Jika ditelusur jauh ke belakang, sebenarnya wanita karir sudah terjadi jauh sebelum era globalisasi. Dalam Nash Al Qur'an misalnya disebutkan tentang Ratu Bilqis sebagai perempuan luar biasa yang berprofesi sebagai pemimpin/ratu. Atau perempuan-perempuan masa Rosulullah sudah banyak yang mengambil peran di luar rumahnya, seperti Zainab dari Bani Aud menjadi dokter fisik (umum) dan dokter ahli mata, Umm al Hasan binti Qadi Abi Ja'far Al Tanjali sebagai dokter yang berpengetahuan luas, Nusaibah istri Zaid bin As yang mampu melukai 11 musuh di perang Uhud, Hindun binti Uthbah dan Hindun binti A. Harits bin Hisyam; pemain pedang mahir, Khadijah binti Khuwailid sebagai bisnismwan, Zainab binti Jahsh: penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan sebagai tukang rias pengantin (ahli kecantikan), Istri Abdullah ibnu Mas'ud dan Qillat Ummi bani Anwar seorang wiraswasta, dan Al shifa seorang sekretaris sekaligus orang dipercaya oleh Khalifah Umar untuk mengurus pasar di kota madinah (Munir, 2010: 51-54).

Di luar konteks atas boleh tidaknya wanita berkarir atau bekerja di luar rumah, maka persoalan selanjutnya muncul berkaitan dengan hak wanita terutama sebagai istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, jika si istri sendiri sudah bekerja. Ada banyak fenomena istri yang bekerja bahkan jauh sampai ke negeri seberang, sementara suami di tanah air hanya “ongkang-ongkang” bahkan lebih tragis sekedar menghabiskan hasil jerih payah istri adalah hal yang banyak sekali bisa dijumpai di sekitar kita.

Berangkat dari situasi dan kondisi seperti itu, maka penelitian dengan judul “Manajemen Mencari Nafkah Pada Keluarga Wanita Karir Dalam Perspektif Islam” ini menarik sekaligus krusial untuk dilakukan.

b. Definisi Operasional

Ada beberapa konsep yang harus didefinisikan secara operasional dan tegas sesuai konteks penelitian ini. Konsep-konsep yang dimaksud adalah:

1) Manajemen Mencari Nafkah

Ada dua konsep besar yang ada dalam pengertian manajemen mencari nafkah, yaitu manajemen sendiri dan mencari nafkah. Istilah manajemen

secara sederhana bisa diartikan sebagai proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan (Umiarso dan Gojali, 2011: 70). Atau manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Gitosudarmo dan Mulyono, 2001:8). Kemudian istilah Mencari Nafkah bisa dipisah menjadi dua, yaitu mencari dan nafkah sendiri. Kata mencari berarti mengupayakan agar memperoleh sesuatu. Sedangkan kata nafkah menurut Ulama madzhab Hambali diartikan sebagai “memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya (Ubaidi, 2007: 29). jadi yang dimaksud dengan manajemen mencari nafkah adalah aktivitas memenej atau mengelola suatu upaya memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan atau ditanggungkan kepada dirinya.

2) Keluarga

Keluarga adalah unit/satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat (Arifin, 1999: 80). Keluarga dalam konteks ini adalah suami/ayah, istri/ibu, anak dan atau kerabat.

3) Wanita Karir

Istilah wanita karir bisa ditelusuri dari makna kata karir terlebih dahulu. Kata karir dalam pengertian umum ialah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju (Khairiya, 2011). Sehingga wanita karir adalah seorang wanita yang memiliki pekerjaan khusus diluar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dan menekuni suatu bidang tertentu yang mendatangkan kemajuan. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar urusan rumah tangganya untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi operasional per istilah kunci yang sudah dilakukan ini, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah aktivitas pengaturan antara suami dan istri dalam hal berbagi mencari nafkah dalam megupayakan adanya kecukupan orang-orang yang ditanggungnya.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dicari jawabannya lewat penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Islam sesungguhnya memandang persoalan dasar atas kewajiban mencari nafkah keluarga?, 2) Bagaimana hak nafkah atas istri yang bekerja (berkarir) dari suaminya? Dan 3) Bagaimana manajemen mencari nafkah dalam keluarga yang istrinya bekerja (berkarir)?

d. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kewajiban dasar mencari nafkah keluarga menurut Islam, 2) Untuk menganalisis atas ada tidaknya hak nafkah atas istri yang bekerja (wanita karir) dan 3) Menemukan format manajemen mencari nafkah dalam keluarga wanita karir.

e. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam hal: 1) Memberikan gambaran tentang pandangan Islam yang sesungguhnya tentang kewajiban mencari nafkah keluarga, 2) Memberikan pemahaman akan perspektif kebenaran memahami agama yang bersifat *relatif* sesuai konteks kekinian termasuk persoalan hak nafkah dari suami untuk istri yang bekerja dan 3) Ditemukannya satu formula baru tentang manajemen mencari nafkah utamanya bagi keluarga yang notabene-nya istrinya juga bekerja.

f. Sistematika Penulisan Laporan

Secara umum sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. *Pertama*, bagian awal laporan. Bagian ini menampilkan berbagai halaman formalitas mulai dari halaman judul, kata pengantar, ucapan terimakasih, abstrak, dan daftar isi. *Kedua*, bagian tengah. Bagian ini merupakan inti atau badannya laporan penelitian, terdiri dari: bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 laporan hasil penelitian dan pembahasan serta bab 5 berisi kesimpulan dan saran. *Ketiga*, bagian akhir. Sebagai bagian akhir dari tulisan ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

2. Landasan Teori

a. Konsep Dasar Kewajiban Mencari Nafkah Dalam Keluarga

1) Nafkah

Ulama madzhab Hambali mengartikan nafkah dengan “memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya (Ubaidi, 2007: 29). Dari pendapat ini menunjukkan bahwa konsep nafkah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk bisa tetap eksis.

2) Landasan Kewajiban Mencari Nafkah Dalam Keluarga

Maraknya fenomena perempuan bekerja padahal mereka memiliki suami yang masih memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, memaksa kita berfikir kritis apakah sebenarnya dasar pijakan kewajiban mencari nafkah dalam keluarga. Sehingga dengan mengetahui dasar tersebut, maka akan jelas posisi perempuan yang bekerja, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Pada sebuah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata bahwa Rosulullah S.A.W bersabda “Kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggungjawab atas orang yang kalian pimpin”. Kelanjutan dari hadits ini juga terdapat pada sabda Rosulullah S.A.W “seorang *wanita* juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia bertanggungjawab atas anggota rumah tangganya (HR. Bukhari, Muslim, Abu dawud dan An Nasa’I dalam Al Jamal, 2003: 74).

Berdasarkan hadits tersebut, menjadi jelas sekali bahwa suami adalah penanggung nafkah utama dalam keluarga, dan istri adalah penanggung kedua. Artinya kewajiban mencari nafkah untuk keluarga asalnya adalah suami. Namun, jika pada situasi khusus secara syar’i penanggung utama tidak bisa menjalankan kewajiban itu, maka penanggungan mencari nafkah jatuh ke tangan istri. Dengan kata lain istri mencari nafkah hukum asalnya bukan wajib. Apalagi sangat jelas disebutkan dalam (Al Baqarah: 233) “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik “. Istri menjadi wajib mencari nafkah untuk keluarganya, terutama anak –anak dan suami, jika suami mengalami halangan secara syar’i.

3) **Pihak Yang Berkewajiban Mencari Nafkah Keluarga**

Menilik pada dasar awal jatuhnya kewajiban mencari nafkah dalam keluarga sebagaimana sudah dikemukakan di muka, maka bisa diidentifikasi pihak yang memiliki peluang memegang tongkat estafet untuk mencari nafkah keluarga, yaitu suami barulah istri.

Dalam pendapat lain sebagaimana yang dilansir oleh Ubaidi (2007: 64), maka alasan yang menjadikan suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah keluarga adalah:

...pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa sebab diwajibkan untuk menafkahi istri adalah kesiapan seorang istri menyerahkan dirinya kepada suami, bukan sekedar pelaksanaan akad nikah. Ini bersandar hadits yang diriwayatkan Aisyah yang dinikahi Rasulullah ketika masih berumur 6 tahun. Rasulullah menggaulinya dua tahun berikutnya dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau menafkahi Aisyah sebelum menggaulinya.

Dari sumber tersebut maka jelas bahwa munculnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya adalah semenjak suami menggauli istrinya.

b. Wanita (Istri) Bekerja/Berkarir

1) Konsep Dasar Wanita Karir

Pertama. Pengertian Wanita Karir. Karir dalam pengertian umum ialah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju (Khairiya, 2011). Sehingga wanita karir adalah seorang wanita yang memiliki pekerjaan khusus diluar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dan menekuni suatu bidang tertentu yang mendatangkan kemajuan.

Kedua. Alasan Wanita Berkarir. Di luar pengertian tersebut, menurut hemat penulis ada beberapa alasan yang menyebabkan wanita harus berkarir, seperti: a) memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (fisiologis), b) memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, c) memenuhi kebutuhan bersosialisasi, d) memanfaatkan ilmu dan lain sebagainya.

Ketiga. Manfaat dan Madharat Wanita Berkarir. Berkarir bagi wanita adalah sebuah pilihan. Sedangkan setiap pilihan mengandung konsekuensi. Konsekuensi ada yang mengandung nilai positif (manfaat)

dan ada yang bernilai negatif (madlarat). Manusia hanya berikhtiyar bagaimana manfaat bisa diperoleh dengan sebanyak-banyaknya, sedangkan madlaratnya bisa diminimalisir sedikit mungkin.

Paling tidak ada manfaat yang bisa diperoleh ketika wanita mengambil pilihan untuk berkarir di luar rumah, seperti: a) terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi jika suami memiliki kemampuan terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, b) wanita bisa mengaktualisasikan diri seoptimal mungkin, c) ukhuwah bashariyah semakin kuat, d) masyarakat tercerahkan dengan ilmu yang bermanfaat dari wanita karir dan masih banyak sesuai konteks yang melingkupi wanita karir.

Di sisi lain, madlarat juga bisa menghinggapi wanita yang berkarir, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya, jika karir yang ditekuni wanita keluar dari norma –norma yang berlaku di masyarakat khususnya norma agama. Wanita menjadi lupa akan kodratnya, keluarga menjadi hancur, anak-anak menjadi terlantar, masyarakat menjadi kisruh dan negara menjadi bobrok jika wanita karir tidak mampu menempatkan pada porsi yang benar.

a. Wanita Karir Dalam Islam

Keluar rumahnya seorang wanita untuk bekerja pada hakikatnya memang dibenarkan dalam syariat Islam. Tapi memang tidak semua bentuk pekerjaan boleh dilakukan oleh para wanita, hukumnya haram kalau wanita yang melakukannya. Sebaliknya, realitas syariah menetapkan ada juga begitu banyak pekerjaan yang justru haram dilakukan oleh laki-laki. Harus dikerjakan oleh para wanita. Maka kalau sampai para wanita dilarang mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi tugasnya secara syar'i, jelaslah kita telah menjerumuskan umat Islam ke dalam lembah yang diharamkan Allah SWT((Sarwat, 2009).

Sementara pemaknaan pro kontra atas diperbolehkan tidaknya wanita berkarir lebih karena alasan keluar rumahnya wanita akibat dari urusannya tersebut. Sementara dalil tentang diperbolehkan tidaknya wanita keluar rumah menunjukkan keragaman yang cukup bersinggungan, sebagaimana dalil berikut:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk pergi ke Masjid, sedangkan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (*HR Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan lafadz ini dari Abu Dawud*).

Dari Abdullah Bin Umar dia berkata, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang perempuan di antara kamu minta izin (untuk berjama'ah di masjid) maka janganlah mencegahnya". (*HR Al-Bukhari dan Muslim, lafadz ini dari Al-Bukhari*).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kamu mencegah kaum wanita untuk pergi ke masjid, tetapi hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian." (*HR Abu Dawud*)(*Sarwat, 2009*).

Ibnu Katsir berkata :” tetaplah mereka para wanita tinggal di dalam rumah, maka janganlah mereka keluar rumah melainkan ada keperluan syar’i ” (Tammimie, 1422).

Secara sekilas tampak ada perbedaan atas diperbolehkannya wanita keluar rumah. Namun jika ditelusuri lebih lanjut sebenarnya ada kondisi khusus yang menyebabkan wanita boleh keluar. Peluang inilah yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai rujukan wanita boleh berkarir dengan keluar rumah, diluar dasar ayat tersebut di awal tentunya. Bahkan Sarwat (2009) secara tegas menyatakan bahwa wanita itu haram keluar rumah tapi harus lebih banyak dikurung di dalamnya merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan salafus-shalih. Boleh dibilang mengurung wanita di dalam rumah adalah sebuah perkara bid'ah yang sesat. Karena para wanita masa itu bisa keluar (Sarwat, 2009). Bahkan jika kembali kepada tulisannya Munir, justru dalam Al Qur'an dan masa rosulullah serta sahabat wanita sudah melakukan kerja di area publik.

Disamping secara historis wanita boleh berkarir, keutamaan orang yang makan akan hasil kerjanya sendiri juga ada dalam hadits Nabi yang dikemukakan oleh Zaharuddin Abd Rahman,

dengan mengutip hadits Nabi (dalam Riwayat, Al-Bukhari, no 1966, Fath Al-bari, 4/306) bahwa :

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده

“Tiada seorang pun yang makan lebih baik dari orang yang makan hasil dari tangannya sendiri”. Termasuk adalah perempuan.

Berdasarkan dalil-dalil ini maka menjadi jelas bahwa Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Namun ketiadaan larangan tersebut harus dijaga dengan berpegang kepada ketentuan yang telah ditetapkanNya. Dalam bahasa Prof. Dr Md Uqlah Al-Ibrahim masih dalam Rahman, seorang wanita bisa memilih karir di luar dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) terdapat keperluan yang menyebabkan ia terpaksa keluar dari tanggungjawab asalnya (yaitu peranan utama kepada rumahtangga) seperti : a. Kematian suami dan memerlukan belanja kehidupan, b. Memberikan bantuan kepada dua ibu bapa yang sangat miskin atau suami yang uzur tubuhnya, c. Membantu bisnis suami yang memerlukan banyak tenaga dan biaya, d. Mempunyai keistimewaan yang hebat sehinggakan kemahiran ini sangat diperlukan oleh masyarakat umumnya (spesialis).
- b) bekerja sesuai fitrah kewanitaannya.
- c) menutup aurat dan sentiasa menjauhi fitnah di tempat kerja.
- d) kerjanya tidak memerlukan berdua-duaan(khalwat) dan bercampur baur dengan lelaki (ikhtilat tanpa batas/sering bersinggungan langsung).
- e) mendapat izin wali atau suami.
- f) tidak menyebabkan terganggu dan terhentinya tanggung jawab di rumah terhadap anak serta suami
- g) tujuan dan niat utama bekerja bukanlah kerana keasyikan dan keghairahan kepada mengumpul harta dan niat semata-mata menyaingi lelaki.

- h) mesti lah berhenti sekiranya terdapat keperluan dan kecatatan dalam pendidikan anak-anak.
- i) diniatkan sementara kecuali jika wanita mempunyai kualitati yang amat diperlukan oleh masyarakat umum.

c. Manajemen

1) Pengertian

Manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Gitosudarmo dan Mulyono, 2001:8).

2) Fungsi dan Proses Manajemen

Berbicaratentang fungsi dan proses manajemen merupakan satu aktivitas yang ada dalam manajemen itu sendiri. Manajemen memiliki fungsi-fungsi utama berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan (POAC). Fungsi-fungsi ini jika dilaksanakan maka akan menjadi proses manajemen itu sendiri (Gitosudarmo dan Mulyono, 2001:11).

3) Inti Kepemimpinan dalam Manajemen

Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi tingkah laku bawahan atau pengikut untuk melakukan suatu tugas sesuai yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut (Gitosudharmo dan Mulyono, 2001: 15). Masih dalam sumber yang sama (2001:215), pondasi utama fungsi kepemimimpinan adalah fungsi-fungsi manajemen.

Kepemimpinan sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas manajemen pada suatu organisasi, termasuk juga dalam keluarga. Kepemimpinan diperlukan agar semua pihak yang ada dalam keluarga secara serentak bisa diarahkan untuk sampai pada tujuan keluarga yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Hasil Penelitian

a. Kewajiban Dasar Mencari Nafkah Keluarga Dalam Islam

Islam adalah agama yang indah yang mengatur pola hubungan alam (makro kosmos) agar terjadi keseimbangan, tetapi juga banyak mengatur pola hubungan manusia (mikro kosmos). Salah satu aturan itu adalah

aturan perkawinan sebagai pintu masuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Dengan terjadinya peristiwa perkawinan, maka ada konsekuensi yang harus dipikul oleh masing-masing pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Dalam hal ini adalah suami, istri dan anak. Hal ini bisa disimak dalam sumber hukum Islam sendiri yaitu Al Qur'an dan Hadits. Jelas sekali disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah: 228

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Berdasarkan ayat tersebut maka Amir (2006:228) melihat bahwa kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal/setara hak suami namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Demikian juga halnya dengan Hadit dari Amru bin Al Ahwash:

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus diikul oleh istrimu dan istrimupun mempunyai hak yang harus kamu pikul”

Hak suami atas istri merupakan kewajiban istri atas suami, demikian sebaliknya. Salah satu kewajiban itu adalah kewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Namun bagaimana Islam sesungguhnya memandang kewajiban mencari nafkah dalam keluarga, apakah kewajiban suami atau kewajiban juga untuk istrinya.

Konsep nafkah menurut Ulama madzhab Hambali adalah “memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya (Ubaidi, 2007: 29). Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung dan siapa yang ditanggung.

Pertama. Pada sebuah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata bahwa Rosulullah S.A.W bersabda “Kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggungjawab atas orang yang kalian pimpin”. Kelanjutan dari hadits ini juga terdapat pada sabda Rosulullah S.A.W “seorang *wanita* juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia bertanggungjawab atas anggota rumah tangganya (HR. Bukhari, Muslim, Abu dawud dan An Nasa’I dalam Al Jamal, 2003: 74).

Berdasarkan hadits tersebut, menjadi jelas sekali bahwa suami adalah penanggung nafkah utama dalam keluarga, dan istri adalah penanggung kedua. Hal ini terjadi karena baik suami maupun istri sama-sama sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya di dalam keluarga baik anak, saudara dan orang tua. Dengan melihat ini, artinya kewajiban mencari nafkah untuk keluarga asalnya adalah suami. Namun, jika pada situasi khusus secara syar'i penanggung utama tidak bisa menjalankan kewajiban itu, maka penanggungan mencari nafkah jatuh ke tangan istri. Dengan kata lain istri mencari nafkah hukum asalnya bukan wajib. Apalagi sangat jelas disebutkan dalam (Al Baqarah: 233) "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik ". Istri menjadi wajib mencari nafkah untuk keluarganya, terutama anak –anak dan suami, jika suami mengalami halangan secara syar'i.

Kedua. Berdasar hadits yang meriwayatkan tentang Aisyah yang dinikahi Rosulullah ketika masih berumur 6 tahun. Rasulullah menggaulinya dua tahun berikutnya dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau menafkahi Aisyah sebelum menggaulinya (Ubaidi, 2007: 64). Artinya bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah atas istrinya adalah semenjak digaulinya istri oleh suami, bukan semenjak dinikahnya istri. Ini artinya, menggauli istri menyebabkan munculnya kewajiban suami untuk memberi nafkah bagi istrinya.

Jadi, kesimpulannya kewajiban dasar mencari nafkah untuk keluarga menurut Islam adalah suami. Kewajiban ini muncul akibat beberapa sebab, yaitu:

- 1) Karena suami adalah pemimpin keluarga yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Namun jika ada sesuatu hal yang menyebabkan suami tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka kewajiban tersebut jatuh ke tangan istri. Karena hakikatnya istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya.
- 2) Karena suami telah menggauli istrinya. Artinya belum jatuh kewajiban tersebut jika baru terjadi akad nikah.

Di luar konteks siapa yang menjadi pemikul kewajiban mencari nafkah dalam keluarga, Islam juga mensyaratkan atas wajib tidaknya pemberian

nafkah. Adapun syarat-syarat wajib nafkah adalah:

- 1) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
- 2) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini maka, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Bila tidak punya harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya, jika ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.
- 3) Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri.
- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau ortu.. wajib nafkah untuk anak dan ortu hanya disyaratkan mampu bekerja bukan mampu harta.
- 5) Bersamaan agama, kecuali untuk nafkah untuk anak dan ortu (Basyir, 1999: 109).

Berdasarkan syarat wajib adanya nafkah, ternyata kewajiban mencari nafkah untuk keluarga tidak hanya jatuh di tangan suami (:ayah), tetapi juga istri, anak dan atau kerabat. Artinya pemegang kewajiban mencari nafkah keluarga bisa suami, istri dan anak bahkan kerabat. Jatuhnya kewajiban suami dan atau istri untuk mencari nafkah sudah dimafhumi sebagaimana penjelasan dan dasar Al Qur'an dan Hadits di atas. Di luar itu, anak juga menjadi wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya dalam situasi tertentu. Hal ini didasarkan pada Qs. Al Isra: 23, maupun Qs. Luqman:15 yang membicarakan tentang kewajiban anak berbuat baik terhadap orang tuanya, yang itu berarti menunjukkan adanya kewajiban pula bagi anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka memerlukan.

Lebih jelas lagi menurut Basyir (1999: 109) Islam membicarakan tentang kewajiban mencari nafkah keluarga sebagai berikut:

- 1) Kewajiban orang tua utamanya ayah berkewajiban mencukupkan nafkah hidup anak-anaknya bila mereka memerlukan
- 2) Anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya jika mereka memerlukan tanpa melihat agama

- 3) Setiap kerabat yang memperoleh hak waris dari kerabat lain berkewajiban memberi nafkah apabila mereka memerlukan.

Dari pembahasan ini maka dasar utama kewajiban mencari nafkah adalah suami/ayah. Jika tongkat ini diteruskan maka kemudian istri, anak dan kerabat. Dengan kata lain suami atau ayah bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

b. Kewajiban Suami Atas Nafkah Istri yang Bekerja.

Berdasarkan hadits Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An Nasa'i dan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 menjadi jelas bahwa kewajiban utama mencari nafkah bagi keluarga adalah menjadi tanggungjawab suami. Seiring dengan perkembangan selanjutnya ternyata mencari nafkah (bekerja/karir) bukan hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga para istri. Lalu bagaimana posisi kewajiban suami untuk menafkahi istri jika ternyata istri sudah bekerja. Apakah kewajiban itu gugur atau tetap melekat pada suami.

Menyikapi persoalan ini tidak bisa dilakukan secara serampangan tetapi harus dicermati secara detail alasan-alasan yang mendasari istri bekerja. Paling tidak ada dua pendapat yang mengerucut atas diberikan tidaknya nafkah istri dari suami padahal istri sudah bekerja. Jika istri bekerja diluar rumah tetapi ia masih mengerjakan tugas rumah tangga maka:

- 1) Jika bekerja karena restu, ijin dan sepengetahuan suami untuk membantunya dalam memenuhi tuntutan hidup dan problematika zaman maka istri masih berhak mendapat nafkah suami.
- 2) Jika istri bekereja tanpa seizin suami, maka ia tidak berhak karena alasan tanpa restu dan tidak sempurnanya kesediaan dan kesempatan suami untuk menggaulinya setiap kesempatan (Ubaidi, 2007: 164).

Jika dicermati lebih lanjut, maka pendapat yang menyebutkan bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya sudah bekerja menunjukkan kalau kewajiban itu muncul akibat ketidaksempurnaan suami untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah secara penuh. Alasan ini pula bersandar kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar, "Seorang lelaki yang tidak mau menafkahi istrinya akan berdosa dan berhak mendapatkan hukuman Allah karena meninggalkan kewajiban" (Ubaidi, 2007: 53). Sehingga jika ada kasus seperti TKW bekerja

di luar negeri, sementara suami masih memiliki kemampuan untuk mencari nafkah walaupun tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka wajib bagi suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri, karena posisi istri di sini hanya sekedar membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini hanya dilihat dari perspektif ekonomi, jika dilihat dari perspektif lain misalnya istri bekerja karena ilmu yang dimilikinya dibutuhkan oleh masyarakat serta istri mendapat restu dari suami (artinya ada kerelaan dari suami diambil waktunya untuk istri bekerja di luar), maka suami juga masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami walaupun bisa jadi penghasilan istri lebih besar dari suami. Atau suami jangan kemudian merasa tidak berkewajiban hanya karena penghasilan istri lebih besar dari suami, tetapi kewajiban ini disandarkan kepada alasan bahwa walaupun istri bekerja, ia masih bisa melayani suami atau suami masih memperoleh kesenangan (: menggauli) atas istrinya sebagaimana pendapat yang sama dikemukakan oleh Ubaidi (2007: 164) "...istri berhak mendapatkan nafkah sebagai ganti dari keterikatan fisiknya dengan suami, manfaat serta kesenangan yang diperoleh suami dari dirinya dan penangannya atas maslahat dan kebutuhan-kebutuhannya".

Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa istri tidak berhak atas nafkah dari suami jika ia bekerja tanpa restu suami sehingga istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri (digauli) juga masih harus dicermati lebih lanjut. Adalah logis jika istri tidak diberi nafkah oleh suami jika ketika ia bekerja tidak mendapat restu suami sekaligus suami masih memiliki kemampuan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Akan berbeda jika suami tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun tanpa restu suami, istri harus bekerja mengingat istri juga menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarga jika suami sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena istri adalah pemimpin kedua di dalam keluarganya yang juga bertanggungjawab atas hidup anggota keluarganya. Artinya istri bekerja karena substansinya dia hanya membantu mencari nafkah yang kebetulan suami belum bisa memenuhi walaupun suami tidak menyadari hal tersebut tetap diperbolehkan sekaligus suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahnya kepada istri. Dalam hal ini menurut an-Nahbani (Muttaqin, 2010) :

...syariat memperbolehkan wanita untuk melakukan aktivitas jual beli, ijarah (perburuhan), wakalah (perwakilan), pertanian, industri, perdagangan, dan berbagai aktivitas pengembangan harta lainnya yang menurut syara' hukumnya mubah. Akan tetapi tugas istri sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya tidak boleh terlalaikan karena itulah kewajiban pokoknya. Tidak boleh istri mendahulukan yang mubah dan mengesampingkan yang wajib.

Dari pembahasan ini jelas bahwa istri-istri yang bekerja tetap berhak mendapat nafkah dari suami dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa kewajiban itu muncul akibat *ketidaksempurnaan* suami untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah secara penuh yang mengakibatkan istri harus ikut membantu mencari nafkah keluarga. Istri sebagai pemimpin kedua menjadi wajib mencari nafkah karena suami sebagai pemimpin utama di keluarga memiliki kekurangan dalam menjalankan kewajiban yang satu ini.
- 2) Di dalam bekerja mendapatkan *restu* dari suami. Melalui perkawinan maka interaksi antara suami-istri adalah interaksi yang bersifat “transaksional”. Artinya jika salah satu (:istri) akan berperan melebihi batas peran awal, maka seyogyanya ada ijin dari pihak satunya (:suami).
- 3) Dibutuhkannya *ilmu* yang dimiliki oleh istri oleh masyarakat luas. Alasan yang kedua pada situasi tertentu tidak mutlak diperlukan, jika memang ilmu yang dimiliki istri sangat dibutuhkan oleh umat. Kewajiban menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat menjadi dasarnya. Alasan selanjutnya adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ibnu Umar R.a dan dihasankan oleh Imam As Suyuthi dan syaikh Nashirudin Al Abani, aitu: “ Perumpaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pohon kurma. Apapun yang kamu ambil darinya akan memberikan manfaat kepadamu (Nursyam, 2006: 329).
- 4) Istri adalah *pemimpin kedua* setelah suami.
- 5) *Ketidakmampuan mutlak* dari suami untuk mencari nafkah, jadi walaupun tanpa restu suami jika kebutuhan keluarga (terutama anak) menjadi pilihan tak terelakan maka istri tanpa restu suami bisa keluar untuk bekerja mencari nafkah buat keluarganya.

b. Manajemen Mencari Nafkah Dalam Keluarga Yang Istrinya Bekerja

Mengingat sudah jelasnya posisi hukum atas nafkah istri dari suami jika sang istri adalah wanita karir, sekaligus bahwa situasi saat ini memiliki probabilitas tinggi yang menyebabkan para istri bekerja di luar rumah, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana memenej hal tersebut sehingga walaupun suami dan istri sama-sama bekerja, dan keduanya sama-sama bisa menjalankan kewajibannya dan menerima haknya namun tujuan keluarga tetap tercapai maka dibutuhkan manajemen nafkah tersendiri.

Pertama. Suami istri harus merencanakan bersama kemungkinan pembagian peran dan tanggungjawab dalam mencari nafkah. Katakanlah suami ditempatkan tetap sebagai leader keluarga di mana penghasilannya mutlak didistribusikan untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga. Sedangkan istri ditempatkan sebagai leader kedua yang berifat antisipatif sekaligus bersifat pemberdayaan sebagai perempuan yang berpotensi memberikan kemaslahatan untuk umat.

Kedua, Organizing. Suami dan istri sepakat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas mencari nafkah sesuai peran yang disepakati bersama pada awal perencanaan. Terutama dari sisi waktu agar peran sesungguhnya dalam keluarga tidak terabaikan karena terlalu fokus pada persoalan mencari nafkah.

Ketiga. Actuating. Sesungguhnya fungsi ini merupakan fungsi kepemimpinan yang diperlukan oleh keluarga untuk mengarahkan seluruh anggota keluarga dan sumber daya lain yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama berdirinya keluarga. Di sinilah fungsi ini mutlak perlu dijalankan oleh suami sebagai pemimpin pertama, baru kemudian istri sebagai pemimpin kedua.

Keempat. Controlling. Kontrol ataupun pengawasan termasuk juga evaluasi merupakan fungsi terakhir yang harus ada dalam setiap tahapan fungsi lain dalam keluarga agar tujuan keluarga bisa tercapai. Artinya suami dan istri bisa autoevaluasi maupun saling memberi koreksi atas apa yang telah mereka lakukan dalam proses mencari nafkah maupun atas hasil dari proses mencari nafkah tersebut. Jika ternyata mencari nafkah dilakukan oleh kedua pemimpin keluarga tersebut mampu mencapai tujuan keluarga secara efektif dan efisien, maka kesepakatan “bersama-sama” mencari nafkah bisa diteruskan, dan sebaliknya.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Islam memandang persoalan dasar atas kewajiban mencari nafkah dalam keluarga berdasarkan alasan mengapa kewajiban itu muncul. Kewajiban mencari nafkah dalam Islam muncul paling tidak karena dua alasan yaitu pertama, kepemimpinan dalam keluarga dan kedua, terjadinya peristiwa “pergaulan” suami atas istri. Kepemimpinan utama dalam keluarga ada dan dilaksanakan oleh suami, sehingga suami berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Namun begitu jika karena alasan tertentu maka kewajiban tersebut bisa diestafetkan kepada pemimpin kedua dalam keluarga yaitu istri. Sedangkan sebab kedua kewajiban muncul akibat digaulinya istri oleh suami, sehingga posisi di sini suami adalah aktif (yang punya inisiatif) sehingga kewajiban mencari nafkah jatuh ke tangan suami.
- b. Para istri yang bekerja (;mencari nafkah untuk keluarga) tetap berhak atas nafkah dari suaminya atau suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istri juga bekerja (mencari nafkah), didasarkan atas
- c. Manajemen mencari nafkah dalam keluarga yang istrinya bekerja merupakan alternatif tak terelakan agar fungsi dan tujuan keluarga tetap bisa dijalankan tanpa konflik sekaligus adanya jaminan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan keluarga.

Hasil penelitian ini juga memebeirkan rekomendasi atau Saran. Islam adalah agama yang seimbang. Kewajiban utama atas pencarian nafkah tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi kepada beberapa pihak di dalam keluarga. Berdasarkan temuan penelitian ini maka seyogyanya:

- 1) Suami/istri, memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk berbagi peran dan kewajiban dalam mencari nafkah untuk kepentingan keluarga mereka.
- 2) Adanya kewajiban tersebut jangan kemudian dijadikan alasan untuk saling menimpakan kewajiban kepada pihak-pihak yang memang punya probabilitas untuk memegang tanggungjawab tersebut.

Daftar referensi

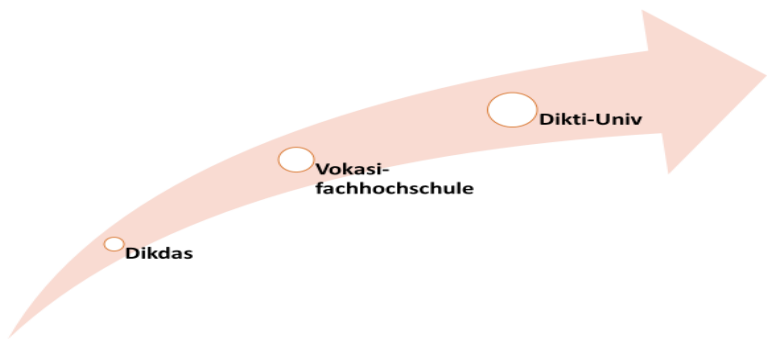
- Al Jamal, Syekh Ibrahim Muhammad. (2003). *146 Wasiat Nabi untuk Wanita*. Jakarta: Gema Insani
- At Tammimie, Amier.(1422). *Hukum Wanita Karir Dalam Tinjauan Syar'i.*
- Basyir, Ahmad Azhar (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: UII Pers
- Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus.(2001). *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Muttaqin, Hidayatullah. (2010). *Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami*.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. (2007). *Nafkah Istri. Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus sunnah
- Umiarso dan Gojali, Imam.(2011). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Ekonomi Pendidikan. "Menjual" Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control Bagi Pelaku Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSHOd
- Khairiya.(2011). *Pengertian Wanita Karir*. Tersedia dalam: <http://id.shvoong.com>
- Munir, Misbachul. (2010). *Produktivitas Perempuan. Studi analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press
- Noor, Arifin. (1999). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia
- Nursyam, Fachrudin.(2006). *Syarah Lengkap Arba'in Tarbawiyah. Refleksi 40 Hadits Muwashhofat Tarbiyah*. Surakarta: Bina Insani Pers
- NN. *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Tafsir Al Qur'an Tematik), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an
- Rahman, Zaharuddin Abd. (2009). *Hukum Wanita Bekerja (Keputusan Majelis Fiqh Dunia)*. Tersedia: <http://www.zaharuddin.net/>
- Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group



F. Menyoroti Arah Pembangunan Cilacap Dalam Perspektif Akademisi Dan Agamawan

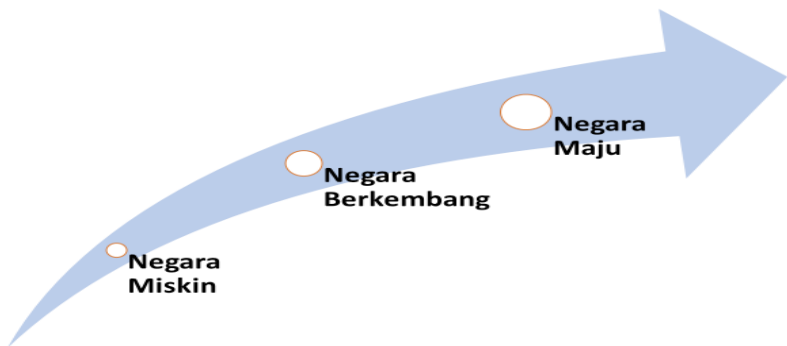
1. Pengantar

Secara umum jenjang pendidikan yang dianut oleh negara-negara di dunia, merujuk kepada tiga jenjang utama, yaitu jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) atau Pendidikan rendah, jenjang Pendidikan menengah (Dikmen) atau Vokasi- Fachhochschule dan yang tertinggi dadalah Jenjang Pendidikan Tinggi atau Universitas.



Bagan 72. Jenjang Pendidikan

Seiring dengan jenjang Pendidikan ini, maka negara juga terklasifikasi secara umum ke dalam kluster 3 negara, yaitu negara miskin, negara berkembang dan negara maju.



Bagan 73. Klasifikasi Negara

Kedua jenis pengelompokkan jenjang pendidikan dan negara jika dilihat dari kacamata pendidikan, keduanya menunjukkan ada relasi kausal. Pendidikan mengakibatkan tingkatan kesejahteraan negara, atau strata negara akan

mempengaruhi ragam layanan jenjang Pendidikan. Untuk opsi pertama, maka negara miskin biasanya warga negaranya hanya mampu mengenyam Pendidikan dasar saja, negara berkembang naik setingkat warga negaranya bisa mengenyam pendidikan sampai ke jenjang menengah dan vokasi, dan negara maju rata-rata warga negaranya mengenyam pendidikan tinggi. Dengan *human investment in education* maka Pendidikan memberi pengaruh kepada kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Jika pendidikannya rendah maka negaranya menjadi miskin, demikian sebaliknya jika Pendidikan warga negaranya tinggi-tinggi maka ini akan menjadi *human capital* bagi negaranya untuk menjadi negara maju.

Paparan ini menunjukkan bahwa Pendidikan akan membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. SDM yang berkualitas selain berkontribusi sekaligus juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara.

Di sisi lain, ada teori yang juga menyebutkan bahwa nilai-nilai unggul (bisa nilai budaya, religious dan sebagainya) mampu berkontribusi bagi kemajuan suatu negara. Contoh real negara -negara maju yang diback up oleh nilai0nilai yang dijunjung tinggi oleh warga bangsanya yang menjadi penyebab kesejahteraan bangsanya adalah negara Jepang, Cina dan Amerika Serikat.

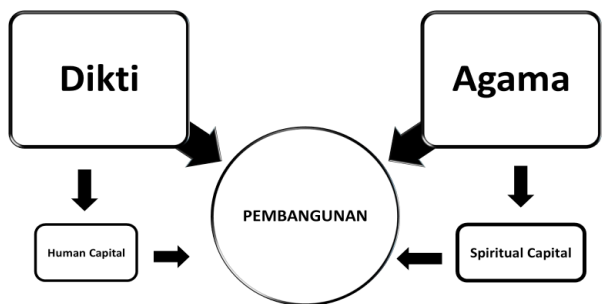
Apapun faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan suatu negara, setidaknya perlu diingat bahwa ada Indikator Keberhasilan Pembangunan suatu negara yang diakui secara dunia. Indikator yang dimaksud diantaranya:

- a. Kekayaan rata-rata (pendapatan nasional/tahun)
- b. Pemerataan hasil pembangunan
- c. Kualitas kehidupan (HDI), yang di dalamnya ada kualitas SDM
- d. Kerusakan lingkungan
- e. Keadilan sosial dan kesinambungan (Chendrawan, 2017) dan (Rahmat, 2015).

Oleh karena itu berdasarkan konteks seminar kali ini adalah Ditki, Agama dan Pembangunan, maka tulisan ini akan mengangkat judul “Menyoroti Arah Pembangunan Cilacap Dalam Perspektif Akademisi dan Agamawan”. Berdasarkan hal ini, sistematika pembahasan akan dimulai dari: 1) bagaimana Ditki dan Agama mampu berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan?, 2) sekilas capaian Pemkab Cilacap, 3) rekomendasi

2. Bagaimana Dikti dan Agama Berkontribusi terhadap Pembangunan?

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana Dikti dan Agama berkontribusi terhadap pembangunan? Atau bagaimana kontribusi Dikti dan agama terhadap pembangunan? Maka bisa diilustrasikan dalam bagan berikut.



Bagan 74. Relasi Dikti, Agama dan Pembangunan

Dari bagan di atas, maka bisa dipahami bahwa Pendidikan tinggi (Dikti) akan menghasilkan luaran Pendidikan berupa manusia yang sudah berubah dari sekedar sumber daya manusia (*human resources*) menjadi *human capital* atau modal manusia. Jenis modal manusia inilah yang akan sangat membantu terlaksananya jalan pembangunan, arah pembnagunan dan kualitas pembangunan. Ingat dalam teori pembangunan yang baru, SDM bisa menjadi masalah jika SDM tersebut SDM yang rendah kualitasnya, mereka hanya akan menjadi beban pembangunan dan menghambat pembangunan. Berbeda dengan modal manusia yang dihasilkan oleh Dikti adalah jenis manusia yang berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan.

Demikian pula halnya dengan agama. Agama akan mampu memberikan kontribusi positif dan produktif kepada pembangunan, karena agama yang diajarkan (lewat Pendidikan formal, informal maupun non formal) akan memnghasilkan manusia-manusia yang di dalamnya memiliki dimensi spiritual capital (modal spiritual). Modal ini akan menjadi nilai-nilai dasar yang menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab tinggi dalam berpartisipasi mensukseskan kerja pembangunan.

Dari penjelasan ini maka sangat jelas pula kontribusi yang bisa disumbangkan pendidikan tinggi dan agama bagi kesuksesan pembangunan. Rasionalisasi secara detail dari dua unsur bisa disimak dalam paparan berikut.

Pertama. Relasi Dikti Dan Pembangunan. Dalam pandangan umum, Pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan negara/bangsa. Melalui Pendidikan maka akan terlahir SDM berkualitas yang sangat dibutuhkan pembangunan (Ionescu, 2013). Dari tangan-tangan tenaga terdidik inilah pendapatan nasional suatu bangsa akan terus meningkat. Artinya Pendidikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional. Sebagai contoh kasus di Amerika di tahun 1900-1956 membuktikan bahwa investasi di bidang Pendidikan mampu menyumbangkan 3, 5 kali dari investasi modal fisik bagi kenaikan pendapatan nasional (Bruto).

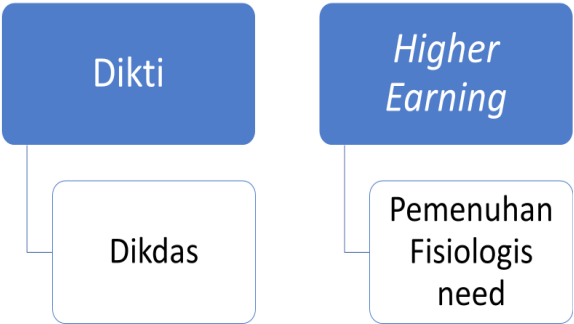
Lebih khusus lagi, dalam teori ekonomi Pendidikan, Pendidikan merupakan *human investmen* atau investasi manusia. Banyak modal yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pendidikan, dan hasilnya akan diperoleh di masa datang setelah pendidikan selesai dilaksanakan. Hasil yang diperoleh ini berupa *Return Of Investment* (ROI) baik berupa *individual return* maupun *social return*. *Individual return* adalah kembalian Pendidikan yang bersifat individual seperti kepuasan tersendiri telah melaksanakan Pendidikan, merasa telah melaksanakan kewajiban, rasa puas memperoleh ilmu dan sebagainya. Sedangkan *social return* adalah kembalian yang bersifat sosial yang bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti ilmu yang bisa dishare, dimanfaatkan masyarakat, mencerahkan masyarakat dan sebagainya.

Pada akhirnya dari komponen investasi di bidang pendidikan adalah sesuatu yang bersifat konsumtif berupa adanya kepuasan hasil pendidikan dan penghasilan masa depan berupa investasi pengetahuan dan ketrampilan untuk masa depan.



Bagan 75. Relasi Pendidikan - Pembangunan

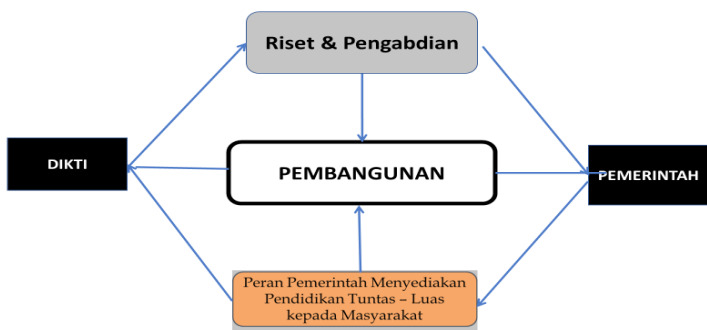
Kedua. Relasi Dikti Dan Kesejahteraan. Ada perbedaan dasar antara impact utama dari dilakukannya kegiatan pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa jenjang Pendidikan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dalam konteks impact yang dihasilkan maka Pendidikan terklasifikasi menjadi dua, yaitu Pendidikan dasar-menengah (Dikdasmen) dan Pendidikan tinggi (Dikti). Dikdasmen memberikan impact kepada terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Artinya Dikdasmen hanya mampu memberikan kontribusi bagi orang yang mengenyam Pendidikan tersebut baru sampai tingkatan pemenuhan kebutuhan fisiologis, seperti pangan, sandang dan papan. Berbeda dengan Dikti, semakin tinggi pendidikannya maka akan semakin tinggi pendapatannya (*higher earning*) dan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Inilah mengapa dalam teori pembangunan Pendidikan tinggi menjadi salah satu item indikator *human development index* (HDI). Di sinilah pentingnya pemerintah mengupayakan Pendidikan tinggi bagi setiap warga negaranya, agar mereka mampu berkontribusi secara produktif terhadap laju pembangunan nasional.



Bagan 76. Relasi Dikti -Pendapatan/Kesejahteraan

Ketiga. Relasi Dikti, Pemerintah Dan Pembangunan. Pendidikan tinggi (Dikti) di satu sisi bisa berkontribusi terhadap pembangunan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dua dharma PT). melalui penelitian yang dilakukan maka akan dihasilkan inovasi-inovasi baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa. Hasil penelitian ini yang nantinya diterapkan di kehidupan masyarakat sebagai teknologi tepat guna yang artinya juga dibutuhkan oleh pembangunan. Di sisi yang berbeda, pemerintah harus menyediakan pula layanan Pendidikan yang tuntas dan luas. Tuntas artinya tidak hanya sekedar pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga sampai pendidikan tinggi sebagai pendidikan yang final. Luas maknanya menyangkut semua jenis,

bidang keilmuan yang dibutuhkan masyarakat. Layanan Pendidikan tuntas dan luas ini artinya Pendidikan tinggi. Jadi peran pemerintah menyediakan layanan pendidikan tinggi dan menfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian (ex. Pendanaan, perizinan dan sebagainya), maka pendidikan tinggi berperan untuk melakukan inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan pembangunan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka pada akhirnya pembangunan akan berjalan sebagaimana mestinya.



Bagan 77. Relasi Dikti, Pembangunan dan Pemerintah

3. Peran Operasional Dikti Dalam Pembangunan

Pendidikan tinggi memang memberikan peranan kepada pembangunan lewat kegiatan tri dharma yang dilakukannya utamanya dua dharma terakhir. Dalam konteks yang lebih operasional dan teknis, peran Pendidikan tinggi dalam pembangunan antara lain bisa berupa:

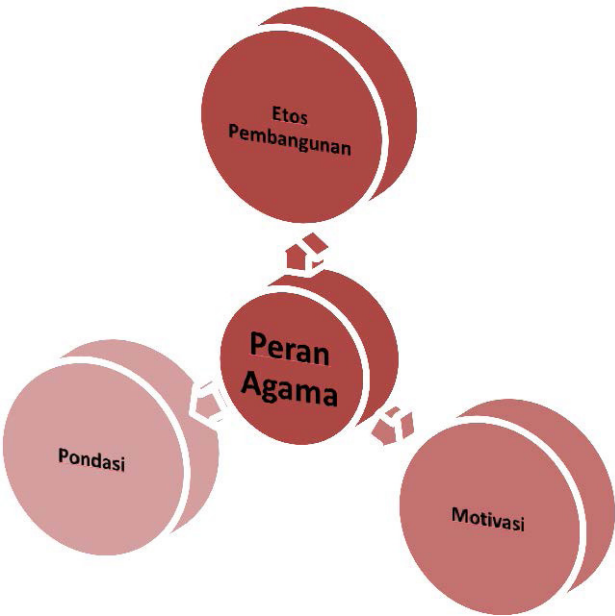
- a. Pengembangan SDM. Terbentuknya SDM yang berkualitas sebagai modal sosial yang bermutu yang menjadi subyek pembangunan
- b. Riset partisipatif, melalui penerapan teknologi dan inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan pembangunan
- c. Pendampingan -pendampingan yang berbasis ilmu, riset bahkan finansial
- d. Layanan akademis yang bisa mengkritik, memberi masukan dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pembangunan.

4. Peran Agama dalam Pembangunan

Setelah mengetahui peran dan kontribusi Pendidikan tinggi bagi pembangunan, maka pembicaraan kali ini adalah melihat bagaimana sesungguhnya peran yang bisa dilakukan oleh agama bagi pembangunan? Setidaknya ada tiga peran yang

bisa dijalankan agama untuk mensukseskan kegiatan pembangunan, yaitu: a) sebagai etos pembangunan, b) motivasi dan c) pondasi (Jalaludin, 2004).

Sebagai etos pembangunan, maka agama bisa diambil nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya agar bisa memberikan etos bagi pembangunan di mana umat pemeluk agama tersebut tinggal. Sebagai contoh kalau di Jepang ada Tokugawa (kerja keras), maka orang Jepang terkenal sebagai pekerja keras, sehingga tidak heran jika negaranya cepat maju karena orang-orang nya terkenal sebagai pekerja keras bahkan cenderung *workalcoholic*. Selanjutnya ada nilai keirausahaan dari Congfusian nya negara Cina. Ini menjadikan bangsa Cina terkenal sebagai bangsa yang menguasai perdagangan di mana pun ia tinggal. Selanjutnya ada Islama yang keberadaannya ada di mana-mana, salah satu nilai yang bisa diambil dan menjamin kesuksesan bagi yang melaksanakannya adalah nilai kesejahteraan berorientasi keabadian (*baqiyat*). Tidak ada sesuatu yang endingnya hanya berdasarkan umur dunia, tetapi dilanjutkan dalam fase kehidupan yang sesungguhnya yang lebih panjang dan kekal lagi yaitu akhirat. Pembangunan bukan diorientasikan menjadikan kemajuan dan kesejahteraan di dunia saja tetapi justru untuk meraih keselamatan dan kesejahteraan di akhirat.



Bagan 78. Peran Agama Dalam Pembangunan

5. Sekilas Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap

Sekilas merujuk kepada laporan kinerja pada tahun sebelumnya, maka secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap (11 sasaran strategis-27 indikator kinerja) pada tahun 2014 dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil. 11 sasaran: 88.5% (Sangat Berhasil), 7 sasaran 63.64% (Sangat Berhasil), 4 sasaran 36.36% (Berhasil). 23 indikator kinerja utama 83,33% (sangat berhasil), 1 indikator 3.703% (Berhasil), 2 indikator 7.405 % (cukup), 1 indikator 3,703% (tidak berhasil) (Cilacap, 2019)

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten: kebijakan prioritas pembangunan 2016, diarahkan untuk mengatasi sejumlah permasalahan pada RPJM: 1) prioritas peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, 2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan masyarakat, 3) peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, 4) pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan 5) peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan demokratisasi. Sedangkan Bappeda Jateng: Prioritas diarahkan pada peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan, maka, secara teoritis menunjukkan “kesesuaian” dengan indikator keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis ini, maka direkomendasikan kepada keduanya agar:

- a. Optimalisasi simbiosis Dikti-Pemda
- b. Fasilitasi Pendidikan Paripurna (Dikti)
- c. Optimalisasi peran Dikti
- d. Internalisasi nilai agama dalam perilaku pembangunan (*development sustainability*, cermat (*tobaqo*), kebersamaan (*sukhbah*), keragaman (*mukhtalifun an wan*), ketulusan (*ikhlas*), orientasi keabadian (*baqiyat*).

Daftar Referensi

- Cilacap, P. K. (2019). *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018*. Cilacap: LKP Cilacap.
- Ionescu, A. M. (2013, January). *The Investment in Education and Quality of Life*. Retrieved from researchGate: https://www.researchgate.net/publication/266445350_The_Investments_in_Education_and_Quality_of_Life/link/5432a3610cf225bddcc7c25d/download
- Jalaludin. (2004). *Psikologi Agama cet. Ke-8*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmat, W. F. (2015). Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan. *JEMA.: ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id*, 1-14.
- S.Chendrawan, T. (2017). Sejarah Pertumbuhan Ekonomi. *Tirtayasa EKONOMIKA.vol.12. NO.1. April 2017*, jurnal.untirta.ac.id.

BAB VIII

PENDIDIKAN TINGGI DAN *WORLD CLASS UNIVERSITY*

A. Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia

1. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai Sistem Pendidikan Tinggi yang penulis singkat di sini dengan Sistem Dikti merupakan pembicaraan tentang pola penyelenggaraan Pendidikan tinggi sekaligus tentang pola pengelolaan perguruan tingginya. Namun sebelum masuk kepada dua tema utama dalam SPI perlu dipahami ada penggunaan kata yang sering dipergunaka secara interchangeable tetapi sesungguhnya memiliki sudut perbedaan, yaitu kata Pendidikan tinggi (Dikti) dan perguruan tinggi (PT).

Berdasarkan UU N0 12 tahun 2012, Pendidikan tinggi adalah **jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah** yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, sedangkan perguruan tinggi adalah **satuan pendidikan** yang **menyelenggarakan pendidikan Tinggi**. Jadi jelas berbeda, jika Dikti merujuk kepada salah satu jenjang yang ada dalam sistem Pendidikan nasional, yaitu jenjang Pendidikan tinggi (: sebagai jenjang Pendidikan tertinggi di Indonesia), sedangk PT merujuk kepada satuan pendidikannya.

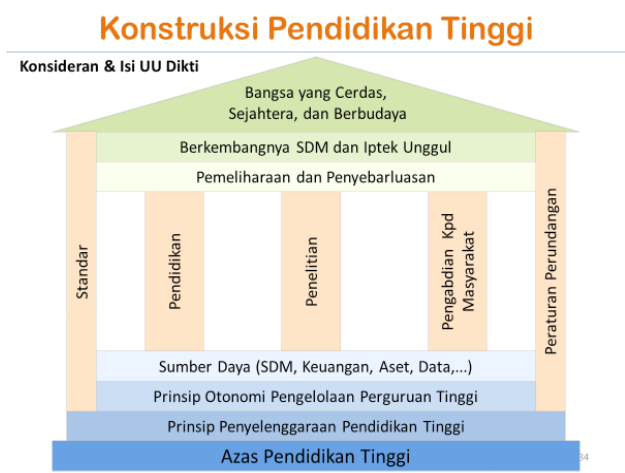
Lalu apa sesungguhnya sistem pendidikan tinggi itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, tulisan ini akan menghantarkan pembaca untuk lebih jauh mengenal Sistem Dikti melalui sub bahasan: 1) sistem Pendidikan tinggi, 2) penyelenggaraan Pendidikan tinggi, 3) pengelolaan perguruan tinggi, dan 4) pengembangan Iptek dalam konteks perguruan tinggi.

2. Sistem Pendidikan Tinggi

Sistem pendidikan tinggi merupakan bagian dari Sisdiknas merupakan sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi. Keberadaan Sistem Dikti didasarkan kepada beberapa landasan hukum, yaitu:

- a. UU Sisdiknas N0.20/thn.2003 Sistem Pendidikan Nasional”
- b. UU.No.12/th.2012: “Pendidikan Tinggi”
- c. PP. N0.4 th 2014 “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”
- d. Renstra ristekdikti 2015-2019

Keberadaannya yang sangat istimewa tersebut menyebabkan Pendidikan tinggi perlu disiapkan dan dikonstruksi secara sedetail mungkin. Pendidikan tinggi dikonstruksi berlandaskan azas (: Kebenaran Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan), prinsip (:Nirlaba, Akuntabel, Transparan, Penjaminan mutu, Efektif dan Efisien) dan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas tri dharma berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Agar kegiatan tersebut berjalan maksimal, selain azas dan lainnya yang sudah disebutkan maka PT harus merujuk pada peraturan perundang-undangan dan standar-standar tertentu (standar internal, nasional dan internasional) yang akan mendukung terwujudnya perkembangan SDM dan Iptek ynag unggul yang berkontribusi bagi terciptanya bangsa yang Cerdas, Sejahtera dan Berbudaya sebagaimana diilustrasikan dalam bagan di bawah ini.



Bagan 79. Konstruksi Dikti

Konstruk yang sedemikian detail tersebut mengamanatkan kepada Dikti bahwa keberadaannya memiliki tujuan tertentu, yaitu:

- a. *berkembangnya potensi Mahasiswa* agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. *dihasilkannya lulusan* yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. *dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. *terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat* berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

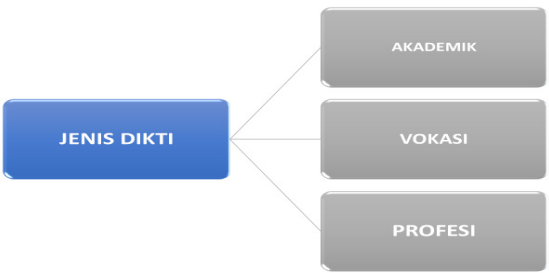
Selain tujuan, Pendidikan tinggi juga memiliki fungsi-fungsi khusus, yaitu:

- a. *mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa* yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. *mengembangkan Sivitas Akademika* yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. *mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Dalam Sistem Dikti, diatur mengenai Jenis Dikti, Program Dikti, Bentuk PT, Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan PT. khusus untuk Penyelenggaraan Dikti dan pengelolaan PT akan dibahas tersendiri dalam sub bab berikutnya, sehingga praktis di sub bab ini akan dibahas jenis, program dan bentuk PT.

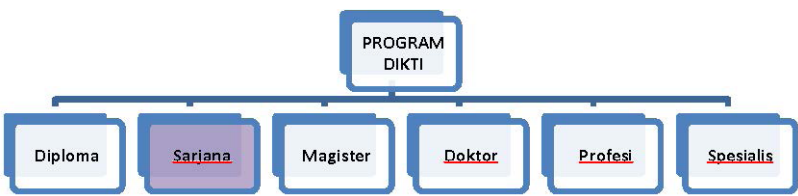
Pertama. Jenis Dikti. Berdasarkan jenisnya, maka Dikti terklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) akademik, 2) vokasi dan 3) profesi. jenis pendidikan akademik adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk penguasaan dan pengembangan cabang IPTEK, dengan program pendidikannya bisa berbentuk program sarjana maupun program pascasarjana. Selanjutnya pada jenis Pendidikan vokasi, maka peserta didik diharapkan setelah selesai menempuh pendidikannya dapat bekerja dengan keahlian terapan tertentu. Jenis Pendidikan ini dimulai dari program diploma, sarjana terapan dan boleh juga dikembangkan

sampai masigster terapan dan Doktor terapan. Adapun untuk jenis Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang dilaksanakan setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.



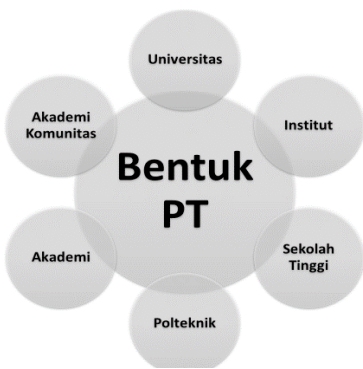
Bagan 80. Jenis Pendidikan Tinggi

Kedua. Program Dikti. Program Dikti di Indonesia terdiri dari 6 jenis program Pendidikan, yaitu: 1) program diploma, 2) program sarjana, 3) progam masigister, 4) program doktor, 5) program profesi dan 6) program spesialis.



Bagan 81. Program Pendidikan Tinggi

Ketiga. Bentuk PT. indonesia menganut bentuk PT ada enam, yaitu: universitas, institut, sekolah tinggi, polteknik, akademi dan akademi komunitas.

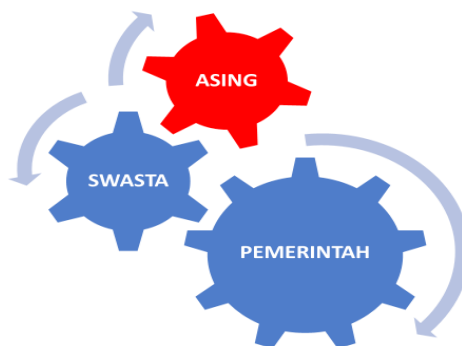


Bagan 82. Bentuk Perguruan Tinggi

3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Dikti diatur dalam tiga kategori penyelenggaraan, yaitu PT yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan asing. Untuk PT yang diselenggarakan oleh pemerintah bisa berbentuk PTN, PTN BH, dan PTN BLU yang masing-masing memiliki ketentuan tertentu. Untuk penyelenggaraan PT Swasta walaupun tidak terklasifikasi secara khusus, namun tetap memiliki ketentuan khusus di dalamnya. Sedangkan untuk penyelenggaraan PT Asing, ada beberapa ketentuan yang mesti dipahami Bersama, yaitu:

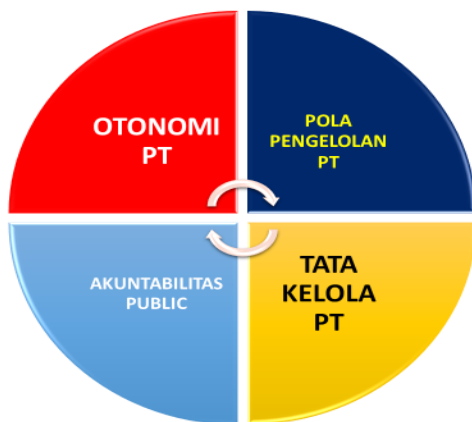
- a. Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI.
- b. Pemerintah **menetapkan daerah, jenis, dan program studi** yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.
- c. Penyelenggara pendidikan Asing **wajib**:
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas **izin** Pemerintah
- e. **berprinsip nirlaba**
- f. mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- g. mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan **mendukung kepentingan nasional**.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.



Bagan 83. Penyelenggaraan PT

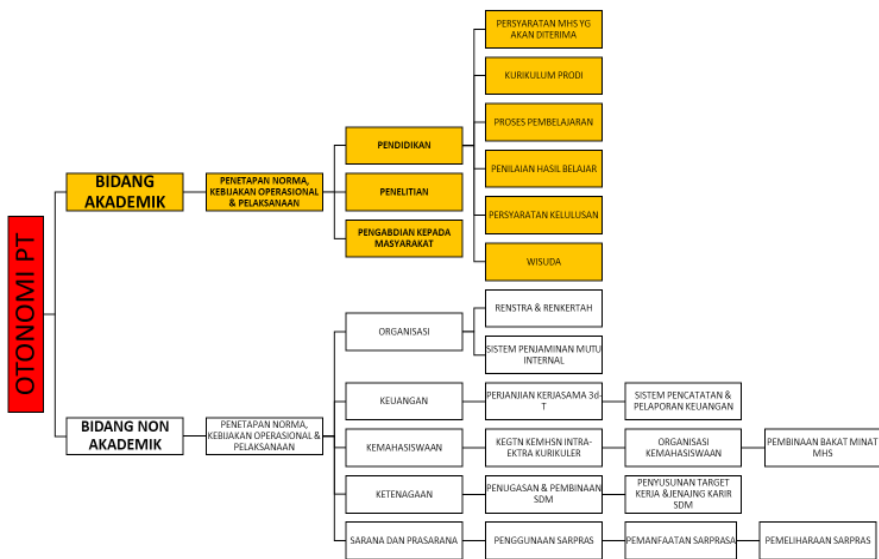
4. Pengelolaan Perguruan Tinggi

Ada empat hal yang di atur dalam pengelolaan PT, yaitu 1) otonomi PT, 2) pola pengelolaan PT, 3) tata Kelola PT dan 4) akuntabilitas PT.



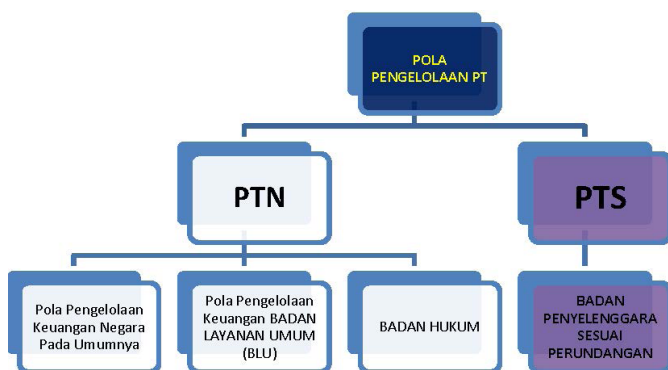
Bagan 84. Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Pertama. Otonomi PT. perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pengaturan yang berkaitan dengan bidang akademik dan non akademik. Pada bidang akademik setidaknya perguruan tinggi mengatur tentang penetapan norma dan kebijakan operasional dan pelaksanaan Tri Dharma PT, yang meliputi: a) Pendidikan: mulai dari menentukan persyaratan mahasiswa yang akan diterima, kurikulum Prodi, proses pembelajaran, peniaian hasil belajar, persyaratan kelulusan sampai dengan wisuda, b) penelitian dan c) pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pada bidang non akademik, berkaitan dengan kegiatan pengaturan tentang penetapan norma dan kebijakan operasional dan pelaksanaan dari 5 hal yaitu: 1) organisasi, seperti Renstra dan Rekentah serta sistem penjaminan mutu internal, 2) keuangan: sistem perjanjian kerjasama 3d-T dan sistem pelaporan keuangan, 3) kemahasiswaan: kegiatan kemahasiswaan, intra dan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan dan pembinaan bakat dan minat mahasiswa, 4) ketenagaan: penugasan dan pembinaan SDM dan penentuan target kerja dan jenjang karir SDM dan 5) sarana dan prasarana: penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Demikian ini adalah pengaturan untuk PT yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan yang untuk PT Swasta diatur dalam peraturan badan penyelenggara (Yayasan atau perkumpulan) yang bisa merujuk ke peraturan ini atau dikembangkan sesuai kebutuhan PTS tersebut.



Bagan 85. Otonomi Perguruan Tinggi

Kedua. Pola Pengelolaan PT. pengaturan mengenai pola pengelolaan PT dalam sistem Dikti terklasifikasi dalam dua kategori bergantung pada siapa yang menyelenggarakannya, yaitu PTN dan PTS. Untuk PTN terbagi lagi dalam tiga pola pengelolaan, yaitu: a) pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya (PTN), b) pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan c) pola pengelolaan Badan Hukum (PTN-BH), sedangkan untuk PTS pola pengelolaannya bergantung kepada badan penyelenggaranya.



Bagan 86. Pola Pengelolaan PT

Ketiga. Tata Kelola PT. Tata Kelola PT terdiri dari lima bagian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sendiri. Kelima bagian tata Kelola PT itu adalah:

1) penyusun kebijakan, 2) pelaksana akademik, 3) pengawas dan penjaminan mutu, 4) penunjang akademik (sumber belajar) dan 5) pelaksana administrasi (TU).

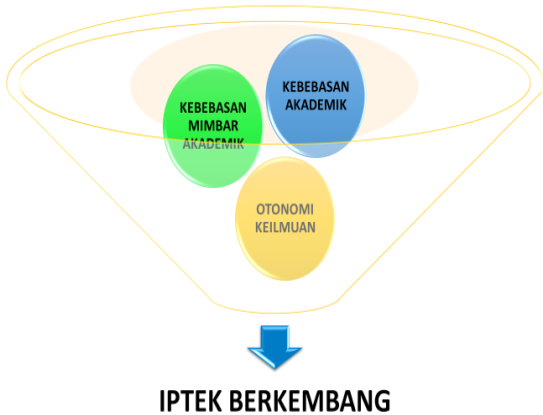


Bagan 87. Tata Kelola PT

Keempat. Akuntabilitas PT. yang dimaksud dengan akuntabilitas PT adalah bentuk pertanggungjawaban PT kepada masyarakat, baik akuntabilitas akademik maupun non akademik. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan PT memnuhi SN Dikti yang telah ditetapkan pemerintah melalui mekanisme pelaporan setiap tahun dan pemenuhan target kinerja PT sesuai visi misi PT.

5. Pengembangan Iptek di Perguruan Tinggi

Dengan hak otonom PT untuk melakukan penyelenggaraan PT, maka PT bisa melaksanakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam konteks kegiatan akademiknya. Melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan maka Iptek bisa dikembangkan sivitas akademika.



Bagan 88. Pengembangan Iptek di PT

Kebebasan Akademik sesuai dengan Pasal 9 ayat 1.UU.N0 12/2012 adalah **kebebasan sivitas akademika** dalam pendidikan tinggi untuk **mendalami dan mengembangkan** IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Sedangkan kebebasan mimbar akademik adalah merupakan **wewenang profesor dan/ atau dosen** yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk **menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab** mengenai **sesuatu** yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya (**Ps1 9 ayat (2).UU.N0 12/2012**) otonomi keilmuan adalah **otonomi sivitas akademika** pada suatu cabang IPTEK dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan / atau mempertahankan **kebenaran ilmiah** menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik (**Ps1 9 ayat (3).UU.N0 12/2012**).

Daftar Referensi

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahu.2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemenintah N0.4 th 2014 tentang “Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”
Renstra ristekdikti 2015-2019



B. Desiminasi SMPM-Dikti

1. Pengantar

Saat ini Perguruan Tinggi (PT) “dipaksa” untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan, jika tidak ingin ditinggalkan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh PT adalah dengan melaksanakan penjaminan mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu PT tidak hanya karena regulasi dari pemerintah juga karena tuntutan zaman. Tetapi melaksanakan penjaminan mutu tidak serta merta bisa berhasil, tetapi diperlukan kesadaran bersama bahwa kualitas bangsa bisa dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan. sedangkan roh dasar peningkatan kualitas pendidikan adalah adanya api semangat perbaikan terus-menerus dalam

semua bidang pendidikan (*Continous Improvement*). Dan tentu saja SPMI dilaksanakan dalam Siklus PPEPP yang diterapkan di semua aspek pengelolaan Perguruan Tinggi dan Perlu selalu dikembangkan peningkatan dan pemeliharaan komitmen bersama serta partisipasi sivitas akademika untuk mencapai budaya mutu (Sutapa, 2018).

Di Indonesia Pelaksanaan penjaminan mutu ini ada dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Oleh karena itu dalam kesempatan diseminasi SPMI ini akan disampaikan hal-hal: 1) Sekilas SPMI, 2) Hubungan SPMI, SN Dikti, SAN dan PD Dikti, serta 3) strategi implementasi SPMI Efektif.

2. Sekilas SPM-PT

a. Pengertian, tujuan, fungsi, Dasar Hukum SPM-Dikti dan Budaya Mutu

Sesuai Permenristekdikti **No. 62 Tahun 2016** Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti) maka yang dimaksud dengan SPM Dikti adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi (Kemneristekdikti, 2018). SPM Dikti ini memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia, dan berfungsi untuk Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

SPM Dikti dilaksanakan berdasarkan amanah dari:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti
- 3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- 4) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- 6) Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti
- 7) Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- 8) Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

Hasil dari pelaksanaan SPM Dikti adalah terwujudnya budaya mutu, yaitu : Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

b. Struktur SPM Dikti

Untuk menjalankan SPM Dikti, maka SPM Dikti disusun dalam suatu struktur yang terdiri dari SPMI, SPME dan OD Dikti (Kemneristekdikti, 2018).

Pertama. SPMI, yaitu SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.

Kedua.. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Ketiga. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Ketiga struktur ini saling berhubungan dan difasilitasi oleh Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

c. Mekanisme SPM Dikti

Untuk menjamin pelaksanaan SPM Dikti mencapai tujuannya, maka ditetapkan mekanisme SPM Dikti itu sendiri oleh Kemenristekdikti dengan akronim PPEPP yang merupakan 5 tahapan dalam suatu siklus. Kelima tahapan-siklus SPM Dikti yaitu:

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

3. Hubungan SPMI, SN Dikti, SAN dan PD Dikti

Dalam SPM Dikti ada tiga struktur yang terlibat secara aktif yaitu SPMI, SPME dengan SAN (Sistem Akreditasi Nasional), dan PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Ketiga struktur ini bekerja dalam kerangka untuk minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenristekdikti N0 44 tahun 2015.

SPME berfungsi untuk memastikan PT bisa memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam SN Dikti, sedangkan SPMI berfungsi untuk memastikan PT selain bisa memenuhi juga diharapkan untuk bisa melampaui SN Dikti. Jika SPMI baik, maka otomatis SPME baik dan hasilnya akan diketahui dari Raihan

peringkat Akreditasi dari BAN PT maupun LAM PT yang bertugas melakukan pengawalan SPME.

4. Strategi Implementasi SPMI

Strategi implementasi SPMI secara umum mengacu kepada pola umum yang bisa diterapkan PT manapun di Indonesia, sedangkan strategi khusus merupakan strategi yang berkaitan dengan menjalankan SPMI sesuai karakteristik local PT.

Pertama. Adapun startegi umum implementasi SPMI sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Panduan Implementasi SPMI meliputi 4 langkah sebagai berikut:

- a. **Perencanaan SPMI, yaitu** Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yang berjumlah 4 buku, yaitu Buku/Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
- b. **Pelaksanaan SPMI, yaitu** Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan SPMI. Pelaksanaannya mengacu kepada siklus PPEPP.

1) **Penetapan Standar Dikti.** Di tahap **ini** PT menetapkan Standar PT baik yang memenuhi SN Dikti atau tambahan standar khusus yang ditetapkan oleh PT itu sendiri. Beberapa Langkah yang bisa dilakukan PT di Langkah ini antara lain:

- a) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain, seperti Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi; Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan • Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.
- b) melakukan benchmarking ke perguruan tinggi, mengundang narasumber yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau

informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;

- d) merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan);
 - e) melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
 - f) melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
 - g) menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- 2) **Pelaksanaan Standar Dikti.** Para pihak yang menjadi subyek atau audience (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.
- 3) **Evaluasi Standar Dikti.** Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga

dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation dalam bentuk AMI atau Akreditasi.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- c) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Adapun obyek yang dievaluasi adalah:

- a) *proses* atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
 - b) *prosedur* atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
 - c) *hasil* atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
 - d) *dampak* atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
- 4) **Pengendalian Standar Dikti.** Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Tindakan pengendaliannya adalah:
- a) Jika temuan (findings) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah **sesuai** dengan apa yang telah dicantumkan di (Standar Dikti), maka **langkah pengendaliannya** berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat **dipertahankan**.
 - b) jika temuan (findings) menunjukkan **tidak sesuai atau menyimpang**, maka harus dilakukan tindakan **koreksi atau perbaikan** untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Catatan lain tentang temuan dan Tindakan koreksi adalah:

- a) jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti: rapat pimpinan, penjatuhan tindakan koreksi tertentu (: instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/ kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat)
 - b) Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (findings) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
 - c) Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh LPM, karena LPM tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (findings) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.
- 5) **Peningkatan Standar Dikti.** Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **telah melalui keempat tahap siklus SPMI**. Peningkatan Standar Dikti dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.
- c. **Evaluasi dan Pengendalian SPMI.** Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Sedangkan yang ditingkatkan adalah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berupa unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi ketiganya. Misalnya:
- a) **Behavior:** 'Setiap semester dosen wajib **menyusun silabus** matakuliah yang diasuhnya
 - b) **Competence:** 'Setiap semester dosen wajib **menyusun silabus** matakuliah yang diasuhnya dengan **mencantumkan capaian pembel-**

ajaran mata kuliah dan harus **selaras dengan capaian pembelajaran program studi**

- c) **Degree: Paling lambat satu bulan sebelum awal semester** berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi’.
- d. **Pengembangan SPMI** Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Kedua. Strategi Khusus. Strategi khusus berkaitan dengan karakteristik PT yang akan menerapkan SPMI khususnya dalam memulai budaya mutu. Strategi memulai budaya mutu, dilakukan dengan:

- a. Selalu kaitkan dengan visi besar institusi
- b. Lakukan program Review
- c. Kembangkan /evaluasi diri self assesment secara periodik
- d. Upayakan pandangan dari pihak eksternal
- e. Ciptakan Academic atmosfeer yang lebih baik (Sutapa, 2018)

5. Indikator Keberhasilan Implementasi SPMI

Setelah SPMI dilaksanakan, maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut berhasil atau tidak maka perlu dilakukan pengukuran. Setidaknya bisa dilihat dari beberapa indikator keberhasilan implementasi SPMI. Menurut Sutapa (Sutapa, 2018) adalah:

- a. Sederhana/tidak complicated
- b. Diterima secara luas
- c. Tidak birokratik
- d. Mudah dioperasikan
- e. Efektif dan efisien
- f. Disesuaikan dengan kondisi spesifik

6. Penutup

PT merupakan ujung tombak yang digadang pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan layanan pendidikan final bagi warga negara Indonesia sehingga menghasilkan lulusan/SDM yang berkualitas yang diperlukan oleh pembangunan negara ini. Amanat ini bisa dilaksanakan PT jika PT melaksanakan penjaminan mutu atas pelaksanaan pendidikan tingginya. Untuk bisa melaksanakan dengan baik, maka dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu tentang SPM Dikti yang terdiri dari SPMI, SPME dan PD Dikti.

Daftar References

- Kemneristekdikti, D. P. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pendidikan Akademik-Vokasi-Profesi-Pendidikan jarak Jauh*. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Sutapa, J. P. (2018). *Strategi Pengembangan SPMI Di Tingkat Fakultas, Lembaga dan Pascasarjana Dalam Mendukung Terwujudnya Visi Perguruan Tinggi*. Retrieved from Kantor Jaminan Mutu UGM: http://penjamu.lppmp.uny.ac.id/sites/penjamu.lppmp.uny.ac.id/files/STRATEGI%20PENGEMBANGAN%20SPMI%20DITINGKAT%20FAKULTAS%20%20LEMBAGA%20DAN%20%20PASCASARJANA_0.pdf



C. Mewujudkan Pembelajaran Bermutu Melalui Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pembelajaran

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Visi Kemenristekdikti yaitu “Terwujudnya Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Serta Kemampuan IPTEK Dan Inovasi untuk Mendukung Daya saing Bangsa” maupun salah satu sasaran strategisnya yaitu “meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Pendidikan tinggi”, maka setiap perguruan Tinggi (PT) wajib mengupayakan kualitas pembelajaran. Untuk mewujudkan

pembelajaran yang bermutu inilah kemudian pemerintah menetapkan standar minimal pelayanan Pendidikan tinggi melalui Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang direvisi melalui Permenristekdikti No 50 tahun 2018 dan mewajibkan semua PT di Indonesia untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) melalui praktik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM PT atau SPM Dikti.

Salah satu standar mutu nasional yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah mengenai SKL dan ISI Pembelajaran. Yang menjadi problem sekarang adalah kondisi real di setiap PT yang berbeda-beda, pembelajaran yang tidak berpusat pada mahasiswa, isi pembelajaran yang tidak ada acuannya karena kurikulum tidak relevan. Di sinilah pentingnya bagi PT untuk menjalankan SPMI.

Berdasarkan hal ini maka pembahasan yang akan dilakukan adalah: 1) urgensi penetapan standar mutu, 2) standar mutu SKL dan Isi Pembelajaran, 3) Instrumen AMI SKL dan ISI Pembelajaran.

2. Urgensi Standar Mutu SPMI

SPMI yang dikembangkan setiap PT memiliki tujuan agar PT mampu menciptakan sistem pengendalian oleh PT secara mandiri, karena PT memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. PT bisa melaksanakan SPMI melalui siklus yang disebut PPEPP, yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti dan Peningkatan Standar Dikti.

Langkah pertama dari siklus PPEPP adalah Penetapan Standar Dikti. Untuk penetapan standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran memiliki rasionalitas. Pertama, rasionalisasi penetapan standar SKL adalah bahwa salah satu misi yang telah ditetapkan oleh PT sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan PT yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan

yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Kedua, rasionalisasi Standar Isi bahwa: Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Dokumen Standar Kompetensi Lulusan di dalamnya berisi beberapa komponen seperti: visi, misi Lembaga, rasional, subyek/pihak yang wajib memenuhi standar, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi, indikator kinerja utama dan tambahan, dokumen terkait dan referensi, namun dalam konteks tulisan ini hanya akan disampaikan tentang Pernyataan Isi Standar.

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan adalah:

- a. Rektor mengeluarkan Kebijakan tentang Pengembangan Kurikulum agar semua kurikulum Prodi memenuhi unsur yang wajib dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulumnya, meliputi 4 aspek: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi minimal 5 tahun sekali.
- b. Universitas memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum agar kurikulum Prodi memuat 2 aspek berikut: 1) *Profil lulusan*, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) *Mekanisme penetapan* (legalitas) kurikulum yang

- melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan maksimal berlaku 5 tahun sekali.
- c. Universitas memiliki Pedoman Implementasi kurikulum agar kurikulum prodi memenuhi 4 aspek berikut: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya maksimal 2 tahun sejak diterbitkan.
 - d. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan agar bisa digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan minimal 5 tahun sekali
 - e. Ketua Program Studi harus menyusun Standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan CPL yang memuat 4 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan dan kekhasan nilai-nilai keghozalian agar sesuai tuntutan minimal dilakukan 5 tahun sekali
 - f. Ketua Program Studi harus menentukan bahwa aspek Sikap lulusan harus menunjukkan perilaku berilmu, berbudi dan berbudaya dalam bingkai nilai-nilai keghozalian sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar lulusan sesuai tuntutan dan berkarakter keghozalian maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan.
 - g. Ketua Program Studi harus menentukan bahwa aspek Pengetahuan lulusan seharusnya terdiri dari penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar lulusan sesuai tuntutan dan berkarakter keghozalian maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan.
 - h. Ketua Program Studi harus menentukan bahwa Keterampilan lulusan seharusnya menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang

diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar lulusan sesuai tuntutan dan berkarakter keghozalian maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan

- i. Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan agar kurikulum Prodi sesuai ketentuan yang berlaku paling lama 4 sd 5 tahun sekali.
- j. Ketua Program Studi meninjau kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna agar lulusan sesuai dengan pasar minimal 5 tahun sekali.
- k. Ka Prodi harus menggunakan SKL/CPL sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran agar lulusan memenuhi ketentuan paling lama 1 bulan sejak ditetapkan
- l. Ka Prodi harus menetapkan bahwa Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus, merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis agar lulusan sesuai ketentuan paling lama 1 bulan sejak SKL ditetapkan.
- m. Ka Prodi menetapkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis agar lulusan sesuai ketentuan paling lama 1 bulan sejak SKL ditetapkan.

4. Standar Isi Pembelajaran

Pernyataan isi dari standar isi pembelajaran adalah:

- a. Ketua Program Studi bersama tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi 4 kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yaitu: 1) mengacu pada CPL, 2) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, di mana program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, 3) bersifat kumulatif dan/atau integrative dan 4) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah dalam 4 sd 5 tahun.
- a. Setiap Program Studi memiliki Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara dari 3 aspek berikut: 1) matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam setiap 4 sd 5 tahun
- b. Wakil Rektor bidang akademik, Dekan, Ka Prodi dan Ketua LP3 melakukan telaah isi kurikulum Program Studi yang harus memuat mata kuliah penciri UNUGHA CILACAP yang meliputi: Mata kuliah Keghozalian (3 sks), Filsafat Ilmu Al Ghazali (2 sks) dan Etika Al Ghazali (2 sks) dalam setiap periode pengembangan kurikulum.
- c. Ketua Program Studi harus meninjau ulang isi kurikulum minimal sekali dalam 4 sd 5 tahun
- d. Ketua Program Studi harus menetapkan jumlah minimal sks yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa.
- e. Ketua Program Studi harus menetapkan jumlah minimal dan maksimal sks yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan Indeks Prestasi Mahasiswa.

5. Instrumen AMI SKL dan ISI

Standar SKL dan ISI Pembelajaran yang sudah ditetapkan, kemudian harus dilaksanakan agar mencapai target (kinerja utama dan tambahan) yang ada dalam

standar tersebut. Cara yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap ketercapaian hal tersebut adalah dengan dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI) dengan menggunakan Instrumen AMI. Adapun instrument AMI untuk standar kompetensi lulusan dan isi pembelajaran bisa dilihat berikut ini.

Instrument Audit SKL

- a. Ketersediaan Kebijakan tentang Pengembangan Kurikulum UNUGHA yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.

1	Kurang dari 2 aspek minimal 5 tahun sekali
2	2 dari 4 aspek minimal 5 tahun sekali
3	3 dari 4 aspek minimal 5 tahun sekali
4	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek minimal 5 tahun sekali

- b. Ketersediaan Pedoman Pengembangan Kurikulum

1	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum memenuhi aspek apapun
2	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang hanya memuat 1 aspek saja
3	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat 2 aspek: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
4	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat 2 aspek: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.

c. Ketersediaan Buku Pedoman Implementasi/Pelaksanaan Kurikulum UNUGHA

1	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap.
2	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan
3	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.
4	Perguruan tinggi memiliki Buku Pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya

d. Kersedianya Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan dan ditetapkan Ka Prodi

1	0
2	Prodi tidak memiliki SKL dan CPL
3	Prodi memiliki SKL dan CPL tapi belum ditetapkan Ka Prodi
4	Prodi memiliki SKL dan CPL yang ditetapkan Ka Prodi

e. Tersedianya SKL dalam rumusan CPL memuat sikap, pengetahuan, keterampilan dan kekhasan nilai-nilai keghozalian

1	Tersedianya SKL / CPL memuat 1 aspek saja
2	Tersedianya SKL / CPL memuat 2 aspek
3	Tersedianya SKL / CPL memuat 3 aspek
4	Tersedianya SKL / CPL memuat 4 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan dan kekhasan nilai-nilai keghozalian

f. Tersedianya rumusan aspek Sikap lulusan yang menunjukkan: 1) perilaku berilmu, 2) berbudi dan berbudaya dalam bingkai nilai-nilai keghozalian sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial 3) melalui proses pembelajaran, 4) pengalaman kerja mahasiswa, 4) penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar lulusan 5) sessuai tuntutan dan 6) berkarakter keghozalian 7) maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan.

1	Tersedianya rumusan aspek sikap yang memenuhi 6 kriteria
2	Tersedianya rumusan aspek sikap yang memenuhi 5 kriteria
3	Tersedianya rumusan aspek sikap yang memenuhi 4 kriteria
4	Tersedianya rumusan aspek sikap yang memenuhi 7 kriteria

- g. Tersedianya rumusan aspek Pengetahuan lulusan yang menunjukkan:
- 1) penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
 - 2) diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar
 - 3) lulusan sesuai tuntutan dan berkarakter keghozalian
 - 4) maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan.

1	tersedianya rumusan aspek pengetahuan yang memenuhi 1 kriteria
2	tersedianya rumusan aspek pengetahuan yang memenuhi 2 kriteria
3	tersedianya rumusan aspek pengetahuan yang memenuhi 3 kriteria
4	tersedianya rumusan aspek pengetahuan yang memenuhi 4 kriteria

- h. Tersedianya rumusan aspek Keterampilan lulusan seharusnya menunjukkan :
- 1) kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang
 - 2) diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran agar
 - 3) lulusan sesuai tuntutan dan berkarakter keghozalian
 - 4) maksimal 1 bulan setelah profil lulusan ditetapkan

1	tersedianya rumusan aspek ketrampilan yang memenuhi 1 kriteria
2	tersedianya rumusan aspek ketrampilan yang memenuhi 2 kriteria
3	tersedianya rumusan aspek ketrampilan yang memenuhi 3 kriteria
4	tersedianya rumusan aspek ketrampilan yang memenuhi 4 kriteria

- i. Tersedianya ketentuan Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus, meliputi aspek:
- 1) pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu,
 - 2) pada jangka waktu tertentu,
 - 3) berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis agar
 - 4) lulusan sesuai ketentuan
 - 5) paling lama 1 bulan sejak SKL ditetapkan.

1	Tersedianya ketentuan Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus memenuhi 2 aspek
2	Tersedianya ketentuan Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus memenuhi 3 aspek
3	Tersedianya ketentuan Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus memenuhi 4 aspek
4	Tersedianya ketentuan Pengalaman kerja mahasiswa dalam ketrampilan khusus memenuhi 5 aspek

- j. Tersedianya kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan sesuai SN-Dikti dan KKNI berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan,

1	Prodi memiliki kurikulum yang disusun/dikembangkan tidak sesuai SN Dikti dan KKNI
2	Prodi memiliki kurikulum yang disusun/dikembangkan sesuai SN Dikti dan KKNI
3	Prodi memiliki kurikulum yang disusun/dikembangkan sesuai SN Dikti dan KKNI berdasarkan masukan dari salah satu para pemangku kepentingan
4	Prodi memiliki kurikulum yang disusun/dikembangkan sesuai SN Dikti dan KKNI berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- k. Dilakukannya Peninjau kurikulum dan rumusan CPL Prodi secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna agar lulusan sesuai dengan pasar minimal 5 tahun sekali.

1	peninjauan kurikulum dan CPL Prodi sesuai kurang dari 4 aspek
2	peninjauan kurikulum dan CPL Prodi sesuai 4 dari 8 aspek
3	peninjauan kurikulum dan CPL Prodi sesuai 6 dari 8 aspek
4	Peninjauan kurikulum dan CPL Prodi melibatkan: 1) pemangku internal, 2) pemangku eksternal, 3) direview pakar bidang ilmu, 4) industri, 5) asosiasi, 6) sesuai perkembangan Iptek, 7) sesuai kebutuhan pengguna dan 8) minimal 5 tahun sekali

- j. Adanya bukti bahwa SKL/CPL dijadikan acuan utama dalam pengembangan 7 standar: standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran maksimal 1 bulan sejak ditetapkan.

1	Adanya bukti bahwa SKL/CPL dijadikan acuan utama dalam pengembangan kurang dari 5 standar lebih dari 1 bulan
2	Adanya bukti bahwa SKL/CPL dijadikan acuan utama dalam pengembangan 5 dari 7 standar maksimal 1 bulan sejak ditetapkan
3	Adanya bukti bahwa SKL/CPL dijadikan acuan utama dalam pengembangan 6 dari 7 standar maksimal 1 bulan sejak ditetapkan
4	Adanya bukti bahwa SKL/CPL dijadikan acuan utama dalam pengembangan 7 standar: standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen & tenaga kependidikan, standar sarana & prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran maksimal 1 bulan sejak ditetapkan

- k. Adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum

1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal
2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal
3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
4	Evaluasi & pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal & eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks & kebutuhan pengguna.

- l. Tersusunnya SKL dan CP semua Prodi di UNUGHA sesuai standar KKNI dan nilai keghozalian

1	50% SKL dan CP Prodi tersusun sesuai KKNI dan Nilai Keghozalian
2	75% SKL dan CP Prodi tersusun sesuai KKNI dan Nilai Keghozalian
3	90% SKL dan CP Prodi tersusun sesuai KKNI dan Nilai Keghozalian
4	100% SKL dan CP Prodi tersusun sesuai KKNI dan Nilai Keghozalian

- m. Adanya kesesuaian CP Prodi, Profil Lulusan, KKNI dan Nilai Keghozalian

1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, tidak memenuhi level KKNI dan tidak mengintegrasikan nilai keghozalian
2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI dan nilai keghozalian
3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, nilai keghozalian dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.
4	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta nilai keghozalian dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna

- n. Tersusunnya kurikulum semua Prodi di UNUGHA secara lengkap

1	50% Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap
2	75% Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap
3	90% Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap
4	100% Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap

Instrument Audit Standar Isi Pembelajaran

1. Kurikulum Program Studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNUGHA, dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan masing-masing Program Studi.

1	struktur Kurikulum Prodi tidak memiliki kesesuaian 3 aspek
2	Kurikulum Prodi hanya memiliki 1 kesesuaian
3	Kurikulum Prodi memiliki kesesuaian 2 dari 3 aspek
4	Kurikulum Prodi memiliki kesesuaian dengan semua aspek 3 berikut: 1) visi, misi, tujuan UNUGHA, 2) peraturan perundangan dan 3) kompetensi Prodi

2. Semua Prodi memiliki Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan

1	struktur Kurikulum Prodi tidak memuat 3 aspek
2	struktur Kurikulum Prodi hanya memuat 1 dari 3 aspek
3	struktur Kurikulum Prodi memuat 2 dari 3 aspek
4	Struktur Kurikulum Prodi memiliki memuat 3 aspek berikut: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, 2) capaian jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan

3. Kurikulum Program studi memiliki ciri khas keghozalian

1	-
2	Kurikulum Program studi tidak memiliki ciri khas keghozalian
3	Kurikulum Program studi Sebagian memiliki ciri khas keghozalian
4	Kurikulum Program studi semua memiliki ciri khas keghozalian

4. Kurikulum Program Studi yang harus diambil mahasiswa memenuhi sks ideal: 144 sks, sd. maksimal berat (160 sks)

1	Kurikulum Prodi yang wajib diambil mahasiswa sebanyak 150-160 sks
2	Kurikulum Prodi yang wajib diambil mahasiswa sebanyak 148 sks
3	Kurikulum Prodi yang wajib diambil mahasiswa sebanyak 146 sks
4	Kurikulum Prodi yang wajib diambil mahasiswa sebanyak 144 sks

D. Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju *World Class University*

1. Pendahuluan

Saat ini disadari atau tidak, kita telah masuk ke era globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan suatu tatanan di mana dunia menjadi begitu terbuka dan transparan, sehingga ada kesan seolah-olah tak ada lagi batas negara. Kecenderungan global inilah yang oleh Kenichi Ohmae dalam Sufyarma (2004) disebut sebagai *borderless world*.

Sebenarnya adanya globalisasi dimulai dalam bidang informasi dan ekonomi, namun kemudian mempunyai implikasi yang sedemikian besar terhadap bidang-bidang lain, termasuk pendidikan. Pengaruh yang sedemikian kuat inilah yang memaksa setiap bangsa untuk mempersiapkan diri dengan sikap antisipasi atau bahkan beradaptasi dengan pengaruh globalisasi tersebut.

Satu kondisi yang diakibatkan oleh globalisasi adalah adanya hiperkompetisi, akselerasi suksesi revolusi Iptek, *alienasi*, *stress*, *ketegangan* antar kelompok, ketergantungan pada obat terlarang dan sebagainya, demikian yang diramalkan Gibson dalam Ahmadi (2005). Akibat inilah yang semestinya diperhitungkan dan diantisipasi sejak awal, agar tidak menimpa generasi muda bangsa yang sesungguhnya akan lebih banyak mengalami hidup dalam era globalisasi ini. Bentuk antisipasi dan adaptasi yang paling efektif adalah melalui proses pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan bertugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa depan.

Ketika dunia sudah berada dalam era globalisasi inilah, maka ada semacam tuntutan bago semua komponen yang ada di dunia ini untuk menyesuaikan dengan globalisasi. Tak terkecuali adalah dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi (PT). Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa isu penting yang

mesti dicermati oleh PT adalah internasionalisasi PT dan *World Class University* (WCU).

Menurut Prof.Dr.der Soz Gumilar R. Sumantri dalam Ghafur (2009), saat ini PT dihadapkan pada adanya tuntutan internasionalisasi dari era globalisasi. Tuntutan itu berkaitan dengan:

- Sifat keuniversalan ilmu pengetahuan (IP) yang tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat ruang dan waktu. IP adalah bahasa universal serta penghubung antarbudaya, antarbangsa, antar generasi dan antar zaman.
- Internasionalisasi sekaligus mendorong dan “memaksa” PT Indonesia untuk membangun mutu diri sendiri sesuai standar pendidikan dunia yang diukur oleh berbagai badan penjaminan mutu internasional dan akreditasi lintas batas negara.
- Internasionalisasi juga merangsang kalangan ilmuwan Indonesia untuk lebih *extovert* dengan membuka diri secara lebih luas ke komunitas dunia dengan mengumumkan karya-karyanya, terutama hasil penelitian, melalui jurnal-jurnal internasional.
- Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa PT Indonesia tidak sekedar “jago kandang”, melainkan mampu bersaing dengan berbagai PT lainnya di manca negara.
- Untuk turut mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermutu dan terpercaya.
- Untuk turut mendorong adanya pengakuan dunia terhadap kualitas tenaga kerja lulusan PT Indonesia di pasar kerja internasional.

Disamping hal tersebut, globalisasi juga menuntut kesiapan setiap elemen kehidupan yang ingin tetap survive agar menyesuaikan dengan “apa yang dikehendaki oleh dunia”. Jika setiap elemen kehidupan mampu menangkap apa yang apa yang dikehendaki masyarakat dunia, maka ia akan mampu memberikan kontribusi atas hal yang dibutuhkan dunia. Jika sudah demikian, maka elemen itu adalah elemen dari *world class*. Termasuk juga di dalamnya adalah PT. Jika PT menginginkan dirinya menjadi elemen WCU, maka PT tersebut harus mengetahui dan memberikan layanan dari apa yang semestinya dikehendaki dunia. Sedangkan salah satu jalan untuk menjadi WCU, PT tersebut harus terlebih dahulu melakukan strategi internasionalisasi PT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan melakukan pembahasan tentang “strategi internasionalisasi PT menuju *World Class University*”. Untuk bisa membahas persoalan ini, maka rumusan masalahnya adalah: 1) bagaimana globalisasi mempengaruhi PT?, 2) bagaimana konsep internasionalisasi PT? Dan 3) bagaimana strategi internasionalisasi PT mampu mengantarkan PT ke WCU?

2. Globalisasi Dan Implikasinya Bagi Perkembangan Perguruan Tinggi

a. Pengertian Globalisasi

Sebelum memahami pengaruh globalisasi terhadap perkembangan PT, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui dan memahami apa sesungguhnya globalisasi. Secara umum ada dua kutub yang bisa digunakan dalam memahami apa globalisasi itu, yaitu bipolarisme konsep globalisasi (Khufad, 2009). Kutub pertama adalah kutub interdependensi dan kutub kedua adalah kutub dependensi. Kutub interdependensi digawangi oleh John Naisbit dan David Ricardo, sedangkan kutub dependensi tokohnya adalah Peter Drucker, Cohen dan Giddens.

Masih dalam sumber yang sama, dijelaskan beberapa pandangan tentang globalisasi yang masuk dalam kutub interdependensi:

- 1) *Globalization is the process of increasing interdependence among countries and their citizens in all aspect.*
- 2) *Economic globalisation is the process of increasing economic interdependence among countries and their citizens.*

b. Adapun pandangan kutub dependensi adalah:

- 1) *Globalization of economics. The rise of neo-capitalism (neo-liberalism)*
- 2) *Globalization of politics. The end of nation-state*
- 3) *Globalization of social relations. The stretching of social relations.*
- 4) *Globalizations f culture. Homogenization: cultural imperialism.*

3. Implikasi Globalisasi Bagi Perkembangan PT

Jika mengacu kepada konsep globalisasi sebagai proses peningkatan hubungan yang saling bergantung antar negara dan warga negar dalam segala aspek sebagaimana batasan pertama dari kutub interdependensi, maka PT dalam hal ini

terimbas globalisasi dalam hal saling bergantungnya PT di suatu negara dengan PT di negara lain. Ketergantungan ini yang kemudian melahirkan adanya sekian banyak bentuk kerjasama internasional PT dengan beberapa pihak yang dianggap mampu mengantarkan PT kepada kepentingan di dunia luas.

Ghafur (2009) dalam hal ini juga mengajukan beberapa pendapatnya tentang dampak globalisasi bagi PT, yaitu:

- PT dituntut paksa untuk merespons berbagai aspek yang muncul dari globalisasi dan dampaknya.
- PT dituntut untuk merespon globalisasi dengan menginternasionalisasi fungsi-fungsi akademik dan non akademiknya.
- PT didorong untuk masuk ke dalam struktur pasar yang keras dengan persaingan bebas dan terbuka.
- PT dituntut pro aktif untuk ambil bagian dari pertumbuhan masyarakat dunia berbasis jaringan dengan memperkuat daya dukung teknologi komunikasi dan informasi (ICT).
- Mengembangkan profesionalisme dan manajerialisme dengan memperkuat tata kelola PT yang baik (*good university governance*).

Sejalan dengan dampak globalisasi bagi PT, maka PT membutuhkan kemampuan lebih agar ia bisa melaksanakan kerjasama internasional sebagai salah satu jalan menuju WCU yang sudah menjadi satu kebutuhan yang tak terelakkan. Dalam hal ini jalan yang harus diwujudkan PT adalah dengan menerapkan strategi internasionalisasi PT.

4. Internasionalisasi Perguruan Tinggi

a. Definisi Internasionalisasi PT

Elliot (1999) dalam Ghofur (2009) mendefinisikan internasionalisasi PT sebagai “sebuah upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menjadikan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan tinggi lebih responsif terhadap tantangan globalisasi ekonomi dan masyarakat”.

Kemudian masih dalam sumber yang sama, Knight mendefinisikan internasionalisasi PT sebagai proses pengintegrasian dimensi internasional dan interkultural ke dalam fungsi pengajaran, penelitian dan pelayanan dari sebuah institusi”. Dari definisi ini maka bisa dipahami:

- 1) Internasionalisasi dan kerjasama internasional adalah proses yang dinamis dan perlu respon secara positif untuk pengembangan Iptek bagi kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat manusia.
- 2) Pengintegrasian dan pemaduan dimensi-dimensi internasional adalah kata kunci yang penting untuk menjamin bahwa program, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada sebuah PT harus mampu mengadopsi aspek-aspek internasional serta mendukungnya keberlanjutan internasionalisasi.

b. Pendekatan Internasionalisasi PT

Untuk melakukan internasionalisasi PT, menurut Knight dalam Ghafur (2009) ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan PT di dunia dalam melaksanakan internasionalisasi PT. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 23. Pendekatan Internasionalisasi PT

Tipe Pendekatan	Fokus Kegiatan
Pendekatan aktivitas	• Pengembangan kurikulum internasional • Pertukaran mahasiswa • Bantuan teknis • Penjaringan mahasiswa asing
Pendekatan kompetensi	Peningkatan ketrampilan, sikap dan nilai yang mendukung program internasionalisasi pada mahasiswa, pengajar dan staf.
Pendekatan etos	Menekankan pada penciptaan kultur dan iklim kampus yang mendukung dan mempromosikan inisiatif internasional atau interkultural.
Pendekatan proses	Integrasi / pemaduan dimensi internasional & interkultural ke dalam pengajaran, penelitian & pelayanan melalui kebijakan prosedur & kegiatan yang tepat.

Adapun strategi internasionalisasi PT yang biasa digunakan oleh berbagai PT di dunia, masih menurut Knight bisa di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

Pertama. Strategi program, mencakup hal-hal yang terkait antara lain dengan kegiatan akademik, penelitian, hubungan eksternal dan pelayanan publik. Pada program akademik biasanya dilakukan program-program seperti pertukaran mahasiswa, pengajaran bahasa asing, internasionalisasi kurikulum, penjaringan mahasiswa asing dan peningkatan kesempatan belajar di luar negeri bagi mahasiswa/staf pengajar. Selain progra, tersebut, program ini juga dilakukan dengan pembukaan kajian kewilayahan, program *join/double degree*, mengirim dan atau mengundang dosen tamu dari luar negeri.

Disamping itu, internasionalisasi dan kerjasama internasional juga bisa dilakukan melalui program kerja kolaboratif, seminar dan konferensi internasional, penerbitan artikel di jurnal-jurnal internasional, perjanjian penelitian internasional, serta pertukaran peneliti dan mahasiswa pascasarjana. Dalam konteks pelayanan publik dan hubungan eksternal, internasionalisasi PT tampil dalam berbagai program seperti kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta untuk menjalankan program-program layanan masyarakat, partisipasi dalam jaringan internasional, penyediaan layanan masyarakat dalam proyek-proyek lintas batas negara, lintas kultural, dan pendataan serta jaringan alumni di mancanegara.

Kedua. Strategi organisasi dalam mengembangkan program internasionalisasi harus menyentuh aspek-aspek manajemen dan tata kelola, perangkat operasional, pengembangan SDM dan layanan pendukung. Strategi program harus menjamin bahwa dimensi internasional terlembagakan dengan baik melalui sumber daya manusia, kebijakan dan sistem administrasi. Untuk itu perlu pengintegrasian visi dan misi internasionalisasi ke dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pengkajian mutu PT. Struktur organisasi yang tepat serta sistem komunikasi yang mendukung dan alokasi sumber daya yang memadai juga penting. Layanan pendukung bagi mahasiswa asing yang belajar di PT tersebut seperti layanan asrama, pelatihan bahasa, program orientasi dan sebagainya harus tersedia dengan baik dan tidak bisa diabaikan. Terakhir pula, tersedia SDM yang berkualitas yang dapat dilakukan melalui program-program penghargaan kepada staf, dukungan pada kegiatan-kegiatan staf di level internasional serta adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih terbuka dan tepat sehingga mampu menjaring orang-orang yang mempunyai keahlian istimewa dengan reputasi internasional dan wawasan internasional.

5. *World Class University (WCU)*

WCU mempunyai pengertian yang berbeda-beda, baik target maupun kriteria penilaiannya. Saat ini beberapa institusi yang telah mantap dan diakui dunia sebagai lembaga pengakreditasi WCU antara lain: *The Times Higher Education Supplement* (THES) dengan situsnya di <http://www.thes.co.uk>; Academic Ranking of World Universities (ARWU) oleh Intitute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, China yang dapat dilihat di situs <http://www.arwu.org>; Webometric (<http://www.webometrics.info>).

Adapun komponen yang harus ada dalam WCU menurut Hendarman, antara lain

1. *World Reputation:*

Third-party Endorsement (Pengesahan pihak ketiga)

Little room for engineering

World Ranking:

Time Higher Education Supplement

Shanghai Jiatong World Universities Ranking

Webometrics Ranking of World Universities

Global Ranking:

a. *Time Higher Education Supplement*

1)	<i>Peer review (5,101)</i>	40%
2)	<i>Employee review (1,471)</i>	10%
3)	<i>Student/Teacher ratio</i>	20%
4)	<i>Citation index</i>	20%
5)	<i>International Teachers</i>	5%
6)	<i>International Students</i>	5%

b. *Shanghai Jiaotong Academic Ranking of world Universities*

1)	<i>Alumni as Nobel Laureate</i>	10%
2)	<i>Faculty as Nobel Laureate</i>	20%
3)	<i>Highly-cited researchers</i>	20%
4)	<i>Articles in Nature and Science</i>	20%
5)	<i>Articles in SCI</i>	20%
6)	<i>Size</i>	10%

c. *Webometrics Ranking of World Universities:*

1)	<i>Web size</i>	20%
2)	<i>Rich files</i>	15%
3)	<i>Scholar (Google)</i>	15%
4)	<i>Visibility (Link)</i>	50%

2. *Prominents Graduates*
 - 1) *Celebrities of national culture*
 - 2) *Community leaders*
 - 3) *International figures*
3. *Research Performance*
 - 1) *Research output:*
 - a) *Research assessment Exercises*
 - b) *Dominance of Anglo-saxon research culture*
 - 2) *Strategic capacity building*
 - a) *Strategic of resources on selected areas*
 - b) *Concentration of talents*
4. *International participation*

Kriteria WCU yang terkait dengan citra internasional dengan indikator: jumlah dosen dan mahasiswa internasional, kualitas riset internasional, angka serapan alumni dan kualitas pengajaran.

Hampir senada dengan pendapat Hendarman adalah pendapat Prof. Dr.Tridoyo Kusumastono. Menurutnya ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu universitas tertentu masuk ke WCU, yaitu:

- a) 40% tenaga pendidik bergelar Ph.D
- b) Publikasi internasional 2 paper/staf/tahun
- c) Jumlah mahasiswa pasca 40% dari total populasi mahasiswa (student body)
- d) Anggaran riset minimal US\$1300/staf/tahun
- e) Jumlah mahasiswa asing lebih dari 20%
- f) ICT 10 kb/mahasiswa (<http://tridoyo.blogspot.com>)

Dengan beberapa kriteria yang diajukan oleh beberapa lembaga pemeringkatan PT kelas dunia, maka ada beberapa PT di Indonesia yang memiliki potensi besar menjadi WCU. Berdasarkan data THE tahun 2008 ada 3 PT Indonesia yang masuk 500 besar, yaitu UI (peringak 287), ITB (315), UGM (316). Sementara Universitas Airlangga,IPB, Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro masuk 1000 besar.

Kemudian berdasarkan Webometrics untuk kategori Asia, terdapat 21 PT Indonesia yang masuk peringkat 100 besar, yaitu Universitas Gunadharma (peringkat 4), IPB (8), Universitas Brawijaya (9), Universitas Airlangga (11), dan Undip (15).

Untuk bisa menuju WCU, menurut Prof. Kai-Ming, seorang ahli kebijakan pendidikan dan konsultan UNESCO dan World Bank, maka PT harus memiliki empat hal berikut: 1) reputasi internasional, prestasi penelitian, lulusan yang terkemuka, dan partisipasi internasional. Kalau empat hal ini belum terpenuhi, jangan bermimpi dulu menjadi universitas kelas dunia. Selain itu, untuk membangun universitas kelas dunia, ada beberapa prasyarat dan komitmen yang tidak bisa ditawar, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, 2) harus memperhatikan sumber daya, dan komitmen yang tidak bisa ditawar, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, 2) harus memperhatikan sumber daya,) sudah memiliki identifikasi institusi, 4) rekrutmen akademisi, 5) mengembangkan sumber daya, dan 6) melakukan reformasi tata kelola.

Dengan mengambil data tahun 2005 saja, prof. Kai-Ming mencontohkan bagaimana negara-negara Asia yang telah menjadikan pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, misalnya Korea Selatan, rasio partisipasi pendidikan tingginya sudah mencapai 84%, Taiwan sudah 82%, Jepang 76,2%, Singapura 81% dari 15% pada tahun 1990-an awal dan Hongkong sendiri sudah 67 % dari 30% pada tahun 2002.

Di luar itu semua, PT harus memenuhi standar/benchmark mutu internasional. Dalam hal ini Jackson and Lund (2000) menyampaikan beberapa benchmarking pendidikan tinggi, yaitu:

- 1) *Benchmarking to improve the quality of educational practice and regulate standard: Benchmarking educational processes and outcomes, the learning environment, to improve departmental system for managing quality and standard, the student experience, the outcomes of learning, key skills using national standard.*
- 2) *Benchmarking to improve the quality of administrative and business processes and services to support HE: student recruitment, facilities and estates management, the learning infrastructure: library and information services.*
- 3) *Benchmarking in other HE system and transnational benchmarking.*

Secara praktis kemudian benchmarking ini berkembang menjadi sebuah pembakuan standar mutu PT internasional yang dilakukan oleh beberapa organisasi baik tingkat regional hingga internasional. Pembakuan standar mutu ini digunakan untuk melakukan akreditasi lembaga dan penjaminan mutu.

Berikut ditampilkan organisasi penjaminan mutu pendidikan PT baik regional maupun internasional.

Tabel 24. Organisasi Penjaminan Mutu PT

Nama Organisasi	Wilayah Kerja	Keterangan
<i>Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA)</i>	ASEAN	
<i>CHEA</i>	Amerika Serikat Dan Kanada	
<i>The European Association for Quality Assurance In Higher Education (ENQA)</i>	Uni Eropa	
<i>External Quality Review (EQR)</i>	Internasional	
<i>International Quality Review Process (IQRP)</i>	Internasional	
<i>The Interbational Network of Quality Assurance Agencies in Higher education (INQAAHE)</i>	Internasional	Lembaga penghimpun lembaga-lembaga penjaminan mutu di dunia. BAN PT termasuk anggotanya.

6. Analisis Kebijakan Internasionalisasi Perguruan Tinggi di Indonesia Menuju *World Class University*.

Internasionalisasi PT di Indonesia merujuk kepada UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 64 dan 65 yang dijabarkan lebih dulu dalam PP.N0 60/1990 tentang Perguruan Tinggi, PP N0.61/1999 tentang Badan Hukum PT (Ghafur, 2009). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang pendidikan lintas batas negara dan kerjasama internasional dalam PP ini, ada pada pasal 125, 129 dan 130. Demikian juga Mendiknas dan dirjen Dikti telah mengeluarkan Surat keputusan yang memberi petunjuk dan arahan teknis tentang bentuk-bentuk kegiatan dan kerjasama luar negeri yang dapat dilakukan oleh PT Indonesia dengan PT atau lembaga lain di luar negeri. Peraturan yang menjadi rujukan antara lain:

1. SK Mendikbud N0. 264/U/1999 tentang Kerjasama PT du Indonesia dengan PT/lembaga lain di Luar negeri.
2. SK Dirjen Dikti N0.61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Adapun ketentuan tentang peraturan yang terkait dengan kerjasama internasional dan pendidikan lintas batas negara menurut UU Sisdiknas 2003 bisa disimak dalam tabel berikut.

Tabel 25. Internasionalisasi Pendidikan menurut UU Sisdiknas

Bentuk Lembaga	Bentuk Sistem	Ketentuan Aturan	Ketentuan Aturan
Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Perwakilan Negara Asing dalam NKRI	Menggunakan sistem negara bersangkutan	Peraturan yang berlaku di negara bersangkutan	Diperuntukkan bagi WNA
Lembaga Pendidikan Asing dalam NKRI	Menggunakan sistem pendidikan nasional Indonesia (Sisdiknas)	Menggunakan Peraturan per-UU-an Indonesia	Wajib memberikan pengajaran pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi siswa SD s/d SLTA yang WNI. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan Indonesia. Mengikutsertakan pendidik dan pengelola WNI
Lembaga pendidikan Indonesia	Menggunakan sistem pendidikan negara lain, seperti jenjang, kurikulum, sistem penilaian dsb.	Menggunakan peraturan per-UU-an Indonesia	Terbuka bagi WNA dan WNI.

Dari peraturan tersebut dapat ditangkap pikiran tentang kategori kerjasama PT, yaitu:

- 1) Kerjasama pendirian PT, dalam bentuk patungan antara pihak luar negeri dengan mitra Indonesia. Untuk kerjasama ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a) mengikuti ketentuan Sisdiknas, b) memenuhi seluruh persyaratan dan tatacara pendirian PT yang berlaku di Indonesia.
- 2) Kerjasama kegiatan akademik bersyarat, yaitu bila kerjasama yang dilakukan berbentuk: a) kontrak manajemen, b) program kembaran (*twinning program*), c) program pemindahan kredit yang diperoleh (*credit transfer*). Untuk ketiga jenis kerjasama ini, berlaku persyaratan bahwa program studi dari PT luar negeri yang telah terakreditasi di negeri asalnya.
- 3) Kerjasama kegiatan akademik yang terbuka dan tanpa syarat, yaitu bila kerjasama berbentuk: a) tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam bidang akademik, b) pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik,

c) penerbitan bersama karya ilmiah, d) penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya dan e) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu (Ghafur, 2009).

Selain aturan-aturan tersebut, Indonesia memiliki lembaga-lembaga pendukung internasionalisasi PT yang bekerja dalam kerangka dua pendekatan, yaitu 1) koordinasi isi kerjasama dapat dilakukan dengan berkoordinasi pada departemen/kementerian terkait. Kerjasama ini bisa berubah dan berpindah dari satu departemen ke departemen lain sesuai bidang kerjanya, 2) koordinasi struktural dengan departemen/kementerian terkait.

Terkait dengan pendekatan kedua, di Indonesia ada dua departemen yang melakukan kerjasama PT dengan luar negeri, yaitu Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional dan Departemen Luar Negeri. Di mana secara internal, koordinasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendiknas, dengan Itjen Hukum dan Perjanjian Internasional dan Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik dari Kementerian Luar Negeri.

Kemudian secara khusus untuk memperkuat dan menghubungkan kerjasama internasional bidang pendidikan dan kebudayaan dengan negara lain, saat ini Indonesia telah memiliki 13 atase pendidikan, yaitu AS, Australia, Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, Malaysia, Mesir, Saudi Arabia, Thailand, Philipina, Jepang dan Papua New Guini. Selanjutnya untuk peningkatan kerjasama, maka pada tahun 2002 Itjen Dikti mendirikan Pusat Jaringan Kerjasama Luar Negeri Perguruan Tinggi (PJKLN) yang mengkoordinasikan program Asia, Eropa, AS dan Kanada, Australia, Jepang dan berbagai program dan kegiatan yang bersifat multikultural.

Di luar departemen pemerintah, maka muncul lembaga swasta masyarakat non pemerintah (*Non Government Organizational/NGO*) yang turut aktif menyelenggarakan kerjasama internasional PT, diantaranya: *Ford Foundation* (FF), *The Asia Foundation* (TAF), *Rockefeller Foundation* (RF), *Smithsonian Institute* (SI), *East-West Center* (EWC), *Fullbright Foundation* dan sebagainya.

Secara normatif, Indonesia sudah mengeluarkan produk kebijakan atas kemungkinan dilakukannya internasionalisasi PT. Namun secara praktis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2009), PT di Indonesia, khususnya yang BHMN yang sudah melaksanakan internasionalisasi PT, biasanya mengambil bentuk kegiatannya sebagai berikut:

Pertama. Kegiatan yang berbasis pada struktur yang sudah ada, dengan memberi dimensi internasionalisasi dari dalam (*internationalization within*) terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan sebagainya. Bentuk kegiatan ini adalah internasionalisasi berperangkat struktur lunak (*soft structure activities*).

Kedua. Kegiatan kongkrit berbasis hubungan kerjasama antara struktur internal dengan pihak eksternal/asing. Kegiatan ini disebut *hard structure activities*, yang bentuk kegiatannya antara lain:

- a) Pengiriman dosen untuk studi lanjut ke luar negeri dan kehadiran dosen dan peneliti asing di PT setempat.
- b) Pengiriman mahasiswa untuk kunjungan keluar negeri.
- c) Mobilitas internasional staf pengajar, peneliti dan pimpinan PT, baik yang akademik maupun yang non akademik.
- d) Keanggotaan dalam berbagai forum kerjasama dan asosiasi internasional seperti *ASEAN University Network (AUN)*, *Association of Pasific Rim Universities (APRU)*, *Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning (ASAIHL)*, *ASEAN-Europeon Academic University Network (ASEAN-Uninet)*, *Southeast Asian Minister of The Islamic World (FUIW)* dan sebagainya.
- e) Peluang dan pemanfaatan dana internasional, seperti *Asia link*, *Marie Curie International fellowship*, *FP-6*, *tematic Priorities of research*, *International Cooperation Action (INCO)*, *United States Institute of Peace (USIP)*, *Toyota Foundation*, *Japan Foundation Research Fund (JFRF)*, *Tokyo Foundation Research Grant* dan lain-lain.
- f) Perjanjian internasional dengan lembaga, organisasi atau PT luar negeri,. Baik akademik maupun non akademik dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan ditinfak lanjuti dengan *Letter of implementation (LoI)*
- g) Publikasi Makalah di berbagai jurnal internasional atau kerjasama penerbitan dengan lembaga-lembaga internasional.

7. Penutup

Dalam rangka merespon tuntutan globalisasi, maka PT perlu melakukan sekian banyak perubahan dalam pengelolaan kelembagaannya jika tidak ingin tergilas arus kompetisi yang sudah sedemikian tinggi. Kompetisi tidak hanya antar PT di negeri sendiri, tapi juga dengan PT negara lain. Salah satu strategi yang

seyogyanya dijalankan adalah strategi internasionalisasi PT. Strategi inilah yang akan mengantarkan PT masuk dalam WCU.

Daftar Referensi

- Ahmadi, Abu.(2005). *Integrasi Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama*
- Ghafur, A. Hanief Saha.(2009). *Manajemen Mutu, Penjaminan Dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Khufad, Ahmad.(2009). *Globalisasi*. Materi Perkuliaha SPS UPI Bandung
- Nines, Peter and Hellsten, Meeri.(2005). *Internationalizing Higher Education. Critical Exploration of Pedagogy and Policy*. Netherlands: Springer
- Sufyarma, M. (2004). *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Salehi, Sayyid Reza Amiri.(2009). *Strategi Untuk Menciptakan Entrepreneur University dalam European Journal of Social Sciences*, Volume 1, Nomor 3 tahun 2009.



E. Menggagas *Inspiring-World Class University*

1. Pendahuluan

Menjadi universitas kelas dunia (*World Class University*) merupakan tuntutan dan kebutuhan setiap Perguruan Tinggi (PT). Tidak terkecuali adalah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap dan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap. IAIIG dan UNUGHA merupakan PT yang lahir karena diinspirasi oleh nama besar Hujjatul Islam Imam Al Ghazali. Sebagai PT yang lahir dari inspirasi tersebut, maka kedua PT yang hakikatnya lahir dari Rahim yang sama, maka kemudian menetapkan diri sebagai Universitas Inspiratif, yaitu universitas yang lahir dan perkembangan selanjutnya diinspirasi sekaligus bercita-cita besar untuk masuk sebagai salah satu deretan universitas berkelas dunia (*World Class University*). Sehingga Universitas Inspiratif yang dimaksudkan di sini adalah universitas yang mampu *menginspirasi* dalam setiap hal-hal yang baik/unggul,

luhur serta kokoh dalam konteks ilmu, budi dan budaya bagi warga masyarakat dunia. Artinya baik dari sisi pemikiran (*fikrah*), gerakan (*harakah*), dan tindakan nyata (*amaliyyah/amaliah*) (Ibnu Hazen, 2015), selalu didasarkan pada nilai-nilai ke-Ghozali-an, dalam bingkai tri dharma PT hingga produk yang dihasilkan IAIIG-UNUGHA Cilacap semuanya mampu menginspirasi masyarakat dunia.

IAIIG- UNUGHA Cilacap sebagai Universitas Inspiratif (*Inspiring University*), dalam menetapkan label “Inspiratif”-nya didasarkan pada Nilai-Nilai Keghozalian (karena memang terinspirasi dari tokoh Inspiratif Kelas Dunia yaitu “Al Ghazali”). Maka *Core Values* yang akan membangun IAIIG-UNUGHA menjadi Universitas Inspiratif Berkelas Dunia (*Inspiring-World Class University*) adalah “Nilai-Nilai Keghozalian” itu sendiri. Sehingga diharapkan IAIIG-UNUGHA Cilacap, baik itu manajemennya; pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa di dalam bekerja dan berkiprah selalu berlandaskan nilai-nilai keghozalian. Masyarakat IAIIG-UNUGHA Cilacap terdiri dari orang-orang yang inspiratif sehingga menghasilkan lulusan inspiratif berkelas dunia.

Sekilas apa yang disampaikan di atas merupakan harapan atau cita-cita untuk mewujudkan I-WCU. Namun di sisi lain, IAIIG-UNUGHA walaupun hakikatnya berasal dari Rahim yang sama tetapi titik keberangkatannya berbeda. IAIIG sudah lahir 25 tahun lebih lama dari UNUGHA, tetapi UNUGHA juga kelahirannya atau cikal bakalnya adalah IAIIG. Sehingga hajat menyatukan 2 PT merupakan keniscayaan agar roda perjalanan dua PT ini betul-betul bisa “bareng”. Di sisi lain, karean start-nya berbeda, maka membutuhkan strategi yang berbeda.

Berangkat dari situasi inilah maka tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis sekaligus menemukan formula penyatuan dan pengembangan 2 PT menjadi PT yang *Inspiring-World Class University*. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama akan penulis akan mengingatkan kembali sekilas tentang WCU maupun CV Keghozalian yang menjadi *core values* di IAIIG -UNUGHA Cilacap.

2. Sekilas Mengenal *World Class University* (WCU)

Pada tulisan saya sebelumnya yang bertajuk “TRANSFORMASI INTERNASIONALISASI PERGURUAN TINGGI MENUJU *WORLD CLASS UNIVERSITY*” dijelaskan secara sederhana tentang WCU. WCU mempunyai pengertian yang berbeda-beda, baik target maupun kriteria penilaiannya. Saat ini beberapa institusi yang telah mantap dan diakui dunia sebagai lembaga

pengakreditasi WCU antara lain: *The Times Higher Education Supplement* (THES) dengan situsnya di <http://www.thes.co.uk>; Academic Ranking of World Universities (ARWU) oleh Intitute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, China yang dapat dilihat di situs <http://www.arwu.org>; Webometric (<http://www.webometrics.info>).

Adapun komponen yang harus ada dalam WCU menurut Hendarman, antara lain

1. *World Reputation:*

Third-party Endorsement (Pengesahan pihak ketiga)

Little room for engineering

World Ranking:

Time Higher Education Supplement

Shanghai Jiatong World Universities Ranking

Webometrics Ranking of World Universities

Global Ranking:

a. *Time Higher Education Supplement*

1)	<i>Peer review (5,101)</i>	40%
2)	<i>Employee review (1,471)</i>	10%
3)	<i>Student/Teacher ratio</i>	20%
4)	<i>Citation index</i>	20%
5)	<i>International Teachers</i>	5%
6)	<i>International Students</i>	5%

b. *Shanghai Jiaotong Academic Ranking of world Universities*

1)	<i>Alumni as Nobel Laureate</i>	10%
2)	<i>Faculty as Nobel Laureate</i>	20%
3)	<i>Highly-cited researchers</i>	20%
4)	<i>Articles in Nature and Science</i>	20%
5)	<i>Articles in SCI</i>	20%
6)	<i>Size</i>	10%

- c. *Webometrics Ranking of World Universities:*
 - 1) *Web size* 20%
 - 2) *Rich files* 15%
 - 3) *Scholar (Google)* 15%
 - 4) *Visibility (Link)* 50%
2. *Prominents Graduates*
 - a *Celebrities of national culture*
 - b *Community leaders*
 - c *International figures*
3. *Research Performance*
 - a *Research output:*
 - 1) *Research assessment Exercises*
 - 2) *Dominance of Anglo-saxon research culture*
 - 3) *Strategic capacity building*
 - 4) *Strategic of resources on selected areas*
 - 5) *Concentration of talents*
5. *International participation*

Kriteria WCU yang terkait dengan citra internasional dengan indikator: jumlah dosen dan mahasiswa internasional, kualitas riset internasional, angka serapan alumni dan kualitas pengajaran.

Hampir senada dengan pendapat Hendarman adalah pendapat Prof. Dr.Tridoyo Kusumastono. Menurutnya ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu universitas tertentu masuk ke WCU, yaitu:

- 1) 40% tenaga pendidik bergelar Ph.D
- 2) Publikasi internasional 2 paper/staf/tahun
- 3) Jumlah mahasiswa pasca 40% dari total populasi mahasiswa (student body)
- 4) Anggaran riset minimal US\$1300/staf/tahun
- 5) Jumlah mahasiswa asing lebih dari 20%
- 6) ICT 10 kb/mahasiswa (<http://tridoyo.blogspot.com>)

Dengan beberapa kriteria yang diajukan oleh beberapa lembaga

pemeringkatan PT kelas dunia, maka ada beberapa PT di Indonesia yang memiliki potensi besar menjadi WCU. Berdasarkan data THE tahun 2008 ada 3 PT Indonesia yang masuk 500 besar, yaitu UI (peringkat 287), ITB (315), UGM (316). Sementara Universitas Airlangga, IPB, Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro masuk 1000 besar.

Kemudian berdasarkan Webometrics untuk kategori Asia, terdapat 21 PT Indonesia yang masuk peringkat 100 besar, yaitu Universitas Gunadharma (peringkat 4), IPB (8), Universitas Brawijaya (9), Universitas Airlangga (11), dan Undip (15).

Untuk bisa menuju WCU, menurut Prof. Kai-Ming, seorang ahli kebijakan pendidikan dan konsultan UNESCO dan World Bank, maka PT harus memiliki empat hal berikut: 1) reputasi internasional, prestasi penelitian, lulusan yang terkemuka, dan partisipasi internasional. Kalau empat hal ini belum terpenuhi, jangan bermimpi dulu menjadi universitas kelas dunia. Selain itu, untuk membangun universitas kelas dunia, ada beberapa prasyarat dan komitmen yang tidak bisa ditawar, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, 2) harus memperhatikan sumber daya, dan komitmen yang tidak bisa ditawar, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, 2) harus memperhatikan sumber daya, 3) sudah memiliki identifikasi institusi, 4) rekrutmen akademisi, 5) mengembangkan sumber daya, dan 6) melakukan reformasi tata kelola.

Dengan mengambil data tahun 2005 saja, prof. Kai-Ming mencontohkan bagaimana negara-negara Asia yang telah menjadikan pembangunan pendidikan tinggi sebagai prioritas, misalnya Korea Selatan, rasio partisipasi pendidikan tingginya sudah mencapai 84%, Taiwan sudah 82%, Jepang 76,2%, Singapura 81% dari 15% pada tahun 1990-an awal dan Hongkong sendiri sudah 67 % dari 30% pada tahun 2002.

Di luar itu semua, PT harus memenuhi standar/benchmark mutu internasional. Dalam hal ini Jackson and Lund (2000) menyampaikan beberapa benchmarking pendidikan tinggi, yaitu:

- 1) *Benchmarking to improve the quality of educational practice and regulate standard: Benchmarking educational processes and outcomes, the learning environment, to improve departmental system for managing quality and standard, the student experience, the outcomes of learning, key skills using national standard.*

- 2) *Benchmarking to improve the quality of administrative and bussiness processes and services to support HE: student recruitment, facilities and estates management, the learning instructure: library and information services.*
- 3) *Benchmarking in other HE system and trasnational benchmarking.*

Secara praktis kemudian benchmarking ini berkembang menjadi sebuah pembakuan standar mutu PT internasional yang dilakukan oleh beberapa organisasi baik tingkat regional hingga internasional. Pembakuan standar mutu ini digunakan untuk melakukan akreditasi lembaga dan penjaminan mutu.

Berikut ditampilkan organisasi penjaminan mutu pendidikan PT baik regional maupun internasional.

Tabel 26. Organisasi Penjamu Regional-Internasional

Nama Organisasi	Wilayah Kerja	Keterangan
<i>Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA)</i>	ASEAN	
<i>CHEA</i>	Amerika serikat Dan Kanada	
<i>The European Association for Quality Assurace In Higher Education (ENQA)</i>	Uni Eropa	
<i>External Quality Review (EQR)</i>	Internasional	
<i>International Quality Review Process (IQRP)</i>	Internasional	
<i>The Interbational Network of Quality Assurance Agencies in Higher education (INQAAHE)</i>	Internasional	Lembaga penghimpun lembaga-lembaga penjaminan mutu di dunia. BAN PT termasuk anggotanya.

3. Core Values Keghozalian di IAIIG-UNUGHA Cilacap

Secara sekilas visi IAIIG dan UNUGHA seolah berbeda. Tetapi jika dicermati secara mendalam maka memiliki visi yang sama. Visi IAIIG : “Menjadi peguruan tinggi yang unggul dalam ilmu, luhur dalam budi dan kokoh dalam budaya”. Sedangkan visi UNUGHA “ pada tahun 2035 menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif”. Inti dari visi IAIIG adalah tampak eksplisit, sedangkan inti dari visi UNUGHA implisit dalam kata inspiratif. Bahwa yang dimaksudkan “inspiratif” di sini mengandung 3 dimensi yang diturunkan dari core values ke-Ghozali-an, yaitu 1) unggul dalam ilmu, 2) luhur dalam budi dan 3) kokoh dalam budaya (Dokumen Cv.Keghozalian, 2014).

Core Values Keghozalian IAIIG-UNUGHA Cilacap diberlakukan bagi penyelenggaraan Institut-Univeritas, maupu pedoman perilaku bagi semua pimpinan, civitas akademika dan karyawan. Sebagai sebuah nilai dasar (inti), maka cv keghozalian yang terdiri dari 3 dimensi (ilmu, budi dan budaya), setiap dimensi memiliki nilai-nilai yang disebut nilai-nilai keghozalian dan setiap nilai keghozalian memiliki karakter yang disebut karakter keghozalian.

Tabel 27. Dimensi, Nilai dan Karakter Keghozalian

Dimensi	Nilai	Karakter
ILMU	Cermat	Cerdas, teliti
	Kritis	Skeptic-metodologis, tawadlu’ (tunduk pada kebenaran)
	Ulet	Kuat, tidak mudah putus asa
	Totalitas	Utuh, integral
	Cipta (kognitif)	Tekstualis, kontekstualis, non dikotomis
	Rasa (afektif)	Sensitive, Ta’abud-sufistik
	Karsa (psikomotor)	Kreatif, Professional-voluentier
BUDI	Beribadah (mengabdikan kepada Tuhan)	Ikhlas, disiplin, totalitas, tanggungjawab, tepat waktu
	Ma’rifatun nafs (konsep diri)	Sabar, rendah hati, jujur, toleransi, santun
	An naf’u lil ghair (peduli terhadap sesama)	Komunikatif, dermawan, empathy, suka menolong, cinta damai
BUDAYA	kebersamaan (<i>sukhbah</i>),	Partisipatif, Adalah /keadilan, Taat norma,,
	keragaman (<i>mukhtalifan an wan</i>),	Pluralis, toleransi/Tasamuh, Moderat/tawasut, Pengakuan hak, <i>Tawazun</i> /keseimbangan, Kedamaian
	ketulusan (<i>ikhlas</i>),	Kompeten, Profesional, Sukarela/ <i>tatawui’iyah</i> , <i>’ubudiyah</i> / tujuannya untuk ibadah,
	orientasi keabadian (<i>baqiyat</i>).	visioner, <i>Ikhtiyat</i> /mawas diri, <i>Ukhrowi</i> /eskatologis (tetapi tdk melupakan dunia).

4. Pengembangan IAIIG-UNUGHA Cilacap “1 Abad Menuju Inspiring-World Class University”

Berdasarkan cv keghozalian, analisis internal maupun eksternal yang sudah dilakukan IAIIG-UNUGHA, maka IAIIG-UNUGHA bisa dikembangkan menjadi I -WCU. Perjalanan menuju Trully I-WCU setidaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu 1 abad, yang dilakukan dalam 7 tahapan, di mana setiap tahapannnya kebutuhan pemenuhannya memakan waktu yang berbeda-beda dari 25 tahunan hingga terkecil 5 tahunan. Ke 7 tahapan yang dimaksud adalah:

Tabel 29. Draf RIP 2014-2120

Tahapan	Tahun	Waktu	Target
I	2014-2029	15 tahun	Penguatan Pondasi Internal Berorientasi Eksternal
II	2030-2045	15 tahun	Daya Saing Propinsi
III	2046-2056	10 tahun	Daya Saing Nasional
IV	2057-2077	20 tahun	Daya Saing ASEAN
V	2078-2103	25 tahun	Daya Saing Asia
VI	2104-2114	10 tahun	Internasionalisasi IAIIG
VII	2115-2120	5 tahun	Trully Inspiring -World Class University

Berdasarkan table 1, dapat dijelaskan arah pengembangan IAIIG-UNUGHA Cilacap menuju I-WCU sebagai berikut.

Tahap Pertama, Penguatan Pondasi Internal Berorientasi Eksternal (2014-2029) melalui penfokusan pada 1) Capacity building; kapasitas institusi dan tatapamong perguruan tinggi yang baik (good university governance) melalui studi banding, pendampingan, dan pelatihan yang difokuskan pada perumusan blue print dan road map institusi dengan melibatkan berbagai tenaga ahli yang berasal dari institusi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menjalin sinergisme yang berkelanjutan dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang unggul di bidangnya masing-masing sesuai dengan kepakaran keilmuan yang diusung IAIIG. Dengan membangun kapasitas institusi dan tatapamong yang baik diharapkan akan membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi stakeholders dan shareholders sehingga kondisi ini akan mendatangkan kekokohan institusi. 2) Rintisan Program Unggulan, melalui program unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi nasional maupun internasional. 3) mendesain standar mutu internasional, melalui kaji banding baku mutu internasional dan mendesain standar mutu internasional. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2029 ***“pada tahun 2029 IAIIG menjadi PT yang memiliki Pondasi Yang Kuat dalam mewujudkan Good University Governance berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian”***.

Tahap Kedua, Daya Saing Propinsi (2030-2045), melalui 1) Pengembangan kegiatan-kegiatan berskala Propinis, penguatan kerjasama PT di Jateng, 3) rintisan kerjasama tingkat ASEAN, Asia dan internasional dan 4) rintisan publikasi internasional. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2056 ***“pada tahun 2045 IAIIG menjadi***

PT yang memiliki Daya Saing Tinggi di Jateng berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian”.

Tahap Ketiga, Daya Saing Nasional (2046-2056), melalui 1) Pengembangan kegiatan-kegiatan berskala nasional, penguatan kerjasama nasional, 3) rintisan kerjasama tkt ASEAN, Asia dan internasional dan 4) rintisan publikasi internasional. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2056 ***“pada tahun 2056 IAIIG menjadi PT yang memiliki Daya Saing Nasional berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian”.***

Tahap Keempat, Daya Saing ASEAN (2057-2077), melalui 1) kaji banding norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi di wilayah ASEAN, APEC, G20, dan negara-negara lain di wilayah Asia, 2) benchmarking secara virtual dan kunjungan langsung ke perguruan tinggi yang dianggap lebih unggul dari pada IAIIG, 3) membangun networking dengan ASEAN UNIVERSITY NETWORK: QUALITY-ASSURANCE dan THES yang bermarkas di Singapore sangat diperlukan karena Singapore dipercaya untuk melaksanakan pemeringkatan perguruan tinggi versi THES, *ASEAN University Network (AUN)*, *Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning (ASAIHL)*, *ASEAN-Europeon Academic University Network (ASEAN-Uninet)*, *Southeast Asian Minister of The Islamic World (FUIW)* dan sebagainya *ASEAN University Network (AUN)*,), *ASEAN-Europeon Academic University Network (ASEAN-Uninet)*, *Southeast Asian Minister of The Islamic World (FUIW)*, *Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning (ASAIHL)*. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2061 ***“pada tahun 2061 IAIIG menjadi PT yang memiliki Daya Saing Di Tingkat ASEAN berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian”.***

Tahap Kelima, Daya Saing Asia (2078-2103). 1) kaji banding norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi di wilayah di wilayah Asia, 2) benchmarking secara virtual dan kunjungan langsung ke perguruan tinggi yang dianggap lebih unggul dari pada IAIIG di Asia, 3) membangun networking dengan negara-negara maju di Asia, 4) masuk keanggotaan *Association of Pasific Rim Universities (APRU)*. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2103 ***“pada tahun 2103 IAIIG menjadi PT yang memiliki Daya Saing Tingkat Asia berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian”.***

Tahap Keenam, Internasionalisasi IAIIG-UNUGHA (2104-2114), melalui 1) Internationalization within (: soft structure activities), dengan mendesain kurikulum berdimensi internasional dan melaksanakan pembelajaran berkelas internasional (kelas internasional), 2) Hard structure activities, meliputi a) pengiriman dosen studi lanjut ke luar negeri, b) menghadirkan/mendatangkan dosen serta peneliti asing ke IAIIG Cilacap, c) pengiriman mahasiswa untuk kunjungan ke luar negeri, d) mobilisasi internasional staf pengajar, peneliti dan pimpinan IAIIG, baik yang akademik maupun non akademik, e) masuk keanggotaan dalam berbagai forum kerjasama dan asosiasi internasional seperti), *Association of Pasific Rim Universities (APRU)*, dan sebagainya, f) pemanfaatan dana internasional, seperti Asia Link, Marie Curie Internasional Fellowship, *FP-6*, *tematic Priorities of research*, *International Cooperation Action (INCO)*, *United States Institute of Peace (USIP)*, *Toyota Foundation*, *Japan Foundation Research Fund (JFRF)*, *Tokyo Foundation Research Grant* dan lain-lain untuk berbagai keperluan akademik dan non akademik, g) Penguatan Perjanjian internasional dengan lembaga, organisasi atau PT luar negeri, baik akademik maupun non akademik dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan ditindak lanjuti dengan *Letter of implementation (LoI)*, dan h) Penggiatan Publikasi Makalah di berbagai jurnal internasional atau kerjasama penerbitan dengan lembaga-lembaga internasional dan atau melalui *webometric*. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2114 “***pada tahun 2114 IAIIG menjadi PT yang Go Internasional berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian***”.

Tahap Ketujuh, Truly Inspiring-World Class University (I-WCU) (2115-2120). Menjadi PT yang masuk dalam jajaran WCU versi webometric, dengan melakukan: 1) memiliki web size 20%), 2) *Rich Files* 15%, 3) *Scholar (Google)* 15%, 4) *Visibility (Link)* 50%, 5) Mengalokasikan anggaran riset minimal US\$1300/staf/tahun, 6) Melakukan publikasi internasional 2 paper/staf/tahun, 7) Memiliki dosen dengan kualifikasi Doktor (Ph.D) 40%, 8) Memiliki jumlah mahasiswa pascasarjana 40% dari populasi mahasiswa (*student body*), 9) Memiliki mahasiswa asing lebih dari 20%, dan 10) Memiliki ICT 10 kb/mahasiswa. Pengembangan pada periode ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi IAIIG 2120 “***pada tahun 2120 IAIIG menjadi Inspiring-World Class University berlandaskan Nilai-Nilai Keghozalian***”.

5. Penutup

Membangun Universitas berkelas dunia (WCU) sekaligus yang mampu menginspirasi (Inspiring university) bukanlah pekerjaan mudah dan cepat sebagaimana membalikkan telapak tangan. Tetapi dibutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang tidak ada hentinya. Kerja, kerja dan kerja dalam rangka selalu mengupayakan perbaikan kualitas menjadi kuncinya. Kerja dan terus kerja merupakan wujud real atas implementasi syukur kita terhadap Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Ghazali. Oleh karena itu sudah semestinya warga IAIIG-UNUGHA Cilacap butuh kerja, kerja dan perbaikan terus menerus agar mampu meraih predikat *Inspiring-World Class University*. Semoga Tuhan memberkati. Amin.

Daftar Referensi

Core Values Keghozalian



F. Internalisasi Ikhlas: Meraih Sukses Belajar di Perguruan Tinggi

1. Pendahuluan

Secara umum banyak konsep yang menunjukkan tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan akan menentukan keselamatan dan kesejahteraan kehidupan manusia dunia bahkan akhirat, karena pendidikan sesungguhnya adalah *human investment*. Melalui pendidikan maka sumber daya manusia (*human resource*) bisa menjadi modal manusia (*human capital*). Sedangkan *Human capital* merupakan komponen strategik yang akan menentukan maju mundurnya sebuah negara, bahkan menentukan keselamatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat baik di dunia maupun akhirat. Begitu pentingnya peran pendidikan, maka Islam sangat memperhatikan persoalan pendidikan.

Konsep *human investment* melalui pendidikan dalam khasanah Islam misalnya bisa dilihat antara lain dalam konsep *uthlubul 'ilma minal lahdi ilal lahdi*

(*long life education*), *tholabul 'ilmu faridhatun 'alaa kulli muslimin wal muslimat* (*education for all, compulsory education*), hingga *uthlubul 'ilma walau kaaana bissien* (Zulfa, 2013). Demikian pentingnya kedudukan pendidikan bagi hidup dan kehidupan manusia, maka pendidikan menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kewajiban tersebut berlangsung sepanjang hayat sekaligus harus menempuh sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya.

Terlepas dari persoalan *equity and equality* pendidikan di Indonesia (Zulfa, 2012), setiap muslim yang mendapat kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan tinggi (; baik di universitas, institut, sekolah tinggi, atau akademi) wajib mensyukuri. Sedangkan bentuk real atas rasa syukur itu adalah dengan menjaga “amanah belajar” dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan tersebut hakikatnya adalah amanah dari Sang Pemberi Kesempatan, jika sampai gagal dalam belajar berarti manusia telah mengingkari amanah dari Tuhannya.

Secara real, saat ini kita sedang berada di era ekonomi kreatif. Daya kreasi dari sumber daya manusia (SDM) akibat dari kepemilikan pengetahuan yang kaya menjadi penanda utama dari era ini (Zulfa, 2013: 14). Sedangkan kepemilikan pengetahuan/ilmu bisa diperoleh melalui kegiatan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi (PT).

Bagi kebanyakan lulusan SMA/MA sederajat, belajar atau kuliah di PT ternama dan favorit dengan jurusan/prodi yang sesuai minat dan bakat menjadi keinginan terbesar mereka. Sehingga wajar ketika pengumuman penerimaan mahasiswa baru menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Rasa gembira, senang, deg-degan dan lain-lain pun muncul secara berbarengan begitu seseorang dinyatakan diterima menjadi mahasiswa. Namun seyogyanya kegembiraan tersebut tidak sampai melenakan mahasiswa. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa pasca itu. Tugas dan tanggungjawab besar menanti mereka, utamanya adalah tugas belajar.

Belajar di PT tentu berbeda dengan belajar di bangku sekolah. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan strategi agar bisa sukses belajar di PT dan lulus tepat waktu. Strategi yang dimaksudkan bisa dalam konteks strategi umum untuk bisa hidup di tengah-tengah iklim dan budaya kampus yang relatif baru bagi mereka, sekaligus strategi belajar khusus yang juga berbeda dengan strategi belajar ketika di SMA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan melakukan pembahasan tentang “Internalisasi Ikhlas: Meraih Sukses Belajar Di Perguruan

Tinggi”. Tulisan mini ini akan memperbincangkan secara sekilas hal-hal yang berkaitan dengan: a) Filosofi belajar di perguruan tinggi, b) Strategi sukses belajar di perguruan tinggi, dan c) Strategi internalisasi ikhlas untuk meraih sukses belajar di perguruan tinggi. Mengetahui filosofi belajar di PT menjadi landasan bagi setiap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PT agar mereka mampu menyusun, memilih dan menggunakan strategi yang tepat yang akan menghantarkan mereka kepada kesuksesan belajar di PT. Sekaligus agar strategi yang sudah dipilih mampu menghantarkan mahasiswa kepada kesuksesan hakiki, maka seyogyanya strategi-strategi tersebut diinternalisasikan dengan nilai-nilai keikhlasan.

2. Filosofi Belajar Di Perguruan Tinggi

Sukses belajar di PT menjadi harapan setiap mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di PT. Agar kesuksesan itu tidak hanya sekedar harapan, maka mahasiswa (terlebih mahasiswa baru) “kudu” mengetahui filosofi belajar di PT. Gaffar (2008) dalam hal ini mengingatkan bahwa secara filosofis, keberadaan PT sebagai unit pelaksana pendidikan tinggi, bertugas untuk “mempersiapkan seseorang dengan *kualifikasi tinggi* untuk menjadi seseorang yang *berkualitas amat tinggi*”. Hal ini berarti seseorang yang menjadi mahasiswa hakikatnya adalah “orang-orang pilihan”, karena hanya mereka yang *berkualifikasi tinggi*-lah yang bisa menjadi mahasiswa. Kondisi ini harus sedemikian rupa dimenej oleh PT agar ketika menjadi lulusan, mereka betul-betul sudah menjadi manusia yang *berkualitas amat tinggi* yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara dan bangsanya.

Menjadi manusia yang berkualitas amat tinggi inilah yang semestinya disadari betul oleh setiap mahasiswa. Hal ini tentu tidak mudah, dan tidak murah sekaligus butuh penanganan tersendiri. Mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan bisa bekerja sama dalam rangka mewujudkan manusia dengan karakteristik demikian. Khusus bagi mahasiswa, seyogyanya mampu melakukan berbagai macam strategi yang akan menghantarkannya menjadi mahasiswa yang sukses belajar di PT.

3. Strategi Sukses Belajar Di Perguruan Tinggi

Sebagaimana sudah disampaikan di muka, belajar di PT tentu berbeda dengan belajar di sekolah. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Namun begitu, apapun bentuk perbedaannya harus diantisipasi dengan strategi-strategi jitu yang akan memberikan jaminan bagi keberhasilan belajar mahasiswa

di PT. Berikut disampaikan beberapa strategi sukses belajar di PT, baik secara umum maupun khusus.

a. Strategi Umum

1) Adaptasi dengan lingkungan kampus

Menjadi mahasiswa baru, berarti menjadi warga baru PT. Sebagai warga baru, maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah beradaptasi dengan lingkungan kampus (: fisik dan manusia). Kemampuan mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus ini yang menjadi modal awal apakah mahasiswa akan mampu bertahan dan berkembang di kampusnya.

2) Pahami sistem akademik

Memahami sistem akademik menjadi strategi yang mau tidak mau harus dijalankan mahasiswa. Sistem akademik berupa tata aturan segala proses akademik yang akan dijalani baik oleh mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma PT (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), biasanya relatif berbeda antara PT satu dengan yang lain. Oleh karena itu mahasiswa wajib mempelajarinya. Biasanya mahasiswa bisa mempelajari sistem akademik pada buku Pedoman Akademik yang diberikan kepada mahasiswa baru setiap tahun akademik baru.

3) Tentukan tujuan kuliah

Setelah memahami sistem akademik yang berlaku di PT di mana mahasiswa kuliah, menentukan target/tujuan kuliah menjadi strategi berikut yang seyogyanya dilakukan oleh mahasiswa yang menghendaki kesuksesan. Dalam hal ini apakah target kuliah untuk memperoleh ilmu/kompetensi, sertifikat/gelar (*credential approach*), prestise, teman, jodoh dan lain sebagainya. Target ini memiliki implikasi pada lama waktu yang akan ditetapkan untuk mengakhiri masa studi. Tetapi apapun ragam tujuan kuliah, hendaknya bisa dicapai secara efektif dan efisien.

4) Tetapkan Lama Studi

Dengan tujuan kuliah yang sudah ditetapkan, selanjutnya mahasiswa bisa memperkirakan berapa waktu yang diperlukan untuk menye-

lesaikan studi. Perkiraan rasional ini yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk memproyeksikan dan menetapkan berapa lama kuliah yang akan dijalankan (apakah mau selesai tepat waktu atau bahkan menjadi mahasiswa abadi).

5) **Aktif kuliah dan forum ilmiah**

Aktif dalam perkuliahan adalah sebuah keniscayaan karena dalam sistem yang ada, keaktifan kuliah menjadi syarat dan atau menjadi salah satu komponen yang akan menentukan kelulusan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Namun begitu, mahasiswa seyogyanya aktif juga dalam even-even ilmiah baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal kampus. Sehingga pengetahuan mereka semakin kaya dan komprehensif. Bekal inilah yang akan menjadikan mahasiswa “kritis” sekaligus “bijaksana” dalam mensikapi berbagai persoalan baik yang langsung ber-*impact* kepada individu mahasiswa maupun masyarakat.

6) **Aktif berorganisasi mahasiswa**

Disamping aktif kuliah maupun aktif mengikuti forum-forum ilmiah, mahasiswa sangat disarankan untuk aktif berorganisasi (catatan: harus pandai mengatur waktu). Karena dengan berorganisasi akan melatih kemampuan *soft skill* seperti leadership, manajerial dan sebagainya, yang akan berkontribusi bagi kesuksesan hidup mahasiswa nantinya di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya.

b. Strategi Khusus

Strategi khusus ini berkaitan dengan lingkup mikro yaitu bagaimana mahasiswa harus belajar di kampus. Ada satu cerita menarik tentang perbandingan kebiasaan belajar yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel), yaitu kebiasaan membaca buku yang banyak. Mahasiswa Indonesia banyak membaca buku sampai bertumpuk –tumpuk ketika akan ujian dengan sistim “wayangan”. Sedangkan mahasiswa Korsel setiap hari terbiasa membaca buku yang banyak (min 7 buku untuk setiap mata kuliah setiap harinya). Ternyata hasilnya berbeda. Walaupun sama-sama banyak, mahasiswa yang membaca buku dengan sistim wayangan cenderung tidak sukses belajarnya. Hal ini terjadi karena mahasiswa hanya sekali waktu membaca semua buku dengan sistim *belajar keras*, sedangkan mahasiswa Korsel walaupun membaca banyak buku tetapi karena

dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dengan cara *belajar efektif*, maka mereka sukses dalam belajarnya, sehingga tidak heran orang Korsel terkenal di dunia sebagai SDM yang berkualitas sangat tinggi.

Berdasarkan atas cerita tersebut, maka untuk mengantisipasi kegagalan dalam belajar maka berikut ini disampaikan strategi khusus sukses belajar di PT.

a. Miliki Motivasi dan kemauan belajar yang tinggi

Belajar di perguruan tinggi adalah suatu pekerjaan yang berat, dan belajar di perguruan tinggi tentu berbeda dengan belajar di sekolah menengah. Tanggung jawab belajar hampir seluruhnya dipercayakan pada para mahasiswa. Pengajar atau dosen hanya memberikan dasar-dasar pengetahuan saja. Oleh karena itu, pada mahasiswa dituntut adanya sikap dan perilaku yang benar dalam belajar. Salah satu hal yang penting ketika belajar di perguruan tinggi adalah perlu adanya motivasi yang tinggi pada diri mahasiswa untuk belajar (Muljono, 2000). Motivasi ini menjadi salah satu penentu kesuksesan belajar mahasiswa. Semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka secara linier akan semakin tinggi pula tingkat kesuksesan belajar mahasiswa.

Sejalan dengan itu mahasiswa juga harus memiliki kemauan yang kuat. Dengan kemauan mahasiswa akan mampu mewujudkan impiannya termasuk sukses belajar. Karena kemauan menurut Ainy Fauziyah adalah janjimu kepada dirimu sendiri yang memberimu kekuatan sangat besar, yang membuat Anda gigih meraih impian, berani menghadapi tantangan secara cerdas dan mengoptimalkan potensi Anda (2000:127-30)

b. Gunakan cara belajar efektif

Motivasi belajar yang tinggi tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi keberhasilan belajar mahasiswa, jika mahasiswa tidak mengetahui bagaimana cara belajar yang tepat di PT. Belajar di PT tidak hanya berkaitan dengan kuantitas materi yang dipelajari atau banyaknya waktu yang disediakan oleh mahasiswa untuk belajar, tetapi belajar berkaitan dengan cara belajar. Cara belajar yang efektif memberi jaminan kepada keberhasilan belajar mahasiswa daripada belajar dengan cara keras. Cara belajar keras akan “memaksa” di luar batas kemampuan mahasiswa, tetapi cara belajar efektif memfasilitasi keterbatasan tersebut dengan rentang waktu dan irama dan konsistensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa seyogyanya

menggunakan cara belajar efektif, bukan cara belajar keras. Cara belajar efektif yang dimaksud di sini adalah bukan membaca seluruh halaman buku, tetapi membaca sesuai tema yang dibutuhkan. Jika mahasiswa menghendaki untuk mempelajari A, maka yang dipelajari adalah materi yang berkaitan dengan A saja, bukan yang lainnya.

c. Mandiri dan bekerjasama

Jangan sekali-kali mahasiswa menggantungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan belajar kepada orang lain. Contoh kecil: mahasiswa mengandalkan catatan perkuliahan kepada temannya, sementara ia sendiri tidak melakukan apa-apa. Catatlah semua point penting yang terjadi dalam proses perkuliahan di kelas. Jika ada hal yang berbeda dengan pandangan dosen, tanyakan atau diskusikan. Demikian juga jika ada catatan yang berbeda dengan catatan perkuliahan teman, diskusikan. Kemudian dari hasil diskusi catat ulang hasil perkuliahan secara lebih sistematis.

d. Manajemen waktu

Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus merupakan satu pengalaman yang menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa. Tetapi jangan lupa dengan tugas belajarnya. Oleh karena itu, mahasiswa wajib mengatur waktu sehingga mahasiswa tidak *keteter* kuliahnya. Jadilah mahasiswa yang ideal; yaitu mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik bagus. Bukan salah satunya saja atau bahkan tidak kedua-duanya.

e. Manajemen keuangan

Mengapa untuk sukses belajar membutuhkan manajemen keuangan?. Manajemen keuangan yang dimaksudkan di sini sangat sederhana. Gunakan sumber keuangan yang ada secara sederhana. Prioritaskan kebutuhan untuk belajar di atas kebutuhan yang lain. Misal: utamakan uang untuk membelicopy materi kuliah daripada untuk membeli pulsa atau jajan.

f. Pahami gaya belajar sendiri

Pada kebanyakan orang, memahami orang lain relatif lebih mudah daripada memahami diri sendiri. Untuk sukses belajar di PT, sebelum memahami gaya mengajar dosen ataupun style dosen secara umum, pahami dulu gaya belajar sendiri. Apakah dirinya termasuk orang yang bisa belajar dengan baik jika mendengarkan (audio), melihat (visual), mengerjakan/ melakukan

(kinestetis), mendengarkan dan melihat (audio visual) atau campuran audio-visual-kinestetis. Jika diri mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi gaya belajarnya sendiri baru disinkronkan dengan style dosennya.

g. Pahami Style Dosen

Selain kasus kurang mampunya mahasiswa mengidentifikasi gaya belajarnya sendiri, banyak kasus gagal belajar juga yang terjadi di kalangan mahasiswa akibat kurangnya pemahaman terhadap style dosen. Mahasiswa ketika kuliah merasa sangat paham, ketika ujian merasa bisa menjawab dengan baik, tetapi ketika hasil ujian diumumkan ternyata tidak sesuai dengan harapan mahasiswa. Hal ini bisa terjadi akibat mahasiswa kurang memahami style dosen. Memahami style dosen bukan hanya berkaitan dengan gaya mengajar dosen, tetapi terkait juga dengan bagaimana dosen melakukan evaluasi perkuliahan, bahkan sampai hal kecil bagaimana bentuk atau jenis instrumen evaluasi yang dikeluarkan dosen. Jika hal-hal seperti ini bisa diantisipasi oleh mahasiswa, maka mahasiswa relatif akan mendapat jaminan lulus ujian dengan sempurna (minimal baik).

h. Manfaatkan Sumber Belajar di kampus secara optimal

Mahasiswa jangan sekali-kali mengandalkan perkuliahan di kelas sebagai satu-satunya ia memperoleh ilmu di PT. Mahasiswa harus aktif, baik secara mandiri maupun kolektif untuk bisa memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di kampus secara optimal, bahkan sangat mungkin untuk sumber belajar di luar kampus. Karena jika mahasiswa hanya mengandalkan perolehan ilmu/pengetahuan dari hasil perkuliahan maka ilmu yang diperoleh akan sangat kecil. Kecilnya ilmu/pengetahuan inilah yang memberikan kontribusi bagi kegagalan mahasiswa dalam kuliah.

i. Memuliakan dosen

Strategi yang tidak kalah pentingnya adalah memuliakan dosen (Tim BK dan akdmk, 2010). Dosen memang hanya salah satu sumber belajar, tetapi kedudukan dosen diantara sekian banyaknya sumber belajar adalah sangat penting sehingga memuliakan dengan cara berinteraksi secara proporsional menjadi kuncinya.

c. Strategi Internalisasi Ikhlas Untuk Meraih Sukses Belajar di Perguruan Tinggi

Sebagus apapun strategi yang digunakan untuk meraih kesuksesan belajar di PT menjadi tanpa makna jika tidak dirruhi dengan nilai-nilai ikhlas. Karena ikhlas sendiri sesungguhnya adalah ruh dari setiap perbuatan manusia Syekh Abu Thalib al Makki menyatakan bahwa ikhlas adalah inti amal dan penentu diterima – tidaknya suatu amal di sisi Allah Yang Mahatahu. Amal tanpa ikhlas bagaikan kelapa tanpa isi, raga tanpa nyawa, pohon tanpa buah, awan tanpa hujan, anak tanpa garis keturunan dan benih yang tidak tumbuh (Nahrowi, 2012: 5). Oleh karena itu agar kesuksesan belajar menjadi bermakna maka harus diinternalisasi dengan nilai-nilai ikhlas.

Untuk bisa menginternalisasikan nilai ikhlas ke dalam aktivitas belajar, maka seyogyanya ikhlas diartikan secara sederhana dan terukur. Seperti ikhlas dalam bahasa manajemen bisa dimaknai sebagai “totalitas”. Artinya orang yang ikhlas adalah orang yang cenderung melaksanakan segala urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya secara *total*, tidak parsial. Totalitas itu bisa dilihat dari kesungguhan melakukan sesuatu mulai dari *awal* mengerjakan, *selama* mengerjakan bahkan *setelah* mengerjakan. Dalam konteks belajar juga demikian. Mahasiswa disebut ikhlas dalam belajar, tidak semata-mata ketika pada saat “niat” di *awal* memulai kegiatan belajar, tetapi bagaimana mahasiswa tetap menjaga ikhlasnya *selama* dia belajar dan *setelah* selesai belajar. Jika ikhlas tidak menjadi ruh dalam belajar maka ancamannya sebagaimana yang disampaikan Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, “Barangsiapa belajar ilmu yang seharusnya ia mengharap wajah Allah Swt, kemudian ia belajar untuk mendapatkan sesuatu dari (harta) dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat” HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad (An-Nuhi, 2009: 20)

Agar ikhlas benar-benar menginternal dalam setiap praktik belajar, maka mahasiswa bisa melaksanakan strategi internalisasi ikhlas melalui manajemen ikhlas belajar sebagaimana penjelasan berikut:

Pertama. Ikhlas di awal belajar. Ini berarti bagaimana mahasiswa menata hati, dan menfokuskan pikiran bahwa apa yang akan dilakukan (;belajar) semata-mata karena Allah. Belajar sesungguhnya merencanakan kesuksesan di masa datang. Jika perencanaan dalam manajemen menjadi kunci “didapatkannya” sesuatu yang kita kehendaki atau kita cita-citakan, maka dalam khasanah Islam, perencanaan sesungguhnya adalah “niat”. Jika kita menghendaki sesuatu maka

niatkanlah, maka engkau akan mendapatkannya. Hal ini antara lain bisa disimak atas hadits dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : *Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan* (HR Bukhari Muslim).

Ikhlas pada tahapan *awal* belajar ini relatif mudah untuk dilakukan, karena berkaitan dengan “niat belajar” (; niat belajar karena Allah atau karena makhluk-Nya) yang dibarengkan dengan kegiatan belajar itu sendiri.

Kedua. Ikhlas selama belajar. Maksudnya adalah ikhlas atas segala kesulitan yang ditemui saat sedang belajar, termasuk ikhlas atas hal yang menyenangkan dan menyulitkan saat belajar. Jika ikhlas pada saat menemui kesulitan relatif bisa dikelola dengan baik (; ikhlas mengurai kesulitan), tetapi ikhlas atas hal-hal yang menyenangkan justru lebih sulit. Contoh, mahasiswa ikhlas bahwa ketika dalam proses perkuliahan di kelas ia aktif sedangkan keaktifan tersebut mendapat dinilai oleh dosen, maka mahasiswa harus berhati-hati. Dalam arti mahasiswa menjadi termotivasi untuk aktif di kelas apakah karena ingin mendapat nilai bagus dari dosen atau betul-betul karena Allah.

Ketiga. Ikhlas setelah belajar. Artinya ikhlas atas hasil belajar, apapun itu bentuknya, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Ikhlas atas hasil belajar yang menyenangkan berarti tidak kemudian membuat mahasiswa riya atau bahkan sampai lupa diri. Demikian juga ikhlas atas hasil belajar yang tidak menyenangkan. Misal: sudah belajar dengan sungguh-sungguh tetapi hasil tidak seperti yang diharapkan. Kondisi ini akan tetap terjaga ikhlasnya jika mahasiswa tidak marah, sedih, benci bahkan putus asa. Banyaknya kasus anak sekolah yang bunuh diri di Korsel dan Singapura menunjukkan mereka tidak ikhlas ketika mendapati kenyataan hasil kerja keras mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi dengan mempraktikkan ikhlas setelah belajar, maka akan menjadikan mahasiswa terus mengoreksi dan mengevaluasi diri untuk selalu melakukan perbaikan (*continues improvement*) sehingga pada akhirnya kesuksesan belajar di PT dapat diraihinya.

4. Penutup

Kesempatan untuk kuliah di PT adalah kesempatan yang wajib disyukuri oleh setiap mahasiswa. Implementasi syukur diwujudkan melalui kesungguhan dalam belajar selama kuliah serta dalam beraktivitas secara luas baik dalam ruang lingkup

kampus maupun di luar kampus yang dibingkai dengan keikhlasan yang indah ketika *akan, sedang dan sesudah belajar*. Karena dengan ikhlas kita menjadi fokus atas apa yang kita niatkan (rencanakan), ikhlas ketika bersusah payah menjalani proses belajar dan bahkan ikhlas ketika hasil belajar belum seperti harapan (:bukan rencana). Melalui ikhlas pula kesuksesan belajar yang hakiki bisa diraih.

Daftar Pustaka

- An-Nuh, Habiburrahman.(2009). *Energi Di Balik Hati Ikhlas. Rahasia Amalan Para Sufi*. Tt: Delta Prima Press
- Fauziyah, Ainy.(2000). *Dahsyatnya Kemauan*. Jakarta: Zaman
- Gaffar, M.Fakry. (2008) *Kebijakan Pengembangan Perguruan Tinggi*. Perkuliahan Sekolah Pascasarjana Program S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2008
- Pudji Muljono. (2000). *Kiat Sukses Belajar di Perguruan Tinggi: Upaya Peningkatan Motivasi dan Penerapan Metode Belajar yang Efektif*.
- Nahrowi, Izza Rohman (Ed).(2012). *Ikhlas Tanpa Batas: Belajar Hidup dan wajar Kepada 10 Ulama-Psikolog Klasik*. Jakarta: Zaman
- Tim BK dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. (2010). *Sukses Belajar Di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Zulfa, Umi.(2013). *Semalam Belajar Ke Negeri Ginseng*. Kroya: Candradimuka
- .(2012). *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Ziswa: School Levy Ala Indonesia*. Bandung: Media Pendidikan, Jurnal FPT UIN Sunan Gunung Djati
- .(2013). *Alternatif Model Penilaian Dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Pengembangan Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi*. Cilacap: Ihya Media



G. Transformasi A Smart Teacher Menuju Internasionalisasi Pendidikan

1. Pendahuluan

Saat ini, disadari atau tidak, kita telah masuk ke era globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan suatu tatanan di mana dunia menjadi begitu terbuka dan transparan, sehingga ada kesan seolah-olah tak ada lagi batas Negara. Kecenderungan global inilah yang oleh Kenichi Ohmae (1987) disebut sebagai *borderless world*. Satu kondisi yang diakibatkan oleh globalisasi adalah adanya hiperkompetisi, akselerasi suksesi revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, *alienasi*, *stress*, konflik antar kelompok, ketergantungan pada obat terlarang dan sebagainya, demikian yang diramalkan oleh Gibson. Akibat inilah yang semestinya diperhitungkan dan diantisipasi sejak awal agar tidak menimpa generasi muda bangsa yang sesungguhnya akan lebih banyak mengalami hidup dalam era globalisasi ini. Bentuk antisipasi dan adaptasi yang paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan itu bertugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa depan.

Ketika dunia sudah berada dalam era globalisasi inilah, maka ada semacam tuntutan bagi semua komponen yang ada di dunia ini untuk menyesuaikan dengan globalisasi. Tak terkecuali adalah dunia pendidikan. Implikasinya globalisasi terhadap dunia pendidikan sebagaimana pendapatnya Admin antara lain munculnya:

- *Home schooling*, yang melayani siswa memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global
- *Virtual School dan Virtual University*
- *Cross Border Supply Model*, yaitu pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pendidikan maya (*virtual education*) yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Asing ; contohnya United Kingdom Open University dan Michigan Virtual University.
- *Consumption Aboard Model*, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain; contoh : yaitu hadirnya banyak para pemuda Indonesia menuntut ilmu membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan ternama yang ada di luar negeri.

- *Movement of Natural Persons Model*. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnnya ke negara konsumen. Contohnya dengan mendatangkan dosen tamu dari luar negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia (tidak gratis tentunya).
- *Commercial Presence Model*, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu isu penting yang mesti dicermati oleh dunia pendidikan adalah internasionalisasi pendidikan, dan bagaimana dunia menyiapkan hal itu tanpa harus kehilangan dengan nilai-nilai lokal-nasional (desentralisasi pendidikan) Mengapa harus demikian, supaya pengembangan pendidikan (;*Schollingnya*) di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 pasal 50 adalah pengembangan sekolah bertaraf internasional dan sekolah berbasis keunggulan daerah.

Untuk itulah maka sekolah harus melakukan transformasi ke arah amanat UU Sisdiknas 2003 tersebut dengan berbagai macam strategi, salah satunya adalah pengembangan atau peningkatan kualitas SDM guru khususnya, menjadi guru yang smart dan efektif.

2. Mutu Pendidikan dan Internasionalisasi Pendidikan

Untuk memahami persoalan internasionalisasi pendidikan sebagai bentuk jaminan mutu pendidikan secara internasional, maka harus kita pahami terlebih dahulu perkembangan konsep mutu itu sendiri, seperti berikut:

- *Fitness for use* (Joseph Juran)
- *Conformanceto CustomerRequirement* (P.B Crosby)
- *Meeting customer expectations* (Armand VFeigenbaum)
- *Conformance to customer satisfaction* (K. Ishikawa)

Berdasarkan perkembangan konsep mutu inilah maka bisa disimpulkan kalau *mutu itu subyektif, dinamis (sesuatu yang dianggap mutu pada hari ini kemungkinan bukan sesuatu yang dianggap mutu pada esok hari)*. Jadi *mutu pada akhirnya adalah suatu proses bukan tujuan*.

Karena mutu adalah proses, bukan tujuan maka kebijakan pendidikan yang terkait dengan desentralisasi dan internasionalisasi pendidikan hanyalah

sebuah proses yang dijalankan agar pendidikan di Indonesia benar-benar akan mewujudkan peserta didik yang mampu hidup dengan kekhasan lokalnya sekaligus mampu berkompetisi dalam dunia internasional.

Knight mendefinisikan internasionalisasi pendidikan sebagai proses pengintegrasian dimensi internasional dan interkultural ke dalam fungsi pengajaran, penelitian dan pelayanan dari sebuah institusi. Dari definisi Knight ini maka bisa dipahami bahwa:

- a. Internasionalisasi dan kerja sama internasional adalah proses yang dinamis dan perlu direspons secara positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat manusia.
- b. Pengintegrasian dan pemaduan dimensi-dimensi internasional adalah kata kunci yang penting untuk menjamin bahwa program, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada sebuah institusi pendidikan harus mampu mengadopsi aspek-aspek internasional serta mendukung keberlanjutan internasionalisasi.
- c. Dengan dimasukkannya dimensi interkultural berarti bahwa internasionalisasi dan kerja sama internasional ditujukan untuk mengakomodasi keragaman kelompok etnik peserta didik dalam sebuah negara serta keragaman nasionalitas antar bangsa di dunia.

Dalam konteks keindonesiaan, maka internasionalisasi berdasarkan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 50 ayat 3 yaitu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan Pasal 1 ayat 8 Permendiknas No. 78 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Tabel 29. Internasionalisasi Pendidikan menurut UU Sisdiknas

Bentuk Lembaga	Bentuk Sistem	Ketentuan Aturan	Ketentuan Aturan
Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Perwakilan Negara Asing dalam NKRI	Menggunakan sistem Negara bersangkutan	Peraturan yang berlaku di Negara bersangkutan	Diperuntukkan bagi WNA
Lembaga Pendidikan Asing dalam NKRI	Menggunakan sistem pendidikan nasional Indonesia (Sisdiknas)	Menggunakan peraturan Per-UU-an Indonesia	Wajib memberi pengajaran pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi siswa SD s/d SLTA yang WNI Bekerjasama dengan lembaga pendidikan Indonesia. Mengikutsertakan pendidik dan pengelola WNI
Lembaga pendidikan Indonesia	Menggunakan sistem pendidikan Negara lain, seperti jenjang, kurikulum, sistem penilaian dsb.	Menggunakan peraturan per-UU-an Indonesia.	Terbuka bagi WNA dan WNI

Dalam kerangka tersebut, maka guru dalam hal ini, memiliki peranan penting sekaligus yang dituntut mampu memberikan kontribusi bagi suksesnya internasionalisasi pendidikan, melalui pemberian layanan pembelajaran efektif, yang menjadi indikator kebermutuan proses pembelajaran. Pembelajaran efektif tidak mungkin akan terwujud jika dilakukan oleh guru-guru yang biasa, dengan rutinitas stagnan tanpa memiliki kepintaran, kecerdasan, kreativitas, dan inovasi. Untuk mewujudkan pembelajaran efektif inilah maka diperlukan guru yang smart; guru yang cerdas, guru yang efektif. Dengan menjadi guru smart dan efektif maka kepentingan proses pembelajaran dalam konteks ini bisa terwujud. Menurut Kir Haryana (2008), proses pembelajaran penilaian, dan penyelenggaraan sekolah internasional harus bercirikan internasional seperti sebagai berikut:

- 1) *Pro-Perubahan*, yaitu proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kembangkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru (a joy of discovery).
- 2) Menerapkan *model pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan*, seperti student centered, reflective learning, active learning, enjoyable dan joyful learning, cooperative learning, quantum learning, learning revolution, dan contextual learning.

- 3) Menerapkan proses *pembelajaran berbasis TIK* (Teknologi Informasi dan komunikasi) pada semua mata pelajaran.
- 4) Proses pembelajaran *menggunakan bahasa Inggris*, khususnya mata pelajaran sains, matematika dan teknologi.
- 5) Proses penilaian dengan menggunakan *model-model penilaian sekolah unggulan* dari negara anggota-anggota OECD dan /atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.
- 6) Dalam penyelenggaraannya harus bercirikan *standar manajemen internasional*, yaitu mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000, dan menjalin hubungan sister school, dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.

3. Strategi A SMART TEACHER Menuju Internasionalisasi Pendidikan

Mengembangkan SDM guru menjadi guru yang smart sebagai salah satu strategi yang bisa dilakukan agar internasionalisasi pendidikan bisa terwujud akan mudah dilakukan, jika kita mengetahui siapa atau bagaimana guru smart itu, serta bagaimana kita mewujudkan guru smart itu.

a. Siapa Guru Smart?

Guru yang smart adalah guru yang pintar, cerdas, kreatif-inovatif dan efektif. Istilah-istilah ini memiliki pengertian yang limit bersambungan. Razalino, menyebut istilah pintar atau kepintaran sebagai kemampuan guru dalam menyerap informasi. Adapun kecerdasan berkaitan dengan kemampuan mengelola kepintaran. Orang yang sukses kadang orang yang tidak terlalu pintar, akan tetapi bisa mengelola orang pintar. Dengan kecerdasan akan membuat guru tahu siapa siswa yang cocok mengerjakan jenis pekerjaan apa. Selanjutnya kreativitas adalah kemampuan untuk membuat perbedaan. Orang yang kreatif adalah orang yang melihat hal yang sama tapi berpikir dengan cara yang berbeda, dan Inovatif adalah kemampuan untuk menemukan nilai tertentu (komersil) dari kreativitas. Inovasi membuat kreativitas tidak cukup untuk meraih sukses. Kreatif hanya membuat perbedaan, inovasi membuat perbedaan tersebut memiliki nilai tersendiri. Terakhir adalah efektif, guru efektif, yaitu guru yang mampu mengantarkan siswa kepada tujuannya sesuai dengan kemampuan siswa.

c. Kriteria Guru Smart

Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas, guru smart/efektif adalah guru yang: **Pertama**, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas seperti: (1) memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan; (2) memiliki hubungan baik dengan siswa; (3) mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus; (4) menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar; (5) mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerja sama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok siswa; (6) mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran; (7) mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi; (8) mampu meminimal-kan friksi-friksi di kelas jika ada.

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, yang meliputi: (1) memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran; (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa.

Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), yang terdiri dari: (1) mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa; (2) mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar; (3) mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan; (4) Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan.

Keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, terdiri dari: (1) mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; seperti hynoteaching dan lain sebagainya, (2) mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran; (3) mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembang-kan metode pengajaran yang relevan. Sedangkan Gilbert H.Hunt mengemukakan 7 kriteria guru yang smart/efektif/baik:

- 1) Sifat dan kepribadian (antusias, stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan bekerja keras, toleran, sopan dan bijaksana, bisa dipercaya, mudah menyesuaikan diri, demokratis, penuh harapan bagi siswa, tidak semata mencari reputasi diri, mampu mengatasi stereotype siswa, bertanggungjawab terhadap kegiatan belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, mempunyai pendengaran yang efektif.
- 2) Pengetahuan (mempunyai pengetahuan yang memadai dalam mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu mengikuti kemajuan dalam bidang itu)
- 3) Apa yang disampaikan (materi yang disampaikan mencakup semua unit bahasan yang diharapkan siswa secara maksimal)
- 4) Bagaimana mengajar (mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang, mendorong siswa untuk berpartisipasi, memonitor dan bahkan sering mendatangi tempat duduk siswa.)
- 5) Harapan (mampu memberikan harapan pada siswa, membuat siswa akuntabel,dan mendorong partisipasi orang tua)
- 6) Reaksi guru terhadap siswa (bisa menerima berbagai masukan, risiko dan tantangan)
- 7) Manajemen (mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, mengorganisasikan kelas sejak hari pertama tugas, memelihara suasana tenang dalam belajar dan tetap menjaga siswa untuk tetap belajar.

d. Kebiasaan Perilaku Guru Smart

- 1) Konsistensi
- 2) Perlakukan siswa sebagai individu
- 3) Jadikan lingkungan kelas fisik anda sedapat mungkin bernuansa belajar
- 4) Lakukanlah penilaian terhadap siswa sesering mungkin tapi dengan alasan yang kuat
- 5) Dapatkan umpan balik dari cara anda mengajar dan bekerja
- 6) Libatkan diri anda dari setiap ajang berbagi pengetahuan formal maupun informal.

e. **Bagaimana Menjadi Guru Smart?**

Untuk bisa menjadi guru smart bisa dilakukan dengan cara: *Pertama*, selalu up date dan membekali diri dengan berbagai macam ketrampilan yang berkembang seperti: ketrampilan mengajar, berbicara di depan umum, ilmu psikologi, self control (pengendalian diri), parenting, *hypnoteaching technique* dan *Neuro-Linguistic Programming* (NLP) atau metode RST (*Recollection Smart Teaching*)

Kedua, mengenal diri sendiri; Kenali Potensi Diri, Dirimu adalah Seorang Profesional Ingatlah, dirimu adalah profesional, Membangun Mentalitas Mutu, dan Selalu Berbuat Baik. Dari sekian usaha yang dilakukan untuk mensukseskan internasionalisasi ada hal yang harus dicermati dan dicarikan jalan keluarnya. Hal yang dimaksud menurut Ghofur, adalah berupa kelemahan utama lembaga pendidikan di Indonesia dalam rangka melakukan internasionalisasi pendidikan. Kelemahan yang dimaksud adalah 1) lemah dalam kemampuan financial, 2) lemah dalam pengembangan profesionalisme manajemen dan tata kelola, 3) lemah dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT), 4) lemah dalam pengembangan kekuatan kompetisi dan penguasaan pasar (*captive market*).

4. **Penutup**

Dalam rangka merespon tuntutan globalisasi, maka dunia pendidikan perlu melakukan sekian banyak perubahan dalam pengelolaan kelembagaannya jika tidak ingin tergilas arus kompetisi yang sudah sedemikian tinggi. Kompetisi tidak hanya antar lembaga pendidikan di negeri sendiri tapi juga bagaimana ia mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Salah satu strategi yang harus dijalankan perguruan tinggi adalah strategi internasionalisasi pendidikan. Dan hal ini tidaklah mudah. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan guru yang smart.

Daftar Referensi

Dampak Globalisasi Dalam Dunia Pendidikan, March 29th, 2010 | Author: admin <http://msb-brebes.co.cc/?p=189>

Ghafur, A. Hanief Saha, (2009), *Manajemen Mutu, Penjaminan Dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: UI Press

Lidia, (2008), Membuka diri terhadap kebutuhan siswa (Lidia, 2008) *7 Kebiasaan Guru Efektif* <http://lidya16.wordpress.com/2008/03/06/7-kebiasaan-guru-efektif/>

Jaya, Novian Triwidia, (2010), *Hypnoteaching, Bukan Sekedar Mengajar*, Bekasi: D-Brain

Syukur, Freddy Faldi, (2010), *Menjadi Guru Dahsyat Guru Yang Memikat*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Komariyah, Aan dan Triatna, Cepi (2006), *Visionary Leadership, Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara

Marno dan Idris, M, (2009), *Strategi dan Metode Pengajaran*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group

Webe, Agung, (2010) *Smart Teaching, 5 metode efektif lejitkan prestasi anak didik*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher

Rabu, 18 Juni 2008 <http://garduguru.blogspot.com/2008/06/cara-mudah-menjadi-guru-unggul.html> <http://garduguru.blogspot.com/2008/06/cara-mudah-menjadi-guru-unggul.html>

Menciptakan Guru Inovatif Penggunaan TIK dalam pendidikan harus sederhana dan tepat pada akar masalah yang muncul. 2008-07-28 14:40:00, Republika <http://zamrishabib.wordpress.com/2008/08/06/menciptakan-guru-inovatif-penggunaan-tik>

Apakah Anda Pintar, Cerdas, Kreatif dan Inovatif? <http://www.ronaldorozalino.com/2010/01/apakah-anda-pintar-cerdas-kreatif-dan.html>. Diposkan oleh Ronaldo Rozalino on 23 Januari, 2010 / Label: Kreatif

Ramli, Murni, Internasionalisasi Sekolah <http://murniramli.wordpress.com/2009/01/02/internasionalisasi-sekolah/>

Satriwan, Trend Sekolah Bertara(i)f Internasional (Bag. 1), <http://www.labschool-unj.sch.id/smajkt/publikasi.php?action=artikel&cid=1033>

Ciri-Ciri Proses Pembelajaran, Penilaian dan Penyelenggaraan Sekolah Internasional <http://gurukuansing.blogspot.com/2010/02/ciri-ciri-proses-pembelajaran-penilaian.html>

H. *Model of Islamic Religion Education 435 Based on Islam Nusantara on College*

1. Introduction.

Indonesia care about religious issues and religious education citizens, even religious education becomes the subject to learners from elementary, middle and high level of education. At higher education level, religious education based on Law No. 12 of 2012 on Higher Education Article 35 paragraph 3 as a compulsory subject taught along with three other subjects, namely Pancasila, Civic Education and Indonesian Language. On the other hand, the worrying phenomenon is the emergence of radicalism in the name of religion, even on campus. the results of research Abdullah Dawn et al quite surprising about the attitude of students at some of Indonesia's top universities. They tend to agree to radicalize on behalf of Amar Ma'ruf Nahi Nahi Munkar in the form of sweeping to places of immorality with numbers reaching 65% (1594 respondents) (Muqoyyidin, 2013).

Situations like this certainly cannot be left. Moreover, students who in fact become the next generation of potential nation to be the leader of the nation, they should appear as a potential leader who can show tolerant attitude in the midst of many diversity both in Indonesia and in the world. Therefore, this paper will discuss the model of alternative religious education in college. The new concept of Islamic Religion Education Model Based on Islam Nusantara on College with the formulation 435. Where four (4) are enthusiastic spirit of religious education process, namely: *ruuhuddin* (religious spirit), nationalism, *ruuhudta'addudiyah* (spirit of diversity) and *ruuhul insaniyyah* (spirit of humanity) (Hazen, Ed, 2016), built on 3 main pillars: (Fikrah thought (*Fikrah*), movement (*harakah*), real action (*amaliyyah*))³, and with 5 markers, namely *islakhiyyah*, *tawazunniyah*, *tatawuwuniyah*, *akhlaqiyah*, and *tasamuh*.

Islamic Religion Education (IRE) based on Islam Nusantara is an education that have spirit of providing an alternative model of religious education to answer the challenges of society postmodernism. Therefore, the model of religious education is a very fundamental issue regardless of the attitude of pro and contra against the term Islam Nusantara. The idea of IRE based Islam Nusantara is one of the efforts to renew the concept and model of Islamic educational thinking, especially in the archipelago in the aspect of higher education. The ultimate goal (learning outcomes) on higher education based on Dikti Formulations as follows:

The formation of the student's personality as a whole (*kaffah*) by making Islam as the foundation of thinking, acting and behaving in the development of science and profession. It means that a whole personality can only be realized if in every student self-implanted faith and piety to Allah swt. It should be noted, however, that faith and piety, will only be realized if it is supported by elements, namely: insight / knowledge of Islam (Islamic knowledge), religious dispositions, Islamic skills, (Islamic commitment), confidence as a Muslim (Moslem confidence), and skills in implementing religious teachings (Islamic competence) (Ristekdikti, 2016).

What is the ultimate goal of the IRE based Islam Nusantara on college, in line with the Islamic Nusantara like in Islamic boarding schools, namely Islam as the basis of thought (*fikrah*), attitude (*harkah*) and behave (*amaliyah*). Based on this condition, writer is hoped that this paper will contribute to the efforts of the affirmation of Islam Nusantara that will deliver Indonesia as a better country and more tolerant relationship (*Tasamuh*), polite (*Akhlaqiyyah*) and humane (*Insaaniyyah*) and justice (*Ta'addul*). This research used qualitative approach, type of literature research especially in the field of education. In the opinion of McMillan and Schumacher(2001). Data obtained from literature sources using the documentary method⁷ and analyzed by using content analysis (Moehadjir, 2000).

2. Islam Nusantara

Islam Nusantara is Islam taught by Walisongo, that is peaceful Islam, get along, not arrogant and *rahmatan lil 'Alamin*, brought by Walisongo which they understand from the teachings of Prophet Muhammad saw., with not only invites *bil lisan*, but also *bil hal*, not only concern formalities, but also the core of Islamic teachings. This means a typical Islamic style of Indonesia, which is a combination of Islamic theological values with the values of local traditions, cultures, and customs in the country. In simple language, Islam Nusantara is the same Islamic concept as Islam elsewhere, but in understanding, its application and its application contextually (bound to the dimension of time and place).As a concept, Islam Nusantara has special characteristics that distinguish it from others Islam. There are at least two concepts that are carried by Islam Nusantara, namely pillars, markers or characteristics. *First*, 3 (three) Pilar Islam Nusantara, namely: thinking (*fikrah*), movement, action. *Second*, the 5 Islamic bookmarks of the archipelago, namely: reform (*islahiyyah*), balanced (*tawazuniyyah*), voluntary (*tatawuu'iyah*), polite (*akhlaqiyyah*) and tolerant (*tasamuh*)⁹.

The following table presents about 8 pillars and markers/ special characteristics of Islam Nusantara.

Table30. Pillars and Characteristics of Islam Nusantara

Pillars	Characteristics
<i>Fikrah-Tawassuth</i> The thought (<i>fikrah</i>) of Islam means that the way of thinking that put forward Islam Nusantara is moderate (<i>tawassuth</i>), which is not textual position, but also not liberal.	<i>Islakhiyyah</i> . Reformation (<i>islakhiyyah</i>). That, thoughts based on development (<i>tatwir al fikrah</i>), and therefore, Islamic thought archipelago is a thought aimed at continuous improvement, the way of dynamic thinking.
<i>Harakah-movement</i> , that carried Islam Nusantara as a movement to make improvements for the association and its citizens. There are not only based on the tradition but also innovation.	<i>Tawazuniyyah</i> , which means balanced in all fields. If a movement is implemented, then the balance aspect must also be taken into consideration. This <i>tawazuniyyah</i> weighs with justice. If a movement is implemented, then the balance aspect must also be taken into consideration. This Tawazuniyyah weighs with
	<i>Tatawuniyyah</i> means volunteer (volunteerism). One thing that must be held in this volunteer is in carrying out thoughts; movements, and practices, nahdliyin should not impose on others.
<i>Amaliah</i> , or actual action of Islam Nusantara is based on <i>fikh</i> and ushul fikh, that is taking care of tradition (<i>'urfand' adat</i>) based on Islamic value	Courteous (<i>akhlaiyyah</i>), ie all forms of thought, movement and practice of Islam Nusantara Muslims performed with polite. The fee here applies in accordance with social ethics, and state and religion.
	<i>Tasamuh</i> , which means being tolerant, respectful to others. This tolerant attitude is not passive, but critical and innovative.

3. The Policy of Islamic Education In College

Islam Nusantara in its execution can be done through an educational path, influenced by the thought of Al Ghazali especially *tasawuf*, with the characteristics of his teachings is polite and reduce the dose of formalism-legalism in the body of Muslims¹⁰. This pattern can be used as moral education (Islam) in Indonesia, especially formal education such as college. Thus, the college able to produce output that always appreciates the differences and pluralism of the community.

The government itself through several regulations have made arrangements on religious education (Islam), especially in Higher Education, including:

- a. Law N0. 20 of 2003 on National Education System, article 15¹¹, mentions “type of education, including general, vocational, academic, professional, vocational, religious, and special education”.

- b. Law No. 12 the year 2012 on Higher Education, Article 35 paragraph 3 “The curriculum of higher education shall contain the subjects of Religion, Pancasila, Civic Education, and Bahasa Indonesia for undergraduate and diploma programs”
- c. Government Regulation No. 55/ 2007 on Religious Education and Religious Education article 1, paragraph 113, explains the limits of religious education: “Religious education is education that provides knowledge and shapes the attitude, personality, and skills of learners in the practice of religious teachings, which implemented at least through the subjects on all paths, levels, and types of education”. The article 5, paragraph 1 “the religious education curriculum must be implemented in accordance with the National Education Standards”.
- d. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education no. 44 of 2015 on National Standards of Higher Education
- e. Circular Letter of the Directorate General of Learning and Student Affairs no. 435/B/SE/2016 on the Materials of Compulsory Subjects of the General Compulsory Course, “Directorate General of Learning and Student Affairs has compiled a Textbook of Subjects for Religious Subjects, Pancasila, Civics and Indonesian Education in order to enrich the Materials. in order to face the era of globalization and the ASEAN Economic Community (MEA) capable of delivering students to be adaptive, competitive, and become a graduate who love the homeland, ready to defend the country, and able to improve the identity of his nation”.

4. Characteristics of Islamic Religious Education in College

The implementation of religious education in college certainly has its own characteristics. At least when viewed from the main duties and functions of religious education at college.

- 1) There are five main tasks of education (religion) of Islam in the college according to Amin Abdullah (Arif, 2012). Namely : a) introduces contemporary issues facing Muslims, together with the attempt to explain classical Islamic teachings, b) directing the ultimate goal of Islam on solving problems of human relationships, c) contextualize Islam, d) criticizing the emphasis of religious education only on cognitive domains, and f) dedicating Islam is not solely for the development of individual morality, but also public morality.

- 2) The function of religious education according to Nurul Zuriyah. there are two functions, namely conservative function and progressive function (Nurudin, 2015). Conservative function is the function of inheritance and the preservation of the ideals and culture of a society in the next generation, where religion as a source of cultural development inspiration. While the progressive function is how religious education activities can provide knowledge and development stock, the planting of values based on religion and the provision of skills to anticipate the future so that the next generation has the provision of the ability to face the challenges of the present and the future.

To be able to run the duties and functions, then the IRE in the college need to refer to some opinions such as *Hujjatul Islam* Imam Al Ghazali. Citing the opinion of Al - Ghazâlî quoted Abdul Halim Mahmud about the purpose of learning is "The result of science is actually closer to God, the God of nature, and connecting with high angels and gathered with the spirits of nature. All that is grandeur and respect is instinctive" (Hermawan, 2016). This means that IRE is also oriented to get closer to Allah swt.. Therefore, students as learners who must meet the requirements as proposed by Al Ghazali¹⁹ as follows:

- a. Must be clean spirited, avoided from bad manners and other disgraceful properties such as, anger, hurt, envy, high heart, *ujub*, *takabbur* and others.
- b. Must reduce its attachment to the world that interfere with the smoothness of mastery of science.
- c. Must be *tawadlu* against his teacher.
- d. Learning gradually
- e. Recognize the value of the knowledge

Furthermore, in addition to student conditioning, the curriculum of IRE in IRE according to Al Ghazali (Al Wizar, 2015). oriented as a religion that serves as a means to purify themselves and clean it from the influence of world life, as well as a science that gives the benefit of the world and the hereafter (pragmatic-theological).

5. Islamic Education Based Islamic Nusantara at College

a. Inclusive Education.

Inclusion or inclusive is one of the strategies that can be applied in implementing IRE in on higher education. The main philosophies and

principles promoted in inclusive education are 1) inclusion is a human rights and equality issue, not merely a special educational issue, 2) inclusion is appreciating even celebrating the differences in the diversity of their identity and learning needs, 3) inclusion aims not to mainstream learners in an unchanged system. In contrast, inclusion aims to change the system in order to meet the needs of learners and 4) inclusion should be community-based. That is, an inclusive education institution reflects how the community around it. In other words, an inclusive system can be realized only through the establishment of an inclusive and democratic society the community around it. In other words, an inclusive system can be realized only through the establishment of an inclusive and democratic society (Soleh, 2014).

Inclusive IRE at college will be present as a form of the student inclusive-ness representation as well as result of a way of thinking, attitude, and behavior of student inclusive to the existence of other religion and other differences.

The IRE inclusive in higher education should be implemented under the following conditions: (a). built on freedom of expression and the distinction should be appreciated not muzzled. (b). Built on the character of the learner who puts humility, generosity, friendliness, and courtesy in respect for others. (c). Built on a humble attitude recognizes the limitations of human beings in achieving absolute truth. (d). Promote a process that encourages learners to see the opinions of others as the respectful, creative and independent dimension. (e). Emphasizes the importance of emotional control in addressing differences (Masduki, 2013)

b. Multicultural education

Multicultural education is an effort to realize the spirit of the flow or understanding of multiculturalism, whose emergence began with the development of ideological movement or understanding of multiculturalism in Western countries such as the US, Britain, Canada, and Australia as a movement politics of difference 1950- a sd-1660s (Machali, 2013). The spirit of multicultural education is the recognition of the dignity of human beings living in their communities with their unique culture.

c. Peace Education (PE)

Peace Education is an educational concept that has emerged since the time of Comenius and has grown more and more in the later years of the twentieth

century. Peace Education is essentially a process of gaining knowledge, attitude development, and behavior to live in mutual respect, tolerance, peace, mutual aid, and nonviolence (Machali, 2013).

In practice, Peace Education relies on the three Peace Education PE pillars of educators, learners and parents²⁵. All three have their respective roles as well as active actors in the planting of noble values in building peace. Educators serve as educators of values and science. Learners act as successors and peers for peers. While parents act as partners of teachers to encourage, support and develop the

c. Institutionalization.

IRE learning will have full strength if the values. This stage, make values in the IRE become a strong identity and character for students and all components in the college. This process is carried out through three (3) stages, namely (a) the stage of rulemaking, i.e. the approval of the rules to be followed by all campus community agreed by the family/community. (b) The stage of day-to-day practice: implementing/practicing the rules at a point an in day-to-day activities and (c) the formalization stage of institutional cultural symbols, i.e. formalizing the value symbols that all campus communities should support: community symbols, clothing, and other attributes (Zulfa, 2013).

This learning model is called IRE-Based Islamic Nusantara Model because this learning model is a model of IRE learning which is based on Islamic Nusantara especially in college that is very heterogeneous society. While referred to as Learning Model IRE 435. This model is formulated from the 435 Islamic Nusantara formula, which is 4 (four) spirit, 3 pillars and 5 markers of Islam Nusantara. Plus formula 4 special education, i.e. inclusive education, multicultural education and peace education (peace education) (Zulfa, 2013).

The realization of IRE learning at such a college will become a pioneer for the realization of a world full of peace and prosperity in Ridlo Allah swt.. IRE able to contribute mature values to realize a future society of prosperity, peace and lead to increased adherence to Him. This is relevant to Mulyadhi Kartanegara Kartanegara said that there are civil values that support the upholding of the cosmopolitan society, namely:

- 1) Inclusivism, ie self-disclosure of "external elements" through the ability to appreciate and select constructively.
- 2) Humanism, in the sense of view that treats humans solely because of their humanity, not because of other causes outside it, such as race, caste, wealth, and religion. Included in humanism here is an egalitarian nature that views human beings equal in degree.
- 3) Tolerance, namely the existence of the extinction and greatness of the soul in addressing the differences.
- 4) A democracy that gives space for freedom of thought and the delivery of criticism.

6. Conclusion

The Islamic Religion Education (IRE) is an important and fundamental part of the national education system in the context of Indonesia's diversity and the world community. The Islamic Religion Education (IRE) is an important and fundamental part of the national education system in the context of Indonesia's diversity and the world community. Indonesia required religious education design that is not only able to reduce the potential for conflict but also able to make human life on earth is full of peace and prosperity. Therefore, with the emergence of IRE based Islam Nusantara on college or can be called Learning Model IRE 345, is expected to be an alternative to create human life in the state and the world peacefully so that the welfare of human life can be achieved in the correct sense.

Daftar References

- Arif, Mahmud, 2012, *Pendidikan Agama Islam Inklusif- Multikulturalisme*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.1 N0.1, Juni 2012/1433.
- Al Wizar, 2015, *Pemikiran Pendidikan Al Ghazali*, Jurnal Potensia Vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015, Hal 140-141
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, (2016), *Pendidikan Agama Islam untuk PT*, Cetakan 1.

- Ghazali, 2016, “Tasawuf Al Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum Al Din”, makalah Seminar Nasional Imam Ghazali: “Pemikiran dan Pengaruhnya Terhadap Islam Nusantara dan Peradaban Dunia”, IAIIG Cilacap pada tanggal 3 April 2016
- Hazen, Ibnu (Ed), (2015), 100 Ulama Dalam Lintas Sejarah NU, (Jakarta: Lembaga Tāmir Mesjid –PBNNU, 2015).
- Hermawan, Asep, 2016, *Konsep Belajar dan Pembelajaran Menurut Al Ghazali*, Studia Didaktika, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol.10 N0.1 tahun 2016
- Maduqi, Irwan, 2013, *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khasanah Pesantren*, jurnal Pendidikan Islam Vol.1, Juni 2013/1434, hlm.10-12.
- Machali, Imam, 2013, *Peace Education Dan Deradikalisasi Agama*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.II, N0 1, Juni 2013/1434. hlm. 48-49
- Muhadjir, Noeng.2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, 2013, *Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.II, Noor 1, Juni 2013/1434. Hlm.134.
- Nurudin, 2015, *Perbandingan Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia dan Sekolah Republik Indonesia Tokyo*, Jurnal Pendidikan Islam. Vol.IV.Nomor 1, Juni 2015/1436, hal.9
- Soleh, Akhmad, 2014, *Kebijakan PT Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendidikan Islam Vol.III Nomor 1, Juni 2014/1435, hlm. 13
- Schumacher, James H McMillan and Sally, 2001, *Research In Education. A Conceptual Introduction*. New York: Addison Wesley Longman.Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Duta Nusindo, Semarang



I. Efektivitas Strategi Percepatan Penyelesaian Studi Program S1 Fakukltas Tarbiyah IAIIG Cilacap

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Välimaa dan Ylijoki Eds (2008:18) dalam bukunya yang berjudul *Cultural Perspectives on Higher Education*, menyatakan bahwa salah satu isu yang paling populer dalam kehidupan pendidikan tinggi adalah perubahan. Normalnya perubahan dimaknakan sebagai bagaimana kita melihat hubungan kausal antara perubahan kebijakan (yang disebut reformasi), atau bisa juga disebut sebagai pengenalan ide-ide manajemen baru ataupun proses pembelajaran di Program Studi/Fakultas. Artinya budaya dalam organisasi seperti Perguruan Tinggi (PT) termasuk budaya akademik menghendaki adanya kebijakan-kebijakan baru yang relevan.

Kebijakan baru yang dibutuhkan oleh PT berkaitan erat dengan proses mewujudkan mutu PT tersebut, Karena PT merupakan ujung tombak perubahan bangsa. Hal ini merupakan fungsi melekat PT, di mana ia merupakan tingkatan pendidikan yang tertinggi dalam jenjang pendidikan formal berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 2. Menyebutkan: “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.

Melihat urgennya kedudukan PT, maka sudah seharusnya PT dalam pengelolaannya diimbangi dengan suatu penjaminan mutu yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan penjaminan mutu sebagaimana Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu”. Tujuan ini diperkuat dengan fungsi SPM-PT dalam ayat selanjutnya (2), yaitu : “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu”.

Dalam konteks nasional, praktik penjaminan mutu PT di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang relatif besar. Hal ini diperkuat dengan Data Statistik Pendidikan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang menyebutkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan perkembangan cukup pesat terutama pada perguruan tinggi swasta. Untuk tahun 2015/2016 perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) berjumlah 2.680 perguruan tinggi yang terdiri dari 82 PTN dan 2.598 PTS. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan antara PTN, PTS maupun dengan perguruan tinggi luar negeri/internasional (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013: 7).

Sisi positif dari tantangan (persaingan) yang sangat besar tersebut dapat dijadikan pendorong bagi pengelola sebuah PT untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui peningkatan mutu di seluruh aspek. Perguruan tinggi diarahkan untuk memenuhi aspek otonomi, transparansi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan peningkatan kualitas agar tetap eksis mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan semakin menebar kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

Dari sekian banyak ukuran mutu, salah satunya adalah mutu lulusan. Mutu lulusan sebenarnya turunan dari konsep *Good University Governance* (GUG). Sedangkan konsep *GUG* sesungguhnya adalah turunan dari konsep *good governance*. Bisa juga dikatakan bahwa GUG adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ universitas/Fakultas/Program Studi sebagai upaya untuk memberikan nilai tambahnya secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Di mana dalam menjalankan aktivitasnya GUG berdasarkan pada prinsip-prinsip: *transperancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness* (Wiyatno, 2009), yang kemudian dikembangkan oleh Dikti menjadi 8 (: ditambah penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi dan nirlaba) (Rizal: 12). Pada prinsip efektivitas dan efisiensi inilah muncul ukuran mutu lulusan dilihat dari aspek ketepatan waktu untuk lulus, dengan capaian pembelajaran yang sesuai atau standar yang ditetapkan tetapi dengan jumlah in put yang dikeluarkan/digunakan relative kecil.

Ketepatan waktu untuk lulus para lulusan (output) merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa. Selain prestasi akademik yang tinggi, lulus tepat waktu juga menjadi salah satu indikator keberhasilan studi mahasiswa.

Tetapi untuk bisa mewujudkan keinginan lulus tepat waktu, mahasiswa harus berhadapan dengan banyak faktor yang, salah satunya dipengaruhi oleh faktor belajar. Sedangkan factor ini menurut Zulfa (2010, 68-69) akan berhasil atau tidak dipengaruhi oleh dua factor besar yaitu faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam diri (internal). Factor internal meliputi factor jasmaniyah (; kesehatan, kelebihan dan kekurangan fisik), psikologis (; intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan) dan kelelahan (; kelelahan jasmani mauun rohani). Sedangkan factor eksternal juga terdiri dari tiga bagian, yaitu *homescholling, scholling dan community*. *HomeSchooling* seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi orang tua, pengertdan orang tua dan latar belakang kebudayaan. *Schooling* yaitu Kurikulum, metode, relasi guru-siswa, relasi siswa-siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, gaya belajar, tugas rumah, aturan. *Community*, kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat dan sebagainya.

Kemudian sejalan dengan mutu lulusan yang dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal tersebut, maka berkualitas tidaknya lulusan PT juga dipengaruhi oleh aturan yang wajib dipatuhi PT (; scholling). Di mana sesuai dengan Permenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai revisi dari Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang SN-PT, pada :

- 1) pasal 16.(1).d menyebutkan : “(1) masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: ...d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- 2) Kemudian Pasal 18 (1) menyebutkan “Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut”.

Berdasarkan informasi tersebut berarti bahwa mahasiswa program sarjana (S-1) dikatakan memenuhi ketepatan waktu untuk lulus jika waktu

yang dihabiskan untuk menyelesaikan program pendidikannya adalah 8 semester (4 tahun). Hal ini sesuai dengan hitungan beban program minimal normal-ideal (144; walaupun sesuai regulasi yang ada beban studi program sarjana berada dalam interval 144-160 sks) dibagi beban minimal normal per semester (18 sks, sesuai regulasi yang ada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi bisa mengambil sks sampai batas maksimal, yaitu 24 sks). Sehingga program S1 sebanyak $144 \text{ sks} / 18 \text{ sks} = 8$ semester. Atau jika mahasiswa tersebut berprestasi akademik tinggi maka bisa ditempuh $144 \text{ sks} / 24 \text{ sks} = 6$ semester- 7 semester. Dalam konteks ini juga berarti secara umum-normal, maka masa studi mahasiswa dikatakan bermutu jika dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu yaitu 8 semester dengan IPK berada dalam minimal dalam batas bawah interval memuaskan : 2,76 s.d 3,0, sesuai pasal 25 ayat (2) "...Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)".

Dalam rangka mewujudkan mahasiswa lulus tepat waktu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, atau khususnya unit pelaksana akademik (fakultas/program studi) yaitu melakukan strategi percepatan bagi mahasiswanya untuk lulus tepat waktu. Strategi itu bisa berkaitan dengan strategi sebaran mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu sampai strategi pendampingan penyusunan tugas akhir sejak awal.

Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap sebagai PT yang menyelenggarakan program sarjana, pada tiga fakultas yaitu: Fakultas Syari'ah, Tarbiyah dan Dakwah. Berdasarkan data kelulusan fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa lama studi mahasiswa Tarbiyah baik program studi PGMI maupun PAI rata-rata adalah 5 – 6 tahun, bahkan sebagian kecil sampai 7 tahun. Berdasarkan perolehan data ini menunjukkan bahwa kinerja mahasiswa masih belum seperti yang diharapkan. Implikasinya adalah rendahnya skor pada aspek mahasiswa pada butir jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dalam penilaian akreditasi Prodi.

Situasi seperti ini kemudian disadari oleh Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap. Sehingga beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan sebagai upaya

fakultas dan Program Studi untuk mendorong jumlah kelulusan tepat waktu mahasiswanya dilakukan, seperti pada formulasi ulang sebaran mata kuliah, program PPL terintegrasi penyelesaian tugas akhir, “menabung” judul penelitian, tawaran workshop/pendampingan metodologi penelitian (Paket A, B, C) dan sebagainya (dokumen Kurikulum Prodi PAI dan PGMI 2010, program Fakultas 2013-2014, kebijakan Prodi 2013). Hasilnya sedikit demi sedikit terlihat mulai bermunculan mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas strategi percepatan penyelesaian studi tepat waktu program sarjana di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengungkap beberapa masalah yang terformulasikan dalam rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016?
- 2) Bagaimana strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016?
- 3) Bagaimana ragam program percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016?
- 4) Bagaimana efektivitas strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016?

c. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui kebijakan percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.
- 2) Mengidentifikasi ragam strategi percepatan studi S1 yang telah dijalankan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.
- 3) Mengidentifikasi ragam program percepatan studi S1 yang telah

dijalankan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

- 4) Menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

2. Landasan Teori

a. Mutu Perguruan Tinggi

Mutu merupakan suatu kebutuhan yang diniscayakan. Setiap elemen yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya institusi pendidikan tinggi (perguruan tinggi/PT) meniscayakan adanya mutu dalam menjalankan roda organisasinya. Tetapi untuk menjalankan PT yang bermutu dibutuhkan komitmen dan kesabaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan mutu membutuhkan tahapan yang panjang dan pelan, sebagaimana tahapan umum untuk menciptakan mutu dalam perpektif penjaminan mutu menurut Prof. Len Chairn, yaitu 1) *quality awarrness*, 2) *quality commitment* dan 3) *quality behavior*.

Tahap pertama **Quality Awareness** (Tahu, Paham dan Sadar Mutu). Hal ini bisa dilihat dari tahu tidaknya elemen PT akan manfaat akreditasi, tahu akan fungsi LPM, tahu akan tugas dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan sebagainya. Setelah *quality awareness* terwujud, maka tahap berikutnya adalah tahap pembentukan **Quality Commitment** (Komitmen terhadap Mutu). Pada tahapan ini pemahaman tentang mutu diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menunjukkan indikasi seseorang komit terhadap mutu, seperti pimpinan memberikan arahan, mengarahkan semua sumber daya, dana, dan SDM dalam mewujudkan mutu, dosen menunjukkan komitmen terhadap organisasi; memiliki rasa keterlibatan terhadap tujuan dan tugas organisasinya maupun kesetiaan pada organisasinya, serta menunjukkan kepemilikan komitmen profesi; melaksanakan tugas profesinya) dan lain-lain. Jika tahap kedua sudah dicapai, maka baru akan muncul tahapan ketiga yaitu **Quality Behavior** (Perilaku Mutu), seperti dosen dalam menjalankan tugasnya selalu menyiapkan silabus/CO/RPS-RPM, mengajar tepat waktu, memilih dan Menggunakan metode/strategi/media pembelajaran yang tepat, menilai dan memberi nilai tepat waktu, melakukan penelitian dengan

sungguh-sungguh, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan sungguh-sungguh, disamping tugas tambahan lain sebagai pribadi.

Terkait dengan upaya mewujudkan mutu perguruan tinggi, pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam mengupayakan perwujudan mutu PT di Indonesia, yang antara lain bisa dilihat produk kebijakannya berupa Permendibud N0 50 tahun 2014 tentang SPM-PT. Di mana dalam Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perguruan tinggi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu akan mampu menunjukkan diri sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan otonomi PT dengan baik. Sebagaimana Pasal 63 UU N0 12 tahun 2013 menyebutkan: “Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi”

Sekaligus diketahui juga, pengelolaan perguruan tinggi yang sudah dijaminakan mutunya akan berimplikasi bagi terbentuknya efektivitas dan efisiensi perguruan tinggi tersebut.

b. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Perguruan Tinggi

1. Efektivitas Pengelolaan Perguruan Tinggi

Mengukur efektivitas pengelolaan perguruan tinggi berarti mengukur seberapa jauh tujuan pendidikan tinggi dicapai oleh para perguruan tinggi tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 2 disebutkan “Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan

Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi”. Sedangkan tujuan pendidikan tinggi sendiri rumusannya bisa dilihat dalam UU N0 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 sebagai berikut:

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2013).

Berangkat dari informasi di tersebut, maka efektivitas pengelolaan perguruan tinggi mengacu kepada konsep efektivitas pendidikan, pengelolaan perguruan tinggi dan tujuan pendidikan tinggi. Dalam konsep efektif, derajat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi ukuran apakah sebuah proses, program dan kegiatan telah efektif atau tidak (Zulfa, 2010) Artinya derajat pencapaian tujuan ini menunjukkan tingkatan keefektifan suatu tujuan itu dicapai. Semakin tinggi derajat pencapaian tujuan tersebut maka akan semakin tinggi efektivitasnya (:sangat efektif), demikian juga berlaku untuk sebaliknya. Senada dengan pendapat tadi adalah pendapat Kok -Yee Ng dan Nelson (Martono dan Wijayanto, 2014) Kok -Yee Ng mengemukakan batasan efektivitas organisasi seperti PT atau fakultas, yang diukur dari

tingkat ketercapaian tujuan. Efektivitas organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok, sehingga organisasi dapat efektif jika mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya setiap bagiannya. Nelson dalam hal ini memperjelas konteks efektivitas organisasi, yaitu organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok meskipun efektivitas kinerja organisasi lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok.

Beberapa prinsip yang dijadikan pedoman untuk menilai efektivitas sebuah program diantaranya:

- a) Menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan dan alat untuk memproses input menjadi output.
- b) Sistem yang dibandingkan harus sama/ *homogeny*. Misal tingkat pendidikan, kecakapan, social ekonomi, dan lain-lain.
- c) Mempertimbangkan semua output. Misal jumlah siswa lulus dan kualitas kelulusan.
- d) Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan output harus berkualitas.

Sekaligus efektivitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi juga merupakan salah satu prinsip dari *Good University Governance* (GUG) dijalankan atau tidak oleh PT. Setidaknya GUG mensyaratkan adanya: 1) transparansi (kepada stakeholders), 2) responsibility (tanggungjawab), 3) independensi (dalam pengambilan keputusan), 4) fairness (adil), 5) penjaminan mutu dan relevansi, 6) efektivitas dan efisiensi dan 7) nirlaba. Dalam konteks ini efektivitas dan efisiensi bisa tercerminkan dari sistem perencanaan jangka panjang (RPJP), menengah (Renstra) dan tahunan (RKAT).

2. Karakteristik PT yang efektif

Dalam teori umum tentang efektivitas lembaga Pendidikan, setidaknya menurut Lunenburg and Ornstein (2004: 409-410), ada 7 karakteristik lembaga Pendidikan (:sekolah/PT) yang efektif, yaitu:

- 1) *a safe and orderly environment that is not oppressive and is conducive to teaching and learning*
- 2) *a clear school mission through which the staff shares a commitment to instructional goals, priorities, assessment procedures, and accountability*
- 3) *instructional leadership by a principal who understands and applies the characteristics of instructional effectiveness*
- 4) *a climate of high expectations in which the staff demonstrates that all students can attain mastery of basic skills*
- 5) *high time on task brought about when a high percentage of student 'time is spent "engaged" in planned activities to master basic skills*
- 6) *frequent monitoring of student progress, using the results to improve individual performance and instructional program*
- 7) *positive home school relations in which parents support the school's basic mission and play an important part in helping to achieve it.*

3. Indikator Perguruan Tinggi yang Efektif

Selain karakteristik sekolah/lembaga Pendidikan yang efektif, (Lunenburg and Ornstein, 2004) juga mengajukan beberapa kriteria efektivitas sekolah. Kriteria efektivitas sekolah menekankan pada skor perstasi/capaian siswa, yaitu:

- 1) *a comparison of expected levels of students achievement with current levels of achievement*
- 2) *analysis of levels of student achievement in prior grade compared with that in the present grade*
- 3) *analysis of levels of achievement scores between similar schools, sometimes after controlling for family income or social class*
- 4) *a comparison of subgroups of students by gender, race, and social class*
- 5) *an analysis of grading inflation and how it skews achievement levels*

Dalam lingkup yang lebih sempit seperti fakultas atau jurusan, maka efektivitasnya bisa dilihat dari kemampuan fakultas untuk menghasilkan output yang berkualitas. Output berkualitas bisa dilihat dari academic achievement dan non academic achievement.

Pendapat lain seperti yang diajukan Cameron sebagaimana yang dikutip Martono dan Wijayanto memperkenalkan Sembilan (9) dimensi efektivitas organisasi pendidikan tinggi, yaitu: (a) kepuasan pendidikan mahasiswa; (b) pengembangan akademik mahasiswa; (c) pengembangan karier mahasiswa; (d) pengembangan personal mahasiswa; (e) kepuasan karyawan administrasi fakultas; (f) kualitas dan pengembangan profesional fakultas, (g) keterbukaan sistem dan interaksi komunitas; (h) kemampuan untuk memperoleh sumber daya dan (i) kesehatan organisasi. Implementasi dari dimensi tersebut sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik penelitian (2014: 115). Pada dimensi kepuasan pendidikan mahasiswa memiliki indikator antara lain a) Mahasiswa menikmati kehidupan di kampus, b) Mahasiswa memelihara hubungan baik dengan fakultas, c) Mahasiswa memiliki kepuasan yang tinggi dengan program studi, dan d) Rata-rata mahasiswa drop out.

c. Efisiensi Pengelolaan Perguruan Tinggi

1) Konsep Umum Efisiensi Pendidikan

Membicarakan persoalan efisiensi pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) akan dimulai dengan membicarakan konsep efisien, efisiensi dalam pendidikan sampai ukuran efisien tidaknya pengelolaan PT. Efisiensi menurut Windham, dalam (Suryadi, 2008) adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi masukan yang minimal atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah. Sedangkan menurut Nanang Fattah menyatakan efisiensi adalah menggambarkan hubungan antara input dan output (Fattah, 2005). Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan. Efisiensi juga dapat diberi makna sebagai proses kegiatan yang mampu melahirkan suasana : kondusif, menyenangkan, merangsang kreativitas, mendorong prestasi dan iklim yang sehat.

Kemampuan subyek atau kelompok subyek untuk menciptakan kondisi seperti mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, prosedur, kriteria hasil. Efisiensi umumnya merujuk pada pertanyaan

bagaimana sumber-sumber yang ada harus dialokasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berbeda bentuk dan nilainya. Untuk mengubah satu atau beberapa jenis barang menjadi bentuk lain diperlukan energi, waktu, upah, tenaga manusia, peralatan dan lain-lain.

Konsep efisiensi sangat relevan bagi ilmu ekonomi pendidikan. Sejak munculnya pengakuan ini, sebagian besar penelitian dalam bidang ekonomi pendidikan banyak berfokus pada pertanyaan bagaimana sumber-sumber masyarakat harus dialokasikan pada investasi pendidikan dan bentuk-bentuk lain investasi. Efisiensi usaha ekonomi pun relatif, misalnya sangat mungkin masih bisa menabung jika anak-anaknya disekolahkan di dalam negeri. Sebaliknya hanya sampai pada titik impas atau mungkin defisit, ketika anak-anaknya disekolahkan diluar negeri. Keputusan masyarakat atau keluarga untuk melakukan investasi dalam bentuk dan jenis apa sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dikandung keluarga atau masyarakat. Disamping stimulan yang didapat dari lingkungan. Masih menurut Nanang Fattah efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

Untuk mengukur efisiensi pengelolaan program sebuah PT ternyata tidak mudah karena sulit didefinisikan dan diukur luarannya. Disamping analisis terhadap nilai yang didapat dari hasil transformasi atas masukan pendidikan tidaklah mudah karena sifatnya terlalu lunak, berbeda dengan tranformasi bahan mentah menjadi barang jadi pada sebuah proses produksi. Suatu program pendidikan (sarjana) yang efisien ialah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber yang di butuhkan dan yang ada atau tersedia guna mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sumber termasuk di sini adalah biaya kuliah, waktu kuliah, pikiran dan tenaga, maupun sarana pendidikan). Semakin disebut efisien program penyelenggaraan pendidikan tinggi jika antara sumber -sumber yang dibutuhkan (: b biaya kuliah, waktu kuliah, pikiran dan tenaga, sarana prasarana pendidikan) seimbang/sesuai kebutuhan, dan semakin sedikit pengorbanan yang diperlukan tersebut maka derjat efisiensi pendidikan akan semakin tinggi.

d. Efisiensi Internal dan Eksternal

Dalam sistem pendidikan ada istilah efisiensi internal dan efisiensi eksternal. PT akan disebut memiliki efisiensi internal jika dalam menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum atau dengan input tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan efisiensi internal pendidikan adalah banyak sedikitnya input atau pengorbanan yang dikeluarkan/diperlukan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Semakin tinggi atau banyak input yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan maka akan semakin tidak efisien proses pendidikan yang dijalankan. Demikian sebaliknya, jika input yang dikeluarkan untuk menghasilkan lulusan sedikit maka akan semakin efisien proses pendidikan yang dijalankan.

Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pendidikan yang sudah dijalankan PT/program memiliki efisiensi internal yang tinggi atau tidak, maka terdapat banyak pilihan cara menghitungnya. Beberapa cara yang dimaksud diantaranya adalah :

- a) Menghitung rata-rata lama belajar. Dalam menghitung rata-rata lama belajar seorang lulusan bisa menggunakan metode mencari statistik kohort (kelompok belajar). Hal tersebut dapat dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut.
- b) Input-Output Ratio. Yang dimaksud dengan input-output ratio adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus, artinya dibandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran.

Disamping menghitung efisiensi internal, ada cara penghitungan efisiensi pendidikan yang lain yaitu efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan, Karena efisiensi eksternal secara konseptual berkaitan dengan analisis keuntungan atas

investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. Dalam memephitungkan investasi tersebut ada dua hal yang penting, yaitu menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna dari kemampuan.

Dengan melihat pola pengukuran efisiensi pendidikan tersebut, hal yang kemudian harus diupayakan demi terbentuknya efisiensi pendidikan adalah hal-hal yang perlu diarahkan kepada: a) pemerataan kesempatan memasuki sekolah/PT (*equallity of acces*), b) Pemerataan untuk bertahan di sekolah/PT (*equallity of survival*), c) Pemerataan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equallity of output*), dan d) Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan (*equallity of outcomes*).

e. Kinerja Perguruan Tinggi

1. Konsep Kinerja

Mengukur kinerja perguruan tinggi tidaklah mudah tetapi juga tidak sulit, bergantung kepada perspektif yang digunakan. Hal ini terjadi Karena konsep kinerja juga beragam. Secara etimologi kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja, yang merupakan padanan dari kata *performance* (bahasa Inggris) dan sering diindonesiakan menjadi performa (Wirawan, 2009: 5). Sedangkan menurut Mangkunegara (2009: 9) kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Berdasarkan pendapat ini maka istilah kinerja bisa dipadankan dengan performa atau prestasi kerja. Artinya istilah ini bisa digunakan secara *interchangeable* (bisa saling menggantikan).

Jika dilihat dalam batasan terminologi, konsep kinerja antara lain bisa dirujuk dari beberapa sumber berikut:

- a) Kinerja adalah *keluaran* yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 2009: 5)
- b) Kinerja adalah *hasil kerja* secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2008: 67).

- c) Kinerja adalah ungkapan seperti *out put*, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas (Gomes, 1995: 195)
- d) Kinerja merupakan *derajat pemenuhan tugas kerja* individu (Byars and Rue, 1991: 248)
- e) Kinerja merupakan *perilaku nyata* yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai dan Sagala, 2009: 548-549)
- f) Kinerja adalah sifat, perilaku dan hasil kerja seseorang sebagai bentuk real dari kompetensi seseorang untuk menyelesaikan tugas sebagaimana yang menjadi tuntutan pekerjaannya (Zulfa, 2013:130)

2. **Kinerja Prodi/Fakultas**

Hal mendasar yang menjadi inti pembicaraan mengenai strategi percepatan penyelesaian masa studi mahasiswa, sebenarnya adalah persoalan kinerja Prodi/Fakultas. Oleh karena itu wajib dipahami apa yang dimaksud dengan kinerja Prodi/Fakultas. Adapun pengertian kinerja bisa dilihat dalam perspektif individu SDM dan organisasi. Dalam konteks ini tentu saja adalah kinerja organisasi. Adapun untuk mengetahui posisi kinerja, maka individu manusia maupun organisasi bisa mengetahuinya lewat *performance appraisal* (pengukuran dan penilaian kinerja) perspektif kinerja organisasi.

Menurut Siegel dan Marconi dalam Putri (2008), penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasar sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Lewat penilaian kinerja diperoleh informasi kinerja organisasi ternilai, yang dalam hal ini adalah kinerja Prodi/Fakultas. Sedangkan kinerja Prodi/Fakultas dalam hal ini jika merujuk pada pendapat Gaffar (Alma dan Hurriyati, 2008: 100) menjelaskan bahwa Prodi/Fakultas/PT mengemban misi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan fungsi dan misi Prodi/Fakultas, maka indikator kinerja Prodi menurut Brodjonegoro ([http:// eng.unri.ac.id](http://eng.unri.ac.id)) adalah 1) kuantitas dan kualitas serta relevansi lulusan, 2) kuantitas dan kualitas serta relevansi hasil

penelitian dan pengembangan, dan 3) kuantitas dan kualitas dan relevansi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Melalui peningkatan kinerja Prodi/Fakultas yang baik, maka Prodi/Fakultas akan memiliki daya saing dengan Prodi/Fakultas yang lain (Sumihardjo dalam <http://repository.usu.ac.id>).

Lebih spesifik lagi dalam konteks indikator kinerja pertama, yaitu kuantitas dan kualitas lulusan bisa dilihat dari seberapa banyak dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh lulusan dalam menyelesaikan studinya. Sehingga efektivitas strategi percepatan penyelesaian studi S1 bisa dilihat berdasarkan aspek efektivitas suatu program/kebijakan yang bisa dilihat dari 1) aspek ketentuan dan peraturan dan 2) aspek tujuan atau kondisi ideal (Muasaroh dalam Angraini, 2015).

a) Strategi Percepatan Penyelesaian Studi S1

Menurut Mintzberg (Winardi, 2008: 114-116) ada lima macam definisi formal tentang strategi, yakni strategi sebagai rencana, sebuah “Ploy”, sebuah pola, sebuah posisi dan sebagai sebuah perspektif. *Pertama*. Strategi sebagai Rencana. Dalam bidang manajemen, Glueck (Winardi: 115), menyatakan, strategi merupakan sebuah rencana terpadu, komprehensif, serta terintegrasi, yang didesain untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran dasar perusahaan yang bersangkutan dicapai. Sebagai sebuah rencana, maka strategi merupakan “Ploy” yaitu sebuah “manuver” khusus untuk mengalahkan seorang pesaingnya. Artinya sebuah organisasi bisa mengumumkan rencananya untuk mencegah pesaingnya membangun rencana yang sama. *Kedua*. Strategi sebagai Sebuah Pola. Strategi sebagai sebuah pola, khususnya sebuah pola dalam suatu arus tindakan-tindakan (*a stream of action*) (Winardi: 116). *Ketiga*. Strategi sebagai sebuah Posisi. Strategi sebagai sebuah posisi, merupakan sebuah alat secara spesifik untuk mengidentifikasi di mana suatu organisasi, melokasi dirinya sendiri pada lingkungannya. *Keempat*. Strategi sebagai Sebuah Perspektif. Strategi dalam konteks ini, isinya bukan hanya berupa sebuah posisi yang dipilih tetapi ia merupakan sebuah cara mendalam untuk mempersepsi dunia.

Dalam konteks Fakultas/Prodi menyusun strategi percepatan penyelesaian studi mahasiswa program S1, maka strategi merupakan sebuah rencana terpadu, komprehensif, serta terintegrasi, yang didesain untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran dasar Fakultas/Prodi yang bersangkutan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan relevansi lulusan program S1 yang harus lulus tepat waktu.

S1 sebagai program pendidikan akademik memiliki ketentuan beban kurikulumnya berada dalam rentang 144-160 sks sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, di mana salah satu syarat untuk bisa menyelesaikan studi S1 adalah penyusunan tugas akhir yang bisa berbentuk skripsi ataupun yang lainnya..

b) Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Penyelesaian Studi Mahasiswa

Secara umum konsep kecepatan penyelesaian studi berkaitan dengan masalah keberhasilan belajar. Sedangkan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh fakto internal peserta didik dan eksternal peserta didik. Factor internal berkaitan dengan factor yang muncul dari diri peserta didik (Zulfa, 2010). Factor internal berkaitan factor yang muncul dari diri individu mahasiswa, baik yang bersifat fisik, psikis maupun kelelahan. Demikian juga factor eksternal sebagai factor yang muncul dan berasal dari luar diri mahasiswa bisa dikategorikan dalam tiga kateori besar yaitu factor keluarga, sekolah/perguruan tinggi dan masyarakat/community termasuk di dalamnya Negara.

Dalam konteks Negara Indonesia, ketetapan lulus studi bagi mahasiswa S1 program akademik dipengaruhi oleh factor kebijakan pendidikan, seperti munculnya permendikbud nomor 49 tahun 2014 yang kemudian direvisi dalam Permenristekdikti onor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam SN Dikti ini khususnya pada elemen stadar nasional pendidikan diatur hal-hal yang berkaitan dengan masa studi yang dibatasi dalam interval 144 sampai dengan 160 sks sebagai beban studi mahasiswa S1. Di mana idealnya beban masksimal

mahasiswa per semester adalah 18 sks, sehingga praktis masa studi tercepat adalah 8 semester.

c) Kajian Hasil Penelitian Relevan.

Strategi yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi bisa berbeda tetapi sangat mungkin sama. Seperti yang dikemukakan Choliq dkk, strategi yang dilakukan UNPAD adalah 1) penetapan pembimbing utama sedini mungkin (setelah KKN dan setelah lulus mata kuliah prasyarat), 2) pelaksanaan riset sedini mungkin, 3) penyediaan fasilitas pendukung riset di kampus, 4) penyelenggaraan semester pendek, dan 4) optimalisasi kelembagaan dan penyempurnaan tertib administrasi.

Senada dengan temuan penelitian di atas adalah temuan yang dilakukan oleh Ibnu Siswanto mengenai Program Percepatan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Jurusan PT. Otomotif FT UNY menyatakan bahwa dalam rangka menurunkan lamanya masa studi adalah dengan Menggunakan strategi percepatan penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS), melalui program: 1) mensinergiskan antara mata kuliah MPP, KKN/PPL, dan TAS, 2) mengembangkan tema penelitian bagi mahasiswa untuk setiap angkatan, 3) workshop penulisan TAS, dan 4) monitoring penulisan TAS. Program dilaksanakan terhadap mahasiswa yang berada di semester 6, menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan (MPP), mendaftar program KKN/PPL, dan memenuhi persyaratan menulis TAS (Siswanto, 2015).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kebijakan (*post policy analysis*) (McMillan dan Schumacher, 2001: 526-581), dengan pendekatan kualitatif. Peneliti sebagai instrument utamanya. Lokasi penelitian ini adalah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap, dengan mengambil waktu penelitian antara bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2016, dengan rentang waktu pelaksanaan dan hasil strategi fakultas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 (Oktober 2016).

4. Hasil Penelitian

a. Kebijakan Percepatan Studi S1 di Lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap sebagai fakultas yang sejak awal pendirian IAIIG ada, secara perlahan berbenah untuk memperbaiki diri di tengah segala keterbatasan. Beberapa kebijakan tingkat operasional ditempuh walaupun kebijakan umum di tingkat institusi belum ditentukan sebelum 2014. Salah satunya adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya memfasilitasi mahasiswa program S1 agar bisa lulus tepat waktu, yang membutuhkan kebijakan operasional berupa percepatan penyelesaian studi.

Kebijakan yang diambil oleh Fakultas Tarbiyah terkait dengan upaya percepatan penyelesaian studi mahasiswa program S1 secara massif mulai muncul berkaitan dengan tuntutan pemerolehan skor yang tinggi dalam penilaian kinerja Program Studi yang tertuang dalam instrument Akreditasi BAN PT khususnya pada Borang 3 A Akreditasi Program Studi Sarjana, pada butir 3.1.4.a. tentang persentase kelulusan tepat waktu yang memiliki bobot skor 1.3 (Diknas, 2008). Artinya kebijakan ini muncul akibat faktor eksternal yaitu adanya tuntutan penilaian oleh BAN PT sebagai lembaga penjamin mutu eksternal di IAIIG Cilacap.

Berangkat dari tuntutan itulah maka fakultas Tarbiyah mengambil inisiatif kebijakan sebagai berikut:

Pertama. Melakukan Pengembangan Kurikulum. Fakultas Tarbiyah sejak berdiri hingga tahun 2010 sudah melaksanakan pengembangan kurikulum 4 kali yaitu kurikulum 1994, 2004, 2006 dan 2010 (Dokumen Rapat Prodi PAI, Juni 2013) dan pada tahun 2014 melakukan pengembangan kurikulum yang Berorientasi KKN Berbasis Keghozalian yang kemudian diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016. Sesuai kurikulum yang berlaku sejak awal, maka skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa program S1 di fakultas Tarbiyah. Demikian juga sesuai dengan kurikulum (Dokumen Kurikulum Tarbiyah, 2010, pp. 5-6) yang digunakan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap maka tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa adalah skripsi, baik untuk program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan beban sks sebanyak 6 (enam).

Selain penetapan jumlah sks sebagai hasil pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh fakultas Tarbiyah, produk dari pengembangan kurikulum juga memandatkan sebaran mata kuliah tertentu yang mendukung terwujudnya proses percepatan penyelesaian studi. Sebaran mata kuliah yang secara langsung berimplikasi bagi percepatan penyelesaian studi yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial/MPS (semester 4), Metode Penelitian Pendidikan/MPP (semester 5/PAI), Statistik Pendidikan (semester 5), Penelitian Tindakan Kelas (semester 7/PGMI), Praktek Pengalaman Lapangan/PPL (semester 7), Kuliah Kerja Nyata/KKN (semester 8) dan skripsi (semester 8).

Sesuai dengan Kalender Akademik, maka sejak tahun akademik 2014-2015, KKN yang didesain masuk dalam semester 8, dalam pelaksanaannya di liburan semester genap (semester 6) dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian juga untuk skripsi di sebaran ada di semester 8 tapi pelaksanaannya bisa di liburan semester 6 karena syarat dan ketentuannya sudah memungkinkan untuk melakukan itu (75% sks sudah ditempuh mahasiswa).

Berdasarkan perolehan data tersebut, maka pengembangan kurikulum yang sudah dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Sedangkan kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2014 selain konsepnya KBK sekaligus juga Berorientasi KKNI dan berbasis Keghozalian sebagai *distinction*-nya. Pengembangan kurikulum di tahun 2014 ini produk kurikulumnya disebut sebagai Kurikulum Berorientasi KKNI Berbasis Keghozalian, yang kemudian diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016.

Sejak kurikulum 2004 sampai dengan 2014, masing-masing meniscayakan adanya skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian program sarjana sebanyak 6 sks yang disebar pada semester 8 tetapi pengerjaannya sudah bisa dimulai sejak semester 6 berakhir (75% beban sks sudah ditempuh mahasiswa).

Dalam konteks ini fakultas Tarbiyah mengeluarkan kebijakan pengembangan kurikulum karena tuntutan eksternal dan internal. Tetapi faktor pendorong utama adalah faktor eksternal. Yaitu kebijakan pendidikan yang terkait dengan kurikulum, seperti:

- 1) UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
- 2) UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2013
- 3) PP. N0.17 th 2010 ttg Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- 4) PP 66 th 2010 ttg Perubahan atas PP N0.17 th 2010 ttg Pengelaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5) PP. N0 4 /2014 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai revisi dari PP Nomor 17 tahun 2010
- 6) Kepmendiknas N0.232/U/2000 ttg “Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa”
- 7) Kepmendiknas n0. 045/U/2000 ttg Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi”
- 8) Perpres. N0.08/2013 ttg KKNi
- 9) Permendikbud n0.13/2013/ ttg penerapam KKNi
- 10) Permendikbud N0.73/2013 ttg Penerpaan KKNi bidang Pendidikan Tinggi.
- 11) Permendikbud N0 49/2014 ttg SN-Dikti
- 12) Permenristekdikti NO 44/2015 ttg SN-Dikti
- 13) Tuntutan dari masyarakat khususnya pengguna lulusan sebagaimana hasil tracer study.

Berdasarkan faktor eksternal tersebut menunjukkan bahwa Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap sangat responsif terhadap tuntutan dan tantangan yang berasal dari luar. Dunn dalam hal ini menyampaikan bahwa kebijakan publik akan muncul karena dipengaruhi oleh faktor kondisi yang mendahului sebuah permasalahan ataupun nilai yang pencapaiannya mendorong pada penyelesaian masalah (Dunn, 2000). Demikian halnya dengan pengembangan kurikulum yang dikeluarkan sebagai produk kebijakan fakultas Tarbiyah muncul sebagai reaksi atas tuntutan regulasi pemerintah, yang sesungguhnya regulasi tersebut juga muncul akibat menampung dan mengantisipasi tuntutan masyarakat global. Dengan kata lain pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan.

Adapun nilai (Dunn, 2000) yang akan dicapai oleh fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap adalah nilai atau kemanfaatan atas lulusannya yang kemudian akan berubah menjadi outcomes yang bermutu tinggi di masyarakat,

maupun kemanfaatan secara terintegrasi dengan tuntutan yang ada dalam instrumen penjaminan mutu eksternal dari BAN PT.

Apa yang sudah dilakukan Fakultas Tarbiyah pada utamanya tahun 2014 konsisten dengan Renstra IAIIG 2014-2018 melalui strategi penguatan kelembagaan yang diwujudkan dalam program pengembangan kurikulum berorientasi KKNi berbasis Keghozalian (Rencana Strategis IAIIG Cilacap Tahun 2014-2018, 2014)

Kedua. Penetapan Pembimbing Skripsi dan Reviewer. Sesuai dokumen rapat senat fakultas Tarbiyah ((Rapat Senat Fakultas Tarbiyah, 4 Maret 2012) yang dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kopertis Wilayah X Jawa Tengah tentang syarat minimal pembimbing skripsi yang harus lektor, maka fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap melalui mekanisme rapat senat fakultas memutuskan dan memberlakukan:

- a) Pembimbing skripsi ada 2: Pembimbing 1 dan 2,
- b) Pembimbing 1 menangani content, sedangkan pembimbing 2 menangani teknis penulisan, tetapi pembimbing 2 bisa membantu membimbing content jika diminta oleh Pembimbing 1 atau mengkomunikasikan content ke Pembimbing 1.

Pada kurun waktu penetapan pembimbing skripsi tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 2013, di mana dalam rangka melakukan pemberdayaan bagi calon pembimbing 2 yang notabene-nya belum memenuhi jabatan lektor sebagai syarat mengemban tugas sebagai pembimbing skripsi, maka fakultas Tarbiyah menetapkan Reviewer sebagai pengganti Pembimbing 2 dengan tugas dan kewenangan persis sebagaimana Pembimbing 2 (Dokumen Fakultas, 2013). Dalam rapat koordinasi Reviewer Fakultas Tarbiyah tersebut diputuskan tentang tugas dan wewenang reviewer serta prosedur kerja yang harus dijalankan reviewer. Tugas dan fungsi reviewer sebagaimana yang dimaksud pada hasil rapat koordinasi tersebut adalah:

- 1) Reviewer berfungsi sebagai pembimbing teknis penulisan skripsi
- 2) Reviewer melakukan proses review naskah skripsi yang akan dimunaqosyahkan sesuai tugas yang diberikan koordinator reviewer
- 3) Memberikan bimbingan teknis penulisan skripsi, maksimal 15 hari sejak mahasiswa mengajukan naskah.

- 4) Memberikan persetujuan bahwa naskah skripsi sudah bisa diajukan dalam sidang munaqosyah dengan membubuhkan tandatangan persetujuan.

Sedangkan prosedur kerja reviewer sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengajukan skripsi yang sudah direkomendasikan oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan kepada tim reviewer skripsi fakultas tarbiyah.
- 2) Koordinator reviewer menunjuk satu anggota tim untuk melakukan review kesesuaian format penulisan dengan panduan serta tingkat originalitas skripsi. Jika dipandang perlu reviewer menyarankan untuk melakukan revisi tanpa merubah esensi skripsi dan wajib melaporkan indikasi plagiasi kepada fakultas melalui Pembantu Dekan I jika hasil review mengindikasikan adanya plagiasi dengan didukung data yang ada.
- 3) Mahasiswa melakukan revisi format penulisan sesuai saran reviewer.
- 4) Mahasiswa mendaftar munaqosah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menunjukkan surat rekomendasi munaqosah dan surat keterangan review skripsi.

Berdasarkan perolehan data tersebut, maka bisa diketahui bahwa penetapan pembimbing dan reviewer yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap sebagai produk kebijakan, dilakukan untuk menyiapkan dosen muda menjadi dosen pembimbing dengan fungsi reviewer juga sama dengan pembimbing 2/asisten. Artinya Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap telah mengantisipasi sedemikian rupa SDM khususnya dosen tetap yang salah satu tugasnya adalah sebagai pembimbing skripsi. Mengantisipasi dosen muda dengan dilatih menjadi pembimbing 2, sesuai dengan butir asessment Malcom Baldrig “ staff training throughout the institution reflects the institutions’ strategic goals and objectives”(Fisher, tt; 98).

Ketiga. Periodeasasi Wisuda. Sebenarnya secara umum peluang mahasiswa IAIIG Cilacap untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu (8 semester ke bawah) sudah difasilitasi sesuai sebaran mata kuliah yang ada di semester 8 namun bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi bisa melaksanakan lebih cepat. Tetapi pada kenyataanya hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kemudian mulai menunjukkan hasil yang relative

signifikan adalah sejak diberlakukan kebijakan secara formal dari Institute. Mulai tahun akademik 2014-2015, secara resmi diberlakukan dalam Kalender Akademik IAIIG Cilacap Tahun 2014-2015 periode wisuda sarjana dilaksanakan dalam dua periode, yaitu periode Oktober dan Maret ((Kaldik IAIIG 2014), kemudian pada tahun berikutnya dijadwal Oktober dan April. Hal ini dilakukan berdasarkan analisis pihak institute akan “kecenderungan budaya” mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi jika sudah memperoleh informasi atau pengumuman tentang pelaksanaan wisuda (Purek1, 2016). Kondisi ini tentu tidak menguntungkan dan tidak mendukung upaya Fakultas dan Prodi untuk meningkatkan prosentasi mahasiswa lulus tepat waktu sesuai standar minimal tuntutan penilaian dari BAN PT maupun Permenristekdikti Nomor 49 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh IAIIG dan dijalankan oleh Fakultas Tarbiyah yang mendukung percepatan masa studi mahasiswa S1 adalah kebijakan periode wisuda dari 1 kali dalam 1 tahun akademik, menjadi 2 kali dalam 1 tahun akademik. Masing-masing dilaksanakan pada semester gasal dan genap. Kinerja dari kebijakan ini adalah makin bertambahnya jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun akademiknya dan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sebagaimana table 4.1, 4.2 dan 4.3. hal ini berarti kebijakan perodesasi wisuda yang dua kali dilaksanakan dalam satu tahun akademik mampu mempertinggi pencapaian nilai yang diharapkan institute/fakultas (Dunn, 2000), berupa jumlah lulusan secara umum maupun jumlah lulusan yang lulus tepat waktu, dan sedikitnya mahasiswa yang selesai mendekati masa droup out (DO).

Keempat. Semester Pendek/Padat. Fakultas Tarbiyah sudah menjalankan program semester pendek dalam rangka membantu mahasiswa secara formal pada tahun 2013 ((Dokumen Program Kerja Fakultas Tarbiyah, 2013). Namun secara formal di tingkatan institute berlaku pada tahun akademik 2014-2015 sebagaimana tertuang dalam Kalender Akademik yang terjadwal dari bulan Juni untuk pendaftaran sampai dengan awal September 2015 ((Institut, 1 Juni 2015). Sedangkan aturan Semester Padat ditetapkan melalui Keputusan Rektor No. Ybk.1271.07/064/823/IAIIG/X.19/IV/2015.

Berdasarkan data tersebut, maka kebijakan tentang semester pendek/padat yang tadinya menjadi kebijakan fakultas Tarbiyah dan kemudian menjadi kebijakan umum di tingkat Institut, menunjukkan bahwa tidak hanya fakultas tetapi institute sudah sedemikian rupa memfasilitasi mahasiswa untuk lulus relative tepat waktu bahkan bisa kurang dari empat tahun. Kebijakan ini dikeluarkan bersandar kepada kebijakan umum di kementerian ristekdikti melalui Dirjen Dikti-nya yang mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1666/D/1988, tentang Semester Pendek (Dikti, 1988). Di mana dalam ketentuannya disebutkan tujuannya adalah untuk akselerasi kelulusan.

Kelima. Masa Studi. Secara umum fakultas Tarbiyah dalam menentukan lama masa studi bagi mahasiswa program S1 yang masuk kategori tepat waktu adalah 8 semester sesuai Buku Panduan Akademik IAIIG Cilacap tahun 2014-2015 dengan beban studi minimal 144 sks sampai maksimal 160 sks (IAIIG, 2014, p. 18). Kebijakan ini dibatasi usia maksimal studi S1 adalah 10 semester. Namun pada tahun 2015 sesuai revisi permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, masa studi mahasiswa S1 paling lama berubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Di IAIIG secara otomatis mengikuti perubahan tersebut, sehingga masa studi mahasiswa S1 paling lama 7 tahun (14 semester). Kebijakan umum masa studi terlalu lama untuk program S1 yang kembali menjadi 7 tahun tidak merubah lama studi untuk mahasiswa yang masuk kategori lulus tepat waktu yaitu maksimal 8 semester.

Hal ini berarti bahwa masa studi mahasiswa secara ideal sudah termaktub dalam kurikulum Fakultas Tarbiyah di semua Prodi yaitu selesai 8 semester, sudah sesuai dengan SN-Dikti baik tahun 2014 maupun revisi tahun 2015.

b) Strategi percepatan Penyelesaian Studi studi S1 yang telah dijalankan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

Beberapa strategi yang dijalankan fakultas Tarbiyah untuk mempertinggi jumlah lulusannya yang tepat waktu, diantaranya:

- a) mensinergikan mata kuliah MPP, PPL dan Skripsi
- b) mendesain sebaran mata kuliah yang mendukung penyelesaian

pengerjaan tugas akhir sedemikian rupa dilakukan lebih awal, seperti mata kuliah MPS, MPP, PTK, statistic dan KKN

- c) workshop penelitian
- d) “menabung” judul penelitian ((Tarbiyah, wawancara mantan Pudek 1, 2016).

Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa *strategi pertama* dilakukan dengan “*mensinergikan mata kuliah MPP, PPL dan skripsi*” adalah strategi yang dilakukan fakultas untuk menyiapkan mahasiswa bisa melaksanakan tiga agenda sekaligus secara berurutan tetapi satu tujuan. Mahasiswa pada semester 5 pada saat mengambil mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan (MPP) diorientasikan untuk menyusun proposal skripsi, sehingga pada semester ini mahasiswa sudah “menabung judul” untuk bisa mengikuti mata kuliah MPP sekaligus menyusun “calon proposal skripsi”. Disebut “menabung judul” yang sesungguhnya masuk ke strategi ke empat, karena pada semester ini sesungguhnya mahasiswa secara formal-peraturan akademik belum memenuhi syarat untuk bisa mengajukan judul skripsi karena belum memenuhi syarat minimal yaitu sudah menempuh 75% sks, tetapi sebagai bagian dari memotivasi mahasiswa agar menyusun proposal skripsi sejak awal, maka mahasiswa dikondisikan untuk menabung judul penelitian untuk skripsi melalui mata kuliah MPP. demikian penjelasan selanjutnya dari mantan Ketua Program Studi PAI (wawancara Mantan Ka Prodi PAI, 2016). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dengan mahasiswa sudah memiliki judul penelitian, maka pada saat melaksanakan PPL Keguruan, mahasiswa sekaligus melakukan penelitian untuk bahan skripsi. Hal ini baru mulai berlaku dengan adanya perubahan kebijakan PPL Keguruan di lingkungan fakultas Tarbiyah yaitu sejak PPL Keguruan tahun 2013 sebagaimana yang disampaikan Ketua Panitia PPL Keguruan tahun 2013 dan dokumen rapat Panitia PPL Keguruan ((dokumen Rapat PPL Keguruan 2013, 2013), diperkuat dengan dokumen buku panduan PPL Keguruan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap tahun 2013 ((Panduan PPL Fakultas Tarbiyah, 2013). Dalam ketiga sumber tersebut diketahui bahwa perubahan mendasar dalam PPL Keguruan Tahun 2013 adalah berkaitan dengan tujuan dan content PPL Keguruan serta strateginya, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan tujuan PPL Keguruan adalah a) praktik kompetensi inti Prodi dan pendukung, yaitu praktik mengajar, konselor, studi

manajemen sekolah dan penelitian dan tujuan ke b) sosialisasi: perluasan sosialisasi IAIIG dan rekrutmen calon mahasiswa (cama) baru.

- 2) Conten PPL Keguruan yaitu : (a) Pra PPL 2 terdiri dari matrikulasi, micro teaching, **observasi dan presentasi**, dan (b) PPL Keguruan (praktik mengajar, praktik konselor siswa, studi manajemen sekolah dan **praktik penelitian (1 MS & PTK)**)
- 3) Strategi yang digunakan: a) Intensivitas Pengawalan Peserta PPL Keguruan, b) perubahan “sebagian” lokasi PPL Keguruan, c) Perubahan “model DPL” serta d) Perubahan Pertanggungjawaban peserta PPL.

Penelitian menjadi aspek baru dalam PPL Keguruan dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa agar pada saat PPL mereka sekaligus melakukan penelitian sehingga setelah PPL selesai, maka penelitian juga selesai yang artinya siap menempuh proses pembimbingan selanjutnya dan atau ujian skripsi (munaqosyah). Demikian juga dengan perluasan wilayah PPL Keguruan, yang tadinya hanya sekolah-sekolah dibawah naungan yang sama dengan IAIIG (: Yayasan BAKII) dan hanya di kabupaten Cilacap, maka wilayah PPL Keguruan tahun 2013 diperluas tidak hanya sekolah di bawah yayasan BAKII tetapi merambah ke sekolah-sekolah negeri ternama baik di tingkat SMP maupun SMA, baik di Cilacap maupun Banyumas ((wawancara Mantan Ka Prodi PAI, 2016).

Pada *strategi kedua: mendesaian sebaran mata kuliah yang mendukung penyelesaian pengerjaan tugas akhir* sedemikian rupa dilakukan lebih awal, seperti mata kuliah MPS, MPP, PTK, statistic dan KKN. Kurikulum Fakultas Tarbiyah khususnya Prodi PAI dan PGMI melakukan re-desain sebaran mata kuliah yang mendukung penyelesaian studi mahasiswa program sarjana. Dalam hal ini mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial (MPS) ditawarkan pada semester 4, statistic Pendidikan (smt 5), Metode Penelitian Pendidikan (MPP/smt 5/khusus PAI), PTK (smt 7/khusus PGMI) dan skripsi (smt 8). (Dokumen Kurikulum Tarbiyah, 2010).

Strategi ketiga: workshop penelitian. Workshop penelitian dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang mengalami kesulitan terkait dengan penelitian yang akan digunakan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir. Strategi workshop penelitian nantinya akan melahirkan program workshop

penelitian yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Fakultas Tarbiyah dengan berbagai macam paket workshop seperti a) Paket 1.A. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Pendekatan Kuantitatif, (b) Paket 1.B. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Pendekatan Kualitatif, (c) Paket 1.C. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi PTK dan (d) Paket 1.D. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Literatur (Studi Pustaka) (Dokumen Program Kerja Fakultas Tarbiyah, 2013) dan dokumen tahun 2013 ((Dokumen Program Pendampingan Fakultas Tarbiyah, 5 Mei 2013).

Strategi keempat: “menabung” judul penelitian. Kebijakan ini muncul awalnya hanya ada di Prodi PAI. Kemunculannya melihat masih sangat kurangnya jumlah mahasiswa yang berupaya untuk lulus studi tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Kemudian muncul ide untuk melakukan gerakan antisipasi tertolaknya judul penelitian yang diajukan mahasiswa pada semester 7 yang akan berimbas semakin lamanya mahasiswa untuk menyelesaikan studi, maka muncullah strategi “menabung judul” penelitian. Strategi ini dalam pelaksanaannya dibebankan kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan (Prodi PAI) agar dalam membekali mahasiswa akan kemampuan teknis menyusun proposal skripsi adalah benar-benar dari judul skripsi yang akan digarap. Karena idenya muncul dari Ka Prodi PAI waktu itu, maka ide ini dikonsultasikan kepada Dekan, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan maka strategi “menabung judul” dilaksanakan hingga saat ini ((wawancara Mantan Ka Prodi PAI, 2016). Sehingga mahasiswa yang menempuh matakuliah MPP pada semester 5 yang secara legal-formal sebenarnya belum berhak memulai pekerjaan penggarapan skripsi (Karena belum memenuhi ketentuan minimal 75% sks yang sudah ditempuh / setelah selesai menempuh sks di semester 6), maka disebutlah “menabung”. Selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan judul tadi dibawa oleh Ka Prodi dalam forum Sidang judul Penelitian, yang akan menentukan judul penelitian mana yang diterima fakultas sekaligus penentuan sebaran pembimbing skripsi ((wawancara staf Tarbiyah tentang sidang judul, 2016).

Dari keempat strategi yang telah dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap, menunjukkan bahwa fakultas Tarbiyah IAIIG telah menjadikan strategi percepatan penyelesaian masa studi S1 sebagai sebuah

rencana terpadu, komprehensif, serta terintegrasi, yang didesain untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran dasar Fakultas/Prodi yang bersangkutan dicapai (Winardi, 2008). Sasaran-sasaran tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan relevansi lulusan program S1 yang harus lulus tepat waktu.

c) Program Percepatan Studi S1 Di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

Sesuai dengan strategi yang sudah dilaporkan pada sub sebelumnya, maka teknis pelaksanaannya dibuatlah program kerja yang mendukung percepatan Studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap, yaitu: pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), workshop penelitian, semester padat/pendek, maupun pendampingan penyelesaian tugas akhir.

1. Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun akademik 2012-2013 (Dokumen Fakultas, Program Kerja Akademik Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap Tahun Akademik 2012-2013, 30 Juli 2013), fakultas Tarbiyah membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Calon Guru/Guru. Program ini disamping untuk memberi pelayanan kepada mahasiswa calon guru juga untuk melayani permintaan pelatihan dari guru di daerah Cilacap maupun bagi kepentingan internal mahasiswa Tarbiyah. Pusdiklat ini dalam menjalankan fungsinya khususnya untuk mahasiswa yang akan maupun sedang dalam proses pengerjaan tugas akhir dalam bentuk tawaran program workshop/pelatihan Paket 1 sebagaimana terjelaskan dalam laporan program workshop berikut.

2. Program Workshop Penelitian

Pada tahun akademik 2013-2014 fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap mengeluarkan Program Pendampingan Akselerasi Studi Mahasiswa Tarbiyah yang berbentuk pelatihan atau Workshop (Dokumen Program Pendampingan Fakultas Tarbiyah, 5 Mei 2013). Program ini dikeluarkan sebagai bentuk layanan yang sifatnya himbauan. Pada program ini dilaksanakan oleh Pusdiklat fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap. Program pendampingan ini terdiri dari 3 Paket besar, yaitu : 1) Paket 1, 2) Paket 2 dan 3) Paket 3. Paket 1 adalah Paket Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi, dengan tujuan utamanya adalah untuk

membekali mahasiswa agar memiliki ketrampilan menyusun rencana penelitian. Berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa PGMI dan PAI maka paket 1 dibagi lagi menjadi 4 paket turunan, yaitu: (a) Paket 1.A. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Pendekatan Kuantitatif, (b) Paket 1.B. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Pendekatan Kualitatif, (c) Paket 1.C. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi PTK dan (d) Paket 1.D. Pelatihan Penyusunan Proposal Skripsi Literatur (Studi Pustaka).

Pada Program Paket 2. Pelatihan Penyusunan Instrumen Penelitian, memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki ketrampilan dalam menyusun instrument penelitian sesuai desain penelitian yang dipilih. Paket ini dijalankan selama dua hari dengan biaya Rp.120.000/peserta. Sedangkan biaya pada paket 1 perpaketnya adalah Rp.150.000/peserta dengan durasi masing-masing paketnya juga dua hari.

Paket 3 sebagai program terakhir adalah Pelatihan Olah Data Penelitian dengan tujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki ketrampilan melakukan olah data penelitian sesuai desain penelitian yang dipilih. Program ini juga terbagi lagi menjadi empat bagian, yaitu Paket 3.A, 3.B, 3.C dan 3.D. Paket 3.A adalah Pelatihan Olah Data Statistik, Paket 3.B. pelatihan Olah Data Kualitatif, Paket 3.C. Pelatihan Olah Data Kuantitatif dan Paket 3.D. Pelatihan Olah Data Study Dokumen. Masing-masing paket yang ada dalam Paket 3 berbiaya Rp.200.000/peserta.

Sebagai program pendampingan, program ini didesain sedemikian rupa agar mahasiswa selesai dalam penyusunan skripsi. Karena pada program ini di setiap paketnya menunjukkan proses yang harus dilalui oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi. Baik waktu maupun produknya juga sudah jelas. Waktu disesuaikan dengan kalender akademik sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan yang ada. Bagi Paket 1, dilaksanakan pada liburan semester gasal dengan produk yang dihasilkan adalah proposal penelitian. Sedangkan pada Paket 2 dilaksanakan pada liburan awal semester genap, dengan produk yang dihasilkan adalah Bab II dan instrument penelitian, dan terakhir Paket 3 yang dilaksanakan di pertengahan liburan semester genap dengan produk yang dihasilkan adalah Bab IV dan V. sehingga

praktis mahasiswa yang berinisiatif mengambil program pendampingan ini akan selesai skripsinya sesuai waktu yang ditentukan.

Program ini berjalan hanya beberapa semester karena sifatnya yang tawaran bukan. Praktis di tahun 2016 tidak dijalankan, tetapi muncul fenomena aneh program ini dihandel oleh mahasiswa, tepatnya mahasiswa fakultas lain (sy'ariah) tetapi dengan jumlah peserta terbanyak tetap dari fakultas Tarbiyah. Mahasiswa Fakultas Syari'ah melalui BEM-nya mengelat workshop penelitian pada tanggal 28 mei 2016. Demikian juga muncul realitas lain, mahasiswa (dalam hal ini PMII) melalui workshop karya tulis ilmiah secara umum juga menggelar Workshop Karya Tulis Ilmiah (6-7 Nopember 2014).

3. Semester Padat

Selain masalah penelitian, persoalan tentang upaya percepatan masa studi S1 juga berkutat dengan persoalan perbaikan nilai atau pengambilan mata kuliah. Dalam hal ini fakultas Tarbiyah sudah melaksanakan semester pendek sebagai semester perbaikan nilai jauh sebelum ada kebijakan institute tentang semester pendek/padat. Kemudian melihat urgensi semester pendek dan serta untuk menertibkan pelaksanaan semester pendek di semua fakultas agar memiliki standar yang sama, maka institute mengeluarkan kebijakan tentang semester pendek melalui SK Rektor No. Ybk.1271.07/064/823/IAIIG/X.19/IV/2015 tentang Semester Padat ((Dokumen Institut, 2015). Ketentuan khusus tentang Semester Padat yang relevan dengan program akselerasi adalah semester padat dilaksanakan tidak hanya untuk melakukan perbaikan nilai mata kuliah yang belum memenuhi standar tetapi juga dapat untuk menempuh mata kuliah baru dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dalam pelaksanaanya semester padat ditangani oleh tim atau panitia tetapi karena pertimbangan efisiensi maka tahun 2016/2017 langsung diserahkan ke bagian akademik. Semester padat dilaksanakan dalam 2 periode yaitu periode liburan semester genap yang disebut Semester Padat (SP) dan semester gasal (Remidial) ((Kalender Akademik IAIIG, 2016).

4. Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)

Sejak fakultas Tarbiyah berdiri hingga tahun 2010, fakultas sudah melaksanakan pengembangan kurikulum 4 kali yaitu kurikulum 1994, 2004, 2006 dan 2010 (Dokumen Rapat Prodi PAI, Juni 2013) dan pada tahun 2014 melakukan pengembangan kurikulum berorientasi KKNI yang kemudian diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2016. Sesuai kurikulum yang berlaku sejak awal, maka skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa program S1 di fakultas Tarbiyah. Demikian juga sesuai dengan kurikulum lama (Dokumen Kurikulum Tarbiyah, 2010, pp. 5-6) yang digunakan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap maka tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa adalah berbentuk skripsi, baik untuk program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan beban sks sebanyak 6 (enam) (Tarbiyah, 2010).

Sesuai panduan tersebut, maka dalam melaksanakan proses penggarapan skripsi, mahasiswa mengikuti alur/prosedur yang ditetapkan oleh fakultas. Prosedur yang dimaksud sebagaimana yang termaktub dalam dokumen fakultas Tarbiyah (Fakultas Tarbiyah I, 2010) meliputi: a) pengajuan judul, b) proses pengerjaan dan c) munaqosyah (ujian skripsi). Setiap prosedur yang harus dijalani mahasiswa memiliki persyaratan sekaligus konsekuensi yang muncul, baik dari sisi waktu maupun kebutuhan lain seperti biaya, pikiran dan sebagainya. Berangkat dari kemungkinan munculnya konsekuensi tersebut dan kemampuan mahasiswa yang relative beragam, maka fakultas mengupayakan beberapa program seperti: 1) mensinergikan mata kuliah MPP, PPL dan Skripsi, 2) mendesain sebaran mata kuliah yang mendukung penyelesaian pengerjaan tugas sedemikian rupa dilakukan lebih awal, seperti mata kuliah MPS, MPP, PTK, statistic dan KKN, 3) workshop penelitian, 4) “menabung” judul penelitian.

d. Hasil Pelaksanaan strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016.

Strategi percepatan penyelesaian studi S1 yang telah dijalankan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap pada rentang waktu tahun 2013 s.d tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan informasi Yudisium dari tahun 2013 sampai dengan 2016 maka diperoleh informasi pada tahun-tahun tertentu perolehan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sebagaimana deskripsi berikut:

- 1) SK Dekan fakultas Tarbiyah Nomor: Ybk.1271/ 094/IAIIG. FT/X.19.2/XI/2013, tertanggal 6 Nopember 2013 tercatat ada 11 mahasiswa PAI, 4 diantaranya masa studi 4 tahun 2 bulan, 3 orang masa studinya 5 tahun 2 bulan dan terakhir 6 tahun 2 bulan sebanyak 4 orang (SK Yudisium Nopember, 2013)
- 2) SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor: Ybk.1271/0112/IAIIG. FT/X.19.2/XI/2013 tertanggal 9 Desember 2013 tentang Yudisium, maka ada 7 mahasiswa PAI dan 1 mahasiswa PGMI yang termasuk lulus cepat 3 tahun 3 bulan ada 1 orang berasal dari Prodi PAI. Masa studi lain : a) 5 tahun 3 bulan ada 1 orang dari Prodi PGMI dan 3 orang dari PAI serta b) masa studi sampai 6 tahun 3 bulan dari Prodi PAI sebanyak 3 orang. (SK Yudisium Desember, 2013)
- 3) SK Dekan Fakutas Tarbiyah Nomor: Ybk.1271/0139/IAIIG. FT/X.19.2/II/2015, tertanggal 18 Februari 2015 ada 15 mahasiswa PAI dan 13 mahasiswa PGMI yang dinyatakan lulus. Dengan masa studi 4 tahun 6 bulan sebanyak 6 orang, 2 orang dengan masa studi 5 tahun 6 bulan dan 7 orang untuk masa studi 6 tahun 6 bulan dari PAI (SK Yudisium Februari, 2015).
- 4) SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor: Ybk.1271/0155/IAIIG. FT/X.19.2/III/2015, tertanggal 5 Maret 2015, peserta yudisium dari Prodi PAI berjumlah 13 orang dan 5 orang dari Prodi PGMI. Masa studi lulusan Prodi PAI: a) 4 tahun 7 bulan sebanyak 10 orang, b) 3 orang yang menyelesaikan studi sampai 5 tahun 7 bulan. Adapun untuk Prodi PGMI yang menyelesaikan studi 4 tahun 7 bulan sebanyak 3 orang dan 2 orang sisanya menyelesaikan studi hingga 5 tahun 7 bulan. (SK Yudisium Maret, 2015)
- 5) SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor: Ybk.1271/288/IAIIG.FT/ X.19.2/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 ada 79 orang dari Prodi PAI dan 10 orang dari Prodi PGMI. Dengan rincian masa studi sebagai berikut. Untuk Prodi PAI: a) masa studi 4 tahun 2 bulan sebanyak 45 orang, b) 5 tahun 2 bulan sebanyak 22 orang dan c) 6 tahun 2 bulan

sebanyak 13 orang. Prodi PGMI: a) 4 tahun 2 bulan 5 orang, b) 5 tahun 2 bulan 2 orang dan c) 6 tahun 2 bulan 3 orang ((SK.Yudiisium, Oktober 2015)

- 6) SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor : Ybk.1271/328/IAIIG. FT/X.19.2/VI/2016 tentang Yudisium di fakultas Tarbiyah tertanggal 25 Juni 2016 (SK Yudisium Juni, 2016), maka diketahui ada 8 orang untuk Prodi PAI dan 4 orang dari prodi PGMI. masa waktu yang dihabiskan adalah 3 tahun 8 bulan untuk 4 mahasiswa PAI dan 2 untuk mahasiswa PGMI (3 tahun 8 bulan). Dengan masa studi lain khususnya bagi Prodi PAI: a) 5 tahun 8 bulan sebanyak 3 orang dan b) 1 orang untuk masa studi 6 tahun 8 bulan. Adapun untuk mahasiswa Prodi PGMI 1 orang untuk masing-masing masa studi 5 tahun 8 bulan dan 6 tahun 8 bulan (SK Yudiisium, Juni 2016).
- 7) SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor : Ybk.1271/312/IAIIG. FT/X.19.2/IV/2016 tertanggal 16 April 2016 tentang Yudisium memberikan informasi ada 87 peserta yudisium dari Prodi PAI dengan 52 diantara menghabiskan masa studi 3 tahun 8 bulan serta 8 orang dari Prodi PGMI dengan 6 diantaranya lulus tepat waktu (3 tahun 8 bulan). Sedangkan masa studi yang lain untuk Prodi PAI adalah: a) 4 tahun 8 bulan sebanyak 17 orang, b) 5 tahun 8 bulan ada 9 orang, c) 6 tahun 8 bulan ada 9 orang. Demikian juga masa studi lain untuk Prodi PGMI terdiri dari: a) 4 tahun 8 bulan ada 1 orang dan b) 5 tahun 8 bulan ada 1 orang (SK Yudiisium April, 2016)
- 8) SK Rektor Nomor : Ybk.1271/288/IAIIG.FT/X.19.2/X/2016 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Yudisium Fakultas Tarbiyah dengan jumlah peserta sebanyak 79 orang, diantaranya 43 orang lulus 4 tahun 2 bulan dari PAI dan 10 orang dari PGMI 5 orang yang lulus 4 tahun 2 bulan. Sisanya lulus 5 tahun 2 bulan (2 orang dari PGMI dan 22 orang dari PAI) dan 6 tahun 2 bulan (3 orang dari PGMI dan 13 orang dari PAI). (SK Yudisium Oktober, 2016).

- e. **Efektivitas pelaksanaan strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016**
Berdasarkan perolehan data pada sub bab sebelumnya bisa diketahui bahwa fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap selama tahun 2013 sampai tahun 2016

telah melaksanakan kegiatan yudisium bagi mahasiswanya 8 kali, dengan perolehan sebaran masa studinya sebagaimana terdeskripsikan dalam table berikut.

Tabel 31. Prosentase Mahasiswa Program Studi PAI Yang Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun 2013-2013 s.d 2016-2017

Tahun Akademik	Prodi PAI						Jumlah
	Krg dr 4 Thn	4 s.d 4.5 Th	4.6 s.d 5 Th	5 s.d 5.5 Th	5.6 sd. 6 Th	6,1 sd. 7 Th	
2013-2013	0	4	0	3	4	0	11
2013-2014	1			3		3	7
2014-2015			16		5	7	28
2015-2016	56	45	17	22	12	22	174
2016-2017		43		22		13	78
JUMLAH TOTAL							298

Lulusan Prodi PAI yang masuk kategori lulus tepat waktu (kurang dari 4 tahun) muncul pada Tahun Akademik 2013-2014 sebanyak 1 orang dari 7 orang (14.28%) dan 56 dari 174 orang (32,18%) di tahun akademik 2015-2016. Jika dilihat dalam konteks keseluruhan lulusan mulai tahun 2012-2013 sampai dengan semester Gasal tahun akademik 2016-2017, maka Prodi PAI telah meluluskan secara tepat waktu sebanyak 19,12% (57 orang).

Tabel 32. Prosentase Mahasiswa Program Studi PGMI Yang Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun 2013-2013 s.d 2016-2017

Tahun Akademik	Prodi PGMI						Jumlah
	Krg dr 4 Thn	4 s.d 4.5 Th	4.6 s.d 5 Th	5 s.d 5.5 Th	5.6 sd. 6 Th	6,1 sd. 7 Th	
2013-2013						0	0
2013-2014			3	13	3		19
2014-2015		5		2	3		10
2015-2016	8		1		2	1	12
2016-2017		5		2		3	10
JUMLAH TOTAL							51

Dari table 4.2 bisa diketahui bahwa mahasiswa Prodi PGMI yang lulus tepat waktu baru muncul pada tahun 2015-2016 sejumlah 8 orang dari 12 orang yang lulus pada tahun tersebut, atau setara dengan 80% lulus tepat waktu. Tetapi jika dihitung penuh sejak tahun akademik 2012-2013 hingga semester Gasal Tahun Akademik 2016-2017 Prodi PGMI telah meluluskan sebanyak 51 orang. 8 orang (15,69%) diantaranya yang lulus tepat waktu.

Tabel 33. Prosentase Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Lulus Tepat Waktu Sejak Tahun Akademik 2012-2013 s.d 2016-2017

Tahun Akademik	Prodi PAI dan PGMI						Jumlah
	Krg dr 4 Thn	4 s.d 4.5 Th	4.6 s.d 5 Th	5 s.d 5.5 Th	5.6 sd. 6 Th	6,1 sd. 7 Th	
2013-2013	0	4	0	3	4	0	11
2013-2014	1		3	16	3	3	26
2014-2015		5	16	2	8	7	38
2015-2016	64	45	18	22	14	23	186
2016-2017		48		24		16	88
JUMLAH TOTAL							349

Berdasarkan table tersebut juga bisa diketahui bahwa sejak semester Genap Tahun Akademik 2012-2013 sampai dengan semester Gasal Tahun Akademik 2016-2017, Fakultas Tarbiyah secara bersama-sama dengan dua Prodinya (PAI dan PGMI) meluluskan mahasiswa secara cepat (4 tahun kurang/ 3 tahun 8 bulan) pada tahun akademik 2013-2014 dan 2015-2016. Pada tahun akademik 2013-2014 sebanyak 1 orang dari 26 orang (3,84%), tahun akademik 2015-2016 sebanyak 64 dari 186 orang (34,4%) dan secara umum sebanyak 65 orang dari 349 orang (18,62%).

Melihat perolehan % mahasiswa yang lulus tepat waktu di Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap sejak tahun 2012-2013 sampai dengan semester Gasal 2016-2017 menunjukan realitas sebagai berikut:

- 1) Tidak setiap tahun akademik ada mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu
- 2) Walaupun kenaikan % mahasiswa yang lulus tepat waktu cenderung naik secara signifikan tetapi belum menjamin adanya kontinuitas

kenaikan di setiap semester (sedikit berbeda di semester genap tahun akademik 2016-2017 yang belum diperoleh data karena belum dilaksanakan).

- 3) % mahasiswa lulus tepat waktu secara umum di fakultas Tarbiyah tidak mencapai 50%, tetapi secara khusus/per prodi khususnya prodi PGMI pada tahun akademik 2015-2016 bahkan bisa mencapai 80%.

Berdasarkan informasi di atas, maka strategi yang sudah dijalankan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap bisa diukur efektivitasnya. Mengukur efektivitas bisa merujuk kepada pengertian efektif itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan di bab 2 bahwa sesuatu (: program/strategi atau yang lainnya) akan disebut efektif jika tujuan dari dilaksanakannya strategi/program tersebut tercapai ((Zulfa, 2010), (Nelson dan Kok Yee dlm Martono dan Wijayanto, 2014). Tujuan dari kebijakan/strategi maupun program yang dikeluarkan oleh fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap adalah untuk memfasilitasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (: tidak disebutkan kuantitasnya, hanya ada tidaknya lulusan yang menyelesaikan studi secara cepat/tepat waktu), maka seberapa capaian jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap yang telah berhasil lulus tepat waktu akan dikatakan efektif. Artinya kebijakan, strategi dan program yang mempercepat studi S1 di Fakultas Tarbiyah adalah Efektif.

Dalam hal mengukur tingkat keefektifan strategi percepatan masa studi program S1 di Fakultas Tarbiyah IAIIG selama kurun waktu tersebut, ditemukan preposisi sebagai berikut:

- 1) Strategi percepatan masa studi Program S1 Fakultas Tarbiyah Efektif, jika dilihat secara komprehensif
- 2) Strategi percepatan masa studi Program S1 Fakultas Tarbiyah Cukup efektif, jika dilihat secara parsial berdasarkan tahun akademik dan secara kuantitatif.

Efektivitas strategi percepatan penyelesaian studi S1 di Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap menunjukkan kinerja fakultas Tarbiyah. Menurut Siegel dan Marconi (Putri, 2008), penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasar sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini oleh Fakultas Tarbiyah. Sedangkan kinerja

Fakultas Tarbiyah dalam hal ini jika merujuk pada pendapat Gaffar (Alma dan Hurriyati, 2008: 100) yaitu keberhasilan untuk mengemban misi salah satu Tri Dharma PT khususnya yang berupa pendidikan dan pengajaran dengan indikator kinerjanya adalah kuantitas dan kualitas serta relevansi lulusan (Brodjonegoro (<http://eng.unri.ac.id>). Kecepatan atau ketepatan lulus program S1 yang telah dicapai mahasiswa menunjukkan bahwa pada aspek dharma pendidikan dan pengajaran, Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap menunjukkan lulusannya berkualitas. Namun karena tujuan percepatan studi tidak ditentukan secara kuantitas maka ukuran efektivitas strateginya tidak bisa terukur.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 ada 5 kebijakan, yaitu : a) *Pengembangan Kurikulum* 2010 dan 2014 yang mengamanatkan skripsi berbeban sks 6, b) *Penetapan Pembimbing Skripsi dan Reviewer*, yang kemudian menjadi pembimbing 1 dan 2, c). *Periodisasi Wisuda menjadi dua kali dalam satu tahun akademik*, d) *Semester Pendek*, dilaksanakan di tingkat fakultas sejak tahun 2013 dan tahun 2014 ditetapkan sebagai kebijakan institute dan e) *Penetapan Masa Studi ideal untuk S1 sebanyak 8 semester*.
- b. Beberapa strategi percepatan studi S1 yang telah dijalankan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah: a) mensinergikan mata kuliah MPP, PPL dan Skripsi, b) mendesain sebaran mata kuliah yang mendukung penyelesaian pengerjaan tugas akhir sedemikian rupa dilakukan lebih awal, seperti mata kuliah MPS, MPP, PTK, statistic dan KKN, c) workshop penelitian dan e) “menabung” judul penelitian.
- c. Program-program yang digulirkan untuk mendukung strategi percepatan studi S1 yang telah dijalankan di Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah: a) pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) fakultas Tarbiyah, b) workshop penelitian bagi mahasiswa, c) semester padat/pendek baik untuk perbaikan maupun untuk menempuh mata kuliah baru & d) pendampingan penyelesaian tugas akhir.

- d. Pelaksanaan strategi percepatan studi S1 di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 secara komprehensif Efektif.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa hal yang bisa disarankan adalah :

- a. perlunya menentukan variasi kebijakan, strategi dan program yang bisa mendukung terwujudnya percepatan penyelesaian studi S1 secara berkualitas.
- b. perlunya fakultas menetapkan tujuan dari strategi percepatan penyelesaian studi S1 secara kuantitas.
- c. perlunya monitoring penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan cara menfungsikan pembimbing melalui kartu/buku kendali maupun baku mutu monitoring penulisan TAS.
- d. perlunya pengembangan tema penelitian di tiap angkatan sehingga tidak terjadi kejenuhan tema maupun duplikasi dan sebaiknya disosialisasikan kepada mahasiswa lebih awal sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan fakultas.
- e. perlunya penetapan pembimbing lebih awal sebagai bentuk pengawalan program percepatan masa studi/lulus tepat waktu.

Daftar Referensi

- Alma, Bukhari dan Hurriyati, (2008). *Manajemen Corportae dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan. Fokus Pada Mutu Dan Layanan Prima*. Bandung : Alfabeta.
- BAN PT. (2008). Buku 3A- Borang Program Studi. Jakarta: Dediknas.
- Byars, Lyolyd L dan Rue, Leslie W (1991). *Human Resource Managment*. Boston : IRWIN.
- Dokumen Kurikulum Tarbiyah. (2010). *Struktur Kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIIG Kelompok Kurikulum Keprodian Kurikulum Prodi PAI dan PGMI*.
- Dirjend Dikti (1988). *Surat Edaran Dirjen Dikti No.1666/D/1988 tentang Semester Pendek*. jakarta: Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Dokumen Institut. (2015). *SK Rektor tentang Semester Padat*.

- Dokumen Program Kerja Fakultas Tarbiyah. (2012). *Program Kerja Akademik Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap Tahun Akademik 2012-2013*.
- Dokumen Program Pendampingan Fakultas Tarbiyah. (5 Mei 2013). *Program Pendampingan Akselerasi Studi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap Tahun Akademik 2013-2014*.
- Dokumen Rapat PPL Keguruan 2012. (2012, desember 11). *Rapat Persiapan PPL Keguruan Fakultas Tarbiyah Tahun 2012*.
- Dokumen Rapat PPL Keguruan tahun 2012. (2012, desember 12).
- Dokumen Institut (1 Juni 2015). *Rapat Pembahasan Pelaksanaan Semester Pendek*. Cilacap: IAIIG.
- Dunn, William N. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Terjemah "Pengantar Analisis Kebijakan Publik. edisi kedua, oleh Samudra Wibawa Dkk. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Fakultas Tarbiyah I. (2010). *Panduan Skripsi Fakultas Tarbiyah*. Cilacap: Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap.
- Fakultas Tarbiyah. (Juni 2016). *SK Yudiisum*. Cilacap: Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap.
- RD.Fakultas (2013). *Koordinasi Reviewerr Fakultas Tarbiyah*. Cilacap: Fakultas Tarbiyah.
- Fattah, N. (2005). *Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fisher, D. C. (t.thn.). *Baldrige On Campus. the Assessment Workbook for Higher Education*. Quality Resource.
- Gomes, F. C. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- IAIIG. (2014). *Panduan Akademik Institut Agama Islam Imam Ghozali Tahun 2014/2015*. Cilacap: IAIIG Cilacap.
- J. V.-H (Eds). (2008). *Cultural Perspectives on Higher Education*. Springers.
- Panduan PPL Fakultas Tarbiyah. (2012). *Panduan PPL Keguruan Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap*.
- Purek 1. (2016). *Kebijakan Wisuda Sarjana*. wawancara
- Rencana Strategi IAIIG Cilacap Tahun 2014-2018*. Cilacap: IAIIG Cilacap.
- SK Dekan Fakultas Tarbiyah. (Oktober 2015). *SK.Yudisium*. Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap
- Kalender Akademik IAIIG (2014, SEPTEMBER). *KALDIK IAIIG 2014*. CILACP: IAIIG Cilacap.

- Kalender Akademik IAIIG. (2016). *Kalender Akademik 2016/2017*.
- McMillan, James H dan Schumacher, Sally.(2001). *Research In Education. A Conceptual Introduction*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Maret, S. Y. (2015, Maret 5). *SK Rektor Nomor: Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/II/2015 tentang Yudisium, tertanggal 5 Maret 2015*.
- Lunenburg, Fred.C dan Ornstein, Allan C. (2006). *Educational Administration. Concepts and Practices (Fourth Edition)*. Australia: Thomson Woodwar.
- Putri. (2008).
- Rapat, D. (4 Maret 2014). *Rapat Senat Fakultas Tarbiyah*. Cilacap: Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap.
- Rapat, D. (Juni 2013). *Rapat Prodi PAI*. Cilacap.
- Sagala, V. R. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. (2015). Program Percepatan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Jurusan PT.Otomotif FT.UNY. *Proceding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Otomotif UMP* (hal. th). Purwokerto: UMP.
- SK Yudiisum April. (2016, April 16). *SK Rektor Nomor : Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/IV/2016 tentang Yudisium tertanggal 16 April 2016*.
- SK Yudisium Desember. (2013, 12 9). *SK Rektor Nomor: Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/XI/2013 tentang Yudisium 9 Desember 2013*.
- SK Yudisium Februari. (2015, 2 18). *SK Rektor Nomor: Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/II/2015 tentang Yudisium*.
- SK Yudisium Juni. (2016, Juni 25). *SK Rektor Nomor: Nomor : Ybk.1271/328/IAIIG.FT/X.19.2/VI/2016*.
- SK Yudisium Maret. (2015, Maret 5). *SK Rektor Nomor: Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/III/2015 tentang Yudisium, tertanggal 5 Maret 2015*.
- SK Yudisium Nopember. (2013, Nopember 6). *SK Rektor Nomor: Ybk.1271/ /IAIIG.FT/X.19.2/XI/2013, tertanggal 6 Nopember 2013*.
- SK Yudisium Oktober. (2016). *SK Rektor Nomor :Ybk.1271/288/IAIIG.FT/X.19.2/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Yudisium*.
- Suryadi, A. (2008). *Pembiayaan Pendidikn*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarbiyah. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah. Dalam Tarbiyah, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah*. Cilacap: Fakultas Tarbiyah IAIIG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).

wawancara Mantan Ka Prodi PAI. (2016). *integrasi MPP,PPL dan skripsi*.

wawancara staf Tarbiyah tentang sidang judul. (2016). *Sidang Judul Skripsi*.

Wawancara mantan Pudek 1. (2016). *Strategi Percepatan Lulus Tepat Waktu*.

Wijayanto, S. d. (2014). Peningkatan Efektivitas Program Studi di Perguruan Tinggi Swasta Melalui Kepemimpinan Adaptif Integratif. *Jurnal Dinamika Manajemen*. Vol.5.NO.1. <http://journal.unnes.ac.id/njul/index.php/jdm>, 110-130.

Winardi, J. (2008). *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulfa, Umi. (2010). *Strategi Pembelajaran. edisi Revisi*. Cilacap: Al Ghazali Press.

Zulfa, Umi (2013). Alternatif Model Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi. Cilacap: Ihya Media.



J. General Education On Higher Education

1. Pendahuluan

Pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk segala zaman dan situasi, termasuk situasi masa depan yang kadang-kadang tidak bisa diprediksikan, salah satu aspek penting dari hasil pendidikan adalah sikap. Jadi bagaimana lulusan bersikap atas segala situasi dari zaman yang ia hadapi sehingga tidak menimbulkan situasi yang justru merugikan masyarakat. Dari sekian banyak tugas yang diemban Pendidikan tersebut terlimpahkan kepada *general education* sebagai salah satu pihak yang mendapatkan amanat tersebut.

Harapan yang demikian mulia, dan sudah diupayakan sedemikian rupa tidak otomatis mulus untuk dicapai. Beberapa realitas memperhatikan yang menunjukkan kebalikan dari yang diidealkan tadi misalnya:

Pertama. Penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radicalism. pengamat Pendidikan Doni Kusuma mengatakan jika seorang mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan umum mengenai cara berpikir yang logis, mereka dapat mengkritisi pemikiran baru yang ditawarkan, termasuk radikalisme (Akbar, 2018).

Kedua. Peristiwa penyerangan Gereja Lidwina di Bedog, Sleman pada saat misa pagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan yang melukai pastor dan jemaat hingga pelaku ditembak polisi ternyata statusnya mahasiswa (inisial S) (Kardi, 2018).

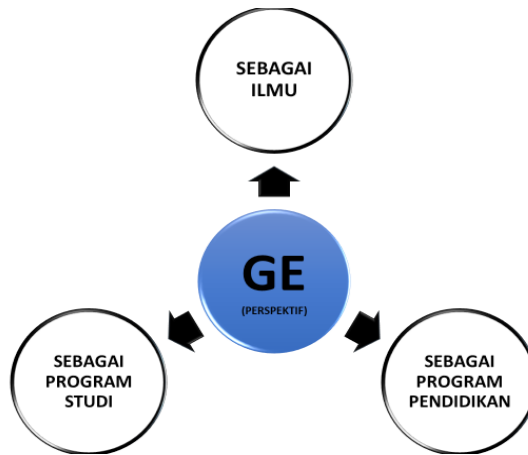
Ragam realitas tersebut menghajatkan adanya *General Education (GE)*. Lalu apa itu *General Education*? Untuk mengetahui jawabannya berikut rencana pembahasan kali ini: 1) perspektif tentang GE, 2) konsep: definisi, tujuan, kedudukan, fungsi dan manfaat, 3) GE sebagai program Pendidikan di Indonesia.

2. Perspektif tentang *General Education*

Merujuk kepada istilah ***General Education (GE)*** memiliki makna yang berbeda-beda. Setidaknya ada beberapa pendapat, seperti berikut:

- a. GE = Pendidikan umum
- b. GE, tidak sama dengan jenis Pendidikan umum dalam sisdiknas
- c. GE, tidak sama dengan *Global Education*
- d. GE Versus *Spesification Education*
- e. GE Versus *Academic and Vocational Education*

Berdasarkan informasi yang sangat beragam ini, maka bagaimana memahami GE?. Memahami GE bergantung kepada perspektif yang akan digunakan. Setidaknya ada tiga perspektif, yaitu: 1) GE sebagai ilmu, 2) GE sebagai program studi dan 3) GE sebagai program Pendidikan.



Bagan 89. Perspektif *General Education*

3. Konsep: Definisi, Tujuan, Kedudukan, Fungsi dan Manfaat GE

General education menurut R.O Hand dan D.Biona adalah proses membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang seimbang pengetahuan, kemampuan berfikir, perasaan, kesadaran keterampilanya, manusia yang sehat rohani(mental) dan jasmaninya, manusia yang mampu menyerasikan diri dengan masyarakat, memahami orang lain dengan baik, responsif terhadap kebutuhan orang lain sebagai mitra yang baik, manusia yang mampu mengatur/menyerasikan pribadi, memahami diri sendiri, tenang dan wajar dalam mengatasi situasi yang nyata (FPBS, 2018).

General Education adalah merupakan pengembangan daya kemampuan manusia, pendidikan komprehensif untuk meningkatkan kemampuan intelektual-rasional (kognitif), emosional yang penuh kesadaran (afektif) dan keterampilan dalam arti yang seluas-luasnya (kognitif -afektif dan psikomotor) dan berlaku untuk semua orang secara umum (Wolfgang Klafki)

Adapun tujuan GE ada 3, yaitu:

- HILMUN:** kesanggupan untuk menolak argumentasi orang bodoj dengan bahasa yang santun
- WORDO'**= tidak rakus, rendah hati, yang mampu membentengi dirinya dari perbuatan masksiat
- HUSNUL KHULUQ** = berakhlak baik, sehingga ia bisa hidup diantara manusia



Bagan 90. Tujuan General Education

4. *General Education* Sebagai Program Pendidikan di Indonesia

GE dalam konteks Indonesia ada dalam perspektif program Pendidikan. GE sebagai program Pendidikan muncul akibat banyaknya persoalan yang berkaitan dengan karakter lulusan, spesialisasi Pendidikan hingga persoalan bangsa lain. Persoalan **Karakter Lulusan**, seperti: rendahnya kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, berfikir kritis, percaya diri dan lunturnya nilai-nilai kebaikan., Ketidaksesuaian Kebutuhan vs Ketersediaan., Kritik terhadap lulusan sebagaimana yang dlansir *English proficiency, Leadership, Organization, Communication Higher Order Thinking, and IT skills* (WB 2010, Dikti 2012), menunjukkan bahwa lulusan Pendidikan di Inonesia dalam kemampuan teknis cukup, tetapi kurang diimbangi kemampuan bernalar dan adanya krisis integritas diri. Adapun **permasalahan Bangsa** yang sering muncul adalah: Rendahnya Cinta Tanah Air, Radikalisme, Intoleransi (pikiran sempit), Kurang Siap Menghadapi MEA, Narkoba, Pengangguran Sarjana, serta krisis integritas bangsa.

Sebagai program Pendidikan maka GE dalam konteks PT juga mengalami perubahan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 34. Peraturan Tentang *General Education* di PT Indonesia

GE lama	GE baru
◆ Diatur berdasarkan SK Dirjen Kikti N).32/dj/kep/1983 ◆ Bentuknya : mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan IAD-ISD	◆ Diatur berdasarkan UU N0 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi psl 35 ◆ Bentuk: mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia ◆ UU DIKTI (Nompr 12/2012) ◆ Dirjen Belmawa

Pada peraturan yang lama, yaitu SK Dirjen Kikti No.32/dj/kep/1983 tentang Kurikulum Inti MKDU dinyatakan bahwa **komponen MKDU** diarahkan untuk melengkapi **pembentukan kepribadian dengan pengembangan kehidupan pribadi** yang memuaskan, keanggotaan keluarga yang bahagia, dan kewarganegaraan yang produktif serta kewarganegaraanyang bertanggungjawab, yaitu: Berjiwa Pancasila, taqwa kepada tuhan yme, memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integrasi dalam menyikapi berbagai persoalan dan memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan bersma-sama melestarikannya. Kebijakan ini dilaksanakan dan **diarahkan** ke MKD berupa: mata kuliah **pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, IAD-ISD.**

Dalam perspektif baru, GE yang dituangkan dalam **UU SISDIKNAS (NOMOR 20/2003), UU DIKTI (Nompr 12/2012) dan Dirjen Belmawa. Pertama.** Dalam UU Sisdiknas, artinya GE dalam konteks Sisdiknas merujuk pada tujuan Pendidikan nasional, yaitu : berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. *Kedua. Dalam UU Dikti.* Kedudukan GE dalam UU Dikti adalah sebagai **program pendidikan** yang yang diformulasikan dengan **makul pengembangan kepribadian** yang bersifat **wajib : Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Ketiga. Dalam Dirjen Belmawa.** General Education adalah **pemberian pemahaman yang bersifat ideologi** kepada mahasiswa yaitu pemberian pemahaman tentang **wawasan kebangsaan** seperti pemahaman thd Pancasila sbg landasan ideologi bangsa, memahami **kesatuan dan persatuan NKRI**, memahami akan **keragaman suku** yang beraneka melalui kebhinekaan tunggal ika, sehingga akan terbentuk lulusan yang **‘BERILMU DAN BERADAB’**, yaitu Insan Indonesia yang beradab dan berilmu, memiliki wawasan kebangsaan dan belanegara, “open minded”, kompetitif pada era MEA, analitis, komunikatif, toleran, memiliki jiwa entrepreneurship, tanggap terhadap lingkungan dan bertanggungjawab.

Selanjutnya Dirjen Belmawa Kembali melakukan revitalisasi GE. Beberapa program yang dilakukan untuk mendukung Gerakan revitalisasi GE antara lain:

- a. **PENGAYAAN MATA KULIAH (HIDDEN /EMBEDDED CURRICULUM):** Learning to think, reading skill, writing skill, articulate communication skill, wawasan kebangsaan dan bela negara

- b. **KEGIATAN EXTRA DAN KO KURIKULER** (HIMPUNAN MHS, UNIT KEGIATAN MHS, BEM DLL)

Berdasarkan hal ini pula, maka kriteria GE di Indonesia adalah:

- a. **Program pendidikan wajib** bagi semua peserta didik dalam kedudukannya sbg warga negara
- b. Memberikan pendidikan umum dalam **sikap, nilai, moral, pengetahuan dan ketrampilan** bukan spesialisasi akademis dan vocational tt
- c. **Bertujuan** untuk membina peserta didik agar menjadi warga negara yg memiliki kepribadian Indonesia yg baik dan terpadu (**manusia Indonesia seutuhnya**)
- d. **Bukan program pendidikan pilihan** sesuai kemampuan, bakat dan minat pesertd didik (Bunyamin maftuh)

Harapannya mahasiswa menjadi pribadi (**Manusia yang utuh**), bukan manusia setengah-setengah dan bukan warga bangsa yang setengah –setengah, tapi **bangsa yang utuh. Semoga Allah Me-Ridlo-i**

Daftar Referensi

- Akbar, W. (2018, April 29). *BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme*. Retrieved from CNN Indonesia: m.cnnindonesia.com/nasional
- Direktori.FPBS. (2018). *General Education.Ffile UPI*. Retrieved from file.upi.edu: file.upi.edu
- Kardi, D. D. (2018, februari 11). *Kronologi Penyerangan Gereja St.Lidwina Bedog Sleman*. Retrieved from CNN Indonesia: m.cnnindonesia.com/nasional SK Dirjen Kikti No.32/dj/kep/1983 tentang
- SK Dirjen Kikti No.32/dj/kep/1983 tentang Kurikulum Inti
- Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona;
- Undang-Undang RI N0 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



K. Belajar Ke Negeri Ginseng

1. Pendahuluan

Pendidikan sesungguhnya adalah *human invesment*. Melalui pendidikan maka sumber daya manusia (*human resource*) bisa menjadi *human capital*. Sedangkan *human capital* merupakan komponen strategik yang akan menentukan maju mundurnya sebuah negara.

Begitu pentingnya peran pendidikan, maka Islam sangat memperhatikan persoalan pendidikan. Konsep *human investment* melalui pendidikan dalam khasanah Islam misalnya bisa dilihat antara lain dalam konsep *uthlubul 'ilma minal lahdi ilal lahdi* (*long life education*), *tholabul 'ilmu faridhatun 'alaa kulli muslimin wal muslimat* (*education for all/ compulsory education*), hingga *uthlubul 'ilma walau kaaana bissien*.

Islam memerintahkan umat muslim untuk belajar ke negeri Cina (*Uthlubul 'ilma walau kaana bissien*), menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk belajar sesuai ahlinya. Islam memerintahkan umat muslim untuk belajar ke negeri Cina bukan dalam konteks belajar tentang ilmu agama, tetapi belajar tentang ekonomi, teknologi, semangat kerja dll. Salah satu yang dekat (*se-ordo*) dengan orang Cina adalah orang Korea Selatan.

Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan (Korsel). Korsel sendiri merupakan salah satu negara yang seumuran dengan Indonesia, karena Korsel lahir (merdeka) 2 hari sebelum Indonesia. Tetapi Korsel telah tumbuh melebihi Indonesia. Korsel telah menunjukkan *kedigjayaanya* untuk mengalahkan banyak negara dunia termasuk Eropa. Dalam hal ini Korsel telah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-15 terbesar dunia dan keempat di Asia setelah Jepang, China dan India.

Tulisan ini bermaksud untuk mengajak pembaca khususnya para pelajar yang sedang menempuh pendidikan (*jihad fi sabilillah*), agar bisa mengambil *itibar* (*lesson learn*) atas hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan khususnya semangat/ghirah/motivasi belajar khususnya dan etos kerja yang sangat tinggi dari orang-orang Korea Selatan. Mengapa penulis memilih Korsel bukan Cina. Sebenarnya karena persoalan sederhana, yaitu karena penulis pernah ke Korsel dan belum pernah ke Cina he he he. Jadi penulis mengajak pembaca untuk pergi belajar ke negeri ginseng ini.

2. Sekilas Mengenal Pendidikan di Korea Selatan.

Ada beberapa lembaga pendidikan di Korsel yang pernah penulis kunjungi, antara lain: a) *Yonsei University Library* (universitas berbasis perpustakaan), b) *Korea National University of Education* (KNUE) semacam IKIP kalau di Indonesia, c) *Miho Middle School* (SMP) dan d) *Seoul National University* (SNU) sebagai salah satu *World Class University* (WCU).

Yonsei University merupakan lembaga pendidikan pertama yang penulis kunjungi di hari pertama. Yonsei merupakan universitas berbasis perpustakaan. Dari Yonsei University inilah penulis memperoleh informasi antara lain: a) pembelajaran berbasis Higtech. b) Setiap area kampus seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran. Setiap sentuhan di area kampus semuanya bernuansa pembelajaran. Bahkan tempat duduk saja untuk sekedar santai mengandung informasi pembelajaran yang dikemas secara apik dengan teknologi tinggi. c) efisiensi waktu sangat menonjol dari setiap aktivitas yang mereka lakukan bahkan dari hal yang sangat sederhana seperti cara jalan mereka. Orang-orang Korsel kebiasaan jalan kakinya sangat cepat. Penulis hampir tidak pernah melihat para pengunjung/mahasiswa yang datang dan pergi dengan jalan kaki seperti orang Indonesia (:alon) tapi sangat cepat (hampir seperti lomba jalan cepet). Bahkan beberapa kali rombongan penulis ketinggalan jauh dengan personel yang difungsikan sebagai guide untuk berkeliling ke area kampus. Sehingga kata-kata kami yang sering muncul “awas ketinggalan!” “pasti orangnya sudah hilang”, “tu tuh orangnya sudah di sana (jauuuuh)”. d) jam belajar sangat panjang dari pagi hingga malam (termasuk di SMP Miho. Bahkan anak SMP baru pulang sekitar jam 10 malam), e) tuntutan belajar sangat tinggi (setiap hari setiap mahasiswa/siswa harus mempersiapkan sumber belajar minimal 7 buku yang harus mampu dipresentasikan dalam waktu 5 menit (gimana mbacanya ya.. padahal setiap hari ada beberapa pelajaran.

KNUE sebagai lokasi kedua yang penulis kunjungi di hari kedua, juga tidak berbeda jauh dengan Yonsei. Hanya di KNUE dikemas dalam acara formal berupa seminar kerjasama Indonesia-Korsel yang bertajuk “*Educational Administration Policy Making Process in South East Korea*”. Penulis memiliki beberapa informasi menarik tentang praktek pendidikan di Korsel. Secara umum kebijakan negara Korsel tentang pendidikan sama seperti Indonesia, ada wajib belajar (*compulsary education*), ada sistem pendidikan dan sebagainya. Hal yang sangat mengejutkan adalah 1) kebijakan pemerintah terkait dengan persoalan

pembiayaan pendidikan. Jika di Indonesia ada kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBN yang didistribusikan untuk seluruh pendidikan di Indonesia, maka Korsel mampu mengalokasikan 6 % dari anggaran negaranya untuk 1 universitas (KNUE), 2) kebijakan tentang lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan tenaga pendidik hanya 1 yaitu KNUE. Hal yang sangat berbeda dengan di Indonesia yang relatif mudah untuk mendirikan/memberi izin bagi berdirinya IKIP atau FKIP untuk beberapa PT di Indonesia yang ini berdampak pada tiadanya jaminan lapangan kerja bagi mereka yang telah lulus.

Hari ketiga dan keempat penulis berkunjung ke Miho Middle School dan Seoul National University (SNU). Di kedua tempat ini selain penulis memperoleh informasi tentang kebijakan pendidikan secara formal, penulis juga melihat, merasakan sekaligus dan memperoleh informasi lain selama berinteraksi dengan orang-orang di area kampus maupun sekolah, seperti: a) kedisiplinan yang sangat tinggi (tepat waktu), b) penghormatan yang tinggi, c) pelayanan yang tinggi, d) rendah hati, e) sadar belajar, f) etos kerja, g) cinta produk dalam negeri (bahkan sampai menolak kebijakan impor daging sapi dengan demo sampai berpuluh-puluh hari, lebih suka pakai produk dalam negeri seperti mobil Hyundai, KIA, Daewoo/Sangyong, Samsung, LG, dan h) gerakan penterjemahan literatur asing ke dalam bahasa Korsel (seperti gerakan penterjemahan besar-besaran yang dilakukan Barat atas literatur-literatur Islam zama keemasan) dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menurut penulis yang pada akhirnya mampu menghantarkan Korsel menjadi negara maju dan SDM-nya dihargai sebagai tenaga kerja yang sangat mahal harganya.

3. I'tibar

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut maka i'tibar yang bisa diperoleh adalah:

- a. Motivasi belajar sangat tinggi. ini bisa dilihat bagaimana kerasnya mereka belajar, mulai dari jam belajar yang sangat panjang hingga tugas-tugas yang sangat banyak yang dibebankan kepada peserta didik. Hal ini mereka lakukan karena mereka menyadari betul akan pentingnya pendidikan. Bahkan mereka selalu bilang, kalau mereka sebenarnya negara miskin (sumber daya alam) tetapi kemiskinan ini yang memicu mereka untuk giat belajar agar SDM berkualitas yang dibutuhkan pembangunan bisa disediakan. Nyatanya selama beberapa dekade terakhir Korsel mampu melesat menjadi

negara maju. Jika motivasi belajar orang Indonesia setinggi orang Korsel maka bukan tidak mungkin Indonesia juga akan sehebat Korsel. Padahal Islam sangat jelas mengatakan *yarfa'illaahu alladzii na'aamanu minkum wa alladzie na uutul 'ilm darajaat*. Korsel telah membuktikan itu. Sedangkan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim belum melakukan itu.

- b. Pekerja keras dan Bekerja selalu menampilkan yang terbaik. Orang Korsel selalu dikenal sebagai pekerja keras bahkan hampir terbilang *workaholic*, serta di dalam bekerja selalu menampilkan hal yang terbaik (bahkan kalau bekerja selalu memiliki target menjadi yang terbaik, akibatnya sering terjadi peristiwa bunuh diri jika tidak memenuhi target tersebut, hingga pemerintah membuat regulasi tersendiri tentang bunuh diri). Dalam Islam, bekerja itu seyogyanya menampilkan yang terbaik “berlomba-lombalah dalam kebaikan”. Tetapi Islam menyeimbangkan konsep bekerja yang terbaik (bukan bekerja seiklasnya/ala kadarnya) sebagai ihtiyar manusia dengan tetap menyandarkan pada hak prerogatif Tuhan untuk menentukan mana yang terbaik untuk manusia. Sehingga kekecewaan akibat gagal meraih yang terbaik tidak memicu untuk bunuh diri.
- c. Tahu Caranya Bersyukur. SDA Korsel sangat miskin jika dibandingkan dengan Indonesia, tetapi mereka mampu menunjukkan cara bersyukur, dengan cara menjaga kelestarian alam, mengeksplor teknologi untuk menambah daya alam. Sedangkan Indonesia yang lagi-lagi banyak muslimnya justru sering merusak alam. Ini artinya sebagian orang Indonesia telah mengingkari amanah Allah untuk menjadi *khalifah fil ardl* yang bertugas untuk memakmurkan bumi.

4. Penutup

Islam mengajarkan belajar sebagai sebuah kewajiban pribadi dan sosial. Sekaligus belajar bisa dari berbagai sumber walaupun dari sumber yang tidak seideal dengan Islam. Korsel merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber belajar yang bisa dimanfaatkan umat khususnya Indonesia. Kita bisa belajar dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang Korsel yang sesungguhnya menjadi ajaran Islam.

L. Idealisme Kampus: Strategi Pengembangan Intelektual Mahasiswa Menuju WCU

1. Pendahuluan

Saat ini pembicaraan tentang *World Class University* (WCU) menjadi pembicaraan yang sangat diminati oleh banyak kalangan. Peran global perguruan tinggi semakin terasa. Gerakan internasionalisasi perguruan tinggi juga semakin beragama dilakukan. Strategi menuju WCU juga banyak diupayakan dan dilakukan. Semuanya menuju satu titik yaitu terwujudnya menjadi salah satu deretan dari komunitas WCU. Sebagai contoh salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia menetapkan strategi jangka panjang menuju WCU dengan strategi-strategi berikut:

- a. Pertama, menetapkan policy nasional untuk mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia dalam jangka panjang dengan dukungan sumber daya yang diperlukan menuju terwujudnya WCU pada tahun 2035.
- b. Kedua, menyusun long terms plan di mana terdapat sekurang-kurangnya empat hal utama: longterms strategies, goals, programs, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi pegangan dalam melakukan pembangunan keseluruhan aspek utama universitas.
- c. Ketiga, membangun infrastruktur universitas dengan kokoh sebagai pilar penopang pembangunan aspek-aspek strategis universitas.
- d. Keempat, membangun institutional research capacity sebagai instrumen kelembagaan untuk melaksanakan riset yang menghasilkan invention dan inovasi sebagai hasil ciptaan lembaga untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan.
- e. Kelima, membangun leadership capacity kelembagaan secara total dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan dan program studi.
- f. Keenam, mengembangkan dan menerapkan ICT sebagai facilitating element, baik dalam proses manajemen kelembagaan maupun dalam kegiatan akademik termasuk proses pembelajaran.
- g. Ketujuh, membangun hubungan dan kerja sama internasional dengan menciptakan network dan partnership dengan berbagai universitas dan berbagai badan internasional yang relevan secara terencana dengan baik untuk memasuki global market.

- h. Kedelapan, mengembangkan rich professionalism & culture of excellence dalam setiap program dan kegiatan, sebab pada professionalism dan excellence competitive dan comparative advantage, value universitas terletak.
- i. Kesembilan, mengembangkan income generating programs yang bervariasi dan terus menerus untuk mengokohkan keuangan lembaga dalam jangka waktu yang panjang untuk mendukung keseluruhan upaya perwujudan World Class University pada 2035.
- j. Kesepuluh, melakukan diseminasi dan komunikasi secara luas, baik lokal, nasional, maupun global dengan memanfaatkan berbagai jenis media massa (Gaffar, 2012).

Pertanyaannya adalah Mengapa WCU harus dikejar? Aoa sjaa yang menjadi persyaratan dan bagaimana strategi penyiapannya? Lalu bagaimana mahasiswa bisa mengambil posisi untuk ikut berpartisipasi bagi kampusnya menuju WCU? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini maka seminar kali ini akan membahas: 1) mengapa harus WCU, 2) penyiapan WCU, 3) Peran Mahasiswa Menuju WCU dan 4) strategi pengembangan intelektual mahasiswa menuju WCU.

2. Mengapa WCU

Berbicara mengenai *World Class University* (WCU) memiliki beragam batasan, ukuran atau kriteria, beberapa pendapat tentang hal itu antara lain seperti pendapatnya Philip G. Albach yang mengatakan bahwa WCU adalah universitas yang masuk dalam **ranking utama universitas dunia** karena memiliki keunggulan (*excellence*) berstandar dunia (Albach, 2013). Lebih jelas lagi adalah pendapatnya Levin: WCU adalah universitas yang memiliki **reputasi internasional** di bidang **penelitian, pembelajaran dan kontribusi bagi masyarakat** luas (Zulfa, 2017). Dari dua definisi ini saja, konsep WCU mencerminkan norma dan nilai-nilai dominan dunia lembaga akademik yang berorientasi pada penelitian (Zulfa, 2017).

Pertanyaannya adalah mengapa kita harus WCU? Jawabannya bisa empat kemungkinan, yaitu karena *ambisi, harapan, tuntutan atau kebutuhan*. Akan disebut *ambisi* jika keinginan untuk menjadi WCU tidak disertai dengan perencanaan dan persiapan panjang, detail dan sistemik yang secara rasional akan menghantarkan situasi perguruan tinggi masuk dalam jajaran WCU. Mirip dengan yang pertama, hanya yang membedakan adalah adanya kesadaran dan kematangan perencanaan dan persiapan yang rasional atas situasi sekarang dengan

harapan yang akan diraih dalam hitungan yang rasional maka WCU menjadi harapan. Siapapun atau perguruan tinggi manapun sepanjang melakukan penyiapan-penyiapan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria dan persyaratan WCU maka WCU menjadi *harapan*.

Berbed halnya dengan dua alasan terakhir yaitu WCU sebagai tantangan dan kebutuhan. Saat ini dengan situasi dunia yang semakin mengglobal, tanpa batasa, bisa saling interaksi maka meraih predikat WCU merupakan peluang. Peluang karena bisa belajar dari universitas lain yang sudah masuk WCU untuk menginspirasi dan mendoornnya mengikuti langkah universitas tersebut, atau bahkan situasi tadi ditangkap sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Artinya univrsitas yang ada saat ini untuk bisa bertahan, bersaing maka harus memenuhi standar WCU jika tidak ingin ditinggalkan oleh calon mahasiswa dan masyarakatnya.

Untuk memperjelas bagaimana posisi universitas kita dari empat alasan peraihan WCU, maka setidaknya bisa disimak dari aspek kesejarahan WCU dan khususnya dalam konteks Indonesia.

Dalam perspektif Kesejarahan WCU, kemunculan WCU bisa dilihat dalam perbandingan tabel di bawah ini, baik dalam sejarah dunia maupun Indonesia.

Tabel 35. Perspektif Kesejarahan WCU

Dunia	Indonesia
1998	2006
UNESCO: <i>World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action</i>	Diknas: Tim Gugus Penetapan 10 PT
Urgensitas peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa memasuki era persaingan global	2007: 50 PT (27 PTN, 23 PTS)
	Tahun selanjutnya: PT mandiri berkompetisi menjdi WCU

Berdasarkan tabel ini, maka WCU yang diharapkan pemerintah adalah 10 PT ternama di Indonesia, sisanya adalah kesukarelaan dari masing-masing perguruan tinggi yang bisa saja berharap, berambisi atau memang melihat WCU sebagai sebuah kebutuhan dunia pendidikan tinggi yang tak terelakkan ini.

Jika WCU merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan saat ini, maka sudah menjadi kewajiban dari perguruan tingi tersebut untuk melakukan penyiapan-penyiapan agar mencapai derajat WCU yang dimaksud. Penyiapan bisa dimulai dengan mempelajari apa yang biasanya menjadi karakteristik dari

WCU, pihak mana yang akan menjadi penilai bagi WCU, dan bagaimana kriteria penilaian WCU dari masing-masing Lembaga penilai yang seara mutlak berarti menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi yang akan masuk ke jajaran WCU,

Pertama. Karakteristik WCU. Dilihat dari karakteristik WCU, maka WCU bisa diklasifikasikan lagi menurut kategori Lembaga penilainya. Secara umum jika mengacu kepada karakteristik yang dikeluarkan lembaga penilai WCU, maka ada 2 kategori, yaitu: 1) ada lembaga penilai dengan standar sangat tinggi dan 2) Ada lembaga penilai dengan standar relatif terjangkau. Berdasarkan hal ini maka perguruan tinggi bisa menentukan pilihan mau menggunakan versi yang mana, tentu dengan melihat kedekatan kemungkinan pemenuhan karakteristik yang sudah dimilikinya.

Kedua. Lembaga penilai WCU. Beberapa lembaga penilai WCU antara lain:

- a. *Shanghai Jia Tong University Rankings*
- b. *Times Higher Education Supplement (THES)*
- c. *Webometrics Ranking of World Universities*
- d. *International Rankings Expert Group & The Berlin Principles*
- e. *Global University City Index*
- f. *World Education News & Reviews (WENR)*
- g. *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*
- h. *QS World University Ranking.*

Ketiga. Kriteria Penilaian WCU. Kriteria Penilaian WCU: pertama. QS World University Ranking, dengan kriteri penilaiannya yaitu: 1) *research quality (academic per review)*, 2) *teaching quality*, 3) *graduate employability (employer review: kesiapan lulusan masuk dunia kerja)*, 4) *international outlook (kontribusi PT scr intrnsl)*. Kedua, **Time Higher Education Supplement**, dengan kriteria: 1) *Peer review*, 2) *Employer review*, 3) *Student/teacher ratio*, 4) *Citation index*, 5) *International teachers* dan 6) *International students*. Ketiga, **Webometrics Ranking of World Universities**, dengan kriteria: 1) *Web size*, 2) *Rich files*, 3) *Scholar (Google)* dan 4) *Visibility (Link)*.

3. Penyiapan WCU

Penyiapan untuk menjadi WCU setidaknya ada dua Langkah, yaitu persiapan pra syarat dan pemenuhan syarat WCU.

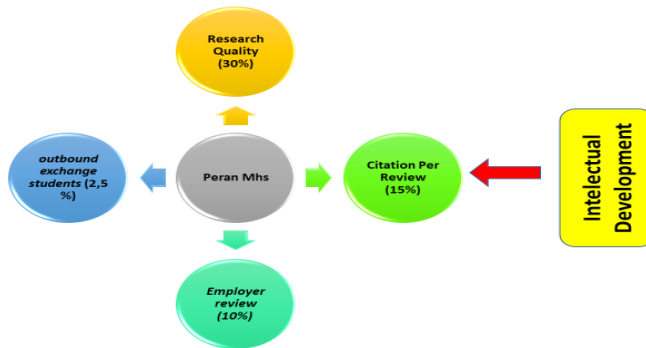
Pertama, Pra Syarat WCU, yaitu a) perubahan mental (dasar dan utama). perubahan mental, yaitu menciptakan suatu keinginan untuk merubah universitasnya menjadi berkelas dunia, sehingga hal inilah yang membutuhkan dukungan seluruh civitas akademika, dan b) sumber keuangan, sarana dan prasarana, *Good University Governance* (GUG) dan lainnya untuk syarat pendukung.

Kedua. *Penyiapan Syarat/ Benchmarking WCU*. Beberapa benchkarking yang harus dipenuhi antara lain: 1) Melahirkan penelitian dan memiliki SDM (*faculty*) yang unggul, 2) Memiliki kebebasan dan atmosfer akademik yang kondusif, 3) Dikelola secara mandiri/*Self Governance*, 3) Memiliki fasilitas dan pendanaan yang memadai, 4) Mendukung keberagaman, 5) Melaksanakan internasionalisasi, 6) Memiliki kepemimpinan yang demokratis, 7) Memiliki mahasiswa yang berbakat, 9). Menggunakan ICT, 10) Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, 11) Menyapa kebutuhan masyarakat sosial dan 12) Memiliki jaringan kerjasama internal dan eksternal yang kuat (Purbani, 2015).

Ketiga. *Pemenuhan Kriteria WCU*. Dalam hal ini perguruan tinggi yang sudah memilih Lembaga penilai WCU, kemudian mencoba memenuhi kriteria dan indikator WCU sesuai dengan lembaga penilaiannya.

4. Peran Mahasiswa Menuju WCU

Salah satu benchmarking WCU adalah dimilikinya mahasiswa yang berbakat. Kepemilikan ini bukan kepemilikan yang pasif tetapi proaktif, sehingga dalam konteks ini mahasiswa harus berperan aktif mewujudkan kampusnya menjadi WCU. Setidaknya ada empat peran yang bisa dimainkan mahasiswa terutama dalam konteks pengembangan intelektual (*intellectual development*), yaitu: a) *research quality*, 2) *citatipn per review*, 3) *employer review* dan 4) *outbound exchange student*.



Bagan 91. Peran Mahasiswa Menuju WCU

5. Strategi Pengembangan Intelektual Mahasiswa Menuju WCU

Rasionalisasi dari pengembangan intelektual mahasiswa menuju WCU, karena WCU identik dengan Mutu, sedangkan mutu perlu ditransformasikan menjadi Budaya Mutu dan mahasiswa menjadi salah satu subyek dan sasaran mutu, karena intelektualitas (: cln) mahasiswa diorientasikan untuk mutu, sedangkan intelektualitas yang bermutu butuh pengembangan dan pengembangan intelektual membutuhkan strategi. Adapun strategi pengembangan intelektual mahasiswa harus bersifat hirarkis, mulai dari: 1) strategi budaya mutu, 2) strategi pengembangan spft skill dan 3) strategi terfokus.

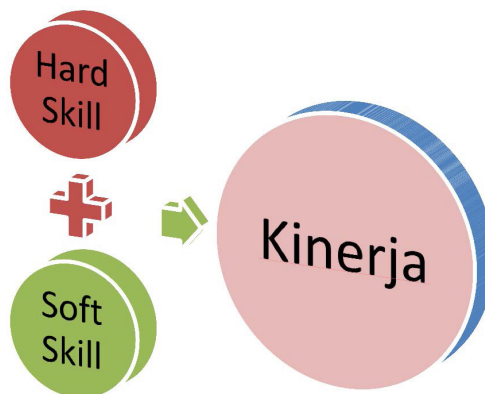


Bagan 92. Strategi Pengembangan

Pertama. Strategi budaya mutu dimulai dengan 1) *Quality Awareness* (Tahu, Paham dan Sadar Mutu). Dalam hal ini mahasiswa harus tahu posisi, peran dan

tugasnya sebagai civitas akademika untuk melakukan pengembangan kualitas kampus, 2) *Quality Commitment* (Komitmen terhadap Mutu). Mahasiswa dalam hal ini bisa mengarahkan atau diarahkan, diberdayakan atau memberdayakan diri, potensi dan membantu memecahkan masalah-masalah kualitas kampus dan lain-lain dan 3) *Quality Behavior* (Perilaku Mutu). mahasiswa selalu menampilkan perilaku mutu dengan menyiapkan/melaksanakan/menyelesaikan Belajar kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler tepat waktu/sungguh2/optimal berdaya saing tinggi dll.

Kedua. Strategi Pengembangan Soft Skill. Untuk menghasilkan kinerja yang bagus mahasiswa harus seimbang antara hard skill dan soft skill-nya. Hard skill berkaitan dengan penguasaan Iptek dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya (khusus sesuai profesi) sedangkan Soft skill berkaitan dengan Keterampilan intra-personal dan inter-personal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja (umum untuk semua profesi).

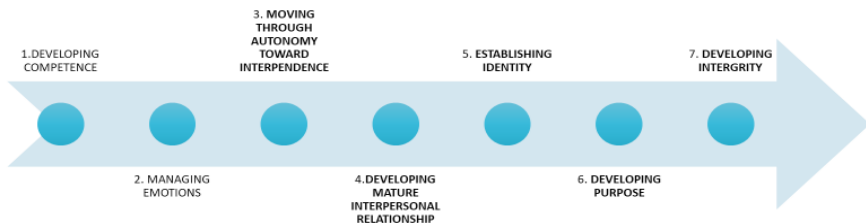


Bagan 93. Strategi Pengembangan Soft Skill

Menurut Artur W. Chickering) ada 7 tahapan untuk melakukan pengembangan Soft Skill. Ketujuh tahapan yang dimaksud adalah:

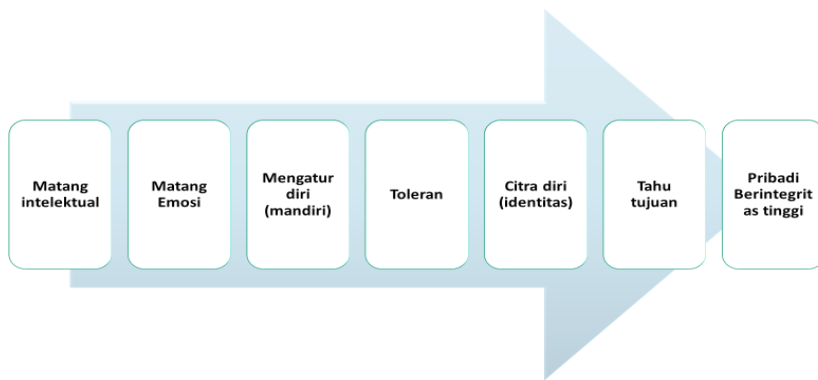
- 1) **DEVELOPING COMPETENCE**, yaitu : Mahasiswa membutuhkan keterampilan dan keyakinan diri di bidang intelektual, fisik, dan hubungan interpersonal.
- 2) **MANAGING EMOTIONS**, yaitu : Mahasiswa membutuhkan kesadaran terhadap berbagai macam perasaan dan rangsangan melalui observasi diri secara terpisah, sehingga mampu mengontrol emosi serta menyatukan perasaan secara selaras.

- 3) MOVING THROUGH AUTONOMY TOWARD INTERPENDENCE, yaitu : mahasiswa membutuhkan kemampuan memotivasi dan mengatur diri sendiri serta mengurangi jaminan perhatian (ketertarikan) dan persetujuan dari orang lain. Kemampuan mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai secara mandiri.
- 4) DEVELOPING MATURE INTERPERSONAL RELATIONSHIP yaitu: mahasiswa membutuhkan kemampuan untuk membangun sikap toleransi dan penerimaan antar sesama serta mematangkan potensi dirinya nenbangun hubungan yang harmonis.
- 5) ESTABLISHING IDENTITY Yaitu : Mahasiswa ingin memperoleh secara akurat dan realistis tentang gambaran dirinya serta membangun citra dan harga dirinya untuk merasa mampu, percaya diri, serta memiliki nilai.
- 6) DEVELOPING PURPOSE, yaitu : mahasiswa membutuhkan kejelasan tujuan akhir yang hendak dicapai dari pendidikan yang diperolehnya
- 7) DEVELOPING INTERGRITY yaitu : Mahasiswa membutuhkan kemampuan untuk mendefinisikan sistem nilai secara konsisten untuk membimbing aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai manifestasi tanggung jawab sosial



Bagan 94. Tahapan Pengembangan Soft Skill

Secara sederhana, 7 tahapan pengembangan soft skill mahasiswa bisa swecara sederhana yaitu 1) Matang intelektual, 2) Matang Emosi, 3) Mengatur diri (mandiri), 4) Toleran, 5) Citra diri (identitas), 6) Tahu tujuan dan 7) Pribadi Berintegritas tinggi sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut.



Bagan 95. Tahapan Pengemabngan Soft Skill

Ketiga. Strategi Terfokus. Strategi terfokus merupakan strategi teknis pengembangan intelektual. Ragamnya menghajatkan wadah/forum seperti berikut ini:

- 1) Pengembangan kompetensi dasar intelektual bisa melalui wadah **Pengembangan kompetensi dasar intelektual**: diskusi, lokakrya, sarasehan, simposium mono/multi/transdisiplin.
- 2) Berorganisasi yg berbasis pada prestasi dan scientific: basis kompetisi lokal/nasional/internasional, menulis, meneliti dan lain-lain.
- 3) UKM penalaran dan kepemimpinan: pengembangan & penalaran, riset & karya mahasiswa, pengbngn & pengkajian intelektual mhs, pers mhs, studi kemasyarakatan, pengembangan intelektual kepemimpinan mhs
- 4) Real penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat.

6. Penutup

Banyak jalan menuju Roma. Demikian juga banyak jalan menuju WCU. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan peran mahasiswa sebagai komponen universitas. Pengembangan intelektual mahasiswa bisa dilakukan mellaui strategi budaya mutu, pengembangan soft skill dan strategi terfokus.

Daftar References

- Albach, P. G. (2013). *The Cost and Benefit of The World Class Univerities*.
- Gaffar, M. F. (2012, Desember 15). *Strategi Jangka Panjang Menuju World Class University pada 2035*. Retrieved from Oke News: <https://news.okezone.com/read/2012/09/15/95/690218/strategi-jangka-panjang-menuju-world-class-university-pada-2035>
- Purbani, W. (2015). Menuju World Class University.
- Zulfa, U. (2017). *Entrepreneur University*. Cilacap: Ihya Media.



M. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa dan Negara dalam Konteks Pendidikan Tinggi

1. Pengantar

Fenomena *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) (Ervianto, 2015), Teror bom di Perancis (Khotimah, 2019), hingga beberapa gerakan radikalisme di Indonesia, sedikit banyak membuat kita sebagai salah satu warga bangsa/Negara di dunia, harus kembali melakukan evaluasi (*re-self evaluation*). Sebagai sebuah negara dan bangsa, Indonesia memiliki falsafah yang sangat agung, melebihi konsep melting-pot-nya Amerika sekalipun, yaitu Pancasila.

Sebagai sebuah falsafah, maka Pancasila menjadi ruh bagi setiap aktivitas kehidupan bernegara maupun berbangsa. Sehingga dalam konteks inilah maka Pancasila secara substansi (:bukan bentuk), nilai-nilainya harus terus dikembangkan dan dikontekstualisasikan. Termasuk juga dalam konteks penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Apalagi beberapa regulasi tentang pendidikan mulai dari UU Sisdiknas, UU Dikti maupun regulasi turunannya yang menjadi nilai instrumental Pancasila, pada point-point tertentu “berpeluang” menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga pada kesempatan ini, tulisan ini secara singkat akan memperbincangkan tentang bagaimana strategi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi.

Untuk membahas tema tersebut maka, setidaknya ada beberapa prblem area yang harus dibahas berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi, yaitu:

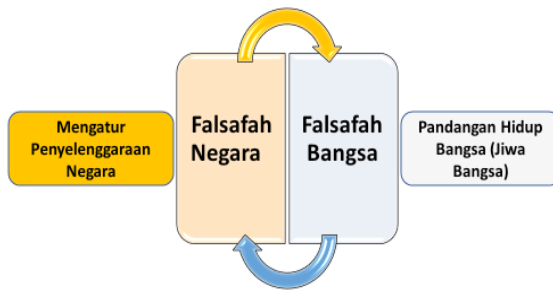
- a. Kedudukan Pancasila
- b. Dikti & Tantangan Globalisasi
- c. Relasi Pancasila, Dikti & Globalisasi
- d. Aktualisasi Nilai Pancasila
- e. Strategi Aktualisasi
- f. Indikator Keberhasilan



Bagan 96. Problem Area Aktualisasi Nilai Pancasila

2. Sekilas Tentang Pancasila: Falsafah Bangsa dan Negara

Sebagaimana diketahui bersama oleh bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan falsafah Negara (*philosofische grondslag*) dan bangsa. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki makna bahwa Pancasila merupakan dasar nilai yang mengatur penyelenggaraan Negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara dilakukan melalui Ketetapan MPRS N0.XX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sisi yang lain, Pancasila juga menjadi falsafah bangsa Indonesia. Artinya Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia atau jiwa seluruh rakyat Indonesia. Keberadaannya ditetapkan dengan Ketetapan MPR N0.II/MPR/1979.



Bagan 97. Kedudukan Pancasila

Sebagai falsafah negara, maka Pancasila merupakan suatu pilihan bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers adalah core philosophy bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dalam pengertian seperti ini nilai-nilai Pancasila merupakan das sollen bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai Pancasila, demikian pendapat Kaelan (Zabda, 2016). Artinya pula, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah suatu cita-cita hukum (Rechtsidee), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.

Demikian pula ketika Pancasila sebagai falsafah bangsa. Artinya Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri. Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara (Zabda, 2016)

Sebagai falsafah bangsa dan Negara, maka Pancasila menjadi acuan dalam setiap pemikiran dan Tindakan setiap warga bangsa dan negara ini. Apalagi jika merujuk kepada kesejarahannya, maka semestinya persoalan tentang bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila semestinya tidak mengalami kendala. Namun realitasnya berbeda. Negara dan bangsa ini mengalami banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perkembangan zaman, termasuk adalah tantangan

globalisasi. Oleh karenanya dengan Pancasila maka globalisasi bisa dihadapi dengan baik. Demikian juga dalam konteks dunia pendidikan tinggi.

3. Pendidikan Tinggi dan Tantangan Globalisasi

Kemunculan globalisasi yang mengakibatkan adanya *borderless world*, **Hiperkompetisi**, Akselerasi suksesi revolusi Iptek, **Globalisasi** barang dan jasa (: **pendidikan**), Tantangan sosial (Kependudukan: tenaga kerja), Pergeseran sistem Nilai (:**Pancasila**), *Alienasi*, *Stress*, *Ketegangan* antar kelompok, Ketergantungan pada obat terlarang dan sebagainya, diakui atau tidka juga memberi pengaruh terhadap pendidikan tinggi yang ada di dunia ini.

- a) Meningkatnya mobilitas mahasiswa dan dosen antar PT dunia
- b) Meningkatnya hubungan universitas antar PT di dunia
- c) Nasionalisme bergerak ke trans-nasional
- d) Pasar bebas pendidikan

Situasi-situasi ini harus segera ditangani oleh Perguruan Tingi (PT). PT harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

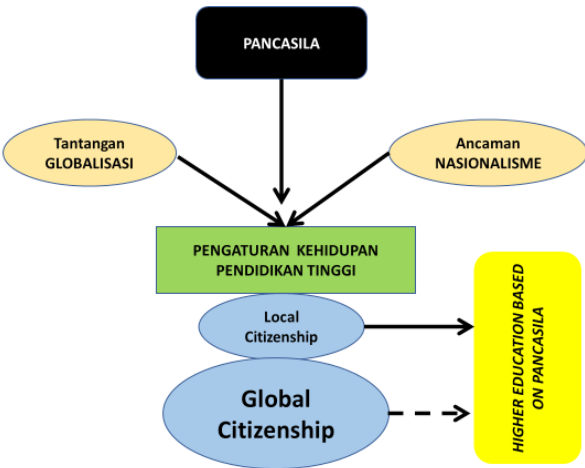
- a) PT harus meningkatkan mutu
- b) Penjaminan mutu berstandar internasional
- c) Internasionalisasi PT

Untuk melakukan usaha-usaha tersebut PT di Indonesia tidak boleh meninggalkan Pancasila.



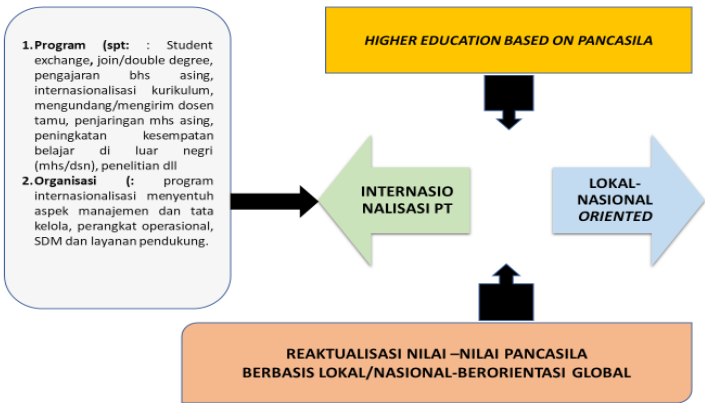
Bagan 98. Pendidikan Tinggi Dan Tantangan Globalisasi

- a. Pendidikan Tinggi
- b. Tantangan Globalisasi



Bagan 99. Relasi Pancasila-Pendidikan Tinggi Dalam Konteks Global

APA YANG HARUS DILAKUKAN PERGURUAN TINGGI?



Bagan 100. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Nasionalisme merupakan sebuah paham yang mana muncul tatkala kita diharuskan untuk memilih pada diri kita akan status kebangsaan. Secara umum nasionalisme muncul tatkala seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang mengharuskannya memilih hal yang berkenaan dengan kewarganegaraan, suatu kelompok, yang secara khayal ada keterikatan (Suhartono, 2007).

4. Strategi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Aktualisasi sebagai sebuah strategi masuk dalam khasanah pembentukan karakter, sedangkan pembentukan karakter ada dalam terminologi pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri mulai dikenalkan sejak tahun 1900- an oleh tokoh Thomas Lickona yang dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul *The Return of Character Education* dan kemudian disusul bukunya, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Artinya, pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral (Dalmeri, 2014).

Dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia di dalamnya mengandung nilai-nilai moral yang wajib tidak hanya diketahui tetapi diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter khas bagi setiap individu bangsa ini. Namun untuk melihat urgensi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan khususnya dalam kehidupan pendidikan tinggi, perlu disadari dulu tentang apa itu *Global Citizenship* dan *National Citizenship* dan bagaimana konsekuensinya bagi pendidikan tinggi di Indonesia.

a. Global Citizenship dan National Citizenship

Warga Negara dunia,

b. Konsekuensi Global Citizenship Bagi Pendidikan Tinggi

Melalui global citizenship, ini maka probabilitas hubungan antar warga dunia semakin terbuka. Menurut Dr. Arqom Kuswanjono, salah satu pengkaji di Sentra Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan UNAIR, menyatakan bahwa hubungan antar negara termasuk dalam konteks pendidikan, bisa ditengarai dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mobilitas mahasiswa dan dosen dalam program seperti student and staff exchange, sandwich dll
- 2) Meningkatnya hubungan universitas dengan universitas luar negeri
- 3) Cross-boarder mulai transparan
- 4) Nasionalisme bergerak menuju trans-nasional
- 5) Pasar bebas pendidikan

Di sisi lain, keterbukaan ini akan membawa konsekuensi bagi pendidikan tinggi seperti:

- 1) PT harus meningkatkan mutu (*quality*), agar tidak tergusur oleh PT Asing yang masuk ke Indonesia bahkan bisa menjadi tuan rumah.
- 2) Peningkatan *quality assurance* dengan menggunakan standar internasional juga bisa memberi dampak ‘semakin hilangnya’ ciri-ciri pendidikan nasional ala Ki Hajar Dewantara.
- 3) Lebih parah lagi, internasionalisasi pendidikan tinggi akan mampu mengikis jiwa nasionalisme.

2 item terakhir inilah yang menjadi titik kritis apakah Pancasila akan tetap bertahan sebagai falsafah dan ideology Indonesia, ataukah tergerus oleh “misi terselubung” Negara maju dan kuat lewat “baju” globalisasi. Di sinilah pentingnya me-reaktualisasikan nilai-nilai pancasila. Sehingga walaupun kita menjadi global citizenship tetapi berbasis local citizenship. Artinya orientasi kita boleh global supaya kita tidak tergilas oleh Negara atau bangsa lain di dunia ini, tetapi harus tetap berbasis pada nasionalisme local.

c. Strategi

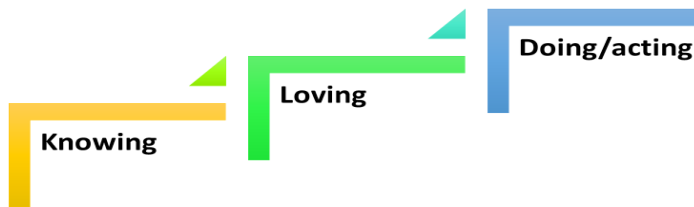


Bagan 101. Strategi Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di PT

Strategi Pemerintah Dalam Reaktualisasi Nilai Pancasila di PT

1. UU N0.12/2012 “Pendidikan Tinggi” psl 35 ayat (3) : “Kurikulum pendidikan tinggi **wajib** memuat : agama, **pancasila**, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia”
2. Pengembangan kurikulum berlandaskan pada: landasan **filosofis**, sosiologis, psikologis, teknologi dll

d. Indikator Keberhasilan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila



Bagan 102. Indikator Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Indikator Moral Knowing

- 1) Kesadaran moral (*moral awareness*),
- 2) Pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*)
- 3) Penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*)
- 4) Keberanian mengambil menentukan sikap (*decision making*)
- 5) Pengenalan diri (*self knowledge*) (Dalmeri, 2014)

Indikator Moral Loving/Feeling:

- 1) Kesadaran akan jati diri
- 2) Percaya diri (*self esteem*)
- 3) Kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*)
- 4) Cinta kebenaran (*loving the good*)
- 5) Pengendalian diri (*self control*)
- 6) Kerendahan hati (*humility*)

Indikator Moral Acting (Outcome) : Munculnya Karakter Diri (bukan Casing)

Berkaitan dengan strategi pembelajaran yang berkenaan dengan moral knowing lebih banyak belajar melalui sumber belajar dan nara sumber.

Pembelajaran moral loving akan terjadi pola saling memahami secara seimbang di antara peserta didik. Sedangkan pembelajaran moral doing akan lebih banyak menggunakan pendekatan individual melalui pendampingan, pemanfaatan potensi, dan peluang yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik. Ketiga strategi pembelajaran tersebut sebaiknya dirancang secara sistematis agar para peserta didik dapat memanfaatkan segenap nilai-nilai dan moral yang sesuai dengan potensi dan peluang yang tersedia di lingkungan dan kehidupannya sosialnya (Dalmeri, 2014)

e. Penutup

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya diperlukan aktualisasi yang komprehensif pada semua tataran agar menghantarkan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara yang maju dan bermanfaat bagi semuanya.

Daftar References

- Dalmeri. (2014). Pendidikan untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona Dalam Educating For Character. *Al Ulum, Volume. 14 Nomor 1, Juni 2014*, <https://media.neliti.com/media/publications/217440-none-3bd0f990.pdf>, 269-288.
- Ervianto, T. (2015, Mei 21). Membedah ISIS. *detikNews*. Jakarta: <https://news.detik.com/kolom/d-2920955/membedah-isis>.
- Khotimah, S. (2019, mEI 27). Polisi Perancis Berhasil Tangkap Tersangka Teror Bom Lyon. *Liputan 6*. Paris, Perancis: <https://www.liputan6.com/global/read/3977419/polisi-prancis-berhasil-tangkap-tersangka-teror-bom-lyon>.
- Suhartono, G. (2007). Nasionalisme Vs Globalisasi: 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. *DIMENSIA, Volume I, No. 1, Maret 2007, journal.uny.ac.id*, 1-11.
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 26, No.2, Desember 2016, ISSN:1412-3835*, 106-114.



N. Bidang Penalaran dan Keilmuaan Mahasiswa

1. Pendahuluan

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, undang-undang yang mengatur pendidikan muncul pertama di tahun 1989 melalui UUSPN (undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini kemudian direvisi dan muncul dalam UU Sisdiknas (UU Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003. Kedua undang-undang tersebut mengatur secara keseluruhan sistem Pendidikan nasional (Indonesia) yang berkaitan dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Pada tahun 2012 jenjang Pendidikan tinggi baru memperoleh undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau UU Dikti melalui UU Nomor 12 tahun 2012. Undang-undang ini kemudian diturunkan dalam bentuk regulasi yang levelnya di bawahnya. Salah satu regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

2. Otonomi Perguruan Tinggi

Dalam UU Pendidikan Tinggi ada dua dimensi Perguruan Tinggi (PT) yang seolah-olah saling bertentangan, yaitu dimensi akademik dan non akademik. Pada aspek pertama, yaitu akademik, sesuai pasal 64 ayat (2), Ruang Lingkup Akademik meliputi aspek :

- a. **Pendidikan dan pengajaran:** kurikulum, pembelajaran dan penilaian hasil belajar
- b. **Penelitian dan pengembangan:** penelitian dan publikasi ilmiah
- c. **Pengabdian pada masyarakat:** aktivitas & kerjasama dengan berbagai pihak

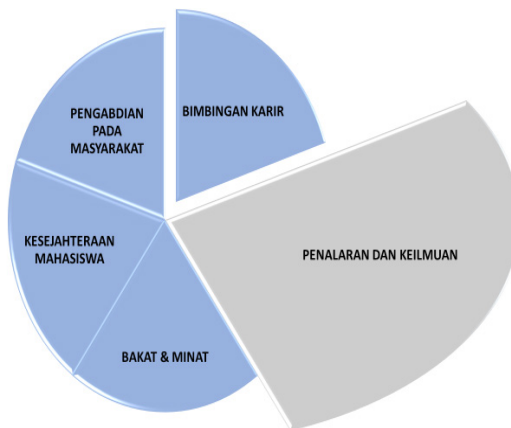
Ketiga aspek ini sering dikenal sebagai Tri Dharma PT. sedangkan aspek non akademiknya sesuai lanjutan pasal tersebut pada ayat (3) meliputi

- a. Organisasi
- b. Keuangan
- c. **Kemahasiswaan**⁶
- d. Ketenagaan
- e. Sarana prasarana

Baik pada dimensi akademik maupun non akademik, PT diberi otonomi. Hanya pada PT swasta semuanya diatur lebih lanjut dalam peraturan badan penyelenggara baik yang berbentuk perkumpulan maupun Yayasan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Dimensi Akademik dalam Bidang Kemahasiswaan

Sesuai tema MOKA kali ini maka akan dilihat dimensi akademik yang terdapat dalam bidang kemahasiswaan yang jika merujuk pada UU Dikti No 12 Tahun 2012 merupakan aspek non akademik. Bidang kemahasiswaan sendiri meliputi aspek: bimbingan karir, Bakat dan minat, kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat serta penalaran dan keilmuan. Kesemuanya aspek bidang kemahasiswaan yang berdimensi akademik adalah penalaran dan keilmuan.

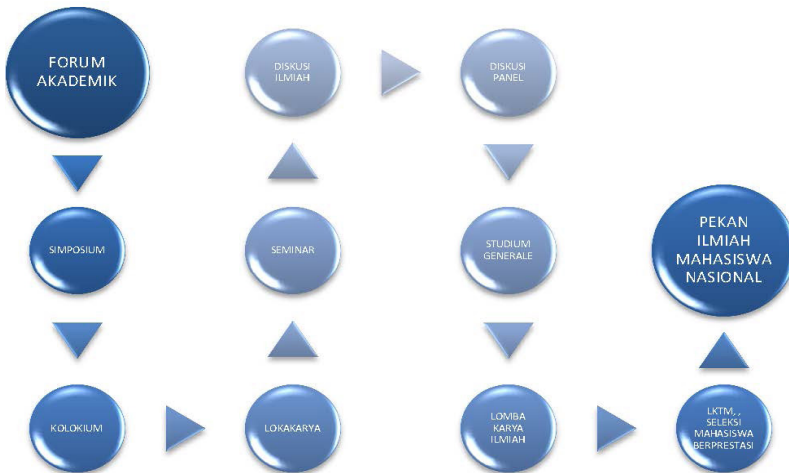


Bagan 103. Aspek Bidang Kemahasiswaan

Yang dimaksud dengan bidang penalaran dan kemahasiswaan adalah Merupakan bidang pembinaan/pengembangan kemahasiswaan yang **bertujuan** untuk **merangsang, mengembangkan** kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, mendorong mahasiswa agar mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah secara profesional. Kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan ini bisa berbentuk:

- a. Forum akademik
- b. Symposium
- c. Kolokium
- d. Lokakarya
- e. Seminar

- f. Diskusi ilmiah
- g. Lomba karya ilmiah
- h. Stadium general
- i. Diskusi panel
- j. LKTM: seleksi mahasiswa berprestasi
- k. Pekan ilmiah mahasiswa nasional



Bagan 104. Ragam Bentuk Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Penjelasan dari berbagai bentuk kegiatan penalaran dan keilmuan dalam bidang kemahasiswaan adalah:

- a. **FORUM AKADEMIK:** Pertemuan sekelompok warga sivitas akademika untuk membahas topik tertentu secara ilmiah dengan tujuan menumbuhkan dan memupuk kemampuan sikap ilmiah dan sikap profesional melalui pemikiran yang objektif.
- b. **Simposium** merupakan suatu pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan.
- c. **Kolokium** adalah hasil modifikasi dari metoda diskusi panel yang melibatkan nara sumber dan peserta
- d. **Lokakarya** merupakan temu karya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metoda yang menghasilkan produk tertentu.

- e. Seminar merupakan pertemuan ilmiah suatu kelompok intelektual yang dengan sistematis membahas suatu topik di bawah pimpinan seorang ahli yang berwewenang dalam bidang tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan.
- f. Diskusi Ilmiah adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
- g. Diskusi Panel adalah suatu pembicaraan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh panelis mengenai suatu topik tertentu.
- h. Studium Generale (kuliah umum) merupakan suatu bentuk atau metoda penyampaian informasi secara lisan tentang suatu topik tertentu oleh seorang yang berkualifikasi, dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas wawasan ilmiah serta mengembangkan sikap interdisipliner tentang suatu bidang ilmu kepada para ilmuwan atau calon ilmuwan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dan berbeda dengan penceramah.
- i. LKTM, LKIM, PKM dan Seleksi mahasiswa berprestasi adalah kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa melalui penulisan karya-karya ilmiah yang diorientasikan pada temuan dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan menemukan karya-karya ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu, teknologi maupun seni.
- j. Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa (LKIM), Program kreativitas Mahasiswa (PKM).
- k. Lomba Karya Ilmiah adalah program/kegiatan yang dilakukan untuk dapat melatih dan meningkatkan kemampuan serta sikap ilmiah mahasiswa.
- l. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Pekan Mahasiswa Daerah (PIMDA) dan Karya Alternatif Mahasiswa (KAM) adalah kegiatan kemahasiswaan yang mengembangkan dan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keterampilan tambahan sebagai alternatif untuk profesi yang digelutinya.

4. Penutup

PT memiliki kewajiban untuk membentuk mahasiswa sebagai pribadi yang seimbang sesuai tujuan pendidikan tinggi dan nasional. Oleh karenanya PT harus menyeimbangkan layanan pendidikan di bidang akademik dan non akademik, salah satunya adalah bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan sebagai bidang non akademik ternyata memiliki dimensi akademik berupa kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa. Jika berbagai bentuk kegiatan penalaran dan keilmuan tadi disinergikan dengan kegiatan akademik dalam pengertian sesungguhnya maka PT akan berhasil menjadikan lulusannya sebagai pribadi-pribadi yang seimbang.

Daftar Referensi

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



O. Pembelajaran di Perguruan Tinggi Era Disrupsi Teknologi

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan Revolusi Industri 4.0 atau yang disebut disrupsi teknologi yang “memaksa” semua elemen yang ada di dunia ini untuk cepat merespon, mengadaptasi dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Tidak terkecuali juga dunia pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi (PT)-nya juga dipaksa untuk segera melakukan respon, mengadaptasikan dan mengembangkan fungsi-fungsi akademik dan non akademiknya. Sehingga tidak heran dalam rangka memenuhi “pemaksaan” tersebut, banyak regulasi yang dikeluarkan, banyak infrastruktur yang harus disiapkan, banyak sumber daya yang harus dikerahkan, banyak penyiapan-penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang harus disiapkan dan masih banyak yang lainnya, karena tanpa melakukan itu maka PT akan Ditinggalkan Masyarakat dan Kehilangan Fungsi Utamanya sebagai pengembangan peradaban bangsa (UU Dikti pasal 4).

Pada pasal 4 UU Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012 (RI, 2012) disebutkan:

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Fungsi-fungsi Pendidikan tinggi ini kemudian diimplementasikan oleh unit Pendidikan tinggi yaitu PT melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: 1) Pendidikan dan pembelajaran, 2) penelitian dan 3) pengabdian pada masyarakat. Pada dharma yang pertama yaitu melaksanakan dharma pendidikan; pembelajaran, maka PT harus mengikuti ketentuan yang ada dalam regulasi berikutnya yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau yang disingkat SN Dikti. SN Dikti ini berisi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh PT dan dilampauinya. Dalam SN Dikti ini diatur ketentuan minimal penyelenggaraan Tri Dharma PT, yang berjumlah 24 standar, yang merambah di masing-masing Dharma PT 8 standar, yaitu 8 standar Pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian pada masyarakat (Kemenristekdikti, 2015)

Selain diatur tentang standar-standar Pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua PT di Indonesiam, regulasi ini juga memberikan batasan atau definisi khusus tentang ap aitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (pasal 1 ayat 10. SN- Dikti 44/15). Dari batasan pembelajaran ini ada tiga komponen mutlak yang harus ada, yaitu dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Salah satu sumber belajar yang harus disediakan oleh dosen atau PT adalah Buku Ajar. Artinya penyusunan dan penerbitan buku ajar di PT merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk hard cofi, maupun soft copy, dan bentuk dan sumber lain dari sekian banyaknya sumber belajar sesuai tuntutan pembelajaran 4.0.

Berdasarkan hal ini sekaligus untuk melaksanakan pemenuhan akan buku ajar, maka diperlukan perubahan mindset dan komitmen kuat seluruh komponen

PT untuk mewujudkannya. Salah satu pemenuhan tuntutan itu adalah penyiapan SDM khususnya dosen melalui pelatihan dan sejenisnya, khususnya dalam konteks ini adalah penyusun buku ajar yang dimulai dari pemahaman tentang pembelajaran di PT era 4.0. sehingga pada sesi pertama ini, pembicaraan akan difokuskan pada: 1) tuntutan pembelajaran abad 21, 2) pembelajaran di PT Abad 21.

2. Tuntutan pembelajaran abad 21

Setidaknya ada 3 pihak yang perlu dicermati untuk memahami pembelajaran di Abad 21 dan khususnya pembelajaran era 4.0. ketiga pihak yang dimaksud adalah mahasiswa, dosen dan pembelajarannya sendiri.



Bagan 105. Aspek Kunci Pembelajaran 4.0

Pertama. Aspek Mahasiswa. Mahasiswa sebagai pihak pertama dan utama yang akan dilayani maupun yang akan menjadi subyek pembelajaran, pada masa ini memiliki karakteristik unik, yaitu:

- Mahasiswa adalah **generasi milenial dan dekat** (cenderung memiliki **karakteristik sama**) dengan anak *Digital Native*.
- Mahasiswa memiliki **Keterampilan belajar dan inovasi: berpikir kritis dan pemecahan masalah** dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif.
- Mahasiswa memiliki **Keahlian literasi digital**: literasi media baru dan literasi ICT.
- Memiliki Kecakapan hidup dan karir**: memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi

antarbudaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggungjawab.

Karakteristik ini berimplikasi pada layanan Pendidikan yang berbeda dengan layanan Pendidikan pada periode-periode sebelumnya, di mana ICT dan bahkan kecerdasan artifial menjadi mutlak diperlukan dalam melakukan interaksi pembelajaran, termasuk bahan ajar berbasis IT.

Kedua. Aspek Dosen. Dosen karena fungsinya sebagai pihak yang akan memberikan layanan jasa Pendidikan tinggi kepada mahasiswa, maka dosen di era ini (dosen 4.0) juga harus menyesuaikan dengan tipikal mahasiswa 4.0. artinya tipikal dosen 4.0 adalah:

- a. Dosen lebih banyak berperan sebagai motivator, inspirator (: selain fasilitator tentunya), *course manager*, **pengembang bahan ajar/desain instructional, dan ahli media.**

Pada saat dosen berperan sebagai motivator maka dosen harus mampu menumbuhkan munculnya ketrampilan mental (*mental skill*) dasar berupa attitude (sikap mahasiswa) dan motivasi mahasiswa sebagai pihak yang belajar (Jack J. Lesyk, Nine mental skill for succes Retrieved from Nine mental skill for succes: <https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview>, 2015). Ketrampilan mental ini sangat penting dimiliki siswa yang ditumbuhkan oleh dosen, karena era 4.0 banyak hal yang terdisrupsi oleh teknologi dan menimbulkan tekanan baru, tidak terkecuali adalah mahasiswa.

Dalam hal ini, sikap mental (sebagai ketrampilan mental level 1) yang perlu dibangun dosen untuk mahasiswa adalah sikap yang antara lain: 1) sadari bahwa sikap adalah pilihan, b) pilihlah sikap yang dominan positif seperti memilih belajar dengan baik, emanfaatkan peluang di era 4.0 daripada menjadi pecundang, 3) mengutamakan mengejar keunggulan, bukan kesempurnaan dan menyadari bahwa diri sendiri, dan orang lain juga tidaklah sempurna. Artinya tanamkan pada mahasiswa agar mengutamakan mengejar keunggulan pembelajaran di era 4.0 daripada mengeluh, menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi ini. Sedangkan pada ketrampilan mental elvel 2, yaitu motivasi, maka dosen bisa menanamkan pada mahasiswa bahwa orang yang sukses adalah orang yang: a) sadar akan penghargaan dan manfaat yang diharapkan melalui aktivitas partisipasi diri, b) mampu bertahan dengan tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit bahkan

ketika imbalan dan manfaat tidak segera datang dan c) sadari bahwa manfaat berasal dari partisipasi diri bukan hasilnya.

Jika kedua ketrampilan mental dasar tadi sudah berada dalam diri mahasiswa, berarti dosen sudah mampu berperan sebagai motivator sekaligus sebagai inspirator jika kedua ketrampilan mental tersebut juga mandarah daging dalam diri dosen 4.0 dan dilihat serta diikuti atau diinspirasi oleh mahasiswa 4.0.

Peran ketiga dari dosen 4.0 adalah sebagai *course manager*. Sebagai *Course manager* atau manager pelatihan adalah spesialis pengajar utama, yang bertugas untuk membangun kontek pelatihan yang dipimpin instruktur dan online serta memastikan integritas instruksional semua program dan kursus yang dikembangkan oleh perancang instruksional (Urbanhire, 2016). Dalam konteks ini, dosen harus bisa membangun konten-konten pembelajaran serta memastikan adanya integrasi dari semua konten pembelajaran sesuai karakteristik 4.0.

Pada peran sebagai pengembang bahan ajar, maka dosen harus bisa mengembangkan bahan ajar yang dibutuhkan untuk layanan perkualiahannya, salah satunya bahan ajar adalah buku ajar yang didesain sedemikian rupa sesuai kebutuhan 4.0 dengan menggunakan IT sehingga pada posisi ini sekaligus dosen adalah ahli media.

- b. **Minat baca tinggi.** Minat baca yang tinggi merupakan ciri dosen 4.0. hal ini menjadi penting karena bagaimanapun dosen juga ditempatkan mahasiswa sebaagi salah satu sumber belajarnya. Tanpa kemampuan membaca yang tinggi maka pengetahuan akan kurang dan berimplikasi pada rendahnya kemampuan memberikan layanan informasi kepada mahasiswa.

Jika pada tahun 2018, kementrian Ristekdikti menyayangkan masih rendahnya minat baca dosen Indonesia yang menyebabkan rendahnya jumlah penelitian di Indonesia. Padahl dengan membaca maka akan meningkatkan minat menulis. Sebab, menulis ini masih jarang. Tahun 2015 saja, tulisan orang Indonesia yang dimuat di jurnal hanya 5.499, sementara Malaysia 25.530, Singapura 17.000, dan Thailand 12.000," ungkap Ali Ghuffron di Unika Atmajaya Jakarta saat Pelaksanaan Hibah Buku Koleksi Ben dan Nafsiah Mboi.

Baca selengkapnya di artikel “Minat Baca Rendah Sebabkan Rendahnya Jumlah Penelitian di Indonesia” (Primastika, 2018). Inilah pentingnya dosen 4.0 harus memiliki minat baca tinggi sehingga kemampaun meneliti dan menulisnya juga tinggi, dan jika ini terwujud maka dosen juga menjadi sumber belajar yang sangat valid bagi mahasiswanya.

- c. Memiliki kemampuan menulis. Sesuai point b, maka dosen yang bisa menulis adalah didahului oleh minat baca yang tinggi, kemudian penelitian tinggi dan menulisnya juga tinggi.
- d. **Kreatif dan inovatif** dalam mengembangkan sumber belajar (termasuk **buku ajar**). Point b dan c menjadi syarat mutlak agar dosen bisa produktif untuk mengembangkan sumber belajar, seperti buku ajar dalam konteks ini. Mampu melakukan **transformasi sosial**. Transformasi sosial pada awalnya dipahami sebagai suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri (Septiarti, 1994). Intinya transformasi sosial adalah proses perubahan masyarakat dari satu fase ke fase yang lainnya. Sejalan dengan situasi sosial yang semakin kompleks di era 4.0, maka dosen tidak hanya bertugas langsung memberikan pelayanan kepada mahasiswa, tetapi dosen juga harus mampu melakukan transformasi sosial masyarakatnya baik melalui perpanjangan tangan mahasiswa, maupun terjun langsung melaksanakan berbagai macam bentuk pengabdian pada masyarakat.

Ketiga. Aspek Peristiwa Pembelajaran. Peristiwa pembelajaran yang ditandai dengan adanya interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam pembelajaran 4.0 juga memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus yang dimaksud antara lain:

- 1) **Berpusat pada mahasiswa.** Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik masih dipertahankan di era 4.0, apalagi era 4.0 menempatkan individu sebagai aspek yang mandiri yang harus mampu bertahan, bersaing dan menghadapi tekanan secara mandiri, bukan bergnantung kepada komunitas atau pihak lainnya. Mahasiswa harus mampu mengeksplor sumber belajar yang sangat melimpah utamanya dari berbagai tautan di internet yang relative kaya, melimpah, dan selalu up to date.
- 2) **Multi arah.** Interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar harus multi arah, tidak cukup dua arah, sehingga croscek kebenaran yang dihasilkan memenuhi derajat kevalidan yang semakin tinggi.

- 3) **Peserta didik** harus **lebih aktif**
- 4) **kolaboratif dan kooperatif**
- 5) *critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation menuju interaksi pembelajaran yang Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.*

3. Pembelajaran di PT abad 21

Pembelajaran di Perguruan Tinggi secara umum harus mengikuti karakteriik dan tuntutan pembelajaran abd 21. Dalam konteks Indonesia, karakteristik pembelajarannya baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang proses diupayakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. PT diharapkan untuk meningkatkan kemampuan inovasinya di Era Revolusi 4.0 melalui pengembangan dan mengajarkan literasi baru dengan melakukan re-orientasi kurikulum. Artinya PT melalui pembelajaran dalam teknologi informasi, 'internet of things', 'big data' dan komputerisasi. Ini akan menghasilkan lulusan terampil dalam aspek literas data, literasi teknologi dan literasi manusia. Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem pembelajaran baru, yaitu 'cyber university' yang berbasis 'online learning, 2) mewajibkan mata kuliah 'entrepreneurship' dan 'internship' dan 3) mengembangkan kepemimpinan dan Kerjasama dalam tim lewat ekstra kurikuler (Kemenristekdikti, 2018).
2. PT disarankan punya unit khusus layanan *life-long learning*
3. **PT melakukan pembelajaran online (daring) maupun Hybrid/Blended Learning, Online.**

Jika pembelajaran online dilakukan penuh melalui modus interaksi di dunia maya, maka kalau blended learning merupakan kolaborasi antara online dan offline. Program model blended learning mencakup beberapa bentuk alat pembelajaran, seperti real-time kolaborasi perangkat lunak, program berbasis web online, dan elektronik yang mendukung sistem kinerja dalam tugas lingkungan belajar, dan pengetahuan manajemen sistem. Model Blended learning berisi berbagai aktivitas kegiatan, termasuk belajar tatap muka, e-learning, dan kegiatan belajar mandiri. Jadi, Blended learning sebagai model campuran pembelajaran yang dipimpin instruktur

tradisional, pembelajaran online secara synchronous, belajar mandiri dengan asynchronous, dan pelatihan terstruktur berbasis tugas dari seorang dosen atau mentor.

Model blended learnings sebagai salah satu modus penyelenggaraan pembelajaran di PT di era 4.0, memiliki dua model, yaitu 1) felex Calssroom dan 2) flipped Classroom. Model pertama mensyaratkan bahwa kuliah online tetap dilakukan di kelas dengan pengawasan langsung dari dosen, demikian juga dnegan Latihan dan responsi juga dilakukan di ruang kelas dan dipantau oleh dosen. Sedangkan pada model kedua, kuliah online dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa tetapi tugas, responsi dan lain-lain masih dipantau oleh dosen.

Pendapat lain, seperti pendapatnya Haughey, membagi model pembelajaran Blended Learning menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Model Web course* adalah penggunaan Internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui Internet.
- 2) *Model Web centric course* adalah penggunaan Internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi disampaikan melalui Internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini pendidik bisa memberikan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pendidik lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui Internet tersebut.
- 3) *Model web enhanced course* adalah pemanfaatan Internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu peran pendidik dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di Internet, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui Internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. (Hendarita, 2017).

PT yang melaksanakan pembelajaran blended sebagai alternative model pembelajaran 4.0 harus memenuhi beberapa persyaratan, agar proses blendednya efektif. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- 1) Adanya unit administratif dengan beberapa tingkat otoritas, memiliki kerja sama dengan unit yang lain
- 2) memiliki staf yang terlatih
- 3) Dana yang memadai (Tau, 2006)

Selain syarat, blended learning juga memiliki 5 kunci proses pembelajaran berlangsung, seperti:

- 1) *Live Event*, pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tapi tempat berbeda.
- 2) *Self-Paced Learning*, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (self-paced learning) yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja, dimana saja secara online.
- 3) *Collaboration*, mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pendidik peserta didik maupun kolaborasi antar peserta didik.
- 4) *Assessment*, pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis assessmen online dan offline baik yang bersifat tes maupun non-tes (proyek kelas).
- 5) *Performance Support Materials*, pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, dapat diakses oleh peserta didik baik secara offline maupun online (Hendarita, 2017).

Dalam melaksanakan pembelajaran blended, menurut Ramsay mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Seeking of information*. Mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten dan kejelasan akademis. Pendidik atau fasilitator berperan memberi masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien.
- 2) *Acquisition of information*. Peserta didik secara individu maupun secara kelompok kooperatif-kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran peserta didik, kemudian menginterpretasikan informasi/ pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu

mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas

- 3) *Synthesizing of knowledge*, mengkonstruksi/merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. (Hendarita, 2017).

Ketika semua hal yang semesti dipenuhi dan melekat pada proses pembelajaran belnded, maka akan menyebabkan kualitas nya terjamin. Adapun

Indikator Kualitas Pembelajaran Daring adalah:

- 1) **Dari sisi Layanan akademik:** a) kualitas bahan ajar yg self-instructional (: dengan membaca masih seakan-akan sedang mengikuti kuliah), b) bantuan/ bimbingan belajar, bimbingan/supervisi praktik/kurikulum, evaluasi hasil belajar
- 2) **Layanan administrasi; clerical:** manajemen/tata kelola profesional

4. Penutup

Dosen saat ini sebagai generasi Digital Imigrant tetap harus menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran era digital, karena dosen harus memfasilitasi pembentukan kemandirian mahasiswa. Salah satu bentuk fasilitasi dosen adalah penyediaan buku ajar. Jadi, membuat buku ajar merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai dosen. Menulis buku ibarat mengukir ilmu di atas batu.

Daftar References

- Hendarita, (. (2017). Model Pembelajaran Blended Learning dengan Media Blog. https://sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif/assets/file_upload/pengantar/pdf/pengantar_3.pdf.
- Jack J. Lesyk, P. (2015). *Nine mental skill for succes* Retrieved from *Nine mental skill for succes*: <https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview>. Retrieved from <https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview>
- Kemenristekdikti. (2015). *Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

- Kemenristekdikti, B. K. (2018, September 20). *SIARAN PERS: No : 175/SP/HM/BKKP/IX/2018*. Retrieved from Kemenristekdikti: kemenristekdikti.go.id
- Primastika, W. (2018, Agustus 6). *Minat Baca Rendah Sebabkan Jumlah Penelitian di Indonessi Rendah*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/minat-baca-rendah-sebabkan-rendahnya-jumlah-penelitian-di-indonesia-cSYR>
- RI, P. (2012, Agustus 10). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Septiarti, S. W. (1994). Trasnformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Struktural-Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis. *CakrawaJaPendlllkan Nomor3, TahunXUI, November1994*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/cpl/article/view/9153/pdf>, 127-139.
- Urbanhire. (2016, September 30). *Training Manager Job Description Template*. Retrieved from Urbanhire: <https://resources.urbanhire.com/training-manager-job-description/>



P. Penyusunan Buku Ajar di Perguruan Tinggi

1. Pendahuluan

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama: mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (UU Guru dan Dosen, 2005) (RI, 2005). Dalam kaitannya dengan kompetensi dosen berbasis Ilmu, maka dosen harus:

- a. yang memiliki kemampuan untuk mewarnai pengembangan budaya akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran di kampus
- b. karyanya menjadi referensi pengembangan dan penerapan dlm Tri Dharma PT maupun manajemen PT.

Dua hal ini memiliki hubungan yang **erat dengan upaya membangun** budaya akademik yang harus dilakukan di kampusnya., yang dilakukan melalui kegiatan penelitian sebagai jantungnya budaya akademik di kampus. Salah satu luaran penelitian adalah buku ajar. Sehingga keberadaan Buku Ajar sesungguhnya berkaitan dengan tanggungjawab individu (kepemilikan ilmu, karier, kesejahteraan) dan Lembaga (kinerja Lembaga, keberkahan Lembaga).

Sedemikian pentingnya keberadaan buku ajar bagi Lembaga maupun bagi individu dosen, maka pemerintah melihat ini sebagai sebuah realitas yang harus dipercepat kemungkinan ragam dan jumlah keberadaannya. Sehingga untuk meningkatkan budaya menulis Buku Ajar di kalangan dosen, kemudian pemerintah telah memfasilitasi dengan program Hibah Buku Ajar.

Menurut Prof. Endang Fauziati, sasaran program Hibah Buku Ajar adalah: a) **meningkatkan produktivitas keilmuan** dalam proses pembelajaran, b) **meningkatkan kualitas buku ajar** melalui *expert review*, baik dari kalangan internal (PT setempat) maupun eksternal, c) **meningkatkan jumlah buku ajar** yang diterbitkan dengan ISBN dan d) **optimalisasi pemenuhan sarana pembelajaran**.

Jika keempat sasaran ini tercapai, maka budaya Menyusun buku ajar di kalangan dosen semakin tinggi dan budaya menulis di kalangan dosen juga semakin tinggi. Artinya jumlah sumber belajar di era 4.0 akan semakin kaya.

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan untuk menyusun buku ajar adalah mengetahui landasan hukum, ragam, karakteristik dan seluk beluk pembuatannya. Oleh karena itu pada tulisan ini akan dibahas lebih teknis hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan buku ajar di PT, yaitu: a) kebijakan dasar, b) buku ajar dan ketentuannya serta c) strategi penyusunan buku ajar.

2. Kebijakan Dasar Penyusunan Buku Ajar di Perguruan Tinggi

a. Buku yang diakui Dikti

Perbincangan Buku Ajar dimulai dengan terlebih dahulu mengidentifikasi buku-buku apa saja yang bisa diakui oleh Dikti sebagai karya dosen. Berdasarkan sosialisasi hibah buku ajar, maka buku-buku yang diakui oleh Dikti setidaknya ada empat macam, yaitu buku referensi, buku monograf, buku ajar dan buku diktat.

Pertama Buku Referensi. Buku referensi adalah buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu dari kompetensi penulis, yang mengandung nilai kebaruan, data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulisnya. Buku referensi memiliki ciri khusus, yaitu: 1) (Tidak tentu) menjelaskan tujuan instruksional, latihan/umpan balik, 2) Disusun secara linear berdasarkan logika bidang IP yang dibahas, 3) Basis utama hasil penelitian bidang ilmu penulis, 4) Gaya bahasa yang termuat dalam buku

tidak komunikatif, padat, dan formal dan 5) Sasaran pasar umum: dosen, mahasiswa, peneliti, masyarakat dan lain-lain.

Kedua Buku Monograf. Buku MONOGRAF Adalah Buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Ketiga Buku Ajar. akan dijelaskan tersendiri dalam sub bab ini.

Keempat Buku Diktat. Buku diktat adalah buku yang memuat penerapan ilmu secara khusus untuk suatu mata kuliah yang disusun oleh pengampunya untuk seluruh mahasiswanya. Bentuknya seperti Diktat/modul/LKS

b. Bahan Ajar

Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran (Sadjati, 2008: 3). Bahan ajar adalah segala bentuk obyek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ (Dikti, 2018).

Pengertian buku ajar lain juga bisa disimak dari pendapat: 1) Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan dan 2) Buku ajar adalah suatu media bagi penyajian suatu subyek secara sistematis bagi keperluan mengajar dan belajar sehingga bermanfaat untuk pengkonstruksian suatu situasi belajar secara spesifik (DP2M Dikti, 2010).

Terlepas dari ragam definisi mengenai buku ajar, Dosen yang menyusun bahan ajar akan memiliki banyak manfaat, diantaranya: 1) Menghemat waktu, 2) Merubah peran dosen dari pengajar menjadi fasilitator dan 3) Pembelajaran lebih efektif efisien. Demikian juga mahasiswa sebagai pihak yang difasilitasi oleh bahan ajar maka otomatis akan memetic banyak manfaat, diantaranya: 1) Bisa belajar mandiri, 2) Belajar bisa kapan saja

dan di mana saja, 3) Menfasilitasi Belajar sesuai kecepatan sendiri dan 4) Menfasilitasi belajar sesuai urutan sendiri.

Adapun **Karakteristik Buku Ajar adalah:**

- 1) Dasar menulis adalah Silabus/RPS-RPM
- 2) Sasaran utama = mahasiswa untuk belajar
- 3) Menjelaskan tujuan instruksional
- 4) Alur buku sesuai dengan silabus RP, dengan ilustrasi, contoh atau studikasuk, dan soal latihan untuk umpan balik
- 5) Dipergunakan oleh dosen dan mahasiwa saat PBM di kelas
- 6) Dapat dipergunakan secara mandiri (melatih diri mahasiswa dalam pemahaman kompetensi terkait)
- 7) Buku ajar ini diterbitkan dan disebarluaskan oleh penerbit nasional dan ber-ISBN
- 8) Gaya Bahasa (sebaiknya) semi formal dan komunikatif agar mudah dipahami
- 9) Kepadatan buku berdasarkan kebutuhan belajar mahasiswa

Selain memiliki karakteristik, buku ajar jika dilihat dari sumber utama yang akan digunakan untuk Menyusun buku ajar ada dua, yaitu: 1) buku ajar berbasis kajian teori dan 2) buku ajar berbasis hasil penelitian. Buku Ajar Berbasis Kajian Teoretis adalah buku ajar yang dikembangkan dari kegiatan mengkaji berbagai referensi. Jenis: buku pegangan kuliah/buku ajar, modul, diktat. Sedangkan buku ajar berbasis hasil penelitian adalah buku ajar yang dikembangkan dari hasil penelitian (bidang terkait) yang sesuai dengan salah satu materi dalam RPS

Dalam penyusunannya buku ajar bisa menggunakan sumbernua dari: 1) Buku teks sebelumnya yang relevan, 2) Buku referensi, 3) Jurnal penelitian atau hasil penelitian yang tertulis pada jurnal penelitian, 4) Laporan hasil penelitian yang relevan dan 4) Berita yang memuat kasus yang bisa menjadi contoh kasus yang dibahas.

3. Buku Ajar dan Ketentuannya

Sistematika Buku Ajar (VERSI DIKTI, 2019) adalah:

- 1) Prakata

- 2) Daftar Isi
- 3) Batang Tubuh: Bab-Bab dengan tujuan instruksionalnya
- 4) Daftar Pustaka
- 5) Glosarium
- 6) Indeks (sebaiknya)

Adapun dalam konteks hibah Dikti maka ada ketentuan khusus mengenai buku ajar, yaitu:

- 1) Harus menggunakan sistem pengaturan buku otomatis, mencakup: daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, indeks dan glosarium
- 2) Pengaturan kutipan dan daftar Pustaka wajib menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, Refworks dan end note.

Sedangkan **Sistematika Buku Ajar (versi Andriani dalam Prof. Markhamah, Kopertis 6 Jateng/2015) adalah:**

- 1) Sebelum mulai Materi : judul, daftar isi, diagram topik, tujuan dan pre test.
- 2) Saat Pemberian Materi: pendahuluan, kaitan pelajaran, heading, pemberian tugas, sign posting
- 3) Setelah Pemberian Materi: Ringkasan, glosary, post test dan indeks.

Beberapa istilah yang perlu diperjelas dan terdapat dalam buku ajar antara lain:

- 1) Glossary = Glossary berisi definisi operasional yang digunakan dalam materi ajar dan sering diperlukan oleh pembaca.
- 2) Index = berisi kata kunci dan biasanya disusun secara alfabetis
- 3) Sign posting: Sign posting dapat dilakukan secara verbal dengan menggunakan kata-kata yang dapat dijadikan pegangan pembaca mengenai maksud kalimat.

4. Strategi Penyusunan Buku Ajar di Perguruan Tinggi

a. Pendahuluan

Menyusun buku ajar secara umum sama dengan penyusunan jenis buku lain. Menyusun buku ajar secara spesifik harus sesuai dengan ketentuan khusus yang menjadi ciri buku ajar, dan menyusun buku ajar secara spesifik lagi

harus disesuaikan dengan tipe atau jenis buku ajar yang akan dibuat jika dilakukan di perguruan tinggi.

Secara umum, buku ajar di perguruan tinggi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) buku ajar berbasis kajian teori dan 2) buku ajar berbasis hasil penelitian. Buku ajar berbasis kajian teori adalah buku ajar yang disusun berdasarkan teori yang disesuaikan dengan RPS mata kuliah tertentu. Sedangkan buku ajar berbasis hasil penelitian adalah buku ajar yang disusun berdasarkan hasil penelitian dosen dan sesuai dengan bahasan mata kuliah tertentu.

b. Tahapan Umum Penyusunan/Pengembangan Buku Ajar

Dalam melakukan penyusunan buku ajar ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh dosen. Langkah-langkah penyusunan buku ajar adalah:

- 1) Melakukan analisis
- 2) Perancangan
- 3) Pengembangan
- 4) Evaluasi
- 5) Revisi



Bagan 106. Langkah-langkah Penyusunan Buku Ajar

c. Strategi Khusus Penyusunan Buku Ajar

Yang dimaksud strategi khusus penyusunan buku ajar adalah tips-tips atau Langkah-langkah khusus penyusunan buku ajar sesuai jenis buku ajarnya yang berjumlah dua macam.

Pertama, Bagaimana Strategi Penyusunan Buku Ajar Berbasis Kajian Teori? Strategi Penyusunan Buku Ajar Berbasis Kajian Teori adalah sebagai berikut:

- 1) Luruskan niat
- 2) Siapkan RPS Mata Kuliah tertentu (yang akan disusun buku ajarnya)
- 3) Sediakan referensi yang kaya sesuai tuntutan RPS
- 4) Lakukan tahapan/prosedur teknis penyusunan buku ajar berbasis kajian teori

Berikut adalah prosedur penyusunan buku ajar berbasis kajian teori:

- 1) Cermati LO dan Bahan Kajian dalam RPS mata kuliah yang diampu
- 2) Siapkan referensi sesuai tuntutan RPS
- 3) Urutkan referensi sesuai urutan materi dalam RPS
- 4) Tentukan materi/bab sesuai urutan RPS
- 5) Tuliskan satu demi satu materi sesuai urutan dalam RPS maupun jumlah pertemuan (Draf Buku Ajar)
- 6) Ujikan/konsultasikan draf tulisan kepada konsultan/reviewer, teman sejawat, mahasiswa dan lapangan
- 7) Revisi
- 8) Final (naskah buku ajar)



Bagan 107. Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Kajian Teori

Pada Langkah 1 sampai dengan 3 sudah cukup jelas, demikian juga untuk langkah ke 6 sampai dengan 8 juga sudah cukup jelas, tetapi untuk Langkah ke 4 sampai 5 penyusun harus cermat, maka berikut akan diberikan contohnya. Contoh yang akan disajikan adalah contoh mata kuliah Metode

Penelitian Pendidikan yang disusun menggunakan prinsip buku ajar berbasis kajian teori, tetapi karena bidikan pangsa pasarnya luas (bukan hanya mahasiswa semester 4 program S1), maka judul buku menjadi “Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi” sekaligus juga untuk memotivasi mahasiswa yang belum memasuki semester pengerjaan proposal skripsi atau sebaliknya memotivasi mahasiswa yang tidak kelar-kelar penggarapan skripsinya. Penulis tetap menyarankan untuk judul buku ajar sesuai dengan nama mata kuliahnya.

Tabel 36. Contoh Langkah 4 “menentukan materi/bab sesuai urutan RPS Mata kuliah MPP

Pertemuan (minggu ke-)	LO (kemampuan akhir yg diharapkan)	Bahan Kajian (materi ajar)	Rencana Bab Buku Ajar
1-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi peta wilayah penelitian Prodi PAI serta memiliki sikap cerdas, teliti, tidak mudah putus asa, sabar, tekstualis, kontekstualitas dan rendah hati baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.1.	1. Kontrak Kuliah-intro 2. Peta wilayah penelitian Prodi PAI	BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2. PETA WILAYAH PENELITIAN PENDIDIKAN
3-4	- Mahasiswa mampu memilih masalah penelitian yang relevan di Prodi PAI serta mampu menunjukkan sikap cerdas, teliti, sabar, kerja keras, tekstualis, kontekstualitas, toleransi, partisipatif, jujur dan tanggungjawab pada diri sendiri dan orang lain. - Mahasiswa mampu merumuskan judul penelitian secara lengkap dan tepat serta mampu menunjukkan sikap cerdas, teliti, sabar, kerja keras, tekstualis, kontekstualitas, toleransi, partisipatif, jujur dan tanggungjawab pada diri sendiri dan orang lain.	3. Masalah penelitian 4. Penyusunan Judul penelitian	BAB 3. TEKNIK MENCARI MASALAH DAN JUDUL PENELITIAN
DST	DST	DST	DST

Setelah Langkah 4 ini dilakukan sampai selesainya jumlahpertemuan dalam RPS maka akan dihasilkan draf buku sesuai Langkah lima sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 37. Draf batang Tubuh Buku Ajar MPP

BAB	JUDUL BAB
I	PENDAHULUAN
II	PETA WILAYAH PENELITIAN PENDIDIKAN
III	TEKNIK Mencari Masalah dan Judul Penelitian
IV	Penyusunan Latar Belakang Masalah
V	Penyusunan Definisi Operasional
VI	Penyusunan Rumusan Masalah
VII	Penyusunan Tujuan dan Manfaat Penelitian
VIII	Penyusunan Telaah Pustaka
IX	Penyusunan Hipotesis Penelitian
X	Penyusunan Metode Penelitian
XI	Penyusunan Sistematika Penulisan Skripsi
XII	Penyusunan Daftar Pustaka
XIII	Penyusunan Kutipan, Catatan Perut dan Catatan Kaki
XIV	PENUTUP

Kedua. Strategi Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian. Sebagaimana buku ajar jenis pertama, maka pada jenis kedua ini juga memiliki strategi khusus. Strategi Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian adalah:

- 1) Luruskan niat
- 2) Siapkan hasil penelitian yang sudah dilakukan
- 3) Siapkan RPS Mata Kuliah tertentu (yang diampu, sebaiknya sesuai dengan bidang keahlian)
- 4) Lakukan tahapan/prosedur teknis penyusunan buku ajar berbasis hasil penelitian berikut!

Prosedur penyusunan buku ajar berbasis hasil penelitian meliputi Langkah- Langkah berikut:

- 1) Lakukan penelitian
- 2) Kembangkan hasil penelitian menjadi buku ajar
- 3) Reduksi hasil penelitian menjadi buku ajar.



Bagan 108. Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian

Ketiga Langkah penyusunan buku ajar berbasis hasil penelitian ini bisa diperjelas dalam Langkah-langkah yang lebih teknis lagi sebagai berikut:

- 1) Lakukan Penelitian Sesuai Materi Dalam RPS Makul Yg Diampu
- 2) Cermati semua LO dlm RPS yg akan disusun ke dalam materi ajar,
- 3) Tentukan LO yg materinya akan disusun berdasar konsep teoritis maupun hasil penelitian
- 4) Tentukan materi ajar yg ada dlm RPS sesuai kajian teoritis
- 5) Tentukan materi ajar yg ada dlm RPS sesuai hasil penelitian
- 6) Reduksi hasil penelitian menjadi Materi buku ajar,
- 7) Rubah Bahasa laporan penelitian menjadi Bahasa buku ajar
- 8) Gabungkan materi yang berasal dari kajian teori dan hasil penelitian sesuai urutan dlm RPS
- 9) Ketik Draf Buku Ajar
- 10) Evaluasi (:reviewer, mhs, lapangan)
- 11) Revisi
- 12) Naskah Buku Ajar (jadi)



Bagan 109. Prosedur Penyusunan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian

Tabel 38. Contoh langkah 4 dan 5: tentukan materi ajar dlm RPS sesuai kajian teori dan hasil penelitian (MK MSDM)

Bahan kajian (sesuai LO)	Nama Bab pada Buku sesuai Hasil Penelitian	Nama Bab pada Buku sesuai kajian teori
Pengantar: a). SDM organisasi Pendidikan, b) Posisi SDM Di Era Ekonomi Kreatif (konsep <i>resource dan capital</i>) dan c).Urgensi MSDM di era ekonomi Kreatif (minggu ii)	-	BAB II. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Konsep Dasar MSDM: pengertian, tujuan, manfaat dan fungsi operasional MSDM (guru (minggu III)	-	Sda
Dst		
Performance Appraisal: pengertian, tujuan, metode, penilai waktu, tempat, manfaat. Performance Appraisal: prinsip, faktor yang mempengaruhi keefektifan penilaian kinerja mekanisme penilaian kinerja dan Pengembangan Kinerja (minggu XI)	BAB V PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN DI PERGURUAN TINGGI	-
Dst	Dst	Dst

Tabel 39. Draf Buku Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian

BAB	JUDUL BAB	KETERANGAN
I	PENDAHULUAN	HASIL PENELITIAN
II	MANAJEMEN SUMDER DAYA MANUSIA	KAJIAN TEORI (YG ADA DALAM LAPORAN PENELITIAN DAN PENAMBAHAN TEORI SESUAI RPS)
III	PENILAIAN KINERJA	KAJIAN TEORI (YG ADA DLM LAP PENLITIAN)
IV	DOSEN	SDA
V	PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN DI PT	HASIL PENELITIAN
VI	ALTERNATIF MODEL PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN DI PT	HASIL PENELITIAN
VII	PENUTUP	HASIL PENELITIAN

Tabel 40. Contoh Langkah 6. Reduksi Hasil penelitian Menjadi Buku Ajar

Hasil Penilaian Kinerja	Pokok-pokok hasil penelitian	Kompilasi hasil penelitian pada materi ajar	Jumlah hal penelitian	Jumlah hal materi ajar
▪ Kebijakan Penilaian Kinerja (PK) ▪ Pelaksanaan PK (instrument, penilai, tujuan, metode, waktu, tempat) ▪ Hasil PK ▪ Pengembangan kinerja SDM	▪ Kebijakan PK di PT X123 ▪ Pelaksanaan PK di PT X123 (instrument, penilai, tujuan, metode, waktu, tempat) ▪ Hasil PK di PT X123 ▪ Pengembangan kinerja SDM di PT X123	▪ Kebijakan PK ▪ Pelaksanaan PK (instrument, penilai, tujuan, metode, waktu, tempat) ▪ Hasil PK ▪ Pengembangan kinerja SDM	Hal 312-360 (48 hal) Dst	Hal 177-179 (3 hal) Dst
Ket: Hasil penelitian 600 hal lebih menjadi 248 hal	-	-	-	-

Adapun pada Langkah ke 7, rubah bahasa laporna penelitian menjadi bahasa buku ajar, contohnya adalah

- 1) Pahami bahwa ada perbedaan Bahasa laporan penelitian dengan Bahasa buku ajar
- 2) Misal: kata “data” dalam laporan penelitian diganti menjadi “contoh”, termasuk jumlah data yang banyak dalam laporan penelitian perlu dikurangi pada materi buku ajar.

d. Strategi Penulisan Buku Ajar

Dalam melakukan penulisan draf naskah buku ajar dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) strategi penulisan materi pokok dan 2) stratgei penulisan non materi pokok.

Pertama. Strategi Penulisan Materi Pokok. Menurut **Prof. Ali Imron Ma'ruf, Strategi Penulisan Materi Pokok** meliputi:

- 1) kelengkapan;
- 2) kebaruan;
- 3) keakurasian;
- 4) penalaran & pembuktian;
- 5) pemecahan masalah;

- 6) komunikasi;
- 7) keterkaitan;
- 8) keterkaitan konsep dg gambar, tabel, dsb.; tdk tumpang tindih; soal kontekstual

Pendapat yang lain diajukan oleh Prof. Endang, menurut beliau strategi penulisan draf naskah buku ajar meliputi:

- 1) Pendahuluan
 - a) deskripsi singkat cakupan materi
 - b) relevansinya dgn pengetahuan mhs, kaitan dgn matakuliah lain
 - c) tujuan instruksional khusus (kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa setelah selesai mengikuti kuliah ini.
- 2) Presentasi materi kuliah
 - a) uraian rinci penjelasan setiap subpokok yg mencakup teori, contoh, grafik, table, dll utk membantu penjelasan dan memotivasi pemahaman mhs.
- 3) Rangkuman/ringkasan dari semua sub-pokok bahasan
- 4) Tugas atau pelatihan guna peningkatan kompetensi.

Kedua. Strategi Penulisan Non Materi. Masih menurut Prof. Ali Imron Ma'ruf, strategi penulisan non materi meliputi 2 aspek, yaitu:

- 1) Aspek Penyampaian (kemampuan prasyarat: penggunaan produk teknologi; kebermaknaan dan manfaat; proses pembentukan pengetahuan; dan penampilan visual).
- 2) Aspek Bahasa dan Keterbacaan (ketaatan Bahasa baku, komunikatif, efektif)

Sedangkan menurut Prof. Endang meliputi:

- 1) Aspek kebahasaan: - keterbacaan; - kejelasan informasi; - kesesuaian dengan kaidah Bahasa yang baik dan benar; bahasa secara efektif dan efisien.
- 2) Aspek penyajian: kejelasan tujuan (indicator) yang ingin dicapai; - urutan sajian; - pemberian motivasi, daya tarik; dan - interaksi (pemberian stimulus dan respons).

- 3) Aspek kegrafikan: - penggunaan font, jenis, dan ukuran; - lay out atau tata letak; - ilustrasi, gambar, foto, dan - desain tampilan.
- 4) Aspek penulisan: tulisan asli (dasarnya ide, pengalaman, penelitian, bhasa ilmiah dan sistematika baru), tulisan saduran (kemasan ulang thd pustaka, gaya bahasa sendiri, strategi perkuliahan), tulisan kompilasi (kemasan ulang thd materi, dan tanpa perubahan /modifikasi).

Dari sekian banyak strategi dan prosedur yang perlu dijalankan dosen penyusun buku ajar, masih ada tawaran Tips Menulis Buku Ajar, yaitu:

- 1) Pastikan tema buku ajar sesuai makul dan bidang ilmu penulis
- 2) Buatlah outline sebelum menulis panjang
- 3) Tulis per tema dalam outline
- 4) Catat dan masukkan segala sumber data
- 5) Luangkan waktu khusus
- 6) Finishing naskah

5. Penutup

Menghasilkan sebuah karya (buku ajar) memang dibutuhkan banyak pengetahuan dan persyaratan-persyaratan tertentu, Tetapi, pengetahuan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa DIMULAI dan DIUPAYAKAN. HAKIKAT PERMULAAN ADALAH AKHIR, MEMULAI MENULIS BUKU (AJAR) = ADA KARYA BUKU AJAR. SELAMAT MENULIS BUKU AJAR. Semoga bermanfaat.

Daftar Referensi

- Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Dirjend Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti. (2019). *Panduan Pangajuan Usulan Program Hibah Penulisan Buku Ajar Tahun 2019*.
- Markhamah (2015), *Strategi Penulisan Buku Ajar Berbasis Hasil Penelitian*, Disampaikan dalam *Workshop* Penulisan Buku Ajar bagi Dosen Kopertis VI Angkatan I, 21-23 September 2015 di Kopertis Wilayah VI Semarang.

- Markhamah (2015), *Strategi Penulisan Buku Ajar Berbasis Kajian Teoritik*, Disampaikan dalam *Workshop* Penulisan Buku Ajar bagi Dosen Kopertis VI Angkatan I, 21-23 September 2015 di Kopertis Wilayah VI
- Zulfa, Umi. (2013). *Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen. Strategi Akselerasi Kinerja Dosen dan Perguruan Tinggi*. Cilacap: Ihya Media
- Zulfa, Umi. (2014). *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media



BAB IX

PENUTUP

Sekian banyak persoalan manajemen pendidikan di Indonesia, baik makro (Nasional), Meso (wilayah/kabupaten) dan Mikro (institusi) semuanya membutuhkan penanganan yang serius. Persoalan yang ada dalam ranah pendidikan ini jika dimanaje dengan baik juga akan menjamin keefektifan penanganan tersebut. Sebaliknya, persoalan yang tidak dimanaje dengan baik cenderung akan mendatangkan persoalan baru. Kolase manajemen ini selain mendeskripsikan adanya persoalan dalam dunia pendidikan kita sekaligus di dalamnya menawarkan alternative kebijakan (problem solving). Semoga bermanfaat.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Umi Zulfa, M.Pd, lahir di Cilacap, 17 April 1974, dari orang tua tercinta; Achmadi Wahab dan Sri Rochini. Beliau memiliki putra-putri Nud'ah Rihadatul Azka dan Muhammad Syafi' Augusta dari suami Alvian Toefur. Penulis menempuh jalur Pendidikan formal dimulai dari MI Ya Bakii Karangjengkol (1987), SMP Negeri 1 Kesugihan (1990), SMA Negeri Kroya (1993), S1 PAI STAIN Purwokerto (1998), S2 Manajemen Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta (2003) dan S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2012). Beliau juga merupakan alumni Pesantren Al Hidayah Kroya dan Purwokerto.

Pengalaman sebagai tenaga pengajar/pendidik dimulai dari jenjang Pendidikan dasar pada tahun 1993 setamat SMA menjadi guru di MI Ya Bakii Karangjengkol, guru di SMP Ya Bakii 5 Karangjengkol (1998-2000), tahun 2000 mulai mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap dan sampai sekarang aktif mengajar di IAIIG-UNUGHA Cilacap, IAIN Purwokerto dan IAINU Kebumen baik program Sarjana maupun Pascasarjana.

Beberapa pengalaman keorganisasian baik formal maupun pengabdian antara lain di IAIIG Cilacap sebagai PD.1 Fak.Tarbiyah (2003-2014), Ka Prodi PAI Fak.Tarbiyah (2009-2014), Ketua LPM (2013-2014), PUREK/WAREK 1 IAIIG-UNUGHA Cilacap (2014 –2019 dan 2019 sd sekarang), Pengurus PSG IAIIG (2012). Wakil Ketua LP Ma'arif Cilacap (2014-Sekarang), Pembina ISPI Cab Cilacap (2014-sekarang), Pembina ISNU Cilacap (2014-2020), Wakil Ketua ISNU Cilacap (2020-sekarang), Pengurus KPI Cilacap, dan beberapa keorganisasian yang lain seperti Sekretaris Rayon 3 Paguyuban Pimpinan Bidang Akademik Kopertais/LLDikti VI (2015-Sekarang), asesor LBKD Diktis, LL Dikti, Trainer K-13 Diktis, auditor mutu, dan sebagainya. Pengalaman mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar, studi komparasi dan sejenisnya di *Seoul National University (SNU)*, *Korea National University of Education (KNUE)*, *Yonsey University*, *Midlle School Miho*. Disamping itu juga terlibat aktif dalam program

pelatihan, workshop, seminar dan bentuk pengembangan SDM lainnya, baik bidang Administrasi dan Manajemen, Pendidikan maupun Penelitian.

Beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan maupun hasil riset penulis antara lain *Strategi Pembelajaran, Metodologi Penelitian Sosial, Metode Penelitian Pendidikan, Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi, Supervisi Pendidikan, Modul Pembelajaran PAI di SMA/MA, Model Pembelajaran Unggulan, Kolase Manajemen Pendidikan, Enterprenuer University, Tokoh Wayang Purwa, Kemungkinan Penerapan School levy dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Analisis School Levy, Monster Kecoa, Cara Cepet Ngitung Kuadrat, Pemberdayaan Madrasah MINAT Kesugihan, Strategi Entrepreneur University menuju World Class University (Studi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, SICI: Alternatif Model Pembelajaran PAI Unggulan, Sekilas Mengenal Pembiayaan Pendidikan Di Amerika, Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University, Internalisasi Ikhlas: Meraoih Sukses Belajar di Perguruan Tinggi, Alternatif Model Penilaian dan Pengembangan Kinerja Dosen, Penilaian Untuk Pengembangan Kinerja Dosen, Strategi Pengembangan Madrasah efektif Melalui Pengembangan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-Schoollevy, Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia), Belajar Ke Negeri Ginseng, Menggagas Inspiring-World Class Univeristy, Model of Islamic Religion Education 435 Based on Islam Nusantara on College, Empowering Pesantren: A Study of Al-Ghazali's Thoughts on Islamic Education* dan sebagainya.